

BAB VII

ILMU SEJARAH

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Sejarah

Istilah “sejarah” berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata “syajaratun” (dibaca” syajarah), yang memiliki arti “pohon kayu”. Pengertian “pohon kayu” di sini adalah adanya suatu kejadian, perkembangan/pertumbuhan tentang sesuatu hal (peristiwa) dalam suatu kesinambungan (kontinuitas). Selain itu ada pula peneliti yang menganggap bahwa arti kata “syajarah” tidak sama dengan kata “sejarah”, sebab sejarah bukan hanya bermakna sebagai “pohon keluarga”, ”asal-usul” atau ”silsilah”. Walaupun demikian diakui bahwa ada hubungan antara kata “syajarah” dengan kata “sejarah”, seseorang yang mempelajari sejarah tertentu berkaitan dengan cerita, silsilah, riwayat dan asal-usul tentang seseorang atau kejadian (Sjamsuddin, 1996: 2). Dengan demikian pengertian “sejarah” yang dipahami sekarang ini dari alih bahasa Inggris yakni “*history*”, yang bersumber dari bahasa Yunani Kuno “*historia*” (dibaca “*istoria*”) yang berarti “belajar dengan cara bertanya-tanya”. Kata “*historia*” ini diartikan sebagai pertelaan mengenai gejala-gejala (terutama hal ikhwal manusia) dalam urutan kronologis (Sjamsuddin dan Ismaun, 1996: 4).

Setelah menelusuri arti “sejarah” yang dikaitkan dengan arti kata “syajarah” dan dihubungkan dengan pula dengan kata “*history*”, bersumber dari kata “*historia*” (bahasa Yunani kuno) dapat disimpulkan bahwa arti kata sejarah sendiri sekarang ini mempunyai makna *sebagai cerita, atau kejadian yang benar-benar telah terjadi pada masa lalu*. Sunnal dan Haas (1993: 278) menyebutnya; “*history is a chronological study that interprets and gives meaning to events and applies systematic methods to discover the truth*”. Carr (1982: 30). menyatakan, bahwa “*history is a continuous process of interaction between the historian and his facts, and unending dialogue between the present and the past*”. Kemudian disusul oleh Depdiknas memberikan pengertian sejarah sebagai mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dari masa lampau hingga kini (Depdiknas, 2003: 1). Namun yang jelas kata kuncinya bahwa sejarah merupakan suatu

penggambaran ataupun rekonstruksi peristiwa, kisah, maupun cerita, yang benar-benar telah terjadi pada masa lalu.

Para ahli sejarah pada umumnya sepakat untuk membagi peranan dan kedudukan sejarah yang terbagi atas tiga hal, yakni; (1) sejarah sebagai peristiwa; (2) sejarah sebagai cerita, dan; (3) sejarah sebagai ilmu (Ismaun, 1993: 277).

Pertama, sejarah sebagai peristiwa; adalah sesuatu yang terjadi pada masyarakat manusia di masa lampau. Pengertian pada ‘masyarakat manusia’ dan ‘masa lampau’ sesuatu yang penting dalam definisi sejarah. Sebab kejadian yang tidak memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat manusia, dalam pengertian di sini, bukanlah merupakan suatu peristiwa sejarah. Sebaliknya juga peristiwa yang terjadi pada umat manusia namun terjadi pada sekarang, bukan pula peristiwa sejarah. Karena itu konsep siapa yang menjadi subyek dan obyek sejarah serta konsep waktu, dua-duanya menjadi penting.

Pengertian sejarah sebagai *peristiwa*, sebenarnya memiliki makna yang sangat luas dan beraneka ragam. Keluasan dan keanekaragaman tersebut sama dengan luasnya dan kompleksitas kehidupan manusia. Beberapa aspek kehidupan kita seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, politik, kesehatan, agama, keamanan, dan sebagainya semuanya terjalin dalam peristiwa sejarah. Dengan demikian sangat wajar jika untuk memudahkan pemahaman kita tentang para ahli sejarah mengelompokkan lagi atas beberapa tema. Pembagian sejarah yang demikian itulah yang disebut pembagian sejarah secara tematis, seperti: sejarah sosial, sejarah politik, sejarah kebudayaan, sejarah perekonomian, sejarah agama, sejarah pendidikan, sejarah kesehatan, sejarah intelektual, dan sebagainya.

Selain pembagian sejarah berdasarkan tema (tematis), juga dikenal pembagian sejarah berdasarkan periode waktu. Dalam pembagian sejarah berdasarkan periodisasi tersebut kita dapat mengambil contoh untuk sejarah Indonesia: zaman prasejarah, zaman pengaruh Hindu-Budha, zaman pengaruh Islam, zaman kekuasaan Belanda, zaman pergerakan nasional, zaman pendudukan Jepang, zaman kemerdekaan, zaman Revolusi Fisik, Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Sebagai patokan dalam menentukan tiap periode/zaman tersebut harus terpenuhi unsur pembeda antar periode satu dengan lainnya.

Di samping itu berdasarkan unsur *ruang*, kita mengenal pembagian sejarah secara regional atau kewilayahan. Contohnya; sejarah Eropa, sejarah Asia, sejarah Timur Tengah, sejarah Amerika Latin, sejarah Timur-Jauh, sejarah Asia Tenggara, sejarah Afrika Utara, dan sebagainya. Dalam hal ini sejarah regional juga bisa menyangkut sejarah dunia, tetapi ruang-lingkupnya lebih terbatas oleh persamaan karakteristik baik fisik maupun sosial-budayanya.

Sejarah *sebagai peristiwa* sering juga disebut sejarah sebagai kenyataan dan sejarah serba obyektif (Ismaun, 1993: 279). Artinya peristiwa-peristiwa tersebut benar-benar terjadi yang didukung oleh evidensi-evidensi yang menguatkan baik berupa saksi mata (*witness*) yang dijadikan sumber-sumber sejarah (*historical sources*), peninggalan-peninggalan (*relics* atau *remains*) dan catatan-catatan atau *records* (Lucey, 1984: 27). Selain itu dapat pula peristiwa itu diketahui dari sumber-sumber-sumber yang bersifat lisan yang disampaikan dari mulut ke mulut. Menurut Sjamsuddin (1996: 78), ada dua macam untuk sumber lisan tersebut. *Pertama*, sejarah lisan (*oral history*), ingatan lisan (*oral reminiscence*) yaitu ingatan tangan pertama yang dituturkan secara lisan oleh orang-orang yang diwawancarai oleh sejarawan. *Kedua*, tradisi lisan (*oral tradition*) yaitu narasi dan deskripsi dari orang-orang dan peristiwa-peristiwa pada masa lalu yang disampaikan dari mulut ke mulut selama beberapa generasi. Apapun bentuknya, peristiwa sejarah, baru diketahui apabila ada sumber yang sampai kepada sejarawan dan digunakan untuk menyusun peristiwa berdasarkan sumber. Oleh karena suatu cerita sejarah sangat tergantung selain oleh kemahiran sejarawan itu sendiri juga kelengkapan sumber yang tersedia.

Di sinilah kemahiran/kecakapan seorang sejarawan diuji kemampuannya. Menurut Wood Gray, (1956: 9), untuk menyusun suatu cerita dan eksplanasi sejarah setidaknya ada enam langkah penelitian:

- a. Memilih satu topik yang sesuai;
- b. Mengusut semua evidensi (bukti) yang relevan dengan topik;
- c. Membuat catatan tentang itu, apa saja yang dianggap penting dan relevan dengan topik yang ditemukan ketika penelitian sedang berlangsung (misalnya dengan menggunakan *system cards*);
- d. Mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan (kritik sumber);

- e. Menyusun hasil-hasil penelitian (catatan fakta-fakta) ke dalam suatu pola yang benar dan berarti yaitu sistematika tertentu yang telah disiapkan sebelumnya;
- f. Menyajikan dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian dan mengkomunikasikannya kepada para pembaca sehingga dapat dimengerti se jelas mungkin.

Kedua, sejarah sebagai *ilmu*; dalam pengertiannya kita mengenal definisi sejarah yang bermacam-macam, baik yang menyangkut persoalan kedudukan sejarah sebagai bagian dari ilmu sosial, atau sejarah sebagai bagian dari ilmu humaniora, maupun yang berkembang di sekitar arti makna dan hakikat yang terkandung dalam sejarah. Berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi sejarah yang akan dikemukakan oleh para sejarawan.

Bury (Teggart, 1960: 56.) secara tegas menyatakan “*History is science; no less, and no more*”. Sejarah itu adalah ilmu, tidak kurang dan tidak lebih. Pernyataan ini mungkin tidak bermaksud untuk memberikan penjelasan batasan tentang sesuatu konsep, melainkan hanya memberikan tingkat pengkategorian sesuatu ilmu atau bukan. Penjelasan tersebut jelas tidak memadai untuk memperoleh sesuatu pengertian. Definisi yang cukup simple dan mudah dipahami diperoleh dari Carr (1982: 30). yang menyatakan, bahwa “*history is a continuous process of interaction between the historian and his facts, and unending dialogue between the present and the past*” .

Pendapat Carr tersebut sejalan dengan pandangan Colingwood (1973: 9) yang menegaskan bahwa: “*Every historian would agree, I think that history is a kind of research or inquiry*”. Colingwood berpendapat bahwa sejarah itu merupakan riset atau suatu inkuiri. Colingwood selanjutnya menegaskan bahwa sasaran penyusunan sejarah adalah untuk membentuk pemikiran agar kita dapat mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dan mencoba menemukan jawaban-jawabannya. Oleh karena itu menurut Colingwood, “*all history is the history of thought*”, semua sejarah itu adalah sejarah pemikiran.

Daniel dan Banks (Sjamsuddin, 1996: 6). mengemukakan pengertian sejarah dari segi materi sejarah yang disajikan dalam obyek penelitian. Daniel berpendapat bahwa “sejarah adalah kenangan pengalaman umat manusia”. Sedangkan Banks berpandangan bahwa semua kejadian di masa lalu adalah sejarah, sejarah sebagai aktualitas. Banks

selanjutnya mengatakan bahwa sejarah dapat membantu para siswa untuk memahami perilaku manusia pada masa yang lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sartono Kartodirdjo, sejarawan Universitas Gajah Mada menyatakan bahwa sejarah dapat dilihat dari arti subyektif dan obyektif. Sejarah dalam arti subyektif adalah suatu konstruk, yaitu suatu bangunan yang disusun oleh subyek/sejarawan/penulis sebagai suatu uraian atau cerita (Kartodirdjo, 1992: 14-15). Oleh karena itu sejarah dalam arti subyektif, tidak lepas dari pengaruh subyek/penulis. Uraian atau cerita tersebut merupakan satu kesatuan atau unit yang mencakup fakta-fakta yang dirangkaikan untuk menggambarkan suatu gejala sejarah, baik proses maupun struktur. Kesatuan itu menunjukkan koherensi, artinya pelbagai unsur bertalian satu sama lain dan merupakan satu kesatuan. Fungsi unsur-unsur itu saling menopang dan saling tergantung satu sama lain. Sejarah dalam arti obyektif menunjuk kepada kejadian atau peristiwa itu sendiri, ialah proses sejarah dalam aktualitasnya. Keseluruhan proses itu berlangsung terlepas satu dari subyek manapun. Obyektif di sini dalam arti tidak memuat unsur-unsur subyek (pembuat cerita).

Kartodirdjo selanjutnya menegaskan bahwa sejarah dapat didefinisikan sebagai bentuk penggambaran pengalaman kolektif di masa lampau (Kartodirdjo, 1992: 59). Pengalaman kehidupan kolektif inilah yang merupakan landasan untuk menentukan identitasnya. Seperti dalam kehidupan masyarakat tradisional, identitas seseorang dikembalikan ke asal-usulnya maupun keluarga besarnya. Itulah sebabnya dalam historiografi masyarakat tradisional dilacak secara dini asal-usulnya bahkan sampai ke mitologisnya. Keberadaan mitos dalam suatu sejarah itu penting, mengingat dalam pemikiran sejarah diwarnai oleh pandangan hidupnya, di mana manusia selalu merasa sebagai pusat alam semesta kosmos (Kartodirdjo, 1992: 59-60).

Gottchalk (1986: 8) mengemukakan pendapat yang sedikit agak berbeda. Ia mengatakan bahwa:

Sesungguhnya sejarawan yang menulis tidak menarik, dalam hal itu merupakan sejarawan yang buruk. Secara profesional ia wajib melukiskan peristiwa-peristiwa yang paling menggairahkan daripada masa lampau dunia dan menghidupkan kembali suasananya, di samping melukiskan peristiwa-peristiwa bisa.

Gottschalk berkesimpulan bahwa sejarah itu lebih berlandaskan sastra, dalam arti keberadaan sejarah itu lebih condong ke “seni” atau “*art*”, walaupun di bagian lain ia mengakui bahwa sejarah juga sebagai “ilmu”. Gottschalk yang lebih condong ke seni juga tidak sendirian. Beberapa sejarawan “*humaniora*” lainnya juga bertengger seperti nama-nama Arthur Schlesinger, Jr., maupun Steel Commager. Di tengah perdebatan ini, akhirnya muncul pendapat moderat. Charles A. Beard, seorang sejarawan Amerika Serikat yang menulis artikel *Written History as an Act of Faith* menyatakan bahwa ;

... kedua hal itu saling mengisi. Pastilah bahwa sejarah memiliki metode ilmiah. Berjuta-juta fakta sejarah dapat dipastikan secara meyakinkan baik bagi awam maupun bagi para ahli, sama halnya dengan fakta ... Kebenaran daripada suatu peristiwa itu dibuktikan oleh satu seri dokumen yang telah diuji sedemikian seksama akan otentisitasnya dan kredibilitasnya, sehingga hal itu dianggap oleh sejarawan sebagai fakta, atau lebih tepat satu rangkaian fakta...(Gottschalk, 1986: 4).

Pernyataan di atas sejalan dengan pendapat Pollard (Ismaun, 1993: 282) yang menyatakan bahwa *History...is both a science and art, because it requires scientific analysis of materials and an artistic synthesis of the result*. Sejarah dikategorikan sebagai ilmu karena dalam sejarah juga memiliki “batang tubuh keilmuan” (*the body of knowledge*), metodologi yang spesifik. Sejarah juga memiliki struktur keilmuan tersendiri, baik dalam; fakta, konsep, maupun generalisasinya (Banks, 1977: 211-219; Sjamsuddin, 1996: 7-19). Kedudukan sejarah di dalam ilmu pengetahuan, digolongkan ke dalam:

a. Ilmu sosial, karena menjelaskan perilaku sosial. Oleh karena itu pendidikan sejarah khususnya di lingkungan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), pendidikan sejarah termasuk pendidikan ilmu sosial, bukan pendidikan bahasa dan sastra, karena fokus kajiannya menyangkut proses-proses sosial (pengaruh timbalik antara kehidupan aspek-sosial yang berkaitan satu sama lainnya) beserta perubahan-perubahan sosial. Itu sebabnya dalam pembelajaran sejarah kajian-kajiannya selalu dituntut pendekatan-pendekatan inter/multidisipliner, karena tidak cukup dengan kajian sejarah naratif dapat menjelaskan aspek-aspek sosial yang melingkupinya dapat dieksplanasikan. Ditinjau dari usianya, sejarah bahkan termasuk ilmu sosial tertua yang

embrionya telah ada dalam bentuk-bentuk mitos dan tradisi-tradisi dari manusia-manusia yang hidup paling sederhana (Gee, 1950: 36, Sjamsuddin, 1996: 190).

b. “*Seni*” atau “*art*”. Sejarah digolongkan dalam “sastera”. Herodotus (484-425 SM) yang digelar sebagai “bapak sejarah” beliau-lah yang telah memulai sejarah itu sebagai “cerita” (*story-telling*), dan sejak itu sejarah telah dimasukkan ke dalam ilmu-ilmu kemanusiaan atau “humaniora” (Sjamsuddin, 1996: 189-190). Sejarah dikategorikan sebagai ilmu humaniora terutama karena dalam sejarah memelihara dan merekam warisan budaya serta menafsirkan makna perkembangan umat manusia. Itulah sebabnya dalam tahap historiografi dan eksplanasinya, sejarah memerlukan sentuhan-sentuhan “estetika” atau “keindahan” (Ismaun, 1993: 282-283).

Ketiga, sejarah sebagai cerita; bahwa sejarah itu pada hakikatnya merupakan hasil rekonstruksi sejarawan terhadap sejarah sebagai peristiwa berdasarkan fakta-fakta sejarah yang dimilikinya. Dengan demikian di dalamnya terdapat pula penafsiran sejarawan terhadap makna suatu peristiwa. Perlu diketahui bahwa buku-buku sejarah yang kita baca, baik buku pelajaran di sekolah, karya ilmiah di perguruan tinggi, maupun buku-buku sejarah lainnya, pada hakekatnya merupakan bentuk-bentuk konkrit sejarah sebagai peristiwa (Ismaun, 1993: 280).

Dengan demikian pula bahwa dalam sejarah sebagai cerita, merupakan sesuatu karya yang dipengaruhi oleh subyektivitas sejarawan. Sebagai contoh, tentang biografi Diponegoro. Jika ditulis oleh sejarawan Belanda yang pro-pemerintah kolonial, maka Diponegoro dalam pikiran dan pendapat sejarawan tersebut dipandang sebagai “pemberontak” bahkan mungkin “penghianat”. Sebaliknya jika biografi itu ditulis oleh seorang sejarawan yang pro-perjuangan bangsa Indonesia, sudah dapat diduga bahwa Diponegoro adalah “pahlawan” bangsa Indonesia. Di sinilah letak sejarah sebagai cerita lebih bersifat subyektif. Artinya memuat unsur-unsur dari subyek, si penulis/sejarawan sebagai subyek turut serta mempengaruhi atau memberi “warna”, atau “rasa” sesuai dengan “kacamata” atau selera subyek (Kartodirdjo, 1992: 62). Oleh karena itu tidak aneh jika sejarah sebagai *cerita* sering disebut “sejarah serba subyektif”. Sejarah akhirnya dapat disimpulkan merupakan hasil rekonstruksi intelektual dan imajinatif sejarawan tentang apa yang telah dipikirkan, dirasakan, atau telah diperbuat oleh manusia, baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan atas rekaman-rekaman lisan, tertulis atau

peninggalan sebagai pertanda kehadirannya di suatu tempat tertentu. Sejarah, bagi sejarawan, merupakan wacana intelektual (*intellectual discourse*) yang tidak berkesudahan.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, dilihat dari ruang lingkungannya terutama pembagian sejarah secara tematik, sejarah yang memiliki cakupan yang sangat luas. Sjamsuddin (1996: 203-221) dan Burke (2000: 444) mengelompokkannya dalam belasan jenis sejarah, yaitu: (1) *sejarah sosial*; (2) *sejarah ekonomi*; (3) *sejarah kebudayaan*; (4) *sejarah demografi*; (5) *sejarah politik*; (6) *sejarah kebudayaan rakyat*; (7) *sejarah intelektual*; (8) *sejarah keluarga*; (9) *sejarah etnis*; (10) *sejarah psikologi dan psikologi histori*; (11) *sejarah pendidikan*, dan (12) *sejarah medis*.

Pertama, Sejarah Sosial: Menurut definisi yang cukup banyak dirujuk, pengertian sejarah sosial dibuat oleh Trevelyan dalam bukunya *English Social History, A Survey of Six Centuries* (1942), ia mengemukakan bahwa "sejarah sosial adalah sejarah tanpa nuansa politik". Akan tetapi definisi ini-pun sering dikutip dengan tidak benar, sebab yang ditulis oleh Tevelyan sesungguhnya adalah : "sejarah sosial bisa didefinisikan secara negatif sebagai sejarah dari sekelompok masyarakat tanpa mengikutsertakan politiknya". Ia sendiri mengakui bahwa definisi itu masih belum memadai, namun karena saat itu dikalangan sejarawan sedang menguat kajian-kajian politik tanpa menampilkan sosok masyarakat yang utuh, akibatnya muncul dorongan kuat untuk melakukan perimbangan. Mengingat tanpa sejarah sosial, maka keberadaan sejarah ekonomi akan gersang dan dangkal. Untuk lebih jelasnya dia sendiri menjelaskan:

Sejarah sosial tidak hanya menyediakan mata rantai yang dibutuhkan antara sejarah ekonomi dan politik. Ruang lingkungannya bisa mencakup kehidupan sehari-hari penghuni sebuah kawasan di masa lampau: ini meliputi manusia dan juga hubungan ekonomi dari berbagai kelas yang berbeda, ciri-ciri dari kehidupan keluarga rumah tangga, kondisi ketenagakerjaan dan aktivitas waktu luang, sikap manusia terhadap alam, budaya dari masing-masing zaman yang muncul dari kondisi-kondisi umum ini serta mengambil bentuk dalam agama, literatur, arsitektur, pembelajaran, dan pemikiran (dalam Thame, 2000: 983).

Memang terdapat berbagai macam tentang pengertian sejarah sosial. Bagi sejarawan Amerika Robert J. Bezucha (1972: x), mengartikan bahwa sejarah sosial itu sejarah budaya yang mengkaji kehidupan sehari-hari anggota-anggota masyarakat dari

lapisan yang berbeda-beda dari periode yang berbeda-beda; merupakan sejarah dari masalah-masalah sosial; sejarah ekonomi "lama". Kemudian sejarawan Inggris Hobsbawm (1972: 2) menyebutnya sejarah sosial mengkaji: sejarah dari orang-orang miskin atau kelas bawah; gerakan-gerakan sosial; berbagai kegiatan manusia seperti tingkah laku, adat istiadat, kehidupan sehari-hari; sejarah sosial dalam hubungannya dengan sejarah ekonomi. Sedangkan dari sejarawan Prancis seperti Lucien Febre dan Marc Bloch yang merupakan tokoh penting dalam jurnal *Annales d'histoire, economique et sociale* (1929) yang sangat berpengaruh, mengemukakan bahwa sejarah sosial berhubungan dengan sejarah ekonomi.

Terorong oleh oleh jurnal *Annales* tersebut, sejarah sosial mendapat legitimasi dan kemashuran yang lebih besar dalam kehidupan akademis Prancis, jika dibanding dengan tempat-tempat lainnya (Prost, 1992). Di Inggris sejarah sosial tidak sepesat di Prancis, namun beberapa sejarawan seperti G.D.H Cole (1948), kemudian Asa Briggs (1991), dan Peter Burke (1991; 1993) masih tetap berlanjut aktif dan produktif menulis sejarah sosial, sejalan dengan hubungan eratnya antara sejarah ekonomi dan sosial meski mulai terpisah pada tahun 1960-an (Thame, 2000: 984). Sedangkan di Indonesia, sejarah sosial mulai berkembang tahun 1960-an ketika Sartono Kartodirdjo mempertahankan disertasinya yang berjudul *Pemberontakan Petani Banten tahun 1888* (1966) (Sjamsuddin, 1996: 204).

Kedua, Sejarah Ekonomi; Sebenarnya sejarah ekonomi ini lebih merupakan kombinasi dua disiplin ilmu yang telah berevolusi cukup lama. Di universitas-universitas Eropa Barat sejarah ekonomi dipandang sebagai disiplin tersendiri. Sedangkan di universitas-universitas Amerika Serikat, sejarah ekonomi dimasukkan ke dalam departemen sejarah atau ekonomi. Kemudian, sejak tahun 1960-an terjadi perubahan yang dimulai dari Amerika Serikat, di mana aspek kuantifikasinya model ini makin meningkat. Kini di Amerika Serikat bidang tersebut didominasi oleh ilmuwan yang mendapat pendidikan dasar sebagai ekonom (Engerman, 2000: 269).

Status sejarah ekonomi sebagai bidang studi tersendiri dikukuhkan dengan dibentuknya *Economic History Society* pada tahun 1926, dan jurnalnya *Economic History Review* yang mulai terbit tahun 1927. Faktor penting lainnya adalah dibentuknya *National Bureau of Economic Research* pada tahun 1920. Di antara pendirinya adalah

Gay, ahli sejarah bisnis dan Ekonomi dari Harvard, dan ia dikenal sebagai direktur terlama. Tokoh lainnya adalah Mithel yang mahasiswa terkenalnya adalah Kuznets, yang berjasa mengumpulkan berbagai data tentang siklus bisnis dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian di Amerika Serikat dibentuk *Economic History Association* tahun 1941, yang sampai Perang Dunia II karya-karyanya masih berorientasi sejarah semata-mata (Engerman, 2000: 270)

Pada tahun 1950-an dan 1960-an, terjadi perubahan penting. Karya sejarawan ekonomi saat itu, seperti; Davis, Fogel, Gallman, North dan Parker lebih bercirikan sebagai karya ekonom; sehingga memunculkan istilah baru, yakni *Cliometri* atau *Ekonometri* yang sering juga disebut *Quantohistory*. Sebetulnya istilah "Cliometri" diambil dari "Clio" yang artinya dalam mitologi Yunani dikenal sebagai Dewi Sejarah. Sedangkan "metri" berarti meter, ukuran, atau hitungan. Jadi *Cliometri* adalah sejarah yang menggunakan hitungan-hitungan (kuantifikasi) statistik dan sebagainya (Sjamsuddin, 1996: 210). Karya *Cliometri* yang paling kontroversial adalah karya Fogel bersama North yang memenangkan hadiah Nobel ekonomi di tahun 1993 yang dibantu oleh Engerman, mengenai aspek ekonomi perbudakan Amerika yang berjudul *Time on the Cross* (1974). Kesimpulan yang dikemukakan dalam buku tersebut khususnya yang berkenaan dengan profitabilitas, kelayakan dan efisiensi perbudakan, menimbulkan perdebatan sengit di kalangan para ahli *Cliometri* dan sejarawan pada umumnya (Engerman, 2000: 124).

Lalu, bagaimana dengan keadaan di Indonseia ? Inilah keprihatinan kita. Begawan ekonomi Indonesia-pun (Sumitrodjohadikusumo) beberapa tahun yang lalu telah melontarkan kekhawatirannya yang mendalam jika sejarah ekonomi terus diabaikan terutama di fakultas-fakultas ekonomi yang sampai saat itu menurutnya sangat mencemaskan. Mungkin hanya sedikit dan satu hal yang bisa kita banggakan di tahun 1977 di mana The Kian Wie telah menulis *Plantation Agriculture and Export and Export Growth: An Economic History East Sumatra 1863-1942* (Abdullah dan Surjomihardjo, 1985: 55) .

Kepeloporan sejarah ekonomi ini sekarang berada di Amerika Serikat, dan negara-negara lain lebih banyak sekedar mengikutinya. Namun, sebagai konsekuensi dari persinggungan dua disiplin, sejarah ekonomi tidak pernah luput diramalkan oleh

perdebatan pendekatan dan metodenya. Sampai tahun 1960-an, perdebatan terpusat pada kegunaan teori abstrak yang dikomparasikan dengan rinci khas uraian sejarah. Timbul reaksi dari Mazhab Austria (Marginalis) yang dipimpin Menger dan aliran Ricardo yang ekstim menggunakan metode-metode ilmu ekonomi. Sementara itu pendekatan yang lebih tradisional masih juga mendapatkan tempat, namun Menger dan Schmoller mempertanyakan kegunaan dan arti penting pendekatan induksi dan deduksi sebagai dasar penelitian ilmiah, merupakan cerminan serunya perdebatan para ekonom dan sejarawan. Ironisnya di Amerika Serikat sendiri sekarang ini para ahli sejarah ekonomi mempertanyakan terlalu abstraknya teori ekonomi matematis yang dikhawatirkan akan memutuskan atau mengaburkan kaitan antara teori teori dengan dunia nyata. Mereka menghimbau lebih ditekankannya aspek-aspek empiris-historis, yang sudah terbukti berhasil pada cabang-cabang lain dari ilmu ekonomi (Engerman, 2000: 271).

Ketiga, Sejarah Kebudayaan: Agak susah untuk menjelaskan karakteristik sejarah kebudayaan mengingat arti kebudayaan itu sendiri sangat luas. Kartodirdjo (1992: 195), mengemukakan semua perwujudan baik yang berupa struktur maupun proses dari kegiatan manusia dalam dimensi ideasional, etis, dan estetis, adalah kebudayaan. Hal ini sejalan dengan Sjamsuddin (1996: 213) yang mengemukakan, semua bentuk manifestasi keberadaan manusia berupa bukti atau saksi seperti *artifact* (fakta benda), *mentifact* (fakta mental-kejiwaan) dan *socifact* (fakta atau hubungan sosial), termasuk dalam kebudayaan. Jadi memang sejarah kebudayaan itu sangat luas. Tentu saja hal ini berbeda dengan apa yang banyak diajarkan di tingkat persekolahan ruang lingkup sejarah kebudayaan itu lebih berkisar pada arkeologi. Di dalamnya termasuk peninggalan-peninggalan zaman Hindu-Budha, Islam, penjajahan Belanda seta Jepang, yang berkaitan dengan kepercayaan, seni bangunan, seni sastra, seni pahat, dan lain-lain. Namun dalam pengertian sejarah kebudayaan gaya baru tidak sesempit itu. Aspek-aspek seperti; gaya hidup, etika, dan etiket pergaulan, kehidupan keluarga sehari-hari, pendidikan, pelbagai adat istiadat, upacara adat, siklus kehidupan, dan lain sebagainya (Kartodirdjo, 1992: 195)..

Banyak tokoh dan karya-karyanya yang menunjukkan para sejarawan begitu tinggi perhatiannya pada sejarah kebudayaan. Di antaranya adalah sejarawan Prancis Voltaire yang dalam karyanya berjudul *Essay on Manners and Customs*. Jacob

Burchardt (1818-1897), sejarawan seni-budaya dari Swiss, menulis *Die Kultur der Renaissance in Italien* (1860) yang telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris *The Civilization of the Renaissance in Italy*. Buku ini ditulis setelah Burchardt berkunjung ke Itali dan pemikirannya banyak terpengaruh oleh pemikiran tentang Renaissance, di mana pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Hegel dan Schopenhauer (Shadily, 1986: 555). Kemudian sejarawan kebudayaan Belanda, Johan Huizinga (1872-1945), ia menulis buku yang terkenal yang terjemahan Inggris-nya *The Waning of the Middle Ages* (1919), *Erasmus* (1924), *Homo Ludens* (1938). Dalam buku *Homo Ludens* tersebut, Huizinga menyebutkan manusia adalah makhluk yang suka bermain, dan untuk mekanisme permainannya itu manusia memiliki seperangkat aturan-aturan, kode, atau simbol-yang dipahami dan disepakatinya. Sedangkan untuk sejarawan budaya Inggris yang ternama Arnold Toynbee (1889-1975) yang menulis *A Study of History* terdiri atas 12 jilid yang memuat tentang 21 pusat peradaban di dunia (misalnya peradaban, Mesir kuno, India, Sumeria, Babilonia, dan peradaban Barat atau Kristen. Enam peradaban muncul serentak dari masyarakat primitif: Mesir, India, Sumeria, Maya, Cina, Minoan (di Pulau Kreta), sementara yang lain terpisah-pisah, dan semua peradaban tersebut berasal dari enam peradaban asli sebelumnya. Kemunculannya pusat-peradaban tersebut erat kaitannya antara tantangan dan tanggapan yang dilakukan oleh kelompok minoritas yang kreatif (Al-Sharqawi, 1986: 167).

Keempat, Sejarah Demografi: Sejarah demografi sudah ada sejak dahulu, yakni ketika John Graunt mempublikasikan *Natural and Political Observations Made Upon the Bills Mortality* (1662). Penulisan sejarah geografi tersebut didasarkan atas data kependudukan Inggris pada abad ke-16. Sebenarnya sejarah pelaksanaan sensus kependudukan di dunia ini telah diadakan beberapa ribu tahun yang lalu seusia dengan kerajaan Mesir kuno, Persia, Ibrani, Jepang kuno dan Yunani kuno (Taeuber, 2000: 99). Akan tetapi karena penduduk yang dicacah juga terbatas (misalnya laki-laki dewasa yang dapat dipilih untuk menjadi tentara), sehingga hasil sensusnya-pun terbatas yang biasanya dijadikan rahasia kerajaan. Selanjutnya menurut Taeuber di Eropa yang berskala mikro khususnya kota-kota tua telah dilaporkan sejak abad ke-15. Bahkan di India-pun pernah mengadakan sensus tahun 1678 (2000: 99). Mungkin sensus yang berkesinambungan tertua adalah di Amerika Serikat, yang biasanya dilakukan setiap sepuluh tahun sekali,

terutama sejak tahun 1790 (Taeuber, 2000: 99). Perkembangan sekarang ini karena teknologi komputer dan kemajuan prosedur perumusan sampel juga menimbulkan perubahan-perubahan penting terhadap praktik sensus. Kemajuan ini juga membuka peluang bagi dikembangkannya berbagai jenis prosedur teknis statistik hingga dari data yang sama, dapat menghasilkan informasi-informasi yang jauh lebih lengkap dan bervariasi.

Dewasa ini banyak para ahli demografi dan para ahli geografi dengan mempertimbangkan pengalaman di Barat yang telah mengembangkan suatu teori tentang transisi demografik (*demografik transition*) yang diharapkan dapat meramalakan dampak industrialisasi atas penduduk di negaranya masing-masing maupun seluruh dunia. Transisi demografis ini juga dikenal sebagai bentuk lingkaran atau siklus demografis (*demographic cycle*) yang menggambarkan proses perubahan tingkat kematian dan kelahiran pada suatu masyarakat dari suatu situasi di mana angka keduanya relatif tinggi jika dibandingkan dengan situasi-situasi sebelumnya yang kedua-duanya rendah (Caldwel, 2000: 217).

Dalam ekonomi masyarakat yang sudah maju, angka kematian dan kelahiran cenderung menurun. Contohnya Prancis menurun pada abad ke-18, begitu pula Inggris dan beberapa negara Eropa Selatan serta Eropa Tengah pada abad ke-19. Implikasi teori ini bahwa perbaikan kesehatan umum tanpa industrialisasi akan menghasilkan pertumbuhan penduduk yang luar biasa, di mana industrialisasi kurang lebih secara otomatis akan menstabilkan jumlah penduduk (Sjamsuddin, 1996: 211).

Kelima, Sejarah Politik: Dalam sejarah "sejarah konvensional", sejarah politik memiliki kedudukan yang dominan dalam historiografi Barat. Akibatnya timbul tradisi yang kokoh bahwa sejarah konvensional adalah sejarah politik (Kartodirdjo, 1992: 46). Karakteristik utama dalam sejarah konvensional adalah bersifat deskriptif-naratif, terutama sejarah makro yang mencakup proses pengalaman kolektif di tingkat nasional maupun unit politik besar lainnya. Dalam hal ini proses politik diungkapkan melalui satu dimensi politik belaka. Penggambaran unidimensional yang demikian dipaparkan secara datar dan tidak ada relief-relief yang menggambarkan kompleksitas pengalaman manusia yang holistik. Itulah kekeringan dan kedangkalan sejarah politik "gaya lama" yang pernah berjaya berabad-abad lamanya. Sebagai karakteristik lainnya dalam sejarah politik

”gaya lama” tersebut biasanya mengutamakan diplomasi dan peran serta peranan tokoh-tokoh besar dan pahlawan-pahlawan yang berpengaruh besar.

Hal ini berbeda dengan penulisan ”sejarah politik gaya baru” yang sifatnya multidimensional, di mana sejarah politik dibuat lebih menarik, mengingat dalam eksplanasinya lebih luas dan mendalam dan tidak terjebak dalam determinisme historis. (Kartodirdjo, 1992: 49). Cakrawala analisisnya lebih luas dan mendalam karena yang dibahas seperti soal struktur kekuasaan, kepemimpinan, para elit, otoritas, budaya politik, proses mobilisasi, jaringan-jaringan politik dalam hubungannya dengan sistem dan proses-proses sosial, ekonomi dan sebagainya. Dengan demikian kait-mengait aspek-aspek kehidupan (seperti aspek ekonomi dan politik maupun dengan aspek-aspek budaya) serta saling ketergantungannya akan menunjukkan kompleksitas yang tidak dapat dikembalikan kepada hubungan antara dua aspek secara isomorfik yang parsial. Di situlah keunggulan ”sejarah politik gaya baru”

Keenam, Sejarah Kebudayaan Rakyat: Sebetulnya agak susah untuk membedakan ”sejarah kebudayaan” dengan ”sejarah kebudayaan rakyat” atau *the history of popular culture*. Kesulitan ini secara teoretik tidak membedakan secara eksplisit antara ”kebudayaan atas” atau ”elit” maupun ”tinggi” dengan ”kebudayaan rakyat”. Namun secara realitas-empirik pembedaan ini nampak bukan dalam struktur melainkan praksisnya. Yang dimaksud ”rakyat” atau populer di sini menurut sejarawan Richards (1988: 126) maupun Smith (1988: 123) adalah kebudayaan kelompok-kelompok dan kelas-kelas yang terpuruk, dikuasai, dan diperintah (subordinasi). Kebudayaan rakyat/massa tersebut diekspresikan dalam selera-selera, kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan-kepercayaan, sikap dan tingkah laku, serta hiburan-hiburannya. Jika pada ”kebudayaan tinggi” mempunyai sastra, drama, musik tersendiri, maka dalam ”kebudayaan rendah/massa” memiliki pertunjukan dalam bentuk ritual, lagu-lagu rakyat, festival rakyat, dan cara berbicara atau berbuat tertentu. Begitu juga jika kebudayaan elite itu eksklusif, maka dalam kebudayaan rakyat itu terbuka. Hal ini mirip dengan istilah yang diberikan oleh Gayatri Spivak (Lela Gandhi, 2001: 2) dalam teori ”poskolonial” yang menyebutnya sebagai kelompok *subaltern* — adalah kelompok-kelompok yang disubordinasikan oleh dampak pemerintah kolonial dalam hubungan hibriditas-kreolisasi yang merupakan subyek tertekan, atau secara lebih umum, mereka berada pada ”level

inferior". Hanya bedanya dengan "sejarah kebudayaan rakyat" pada level ini tidak membahas dalam tataran "sejarah makro" maupun tingkat nasional.

Dikhotomi antara "kebudayaan tinggi/elit" dengan "kebudayaan rakyat" ataupun "rendah" di Indonesia belum banyak dikenal. Dengan demikian pembahasan mengenai "sejarah kebudayaan rakyat" belum ada. Mungkin ini ada hubungannya dengan pandangan hidup kita yang "normatif-integratif" sehingga khawatir jika disebut mempertajam perbedaan status sosial masyarakat. Atau mungkin karena "fobi" terhadap isu-isu yang bersifat sosialis, kendati secara realitas Indonesia kaya dengan "kebudayaan rakyat" yang masih eksis seperti; upacara-upacara ritual sedekah laut (untuk masyarakat nelayan) atau sedekah bumi (untuk masyarakat pedalaman), pertunjukan seni nini towok, sintren ataupun lais, bahkan sampai seni lenong maupun "dangdut" yang demikian merakyat dan mulai merayap ke lapisan atas (Sjamsuddin, 1996: 215). Atau juga mungkin karena sejarawan-sejarawan kita yang menemui sejumlah kesulitan, sebab penulisan ini menuntut kelengkapan-kelengkapan metodologis dan teoretis termasuk kemahiran analisis seni satera dan budaya secara interdisipliner.

Ketujuh, Sejarah Intelektual: Sejarah Intelektual, secara filosofis hubungannya lebih erat dengan aliran fenomenologi. Dalam arti luas fenomenologi mengkaji tentang fenomena-fenomena atau apa saja yang tampak. Dalam hal ini fenomenologi merupakan sebuah pendekatan yang berpusat pada analisis terhadap gejala yang membanjiri kesadaran manusia (Bagus, 2000: 234). Jadi singkatnya aliran ini berasumsi bahwa kesadaran adalah realitas primer. Realitas tersebut adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia yakni kebudayaannya. Dalam hal ini berbeda dengan sejarah mentalitas, yang mengkaji "kepercayaan dan sifat-sifat rakyat" (Himmelfarb, 1987: 4).

Dalam suatu fakta sejarah, ragamnya bisa berupa *artifact* (benda), *socifact* (hubungan sosial), dan *mentifact* (kejiwaan). Terutama yang terakhir tersebut langsung menyangkut semua fakta seperti yang terjadi dalam jiwa, pikiran, atau kesadaran manusia. Oleh karena itu semua fakta yang nampak sebenarnya bersumber pada ekspresi dari apa yang terjadi dalam mental orang, antara lain; pikiran, ide, kepercayaan, angan-angan, dan segala macam unsur kesadaran (Kartodirdjo, 1992: 177). Dipandang dengan perspektif itu sangatlah esensial untuk mengkaji *mentifact* dalam segala bentuknya, terutama perkembangannya yang kesemuanya itu menjadi obyek studi sejarah mentalitas,

intelektual, dan ide-ide. Dan, perlu dicatat di sini bahwa tidak semua bentuk kesadaran meninggalkan bekasnya, baik dokumen maupun monumen. Karena itu tidak terhitung banyaknya *mentifact* yang musnah terbawa ke liang lahat yang tidak tercatat atau tidak berbekas. Di sinilah sang sejarawan dituntut keahliannya untuk dapat merekam kesadaran tersebut yang menyangkut alam pikiran manusia masa lalu menjadi pusat perhatian sejarah intelektual. Alam pikiran itu sendiri mempunyai struktur-struktur yang bertahan lama dan dapat direkam. Contoh konkretnya bahwa sejarawan dituntut untuk dapat merekam ideologi-ideologi politik liberalisme, sosialisme, konservatisme, gagasan-gagasan tokoh Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, Hegel dan sebagainya. Demikian juga revolusi intelektual baik itu yang menyangkut ilmu-ilmu kealaman (seperti Newton, Galileo Galilei, Charles Darwin) maupun ilmu-ilmu sosial (seperti Adam Smith, Sigmund Freud, Karl Mark, dan sebagainya).

Kedelapan, Sejarah Keluarga: Sejarah Keluarga (Family History) sebagai suatu bidang riset mulai muncul pada tahun 1950-an, sebagai bagian tumbuhnya minat terhadap sejarah ekonomi dan sosial (Wall, 2000: 340-341). Di mana para ahli sejarah mencari informasi mengenai keluarga dari berbagai sumber, mulai dokumen-dokumen legal, catatan kasus-kasus pengadilan, sejarah nama-nama keluarga, lukisan lama, naskah perjanjian, juga berbagai penggalian arkeologis di lokasi-lokasi milik pribadi maupun publik guna mengungkap cikal-bakal kehidupan keluarganya (Gotein, 1978; Rawson, 1986; Gardner, 1986).

Pada umumnya orang yang berminat menelaah dalam sejarah keluarga adalah mereka yang ingin mencari pemahaman mengenai cikal bakal keluarganya sendiri. Umumnya para sejarawan keluarga tidak merasa puas hanya mengumpulkan nama dan tanggal-tanggal peristiwanya. Namun mereka juga ingin mempelajari sejarah nenek moyangnya dalam berbagai aspek kehidupan, seperti; masa anak-anak dan remaja, pergaulan dengan teman, tetangga, pekerjaan, pernikahan, kebiasaan-kebiasaan, sampai akhir hayatnya. Di Inggris, kepustakaan mengenai studi ini cukup banyak dan sangat berharga (*Federation of Family History Societies*, 1993; Hey, 1993). Selain itu federasi peminat Sejarah Keluarga juga menerbitkan *Newsletter* setiap enam bulan sekali dengan judul *Family History News Digest*, yang merinci berbagai kegiatan dan publikasi mereka.

Di tahun 1994 saja sudah tercatat lebih dari 80 perkumpulan penggemar Sejarah Keluarga yang aktif.

Kontribusi yang sangat berharga dari sejarawan keluarga, contohnya yang ditulis Anderson dalam bukunya *Approaches to the History of the Western Family 1500-1914* (1980), ia mengidentifikasi empat pendekatan pokok yang digunakan untuk mengkaji asal-usul keluarga, yaitu pendekatan; (1) *psikohistori*, (2) *demografi*, (3) *sentimen keluarga*, (4) *ekonomi rumah tangga*. Dalam kajian pendekatan *pertama*, menyajikan perspektif yang jernih tentang motivasi, kesadaran dan kealpaan generasi lampau, namun banyak kesimpulan yang sulit diterima. Dalam pendekatan *kedua*, lebih mementingkan data-data perjuangan hidup masa lampau. Fokus mereka tertuju pada bentuk struktur rumah tangga, usia pernikahan pertama, pola pengasuhan anak dan pola kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan pendekatan *ketiga*, mengemukakan tentang perasaan-perasaan kedekatan hubungan keluarga yang bersifat akrab, hangat, dan egaliter atau mungkin juga terbalik keadaannya. Sedangkan pendekatan *keempat*, lebih menekankan penelaahan lingkungan mikro-ekonomi, pekerjaan, sampai hal-hal hubungan aspek ekonomi dengan non-ekonomi, seperti bagaimana hubungan antara perkawinan muda yang tidak ada hubungannya dengan pola pewarisan harta keluarga, dan sebagainya. Tentu saja tidak hanya satu model dalam pengkajian *Sejarah Keluarga*. Sejarawan Burgiere dkk. yang merupakan sejarawan keluarga dari Prancis dalam bukunya yang berjudul *Histoire de la famille* (1986) menegaskan bahwa pendekatan dalam penyusunan *Sejarah Keluarga* aspek-aspek sentimen keluarga dan psikohistori dapat diabaikan..

Kesembilan, *Sejarah Etnis*: Pada umumnya sejarah etnis (*ethnohistory*) ditulis untuk merekonstruksi sejarah dari kelompok-kelompok etnis sejak sebelum datangnya bangsa Eropa sampai dengan interaksi mereka dengan orang-orang Eropa. Sejarah etnis tersebut mulai digunakan secara umum oleh pakar antropologi, arkeologi, dan sejarawan, sejak tahun 1940-an. (Sjamsuddin, 1996: 215). Contoh sejarah etnis adalah; *Sejarah Etnis Aztec, Maya, Aborigin*, maupun *Maori*. Sumber-sumber yang mereka gunakan, selain dari bahan-bahan etnografis yang ditulis tentang kelompok etnis-etnis tersebut, juga dari tradisi-tradisi lisan (*oral traditions*) yang masih bertahan di antara kelompok etnis tersebut. Di sinilah para ahli sejarawan etnis harus melakukan penelitian lapangan seperti

yang dilakukan antropolog maupun arkeolog. Begitu juga untuk teknik-teknik sejarah lisan (*oral history*), harus mereka kuasai betul.

Untuk penulisan sejarah lisan (*oral history*), seorang sejarawan harus pandai menginterpretasikan keterangan-keterangan dari kesaksian-kesaksian lisan mengenai masa lampau. Hal ini berbeda dengan "tradisi lisan" (*oral tradition*) yang banyak dikembangkan oleh Jan Vansina dalam buku *De la tradition orale: essai de method historique* (1961) atau dalam bahas Inggris-nya *Oral Tradition* (1973), di mana sejarah lisan lebih terkait dengan pengalaman-pengalaman pada masa lampau mutakhir daripada dengan transmisi ingatan-ingatan antar generasi (Henige, 1982). Di antara teori yang umum dalam metode sejarah lisan, adalah metode *riwayat hidup* yang dikembangkan oleh *Mazhab Chicago* dalam kaitannya dengan pengalaman para imigran, budaya, kejahatan dan penyimpangan pemuda (Plumer, 1983). Dalam hal ini dapat digunakan *analisis silang* dengan kesaksian lisan yang biasanya menggunakan sampel yang lebih besar dengan wawancara yang terstruktur.

Adapun ruang lingkup sejarah etnis ini mencakup kajian-kajian yang meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi, kebudayaan, kepercayaan-kepercayaan masyarakat, interaksi-interaksi dalam lingkungan masyarakat/ kelompok, kekerabatan, perubahan-perubahan sosial-budaya, migrasi, dan sebagainya. Untuk menyusun sejarah etnis yang baik, diperlukan suatu pembahasan yang bersifat interdisipliner guna mengungkap secara mendalam dari berbagai aspek kehidupan.

Kesepuluh, Sejarah Psikologi dan Psikologi Histori: Mungkin benar tulisan Peter Burke dalam *History and Social Theory* yang menyebutkan bahwa sampai sekarang ini peranan psikologi masih agak marjinal dalam historiografi, dan lagi-lagi alasannya banyak yang menyandarkan pada relasi psikologi dan sejarah (Burke, 2001: 170). Namun dalam perkembangan kaitannya relasi psikologi dengan sejarah tersebut terdapat *dua kejutan* yang terjadi.

Kejutan pertama, tahun 1930-an, beberapa sejarawan terutama dua sejarawan Prancis Marc Bloch dan Lucien Febre yang menyebarluaskan dan mencoba mempraktikkan apa yang mereka sebut dengan 'psikologi sejarah' (*historical psychology*) yang berlandaskan psikologi tapi bukan pada *Psikoanalisis Freud*, melainkan psikologiwan Prancis, seperti Charles Blondel, Henri Wallon, dan Lucien

Levy-Bruhl, di mana ide-idenya tentang 'mentalitas primitif'. Sebenarnya sejarah mentalitas ini pada dasarnya pendekatan aliran Durkheim (*Durkheimian*) terhadap ide-ide, kendati Durkheim sendiri lebih suka menggunakan istilah 'refrensi kolektif'. Sejarah mentalitas ini dikembangkan oleh pengikut Durkheim, Lucien Levy-Bruhl dalam studinya *La mentalite primitive* (1927) dan studi lainnya. Para sosiolog dan antropolog kontemporer kadang-kadang menyebutnya dengan modus pemikiran (*modes of thought*), sistem keyakinan (*belive systems*) maupun peta kognitif atau *cognitive maps*. Apapun namanya pendekatan ini menggunakan tiga bentuk pendekatan, yakni; (1) menekankan sikap kolektif/kelompok daripada individu, (2) fokusnya kepada asumsi-asumsi tersirat daripada teori-teori eksplisit terutama pada akal sehat, (3) orientasinya pada struktur sistem keyakinan dan perhatian terhadap kategori-kategori dalam menafsirkan pengalaman (Burke, 2001: 137).

Kejutan kedua, terjadi di Amerika Serikat pada dasawarsa 1950-an, beredar istilah baru yang menyebutnya suatu pendekatan baru yang mengasyikan, yakni 'psikosejarah' (*psychohistory*). Pengkajian terhadap Luther Muda yang dilakukan oleh Erik Erikson dengan psikoanalisis menimbulkan perdebatan. Sementara itu tiba-tiba Ketua Asosiasi Sejarawan Amerika, Langer yang merupakan negarawan yang disegani juga membuat kejutan dengan mengatakan 'tugas yang menunggu' para sejarawan adalah mengadopsi psikologi sejarah lebih serius dibanding dengan masa-masa sebelumnya (Erikson, 1958; Langer, 1958, Burke, 2000; 2001). Sejak saat tersebut diterbitkanlah jurnal-jurnal psiko-sejarah, dan para pemimpin besar seperti Trotsky, Gandhi, serta Hitler dikaji dari sudut pandang psikosejarah (Wolfenstein, 1967; Erikson, 1970; White, 1977). Ternyata 'kemesraan' antara sejarah dan psikologi tersebut tidak terjadi seperti yang diharapkan Langer dan sejarawan psikosejarah lainnya. Alasannya karena waktu itu bersamaan dengan munculnya pendekatan-pendekatan baru terhadap masa silam, khususnya yang diringkas dalam empat slogan dan empat bahasa: (1) *subaltern history* atau *grass-root history* (maksudnya sejarah dari bawah); (2) *microstoria* (sejarah mikro), (3) *alltagsgeschichte* (sejarah keseharian), (4) *historie del'immaginaire* atau sejarah mentalitas-intelektual (Burke 2000: 442).

Kesebelas, Sejarah Pendidikan: Di negara-negara Barat (Amerika dan Eropa) perhatian sejarah pendidikan telah begitu nampak sejak abad ke-19, dan pentingnya

sejarah pendidikan tersebut digunakan untuk berbagai macam tujuan, terutama sekali untuk membangkitkan kesadaran bangsa dan kesatuan budayaan, pengembangan profesi guru, atau kebanggaan terhadap lembaga-lembaga dan tipe pendidikan tertentu (Siver, dalam Sjamsuddin, 1996: 219).

Dalam pembahasannya, sejarah pendidikan itu memiliki substansi yang luas, baik yang menyangkut tradisi dan pemikiran-pemikiran berharga dari para pemimpin besar pendidikan, sistem pendidikan, pendidikan dalam hubungannya dengan sejumlah elemen-elemen penting dan problematis khususnya dalam perubahan sosial yang menyangkut aliran-aliran; perenialisme, esensialisme, rekonstruksionisme, konstruktivisme, dan progresifisme. Pendekatan pembelajarannya bisa menyangkut tentang psikologi belajar behaviorisme, gestalt, humanisme, kognitifisme, bahkan sampai psikologi belajar kecerdasan majemuk Gardner.

Perlu diketahui, bahwa esensi pendidikan itu sendiri sebenarnya sangat luas mengingat ia berperan sebagai transmisi kebudayaan (ilmu pengetahuan, teknologi, ide-ide, dan nilai-nilai spiritual dan estetika), dari generasi ke generasi. Oleh karena itu usia sejarah pendidikan pada hakikatnya sama tuanya dengan sejarah pada umumnya. Dan, dalam pendekatan sejarah pendidikan-pun sama halnya dengan pendekatan historiografi sejarah secara umum, yakni lebih menekankan pendekatan *diakronik* (Sjamsuddin, 1996: 220). Pendekatan *diakronik* yang lazim digunakan dalam sejarah dapat diibaratkan penampang batang kayu yang vertikal, yang menunjukkan perkembangan dari titik awal bergerak dari fase ke fase berikutnya, dengan perkataan lain mengungkapkan genesis suatu fenomenon. Sedangkan dalam pendekatan *sinkronik* yang lazim digunakan dalam ilmu-ilmu sosial lainnya, dapat diibaratkan penampang lintang atau horisontal. Artinya dalam pendekatan ini memandang fenomena sebagai suatu unit atau sistem. Fungsi dan strukturnya diterangkan bagaimana bekerjanya bagian-bagian unit itu saling berkaitan dalam fungsinya secara bersama-sama mendukung fungsi unit itu (Kartodirdjo, 1992: 211).

Keduabelas, Sejarah Medis: Penulisan *sejarah medis* dilatarbelakangi oleh kebutuhan para dokter yang menyadari pentingnya pemahaman tradisi-tradisi pengobatan yang berbeda-beda pada masa lalu. Hippocrates (11ahir tahun 460 sM) telah menulis "Sumpah Kediokteran" yang tertulis dalam *Ancient Medicine*, yang sampai sekarang

sumpah tersebut menjadi pijakan para dokter. Sejak abad ke-18 survey sejarah kedokteran mulai ditekuni oleh para dokter seperti John Friend, Daniel Leclerc, dan Kurt Sprengel (Bynum, 2000: 445). Selanjutnya para dokter yang ingin menjadi anggota *Royal College of Physicians of London* masih diharuskan membaca literatur antik sampai pertengahan abad ke-19 di samping kesadaran masa kini sebagai kelanjutan masa lalu terus berkembang.

Pada akhir abad ke-19 di Jerman, *sejarah kedokteran* berkembang pesat berkat dorongan para dokter dan filolog. Hal ini terbukti dengan didirikannya *Institutes for History of Medicine* di berbagai universitas; yang terpenting adalah Leipzig, di mana Karl Sudhoff menjadi pemimpinnya tahun 1905-1925. Henry Sigerist, Owsei Temkin, dan Erwin Ackernecht, semuanya bekerja di Leipzig sebelum bermigrasi ke Amerika Serikat pada akhir tahun 1920-an (Bynum: 2000: 445). Bahkan Sigerist berjasa membentuk sosok tersendiri dari studi sejarah kedokteran tersebut, yang sebelumnya hanya dianggap salah satu cabang sejarah. Dia menduduki Direktur *Institute of the History of Medicines* pada *John Hopkins University* sejak tahun 1932. Kemudian pada tahun 1950-an, sejarah kedokteran sudah diajarkan di berbagai fakultas kedokteran Amerika Serikat, Jerman, Spanyol dan beberapa negara lainnya. Prinsip dasarnya yang menyebabkan perlu diajarkannya bidang tersebut adalah: "Whighism" — istilah Herbert Butterfield yang artinya; "Memungkinkan terungkapnya berbagai kesalahan, dan menempatkan ilmu pengetahuan di atas keyakinan takhayul" (Bynum, 2000: 445).

Terjadi suatu perkembangan baru pada tahun 1960-an, di mana bidang ini tidak hanya ditekuni para dokter, tetapi diminati oleh ilmuwan bidang-bidang lainnya, seperti; sejarawan, ekonom, demografer sejarah, sosiolog, dan antropolog yang juga diajarkan pada fakultas-fakultas lain selain kedokteran. Substansi yang diajarkannya juga tidak hanya mempelajari orang-orang besar dalam dunia kedokteran, melainkan sejarah kesehatan masyarakat serta aneka aspek yang mempengaruhinya, jadi lebih terbuka. Bahkan beberapa saat kemudian topiknya semakin beragam, terutama sejak Foucault memberikan sumbangan sejarah psikiatri yang ditulis dalam *Mental Illness and Psychology* (1962) dan *The Birth of the Clinic: An Archeology of Medical Perception* (1963), serta *History of Sociality, Volume I: An Introduction* (1976). Sejarah Psikiatri merupakan salah satu tema menarik yang banyak dibahas. Dalam hal ini para ilmuwan

mengulas kelaikan definisi gangguan mental, yang ternyata bervariasi yang ada kalanya berbeda antara tinjauan medis dan sosial. Di samping itu juga topik tentang kedokteran tropis, peranan kesehatan kaum wanita, dan sebagainya merupakan topik baru yang banyak diminati dalam penulisan *sejarah medis* (Bynum, 2000: 445).

B. Metode dan Ilmu Bantu Sejarah

Dalam metodologi riset, kita sering mendengar metode historis — dengan langkah-langkah; *Define the problems or questions to be investigated; search for sources of historical facts; summarize and evaluate the historical sources; and present the pertinent facts within an interpretative framework* (Edson, 1986: 20) (Menggambarkan permasalahan itu atau mempertanyakan untuk diselidiki; mencari sumber tentang fakta historis; meringkas dan mengevaluasi sumber-sumber historis; dan menyajikan fakta-fakta yang bersangkutan dalam suatu kerangka interpretatif). Sepintas nampaknya begitu mudah untuk mengadakan penelitian historis tersebut, namun dalam praktiknya tidak semudah yang kita bayangkan. Secara sederhana Ismaun (1988: 125-131) mengemukakan bahwa dalam metode *sejarah meliputi; (1) heuristik (pengumpulan sumber-sumber); (2) kritik* atau analisis sumber (eksternal dan internal); *(3) interpretasi; (4) historiografi* (penulisan sejarah). Di sini jelas bahwa untuk melakukan penelitian dan penulisan sejarah dituntut keterampilan-keterampilan khusus tertentu.

Namun seorang sejarawan ideal, apakah itu sejarawan profesional maupun sebagai sejarawan pendidik (guru sejarah) perlu mempunyai latar-belakang beberapa kemampuan yang dipersyaratkan. Sjamsuddin (1996: 68-69) merinci ada tujuh kriteria yang dipersyaratkan sebagai sejarawan:

- a. Kemampuan praktis dalam mengartikulasi dan mengekspresikan secara menarik pengetahuannya, baik secara tertulis maupun lisan.
- b. Kecakapan membaca dan/atau berbicara dalam satu atau dua bahasa asing atau daerah.
- c. Menguasai satu atau lebih disiplin kedua, terutama ilmu-ilmu sosial lain seperti antropologi, sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, atau ilmu-ilmu kemanusiaan (*humaniora*) seperti filsafat, seni atau sastra, bahkan kalau mungkin relevan juga yang berhubungan dengan ilmu-ilmu alam.
- d. Kelengkapan dalam penggunaan pemahaman (*insight*) psikologi, kemampuan imajinasi dan empati.

- e. Kemampuan membedakan antara profesi sejarah dan sekedar hobi antikuarian yaitu pengumpulan benda-benda antik.
- f. Pendidikan yang luas (*broad culture*) selama hidup sejak dari masa kecil.
- g. Dedikasi pada profesi dan integritas pribadi baik sebagai sejarawan peneliti maupun sebagai sejarawan pendidik.

Selanjutnya dikemukakan juga oleh Gray, (1956; 9) bahwa setidaknya seorang sejarawan minimalnya ada enam tahap dalam penelitian sejarah:

1. Memilih suatu topik yang sesuai.
2. Mengusut semua evidensi atau bukti yang relevan dengan topik.
3. Membuat catatan-catatan penting dan relevan dengan topik yang ditemukan ketika penelitian diadakan.
4. Mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan atau melakukan kritik sumber secara eksternal dan internal.
5. Mengusut hasil-hasil penelitian dengan mengumpulkan catatan fakta-fakta secara sistematis.
6. Menyajikannya dalam suatu cara yang menarik serta mengkomunikasikannya kepada para pembaca dengan menarik pula.

Sedangkan sebagai ilmu bantu dalam penelitian sejarah terdiri atas; (1) *paleontologi*, ilmu tentang bentuk-bentuk kehidupan purba yang pernah ada di muka bumi, terutama fosil-osil; (2) *arkeologi*, merupakan kajian ilmiah baik mengenai hasil kebudayaan prasejarah maupun periode sejarah yang ditemukan melalui ekskavasi-eksavasi di situs-situs arkeolog; (3) *paleoantropologi*, yaitu ilmu tentang manusia-manusia purba atau antropologi ragawi; (4) *paleografi*, yaitu kajian tentang tulisan-tulisan kuno, termasuk ilmu membaca, penentuan waktu/tanggal/tahun; (5) *epigrafi*, yaitu pengetahuan tentang cara membaca, menentukan waktu, serta menganalisis tulisan kuno pada benda-benda yang dapat bertahan lama (batu, logam, dsb); (6) *ikonografi*, yaitu arca-arca atau patung-patung kuno sejak zaman prasejarah maupun sejarah; (7) *numismatik*, yaitu tentang ilmu mata uang, asal-usul, teknik pembuatan, mitologi; (8) *ilmu keramik*, kajian tentang barang-barang untuk tembikar dan porselin. (9) *genealogi*, adalah pengetahuan tentang asal-usul nenek moyang atau asal mula keluarga seseorang maupun beberapa orang; (10) *filologi*, adalah ilmu tentang naskah-naskah kuno; (11)

bahasa, adalah penguasaan tentang beberapa bahasa asing maupun daerah yang diperlukan dalam penelitian sejarah; (12) *statistik*, adalah sebagai presentasi analisis, dan interpretasi angka-angka terutama dalam *quantohistory* atau *cliometry*; (13) *etnografi*, merupakan kajian bagian antropologi tentang deskripsi dan analisis kebudayaan suatu masyarakat tertentu.

C. Tujuan dan Kegunaan Ilmu Sejarah

Mengenai fungsi dan kegunaan sejarah sejak zaman klasik para penulis sudah banyak memberikan penegasan bahwa sejarah selalu memiliki *use value* bagi kehidupan manusia. Polybius (198-117 sM) mengatakan bahwa sejarah adalah *philosophy teaching by example*. Ia juga mengemukakan bahwa semua orang mempunyai dua cara untuk menjadi baik. *Satu*, berasal dari pengalaman dirinya sendiri, dan yang *lainnya* lagi berasal dari pengalaman orang lain. Cicero (106-43 sM) yang dikenal sejarawan sebagai subyek praktis; mengemukakan bahwa sejarah berfungsi sejarah didaktik (*didactic history*), ia membuat beberapa adagium bahwa sejarah adalah *cahaya kebenaran, saksi waktu, guru kehidupan*; atau *historia magistra vitae* (sejarah adalah guru kehidupan); maupun *prima esse historiae legem ne quid falsi dicere audeat, ne quid veri non audeat* (hukum pertama dalam sejarah ialah takut mengatakan kebohongan, hukum berikutnya tidak takut mengatakan kebenaran). Kemudian Tacitus (55-120 sM), yang dijuluki sebagai sejawaran moralis mengemukakan bahwa fungsi tertinggi sejarah adalah untuk menjamin bahwa perbuatan-perbuatan jahat (*evil*) harus diperlihatkan untuk dikutuk oleh generasi kemudian (Conkin & Stomberg, 1971: 15). Selain itu baginya sejarah sebagai suatu pengajaran bagi masa sekarang dan suatu peringatan bagi masa yang akan datang (Sjamsuddin, 1999: 13).

Secara rinci dan sistematis, Notosusanto (1979: 4-10) mengidentifikasi terdapat empat jenis kegunaan sejarah, yakni: *Pertama*, fungsi edukatif; artinya bahwa sejarah membawa dan mengajarkan kebijaksanaan ataupun kerarifan-kearifan. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam ungkapan John Seeley yang mempertautkan masa lampau dengan sekarang dalam pemeonya *We study history, so that we may be wise before the event*. Oleh karena itu penting pula ungkapan-ungkapan seperti; *belajarlah dari sejarah*, atau *sejarah mengajarkan kepada kita*.

Kedua, fungsi inspiratif. Artinya dengan mempelajari sejarah dapat memberikan inspirasi atau ilham. Sebagai contoh melalui belajar sejarah perjuangan bangsa, kita dapat terilhami untuk meniru dan bila perlu ”menciptakan“ peristiwa serupa yang lebih besar lagi dan paling tidak dengan belajar sejarah dapat memperkuat *l'esprit de corps* atau ”spirit dan moral“. Meminjam filosof spiritual Prancis Henry Bergson sebagai *elan vital* sebagai energi hidup atau daya pendorong hidup yang memungkinkan segala pergerakan dalam kehidupan dan tindak-tanduk manusia.

Ketiga, fungsi instruktif; yaitu bahwa dengan belajar sejarah dapat menjadi berperan dalam proses pembelajaran pada salah satu kejuruan atau keterampilan tertentu seperti navigasi, jurnalistik, senjata/militer dan sebagainya. *Keempat*, fungsi rekreasi, artinya dengan belajar sejarah itu dapat memberikan rasa kesenangan maupun keindahan. Seorang pembelajar sejarah dapat terpesona oleh kisah sejarah yang mengagumkan atau menarik perhatian pembaca apakah itu berupa roman maupun cerita-cerita peristiwa lainnya Selain itu juga sejarah dapat memberikan rasa kesenangan lainnya seperti ”pesona perlawatan“ yang dipaparkan dan digambarkan kepada kita melalui pelbagai evidensi dan imaji. Sebab dengan mempelajari pelbagai peristiwa menarik di berbagai tempat, negara-bangsa, kita ibarat berwisata ke pelbagai negara di dunia

Pengetahuan yang diajarkan di sekolah menurut Dasuki (2003: 359) terdiri atas sejarah yang serba tafsir (*interpreted history* atau *history as interpretation*) dalam wujud cerita sejarah. Oleh cerita sejarah pula kita dihubungkan dengan generasi-generasi masa lampau. Kemudian melalui cerita sejarah, kita mengadakan renungan dan penghayatan kembali peristiwa-peristiwa masa lampau (*rethinking and reliving of past events*), memikirkan dan menghayati kembali tingkah-laku manusia pada masa lampau. Kegiatan manusia secara keseluruhan dan kebudayaannya merupakan subyek dalam sejarah. Di sinilah kebudayaan sebagai subyek sejarah, pada gilirannya dapat menyediakan jangkauan yang sangat luas untuk mendidik generasi muda. Ini merupakan peranan penting pengajaran sejarah dalam pendidikan humaniora tersebut (Dasuki, 2003: 359).

Melalui memori, kita dapat diperkenalkan secara langsung dengan masa lampau. Pengetahuan langsung melalui memori ini ialah sumber semua pengetahuan kita tentang masa lampau (Russel, 1955: 49). Oleh memori ini pula maka ada pengetahuan tentang

sejarah. Dalam sejarah tersebut terhimpun dan diawetkan memori kolektif mengenai pengalaman insani. Mengingat fungsinya yang demikian penting, sejarah merupakan *konservator* atau pengawet memori kolektif umat manusia. Dengan demikian sejarah berfungsi sangat penting dalam pembinaan identitas kolektif bangsa dan dapat dijadikan wahana pertama untuk mensosialisasikan ke generasi muda. Sejarah dengan demikian dapat dijadikan cermin untuk mengetahui diri sendiri: Siapa saya maupun kita ini? Harus bagaimana jika saya maupun kita agar tidak dicatat terkutuk dalam sejarah?

Ini-lah yang oleh bangsa Yunani terdapat ungkapan *gnothi seuton* (kenalilah dirimu sendiri). Begitu juga pada bangsa Romawi terdapat ungkapan yang sama artinya, *cognose te ipsum* (kenalilah dirimu sendiri). Bahkan menurut Collingwood seorang filosof Inggris penganut teori idealisme, bahwa belajar sejarah itu juga untuk *self-knowledge* atau "tahu diri" (1956: 10). Pada bagian lain dengan meminjam kata-kata Namier (1957: 375), bahwa *puncak pencapaian studi sejarah adalah kesadaran sejarah* — suatu pemahaman intuitif mengenai bagaimana sejumlah hal tidak terjadi (bagaimana sejumlah hal terjadi merupakan masalah pengetahuan khusus).

Beberapa tulisan Soedjatmoko (1976: 9-15; 1985: 48; 1995: 358-369) ia mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya sebagai bangsa Indonesia untuk memiliki *kesadaran sejarah*. Kesadaran sejarah ia artikan sebagai suatu refleksi kontinu tentang kompleksitas perubahan-perubahan (kontinuitas dan kemungkinan diskontinuitas) yang ditimbulkan oleh interaksi dialektis masyarakat yang ingin melepaskan diri dari genggamannya realitas yang ada. Dengan kesadaran sejarah, manusia berusaha menghargai kerumitan upaya pengungkapan terhadap kejadian-kejadian yang melingkupinya, menghargai keunikan masing-masing keadaan, dan bahkan dalam kecenderungan yang dikaji. Kesadaran sejarah membantu manusia untuk waspada terhadap pemikiran yang terlalu sederhana, analogi yang terlalu dangkal, serta penerimaan-penerimaan pola hukum yang terlalu mudah mengarahkannya jalannya sejarah ataupun berada dalam cengkraman determinisme sejarah. Kesadaran sejarah juga berarti mengelakkan kecenderungan-kecenderungan menghadapi fenomena-fenomena yang buta (Soedjatmoko, 1976: 14). Atau *utopianisme politik* yang *instant utopianism* sebagai akibat frustrasi-frustrasi yang tajam, maupun radikalisme yang mengandung permasalahan fundamental mengenai sifat hakikat manusia, seperti yang dilukiskan dalam *Novel George Orwell 1984* tentang visi

imajinatifnya mengenai "telos" atau *tujuan masyarakat* (Kartodirdjo, 1990: 270). Karena luasnya tentang kesadaran sejarah, Soedjatmoko (1976: 15) menyebutnya sebagai *orientasi intelektual yang bersifat kreatif, mawas diri, dan introspeksi yang tiada henti*.

Pandangan yang serupa dikemukakan oleh Kartodirdjo (1990: 204) yang secara rinci menjelaskan bahwa kesadaran sejarah merupakan kesadaran diri yang secara imanen ada pada refleksi diri akan memperkuat potensi untuk: (1) menempatkan posisi diri kita dalam konteks sosiokultural serta konteks temporal; (2) melepaskan diri dari perhatian kognitif serta kehidupan praktis yang menuntut terselenggaranya fungsi-fungsi atau kepentingan perhatian normatif-etis dalam menghayati sejarah dengan orientasi teleologis, seperti kepentingan politik-kebudayaan; (3) membantu mencari jawaban dari permasalahan metahistoris melalui penggambaran masa depan atau fungsi prediktif dari studi sejarah. Sejalan dengan pendapat tersebut Barzun (1974: 131) menyatakan bahwa *sejarah menggembleng jiwa manusia menjadi kuat dan tahan dalam menghadapi teror dan kekacauan kehidupan kita*. Kehidupan modern menuntut alat-alat intelektual yang dapat memahami lingkungan secara mendalam dan penuh arti, sehingga tidak terikat atau terpaku pada kekinian belaka, dan mampu mengemansipasikan diri dari gejala musiman, lebih-lebih dari tekanan kekuatan sosial. Seperti apa yang diucapkan Langlois dan Seignobos (Kartodirdjo, 1992: 21) bahwa *"sejarah mempunyai pengaruh hieginis terhadap jiwa kita karena membebaskan dari sifat serba percaya belaka"*.

Jika manusia menyadari kemungkinan untuk ikut andil "membentuk" masa depannya, berarti ia menerima tanggung-jawab tersebut sebagai bagian dari penegasan kebebasannya. Dengan demikian sejarah tidak lagi diterima sekedar sebagai pemuas rasa ingin tahu manusia belaka, atau sumber kekaguman narsistiknya, melainkan menjadi sesuatu yang amat penting bagi orientasi partisipasi yang bermakna untuk kehidupan manusia. Di sinilah pentingnya para sejarawan yang oleh Niebuhr (1949: 29) disebut sebagai dorongan *emansipatoris*. Dorongan emansipatoris pada hakikatnya merupakan dorongan pencarian dan penegakan *kebebasan* diri dan masyarakat memperbesar kemungkinan keberhasilan dalam "mengubah" maupun "mengendalikan" nasibnya. Dalam hal ini seorang sejarawan harus menunjukkan kebebasannya untuk menentukan sikapnya yang bertanggung-jawab.

D. Sejarah Perkembangan Ilmu Sejarah

Sejarah merupakan salah satu disiplin ilmu tertua, dan secara formal diajarkan di universitas-universitas Eropa mulai dari *Oxford University* hingga *Göttingen*, pada abad ke-17 dan 18 (Gilbert, 1977). Walaupun kemunculan ilmu sejarah baru terasa di abad 19, bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan sosial lainnya. Di mana perkembangan ilmu sejarah diwarnai oleh konflik persaingan di antara para tokohnya. Diilhami oleh karya Leopold von Ranke (1795-1886), para sejarawan mulai meninggalkan paradigma sejarah klasik yang telah lama dipraktikkan oleh sebagian besar sejarawan sejak abad delapan belas. Mereka mulai memusatkan perhatian pada pemaparan narasi-narasi peristiwa politik yang terutama didasarkan pada dokumen-dokumen resmi (Burke, 2000: 440).

Namun jika ditelusuri lebih jauh lagi, embrio lahirnya ilmu sejarah bisa ditarik dalam sejarah historiografi Eropa, yang akan dilihat sebagai gejala terikat oleh waktu (*time bound*) dan terikat pula oleh kebudayaan (*culture bound*) pada zamannya, walaupun sejarah Mesir jauh lebih tua (4.000 S.M), namun karena orang Mesir tidak menulis ilmu sejarah, realitas tersebut tidak memperkuat pendapat Mesir sebagai pertama lahirnya ilmu sejarah.

Tulisan-tulisan sejarah di Eropa, pertama kali muncul dalam bentuk puisi yaitu Homerus (Homer) yang karyanya *Iliad* dan *Odyssey*. Syair *Iliad* menceritakan tentang perang Yunani dengan Troya tahun 1200 SM. Sedangkan syair *Odyssey* menceritakan tentang petualangan Odysseus setelah jatuhnya kota Troya. Sebenarnya karya ini lebih merupakan legenda dan mitos daripada karya sejarah yang sesungguhnya.

Penulis sejarah Yunani yang terkenal adalah Herodotus (484-425 sM), Thucydides (460-396 sM), dan Polybius (198-117). Herodotus menulis karyanya yang berjudul *History of the Persian Wars* (Sejarah Perang-perang Persia, 500-479 sM), ia melihatnya perang ini sebagai bentrokan antar dua peradaban yang berbeda yaitu Yunani dan Persia. Meskipun dia menganggap bahwa Persia sebagai bangsa “barbar” yang dibencinya, namun Herodotus mencoba bersikap obyektif untuk menghargai bangsa Persia. Di sinilah kejernihan hati sejarawan Herodotus di samping ia berusaha keras untuk melakukan inkuiri secara kritis dan memberi penjelasan-penjelasan yang naturalistik serta tidak banyak menunjukkan adanya “campur tangan” para dewa

sebagaimana penulis sebelumnya Homerus, sehingga Herodotus layak mendapat julukan sebagai “Bapak Sejarah” bahkan sebagai “Bapak Antropologi” (Gawronski, 1969: 68).

Lain halnya dengan Thucydides yang menulis tentang *The Peloponnesian War* (Perang Peloponesia, 431-404 SM), kisah yang merupakan perang saudara antara dua polis yakni Athena dan Sparta. Tulisan tersebut bertahan lama bahkan menjadi standar yang diikuti dalam penulisan sejarah lama. Ia dianggap sebagai sejarawan dalam arti yang sebenarnya karena ia mencoba mencari sebab dari peristiwa-peristiwa sejarah (Winarti, 2001: 10). Begitu juga Polybius, meskipun ia orang Yunani, tetapi ia banyak dibesarkan di Roma. Polybius lebih dikenal sebagai penulis yang mengkaji tentang perpindahan kekuasaan dari tangan Yunani ke Romawi. Ia dikenal selain itu karena dalam mengembangkan metode kritis dalam penulisan sejarah. Seperti halnya Thucydides, ia juga melihat sejarah itu pragmatis, “sejarah adalah filsafat yang mengajar melalui contoh” atau *philosophy teaching by example* (Kuntowijoyo, 1997: 39). Karena ia tinggal di dua tempat, ia begitu menyadari waktu itu betapa saling ketergantungan antar dua bangsa tersebut antara Yunani dan Romawi.

Historiografi Romawi pada mulanya masih menggunakan bahasa Yunani, baru kemudian memakai bahasa Latin, tetapi tulisan sejarah Yunani tetap menjadi model. Beberapa penulis sejarah Romawi adalah Julius Caesar (100-44 SM) seorang jenderal yang menaklukkan Gaul dan bukunya *Commentaries on Gallic Wars*, mengisahkan tentang suku Gallia. Sallustius (86-34 SM), terkenal dengan monografinya berjudul *History of Rome, Conspiracy of Catilinr, Jugurthine War*. Livius (59 SM-17 M), sebagai narator yang sering mengorbankan kebenaran demi retorika. Sedangkan Tacitus (55-120 sM), menulis tentang *Annals Histories*, dan *Germania*. Bobot tulisannya dapat diibaratkan di tengah-tengah antara Livius yang retoris dan Polybius yang cenderung faktual sejarah.

Kemudian pada zaman Kristen awal seperti tulisan Augustine (354-430) yang berjudul *The City of God*, adalah filsafat sejarah Kristen yang bertumpu pada agama dan supernaturalisme yang tidak dapat dipisahkan. Beberapa penulis lainnya seperti Africanus (tahun 180-250 M), yang karyanya *Chronographia* mengisahkan tentang “penciptaan” yang mengambil dari Yahudi, Yunani, dan Romawi. Eusebius (260-340 M), menulis *Chronicle* dan *Chruch History* yang memisahkan antara kelompok *sacred*, yaitu Yahudi,

Kristen, dan *profane*, yaitu *pagan* atau kafir. Kemudian Orosius (380-420 M), dikenal sebagai menulis *Seven Books Against the Pagans*, merupakan pembelaan atas peradaban Kristen yang dituduh menyebabkan runtuhnya Romawi. Menurutnya runtuhnya Romawi, memang sudah kehendak Tuhan (Kuntowijoyo, 1997: 42).

Sedangkan pada zaman Kristen Pertengahan, terdapat beberapa nama seperti; Marcus Aurelius Casiodorus (480-570), Procopius (500-565), Gregory atau Bishop Tours (538-594), dan Venerable Bede (672-735). Di antara nama-nama tersebut Bede yang menulis *Ecclesiastical History of the English People*, yang mengisahkan terbentuknya kebudayaan Anglo-Saxon. Ia menulis penuh hati-hati dalam menulis hal-hal yang ajaib, lebih sistematis, dan menggunakan banyak sumber, sehingga sejarahnya terkesan lebih obyektif.

Berbeda dengan tulisan-tulisan pada zaman *Renaissance* yang melihat semangat pagan dan kebudayaan klasik Yunani-Romawi sebagai model, di mana teologi tidak lagi menjadi fokus kajian. Namun demikian berbeda dengan zaman modern, karena dalam *Renaissance* masih tinggi unsur “melihat kebelakang”, sedangkan modern “melihat kedepan” (Kuntowijoyo, 1997: 44). Beberapa penulis di antaranya; Lorenzo Valla (1407-1457), Guicciardini yang menulis tentang *History of Florence* yang merupakan sejarah politik yang rasional. Kemudian pada zaman Reformasi diwakili oleh sejarawan Vlacich Illyricus (1520-1575), Sleidanus (1506-1556), dan Heinrich Bullinger (1504-1575). Di antara tiga penulis tersebut Bullinger-lah yang lebih dikenal melalui tulisannya *History of the Reformation*, seorang warga Swiss pengikut Zwingli, sekalipun bersifat apologetis, tetapi tulisannya disusun secara rapi dan menggunakan banyak sumber, menempatkan dia lebih jujur dan dapat dipercaya.

Pada zaman *Rasionalisme* dan *Pencerahan*, sebagaimana dipelopori Rene Descartes (1596-1650) dari Prancis, Francis Bacon (1561-1626) dari Inggris, dan Baruch Spinoza (1632-1677) dari Belanda, mereka ini banyak mempengaruhi historiografi abad 18. Terdapat tiga aliran yang berkembang pada zaman ini. *Pertama*, aliran radikal dipelopori oleh Voltaire, *kedua*, aliran moderat dipimpin oleh Montesquieu, dan *ketiga*, aliran sentimental yang dipelopori oleh J.J. Rousseau (Kuntowijoyo, 1997: 48). Sebetulnya semua aliran ini berkehendak membebaskan masa depan dari despotisme, tetapi jika Voltaire sangat intelektual dan tegas, sedangkan Rousseau emosional dalam

pembebasan tersebut. Hal ini juga berbeda dengan di Prancis yang banyak diwarnai revolusioner, sedangkan di Inggris yang puas dengan perkembangan institusional dipelopori oleh David Hume (1711-1776) penulis *History of England from the Invasion of Julius Caesar to the Revolution of 1698*. Di sini Hume percaya bahwa sejarah adalah catatan tentang perkembangan intelektual dan moral (Kuntowijoyo, 1997: 49).

Pengikut Rousseau dari Jerman adalah Johann Gottfried Herder (1744-1803) yang merupakan filsuf sejarah dan menulis *Ideas for the Philosophy of the History of Humanity*, dan *Ideas for the Philosophy of the History of Mankind*, berada antara Rasionalisme dan Romantisisme. Herder percaya bahwa kemajuan sejarah itu tercapai berkat kerjasama antara faktor eksternal dan semangat (*geist*) yang subyektif. Setiap peradaban itu muncul, berkembang, dan menghilang mengikuti hukum alam tentang perkembangan. Lain lagi dengan Hegel yang menulis *Philosophy of History*, berpendapat bahwa sejarah itu bergerak maju dengan cara dialektis. Mula-mula ada *tesis*, kemudian muncul kekuatan yang melawan, yaitu *anti tesis*, kemudian dari pertarungan itu muncullah *sintesis* (Hegel, 2002: 471-475). Filsafat sejarah Hegel bersifat idealis-nasionalistis. Ia percaya bahwa Tuhan menugaskan bangsa Jerman sebagai sarana pembebasan manusia.

Untuk memberikan semacam konklusi mengenai perkembangan pendekatan ilmu sejarah sebelum abad 19, bahwa pada zaman tersebut dapat disimpulkan menurut Alexander Irwan dalam kata pengantarnya terhadap terjemahan buku Immanuel Walerstein, mengemukakan bahwa pendekatan sejarah tersebut bercampur aduk dengan narasi yang bersifat metafisis dan mitis.

Ibaratnya Mahapatih Gajah Mada yang dikisahkan mempunyai berbagai kesaktian dan kekuatan fisik yang luar-bisa; atau misalnya lagi Sultan Mataram yang mempunyai kemampuan supernatural untuk berhubungan dengan Nyai Loro Kidul; dan candi Sewu yang dikisahkan dibangun oleh Bandung Bondowoso untuk Roro Jonggrang dalam waktu satu malam (Irwan, 1997: xviii).

Hal pertama yang perlu dicatat adalah beragamnya nama mengenai materi kajian atau “disiplin-disiplin ilmu” muncul sepanjang abad 19. Tetapi menjelang pecahnya Perang Dunia I, terjadilah konvergensi umum atau konsensus di sekitar sejumlah kecil nama spesifik, sedangkan calon-calon lainnya cenderung digururkan. Nama-nama itu,

sebagaimana akan kita diskusikan terutama ada lima untuk ilmu sosial., yakni: ilmu sejarah, ilmu ekonomi, sosiologi, ilmu politik, ilmu geografi, dan psikologi (Wallerstein, 1997:22). Selanjutnya Wallerstein penulis *Open The Sosial Science Report of the Gulbenkian Commission on the Restructuring of the Social Science*, mengemukakan bahwa “yang pertama dari disiplin-disiplin ilmu sosial yang mencapai eksistensi institusional otonom adalah ilmu sejarah”. Walaupun banyak sejarawan secara antusias mereka menolak label “ilmu sosial”, dan beberapa di antaranya masih ada yang mempertahankan pendapat tersebut. Namun menurut Wallerstein, berbagai perbedaan pendapat dan perselisihan tentang hal tersebut, adalah masalah internal di kalangan sejarawan sendiri maupun sejarawan dengan ilmuwan-ilmuwan sosial (Wallerstein 1997: 22).

Secara periodik, ilmu sejarah memang sudah berlangsung sejak lama, dan terminologi sejarah-pun sudah amat tua, khususnya sejak zaman Yunani kuno. Sebab mengenai catatan-catatan masa lalu, khususnya masa lalu tentang bangsanya sendiri, negaranya sendiri, memang merupakan suatu aktivitas yang sudah lazim dalam dunia pengetahuan; dan *hagiografi* (riwayat hidup dan legenda orang-orang yang dianggap suci) penulisannya senantiasa didorong oleh mereka yang berkuasa. Tetapi yang membuat disiplin baru ilmu sejarah itu berbeda, adalah sejak dikembangkannya pada penekanan *wie es eigentlich gewesen* (apa yang nyata-nyata terjadi) oleh Leopold von Ranke (1795-1886) pada abad 19 dengan karyanya *A Critique of Modern Historical Writers*. Walaupun sebenarnya munculnya aliran sejarah kritis ini tidak sendiri karena zaman sebelumnya terdapat sederetan sejarawan lainnya seperti; Jean Bodin (1530-1596) terkenal dengan karyanya *Method for Easy Understanding History*, Jean Mabillon (1632-1707) menulis *De Re Diplomatica*, Berthold Gerg Nibhr (1776-1831) yang menulis *Roman History*.

Akan tetapi nama Ranke, setahap lebih dikenal dibanding lainnya. Sebagai penumbuh historiografi kritis dan modern, Ranke menganjurkan supaya sejarawan menulis apa yang sebenarnya terjadi (*wie es eigentlich gewesen*), sebab setiap periode sejarah itu akan dipengaruhi oleh semangat zamannya (*zeitgeist*). Atau lebih ekstrim lagi penulisan sejarah pada waktu itu kebanyakan dengan penciptaan kisah-kisah yang dibayangkan atau dilebih-lebihkan sehingga bersifat retorik, karena kisah-kisah semacam

itu hanya menyanjung-nyanjung pembaca maupun melayani tujuan-tujuan yang mendesak bagi para penguasa ataupun kelompok-kelompok yang berkuasa lainnya (Wallerstein, 1997: 23).

Betapa sukar mengabaikan kata-kata Ranke yang begitu kuat pengaruhnya tersebut, sebagaimana tercermin dalam tema-tema yang digunakannya “ilmu” dalam perjuangannya melawan “filsafat” — penekanannya pada eksistensi dunia nyata yang obyektif dan dapat diketahui, pada upaya pembuktian empirik, dan netralitas peneliti. Hal ini ibarat ilmu-ilmu lainnya, tidak harus terlebih dahulu menemukan datanya di dalam tulisan-tulisannya (perpustakaan, *locus* membaca), atau dalam proses-proses berpikrnya sendiri (studi, *locus* refleksi). Tetapi lebih baik di suatu tempat di mana data eksternal obyektif dapat dikumpulkan, disimpan, dikontrol dan dimanipulasi (laboratorium/arsip, *locus* riset) (Wallerstein, 1997: 24).

Namun demikian tidak dengan serta-merta gagasan Ranke dapat diterima para sejarawan. Sebab sadar ataupun tidak, orang menulis sejarah pasti mempunyai maksud, karena itu istilah “sebagaimana terjadi” yang dijadikan motto sejarah kritis sesungguhnya sejarah itu tidak akan pernah obyektif. Carl Becker (1873-1945) mengatakan bahwa pemujaan terhadap fakta, dan pembedaan fakta antara fakta keras (*hard fact*) dan fakta lunak (*cold fact*) hanyalah illusi. Sebab fakta sejarah tidaklah seperti batu bata yang begitu mudah dan tinggal dipasang. Tetapi fakta itu sengaja dipilih oleh sejarawan yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya demikian halnya dengan James Harvey Robinson (1863-1936) penulis *The New History* (1911) memberikan komentar yang serupa; dengan sejarah kritis kita hanya dapat menangkap “permukaan”, tetapi tidak yang “dibawah” realitas, tidak dapat memahami perilaku manusia yang sebenarnya (Kuntowijoyo, 1999: 56-57).

Di Inggris pandangan-pandangan ala Dilthey dan Croce terangkat kembali dengan munculnya R.G. Collingwood (1888-1943), seorang filsuf sejarah terkemuka. Terdapat sejumlah kecil pembelotan terhadap hegemoni narasi politik, namun sampai pada tahun 1950 usaha itu tidak bisa dikatakan berhasil. Para sejarawan Marxis belum banyak menghasilkan karya penting kecuali Jan Romein yang menulis *The Lowlands by the Sea* (1934) dan Emilio Sereni yang menulis *Capitalism in the Countryside* (1947). Hanya ada dua bidang yang jelas terlihat berubah, yakni: *Pertama*, para sejarawan ekonomi telah

menjadi kelompok yang signifikan dalam profesi ini, dan mereka memiliki jurnal sendiri yang berpengaruh, seperti *Economic History Review*, dengan tokoh-tokoh terkemuka seperti Henri Pirenne dari Belgia (1862-1935), dan Eli Heckscher (1879-1952) dari Swedia. Perdebatan mereka sendiri acapkali lebih intensif dengan perdebatan ekonomi, daripada sejarawan.

Kedua, di Prancis, pendekatan sejarah yang lebih umum, diilhami oleh Lucien Febre (1878-1956) dan Marc Bloch (1886-1944) dengan jurnal *Annales*, mulai menarik perhatian dan karya-karya besar mengenai dunia Mediterania pada kurun pemerintahan Raja Philip II telah terbit pada tahun 1949 oleh Fernand Braudel (1902-1985) yang amat orisinal dalam eksplorasinya terhadap hal-hal apa yang oleh para sejarawan disebut 'geohistory'. Karya tersebut menjadi tonggak perkembangan *geografi sejarah* yang ide dasarnya dipengaruhi oleh karya Vidal de la Blache, namun lebih deterministik sifatnya (Burke, 2002: 441). Kelompok *Annales* di bawah kepemimpinan Braudel tersebut mendominasi dunia sejarah, baik secara intelektual maupun institusional.

Di sinilah para sejarawan seperti Robinson, Becker, Landes, dan Tilly, yang mendesak perlunya *The New History* (Sejarah Baru) sebagai pengaruh pesatnya perkembangan ilmu-ilmu sosial. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa perkembangan metodologi sejarah ini erat kaitannya dengan usaha-usaha saling mendekatnya (*rapproachment*) antara sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Sejarah tidak mentabukan penggunaan konsep-konsep yang umum digunakan dalam beberapa ilmu sosial jika dianggap relevan, selama penggunaan itu untuk kepentingan analisis sehingga menambah kejelasan dalam eksplanasi dan interpretasi sejarah (Sjamsuddin, 1996: 198). Oleh karena itu penggunaan ilmu-ilmu sosial adalah wajar bahkan perlu dilakukan guna menambah kejelasan. Hal ini dapat ditandai dalam perkembangan historiografi sejak abad ke-20.

Perluasan secara *horizontal* (keluasan) maupun *vertical* (kedalaman) subyek sejarah yang harus dikaji dan diteliti menuntut pula peningkatan dan penyempurnaan metodologi sejarah sehingga menghasilkan historiografi yang bervariasi dalam segi tema-tema. Penggunaan konsep-konsep ilmu sosial membuat banyak pertanyaan penelitian yang bisa diajukan yang pada gilirannya jawaban-jawaban yang bisa diberikan. Penulisan sejarah tidak semata-mata mengutamakan kekhususan, meskipun ini mustahil ditinggalkan sama sekali, tetapi sudah tidak segan-segan menggunakan konsep ilmu-ilmu sosial lain,

bahkan jika memang relevan menggunakan teori, hipotesis atau generalisasi-generalisasi. Pada gilirannya ilmu-ilmu sosial-pun menggunakan pendekatan sejarah (Sjamsuddin, 1996: 198).

Jika disimak lebih jauh, kurun waktu 1950-an tampaknya merupakan titik balik historiografi. Sejarahwan Marxis yang berpengaruh akhirnya muncul ke permukaan, terutama yang berada di luar blok komunis (contohnya Eric Hobsbawn dan Edward Thomson di Inggris, Pierre Vilar di Prancis, dan lain-lain), meskipun sebagian berasal dari blok komunis — contohnya sejarahwan ekonomi Polandia Witold Kula (1916-1968). Begitu juga di Prancis dengan munculnya kelompok *Annales* yang telah dikemukakan di atas. Dalam hal ini ‘ilmu sejarah ekonomi baru’, sebagaimana ilmu ekonomi semakin ambisius dalam mengejar tujuannya, dan metode-metodenya semakin kuantitatif. Hal ini acapkali dijadikan model oleh cabang sejarah lain. Sejarah demografi misalnya yang muncul sebagai subdisiplin pada kurun 1950-an diilhami oleh semakin pertumbuhan populasi, merupakan salah satu cabang sejarah sosial yang kuantitatif (Wrigley, 1969). Para sejarahwan sosial dan ahli sosiologi sejarah juga mengambil garis kuantitatif pada kurun tersebut, kendati ada juga yang menolak. Di antaranya studi klasik E.P. Thomson dalam *The Making of the English Working Class* (1963) yang berisikan kritik pedas terhadap tulisan sejarah yang oleh para sejarahwan seperti Thomson disebutnya sebagai sosiologi. Atau lebih tepatnya sosiologi sejarah kuantitatif yang ditokohi para pengikut Talcot Parson dan Neil Smelser, yang sebelumnya sudah terkenal setelah menulis Revolusi Industri.

Kuantifikasi, juga memainkan peran penting dalam ‘sejarah politik baru’ yang dipraktikkan di Amerika Serikat, baik dalam tulisan-tulisan mengenai hasil-hasil pemilu, pola pemungutan suara di Kongres, atau usaha untuk menghitung pemogokan serta bentuk-bentuk protes lainnya (Bogue, 1983). Metode-metode yang mirip dengannya juga diterapkan pada sejarah agama, khususnya di Prancis, yang memakai statistik pengakuan dosa dan frekuensi jemaat dalam setahun sebagai bahan telaahan. Dalam buku asli dan kontroversialnya mengenai ‘kesalehan zaman barok dan dekristenisasi’ Michel Vovelle (1973) mempelajari 30000 surat wasiat dari Provence abad delapan belas, yang kemudian ia susun menjadi sebuah indeks baku tentang pandangan gereja terhadap kematian dan perubahan-perubahan sikap keagamaan. Karyanya menawarkan suatu benang merah

antara klonometrika dan disiplin baru yang tengah naik daun tahun 1950-an, yakni psikohistori (Burke, 2000: 441).

Di Prancis, bertolak dari pemikiran Durheim dan Lucien Levy-Bruchl (1857-1939), minat dalam psikologi histori tidak sekedar pada individu, melainkan pada mentalitas kolektif. Hal ini antara lain dapat dilihat pada karya Philippe Arie (1914-1984) tentang perubahan sikap terhadap masa kanak-kanak dan kematian dari abad ke abad. Sejumlah tokoh lain seperti Jaques Le Goff, lebih suka untuk mempelajari mentalitas dengan cara seperti yang ditempuh Claude Levi-Strauss, yang menekankan *oposisi biner* pada umumnya, dan pertentangan antara alam dan kebudayaan pada khususnya (Burke, 2000: 441).

Di Amerika Serikat yang mulai gandrung pada ide-ide Sigmund Freud, para ahli sejarah dan psikoanalisis (yang perpaduannya membentuk psikohistori) mulai mencoba menyimak motif dan dorongan personal para pemimpin agama yang merangkap sebagai pemimpin politik seperti Martin Luther, Woodrow Wilson, Lenin, Gandhi. Presiden Asosiasi Sejarawan Amerika yakni Langer bahkan menghimbau para koleganya untuk menyambut psikohistori sebagai cabang baru dalam ilmu sejarah (Langer, 1958).

Ternyata himbauan tersebut tidak banyak disambut oleh sejarawan Amerika lainnya. Apa yang dilakukan oleh sebagian besar dari mereka pada kurun 1970-an, seperti rekan sejawat mereka pada disiplin-disiplin terkait lainnya, sampai pada titik tertentu justru merupakan reaksi terhadap kecenderungan di atas yang terjadi pada 1968. Mereka menolak determinisme (baik ekonomi maupun geografis), sebagaimana mereka tolak metode-metode kuantitatif dan klaim ilmiah dari ilmu sosial. Dalam ilmu sejarah penolakan terhadap karya generasi sebelumnya itu dibarengi oleh munculnya pendekatan-pendekatan baru terhadap masa silam, khususnya yang diringkas dalam empat slogan dan empat bahasa: "*subaltern history* (maksudnya *sejarah dari bawah*), *microstoria*, *Alltagsgeschichte*, dan *history de Imaginaire* (Burke, 2000: 442).

Pertama, *subaltern history* atau 'sejarah dari bawah'; memiliki makna dasar bahwa sejarah tidak hanya menyoroti para tokoh besar, namun juga orang-orang kebanyakan di masa lalu. Penulisannya-pun tidak boleh terlalu diwarnai oleh wawasan tokoh besar, melainkan juga harus bertolak dari sudut pandang orang-orang kebanyakan. Ini merupakan perubahan paling penting dalam ilmu sejarah sepanjang abad dua puluh,

yang memberi perimbangan atas kelemahan-kelemahan atas tradisi historigrafi elitis yang tidak memasukkan pengalaman, kebudayaan, dan aspirasi-aspirasi kelompok bawah yang mendominasi (Guha, 1982).

Pergeseran tersebut telah mendorong bangkitnya tradisi sejarah oral, sehingga memberikan kesempatan bagi orang-orang kebanyakan untuk mengutarakan pengalaman mereka mengenai proses sejarah dengan bahasa mereka sendiri. Akan tetapi, praktek sejarah dari bawah tersebut pada gilirannya menjadi terlalu disederhanakan dari pemikiran aslinya, terutama karena menajamnya perbedaan orientasi antara berbagai kelompok yang didominasi: kelas pekerja, para petani, rayat terjajah, dan wanita. Sekitar kurun waktu 1970-an, gerakan untuk menciptakan ilmu sejarah khusus wanita mulai terlihat bentuknya, berkat kebangkitan studi-studi wanita dan feminisme. Hal ini melemahkan setiap asumsi tentang kesatuan 'kelas-kelas yang disubordinasikan'. (Burke, 2000: 442).

Kedua, "microstoria" atau "sejarah mikro", yang bisa didefinisikan sebagai usaha mempelajari masa lalu pada level komunitas kecil, baik itu berupa sebuah desa, keluarga, atau bahkan individu. Pendekatan ini ditempatkan pada peta sejarah oleh Carlo Ginzburg dalam *Cheese and Worms* (1976), sebuah studi mengenai kosmos lingkungan Italia abad enam belas. Studi ini sebagai jawaban atas desakan *Inquisisi*, yang oleh Emmanuel le Roy Ladurie dalam *Montaillou* (1975), disusun berdasarkan catatan-catatan *inquisisi* yang digunakan untuk memotret pedesaan abad enam belas yang kemudian juga diperbandingkan dengan studi-studi komunitas seperti *Akenfield* karya Ronald Blythe. Kedua buku ini tidak saja menjadi *bestseller*, namun juga patut diteladani karena mengilhami sebuah mazhab atau paling tidak sebuah kecenderungan baru. Para ahli sejarah tradisional melihatnya sebagai semacam *antikuarianisme* dan pengingkaran terhadap kewajiban para sejarawan untuk menjelaskan bagaimana dunia modern ini terbentuk. Oleh karena itu, sejarah mikro dibela oleh salah seorang praktisi utamanya Giovanni Levi (1991), yang menegaskan bahwa reduksi skala justru telah menyingkap fakta, betapa aturan-aturan politik dan sosial acapkali tidak berfungsi dan betapa individu-individu bisa menciptakan ruang untuk diri sendiri di tengah-tengah persilangan berbagai institusi yang ada.

Ketiga, Alltagsgeschichte atau ‘sejarah keseharian’, yang merupakan pendekatan yang berkembang atau paling tidak pernah hangat didefinisikan di Jerman. Pendekatan ini menarik garis tradisi filsafat dan sosiologis yang antara lain terlihat pada karya Alfred Schutz (1899-1959) dan Erving Goffman (1922-1982), Henri Lefebvre dan Michel de Certeau (1925-1986). Seperti halnya sejarah mikro, yang memang tumpang-tindih dengannya, sejarah keseharian ini menjadi penting karena bisa menembus pengalaman manusia dan membawanya ke sejarah sosial, yang dipandang oleh sebagian praktisinya semakin abstrak dan tanpa wajah. Pendekatan ini dikritik sebab perhatiannya pada apa yang disebut para pengkritiknya sebagai hal-hal yang remeh, serta mengabaikan politik. Tapi pendekatan ini juga punya pembela, seperti halnya sejarah mikro, yang menegaskan bahwa hal-hal yang tampak remeh-pun acapkali bisa menjadi kunci untuk memahami perubahan-perubahan penting dan berskala besar (Ludtke; 1982).

Keempat, historie del’imaginaire atau ”sejarah mentalitet” yang bisa didefinisikan sebagai versi sehari-hari dari sejarah intelektual atau sejarah ide-ide. Dalam kalimat lain, ini adalah sejarah kebiasaan berfikir atau asumsi-asumsi yang tak terucapkan, dan sering tertutup oleh gagasan-gagasan verbal yang dirumuskan secara sadar oleh para filsuf dan teoretisi. Pendekatan ini berawal di Prancis pada kurun 1920-an dan 1930-an, muncul sebagai kebangkitan kembali. Tetapi sebagai sering terjadi, apa yang bangkit kembali itu tidaklah serupa dengan apa yang dahulu ada. Para sejarawan yang bekerja di bidang ini lebih berminat untuk menyimak representasi-representasi atau aspek-aspek visual dan mental dari suatu peristiwa. Begitu juga pada apa yang disebut oleh pengikut Jaques Lacan dan Michel Foucault sebagai unsur *imaginary*. Pergeseran memunculkan apa yang acapkali disebut sebagai titik berat baru terhadap pembentukan, penyusunan, dan ‘produksi sosial’, bukan hanya dalam bentuk-bentuk kebudayaan — misalnya penemuan –penemuan tradisi — melainkan juga sosok negara dan masyarakat, yang acapkali dipandang bukan sebagai struktur obyektif atau baku, melainkan sebagai ‘komunitas-komunitas bayangan’ (Anderson, 1991; Hobsbawm dan Ranger, 1983). Dengan kalimat lain, seperti rekan-rekannya dalam subdisiplin lain, para sejarawan mengalami efek-efek ‘pembalikan linguistik’ (Burke, 2000: 443).

Perlu dicatat di sini bahwa keempat pendekatan tersebut semuanya memiliki kaitan tertentu dengan antropologi sosial. Karena para antropolog sejak lama memang

berminat mempelajari sesuatu berdasarkan “sudut pandang kaum pribumi” dan bekerja dalam komunitas-komunitas kecil guna mengadakan observasi atas kehidupan sehari-hari, serta menyelidiki pola pikir dan sistem nilai yang hidup di masyarakat. Sejumlah sejarawan ternyata juga melakukan hal serupa, dan mereka banyak memakai konsepsi para antropolog terkemuka seperti E.E Evans-Pritchard, Victor Turner, maupun Clifford Geertz (Walters, 1980).

Tanpa mengabaikan arti pentingnya keempat pendekatan tersebut, ternyata belum cukup mengungkapkan semua perubahan yang telah terjadi dalam ilmu sejarah, bahkan belum sanggup melepaskan diri sepenuhnya dari pengaruh pendekatan-pendekatan tradisional yang hendak mereka ubah. Beberapa sejarawan mencoba menjelaskan hal itu secara lebih fokus, dengan bertolak dari pendekatan tersendiri. Usaha seperti itu antara lain dilakukan oleh Fernand Braudel, yang mencoba melihat dunia sebagai suatu kesatuan yang utuh. Tokoh terkemuka lainnya yang melakukan upaya serupa adalah Immanuel Wallerstein, seorang sosiolog tentang masyarakat Afrika yang kemudian menjadi penulis sejarah kapitalisme. Dalam karyanya itu Wallerstein mengembangkan konsepsi baru yang disebut *modern world system*. Dengan diilhami pemikiran Marxis, karya Wallerstein ini secara gamblang menggambarkan perkembangan ekonomi dan teori sistem-sistem dunia guna memperlihatkan hubungan antara kebangkitan kekuatan ekonomi Venesia dan Amsterdam serta keterbelakangan Eropa Timur dan Amerika Latin (Wallerstein, 1974).

Seperti yang sudah diduga, upaya-upaya lain untuk melihat sejarah planet bumi sebagai satu kesatuan dilakukan oleh mereka yang mengambil sudut pandang ekologi, yang biasanya lebih suka meninjau sesuatu secara holistik. Misalnya tentang akibat-akibat perbenturan antara Eropa dan Amerika sebagai “pertukaran harta Columbus” dari tanaman, binatang, dan jenis-jenis penyakit baru. Dengan demikian pendekatan tersebut “menempatkan alam dalam sejarah” (Crosby, 1972). *Geohistory* Braudel mempelajari masalah-masalah yang lebih statis dalam interaksi antara lansekap dan populasi manusia serta makhluk hidup lainnya (Cronon, 1990; Wroost, 1988).

Dengan munculnya pendekatan-pendekatan tersebut, dan sebagai reaksi atas beberapa di antaranya, para peminat ilmu sejarah dapat menyaksikan dua kebangkitan kembali unsur lama dalam ilmu sejarah, yakni kebangkitan kembali *politik* dan kebangkitan kembali *narasi*. Sejak lama sejumlah besar sejarawan memang menghendaki

dimasukkannya kembali tinjauan politik ke dalam ilmu sejarah. Kondisi keilmuan pada tahun 1980-an dan 1990-an tampaknya mendukung hal itu, setelah terkikisnya determinisme yang sebelumnya selalu dikaitkan dengan strategi dan taktik politik sempit. Sejarah politik-pun berkembang lagi, bahkan dengan mencakup hal-hal baru termasuk apa yang oleh Michel Foucault disebut “*mikropolitik*”. Strategi dan taktik politik yang dibahas bukan hanya yang berskala negara, namun juga dalam komunitas yang lebih kecil, seperti desa ataupun kampung. Sejarah diplomatik yang semula berfokus pada negara-pun, sejak itu melebar dan mencakup berbagai hal baru seperti mentalitas dan ritual.

Kebangkitan politik, relatif lebih lancar daripada kebangkitan narasi yang sering menyulut kontroversi setelah dahulu terdesak aliran baru yang dimotori mazhab *Annales*. Istilah kebangkitan narasi-pun sering disalahtafsirkan. Sama halnya dengan para antropolog dan sosiolog, kini para sejarawan secara terang-terangan mempermasalahkan hubungan antara peristiwa dan struktur di mana struktur bisa bersifat sosial dan kultural. Paparan naratif dalam bentuk yang baru lebih beraneka ragam, dimunculkan kembali karena ada sejumlah sejarawan yang menyadari perlunya penggunaan retorika, eksperimen literer, dan (laiknya sejumlah novelis mutakhir) kombinasi antara fakta dan fiksi untuk meningkatkan daya tarik (White, 1978).

Salah satu bentuknya yang menonjol adalah narasi mengenai peristiwa-peristiwa berskala kecil, dengan memakai sebuah teknik pemaparan yang lazimnya dipakai para ahli sejarah mikro. Hal ini berlawanan dengan *Grand Naratif* yang menekankan peristiwa-peristiwa kunci dan tahun-tahun baku seperti; 1492, 1789, 1914, 1945 dan seterusnya. Bentuk lain kemunculan narasi adalah berkembangnya paparan sejarah yang diceritakan dari sudut pandang majemuk guna mengakomodasi berbagai persepsi mengenai peristiwa tersebut dari kalangan bawah maupun atas. Dari pihak-pihak yang bertempur pada suatu perang saudara, maupun mereka yang hanya merasakan dampak negatifnya, dan seterusnya. Bersamaan dengan tumbuhnya minat untuk mempelajari benturan-benturan antara berbagai kebudayaan, bentuk-bentuk narasi dialogis tampaknya akan semakin kerap dipraktekkan di masa mendatang.

E. Hubungan Ilmu Sejarah dengan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya

Hubungan *Sejarah* dengan *Sosiologi*; hal ini lebih nampak lagi dengan cepatnya perubahan sosial, jelas menarik perhatian bukan saja sejarawan tetapi juga sosiolog. Sebab para sosiolog yang menganalisis berbagai persyaratan pembangunan pertanian dan industri di negara-negara yang disebut ‘negara berkembang’ memperoleh kesan yang mereka kaji adalah tentang perubahan dari waktu-kewaktu dengan kata lain ‘sejarah’. Sebagian di antaranya seperti sosiolog Amerika Serikat Imanuel Wallerstein yang begitu tergoda untuk memperluas penyelidikannya hingga jauh ke masa silam, khususnya tentang Ekonomi Dunia Kapitalis (Wallerstein, 1996: 537).

Terdapat tiga tokoh besar ahli sosiolog yang sangat mengagumi sejarah — Pareto, Durkheim, dan Weber — mereka menguasai sejarah dengan amat baik. Buku Vilfredo Pareto, *Treatise on General Sociology* (1916) banyak berbicara tentang sejarah Athena, Sparta, dan Romawi klasik dengan mengambil contoh-contoh sejarah Itali Abad Pertengahan. Sementara itu Emile Durkheim, yang dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri Sosiologi sebagai ilmu, ia melakukannya pembedaan antara Sosiologi, Sejarah, Filsafat, dan Psikologi. Dia merasa perlu belajar sejarah kepada Fustel de Coulanges. Bahkan salah satu bukunya itu dipersembahkan untuk Coulanges, serta dia juga menulis monograf sejarah pendidikan Prancis. Selain itu dia ia menjadikannya buku sejarah sebagai salah satu sajian jurnal *Annee Sociologique*, dengan syarat pembahasan buku itu bukan hal-hal yang ‘superfisial’ seperti umumnya buku-buku sejarah peristiwa (Lukes: 1973; Burke: 2001). Sedangkan tentang Max Weber sosiolog yang memiliki wawasan luas tentang sejarah, ia sebelum melakukan studi untuk bukunya *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (1904-1905), sebelumnya ia telah menulis tentang Perniagaan Abad Pertengahan serta Sejarah Pertanian zaman Romawi kuno.

Apalagi perkembangan akhir-akhir ini banyak sekali karya sosiolog diterbitkan yang berupa studi sosiologis mengenai gejala sosial atau *sociofact* di masa lampau, seperti *Pemberontakan Petani* karya Tilly, *Perubahan Sosial masa Revolusi Industri* di Inggris oleh Smelzer, *Asal Mula Sistem Totaliter dan Demokrasi* oleh Barrington Moore, yang kesemuanya itu disebut sebagai *historical sociology* atau sejarah sosiologi (Kartodirdjo, 1992: 144). Adapun karakteristik dari *historical sociology*

(sosiologi sejarah) tersebut bahwa studi sosiologis mengenai suatu kejadian atau gejala di masa lampau yang dilakukan oleh para sosiolog.

Di satu pihak sekarang ini juga sedang terjadi apa yang disebut *sociological history* (sejarah sosiologis) yang menunjuk kepada sejarah yang disusun oleh sejarawan dengan pendekatan sosiologis. Timbul pertanyaan, "mengapa perkembangan ilmu sejarah atau studi sejarah kritis sejak akhir Perang Dunia II menunjukkan kecenderungan kuat untuk mempergunakan pendekatan ilmu sosial?"

Untuk menjawab ini, memang akhir-akhir ini sedang terjadi apa yang disebut sebagai gejala *Rapprochement* atau proses saling mendekat antara ilmu sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Metode kritis ini berkembang pesat sejak diciptakan oleh Mabilon, sehingga terjadi inovasi-inovasi yang sangat penting dalam sejarah, yang mana dapat menyelamatkan sejarah dari "kemacetan" (Kartodirdjo (1992: 120). Sebab jika dipandang dari titik sejarah konvensional, perubahan metodologi tersebut sangat revolusioner, dengan meninggalkan model penulisan sejarah naratif. Dikatakan revolusioner karena ilmu sejarah lebih bergeser ke ilmu sosial. Perubahan paradigma ini beranggapan bahwa dapat diingkari tanpa bantuan kerangka konseptual dari ilmu-ilmu sosial, gejala politik, ekonomi, psikologi, budaya, geografi, sukar dianalisis dan dipahami proses-prosesnya. Kombinasi antar pelbagai perspektif akan mampu mengekstrapolasikan interdependensi antara pelbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini sejarawan tidak langsung berurusan dengan kausalitas, akan tetapi lebih banyak dengan kondisi-kondisi dalam pelbagai dimensinya.

Hubungan *Sejarah* dengan *Antropologi*; dapat dilihat karena kedua disiplin ini memiliki persamaan yang menempatkan manusia sebagai subyek dan obyek kajiannya, yang lazimnya mencakup pelbagai dimensi kehidupannya. Dengan demikian di samping memiliki titik perbedaan, kedua disiplin itu juga memiliki persamaan. Bila sejarah membatasi diri pada penggambaran suatu peristiwa sebagai proses di masa lampau dalam bentuk cerita secara "einmalig" (sekali terjadi), hal ini tidak termasuk bidang kajian antropologi. Namun jika suatu penggambaran sejarah menampilkan suatu masyarakat di masa lampau dengan pelbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi, politik, religi, dan keseniannya, maka gambaran tersebut mencakup unsur-unsur kebudayaan masyarakat,

maka dalam hal ini ada persamaan bahkan tumpang tindih antara sejarah dan antropologi (Kartodirdjo, 1992: 153).

Memang ada persamaan yang menarik kalau hal itu dihubungkan dengan ucapan antropolog terkemuka Evans-Pritchard, yang mengemukakan bahwa “*Antropologi adalah Sejarah*”. Hal ini dapat dipahami karena dalam studi antropologi diperlukan pula penjelasan tentang struktur-struktur sosial yang berupa lembaga-lembaga, pranata, sistem-sistem, yang kesemuanya itu akan dapat diterangkan secara lebih jelas apabila diungkapkan bahwa struktur itu adalah produk dari suatu perkembangan masa lampau. Karena antropologi juga mempelajari obyek yang sama yaitu tiga jenis fakta; terdiri atas *artifact*, *sociofact*, dan *mentifact*, di mana semuanya adalah produk historis dan hanya dapat dijelaskan eksistensinya dengan melacak sejarah perkembangannya (Kartodirdjo, 1992: 153).

Sebagaimana kita ketahui bahwa fakta menunjuk kepada kejadian khusus (sejarah dalam aktualitasnya), untuk itu

sebagai suatu konstruk, maka fakta adalah hasil strukturasi oleh seorang subyek. Begitu juga *artifact*, sebagai benda fisik adalah konkrit dan merupakan hasil buatan. *Artifact* menunjuk kepada proses pembuatan yang telah terjadi di masa lampau. Sebagai analoginya *sociofact* yang menunjuk kepada kejadian sosial (interaksi antar aktor, proses aktivitas kolektif) yang telah mengkristalisasi sebagai pranata, lembaga, organisasi, dan lain sebagainya. Jelaslah bahwa untuk memahami struktur dan karakteristik *sociofact* perlu dilacak asal-usulnya, proses pertumbuhannya, samapai wujud sekarang. Pendeknya, segala sesuatu dan keadaan yang kita hadapi dewasa ini tidak lain ialah produk dari perkembangan masa lampau, jadi produk sejarahnya (Kartodirdjo, 1992: 154).

Dengan demikian dalam hal ini mengalami konvergensi antara pendekatan historis dengan antropologis, dan dengan demikian pula pendapat Evans-Pritchard tersebut dapat dibenarkan.

Terutama hubungan Antropologi Budaya dengan Sejarah. Hal ini bisa dipahami lebih-lebih belakangan ini mengingat ada dua hal yang penting. *Pertama*; makna ‘kebudayaan’ telah semakin meluas karena semakin luasnya perhatian para sejarawan, sosiolog, mengkritisi sastra dan lain-lain. Perhatian semakin dicurahkan kepada kebudayaan populer, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai masyarakat awam serta

pengungkapannya ke dalam kesenian rakyat, lagu-lagu rakyat, cerita rakyat, festival rakyat, dan lain-lain (Burke, 1978; Yeo dan Yeo: 1981). *Kedua*; mengingat semakin luasnya makna ‘kebudayaan’ semakin meningkat pula kecenderungan untuk menganggap kebudayaan sebagai sesuatu yang aktif, bukan pasif. Kaum strukturalis tentu telah berusaha mengembalikan keseimbangan itu yang sudah terancam begitu lama. Levi-Strauss utamanya yang pada mulanya begitu membanggakan Karl Marx, akhirnya berpaling kembali kepada Hegel, dengan mengatakan bahwa yang sebenar-benarnya struktur-dalam, bukanlah tatanan sosial dan ekonomi, melainkan kategori mental (Burke, 2001: 178).

Tentang hubungan *Sejarah* dengan *Psikologi*: Dalam cerita sejarah, aktor atau pelaku sejarah senantiasa mendapat sorotan yang tajam, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Sebagai aktor individu tidak lepas dari peranan faktor-faktor internal yang bersifat psikologis (seperti motivasi, minat, konsep diri, dan sebagainya), yang selalu berinteraksi dengan faktor-faktor eksternal yang bersifat sosiologis (lingkungan keluarga, lingkungan sosial-budaya, dan sebagainya). Begitu juga dalam aktor yang bersifat kelompok menunjukkan aktivitas kolektif, suatu gejala yang menjadi obyek khusus psikologi sosial. Dalam pelbagai peristiwa sejarah perilaku kolektif sangat mencolok, antara lain sewaktu ada huru-hara, masa mengamuk (*mob*), gerakan sosial atau protes yang revolusioner, yang kesemuanya menuntut penjelasan berdasarkan psikologi dari motivasi, sikap, dan tindakan kolektif (Kartodirdjo, 1992: 139). Di sinilah psikologi berperan untuk mengungkap beberapa faktor tersembunyi sebagai bagian proses mental.

Sampai sejauh ini peranan ilmu psikologi masih agak marjinal dalam pembahasan sejarah. Alasannya terletak pada relasi antara psikologi dengan ilmu sejarah. Pada tahun 1920-an dan 1930-an dua sejarawan Prancis March Bloch dan Lucien Febre menyebarluaskan praktik-praktik *historical psychology* (psikologi sejarah), yang berlandaskan bukan pada aliran psikologi Freud (Psikoanalitis), melainkan psikologi Prancis seperti Charles Blondel, Henri Wallon, dan Lucien Levy-Bruhl, yang ide-idenya tentang ‘mentaliteit primitif’. Namun pendahulu-pendahulu mereka yang dikenal sejarawan mentaliteit telah mengalihkan perhatiannya ke antropologi. Kemudian di Amerika Serikat pada dasawarsa 1950-an, beredar istilah baru untuk menyebut suatu pendekatan baru yang mengasyikan: *psychohistory* (psikosejarah). Setelah Erik Erikson

pengikut Freudian melakukan pengkajian sejarah yang dilakukan secara psikoanalitis terhadap tokoh sejarah, ternyata menimbulkan perdebatan sengit. Sementara itu ironisnya di tengah perdebatan tersebut, Ketua Asosiasi Sejarawan Amerika, seorang negarawan yang disegani, membuat kejutan di kalangan para koleganya dengan mengatakan '*duty awaiting' from historian's to adopt psychology morely is serious compared to with a period of/to previously* ('tugas yang menunggu' dari para sejarawan adalah mengadopsi psikologi secara lebih serius dibanding dengan masa-masa sebelumnya (Erikson, 1958; Langer: 1958). Sejak saat tersebut diterbitkanlah jurnal-jurnal psikologi sejarah, dan para pemimpin besar seperti seperti Stalin, Trotsky, Himler, dan Hitler dikaji dari sudut pandang psiko-sejarah (Wolfenstein: 1967; Erikson: 1970; Fromm: 1974; Waite: 1977). Akan tetapi 'mendekatnya' kedua disiplin ini masih bersifat illusif. Hal ini terjadi bukan semata-mata karena sulitnya dalam disiplin psikologi itu sendiri sangat kompleks, melainkan juga para sejarawan saat itu sedang cenderung menjauhkan diri dari 'orang-orang hebat' lebih memfokuskan pada sejarah sosial (Burke, 2001: 171).

Pada tahun 1940-an ada usaha kembali untuk mendekatkan disiplin sejarah dengan psikologi terutama sintesis pandangan Karl Marx dan Sigmund Freud oleh Erich Fromm, dan kajian kolektif tentang 'kepribadian otoriter' yang dipimpin oleh Theodor Adorno (Fromm, 1942; Adorno: 1950). Relevansi kedua disiplin itu bagi sejarah adalah penting, karena bertolak dari asumsi "jika kepribadian dasar berbeda-beda antara satu masyarakat dan masyarakat lainnya, pastilah ia berbeda-beda pula antara satu periode dan periode lainnya". Selain itu pendekatan psikologis paling tidak dapat dilakukan melalui tiga cara: *Pertama*; sejarawan terbebas dari asumsi yang hanya berdasarkan 'akal sehat' tentang sifat manusia (Burke, 2001: 172-174). *Kedua*, teori para ahli psikologi memberikan sumbangan terhadap proses kritik sumber. Agar otobiografi atau buku harian dapat digunakan secara tepat sebagai bukti sejarah, perlu dipertimbangkan usia sang penulis, posisinya dalam siklus kehidupan, maupun catatan mimpi-mimpinya (Erikson, 1968: 701-702). *Ketiga*; ada sumbangan dari para ahli psikologi bagi sejarah, yakni para ahli psikologi telah banyak memberi perhatian pada 'psikologi pengikut' di samping pada 'psikologi pemimpin'. Di samping itu beberapa ahli psikologi juga telah membahas hubungan antara apa yang disebut aspek 'psikologistik' motivasi dengan

aspek ‘sosiologistik’ motivasi, dengan kata lain apa yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai motif ‘publik’ dan motif ‘pribadi’ (Burke, 2001: 174).

Kemudian mengenai hubungan *Sejarah* dengan *Geografi*; dapat dilihat dari suatu aksioma bahwa setiap peristiwa sejarah senantiasa memiliki lingkup temporal dan spasial (waktu dan ruang), di mana kedua-duanya merupakan faktor yang membatasi fenomena sejarah tertentu sebagai unit (kesatuan), apakah itu perang, riwayat hidup, kerajaan dan lain sebagainya (Kartodirdjo, 1992: 130).

Mengenai kedekatan ilmu geografi dan sejarah tersebut ibarat sekutu lama sejak zaman geografiwan-sejarawan Yunani kuno Herodotus, bahwa sejarah dan geografi sudah demikian terkait ibarat terkaitnya pelaku, waktu, dengan ruang itu terpadu. Para sejarawan kini bisa mempertimbangkan teori daerah pusat (*central-place theory*), atau teori difusi inovasi ruang (*spatial diffusion of innovations*), maupun teori ‘ruang sosial’ (*social space*) (Hagerstrand: 1953: Buttimer: 1969). Kita hidup di era yang tidak tegas lagi garis-garis demarkasi disiplin ilmu dan terbukanya batas ranah intelektual, suatu zaman yang mengasyikan sekaligus membingungkan. Rujukan kepada Ellsworth Huntington, Mikhail Bakhtin, Pierre Bourdieu, Fernand Braudel, Michel Foucault dan sebagainya, dapat ditemukan pada tulisan-tulisan arkeolog, sejarah, maupun geografi.

Dengan demikian jelaslah bahwa peranan spasial dalam geografi distrukturasikan berdasarkan fungsi-fungsi yang dijalankan menurut tujuan atau kepentingan manusia selaku pemakai. Kemudian unit-unit fisik yang dibangun menjadi unsur struktural fungsional dalam sistem tertentu, ekonomi, sosial, politik, dan kultural. Sedangkan struktur dan fungsi itu bermakna dalam konteks tertentu, yaitu tidak lepas dari jiwa zaman atau gaya hidup masanya. Dengan demikian menjadi kesaksian struktur dalam kaitannya dengan periode waktu. Di sini hubungan dimensi geografi dengan sejarah yang tidak bisa dipisah-pisahkan secara kaku.

Berikutnya adalah hubungan *Sejarah* dengan *Ilmu Ekonomi*. Walaupun kita tahu bahwa sejarah politik pada dua atau tiga abad terakhir begitu dominan dalam historiografi Barat, namun ironisnya mulai abad 20, sejarah ekonomi dalam pelbagai aspeknya juga semakin menonjol, terutama setelah proses modernisasi di mana hampir setiap bangsa di dunia lebih memfokuskan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu proses industrialisasi beserta transformasi sosial yang mengikutinya menuntut pengkajian pertumbuhan

ekonomi dari sistem produksi agraris ke sistem produksi industrial (Kartodirdjo, 1992: 136).

Terbentuknya jaringan navigasi atau transportasi perdagangan di satu pihak dan pihak lain, jaringan daerah industri dan bahan mentah mengakibatkan munculnya suatu sistem global ekonomi. Dengan lahirnya sistem global ekonomi tersebut mempunyai implikasi yang sangat luas dan mendalam tidak hanya pada bidang ekonomi saja, tetapi erat hubungannya dengan bidang politik misalnya. Hal itu nampak dengan pertumbuhan kapitalisme, mulai dari kapitalisme komersial, industrial, hingga finansial. Ekspansi politik yang mendukungnya mengakibatkan timbulnya *the scramble for colonies*, persaingan tidak sehat yang menjurus ke konflik politik, perebutan jajahan, pendeknya makin merajalelanya imperialisme (Kartodirdjo, 1992: 137).

Sepanjang masa modern, yaitu sejak kurang lebih 1500, kekuatan-kekuatan ekonomis yang sentripetal mengarah ke pemusatan pasar dan produksi ke Eropa Barat, suatu pola perkembangan yang hingga Perang Dunia II masih tampak. Dari pertumbuhan sistem ekonomi global yang kompleks itu menurut Kartodirdjo (1992: 137) dapat diekstrapolasikan beberapa tema penting, antara lain:

- (1) proses perkembangan ekonomi (*economic development*) dari sistem agraris ke sistem industrial, termasuk organisasi pertanian, pola perdagangan, lembaga-lembaga keuangan, kebijaksanaan komersial, dan pemikiran (ide) ekonomi;
- (2) pertumbuhan akumulasi modal mencakup peranan pertanian, pertumbuhan penduduk, peranan perdagangan internasional;
- (3) proses industrialisasi beserta soal-soal perubahan sosialnya;
- (4) sejarah ekonomi yang bertalian erat dengan permasalahan ekonomi, seperti kenaikan harga, konjunktur produksi agraris, ekspansi perdagangan, dan sebagainya;
- (5) sejarah ekonomi kuantitatif yang mencakup antara lain *Gross National Product (GNP) per capita income*.

Sementara itu perlu diketahui bahwa pelbagai tema tersebut di atas memerlukan pula suatu metodologi yang menuntut kerangka konseptual yang lebih luas serta tidak terbatas pada pendekatan menurut konsep dan teori ekonomi saja. Dengan demikian jelas bahwa kompleksitas sistem ekonomi dengan sendirinya menuntut pula pendekatan ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan lain sebagainya. Untuk mengkaji fenomena ekonomis di negeri yang sedang berkembang perlu pula

dipergunakan ilmu bantu seperti; antropologi ekonomi, sosiologi ekonomi, ekonomi politik, ekonomi kultural, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu dapat dicakup apabila digunakan pendekatan sistem; dengan sendirinya diperlukan analisis yang mampu mengekstrapolasikan komponen-komponen sistem itu beserta dimensi-dimensinya.

Perlu diketahui bahwa dalam pendekatan sistem, kita berangkat dari konsep ekonomi sebagai pola distribusi alokasi produksi dan konsumsi; maka jelaslah bahwa pola itu berkaitan, bahkan sering ditentukan oleh sistem sosial serta stratifikasinya. Lebih lanjut jelas pula korelasinya faktor sosial itu dengan sistem politik atau struktur kekuasaannya. Selanjutnya dalam perkembangan sejarah ekonomi mengalami pula diferensiasi dan subspecialisasi, antara lain dengan timbulnya: (1) sejarah pertanian; (2) sejarah kota; (3) sejarah bisnis; (4) sejarah perburuhan; (5) sejarah formasi kapital.

Hubungan *Sejarah dengan Ilmu Politik*; dapat dilihat dari pernyataan “politik adalah sejarah masa kini, dan sejarah adalah politik masa lampau”. Dalam hal ini menunjukkan bahwa sejarah sering diidentikan dengan politik, sejauh keduanya menunjukkan proses yang mencakup keterlibatan para aktor dalam interaksinya serta peranannya dalam usaha memperoleh “apa”, ”kapan”, dan ”bagaimana” (Kartodirdjo, 1992: 148-149).

Di zaman sekarang ini sebenarnya sejarah politik masih cukup menonjol, akan tetapi tidak sedominan masa lampau. Hal ini sangat menarik bahwa pengaruh ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial sungguh besar dalam penulisan sejarah politik yang juga lebih tepat disebut *sejarah politik gaya baru*. Kartodirdjo (1992: 149) menambahkan bahwa lebih menarik lagi jika “polity” didefinisikan

... sebagai pola distribusi kekuasaan, maka jelaslah bahwa pola distribusi itu dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan kultural. Barang siapa menduduki posisi sosial tinggi, memiliki status tinggi, maka bagi dia ada kesempatan dan keleluasaan memperoleh bagian dari kekuasaan. Dia lebih mudah mengambil peranan sebagai pemimpin. Berdasarkan relasinya, ada sumber daya sosial-budaya untuk melakukan peranan politiknya, artinya menyebarkan pengaruhnya. Padanya ada pula otoritas sebagai alat utama untuk berperan politik.

Berbicara tentang pola distribusi kekuasaan, kita tidak dapat melupakan faktor kultural sebagai penentu. Sebab jenis otoritas dan struktur kekuasaan sangat dipengaruhi oleh orientasi nilai-nilai dan pandangan hidup para pelaku sejarah. Dengan demikian

kerangka konseptual ilmu politik menyediakan banyak alat untuk menguraikan pelbagai unsur politik, aspek politik, kelakuan aktor, nilai-nilai yang melembaga sebagai sistem politik, dan lain sebagainya (Kartodirdjo, 1992: 150).

F. Menuju *Rapprochement* Sejarah dengan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya

Suatu perkembangan yang sangat menarik dalam ilmu sejarah, adalah pelbagai arah perkembangan studi sejarah telah timbul pada abad ke-20 yang lalu, sehingga menciptakan kecenderungan-kecenderungan baru dalam bidang metodologi sejarah. Namun perlu juga disadari bahwa konsep tentang sejarah yang pada umumnya berlaku dalam profesi sejarah dewasa ini, sesungguhnya merupakan hasil pertumbuhan yang berabad-abad sejak zaman Herodotus, kemudian melalui pemikir-pemikir Rasionalisme, Romantisisme, Positivisme, dan Neo-Kantianisme sampai pada alam pikiran ilmu sosial yang humanistik.

Tanpa bermaksud mengecilkan arti dan peran bangsa Yunani kuno yang berjasa besar dalam menyusun ilmu pengetahuan secara sistematis, mungkin tidak berlebihan jika pada awalnya kelahiran ilmu sejarah itu diwarnai oleh tradisi intelektual bangsa Yunani kuno yang masih *inherent* dan bersifat *a-historis*. Hal ini terbukti dari persepsinya bahwa kehidupan manusia sebagai organisme tunduk kepada hukum alam, yaitu adanya proses berulang seperti halnya yang diyakini dalam filsafat Spekulatif (Ankersmit, 1987: 17). Pergerakan waktu mewujudkan pola siklis dalam kerangka mana tidak dikenal kejadian historis yang unik. Yang diperhatikan mereka bukan partikularisme, tetapi universalisme atau substansialisme. Substansialisme inilah yang mengembalikan segala perubahan kepada hukum alam atau faktor transendental dan metafisik. Begitu juga proses kehidupan manusia dikembalikan kepada stabilitas kondisi manusia dan prinsip kelakuannya. Mungkin pula hanya Herodotus sejarawan Yunani klasik yang berani menyimpang dari pola pikiran tersebut. Antara lain dengan menonjolkan makna dari kejadian-kejadian sendiri dengan segala keunikannya terutama melalui inkuiri yang sangat berharga melalui wawancara dengan orang-orang, mengunjungi monumen-monumen bersejarah untuk mendapatkan informasi bagi dirinya tentang segala hal (Barnes, 1963: 28).

Namun pikiran naturalistik Yunani klasik masih mempunyai kelanjutannya pada zaman Rasionalisme abad XVII. Bahkan menurut Rene Descartes (1596-1650), ilmu pengetahuan harus mampu mengambil faktor-faktor yang konstan atau ajeg sehingga dapat dikembalikan kepada hukum-hukum umum yang bersifat absolut. Dalil yang matematika yang mutlak itu menguasai seluruh universum, maka pengetahuan yang penuh kekuasaan mempunyai potensi menguasai secara luas. Tradisi Cartesian ini diperkokoh oleh tradisi sebelumnya yang dibangun oleh Francis Bacon (1561-1626) bersifat empirisme sehingga pada abad XIX Positivisme yang digagas Auguste Comte (1789-1857) mengembangkan perspektif *scientific* yang monistis — ialah bahwa hanya ada satu ilmu pengetahuan yang mampu membuat hukum-hukum. Dalam pengertian semacam ini tidak ada tempat bagi sejarah dan ilmu-ilmu humaniora lainnya (Kartodirdjo, 1990: 259). Sejarah yang terlahir pada zaman klasik inipun masih bersifat *ilmu lunak* dan sangat retorik, di mana pengaruh lingkungan sosiobudaya, mitos, dewa-dewa, serta legenda yang tidak didokumentasi terus menerus meresap dalam tulisan-tulisan sejarah klasik tersebut.

Keadaan semacam ini baru mengalami pencerahan ketika Leopold von Ranke (1795-1886) menulis *A Critique of Modern Historical Writers*. Ranke dianggap sebagai penumbuh historiografi modern yang menganjurkan sejarawan menulis apa yang sebenarnya terjadi atau *wie es eigentlich gewesen ist* (Wallerstein, 1997: 23), yang dikenal dengan sejarah kritis. Tidak lama kemudian lahir golongan Neo-Kantian Heidelberger (Baden) seperti Henrich Rickert (1863-1936), W. Windelband dan Wilhelm Dilthey (1833-1911) melahirkan apa yang dikenal dengan *historisme* sebagai unsur Romantisisme pada satu pihak, dan hasil perpaduan antara empirisme dan idealisme pada lain pihak.. *Historisme* memusatkan perhatiannya pada fakta dan peristiwa serta sejarah sebagai sambung-menyambung peristiwa-peristiwa dalam hubungan sebab akibat yang lebih kompleks. Ia membedakan ilmu-ilmu alam dengan ilmu-ilmu sosial dan kerohanian. Menurutnya kebudayaan manusia bertopang kepada nilai-nilai yang diidam-idamkan dan kepada dunia kenyataan (realitas) yang tiada henti-hentinya saling mempengaruhi. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan antara alam nilai yang dalam hakikat tidak nyata (tidak riil) tetapi berlaku, dengan alam relitas. Tetapi hubungan antara dua alam itu dipertautkan manusia yang kemudian memberikan arti

kepadanya. Kawasan yang demikian oleh Rickert disebut *pro-fisika*. Seperti dialektika Hegel, Rickert percaya bahwa setiap tese menghasilkan hetero-tese, sebab *sesuatu* memiliki *sesuatu yang lain* di sampingnya. Selanjutnya ditonjolkan sifat keunikan serta kontekstualisme peristiwa sekaligus relativitasnya.

Di bawah ini dibedakan antara Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu-ilmu Kemanusiaan menurut alairan Neo-Kantian dapat dilihat pada Tabel 1-1 berikut ini

Tabel 1-1
Perbedaan Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu-ilmu Kemanusiaan

A. Ilmu-ilmu Alam	B. Ilmu-ilmu Kemanusiaan
1. nomothesis	1. idiografis
2. generalisasi	2. keunikan
3. deskriptif-analitik	3. deskriptif-naratif
4. eksplanasi	4. interpretasi
5. kuantitatif	5. kualitatif
6. obyektif	6. subyektif

Sumber: Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1992, hlmn.261.

Dalam dikhotomi tersebut, kedudukan ilmu sosial mengambil tempat di tengahnya. Dengan demikian jelas bahwa kedudukan ilmu sososial lebih dekat pada ilmu alam daripada dengan ilmu-ilmu kemanusiaan. Sedangkan setiap disain riset termasuk sejarah, jelas memerlukan kerangka referensi yang bulat, yaitu menggunakan alat-alat analitis yang diduga kuat dapat meningkatkan kemampuan untuk menggarap data. Di sini jelas bahwa pengkajian sejarah memerlukan penyempurnaan yang terus-menerus dan lebih luas. Implikasinya jelas bahwa *rapprochement* antara ilmu sosial dan sejarah tidak bisa lagi dihindari, sekalipun akan berimpilikasi pula pada ranah metodologi. Perintisan ke arah *rapprochement* tersebut jika ditarik mundur ke belakang lebih jauh yakni sejak dimulai berkembangnya ilmu diplomatik oleh Mabilon (1632-1707) di mana dirasakan pentingnya kritik eksternal dan internal terhadap validitas dokumen. Di samping itu, sebab lain ilmu sejarah lebih mengharapkan *rapprochement* dengan ilmu sosial, karena jelas ilmu-ilmu sosial jauh lebih dekat dan lebih berdaya-guna jika dibanding dengan ilmu alam bagi ilmu sejarah, di samping sejarah itu sendiri di satu pihak adalah bagian integral sebagai ilmu sosial.

Secara rinci Kartodirdjo (1992: 120) mengemukakan sebab-sebab *rapprochement* atau proses saling mendekatnya antara ilmu sejarah dan ilmu-ilmu sosial disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- (1) sejarah deskriptif-naratif sudah tidak memuaskan lagi untuk menjelaskan pelbagai masalah atau gejala yang serba kompleks. Oleh karena obyek yang demikian memuat pelbagai aspek atau dimensi permasalahan, maka konsekuensi logis ialah pendekatan yang mampu mengungkapkannya.
- (2) pendekatan multidimensional atau *social scientific* adalah yang paling tepat untuk dipergunakan sebagai cara menggarap permasalahan atau gejala tersebut di atas.
- (3) ilmu-ilmu sosial telah mengalami perkembangan pesat, sehingga dapat menyediakan teori dan konsep yang merupakan alat analitis yang relevan sekali untuk keperluan analitis historis.
- (4) lagi pula, studi sejarah tidak terbatas pada pengkajian hal-hal informatif tentang apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana, tetapi juga ingin melacak pelbagai struktur masyarakat, pola kelakuan, kecenderungan proses dalam pelbagai bidang, dan lain-lain. Kesemuanya itu menuntut adanya alat analitis yang tajam dan mampu mengekstrapolasikan fakta, unsur, pola, dan sebagainya.

Pada bagian lain Kartodirdjo (1992: 129) yang mengemukakan tentang manfaat menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial tersebut, bahwa

...metodologi dan pendekatan ilmu sosial bagi sejarah sungguh-sungguh meningkatkan kemampuannya; maka akan lebih tampil unsur-unsur dan dimensi-dimensinya, juga jaringan yang kompleks. Metodologi tersebut memberi harapan besar bagi perkembangan sejarah karena meningkatkan produktivitasnya.

Dengan demikian jelas bahwa sejarah; (1) tidak semata-mata berupa kronik ataupun serialisasi kumpulan fakta yang menjadi suatu cerita sebagai penuangan imajinasi sejarawan yang kering ataupun dangkal; (2) perkembangan sejarah pada hakikatnya adalah perkembangan sosial ataupun perubahan sosial. Dengan demikian ilmu sejarah tidak hanya menggarap masa lampau saja, tetapi melalui analisis faktor-faktor tersebut ada kemampuan untuk membuat semacam proyeksi ke masa depan. Dengan demikian jelas pula bahwa implikasi metodologis dari konsep-konsep sejarah tersebut di atas, ialah merupakan metode *social-scientific*. Dalam hal ini kita ungkap kembali tentang suatu *rapprochement* antara sejarah dengan ilmu-ilmu sosial. Merupakan

suatu kecenderungan yang mendekatkan kedua kutub dari dihotomi kaum Neo-Kantian (Kartodirdjo, 1990: 263).

Menurut Sjamsuddin (1996: 198), bahwa perkembangan

kepesatan ilmu-ilmu sosial dan kajian sejarah, terutama yang terakhir ini dalam metodologinya, erat sekali hubungannya dengan usaha-usaha saling mendekat (*rapprochement*) antara sejarah dengan ilmu-ilmu sosial. Sejarah tidak mentabukan penggunaan konsep-konsep yang umum digunakan dalam beberapa ilmu sosial jika dianggap relevan. Selama penggunaan itu untuk kepentingan analisis sehingga menambah kejelasan dalam eksplanasi dan/atau interpretasi sejarah, maka penggunaan ilmu-ilmu sosial itu adalah wajar saja. Hal ini dapat ditandai dalam perkembangan historiografi pada abad ke-20 ini. Perluasan secara horizontal (keluasan) maupun vertikal (kedalaman) subyek sejarah yang harus dikaji dan diteliti menuntut pula peningkatan dan penyempurnaan metodologi sejarah sehingga menghasilkan historiografi yang bervariasi dalam segi tema-tema. Penggunaan konsep-konsep ilmu sosial membuat banyak pertanyaan penelitian yang bisa diajukan yang pada gilirannya jawaban-jawaban yang bisa diberikan. Penulisan sejarah tidak lagi semata-mata mengutamakan kekhususan, meskipun ini mustahil ditinggalkan sama sekali tetapi sudah tidak segan-segan menggunakan konsep ilmu-ilmu sosial lain, bahkan jika memang relevan menggunakan teori, hipotesis atau generalisasi-generalisasi. Pada gilirannya ilmu-ilmu sosial-pun menggunakan pendekatan sejarah.

Diharapkan dengan adanya *rapprochement* antara ilmu-ilmu sosial dan sejarah tersebut akan terhindar kemacetan-kemacetan dan kekeringan kajian dalam studi sejarah. Ibarat suatu sistem, di mana sejarah itu bersifat diakronis perlu juga diimbangi dengan pendekatan sinkronis, atau sebaliknya. Namun yang jelas dalam mendefinisikan unsur-unsur sistem tersebut yang saling pengaruh-mempengaruhi tidak ada satu faktor atau dimensi yang deterministik. Artinya unsur-unsur tersebut saling pengaruh-mempengaruhi dan saling ketergantungan, serta bersama-sama mendukung fungsi sistem itu. Dalam kata yang lebih pantas bahwa, di samping sifat ke-unikan dari peristiwa sejarah, perlu menjadi perhatian kita bahwa partikularitas fakta sejarah juga secara inheren mencakup generalitas atau universalitas.

Adanya pendekatan baru (*rapprochement*) tersebut jelas berimplikasi bagi metodologi studi sejarah. James Harvey Robinson (1912), David S Landes dan Charles Tilly. ed.(1971); serta Getrude Himmelfarb (1987); maupun Sartono Kartodirdjo (1992)

membandingkan pola Sejarah Lama (*The Old History*) dengan Sejarah Baru (*The New History*) dapat dibandingkan sebagai berikut:

No	Sejarah Lama (<i>The Old History</i>)	Sejarah Baru (<i>The New History</i>)
1.	Dinamakan sejarah konvensional, atau sejarah tradisional, maupun sejarah total (<i>total history</i>)	Dinamakan sejarah baru maupun <i>scientific history</i> atau <i>social-scientific history</i> .
2.	Lebih berorientasi pada peristiwa	Lebih berorientasi pada problema
3.	Ruang-lingkupnya sempit/terbatas, pada pengalaman & kehidupan	Ruang-lingkupnya luas mencakup segala aspek kehidupan manusia
4.	Temanya terbatas pada sejarah politik & ekonomi lama saja	Temanya luas dan bervariasi; sejarah kebudayaan, politik baru, perekonomian baru, agraria, pendidikan, intelektual, psycho history, sejarah lokal, sejarah etnis, dsb
5.	Para pelaku sejarah terbatas pada raja-raja, orang besar, pahlawan, petinggi militer.	Para pelaku sejarah luas dan bervariasi; semua lapisan masyarakat (bawah maupun elite)
6.	Pemaparannya deskriptif-naratif	Pemaparannya analitis-kritis
7.	Tanpa pendekatan ilmu-ilmu sosial yang memadai (monodisiplin maupun unidimensional) ilmu sosial.	Menggunakan pendekatan inter / multidisipliner (ekonomi, budaya, sosiologi, politik, psikologi, geografis, dsb)

G. Konsep-konsep Sejarah

Beberapa konsep yang dikembangkan dalam ilmu sejarah, seperti; (1) perubahan; (2) peristiwa; (3) sebab dan akibat; (4) nasionalisme; (5) kemerdekaan; (6) kolonialisme; (7) revolusi; (8) fasisme; (9) komunisme; (10) peradaban; (11) perbudakan; (12) waktu, (13) feminisme, (14) liberalisme, (15) konservatisme.

1. Perubahan

Konsep "perubahan" merupakan istilah yang mengacu kepada sesuatu hal yang menjadi "tampil berbeda". Konsep tersebut demikian penting dalam sejarah dan pembelajaran sejarah, mengingat sejarah itu sendiri pada hakikatnya adalah *perubahan*. Para sejarawan selalu menggunakan sebagian besar waktu mereka untuk menjelaskan perubahan. Perhatian yang dominan tidak dapat dihindari, melahirkan pertanyaan-

pertanyaan seperti; apakah transisi-besar dalam sejarah menunjukkan karakteristik-karakteristik pola yang khusus? Perubahan-perubahan apa yang terjadi? Dan, perubahan itu digerakkan oleh kekuatan tenaga apa?.

Pentingnya perubahan ini sesuai dengan pendapat Diane Lapp (1975: 86) ”*Change is the primer experience of life, a basic experience entirely new in the history of mankind-not simply change, but change at an increasing rapidation*”. Perubahan yang merupakan konsep dasar dan penting mutlak bagi siswa maupun mahasiswa, itu jelas perlu diketahui, dipahami dan diperoleh maknanya sebagai suatu dinamika kehidupan dalam *survival* peserta didik, terutama dapat memberi kesadaran menghadapi masa kini dan mendatang (Wiriaatmadja, 1998: 94). Kita sering mendengar pemeo ”Tidak ada di dunia ini yang abadi, kecuali perubahan itu sendiri yang abadi”. Bahkan seorang futuris ternama Amerika Serikat Alvin Toffler (1981) mengemukakan bahwa ”perubahan tidak sekedar penting dalam kehidupan, tetapi perubahan itu sendiri adalah kehidupan”.

2. Peristiwa

Konsep ”*peristiwa*” mempunyai arti sebagai suatu ”kejadian yang menarik” maupun ”luar biasa” karena memiliki keunikan. Dalam penelitian sejarah ”*peristiwa*” selalu menjadi obyek kajian, mengingat salah satu karakteristik ilmu sejarah adalah mencari keunikan-keunikan yang terjadi pada suatu ”*peristiwa*” tertentu, dengan penekanan pada tradisi-tradisi relativisme. Oleh karena itu para sejarawan di samping meyakini adanya universalitas dari karakteristik suatu peristiwa, juga sekaligus berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan manusia termasuk peristiwa akan lebih sesuai jika dikaji secara ideografik atau memiliki sifat kehususan yang partikularistik.

Pembelajaran sesuatu kajian terhadap peristiwa-peristiwa bagi peserta didik adalah penting, bukan sekedar untuk memahami peristiwanya itu sendiri secara obyektif, akan tetapi dapat ditelusuri baik sebab-sebab, proses terjadinya, dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari peristiwa itu sendiri. Bagi anak didik pemahaman akan *kesadaran historis* perlu dijelaskan melalui serangkaian aktivitas-aktivitas nyata yang bisa dianalisis. Sebab sejarah bukan sekedar merupakan tumpukan fakta-fakta belaka, tetapi telah tersusun sebagai satu kesatuan seperti yang telah direncanakan. Selain pengungkapannya bersifat deskriptif-naratif, tentang suatu peristiwa, perlu dicakup pula setting sosial

budaya peristiwa itu, kondisi-kondisi ekonomi-politik yang menjadi faktor-faktor kausalnya, serta dampak-dampak yang ditimbulkannya sebagai akibatnya.

3. *Sebab dan Akibat*

Istilah "sebab" merujuk kepada pengertian faktor-faktor diterminan fenomena pendahulu yang mendorong terjadinya sesuatu perbuatan, perubahan, maupun peristiwa berikutnya, yang sekaligus sebagai suatu kondisi yang mendahului peristiwa. Sedangkan "akibat" adalah sesuatu yang menjadikan kesudahan atau hasil suatu perbuatan maupun peristiwa sebagai dampaknya.

Dalam kajian dan eksplanasi sejarah "sebab" dan "akibat" itu perlu diperkenalkan kepada peserta didik. Pembelajaran sejarah tidak sekedar mempertanyakan *apa, siapa, di mana, kapan* peristiwa itu terjadi. Tetapi juga yang lebih penting serta melatih siswa maupun mahasiswa untuk berpikir kritis ke arah tingkat berpikir yang lebih tinggi, adalah "*mengapa hal itu terjadi*" (merujuk kepada sebab), dan "*bagaimana hal itu berlangsung*" (merujuk kepada proses), dan "*bagaimana dampaknya dari peristiwa itu*" (merujuk kepada akibat). Dalam suatu kerisauannya, Soedjatmoko (1976: 12) seorang ilmuwan sosial terkemuka Indonesia, pernah mencemaskan tentang kecenderungan "*ahistoris*" ilmu-ilmu sosial di Indonesia. Yang dimaksudkannya dengan pernyataan itu ialah, miskinnya dialog antara kenyataan empiris dan ide, antara gejala dan teori (Zed dalam Burke, 2001:x). Padahal dari sanalah sebenarnya kita memperoleh pengetahuan. Sebab dengan adanya kesadaran *historis* itu segala sesuatunya dapat dicari sebab-musebabnya, serta akibat-akaibatnya. Tidak ada sesuatu peristiwa yang terjadi begitu saja ataupun berdiri sendiri sendiri serta terjadi tanpa *sebab* dan *akibat* yang dapat dijelaskan.

Selain itu peserta didik lanjutan maupun mahasiswa, perlu memiliki kemampuan untuk membedakan "sebab umum" (*general cause* atau *fundamental cause*) yang merupakan faktor-faktor pendorong yang sesungguhnya mengerakkan terjadinya sesuatu peristiwa. Sedangkan "sebab langsung" atau "sebab khusus" (*direct-cause* atau *immediate cause*) hanya sebagai faktor pemicu belaka (Hoagland, 1960: 352-356). Bahkan lebih ekstrim lagi menurut Bury sebab langsung atau khusus itu bisa merupakan "kebetulan" maupun "tabrakan" (*collision*) yang mempunyai pengertian tidak terduga namun bermakna. Dengan demikian sesungguhnya-lah bahwa "tanpa sebab khusus" atau

”langsung”-pun peristiwa itu tetap akan terjadi, mengingat faktor-faktor penggerak lainnya terus bekerja sebagai pendorong terjadinya sesuatu dalam sebab-sebab umum, hanya mungkin waktunya tidak terjadi saat itu .

4. Nasionalisme

Konsep ”nasionalisme”, mempunyai arti secara sederhana merupakan rasa kebangsaan di mana kepentingan negara-bangsa mendapat perhatian besar dalam kehidupan bernegara. Bahkan menurut Kenneth Minogue dari *London School of Economic and Political Science* mengemukakan bahwa nasionalisme juga merupakan keyakinan bahwa setiap bangsa pada hakikatnya mempunyai hak dan kewajiban untuk membentuk dirinya sebagai negara (Minogue, 2000:695). Ia menambahkan bahwa secara umum menurutnya lahirnya nasionalisme muncul dalam suasana kebencian kosmopolitanisme yang mencuatkan emosi-emosi suatu bangsa terhadap bangsa lain yang merongrong karena memarjinalkan kebebasan dan kedaulatannya. Gagasan-gagasan romantik tentang kemanusiaan yang mendalam pada sosio-budayanya yang khas telah menimbulkan kekaguman nostalgia masa lalu yang jaya tentang kemajuan-kemajuan ekonomi, seni-budaya (lagu, puisi, cerita, drama dan kreasi-kreasi lain) yang dipahami sebagai pengejawantahan jiwa nasional, telah mendorong bangkitnya nasionalisme.

Begitu juga nasionalisme Indonesia, jika ditarik akar-akar secara formalnya, berawal dari berdirinya organisasi pergerakan nasional secara modern, yakni lahirnya ”Boedi Oetomo” dan ”Sumpah Pemuda”, yang secara teoretis-praktis dapat dikatakan bahwa pada saat itu bangsa (*nation*) kita Indonesia adalah suatu *imagined community* sebagai sebuah komunitas baru yang juga merindukan masa lalu seraya merancang masa depan yang penuh harapan. Anderson (1983: 15), menyebutnya sebuah bangsa atau *nation*, dalam pendekatan antropologis adalah *sebuah komunitas yang dibayangkan* atau *an imagined political community*, karena setiap anggota komunitas tersebut sesungguhnya tidak mengenal satu sama lainnya secara akrab, termasuk sebuah *nation* yang paling kecil sekalipun. Hanya dalam pikiran saja mereka hidup dalam kebersamaan.

Nilai-nilai nasionalisme semacam ini penting diajarkan kepada peserta didik melalui pembelajaran sejarah nasional khususnya, karena tanpa penanaman nilai-nilai tersebut mana mungkin segenap bangsa Indonesia dapat mempertahankan kesatuan dan

persatuannya. Dengan adanya pembelajaran Sejarah dan PPKn-pun ternyata fenomena-fenomena disintegrasi bangsa dan gerakan-gerakan SARA lainnya begitu menguat terjadi di Aceh, Kalimantan Barat (Sambas) dan Selatan (Sampit), Sulawesi Tengah (Poso), Maluku Selatan (Ambon), dan Papua, terutama di Era Reformasi pasca krisis multidimensional ini (Supardan, 2004: vi-vii). Dapat dibayangkan, bagaimana nasib bangsa Indonesia jika tidak dijamin pentingnya nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

5. Kemerdekaan/Kebebasan

Konsep "kemerdekaan" atau "kebebasan" adalah nilai utama dalam kehidupan politik bagi setiap negara-bangsa maupun umat manusia yang senantiasa diangung-agungkan sekalipun tidak selamanya dipraktikkan. Arti penting kemerdekaan ini dapat dilihat pada ketentuan yang mengatur hak-hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak-hak Manusia Universal yang disetujui dengan suara bulat oleh Majelis Umum Pererikatan Bangsa-bangsa tanggal 10 Desember 1948.

Ditinjau dari sejarahnya perintisan kemerdekaan atau kebebasan itu setidaknya sudah ada pada zaman Yunani kuno, kebebasan menjelma pada konsep *eleutheria* yang hanya dimiliki oleh pria dewasa sehingga hanya mereka yang memiliki tempat dalam kehidupan publik. Sedangkan pada zaman Romawi kebebasan diwujudkan sebagai konsepsi *libertas* yang menjadi kunci status seseorang (Monigue, 2000: 377). Kemudian pada awal zaman modern di Eropa, konsepsi kebebasan menjadi pokok pertentangan antara lembaga-lembaga monarki dan tradisi publik yang mulai muncul saat itu. Masing-masing pihak memiliki penafsiran sendiri tentang makna kemerdekaan /kebebasan itu. Bagi mereka yang mendukung monarki, kebebasan hanya berlaku dalam kehidupan pribadi namun tidak berlaku dalam kehidupan publik. Sementara itu bagi para ilmuwan politik seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan lain-lain, kebebasan adalah mutlak, roh hukum, dan harus dimiliki setiap individu. Kemudian pada zaman Montesquieu (1689-1755) para ilmuwan menilai kebebasan modern sebagai individualisme yang agak berbeda dengan kebebasan sipil yang diangungkan pada masa sebelumnya. Mungkin J.J. Rousseau (1712-1778), yang merupakan tokoh utama yang mengembangkan pandangan terakhir mengenai kebebasan itu. Seseorang baru bisa

dikatakan bebas jika ia dapat melakukan apa saja. Pandangan ini agaknya bertentangan dengan pandangan modern tentang kebebasan Isaiah Berlin (1956) yang melihatnya bahwa kebebasan harus diimbangi dengan tanggung jawab.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara konsep kemerdekaan ini lebih menitikberatkan pada komitmennya untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat dan tidak terikat oleh bangsa dan negara manapun termasuk penjajah sekalipun. Indonesia termasuk negara yang banyak memberikan inspirasi kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika, terutama dengan diadakannya Konferensi Asia-Afrika 1955, di mana memberikan pengaruh yang penting terhadap bangkitnya perlawanan bangsa Asia-Afrika lainnya untuk lepas dari penjajahan.

6. Kolonialisme

Konsep "kolonialisme" merujuk kepada bagian imperialisme yang terkandung dalam ekspansi bangsa-bangsa Eropa Barat ke berbagai wilayah lainnya di dunia sejak abad 15 dan 16. Pada puncak perkembangannya, kolonialisme merajalela pada abad 19. Di mana hampir setiap negara Eropa memiliki daerah jajahan di Asia, Afrika, dan Amerika. Kolonialisme bermula dari serangkaian petualangan liar mencari kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama. Kedaulatan wilayah-wilayah seberang diambil alih baik melalui paksaan militer ataupun tindakan-tindakan licik lainnya (Denon, 2000: 134). Kalaupun penguasa lokal masih bertahan, kekuasaan riilnya sudah jauh berkurang atau bahkan lenyap sama sekali. Begitu juga ketika kekuasaan kolonial makin kuat, mereka bertindak makin mencampuri kehidupan sehari-hari dalam dominasi politik, eksploitasi ekonomi, maupun penetrasi budaya. Tindakan inilah yang pada gilirannya menimbulkan perlawanan sekaligus mengawali transfer bertahap dari kekuasaan kolonial ke para pemimpin nasionalis yang heroik.

Namun perlu diketahui baik menurut Edward Said yang ditulis dalam karyanya *Orientalism* (1978) maupun Guha dalam *Subaltern Studies; Writing on South Asia History and Society* (1994), bahwa kolonialisme bukanlah suatu periode tertentu, maupun seperangkat mekanisme pemerintahan. Dengan demikian pencapaian situasi lebih baik pasca kolonialisme mensyaratkan lebih dari sekedar penerapan solusi-solusi teknis untuk mengatasi masalah-masalah yang kasat mata. Analisis pembela kolonialisme

maupun penganut nasionalisme atau anti-kolonialisme, digambarkan sebagai dua sisi koin yang sama, sebagai kumpulan teori evolusi sosial yang ternyata lebih banyak mengacaukan daripada memperjelas pengalaman manusia di masa lampau maupun sekarang. Maknanya kian kabur ketika etnik-etnik yang mencoba mempertahankan identitasnya dari tekanan homogenisasi negara-bangsa memperoleh kesempatan mengekspresikan diri yang lebih besar setelah berakhirnya Perang Dingin.

Terlepas dari apakah tuntutan yang dikumandangkan itu menyangkut pengakuan politik dan pelebagaan desentralisasi, atau pemberian hak-hak atas tanah maupun keuntungan material lainnya, spektrum nasionalisme etnik terus berkembang belakangan ini, sehingga pada titik ekstremnya mengakibatkan pertumpahan darah yang tidak kalah buruknya dari yang terjadi di masa kolonialisme. Perluasan istilah "kolonialisme" mengaburkan ikatannya dengan kapitalisme maupun imperialisme, sehingga setiap gerakan dari suatu kelompok pemukim ke dalam suatu wilayah yang telah dinyatakan milik kelompok lain dapat disebut sebagai "kolonialisme" ataupun "kolonisasi" (Denon, 2000: 138).

7. Revolusi

Konsep "revolusi" menunjuk suatu pada pengertian tentang perubahan sosial-politik yang radikal dan berlangsung cepat dan besar-besaran. Hal ini berbeda dengan konsep "evolusi" yang lebih mengacu ke perubahan yang berlangsung secara perlahan-lahan, kendatipun pasti. Diskriminasi dua konsep ini penting dipahami peserta didik agar mampu secara kritis membedakannya secara tepat dan akurat.

Kata "revolusi" untuk pertama kali muncul dalam teks politik di Itali abad 14 yang berarti waktu itu berkaitan dengan *penggulingan pemerintahan resmi* yang sebetulnya tidak begitu banyak berimplikasi perubahan politik mendasar. Namun sejak Revolusi Prancis 1789, terminologi "revolusi" semakin banyak dikenal dan selalu dihubungkan dengan perubahan mendadak serta berjangkauan luas (Gordon, 2000: 927). Dilihat dari aspek penyebabnya pada umumnya menurut Skocpol (1979) tidak muncul dari tingkat deprivasi atau disequilibrium yang parah. Revolusi justru terjadi ketika berbagai kesulitan — perang dan krisis keuangan negara — berhasil diatasi namun memiliki institusi-institusi yang rentan terhadap revolusi.. Menurut Skocpol yang

mengidentifikasi tiga ciri kelembagaan yang menyebabkan kerentanan revolusi tersebut, adalah:

1. Lembaga militer negara sangat inferior terhadap militer dari negara-negara pesaingnya.
2. Elit yang otonom mampu menentang atau menghadang implementasi kebijaksanaan yang dijalankan pemerintah pusat.
3. Kaum petani memiliki organisasi pedesaan yang otonom.

Elemen-elemen di atas dalam berbagai kombinasinya, telah berperan dalam memunculkan revolusi-revolusi besar di masa-masa modern: Perancis 1789, Meksiko 1910, Cina 1911, Rusia 1917, Indonesia 1945, Filipina 1986, Argentina 1989, Chile 1989, dan sebagainya

8. Fasisme

Konsep "fasisme" atau *facism* adalah nama pengorganisasian pemerintahan dan masyarakat secara totaliter oleh kediktatoran partai tunggal yang sangat nasionalis sempit, rasialis, militeristis, dan imperialis (Ebestein dan Fogelman, 1990: 114). Di Eropa, Italia merupakan negara pertama yang menjadi fasis pada tahun 1922 di bawah pimpinan Benito Mussolini, menyusul Jerman tahun 1933 dibawah pimpinan Adolf Hitler, dan kemudian Spanyol tahun 1936 diinspirasi oleh ajaran-ajaran Mikhael Bakunin.

Dilihat dari latar belakangnya, lahirnya fasis tidak lepas dari tradisi otoriter yang mendominasi selama beberapa abad lamanya, sedangkan gerakan-gerakan demokrasi di negara itu menjadi rapuh. Sementara itu sikap kepatuhan dan penyerahan diri rakyat kepada pemimpin demikian tinggi kepercayaannya. Dengan mudah penyelesaian para diktator totaliter ini adalah mengarahkan atau menyalurkan rasa permusuhan yang laten dari rakyat untuk melawan "*musuh-musuh yang nyata ataupun yang imajiner*" (Ebestein dan Fogelman, 1990: 115).

Keunikan fasisme juga terletak pada pertentangannya terhadap semua sektor kehidupan politik yang ada, baik itu yang ada di sayap kanan, sayap kiri, maupun tengah. Sifatnya anti liberal, anti komunis (dan adapula yang sifatnya anti sosialis yang sering disebut pula sebagai gerakan demokratis sosial), serta anti konservatif meskipun para

pendukung gerakan fasis ini bersedia mengadakan persekutuan sementara dengan kelompok-kelompok lain khususnya dengan sayap kanan. Keunikan lainnya adalah dalam gaya operasi organisanya. Mereka sangat mementingkan struktur estetis, simbol-simbol koreografi politik dan berbagai aspek romantik dan mistis lainnya. Gerakan fasis selalu bersuha memanfaatkan mobilisasi massa, yang selanjutnya akan disokong oleh militerisasi hubungan-hubungan politik demi menciptakan suatu partai yang militan. Tidak seperti golongan radikal lainnya, kaum fasis memberi penilaian positif terhadap penggunaan kekerasan, dan mereka sangat mengagung-agungkan prinsip maskulinitas dan dominasi kaum pria. Meskipun mereka menghendaki adanya masyarakat yang serba egaliter, mereka tetap menganggap perlu adanya elit khusus yang berhak mengatur semua sektor kehidupan dan sepenuhnya berkuasa terhadap masyarakat. Dalam hal ini kepemimpinan fasisme cenderung kepada kepemimpinan yang otoriter, kharismatik dan bergaya personal (Payne, 2000: 347).

9. Komunisme

Konsep "komunisme" pada dasarnya istilah ini merujuk kepada setiap pengaturan sosial yang didasarkan pada kepemilikan, produksi, konsumsi, swa-pemerintahan yang diatur secara komunal atau bersama-sama (Meyer, 2000: 143)..

Pada abad 19, pemikiran-pemikiran yang paling radikal dari gerakan sosialis yang saat itu tumbuh pesat adalah Marx dan Engels, yang menyebutnya diri mereka kaum komunis untuk membedakan dari kelompok sosialis lainnya yang mereka anggap kurang konsisten. Sehingga dengan demikian komunisme dalam pengertian sempit merujuk kepada kumpulan doktrin Marxis, atau kritik kaum Marxis terhadap kapitalisme dan teori liberal, serta ramalan mereka akan terciptanya revolusi proletariat yang akan menciptakan suatu masyarakat komunis yang mereka yakini akan bebas dari kemiskinan, kelas, pembagian kerja yang timpang, serta institusi-institusi pemaksaan dan dominasi.

Sedangkan dalam arti luas komunisme tidaklah semata-mata terfokus pada ajaran Marx, Lenin, maupun Stalin, melainkan merupakan suatu impian untuk menciptakan masyarakat ideal yang dapat mensejahterakan semua manusia melalui rangkaian program akumulasi modal anti kapitalis atau westernisasi secara cepat dengan melalui berbagai revisi ajaran Karl Marx (Meyer, 2000: 144). Dengan demikian bagi pemerhati ideologi ini

nampaknya pendapat umum yang beredar di Barat bahwa komunisme telah mati, adalah nampaknya terlalu prematur.

Ketika terjadinya pergolakan di Asia Tenggara pasca Perang Dunia II, tidak lepas dari pengaruh pertentangan antara blok komunis dan blok kapitalis yang selalu mengeksploitasi benih-benih pertentangan yang ada untuk kepentingan masing-masing. Blok kapitalisme atau Barat yang merasa cemas dengan perkembangan komunis di Asia Tenggara begitu cepat meluas, dengan segera Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower (Presiden USA ke 34, mantan komandan tertinggi pasukan Sekutu PD II) bersama-sama Robert A. Scalapino menggagas apa yang dikenalnya sebagai *Teori Domino*. Isi pokok dari *Teori Domino* tersebut bahwa jika salah satu negara Asia Tenggara jatuh dalam pelukan komunis, maka cepat atau lambat bangsa-bangsa Asia Tenggara lainnya akan jatuh pula pada pelukan komunis (Supardan, 1983: 12-15)..

10. Peradaban

Konsep "peradaban" atau *civilization*, merupakan konsep yang merujuk pada suatu entitas kultural seluruh pandangan hidup manusia yang mencakup nilai-nilai-norma-norma, institusi-institusi dan pola-pola pikir yang terpenting dari suatu masyarakat dan terwariskan dari generasi ke generasi. (Bozeman dalam Huntington, 1998: 41). Selain itu juga peradaban menunjuk kepada suatu corak maupun tingkatan moral, yang menyangkut penilaian terhadap totalitas kebudayaan. Jadi peradaban jauh melebihi luasnya dari suatu kebudayaan yang pengaruh mempengaruhi.

Dengan demikian sejarah umat manusia, pada hakikatnya adalah sejarah peradaban itu sendiri. Sebab tidak mungkin berbicara mengenai sejarah perkembangan manusia — yang membentang dari seluruh peradaban dari Mesir kuno dan Sumeria hingga Yunani-Romawi klasik, Meso-Amerika hingga peradaban Kristen, peradaban India, Cina, sampai peradaban Islam, — melalui kajian-kajian bidang lain, selain peradaban itu sendiri. Baik itu tinjauan para sosiolog (seperti Durkheim, Mauss, Weber, Sorokin), sejarawan (Toynbee, Braudel, Wallerstein), maupun antropolog (Kroeber, Eisenstadt, Bozeman, Bagby, Coulborn dan sebagainya). Eksplanasi sejarah jelas tidak mungkin melepaskan dari kajian tentang peradaban bangsa-bangsa di dunia. Apakah itu

yang sifatnya dinamis dari lahir sampai berkembang, maupun peradaban yang mengalami kemunduran sampai hancur.

Bagi Toynbee, sebuah peradaban yang sedang berkembang, merupakan respons terhadap tantangan-tantangan dan melampaui suatu periode pertumbuhan yang melibatkan kontrol terhadap lingkungan hasil dari kreasi kelompok minoritas yang kreatif, yang kemudian diikuti oleh suatu massa yang penuh tantangan, namun diikuti pula oleh komunitas bangsa yang universal, dan setelah itu mengalami suatu disintegrasi yang menuju kehancuran yang terkubur dalam tanah dan pasir-pasir. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Quigley bahwa gerak perkembangan peradaban melalui tujuh tahapan; (1) percampuran; (2) pergerakan; (3) perluasan; (4) masa konflik; (5) kekerasan universal; (6) keruntuhan; (7) invasi (Huntington, 1998: 44).

11. Perbudakan

Konsep "perbudakan" atau *slavery*, pada hakikatnya adalah suatu istilah yang menggambarkan suatu kondisi di mana seseorang maupun kelompok tidak mempunyai kedudukan dan peranan sebagai manusia yang memiliki hak asasi sebagai manusia yang layak. Konsep "perbudakan" ini demikian penting untuk diketahui para peserta didik, mengingat dalam sejarah peradaban manusia, sistem "perbudakan" tersebut demikian menggejala bahkan merebak hampir di setiap bangsa di dunia, apakah itu di zaman Yunani-Romawi kuno, Jahiliyah Timur Tengah, maupun Penjelajahan Samudera dengan "Penemuan Daerah-daerah Baru" oleh bangsa Eropa yang berimplikasi merajalelanya perbudakan atas kulit hitam oleh kulit putih, merupakan periode historis yang penting untuk dikenang sebagai manifestasi pelecehan hak asasi manusia terbesar dalam sejarah umat manusia..

Menurut Robert Ross dari *University of Leiden* bahwa terdapat 3 ciri dalam perbudakan sebagai penanda; *Pertama*, budak-budak adalah umumnya "orang luar" yang dibawa secara paksa untuk melayani tuan baru mereka. Atau mereka dengan cara tertentu dikeluarkan dari keanggotaan masyarakat mereka. Misalnya karena berhutang maupun dihukum karena melakukan tindakan kriminal. *Kedua*, setidaknya pada generasi pertama, budak adalah komoditas pasar dengan tingkat harga berapa-pun di mana komersialisasi hadir dalam bentuk-bentuk yang dikenal. Dengan kata lain terdapat "spesis" kepemilikan,

dan inilah yang membedakan budak melalui bentuk tenaga kerja paksa yang berbeda dengan tenaga kerja lainnya. *Ketiga*, budak memiliki pekerjaan khusus (yang secara umum adalah pekerjaan-pekerjaan kasar dan rendah) dalam pembagian kerja secara total (Ross, 2000: 965).

12. Waktu

Konsep "waktu" dalam hal ini (hari, tanggal, bulan, tahun, windu, dan abad) merupakan konsep esensial dalam sejarah. Bahkan bagi semua masyarakat, waktu merupakan parameter di mana kehidupan dibangun, diatur dan diselaraskan. Kerangka waktu ini bisa berwujud kalender, detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, musim, tahun, windu, abad, rentangan hidup dari kelahiran sampai kematian, kejadian-kejadian hidup pribadi, maupun kejadian-kejadian kolektif dalam masyarakat. Seperti halnya pemilihan umum, pemberontakan, kudeta, revolusi, kejuaraan dunia, upacara-upacara religius, semester perkuliahan, maupun jam buka sebuah bank atau sekolah, semuanya sebagai sebuah parameter, waktu bisa digunakan mengukur durasi — perhitungan waktu — pergerakan benda-benda angkasa, kejadian-kejadian diri manusia yang mirip berulang secara teratur, proses-proses dari serangkaian kejadian (Adam, 2000: 1096-1097).

Begitu pentingnya mengenai "waktu", yang digunakan dengan riset historis dan empiris dalam perspektif kronologis, fungsionalis, strukturalis maupun simbolis, secara alternatif ilmuwan/sejarawan bisa menggunakan penempatan subyektif dari saat kemarin, sekarang, dan akan datang. Di mana selalu spesifik-person ataupun kejadian itu selalu memiliki nilai keunikan bagi pengalaman pribadi bahkan nilai kolektifnya sebuah komunitas. Sebaliknya dalam pendekatan konstitutif ataupun interpretatif yang cenderung menekankan momen kreatif, fakta bahwa saat ini selalu lebih penting daripada waktu-waktu yang lalu. Bahwa waktu adalah rentetan kejadian atau *constitutive of events* (Adam, 2000: 1097). Sebab waktu dapat berfungsi sebagai alat peretukan yang abstrak, waktu dapat dijual, dialokasikan, dan dikuasai. Dengan demikian 'clock time' tidak bisa dilepaskan dari hubungannya dengan kekuasaan dan memiliki nilai penting bagi semua orang.

Mengenai pentingnya pemahaman tentang "waktu" menurut Sztompka (2004: 58-59) terdapat enam fungsi waktu; (1) sebagai penyelaras tindakan; (2) sebagai koordinasi;

(3) sebagai bagian dalam pentahapan/rentetan peristiwa; (4) menepati ketepatan; (5) menentukan ukuran; (6) untuk membedakan suatu masa tertentu dengan lainnya. Dengan demikian waktu tidak sekedar alat atau instrumen yang menakjubkan, tetapi waktu sebagai nilai pada dirinya sendiri, menjadi variabel independen, variabel utama, faktor diterminan dalam kehidupan sosial kita, seperti yang dikatakan Barbara Adam dalam tulisannya "*Time and Social Theory*" bahwa

Kita mengetahui peristiwa di masa lalu dengan mencatat, membayangkan peristiwa kini secara langsung, dan mengetahui peristiwa masa lalu hanya di dalam imajinasi kita. Kejadian masa lalu telah ditentukan, kejadian masa kini akan ditentukan, dan kejadian masa mendatang belum ditentukan. Masa lalu tak dapat lagi dipengaruhi, masa kini sedang dipengaruhi, dan masa depan hanya secara potensial yang dapat dipengaruhi (Adam, 1990a: 22).

13. *Feminisme*

Istilah "feminisme" adalah nama suatu gerakan emansipasi wanita dari subordinasi pria. Gerakan ini tidak sekedar mempertanyakan ketidaksetaraan wanita dengan pria, melainkan suatu gerakan struktur ideologis yang tertanam dalam-dalam yang membuat kaum wanita selalu tidak diuntungkan oleh kaum pria. *Patriarki* adalah salah satu struktur itu, dan kontrak sosial — yang begitu berpengaruh dalam memberikan pembenaran pada lembaga-lebaga politik Barat — adalah jenis yang lain. Wanita memang tidak ingin diidentikkan dengan pria, tetapi berusaha untuk mengembangkan bahasa, hukum, dan mitologi yang baru dan khas bersifat feminin (Lechte, 2001: 247).

Menurut Maggie Humm (2000: 354), semua gerakan feminis mengandung tiga unsur asumsi pokok berikut ini: *Pertama*; gender adalah suatu konstruksi yang menekan kaum wanita, sehingga cenderung menguntungkan pria; *Kedua*, konsep patriarki (dominasi kaum pria dalam lembaga-lebaga sosial) melandasi konstruk tersebut; *Ketiga*, pengalaman dan pengetahuan kaum wanita harus dilibatkan untuk mengembangkan suatu masyarakat non-seksis di masa mendatang. Dengan demikian premis-premis tersebut mewarnai dua agenda utama teori feminis, yakni: *perjuangan* untuk mengikis stereotip gender, dan *perbaikan konstruksi sosial* demi membela kepentingan kaum wanita yang selanjutnya diejawantahkan sebagai model-model feminis baru.

Perlu diketahui bahwa, meskipun tokoh perintis teori feminisme ini Mary Wollstonecraft (1759-1797) telah begitu jauh berlalu, sesungguhnya istilah feminis itu sendiri jauh sebelumnya sudah ada, dan perintisan gerakan ini juga jauh sebelumnya sudah dilakukan. Misalnya Christine de Pizan (1354-1430) seorang wanita Prancis yang menulis *The Book of the Cities of Ladies* (1405) yang terkadang digambarkan sebagai sebuah utopia feminis awal (Losco dan William, 2003: 476). Beberapa pejuang feminis lainnya seperti Luce Irigaray yang dikenal karyanya *Speculum of the Other Woman* (1974), *This Sex Which is Not One* (1988), *Culture of Difference* (1990). Kemudian Michele Le Doeuff yang dikenal karyanya *The Philosophical Imaginary* (1980) dan *Hipparchia's Choice* (1989). Sedangkan Carole Pateman dikenal melalui karyanya *Participation and Democratic Theory* (1970), *The Sexual Contract* serta *The Disorder of Women: Democracy, Feminism, and Political Theory* tahun 1989 (Lechte, 2001: 248-267). Untuk Indonesia, gerakan feminisme mulai diperjuangkan oleh R.A. Kartini (1879-1904) yang surat-suratnya diterbitkan dalam judul *Door duisternis tot licht* atau terjemahan dalam bahasa Indonesinya “*Habis Gelap Terbitlah Terang*” oleh Armijn Pane.

14. Liberalisme

Konsep “liberalisme” mengacu kepada sebuah doktrin yang maknanya hanya dapat diungkapkan melalui penggunaan kata-kata sifat yang menggambarkan nuansa-nuansa khusus. Dua kata itu sifat di antaranya yang paling terkenal adalah liberalisme sosial/politik dan liberalisme ekonomi (Barry, 2000: 568). Pada umumnya orang menafsirkan pengertian “liberalisme” merujuk kepada kebebasan seluas-luasnya. Sehingga secara tradisional konsep tersebut menyatakan bahwa keberadaan individu mendahului masyarakat, karena itu bentuk-bentuk politik harus menghormati kenyataan ini dengan menyebarkan perasaan aman, di mana individu bebas mengejar tujuan-tujuan pribadinya. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan dalam pluralisme tujuan sehingga tak seorangpun memiliki hak istimewa, dan menuntut hukum dan negara demi melindungi kerangka institusional dan terjaminnya keadilan bagi semua orang.

John Locke (1690) dapat dikatakan sebagai pelopor liberalisme modern yang berpendapat bahwa pemerintah terikat secara hukum alamiah untuk melindungi hak-hak

individu, dan tidak tunduk pada hukum moral. Bahkan lebih lanjut dalam liberalisme rakyat dapat tidak patuh jika pemerintah melanggar batas-batas individualisme yang ditetapkan oleh moralitas. Perkembangan selanjutnya liberalisme mendapat pengaruh dari masa Pencerahan (*Enlightment*) Eropa, di mana dalam pencerahan ini jauh lebih rasional yang secara eksplisit mengharuskan seluruh tatanan sosial mengalami uji penalaran yang abstrak, yang tidak dicampur-adukan dengan pandangan tradisional. Sejak Voltaire dan selanjutnya liberalisme Revolusi Prancis yang menalami pergeseran dari empirisme David Hume dalam dan Adam Smith (1776) yang memiliki ciri khas dalam mengidentifikasi kebebasan dari pertumbuhan spontan lembaga-lembaga pasar dan kerangka hukumnya. Bentuk liberalisme ini hanya sedikit memberi ruang bagi pemerintah, mengingat “*invisible hand*” dari sistem pertukaran telah dianggap mampu membangkitkan benda publik yang terlepas dari tindakan penonjolan diri dari pihak-pihak swasta.

Mungkin sejak abad 19, liberalisme mulai dihubungkan secara eksplisit dengan *laissez faire* dan *utilitarianisme*, serta dimensi-dimensi moralnya dikaitkan dengan upaya pencapaian kebahagiaan Jeremy Bentham dalam *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789), dan John Stuart Mill dalam *On Liberty* (1859) yang menganggap dirinya sebagai *utilitarian liberal*. Sedikit berbeda dengan pada awal abad 20, konsep liberalisme mulai mengambil orientasi sosial dan negara dibebani tugas untuk memenuhi persyaratan terciptanya kehidupan yang baik. Dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran L.T. Hobhouse (1911) doktrin liberalisme Inggris mulai terkait dengan munculnya negara kesejahteraan. Begitu juga ahli-ahli teori intervensi ekonomi seperti John Maynard Keynes dalam *Essay in Persuasion* (1936) dapat mengklaim sebagai pendukung liberalisme, meskipun mereka menolak doktrin liberal tradisional bahwa pasar bebas bisa mengoreksi dirinya sendiri. Dan, pada saat-saat terakhir ini liberalisme telah meninggalkan banyak utilitarisnisme, hal ini nampak terutama karena kedekatannya dengan teori keadilan sosial John Rawls dalam *Theory of Justice* (1971) yang berpendapat bahwa keadilan adalah kebaikan utama dari masyarakat dan tuntutannya harus dipenuhi sebelum kondisi kesejahteraan ekonomi menjadi relevan dari kebijakan pemerintah.

15 Konservatisme

Istilah “konservatisme” merujuk kepada doktrin yang meyakini bahwa realitas suatu masyarakat dapat ditemukan pada perkembangan sejarahnya, dan karena itu sebaliknya pemerintah membatasi diri dalam dalam campur tangan terhadap perilaku kehidupan masyarakatnya, dalam arti tidak boleh melupakan akar-akar sejarahnya (Minogue, (2000: 1666). Doktrin ini muncul tahun 1790-an sebagai reaksi terhadap proyeksi rasionalis dan Revolusi Prancis yang dikemukakan oleh Edmund Burke dalam judul *Reflections on the Revolution in France* (1790). Ia mengkritik Revolusi Prancis 1789, yang menurutnya bahwa Revolusi Prancis berbeda dengan Revolusi Industri dan Revolusi Amerika. Sebab menurut pandangannya Revolusi Prancis “*tidak membela kebebasan-kebebasan tradisional, bahkan menghancurkan suatu tatanan yang telah lama mapan, dan membawanya pada penyalahgunaan kekasaan elitis atau berujung dengan pemerintahan Teror*” (Losco, dan Williams: 2005; 316).

Walaupun dalam konservatisme berpandangan bahwa masyarakat itu sebagai sesuatu yang terus berproses, tetapi proses itu juga tidak boleh membuat tercerabut dari akar-akarnya. Di Inggris konservatisme berkembang pesat melalui Partai *Whig* pada akhir 1830-an, yakni dengan tampilnya partai Konservatif (*Tory*). Doktrin konservatisme menyatakan bahwa partai-partai politik harus memberi respons terhadap perubahan lingkungan, meskipun doktrin ini dikenal dengan kehati-hatiannya dalam melakukan perubahan apa-pun. Meskipun demikian konservatisme bukan hanya merupakan doktrin, melainkan juga disposisi tentang manusia. Artinya sampai batas tertentu konservatisme adalah sikap dasar yang ada pada di hampir semua manusia (Minogue, 2000: 167).

Partai politik Konservatif Inggris memiliki pengaruh besar, sejak di bawah kepemimpinan Disraeli, partai ini mengorganisir dan memperkokoh diri sehingga menjadi figur handal dalam percaturan politik. Pada abad 19 Partai Konservatif berada pada jajaran terdepan dalam upaya mempertahankan monarkhi saat dirongrong oleh upaya pemisahan diri Irlandia. Kemudian setelah keberhasilan penciptaan negara kesejahteraan oleh Attlee dari tahun 1945 hingga 1951 Winston Churchill dan Macmillan meneruskannya lebih lanjut. Namun pada tahun 1976, Margareth Thatcher dari sayap kanan yang berkuasa mulai menyusutkan peranan negara kesejahteraan yang dianggap memboroskan uang negara. Namun demikian di Inggris sendiri partai ini sering

mendapat kritik keras, seperti yang dilakukan oleh seorang ekonom Frederick A. Hayek dalam karyanya “*The Constitution of Liberty* (1960), pada dasarnya kaum konservatisme tidak dapat menawarkan suatu alternatif atau arah di mana kita bergerak.

H. Generalisasi-generalisasi Sejarah

Sebagaimana dikemukakan pada tulisan sebelumnya, bahwa dalam sejarah berupaya mencari keunikan-keunikan peristiwa sebagai ilmu yang bersifat idiografis dan partikularistik, kualitatif-subyektif yang terjadi oleh karena itu implikasinya betapa sulitnya membuat generalisasi-generalisasi historis. Namun demikian kesulitan tersebut setidaknya tereduksi oleh pendapat Banks (1977: 99-100) bahwa dalam pembuatan generalisasi sejarah dapat dibedakan atas tiga tingkatan, yakni:

1. *High order generalization*, ialah generalisasi yang juga disebut *laws* atau *principles*, yaitu generalisasi yang pemakaiannya secara universal.
2. *Intermediate level generalization*; ialah generalisasi yang digunakan di kawasan tertentu, ataupun di daerah kebudayaan tertentu.
3. *Low order generalization*, yaitu generalisasi yang didasarkan atas data dari dua atau lebih tentang sekelompok masyarakat dari suatu kawasan tertentu yang bersifat lokal, dan generalisasi inilah yang paling memungkinkan dibuat dalam sejarah..

Adapun generalisasi-generalisasi sejarah yang digunakan di sini seperti; (1) perubahan; (2) peristiwa, (3) sebab dan akibat, (4) nasionalisme, (5) kemerdekaan, (6) imperialisme; (7) revolusi; (8) fasisme; (9) komunisme (10) peradaban (11) perbudakan, (12) waktu; (13) feminisme; (14) liberalisme; (15) konservatisme.

1. Perubahan:

Jika kita hanya mengakui gerak sejarah berdasarkan siklus, maka tidak akan banyak terjadi *perubahan-perubahan* yang berarti dalam dinamika masyarakat lokal, nasional, maupun global. Padahal perubahan yang terjadi pada masyarakat sekarang ini demikian cepat, banyak lompatan, dan banyak hal yang tidak terduga.

2. *Peristiwa*

Sebenarnya, jika kita mengakui validitas gerak sejarah yang dikemukakan Giambattista Vico, di samping beberapa *peristiwa* sejarah itu kecenderungannya akan terjadi pengulangan yang serupa, tetapi juga akan terjadi suatu proses kemajuan yang lebih berarti daripada gerak sejarah yang betul-betul hanya bersifat siklus belaka (Al-Sharqawi, 1986: 147).

3. *Sebab dan Akibat*

Munculnya peradaban di lembah Sungai Nil (Mesir kuno) yang bernilai tinggi sebagai khasanah budaya dunia, *disebabkan* adanya tantangan yang cukup keras bagi masyarakat Mesir dan berperannya kaum elite minoritas yang kreatif, *akibatnya* mereka berupaya untuk merespons tantangan itu dalam bentuk peradaban yang bernilai agung (Lauer, 2003: 53).

4. *Nasionalisme*

Menurut Jan Romein, gerak kemajuan dan keberlanjutan perubahan sejarah (sosial-budaya), tidak bisa disamakan dengan evolusi biologis, melainkan kebalikannya. Mengingat manusia memiliki sejumlah kemampuan akal-pikirannya sebagai makhluk yang lebih sempurna. Oleh karena itu dalam dialektika kemajuan perkembangan *nasionalisme* pun tidak berjalan secara evolutif, tetapi maju dengan lompatan-lompatan yang dadakan seperti revolusi (Wertheim, 1976: 95-96)

5. *Kemerdekaan*

Menurut Wittfogel terdapat hubungan yang erat dengan berkembangnya budaya hidrolis yang berukuran besar, khususnya sistem irigasi, dengan munculnya struktur sosial yang sentralistik, otokratik, dan birokratik sebagaimana sering disebut sebagai "despotisme oriental". Dengan membangun budaya hidrolis bendungan dan irigasi besar, masing-masing penguasa akan merasa *bebas* atau *merdeka* dengan mengembangkan sistem budaya hidrolis tersebut (Wertheim 1976: 17; Kaplan dan Manners, 1999: 95).

6. *Kolonialisme*

Merajalelanya *kolonialisme* Barat pada abad 19 terhadap Asia-Afrika-Amerika Latin, sebenarnya tidak bisa dilepaskan sebagai dampak "penemuan-penemuan" daerah baru ataupun hasil eksplorasinya terhadap daerah-daerah lain yang belum mereka kenal sebelumnya (Denoon, 2000: 134).

7. *Revolusi:*

Revolusi Prancis yang terjadi tahun 1789, memiliki dampak besar bagi kemenangan kaum borjuis di Eropa Barat maupun bangkitnya nasionalisme serta perlawanan terhadap imperialisme sesama bangsa Eropa khususnya (Furet dan Richet, 1989: 480).

8 *Fasisme:*

Lahirnya fasisme di Itali maupun Jerman menjelang Perang Dunia II, itu tidak lepas dari pengaruh Krisis Ekonomi Dunia akibat malapetaka Perang Dunia I yang menimbulkan krisis ekonomi (Malaise) yang sangat parah bagi dunia (Payne, 2000: 347)..

9. *Komunisme*

Makin meluasnya bahaya *komunisme* di Asia Tenggara, mendorong para ahli strategi dan pemikir Amerika Serikat untuk menggagas suatu teori baru yang dikenal dengan Teori Domino (Supardan, 1983: 21).

10. *Peradaban*

Beberapa pusat peradaban tertua seperti Mesir kuno, Mesopotamia, India kuno, Cina kuno, pada umumnya lahir ataupun muncul sebagai respons atas tantangan dan kesadaran minoritas kreatif yang terjadi di beberapa lembah sungai-sungai besar (Toynbee, 1961).

11. *Perbudakan*

Ketika kolonialisme dan imperialisme merajalela, sistem perbudakan-pun di beberapa wilayah (Afrika, Asia, maupun Amerika Latin) berkembang dengan pesatnya (Ross, 2000: 965)..

12. Waktu

Studi tentang *waktu* dapat berfungsi baik sebagai kerangka eksternal untuk mengukur peristiwa dan proses, menata kesemerawutan terjadinya peristiwa dan proses demi orientasi manusia atau mengkoordinasikan tindakan individu dan sosial secara "*kuantitatif*" (dinyatakan seperti oleh; jam, hari, tanggal, bulan tahun, abad) yang memungkinkan kita mengenal perbandingan kecepatan, interval, rentangan, dan sebagainya), maupun untuk mentukan kerangka internal secara "*kualitatif*" (yang dinyatakan berlangsung lebih lama atau lebih sebentar, lebih lambat atau lebih cepat, dan sebagainya) (Adam, 1990a: 23) .

13. Feminisme

Teori-teori feminisme pada awalnya bersifat interdisipliner yang merangkum beberapa diskriminasi dan ketimpangan sosial antara pria dan wanita di berbagai bidang sosial-budaya, seperti; sejarah, filsafat, antropologi, politik, ekonomi dan seni. Selanjutnya berkembang dalam beberapa tema yang menonjol seperti reproduksi, representasi, dan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Perkembangan selanjutnya yang mencolok adalah munculnya konsep-konsep baru seperti seksisme dan esensialisme yang dimaksudkan untuk menggugat diskriminasi sosial terhadap ilmu pengetahuan yang berkembang (Humm, 2000: 354)..

14. Liberalisme

Liberalisme secara metodologis meragukan penjelasan teori-teori holistik ataupun kolektivisme. Mereka lebih mengasosiasikan dengan gerakan-gerakan *laissez-faire* dan menolak intervensi pemerintah serta implikasi-implikasi moral yang mengahruskan memperhatikan yang lemah. Selain itu, mesti tidak menyangkal legitimasi dan prosedur-prosedur demokratis, kaum liberal tidak bersedia mempertaruhkan makna hakiki individu dengan membuka pintu selebar-lebarnya pada kekuatan mayoritas (Barry, 2000: 571).

15. *Konservatisme*

Pada umumnya pengikut *konservatisme* adalah para orang tua yang sudah memiliki pandangan dan sikap mapan mengenai apa yang harus diutamakan dalam hidup. Aliran ini menjunjung tinggi sopan santun, meskipun hal itu mungkin irasional karena hal-hal tersebut dianggapnya sebagai jangkar yang akan mencegah seseorang bertindak semaunya. Oleh karena itu daya tarik konservatisme di Inggris sampai sekarang masih luas khususnya bagi "golongan tua" tetap besar. Mereka beranggapan bahwa suatu masyarakat yang tidak memiliki elemen *konservatisme*, di satu sisi tidak akan bertahan lama, walaupun bagi banyak orang di sisi lain bisa dianggap stagnan (Minogue, 2000: 167).

I. Teori-Teori Sejarah

Teori merupakan unsur yang sangat esensial dalam kajian tentang suatu fenomena baik pada masa lalu maupun sekarang. Namun untuk ilmu sejarah, kedudukan teori menjadi menimbulkan perdebatan sengit, terutama antara aliran empirisme dan idealisme, dan khususnya mengenai penerapan hukum umum (*general law*) dan teori generalisasi (*generalizing theory*). Menurut golongan Idealis (terutama Neo-Kantian seperti Wilhelm Dilthey, Henrich Rickert, Windelband, Max Weber, serta Neo-Hegelian seperti Benedetto Croce, R.G. Collingwood), bahwa ilmu-ilmu alam (*natural sciences*) dan kajian-kajian manusia (*human studies*) termasuk *humaniora*, merupakan jenis-jenis olahan intelektual yang sama sekali berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya. Dikatakan berbeda karena jika ilmu-ilmu alam itu bertujuan untuk menemukan hukum-hukum umum (*general laws*) dan bersifat nomotetik. Sedangkan sejarah bertujuan untuk menegakkan dan mendiskripsikan individu dan fakta-fakta unik serta peristiwa-peristiwa yang bersifat ideografik. Kemudian ilmu-ilmu alam itu bersifat "obyektif", yang bisa dilakukan berbagai metode observasi langsung maupun eksperimen-eksperimennya. Sedangkan dalam kajian-kajian kemanusiaan (termasuk sejarah) itu "subyektif" yang hanya dilakukan atas metode interpretasi dan pemahaman dan "Verstehen" menurut Dilthey dan Weber serta berpikir ulang (*rethinking*) menurut Collingwood (Sjamsuddin, 1996: 35).

Menurut kelompok yang anti teori, sejarah teoretis adalah sejarah yang spekulatif dan itu harus diserahkan kepada para ahli filsafat (Barzun, 1974). Selain itu juga menurut kelompok anti teori tersebut bahwa kebudayaan manusia itu begitu kaya dan beragam sehingga memiliki keunikan masing-masing dari setiap tempat dan zamannya. Oleh karena itu model-model sejarah dan tingkah laku manusia yang dijelaskan secara umum adalah penipuan belaka. Adapun tugas sejarawan adalah merekonstruksi peristiwa-peristiwa serta situasi-situasi menurut keunikan individual dan interpretasi-interpretasi mereka hanya berlaku untuk serangkaian kondisi-kondisi tertentu saja. Tidak ada manfaatnya membuat komparasi situasi-situasi sejarah yang dipisahkan oleh waktu dan tempat (Tosh, 1984; 131). Lebih keras lagi sikap anti teori ini juga dikemukakan oleh David Thomson maupun G.R. Elton. Bagi Thomson (Tosh, 1984: 132) bahwa "Sikap sejarah menurut definisinya adalah bermusuhan dengan pembuatan sistem (*system-making*)" Thomson berpandangan seperti ini karena ia adalah pengikut yang tidak menyukai filsafat sejarah spekulatif yang tidak menghargai keunikan gerak sejarah. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Elton bahwa menempatkan sejarah dalam upayanya membuat teori-teori adalah sama halnya dengan menempatkan sejarah dalam hubungan yang tergantung pada ilmu-ilmu sosial. Atau para sejarawan teoretisi adalah perongrong/pengganggu otonomi disiplin sejarah. Sebab menurutnya, dalam bentuknya yang tidak lemah, sejarah memberikan obat penawar yang paling ampuh terhadap pembentuk-pembentuk sistem (*system builders*) di antara ahli-ahli ilmu sosial yang menawarkan penyelesaian-penyelesaian yang segera serta tidak ragu-ragu dalam permasalahan kehidupan manusia yang sangat kompleks (Elton, 1969).

Sebaliknya golongan *empiris* berpendapat bahwa walaupun terdapat perbedaan dalam metode, sebenarnya harus mampu menunjukkan pengetahuan yang benar dan sejarah-pun harus mengikuti aturan yang sama (Lubaz, 1963-64: 3). Mereka mengemukakan bahwa besarnya tuduhan-tuduhan yang merendahkan pendukung teoretisi itu hanyalah atas dasar prasangka belaka. Bahkan kecenderungan-kecenderungan negatif yang dimiliki oleh kaum "tradisionalis" jika dibiarkan dan tidak terkendali hanya akan menimbulkan akibat yang lebih buruk serta terjadinya "pemiskinan" pemahaman sejarah (Tosh, 1984: 133). Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa dalam penulisan sejarah itu tidak sepenuhnya dan semuanya

menekankan "keunikan" semata-mata, di mana para sejarawan-pun membuat keumuman-keumuman seperti membuat kategori-kategori, konsep-konsep, serta generalisasi-generalisasi dari peristiwa sejarah.

Para teoretisi juga beranggapan bahwa tidak ada salahnya studi komparasi itu dilakukan jika memang bermanfaat seperti penyusunan model-model masyarakat industri, agraris, ataupun feodal, teknologis, dan sebagainya. Dengan demikian, tidak benar pula jika sejarah diorientasikan pada kajian keunikan individual semata-mata, melainkan juga pada kajian kelompok (kolektif) seperti nasionalitas, budaya, agama, dan komunitas. Sebab dengan memberikan identitas-identitas yang lebih besar akan dapat memberikan arti pada mereka sebagai makhluk sosial. Selain itu juga dengan pembentukan teori tidak berarti akan menghapuskan kemerdekaan dan peranan individu. Justru dengan pengembangan teori akan mencari untuk menjelaskan kendala-kendala yang membatasi kemerdekaan individu. Sebaliknya jika sejarawan mempertahankan suatu fokus eksklusif pada pikiran-pikiran dan perbuatan para individu seperti yang sering dikaji oleh sejarawan naratif politik atau diplomasi, hal ini hanya akan menemukan sesuatu yang hanya berisikan sesuatu deskripsi kronologis maupun peristiwa-peristiwa yang tidak terduga (Berkhofer, 1969: 271-272; Tosh: 1984: 135). Selanjutnya menurut sejarawan Indonesia Sartono Kartodidjo (1990: 260-264; 1992: 120-156), bahwa justru dengan penggunaan teori-teori sosial melalui fenomena *rapprochement*, adalah merupakan titik tolak (*point of departure*), di mana hasil karya sejarah akan dapat memodifikasi teori-teori itu, membentuk teori-teori baru, serta menempatkan ilmu sejarah sejajar dengan ilmu-ilmu sosial daripada sebagai sub-ordinasi sejarah pada ilmu-ilmu sosial.

Reaksi keras dari teoretisi lainnya juga dikemukakan oleh Carl G. Hempel dalam tulisannya *Explanation and Laws* (Gardiner, 1959), dan Cristopher Lloyd dalam *Explanation in Social History* (1988) yang mengemukakan bahwa setiap penjelasan dalam sejarah harus dapat diterangkan oleh "hukum umum" atau *general law*, sebab secara metodologis menurutnya tidak ada perbedaan mendasar antara sejarah dengan ilmu-ilmu lainnya. Bukankah dalam sejarah juga bertujuan untuk membuat hubungan-hubungan kausatif (*causative connections*); yaitu penjelasan itu diperoleh dengan menempatkan peristiwa-peristiwa itu dibawah hipotesis, teori, atau hukum umum. Atau dengan kata lain penjelasan itu diperoleh dengan mendeduksikannya dari pernyataan-

pernyataan hukum umum. Terlepas dari pro dan kontra terhadap pernyataan tersebut, bahwa dengan adanya kontroversi mendasar antara dua aliran itu berimplikasi pada sedikitnya jumlah teori-teori sejarah yang dihasilkannya.

1. Teori *Gerak Siklus Sejarah* Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun (1332-1406), adalah seorang sejarawan dan filsosof sosial Islam kelahiran Tunisia yang merupakan penggagas pertama dalam teori siklus ini, khususnya dalam sejarah pemikiran manusia, terutama dari dimensi sosial dan filosofis pada umumnya. Karya monumentalnya adalah *Al-Muqaddimah* (1284 H), yang secara orisinal dan luas membahas kajian sejarah, budaya, dan sosial.

Adapun inti atau pokok-pokok pikiran dalam teori Khaldun tersebut, dikemukakan dalam *Al-Muqaddimah* itu sebagai berikut:

- a. Kebudayaan adalah masyarakat manusia yang dilandaskan di atas hubungan antara manusia dan tanah di satu sisi, dan hubungan manusia dengan manusia lainnya di sisi lain yang menimbulkan upaya mereka untuk memecahkan kesulitan-kesulitan lingkungan, mendapatkan kesenangan dan kecukupan dengan membangun industri, menyusun hukum, dan menertibkan transaksi.
- b. Bahwa kebudayaan dalam berbagai bangsa berkembang melalui empat fase, yaitu (1) *fase primitif* atau *nomaden*, (2) *fase urbanisasi*, (3) *fase kemewahan*, dan (4) *fase kemunduran* yang mengantarkan kehancuran.
- c. Kehidupan *fase primitif* atau *nomaden* adalah bentuk kehidupan manusia terdahulu (tertua) yang pernah ada. Pada masa ini sifat kehidupan kasar namun diwarnai oleh keberanian dan ketangguhan yang mendorong mereka untuk menundukkan kelompok-kelompok lain. Selain itu pada masa ini juga pada kelompok-kelompok tersebut tumbuh solidaritas, ikatan, dan persatuan yang menopang mereka meraih kekuasaan dan kesenangan.
- c. Dalam fase kedua (*urbanisasi*), pembangunan yang mereka lakukan tetap berlangsung sehingga perkembangan kebudayaan semakin maju khususnya di kota-kota..
- d. Pada fase ketiga (*kemewahan*), banyak kelompok yang tenggelam dalam masa kemewahan, di mana pada fase ini dicirikan oleh beberapa indikator, seperti; ketangguhan dalam mempertahankan diri, memperoleh kemewahan dalam kekayaan,

keinginan untuk hidup bebas, mengejar nafsu kepuasan dan kesenangan, namun di pihak lain ada juga yang menghendaki pada kesederhanaan. Akibatnya terjadi friksi dan solidaritas mereka menjadi melemah.

- e. Pada fase *kemunduran*, kerajaan, pemerintahan melalaikan urusan kenegaraan / pemerintahan dan kemasyarakatan, yang mempercepat kehancuran di mana ditandai ketidakmampuannya dalam mempertahankan dirinya. Ini pertanda usainya daur kultural dalam sejarahnya dan bermulanya daur baru dan begitu seterusnya (Al-Sharqawi, 145-146).
- f. Biasanya kelompok-kelompok yang terkalahkan akan selalu mengekor kepada kelompok-kelompok yang menang, baik dalam slogan, pakaian, kendaraan, dan tradisi lainnya.

2. Teori *Daur Kultural Spiral* Giambattista Vico

Nama filosof sejarah Italia Giambattista Vico (1668-1744) memang jarang dikenal, padahal jasanya begitu besar terutama dalam teorinya tentang gerak sejarah ibarat *daur kultural spiral* yang dimuat dalam karyanya *The New Science* (1723) yang telah diterjemahkan Downs tahun 1961. Atau mungkin karena teorinya yang sering diidentikkan dengan teori siklus di mana nama-nama besar tokoh lainnya seperti Pitirim Sorokin (1889-1966), Oswald Spengler (1880-1936), Arnold Toynbee (1889-1975), melebihi bayangan nama besarnya.

Secara makro, pokok-pokok pikiran Vico yang tertuang dalam teori daur spiralnya dalam *The New Science* (Downs, 1961: 113; Al-Sharqawi, 1986: 147-148) tersebut sebagai berikut:

- a. Perjalanan sejarah bukanlah seperti roda yang berputar mengitari dirinya sendiri sehingga memungkinkan seorang filosof meramalkan terjadinya hal yang sama pada masa depan.
- b. Sejarah berputar dalam gerakan spiral yang mendaki dan selalu memperbaharui diri, seperti gerakan pendaki gunung yang mendakinya melalui jalan melingkar ke atas di mana setiap lingkaran selanjutnya lebih tinggi dari lingkaran sebelumnya, sehingga ufuknya pun semakin luas dan jauh.

- c. Masyarakat manusia bergerak melalui fase-fase perkembangan tertentu dan terjalin erat dengan kemanusiaan yang dicirikan oleh gerak kemajuan dalam tiga fase yaitu; fase telogis, fase herois, dan fase humanistik.
- d. Ide kemajuan adalah substansial, meski tidak melalui *satu perjalanan lurus ke depan, tetapi bergerak dalam lingkaran-lingkaran* historis yang satu sama lain saling berpengaruh. Dalam setiap lingkaran pola-pola budaya yang berkembang dalam masyarakat, baik agama, politik, seni, sastra, hukum, dan filsafat saling terjalin secara organis dan internal, sehingga masing-masing lingkaran itu memiliki corak kultural khususnya yang merembes ke dalam berbagai ruang lingkup kulturalnya (Colingwood, 1956: 67).

3. Teori Tantangan dan Tanggapan Arnold Toynbee

Arnold Toynbee (1889-1975) seorang sejarawan Inggris, ia juga pendukung teori siklus —*lahir-tumbuh-mandek-hancur*. Seperti halnya Khaldun yang dikenal sebagai “jenius Arab”, Toynbee melihat bahwa proses *lahir-tumbuh-mandek-dan hancur* suatu kehidupan sosial, lebih ditekankan pada masyarakat atau peradaban sebagai unit studinya yang lebih luas dan komprehensif, daripada studi terhadap sesuatu bangsa maupun periode tertentu. Pemikiran-pemikiran Toynbee yang cemerlang itu dituangkan dalam karya monumentalnya terbit sebanyak 12 jilid. dan ringkasan dari karyanya itu adalah *A Study of History*. Pokok-pokok pikiran dari teori tantangan dan tanggapan (*challenge and response*) tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Menurut Toynbee terdapat 21 pusat peradaban di dunia (misalnya peradaban; Mesir kuno, India, Sumeria, Babilonia, dan peradaban Barat atau Kristen). Enam peradaban muncul serentak dari masyarakat primitif: Mesir, Sumeria, Cina Maya, Minoa (di P.Kreta) dan India. Masing-masing muncul secara terpisah dari yang lain, dan terlihat di kawasan luas yang terpisah. Semua peradaban lain berasal dari enam peradaban asli ini. Sebagai tambahan, sudah ada tiga peradaban gagal (peradaban Kristen Barat Jauh, Kristen Timur Jauh, dan Skandinavia), dan lima peradaban yang masih bertahan (Polinesia, Eskimo, Nomadik, Ottoman, dan Spartan)..

- b. Peradaban muncul sebagai tanggapan (*response*) atas tantangan (*challenge*) walaupun bukan atas dasar murni hukum sebab-akibat, melainkan hanya sekedar hubungan, dan hubungan itu dapat terjadi antara manusia dan alam atau antara manusia dan manusia.
- c. Sebagai contoh, peradaban Mesir muncul sebagai hasil tanggapan yang memadai atas tantangan yang berasal dari rawa dan hutan belantara lembah Sungai Nil, sedangkan peradaban lain muncul dari tantangan konflik antar kelompok.
- d. Berjenis-jenis tantangan yang berbeda dapat menjadi tantangan yang diperlukan bagi kemunculan suatu peradaban.
- e. Terdapat lima perangsang yang berbeda bagi kemunculan peradaban, yakni kawasan yang ; (a) ganas, (b) baru; (c) diperebutkan; (d) ditindas; (e) tempat pembuangan.
- f. *Kawasan yang ganas*, mengacu kepada lingkungan fisik yang sukar ditaklukkan, seperti yang disediakan lembah S.Hoang Ho (Toynbee, 1961: 88). *Kawasan baru*, mengacu kepada daerah yang belum pernah dihuni dan diolah. *Kawasan yang diperebutkan*, termasuk yang baru ditaklukkan dengan kekuatan militer. *Kawasan tertindas*, menunjukkan suatu situasi ancaman dari luar yang berkepanjangan. *Kawasan hukuman/pembuangan*, mengacu kepada kawasan tempat kelas dan ras yang secara historis telah menjadi sasaran penindasan, diskriminasi dan eksploitasi.
- g. Antara tantangan dan tanggapan berbentuk *kurva linear*. Artinya, tingkat kesukaran yang *cukup besar* dapat membangkitkan *tanggapan memadai*; tetapi tantangan *ekstrem* dalam arti terlalu lemah dan terlalu keras, *tidak memungkinkan* dapat membangkitkan tanggapan yang memadai. Atau jika tantangan terlalu keras, peradaban bisa hancur atau terhambat perkembangannya; dalam kasus seperti itu tantangan mempunyai cukup kekuatan untuk mencegah perkembangan normal, meskipun tak cukup keras sehingga menyebabkan kehancurannya.
- h. Untuk terciptanya suatu tanggapan yang memadai *kriteria pertama* adalah keras-lunaknya tantangan. *Kriteria kedua*, kehadiran *elit kreatif* yang akan memimpin dalam memberikan tanggapan atas tantangan itu. Sebab seluruh tindakan sosial adalah *karya individu-individu pencipta, atau yang terbanyak karya minoritas kreatif* itu (Toynbee, 1961: 214). Namun kebanyakan umat manusia cenderung tetap terperosok ke dalam cara-cara hidup lama. Oleh karena itu tugas minoritas kreatif bukanlah semata-mata menciptakan bentuk-bentuk proses sosial baru, tetapi juga

menciptakan cara-cara barisan belakang yang mandek itu bersama-sama dengan mereka untuk mencapai kemajuan (Toynbee, 161: 215).

4. Teori *Dialektika Kemajuan* Jan Romein

Jan Marius Romein adalah teoretisi dan sejarawan Belanda (1893-1962) yang pertama kalinya melihat gejala lompatan dalam sejarah umat manusia sebagai suatu kecenderungan umum dalam kemajuan maupun keberlanjutan. Pikiran-pikiran Jan Romein ini ditungkan dalam "Dialektika Kemajuan" atau *De Dialektiek van de Vooruitgang: Bijdrage tot het ontwikkelingsbegrip in de geschiedenis* (1935). Adapun pokok-pokok pikiran teori Jan Romein tersebut sebagai berikut:

- a. Gerak sejarah umat manusia itu kebalikan dari berkembangnya secara berangsur-angsur (evolusi), melainkan maju dengan lompatan-lompatan yang dadakan sebanding dengan mutasi yang dikenal dalam dunia alam hidup-biologis.
- b. Suatu langkah baru dalam evolusi manusia itu kecil kemungkinannya terjadi dalam masyarakat yang telah mencapai tingkat kesempurnaan yang tinggi dalam arah tertentu. Sebaliknya kemajuan yang pernah dicapai di masa lalu, mungkin akan berlaku sebagai suatu penghambat terhadap kemajuan lebih lanjut (Wertheim, 1976: 58). Sebab, suatu suasana yang puas diri dan adanya kepentingan yang bercokol pada kelompok itu cenderung menentang langkah-langkah lebih jauh yang mungkin menyangkut suatu perombakan menyeluruh terhadap lembaga-lembaga atau perlengkapan yang sudah ada.
- c. Dengan demikian keterbelakangan dalam hal-hal tertentu dapat dijadikan sebagai suatu keunggulan (situasi yang menguntungkan) untuk mengejar ketinggalannya. Sebaliknya kemajuan yang relatif pesat di masa lalu, dapat berlaku sebagai penghambat kemajuan. Inilah yang dinamakan *Dialektika Kemajuan (Dialectics of Progress)*

5. Teori *Despotisme Timur* Wittfogel

Karl Wittfogel penulis buku *Oriental Despotism* (1957) mengemukakan teori-teorinya sebagai berikut:

- a. Cara produksi Asiatik, yang menurut pendapatnya khas pada masyarakat-masyarakat yang berdasar irigasi besar-besaran, telah menimbulkan suatu garis lain dalam perspektif evolusi.
- b. Masyarakat-masyarakat *hidrolis*, tidak hanya dicirikan oleh irigasi, tetapi dalam hal-hal tertentu oleh bangunan-bangunan drainase besar-besaran, adalah tipikal Despotisme Timur, yang dijalankan dan perintah dengan *kekuasaan total* oleh suatu birokrasi yang bercabang luas dan terpusat, serta secara tajam mesti dibedakan dari masyarakat feodal, seperti dikenal dalam masyarakat di Eropa Barat dan Jepang.
- c. Bila masyarakat-masyarakat feodal memungkinkan suatu perkembangan menuju kapitalisme borjuis, maka birokrasi-birokrasi Asiatik itu (mencakup Tsar Rusia) sama sekali tidak cocok bagi perkembangan apapun menuju suatu struktur yang lebih modern.
- d. Struktur-struktur politik baru yang dilahirkan di kerajaan-kerajaan despotis Timur di masa lalu, (Rusia dan Cina) sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai suatu sub-tipe dari suatu masyarakat modern atau sebagai sesuatu yang baru, melainkan hanya merupakan salinan-salinan dari despotisme-despotisme Timur tradisional, di mana kemungkinan-kemungkinan untuk menjalankan kekuasaan mutlak dan teror, telah berkembang hingga tingkat yang luar biasa tingginya (Wittfogel, 1957: 438).
- e. Doktrin ini bermaksud menunjukkan bahwa Uni Soviet (sekarang Rusia) maupun Cina tidak dapat menawarkan apapun yang mungkin diinginkan oleh bangsa-bangsa lain, dan bahwa jalan satu-satunya ke arah kemajuan adalah mengikuti garis “peradaban modern yang berdasarkan hak milik”. Dan, garis ini menurut Wittfogel, tampaknya tidak lagi menuju pada sosialisme, melainkan hanya “bergerak menuju suatu masyarakat polisentrisme dan demokratis”, di mana kompleks-kompleks birokrasi yang lebih besar saling mengendalikan satu sama lain (Wittfogel, 1957: 366-367), dan jika meminjam istilah Karl Popper, hal ini melalui masyarakat “terbuka”.

6. Teori Perkembangan Sejarah dan Masyarakat Karl Marx

Karl Heinrich Marx (1818-1883) dilahirkan di Trier distrik Moselle, Prusia Rhineland pada 5 Mei 1818. Ia berasal berasal dari silsilah panjang *rabbi*, baik garis ayah

maupun ibunya. Ayahnya seorang pengacara terhormat dan menikah dengan Jenny anak tokoh sosialis awal Baron von Wesphalen, pertamanya masuk ke University Bonn, tahun berikutnya ia pindah ke University of Berlin. Di universitas ia menjadi pengikut filsafat Hegelianisme. Marx bercita-cita menjadi pengajar di universitas, dan ia mendapatkan gelar doktornya mengenai filsafat pasca Aristotelian Yunani (McLellan, 2000: 618).

Ia adalah ilmuwan sosial revolusioner Jerman yang analisisnya tentang masyarakat kapitalis menjadi basis teoretis untuk pergerakan sejarah dan politik. Kontribusi utama Marx terletak pada penekanannya terhadap peran faktor ekonomi — berubahnya cara masyarakat dalam mereproduksi alat-alat subsistensi — dalam membentuk jalannya sejarah. Perspektif ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap seluruh jajaran ilmu sosial. Teori besar sosiohistoris Marx, yang sering disebut sebagai konsepsi sejarah materialis atau materialisme historis, dapat diungkap dari perkataan Friederich Engels, sahabat terdekatnya, sebagai berikut:

... sebab yang utama dan kekuatan penggerak terbesar dari semua peristiwa sejarah yang penting terletak pada perkembangan ekonomi masyarakat, pada perubahan-perubahan model dalam produksi dan pertukaran, pada pembagian masyarakat dalam kelas-kelas yang berlainan, dan pada perjuangan kelas-kelas ini melawan kelas yang lain (dalam Shaw, 2000: 620).

Teori-teorinya tentang gerak sejarah dan masyarakat, tertuang dalam *Die Deutch Ideologie (Ideologi Jerman)* tahun 1845-1846, yang secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Struktur ekonomi masyarakat yang ditopang oleh relasi-relasinya dengan produksi, merupakan fondasi riil masyarakat. Struktur tersebut sebagai dasar munculnya "suprastruktur hukum dan politik, dan berkaitan bentuk tertentu dari kesadaran sosial". Di sisi lain, relasi-relasi produksi masyarakat itu sendiri berkaitan dengan tahap perkembangan tenaga-tenaga produktif material (masyarakat). Dalam kerangka ini model produksi dari kehidupan material akan mempersiapkan proses kehidupan sosial, politik, dan intelektual pada umumnya.
- b. Seiring tenaga produktif masyarakat berkembang, tenaga-tenaga produktif ini mengalami pertentangan dengan berbagai relasi produksi yang ada, sehingga

membelenggu pertumbuhannya. Kemudian ”mulailah suatu era revolusi sosial”, seiring dengan terpecahnya masyarakat akibat konflik.

- c. Konflik-konflik itu terselesaikan sedemikian rupa sehingga menguntungkan tenaga-tenaga produktif, lalu muncul relasi-relasi produksi yang baru dan lebih tinggi yang persyaratan materiilnya telah ”matang” dalam rahim masyarakat itu sendiri. Masyarakat dan pemerintahan kelas, memang tidak terhindarkan sekaligus diperlukan untuk memaksa produktivitas para produsen agar melampaui tingkat subsistensinya. Namun kemajauan produktif yang dihasilkan kapitalisme tersebut menghancurkan kelayakan dan landasan historis pemerintahan kelas. Karena negara merupakan alat suatu kelas untuk mengamankan pemerintahannya, maka negara akan melemah dalam masyarakat pasca kelas.
- d. Relasi-relasi produksi yang lebih baru dan lebih tinggi ini mengakomodasi secara lebih baik keberlangsungan pertumbuhan kapasitas produksi masyarakat. Di sinilah model produksi borjuis mewakili era progresif yang paling baru dalam formasi ekonomi masyarakat, tetapi hal ini merupakan bentuk produksi antagonistik yang terakhir. Dengan matinya bentuk produksi tersebut, maka prasejarah kemanusiaan berakhir.
- e. Di sinilah kapitalisme akan hancur oleh hasratnya sendiri untuk meletakkan masyarakat pada tingkat produktif yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Selain itu perkembangan tenaga-tenaga produktif yang membayangkan munculnya kapitalisme sebagai respons terhadap tingkat tenaga produktif pada awal mula terbentuk.
- f. Dengan demikian perkembangan kapasitas produktif masyarakat menentukan corak utama evolusi yang dihasilkan, yang pada gilirannya menciptakan institusi-institusi hukum dan politik masyarakat atau suprastruktur.

7. Teori Feminisme Wollstonecraft

Mary Wollstonecraft dilahirkan di Inggris tahun 1759, adalah seorang miskin yang berasal dari keluarga yang “berantakan” karena ayahnya pecandu berat peminum alkohol yang kronis. Sebagai seorang pemikir wanita otodidak yang berani dan radikal, Wollstonecraft menulis beberapa buku. Buku yang pertama ia tulis adalah *Thoughts on*

the Educations of Daughters. Pada tahun 1785 ia beralih profesi sebagai penulis wanita. Selama beberapa berikutnya ia menerbitkan ulasan-ulasan, menerjemahkan karya-karya besar, serta menulis lebih banyak lagi buku-bukunya. Dan yang lebih tragis lagi, ia mendapatkan citra buruk karena dukungannya terhadap prinsip-prinsip republikan dalam bukunya *A Vindication of the Rights of Man* (1790), yang merupakan salah satu dari sekian banyak tanggapan atas kritik Edmund Burke terhadap Revolusi Prancis. Karyanya yang paling terkenal adalah *A Vindication of the Rights of Woman*, (1792) menyusul 2 tahun setelah memperoleh citra buruk atas karya sebelumnya.

Isi pokok pemikiran (teori) Wollstonecraft, adalah:

- a. Salah satu ciri yang paling universal sekaligus mencolok adalah subordinasi wanita atas pria. Sekalipun hari ini banyak kemajuan-kemajuan politik dan budaya yang diperolehnya tetap masyarakat menempatkan wanita sebagai subordinat posisi pria.
- b. Dalam beberapa segi, hal ini disebabkan oleh kaum wanita itu sendiri yang berprasangka buruk terhadap kapabilitas bakat-bakat dan kapasitas-kapasitas mereka sendiri — sebuah pandangan yang diajukan oleh banyak penulis dan pemikir pembenci wanita.
- c. Padahal pria dan wanita sama-sama mampu bernalar dan memperbaiki diri. Meski demikian kapasitas wanita bagi tindakan rasional, bagi keseluruhan sejati, telah dikurangi oleh beragamnya institusi sosial dan tuntutan-tuntutan budaya.
- d. Masyarakat dan kaum pria telah membatasi kesempatan-kesempatan yang dimiliki wanita untuk menggunakan kemampuannya alaminya bagi kebaikan masyarakat.
- e. “Keluhuran-keluhuran jinak” dan “kesenangan-kesenangan hampa” telah mendorong kaum wanita berfokus pada penyanjungan dan menyenangkan pria, yang dapat menjauhkan wanita untuk berkontribusi pada kehidupan moral, budaya, dan politik.
- f. Wanita tidak boleh memiliki status “inferior” sekalipun penyebabnya oleh kaum wanita itu sendiri yang begitu pasrah menerima citra mereka yang tidak menguntungkan diri.
- g. Semakin baik pendidikan mereka, semakin baik wanita menjadi warganegara, istri, dan ibu. Wanita terdidik adalah orang-orang yang lebih rasional dan lebih luhur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. dan Surjomihardjo, A, (1985) Ilmu Sejarah dan Historiografi Arah dan Perspektif, Jakarta, PT. Gramedia: jakarta.
- Adam, Barbara (2000) “Waktu” dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn, 1096-1097.
- Adam, Barbara, (1990a) *Time and Social Theory*, Cambridge, Simon & Schuster UK Ltd:
- Adam, Barbara (1990b) *Time watch: The Social Analysis of Time*, Cambridge: Simon & Schuster UK Ltd
- Al-Sharqawi, Effat (1886) *Filsafat Kebudayaan Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka.
- Anderson, B. (1983) *Immagined Communities, Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*, London: The Thetford Press, Ltd..
- Anderson, M. (1980) *Approaches to the History of the Western Family 1500-1914*, Basingstoke.
- Banks, James, A. (1970) *Teaching the Black Experience: Methods and Materials*, Belmont, Calif: Fearon.
- Banks, James A. (1977) *Teaching Strategies for the Social Studies: Inquiry, Valuing, and Decision-Making*, Phippines,: Addison-Wesley Publishing Company.
- Barry, Norman (2000) “Liberalisme” dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlmn. 568-571.
- Barzun, Jaques (1974) *Clio and the Doctors, Psycho-History, Quanto-History & History*, Chicago and London: The University of Chicago.
- Benedict, Ruth. (1965) *Patterns of Culture*, New York: Mentor Books.
- Berlin, Isaiah (1969) *Four Essay In Liberty*, London: The Thetford Press, Ltd..
- Berkhofer, Robert F.Jr (1969) *A Behavioral Approach to Historical Analysis*, London: Cllier Macmillan Publishers.
- Bezucha, Robert,J. (1972) *Modern European Social History*, Lexington, Massachusets: D.C. and Company.

- Braudel, F. (1949) *The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II*, Edisi Kedua 1966; Terjemahan Bahasa Inggris, London, 1972-1973.
- Braudel, F. (1979) *Civilization and Capitalism*, 3 jilid; terjemahan Bahasa Inggris, London, 1980-1982.
- Bogue, A.G. (1983) *Clio and the Bitch Goddess: Quantification in American Political History*, Beverly Hill, Ca.
- Burke, Peter (2001) *Sejarah dan Teori Sosial*, Alih Bahasa Mestika Zed & Zulfami, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Burke, Peter (2000) “Sejarah” dalam Kuper, Adam & Kuper (ed), Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn. 440-444.
- Burke, Peter (1993) *History and Social Theory*, New York: Cornel University Press.
- Burke, Peter (ed) (1991) *New Perspectives on Historical Writing*, Cambridge, UK.
- Burgiere, A. . Klapisch-Zuber,C., Segalen, M., dan Zonabend, F. (1986) *Histoire de la famille*, Paris.
- Bynum, W.F. (2000) “Sejarah Medis” dalam Kuper, Adam & Kuper (ed), Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn. 444-445.
- Carr, E.H. (1985) *What Is History ?* , Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books, Ltd.
- Caldwell, John, C. (2000) “Transisi Demografi” dalam Kuper, Adam & Kuper (ed), Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn 217-.218..
- Collingwood, R.G. (1956) *The Idea of History*, London and New York: Oxford University Press.
- Collingwood, R.G. (1973) “The Historical Imagination” Cetak ulang dalam bukunya *The Idea of History*, Oxford.
- Conkin, Paul, K. dan Stomberg, Roland N. (1971) *The Heritage and Challenge of History*, The Hague: Martinus.
- Cronon, W. (1990) “Placing Nature in History” *Journal of American History*, 76.

- Crosby, A.W. (1972) *The Columbia Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492*, Westport, CT.
- Dasuki, Ahmad (2003) "Historiografi dan Penggunaan Sejarah dalam Pendidikan" dalam Helius Sjamsuddin dan Andi Suwirta (ed) *Historia Magistra Vitae: Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Hj. Rochiati Wiriaatmadja, MA*, Bandung: Historia Press.
- Denon, Donald (2000) "Kolonialisme" dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn. 134-136..
- Engerman, Stanley, L. (2000) "Sejarah Ekonomi" dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn. 269-171.
- Ebenstein dan Fogelman (1990) *Isme-isme Dewasa Ini, Edisi Kesembilan*, Terjemahan Alex Jemadu, Jakarta: Erlangga.
- Edson, C.H. (1986) "Our Past and Present: Historical Inquiry in Education" *The Journal of Thought* 21, No.3. halmn 13-27.
- Elton, G.R. (1969) *The Practice of History*, Fontana.
- Erikson, Erik H. (1959) *Young Man Luther: A Study in Psychoanalysis*, London: Faber and Faber. .
- Erikson, E.rik. H (1970) *Gandhi's Truth*, London: George Allen & Unwin, Ltd.
- Erikson, Erik, H. (1970) "Sociology and Historical Perspective", dalam *The American Sociologist*, 5.
- Federation of Family History Societies (1993) *Welsh Family History: A Guide to Research* Birmingham.
- Foucault, Mitchel (1976) *The History Sexuality, Volume I: An Introduction*, Diterjemahkan Oleh Robert Hurley, London: Allen Lane.
- Foucault, Mitchel, (1963) *The Birthh of the Clinic: An Archeology of Medical Perception*, Diterjemahkan Oleh A.M. Sherdian, New York: Harper & Row.
- Foucault, Michel, (1962) *Mental Illness and Psychology*, Diterjemahkan oleh Alam M. Sherdian, New York: Harper & Row.
- Fromm, E., (1942) *The Fear of Freedom*, New York: Longman.

- Fromm, E. (2001) *Akar Kekerasan: Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia*, Penerjemah Imam Muttaqin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gandhi, Lela (2001) *Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat*, Penerjemah: Yuwan Wahyutri dan Nur Hamidah, Yogyakarta; Qalam.
- Gardner, J.F. (1986) *Women in Roman Law and Society*, London: George Allen & Unwin, Ltd
- Gardiner, Patrick (1968) *The Nature of Historical Explanation*, London-Oxford-New York: Oxford University Press.
- Gee, Wilson, (1950) *Social Science Research Methods*, New York: Appleton-Century-Crofts, Inc.
- Gielbert, F. (1977) "Reflection on the history of the professor of history" dalam F. Gilbert *History: Choice and Commitment*, Cambridge, MA.
- Goldstone, Jack.A. (2000) "Revolusi" dalam Kuper, Adam & Kuper (ed), Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gotain, S.D. (1978) *A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza*, vol.iv, The Family, Berkeley.
- Gottchalk, Louis (1986) *Mengerti Sejarah*, Penerjemah Nugraho Notosusanto, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Gray, Wood, et.al. (1964) *Historian's Handbook. A Key to Study and Writing of History*, Boston: Houghton Mifflin Company.
- Guha, R. (ed) (1994) *Subaltern Studies: Writing on South Asian History and Society*, volume 2, New Delhi.
- Guha, R. (1982) "Some aspects of the Historiography of colonial India", dalam *Subaltern Studies*, New Delhi.
- Hayek, F.A. von (1976) *The Mirage of Social Justice*, London: Faber and Faber.
- Hempel, Carl G. (1959) "Explanation and Laws" dalam Patrick Gardiner, (ed) *Theories of History*, New York: The Free Press, hlmn 345-356.
- Hey, D. (1993) *The Oxford Guide to Family History*, Oxford: Oxford University Press.

- Himmelfarb, Gertrude (1987) *The New History and the Old*, Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Henige, D. (1982) *Oral Historiography*, London: Allen and Unwin.
- Hoagland, Richard B. (1960) *Learning World History*, Greystone Press.
- Hobsbawm, E.J. (1972) "From Social History to the History of Society" dalam Felix Gilbert & Stephen R. Graubard, (ed) *Historical Studies Today*: New York: W.W Norton & Company, Inc. Hal. 1-26
- Hobsbawm.E.J., dan Ranger, T.O. (eds) (1983) *The Invention of Tradition*, Cambridge U.K.
- Huntington, Samuel.P. (1998) *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, London: Simon & Schuster UK Ltd.
- Ismaun, (2005) *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu dan Wahana Pendidikan*, Bandung: Historia Utama Press.
- Ismaun, (1993) *Modul Ilmu Pengetahuan Sosial 9: Pengantar Ilmu Sejarah*, Universitas Terbuka: Jakarta.
- Kartodirdjo, Sartono (1992) *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: PT Gramedia.
- Kuntowijoyo, (1999) *Pengantar Ilmu Sejarah*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Keynes, J.M. (1936) *The General Theory of Employment Interest and Money*, London: Mmcmillan
- Khaldun, Ibnu (1268H) *Al-Muqadimah*, Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.
- Ladurie, E.L.R (1979) *The Territory of the Historian*, Sussex: Harvester.
- Landes, David S & Tilly, Charles, ed (1971) *History as Social Science*, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc.
- Langer, W.L. (1958) "The Next Assignment", dalam *American Historical Review* 63, 283-304.
- Lapp, Diane, et al. (1975) *Teaching and Learning, Philosophical, Pssyhological Curricular Applications*, New York: Macmillan Publisher, Co. Inc.

- Lauer, Robert, H. (2003) *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Terjemahan Alimandan S.U. Jakarta Rineka Cipta.
- Levi, G. (1991) "On microhistory" dalam Peter Burke (ed) *New perspectives on Historical Writing*, Cambridge, UK.
- Lechte, John (2001) *50 Filsuf Kontemporer: dari Strukturalisme sampai Post Modernisme*, Penerjemah A. Gunawan Admiranto, Yogyakarta: Kanisius.
- Lloyd, Christopher (1988) *Explanation in Social History*, Cowley Road: Oxford: Basil Blackwell Inc.
- Losco, Joseph dan William, Leonard (2005) *Political Theory: Kajian Klasik dan Kontemporer, Volume I dan II, Edisi Kedua*, Penerjemah Haris Munandar, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Lubasz, Heinz. (1963-64) "Introduction Symposium: Use of Theory in the Study of History", dalam *History and Theory*. III-No. 1. Hal.3-4.
- Ludtke, A. (1982) "The Historiography of Evryday Life" dalam R. Samuel dan Stedman Jones (eds) *Culture, Ideology, and Politics*, London.
- Minogue, Kenneth, (2000) "Nasionalisme" dalam Kuper, Adam & Kuper (ed), Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Minogue, Kenneth, (2000), "Kebebasan" dalam Kuper, Adam & Kuper (ed), Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Namier, L.B. (1957) "History and Political Culture" dalam Fritz Stern, ed. *The Varieties of History*, New York:
- Notosusanto, Nugroho, (1971) *Norma2 Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*, Djakarta: Dephankam Pusdjarah ABRI.
- Notosusanto, Nugroho (1979) *Sejarah Demi Masa Kini*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Pareto, V.(1916) *The Mind and Society*; Terjemahan bahasa Inggris, London, 1935.
- Rawls, John, (1971) *A Theory of Justice*, Oxford: Oxford University Press.
- Rawson, B. (ed) (1986) *The Family in Ancient Rome*, London: George Allen & Unwim, Ltd.

- Richards, Jeffrey (1988) "What is the History of Popular Culture ?", dalam Juliet Gardiner, (ed) *What is History Today?*, Houndmills: Macmillan Education.
- Robinson, James Harvey (1965) *The New History*, New York: The Free Press.
- Roper, Michel, (2000) "Sejarah Lisan" dalam Kuper, Adam & Kuper (ed), Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn. 717-718.
- Ross, Robert, (2000) "Perbudakan" dalam Kuper, Adam & Kuper (ed), Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn. 965-966.
- Russel, Bertrand, (1955) *Unpolar Essay*, London: George Allen & Unwim, Ltd.
- Said, Edward (1978) *Orientalism*, Harmondsworth: Penguin.
- Sjamsuddin, Helius (1999) "Sejarah dan Pendidikan Sejarah", *Mimbar Pendidikan XVIII*, (2), 12-17.
- Sjamsuddin, Helius (1996) *Metodologi Sejarah*, Jakarta: Depdikbud, Proyek Pendidikan Tenaga Akademik.
- Smith, Dai (1988) "What is the History of Popular Culture"? Dalam Juliet Gardiner, (ed) *What is History Today*, Houndmills: Macmillan Education, Ltd.
- Skocpol, T. (1979) *States and Social Revolution*, Cambridge, UK: George Allen & Unwim, Ltd.
- Soedjatmmoko (1995) "Sejarawan Indonesia dan Zamannya" dalam Soedjatmmoko (eds) *Historiografi Indonesia, Sebuah Pengantar*, Jakarta: Gramedia., halmn. 358-370.
- Soedjatmmoko (1976) "Kesadaran Sejarah dan Pembangunan" dalam *Prisma No,7 Tahun V, 1976*, Jakarta: LP3ES, hlmn. 9-16.
- Sunal, C.S., dan Haas, M.E. (1993) *Social Studies and The Elementary/Middle School Student*, Harcourt Brace Jovanovich, Orlando: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Supardan, Dadang (1983) *Hubungan Berakhirnya Konfrontasi Indonesia Malaysia Dengan Pembentukan ASEAN*, Skripsi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Sejarah, FKIS-IKIP Bandung.
- Supardan, Dadang (2000) *Kreativitas Guru Sejarah dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Deskriptif-Analitik terhadap Guru dan Implikasinya untuk Program Pengembangan Kreativitas Guru Sejarah Sekolah Menengah Umum di Kota*

- Bandung*, Tesis Untuk Memperoleh Gelar Magister Pendidikan, Program Pascasarjana UPI Bandung.
- Supardan, Dadang, (2004) *Pembelajaran Sejarah Berbasis Pendekatan Multikultural dan Perspektif Sejarah Lokal, Nasional, Global, Untuk Integrasi Bangsa (Studi Kuasi Eksperimentl Terhadap Siswa SMU di Kota Bandung)*, Disertasi Doktor, UPI Bandung.
- Taeuber, Conrad, (2000) “Sensus Penduduk” dalam Adam Kupper & Jessica Kupper, Ed. *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Haris Munandar dkk. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlmn.99-101.
- Teggartt, (1960) *Theory and Process of History*, Berkeley and Los Angles: University of California Press.
- Temperley, Harold, (ed) *Selected Essay of JB. Bury*, Amsterdam: Adolf M.Hakkert
- Thame, Pat (2000) “Sejarah Social” dalam Kuper, Adam & Kuper (ed), Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn.982-985..
- Thomson, E.P. (1963) *The Making of the English Workin, Class*, London: Faber and Faber.
- Toffler, Alvin (1981) *Future Schock*, London: Hazel Watson & Viney Ltd. Aylesbury, Bucks.
- Tonkin, Elizabeth, (2000) “Tradisi Lisan” dalam Kuper, Adam & Kuper (ed), Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn. 719-720.
- Tosh, John (1984) *The Pursuit of History, Aims, Methods and New Directions in the Study of Modern Histry*, London and New York; Longman.
- Toynbee, Arnold (1961) *A Study of History*, Vol. 1-12, New York, Oxford University Press.
- Trevelyan, G.M. (1942) *English Social History, A Survey of Six Centuries*, London: George Allen & Unwin, Ltd.
- Vansina, L (1973) *Oral Tradition*, Harmondsworth.
- Vico, Giambattusta, (1961) *The New Science*, terjemahan R.B. Downs, New York: Barnes.
- Vovelle, M. (1973) *Piete baroque et dechristianisation en Provence au 18e sieecle*, Paris.

- Waite, R.G.L. (1977) *The Psychopathic God: Adolf Hitler*, New York: Longman.
- Wall, Richard, (2000) "Sejarah Keluarga" dalam Kuper, Adam & Kuper (ed), Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halmn. 340-341.
- Wallerstein, Immanuel (1974) *The Modern World System*, New York: Longman.
- Wallerstein, Immanuel, (1996) "Ekonomi Dunia Kapitalis" dalam Roy C. Macridis dan Bernard E. Brown (Ed), *Perbandingan Politik*, Alih Bahasa: Henry Sitanggang, Jakarta: Erlangga.
- Wallerstein, Immanuel, (1997) *Lintas Batas Ilmu Sosial*, Alih Bahasa: Oscar, Yogyakarta: LkiS.
- Walsh, W.H. (1960) *Philosophy of History: An Introduction*, New York: Harper & Row, Publisher.
- Walters, R.G. (1980) "Sign of the times: Clifford Geertz and historians" dalam *Social Research*, 47.
- Weber, Max, (1949) *The Methodology of Social Sciences*, diterjemahkan dan disunting oleh Edward A. Shils dan Henry A. Finch, New York: The Free Press.
- White, H.V. (1978) *Tropics of Discourse*, Baltimore, MD.
- Wiriaatmadja, Rochiati (1998) "Landasan Filosofis Kurikulum Pengajaran Sejarah (SMU) Tantangan dan Harapan" dalam *Simposium Pengajaran Sejarah (Kumpulan Makalah Diskusi)*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Wittfogel, Karl (1957) *Oriental Despotism*, New Haven: Yale University Press.
- Wolfenstein, E.V. (1967) *The Revolutionary Personality: Lenin, Trotsky, Gandhi*, Princeton, NJ.
- Wrosten, D. (ed) (1988) *The Ends of the Earth: Perspectives on Modern Environmental History*, Cambridge: Uk.
- Yeo dan Yeo (1981) *Popular Culture and Class Conflict 1590-1914*, Brighton, 128-154.

BAB VIII

ILMU EKONOMI

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Ilmu Ekonomi

Istilah ‘ekonomi’ berasal dari bahasa Yunani asal kata ‘oikosnamos’ atau ‘oikonomia’ yang artinya ‘manajemen urusan rumah-tangga’, khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan. (Sastradipoera, 2001: 4). Namun sejak perolehan maupun penggunaan kekayaan sumberdaya secara fundamental perlu diadakan efisiensi termasuk pekerja dan produksinya, maka dalam bahasa modern istilah ‘ekonomi’ tersebut menunjuk terhadap prinsip usaha maupun metode untuk mencapai tujuan dengan alat-alat sesedikit mungkin. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa definisi tentang ilmu ekonomi.

Menurut Albert L. Meyers (Abdullah, 1992: 5) ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempersoalkan kebutuhan dan pemuasan kebutuhan manusia. Kata kunci dari definisi ini adalah; *pertama*, tentang “kebutuhan” — yaitu suatu keperluan manusia terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang sifat dan jenisnya sangat bermacam-macam dalam jumlah yang tidak terbatas. *Kedua*, tentang ”pemuas kebutuhan” yang memiliki ciri-ciri “terbatas” adanya. Aspek yang kedua inilah menurut Lipsey (1981: 5) yang menimbulkan masalah dalam ekonomi, yaitu karena adanya suatu kenyataan yang senjang, karena kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa jumlahnya tak terbatas, sedangkan di lain pihak barang-barang dan jasa-jasa sebagai alat pemuas kebutuhan sifatnya langka ataupun terbatas. Itulah sebabnya maka manusia di dalam hidupnya selalu berhadapan dengan kekecewaan maupun ketidakpastian. Definisi ini nampaknya begitu luas sehingga kita sulit memahami secara spesifik.

Ahli ekonomi lainnya yaitu J.L. Meij (Abdullah, 1992: 6) mengemukakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu tentang usaha manusia ke arah kemakmuran. Pendapat tersebut sangat realistis, karena ditinjau dari aspek ekonomi di mana manusia sebagai makhluk ekonomi (*Homo Economicus*) pada hakekatnya mengarah kepada pencapaian kemakmuran. Kemakmuran menjadi tujuan sentral dalam kehidupan manusia secara ekonomi, sesuai yang dituliskan pelopor “liberalisme ekonomi” oleh Adam Smith dalam buku “*An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations*” tahun 1776.

Namun dengan cara bagaiman manusia itu berusaha mencapai kemakmurannya ? Memang dalam definisi yang dikemukakan Meij tersebut tidak dijelaskan.

Kemudian Samuelson dan Nordhaus (1990: 5) mengemukakan “*Ilmu ekonomi merupakan studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, untuk kemudian menyalurkannya — baik saat ini maupun di masa depan — kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.* Menurut Samuelson bahwa ilmu ekonomi itu merupakan ilmu pilihan. Ilmu yang mempelajari bagaimana orang memilih penggunaan sumber-sumber daya produksi yang langka atau terbatas untuk memproduksi berbagai komoditi, dan menyalurkannya ke berbagai anggota masyarakat untuk segera dikonsumsi. Jika disimpulkan dari tiga pendapat di atas walaupun kalimatnya berbeda-beda, namun tersirat bahwa pada hakikatnya ilmu ekonomi itu merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencapai kemakmuran yang diharapkan, dengan memilih penggunaan sumber daya produksi yang sifatnya langka/terbatas itu. Dengan kata lain yang sederhana, bahwa ilmu ekonomi itu merupakan suatu disiplin tentang aspek-aspek ekonomi dan tingkah laku manusia.

Secara fundamental dan historis, ilmu ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yakni ilmu *ekonomi positif* dan *ekonomi normatif* (Samuelson dan Nordhaus, 1990: 9). Jika ilmu ekonomi positif hanya membahas deskripsi mengenai fakta, situasi dan hubungan yang terjadi dalam ekonomi. Sedangkan ilmu ekonomi normatif membahas pertimbangan-pertimbangan nilai dan etika, seperti haruskah sistem perpajakan diarahkan pada kaidah mengambil dari yang kaya untuk menolong yang miskin? Lebih jelasnya Sastradipoera, (2001: 4), mengemukakan.

Ilmu konomi positif merupakan ilmu yang hanya melibatkan diri dalam masalah ‘apakah yang terjadi’. Oleh karena itu ilmu ekonomi positif itu netral terhadap nilai-nilai. Artinya ilmu ekonomi positif itu ‘bebas nilai’ (*value free* atau *wetfrei*)...hanya menjelaskan ‘apakah harga itu’ dan ‘apakah yang akan terjadi jika harga itu naik atau turun’ bukan ‘apakah harga itu adil atau tidak’...*Ilmu ekonomi normatif*, bertentangan dengan ilmu positif, ilmu ekonomi normatif beranggapan bahwa ilmu ekonomi harus melibatkan diri dalam mencari jawaban atas masalah ‘apakah yang seharusnya terjadi’. Esensi dasar ilmu ekonomi adalah pertimbangan nilai (*value judgment*). Seorang ekonom penganut etika puritan

egalitarianisme, Gunnar Myrdal (1898-1987) lebih suka menyebutnya 'ilmu ekonomi institusional'.

Ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu sosial, tentu berkaitan dengan bidang-bidang disiplin akademis ilmu sosial lainnya, seperti; ilmu politik, psikologi, antropologi, sosiologi, sejarah, geografi, dan sebagainya. Sebagai contoh kegiatan-kegiatan politik seringkali dipenuhi dengan masalah-masalah ekonomi, seperti kebijaksanaan proteksi terhadap industri kecil, undang-undang perpajakan, dan sanksi-sanksi ekonomi. Ini artinya bahwa kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kegiatan-kegiatan politik (Abdullah, 1992: 6).

Sebagai disiplin yang mengkaji tentang aspek ekonomi dan tingkah laku manusia, artinya juga mengkaji peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat. Pada dasarnya orang mengkaji peristiwa-peristiwa ekonomi, tujuannya adalah berusaha untuk mengerti hakikat dari peristiwa-peristiwa tersebut yang selanjutnya untuk dipahaminya. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa tujuan ilmu ekonomi itu untuk: *(1) mencari pengertian tentang hubungan peristiwa-peristiwa ekonomi, baik yang berupa hubungan kausal maupun fungsional. (2) untuk dapat menguasai masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.* (Abdullah, 1992:7).

Ilmu ekonomi juga memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya. Walaupun kita ketahui dalam ilmu ini telah digunakan pendekatan-pendekatan kuantitatif-matematis, tetapi pendekatan-pendekatan tersebut tidak dapat menghilangkan keterbatasan-keterbatasannya yang melekat pada ilmu ekonomi sebagai salah satu cabang ilmu sosial. Menurut Abdullah, (1992: 8), keterbatasan-keterbatasan tersebut mencakup:

- (1) Obyek penyelidikan ilmu ekonomi tidak dapat dilokalisasikan. Sebagai akibatnya kesimpulan atau generalisasi yang diambilnya bersifat kontekstual (akan terikat oleh ruang dan waktu).
- (2) Dalam ilmu ekonomi manusia selain berkedudukan sebagai subyek yang menyelidiki, juga obyek yang diselidiki. Oleh karena itu hasil penyelidikannya yang berupa kesimpulan ataupun generalisasi, tidak dapat bersifat mutlak, di mana unsur-unsur subyeknya akan mewarnai kesimpulan tersebut.

- (3) Tidak ada laboratorium untuk mengadakan percobaan-percobaan ekonomi. Sebagai akibatnya ramalan-ramalan ekonomi sering kurang tepat dan akurat.
- (4) Ekonomi hanya merupakan salah satu bagian saja dari seluruh program aktivitas di suatu negara. Oleh karena itu apa yang direncanakan (*ex-ante*) dan kenyataannya (*ex-post*) sering tidak sejalan.

Sehubungan dengan keterbatasan-keterbatasannya tersebut, maka sebagai akibatnya sifat keberlakuan generalisasinya yang berupa dalil-dalil atau hukum-hukum dan teori-teorinya akan tergantung kepada konteks ruang dan waktu serta tidak mutlak. Jadi sifat keberlakuan dalil-dalil atau hukum-hukumnya adalah bersyarat. Yaitu bila yang lainnya tidak berubah. Syarat ini bisa disebut juga dengan “*Ceteris Paribus*”. Hal ini disebabkan oleh hukum-hukum ekonomi merupakan pernyataan-pernyataan tentang tendensi-tendensi ekonomi. Ia merupakan hukum-hukum yang berhubungan dengan tingkah laku sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, di mana tingkah laku tersebut juga dipengaruhi atau tergantung kepada situasi dan kondisi yang berlaku pada suatu saat. Jadi ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu sosial tetap tidak dapat melepaskan dirinya dari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh ilmu sosial.

Ditinjau dari ruang-lingkup/cakupannya, ilmu ekonomi juga dapat dibedakan atas makroekonomi dan mikroekonomi (Samuelson dan Nordhaus, 1990: 99). Istilah “makroekonomi” itu sendiri untuk pertama kali diperkenalkan oleh Ragnar Frisch pada tahun 1933, untuk diterapkan pada studi mengenai hubungan antar agregat ekonomi yang bersifat luas, seperti; pendapatan nasional, inflasi, pengangguran agregat, neraca pembayaran (Taylor, 2000: 597). Perlu diketahui bahwa pada masa sebelumnya, sasaran kebijakan makroekonomi adalah kesempatan kerja *full employment* (kondisi di mana seluruh sumber daya, khususnya tenaga kerja, bisa terserap sepenuhnya) dan stabilitas harga. Stabilitas *output* dari tahun ke tahun — untuk menghindari ledakan pertumbuhan atau resesi yang sangat parah — merupakan sasaran tambahan. Tetapi, tingkat pertumbuhan *output* pada jangka waktu yang lebih panjang, tergantung pada banyak faktor — seperti; teknologi, pelatihan, dan insentif — yang cenderung termasuk dalam “sisi penawaran” atau kebijakan mikroekonomi. Dalam perekonomian yang terbuka, baik posisi neraca pembayaran (*balance of payment*) atau pola tingkat pertukaran di pasar pertukaran valuta asing, dapat dipandang sebagai tujuan yang terpisah dari

kebijakan makroekonomi atau sebagai suatu halangan terhadap operasional makroekonomi (Britton, 2000: 596).

Dalam hal ini instrumen kebijakan makroekonomi adalah *moneter* dan *fiskal*. Kebijakan *moneter* dilaksanakan oleh bank sentral, sebagai contoh oleh Bank Indonesia. Ketat tidaknya kebijakan ini dapat diukur dari tingkat suku bunga riil (yaitu suku bunga nominal dikurangi tingkat inflasi) atau melalui pertumbuhan penawaran uang (yang didefinisikan secara berbeda-beda). Salah satu keuntungan kebijakan moneter sebagai alat untuk mempengaruhi perekonomian adalah berbeda dari kebijakan fiskal, kebijakan ini bisa dikaji ulang dan diubah secara kontinu berdasarkan informasi baru (Britton, 2000: 596).

Sedangkan kebijakan *fiskal* adalah perpajakan dan pembelanjaan masyarakat yang dikontrol oleh pemerintah, dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah mendapat pengesahan dari badan legislatif. Pajak dan pembelanjaan mempengaruhi perekonomian melalui cara yang berbeda-beda, tetapi 'kebijakan fiskal' dalam konteks saat ini adalah efek *budget* sebagai suatu keseluruhan terhadap tingkat agregat permintaan dalam perekonomian. Kecuali dalam situasi darurat, kebijakan fiskal biasanya diubah sekali setahun. Kegunaannya dalam mengatur perekonomian juga ditentukan oleh kemampuan dalam menangani anggaran publik itu sendiri secara bijaksana (Britton, 2000: 596).

Penggunaan pinjaman publik dan tingkat suku bunga untuk menstabilkan perekonomian diterima sebagai suatu prinsip kebijakan pada tahun 1950-an dan 1960-an, seiring dengan gagasan Maynard Keynes yang telah mengubah banyak prinsip ekonomi. Selanjutnya, di tahun 1970-an dan 1980-an muncullah neo-klasik atau kontra revolusi monetaris yang berasal dari Chicago dan dipimpin Milton Friedman. Isu yang mendasar dalam perdebatan ini berkaitan dengan hubungan antara dua tujuan dari *full employment* dan stabilitas harga. Hal ini dimungkinkan (melalui pemotongan pajak atau pemotongan tingkat suku bunga), untuk meningkatkan ketenagakerjaan dalam jangka pendek tanpa harus membuat inflasi meningkat cepat. Namun, dalam jangka panjang argumentasi neo-klasik menyatakan bahwa situasi ini tidak bisa berbalik (dengan tingkat pengangguran kembali pada level "alamiah" dan tidak ada yang bisa ditunjukkan untuk kebijakan perluasan kecuali terjadinya inflasi yang lebih tinggi).

Menurut Britton (2000: 597), tidak bisa dipungkiri dalam praktiknya catatan kebijakan makroekonomi sejak tahun 1970-an lebih banyak mengalami kegagalan dibandingkan keberhasilan. Inflasi meningkat tajam di sebagian besar negara, terutama pada periode kenaikan harga minyak dunia yang paling dramatis pada tahun 1974 dan 1979. Sejak tahun 1980-an inflasi lebih rendah, tetapi pada saat bersamaan pengangguran di banyak negara jauh lebih tinggi. Respons terhadap berbagai kekecewaan ini telah mengarahkan pada tindakan memperkenalkan desain kebijakan baru untuk meningkatkan "saling tukar" (*trade off*) antara dua sasaran. Di tahun 1970-an, khususnya di Inggris, penekanannya yang utama adalah kebijakan harga dan penghasilan. Pendekatan lain, yang berlanjut hingga tahun 1990-an, melibatkan tindakan-tindakan ketenagakerjaan khusus yang dirancang untuk membantu pengaturan secara langsung dengan cara memberikan pelatihan atau mencarikan lowongan pekerjaan yang sesuai untuk mereka.

Ini sangat berbeda dengan studi mengenai unit-unit pengambilan keputusan individual dalam perekonomian seperti rumah tangga, pekerja dan perusahaan, yang secara umum dikenal dengan sebutan mikroekonomi. Sebagai contoh ekonomi mikro meneliti determinasi harga terhadap beras, atau harga relatif beras dan baja atau *employment* dalam industri baja, sementara ekonomi makro berurusan dengan determinasi tingkat *employment* dalam suatu perekonomian khusus, atau dengan tingkat harga dari seluruh komoditas. Kendati demikian, perbedaan antara dua bidang analisis ekonomi ini berguna untuk berbagai tujuan.

Perkembangan ekonomi mikro sebagai suatu bidang tersendiri, merupakan bagian dari pendekatan marginal atau neo-klasik yang mulai mendominasi teori ekonomi setelah tahun 1970-an. Berbeda dengan ekonomo klasik, yang menyoroti pertumbuhan ekonomi negara akibat pertumbuhan sumber daya produktif mereka, serta menjelaskan harga relatif barang berdasarkan kondisi-kondisi obyektif dari biaya-biaya produksinya. Dalam teori neo-klasik mengarahkan perhatiannya pada alokasi sumber daya yang tersedia secara efektif (dengan asumsi implisit mengenai *fullemployment*) dan pada determinasi 'subyektif' terhadap harga-harga individual yang berdasarkan pada kegunaan marginal (Asimakopulos, 2000: 660).

Terdapat enam topik yang sering dipresentasikan dalam ekonomi mikro, yakni; (1) *teori perilaku konsumen*, (2) *teori pertukaran*, (3) *teori produksi dan biaya*, (4) *teori*

perusahaan, (5) *teori distribusi*, dan (6) *teori ekonomi kesejahteraan* (Asimakopulos, 2000: 661). Tema umum yang mendasari semua topik tersebut adalah upaya dari para aktor individual untuk meraih suatu posisi yang optimal, dengan nilai-nilai parameter yang membatasi pilihan mereka. Para konsumen berusaha untuk memaksimalkan kepuasan (atau kegunaan), sesuai dengan selera, pendapatan mereka dan harga barang-barang; perusahaan berusaha memaksimalkan laba mereka, dan ini berarti bahwa dengan tingkat *output* berapa-pun diproduksi dengan biaya terendah. Syarat-syarat maksimalisasi tersirat dalam istilah ekualitas marjinal (*marginal revenue*) sama dengan biaya marginal (*marginal cost*).

Dewasa ini ilmu ekonomi telah berkembang jauh melebihi ilmu-ilmu sosial lainnya yang terbagi-bagi dalam beberapa bidang kajian, seperti; (1) *ekonomi lingkungan*; (2) *ekonomi evolusioner*; (3) *ekonomi eksperimental*; (4) *ekonomi kesehatan*; (5) *ekonomi institusional*; (6) *ekonomi matematik*; (7) *ekonomi sumber daya alam*; (8) *ekonomi pertahanan*; (9) *ekonomi sisi penawaran*; (10) *ekonomi kesejahteraan*; (11) *ekonomi dualistik*; (12) *ekonomi informal*; (13) *ekonomi campuran*; (14) *ekonomi pertanian*; (15) *ekonomi tingkah-laku*; (16) *ekonomi pembangunan*.

Ekonomi Lingkungan. Bidang kajian 'ekonomi lingkungan' (*environmental economics*) ini bermula dari tulisan Gray (1900-an), Pigou (1920-an), dan Hotelling (1930-an), akan tetapi baru muncul sebagai studi koheren pada tahun 1970-an, yakni ketika revolusi lingkungan mulai terjadi di berbagai negara (Pearce, 2000: 300). Selanjutnya, jika ditinjau dari substansinya, terdapat tiga unsur pokok dalam ekonomi lingkungan, yakni; *Pertama*, kesejahteraan manusia sedang terancam oleh degradasi lingkungan dan penyusutan sumber daya alam. Dalam hal ini sangat mudah untuk menunjukkan bukti konkret dari timbulnya bencana banjir yang disebabkan oleh penggundulan hutan, pembukaan lahan untuk perumahan dan industri, terjadinya erosi, dan sebagainya. Semuanya ini memiliki dampak bukan saja pada kesehatan, tetapi juga secara ekonomis merugikan kehidupan manusia.

Kedua, kerusakan lingkungan disebabkan oleh penyimpangan/kegagalan ekonomi, terutama yang bersumber dari pasar. Hal ini dapat diambil contoh, bahwa karena orientasi produk dan profit, tidak sedikit beberapa industri yang mengabaikan analisis dampak lingkungan yang merugikan (*externality*) bagi masyarakat luas. Begitu

juga banyak industri-industri global yang menempatkan pabrik-pabrik dari negara maju ke hutan-hutan dan persawahan di negara berkembang. *Ketiga*, solusi kerusakan lingkungan harus mengoreksi unsur-unsur ekonomi sebagai penyebabnya. Seperti halnya dengan kebijakan subsidi, relokasi industri, dan sebagainya, yang kiranya merusak lingkungan, harus segera dihentikan. Selain itu, jika aktivitas 'destruktif' terselubung yang merugikan itu sulit dihentikan, perlu ada penerapan pajak ekstra atau penerbitan lisensi khusus demi merendam kegiatan tersebut. Langkah ini pernah dilakukan di Amerika Serikat yang menerbitkan lisensi polusi dan lisensi memancing, yang ternyata cukup efektif mengatasi masalah tersebut (Pearce, 2000:300).

Ekonomi Evolusioner (Evolutionary Economics): Merupakan bidang kajian ekonomi yang menjelaskan naik turunnya pertumbuhan ekonomi dan jatuh banggunya perusahaan-perusahaan, kota-kota, kawasan dan negara, yang mencerminkan bahwa evolusi selalu beroperasi pada tingkat yang berlainan dengan tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Dan, hal inilah yang menjadi latar belakang munculnya bidang-bidang baru kegiatan ekonomi khususnya ekonomi evolusioner (Metcalf, 2000: 324). Dengan demikian selalu dipertanyakan mengapa dan bagaimana perekonomian dunia itu berubah, sehingga tinjauannya bersifat dinamis, untuk menangkap keragaman perilaku yang memperkaya perubahan sejarah. Tema-tema inilah yang sering dibicarakan dalam sejarah (Landes, 1968; Mokyr, 1991), yang semuanya bertolak dari suatu mekanisme yang sama, namun menentukan pula keragaman perilaku ekonomi.

Ekonomi evolusioner, juga merupakan entitas-entitas yang memiliki berbagai karakteristik atau ciri perilaku, yakni; *stabilitas kelangsungan perilaku dari waktu ke waktu*, sehingga kita dapat mengaitkan ciri-ciri perilaku di masa mendatang dengan yang ada pada saat ini. Dengan demikian kelembaman (*inertia*) merupakan elemen pengikat penting serta tampak jelas bahwa evolusi tidak dapat berlangsung di dunia di mana individu-individu atau organisasinya berperilaku secara acak/random. Begitu juga dalam kajian mengenai sumber keragaman perilaku ekonomi, para ahli lebih menaruh perhatian pada pengaruh teknologi, organisasi, dan manajemen berdasarkan pemahaman bagaimana suatu tindakan dilangsungkan sehingga memunculkan ciri-ciri perilaku yang menguntungkan. Kemudian timbul pertanyaan; apakah evolusi itu mengandung rasionalitas? Di sini nampaknya tidak. Sebab dalam dunia manapun, di mana

pengetahuan dihargai cukup mahal serta kapasitas komputasional senantiasa terbatas, maka kita tidak memiliki pijakan yang layak untuk mengupayakan optimistisasi secara pasti, sebagai pedoman guna menilai perilaku. Walaupun tidak disangkal lagi bahwa individu senantiasa mencari hasil yang terbaik dari serangkaian pilihan yang ada, akan tetapi kalkulasi yang dipergunakannya mungkin saja bersifat lokal, dan tidak bersifat global. Hal inilah yang merupakan sumber keragaman perilaku tersebut (Metcalf, 2000: 324).

Ekonomi Eksperimental (Experimental Economics): Bidang ekonomi eksperimental pada mulanya merupakan hasil-hasil studi perilaku pilihan individu, terutama ketika para ekonom memusatkan perhatiannya pada teori-teori mikroekonomi. Teori tersebut bertumpu pada preferensi-preferensi individu, di mana mereka menyadari bahwa bidang tersebut sulit dipelajari dalam lingkungan alamiah, sehingga dirasakan perlunya merumuskan sarana laboratorium. Sebagai pengujian awal formal atas teori-teori pilihan individu (*individual choice*), dapat ditemukan pada tulisan Thurstone dalam *The Indifference Function* (1931) yang menggunakan teknik-teknik eksperimental. Kemudian didukung pula oleh teori harapan kepuasan (*expected utility theory*) yang mengajukan prediksi-prediksi lebih gamblang, maka pada tahun 1950 Melvin Dresher dan Merrill Flood melakukan eksperimen awal secara formal dilaksanakan. Ternyata teori ini memang cocok untuk mempelajari perilaku, kendati masih ada penyimpangan. Selain itu, teori ini juga diterapkan pula pada studi tentang pengadaan barang publik, yang dilakukan secara survey oleh Ledyard dalam *Publik Goods: a survey of experimental research* tahun 1995 (Roth, 2000: 332).

Sebagai eksperimen awal tentang hal ini dilakukan oleh Thomas Schelling dalam karyanya *The Strategy of Conflict* (1960). Eksperimen ini sangat berguna untuk mengisolasi dampak-dampak aturan main tertentu yang harus diorganisir pasar. Tentang kajian umum mengenai ilmu ekonomi eksperimental dan ulasannya tentang sejarah dan perkembangannya, telah dimuat dalam karya Roth "Introduction to experimental economics" (1950). Begitu juga Sunder dalam *Experimental asset markets: a survey* (1995), yang menyoroti pasar-pasar komoditi, seperti; pasar uang dan pasar modal, di mana informasi memegang peranan sedemikian penting. Pendeknya, 'ilmu

ekonomi eksperimental' kini telah menjadi perangkat riset yang mapan bagi perkembangan ekonomi secara umum (Roth, 2000: 334).

Ekonomi Kesehatan: Ilmu ekonomi kesehatan (*health economics*) berusaha melakukan analisis terhadap input-input perawatan kesehatan, seperti pembelanjaan dan tenaga kerja, memperkirakan dampak-adampaknya pada hasil akhir yang diinginkan, yakni kesehatan masyarakat. Sedangkan tujuannya ilmu ekonomi kesehatan tersebut adalah menggeneralisasikan aneka informasi mengenai biaya dan keuntungan dari cara-cara alternatif mencapai kesehatan dan tujuan-tujuan kesehatan (Maynard, 2000: 427).

Dalam relaitasnya, evaluasi mengenai perawatan kesehatan itu jarang dilakukan baik yang bersifat publik (pemerintah) maupun pribadi (misalnya individu pembuat keputusan dan anggota keluarganya). Bahkan Cochrane dalam tulisannya yang berjudul *Effectiveness and Efficiency* (1971) mengeluhkan kebiasaan buruk tersebut dengan mengemukakan: "hampir semua terapi perawatan kesehatan, tidak pernah dievaluasi secara 'ilmiah'. Maksud 'ilmiah' di sini adalah bahwa aplikasi ujicoba terkontrol yang sifatnya random oleh pelaksana terapi terhadap kelompok eksperimental pasien yang diambil secara acak. Serta sebuah konsep terapi alternatif sebagai pembandingnya. Jika ada perbedaan signifikan antara hasil terapi pada kelompok kontrol, berarti dampak relatif dari terapi tersebut benar-benar berpengaruh maupun bermakna.

Ekonomi Institusional. Ekonomi institusional (*institutional economics*) merupakan studi tentang sistem-sistem sosial yang membatasi penggunaan dan pertukaran sumber daya langka, serta upaya-upaya untuk menjelaskan munculnya berbagai bentuk pengaturan institusional yang masing-masing mengandung konsekuensi tersendiri terhadap kinerja ekonomi (Eggertsson, 2000: 501). Lahirnya ilmu ekonomi institusional ini bertolak dari asumsi-asumsi

1. Kontrol yang lemah akan mendorong pemborosan dan pemanfaatan sumber daya secara sembrono.
2. Kontrol yang tertib akan menurunkan niat curang dan memperkecil biaya transaksi yang selanjutnya memacu spesialisasi produksi dan investasi jangka panjang.
3. Pemilahan kontrol sosial mempengaruhi distribusi kekayaan.
4. Kontrol organisasional mempengaruhi pilihan organisasi ekonomi.
5. Kontrol bisa secara langsung mengatur pemakaian sumber daya ke sektor-sektor yang dianggap paling tepat.

6. Struktur kontrol mempengaruhi pengembangan jangka panjang sistem ekonomi karena struktur itu mempengaruhi nilai relatif investasi dan jenis-jenis proyek yang akan diutamakan (Eggertsson, 2000: 501).

Ditinjau dari usianya, ilmu ekonomi institusional tersebut relatif baru, karena secara formal baru berdiri sejak tahun 1980, kendati perintisannya jauh dilakukan pada masa-masa sebelumnya. Coase dalam *The Nature of the Firm* (1937), dan *The Problem of Social Cost* (1960), tentang biaya transaksi; Alchian dalam *Some economics of property* (1961) tentang hak cipta. Pada tahun 1980-an inilah upaya-upaya pengembangan teori ekonomi umum yang baku tentang institusi memperoleh momentumnya. Penyempurnaan-penyempurnaan pendekatan standar dalam ilmu ekonomi institusional telah berhasil dilakukan, bersamaan dengan munculnya ekonomi neo-institusional yang mencakup berbagai hal penting yang semula tidak termasuk dalam pendekatan konvensional. Beberapa modifikasi tersebut telah diterima sebagai bagian dari aliran utama ilmu ekonomi serta cabang-cabangnya seperti; studi organisasi industri yang ditulis Milgram dan Roberts tahun 1992, dan ekonomi hukum yang ditulis Posner tahun 1992 (Eggertsson, 2000: 503).

Ekonomi Matematik. Ilmu 'ekonomi matematik' (*mathematical economics*) mulai berkembang sejak tahun 1950-an. Sebelum terjadi formalisasi ekonomi matematika dan sebelum dikenal teknik-teknik canggih dalam analisis matematika ekonomi tersebut terutama bertumpu pada teknik-teknik analisis grafik dan presentasi. Memang pada tingkat tertentu sangat efektif, tetapi teknik-teknik tersebut juga dibatasi oleh karakter dua dimensional dari selembar kertas. Selain itu juga, teknik-teknik grafik dapat mengemukakan asumsi-asumsi implisit yang signifikansinya mungkin tidak kentara atau sangat sulit dimengerti (Hughes, 2000: 630). Tetapi setelah tahun 1950-an, terutama yang ditandai oleh arus perpindahan ahli-ahli matematika menjadi akademisi ekonomi (seperti Kenneth Arrow, Gerard Debreu, Frank Hahn, Werner Hildenbrant), maka ilmu ekonomi matematik-pun menjadi berkembang dengan pesat sebagai suatu disiplin ilmiah.

Ditinjau dari substansinya dalam ekonomi matematik tersebut, mula-mula digunakannya teori ekuasi simultan (*simultaneous equations*) oleh *Leon Walras*, untuk membahas problem ekuilibrium dalam beberapa pasar yang saling berhubungan dengan

digunakannya kalkulus oleh *Edgeworth* untuk menganalisis perilaku konsumen. Berbagai permasalahan yang timbul ini tetap berada pada inti ekonomi matematika modern, kendati teknik-teknik matematika yang diterapkan telah berubah seluruhnya. Analisis ekuilibrium umum telah menjadi sangat bergantung pada perkembangan modern dalam tipologi dan analisis fungsional, sehingga pembagian bidang antara tipe ekonomi matematika yang cukup abstrak dengan matematika murni, hampir tidak jelas sama sekali. Kemudian substansi lainnya adalah teori perilaku konsumen atau produsen, individual mendapatkan manfaat dan kemajuan melalui teori program matematika dan teori analisis cembung atau *convex analysis* (Hughes, 2000: 631). Sebagai implikasinya hasil dari penerapan kalkulus digolongkan pada suatu teori umum yang didasarkan pada konsep fungsi nilai maksimum/minimum, yaitu suatu fungsi laba maupun biaya untuk produsen. Hal ini merupakan suatu fungsi kegunaan atau pembelanjaan tidak langsung bagi konsumen. Dengan demikian teori ini menggali hasil dualitas yang menandai berbagai masalah maksimalisasi dan minimalisasi yang saling berhubungan, yang dapat diberi interpretasi ekonom langsung. Seperti halnya kumpulan 'harga-harga bayangan' dengan berbagai hambatan yang membatasi berbagai pilihan yang layak. Pendekatan terhadap teori konsumen dan produsen tersebut mempunyai implikasi-implikasi empiris penting dan dapat diuji (Hughes, 2000: 631).

Ekonomi Sumber Daya Alam; Ilmu ekonomi sumber daya alam (*natural resource economics*), merupakan bidang ekonomi yang mencakup kajian deskriptif dan normatif terhadap alokasi berbagai sumber daya alam (yaitu sumber daya yang tidak diciptakan melalui kegiatan manusia, melainkan disediakan oleh alam). Beberapa masalah penting dalam hal ini berkaitan dengan jumlah sumber tertentu yang bisa atau harus ditransformasikan dalam proses-proses ekonomi, dan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya antara generasi sekarang dan yang akan datang (Sweeney, 2000: 697).

Pemanfaatan sumber daya alam (terutama hutan, perikanan, energi, dan lahan pertanian) telah menarik perhatian para ekonom sejak zaman Adam Smith. Namun baru-baru ini pengkajian tentang teori-teori khusus yang menyangkut sumber daya alam tersebut secara formal telah dilakukan. Perbedaannya dengan ilmu ekonomi lingkungan (yang membahas dampak kegiatan-kegiatan manusia terhadap lingkungan alam), memang

agak kabur. Tetapi biasanya, *pertama*; lingkungan alam mengandung sedikit limbah pembuangan. *Kedua*; antara sumber daya yang bisa diperbaharui dan yang bisa habis dipakai (Sweeney, 2000: 697). Sumber daya yang bisa diperbaharui, seperti hutan, ikan, dan udara, maupun air bersih, dicirikan dengan cadangan sumber daya yang mampu memperbaharui sendiri. Sedangkan sumber daya yang bisa habis dipakai ("tidak bisa diperbaharui") atau ("bisa habis sama sekali"), seperti minyak bumi, biji besi, logam mulia, dicirikan dengan adanya cadangan sumber daya yang tidak dapat memperbaharui sendiri. *Ketiga*, apakah suatu sumber daya dikelola sebagai hak milik bersama atau perusahaan ataupun pribadi. Jika milik bersama biasanya mengabaikan biaya kesempatan (*opportunity cost*) akhirnya cenderung menggunakannya secara berlebihan. Namun jika pribadi ataupun perusahaan, membuat para pengguna potensial untuk memperhitungkan biaya-biaya kesempatan itu, dan akhirnya penggunaan sumber daya akan lebih efektif dan efisien (Sweeney, 2000: 697).

Ekonomi Pertahanan. Ekonomi pertahanan (*defence economic*), merupakan studi tentang biaya-biaya pertahanan yang mengkaji masalah pertahanan dan perdamaian dengan menggunakan analisis dan metode ekonomi yang meliputi kajian mikroekonomi dan makroekonomi seperti optimisasi statis dan dinamis, teori-teori pertumbuhan, distribusi, perbandingan data statistik dan ekonometrik (penggunaan statistika model ekonomi). Sedangkan pelaku-pelaku dalam studi ini antara lain, Menteri Pertahanan, birokrat, kontraktor pertahanan, anggota parlemen, bangsa-bangsa yang bersekutu, para gerilyawan, teroris dan pemberontak (Sandler, 2000: 208).

Bidang ini berkembang pesat setelah Perang Dunia II, yang topik-topiknya mencakup; perlombaan senjata, studi aliansi dan pembagian beban, kesejahteraan, penjualan senjata, kebijakan pembelian senjata, pertahanan dan pembangunan, industri senjata, persetujuan pembatasan senjata, dampak ekonomis dari suatu perjanjian, evaluasi usulan perlucutan senjata, pengalihan industri pertahanan, dan sebagainya. Ketika terjadi Perang Dingin blok Barat dan Timur, perhatian ekonomi pertahanan umumnya tertuju pada masalah-masalah beban pertahanan dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada pasca Perang Dingin, para ekonom pertahanan memusatkan perhatian pada konversi perindustrian militer, aspek sumber daya persenjataan, biaya pemeliharaan

pasukan penjaga perdamaian, dan pengukuran keuntungan perdamaian (Sandler, 2000: 209).

Ekonomi Sisi Penawaran (*Supply-Side Economic*); istilah tersebut memiliki makna ganda, yakni makna *umum* dan *khusus*. Makna umum 'ekonomi sisi penawaran' biasanya berkaitan dengan analisis yang menekankan pada arti penting faktor penawaran dalam menentukan *output* dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Sedangkan dalam pengertian yang khusus istilah tersebut diasosiasikan dengan kebijakan ekonomi Amerika Serikat pada tahun 1980-an, yang kadang-kadang merujuk pada *Reagonomics*, yang berpandangan bahwa pemotongan pajak tidak perlu disesuaikan dengan pemotongan pengeluaran, karena pemotongan pajak akan menyebabkan pertumbuhan yang cukup untuk mengembalikan pendapatan pajak (Siebert, 2000: 1072).

Ekonomi sisi-penawaran ini bersifat mikro, sebuah faktor yang dapat menjelaskan pengabaianya dalam ekonomi makro. Ekonomi ini juga dibangun atas dasar analisis pilihan individu. Faktor-faktor utama dalam determinasi sisi-penawaran dari *output* antara lain adalah efek insentif terhadap produksi, efesiensi pasar tenaga kerja, penghindaran peraturan dan tingkat tabungan (Siebert, 2000: 1072). Ide-ide ini terletak di jantung ekonomi, sedangkan para penulisnya di antaranya, Kendrick yang menulis *Productivity Trends in United States* (1961); Kuznets dalam *Economic Growth of Nation* (1971); Mincer dan Polachek dalam *Family Investmen in Human Capital: Earning of Women* (1974) tentang sensitivitas penawaran tenaga kerja wanita terhadap upah pasca-pajak; dan Becker dalam *A Tretise on the Family* (1981) tentang ekonomi keluarga. Namun dalam pengertian yang lebih spesifik lagi, 'ekonomi sisi-penawaran' dikembangkan oleh para ahli ekonomi seperti Paul Craig Roberts yang dituangkan dalam karyanya *The Suply Side Revolution": An Insider's Account of Policymaking in Washington* (1984); Bartlett dan Roth dalam bukunya *The Supply-Side Solution* (1984).

Ekonomi Kesejahteraan (*Welfare Ecomics*), adalah kajian ilmu ekonomi tentang bagaimana melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik, atau optimal, dalam menggunakan sumber-sumber yang terbatas (Pearce, 2000b: 1141). Dengan demikian di sini kata kuncinya adalah "optimalisasi" dan "kesejahteraan sosial". "Optimalisasi" didefinisikan dalam pengertian maksimalisasi kesejahteraan sosial. Sedangkan "kesejahteraan sosial" diartikan sebagai jumlah kemakmuran semua anggota dari

masyarakat tertentu. Dengan menggunakan penilai atas nilai, dalam pengertian bahwa individu menilai kemakmuran mereka sendiri untuk diperhitungkan dalam formulasi suatu ukuran kesejahteraan sosial, maka berarti kita menggunakan basis ilmu ekonomi kesejahteraan "Peretian" (istilah pengikut Vilfredo Pareto). Untuk menyatakan bahwa kesejahteraan seseorang-lah meningkat, hal itu memerlukan penataan definitif lebih lanjut, yang berarti bahwa peningkatan kesejahteraan seseorang tersebut telah terjadi tanpa diikuti dengan makin memburuknya keadaan kesejahteraan orang lain. Dengan demikian, kesejahteraan sosial meningkat, bila setidaknya-tidaknya ada satu individu yang meningkat kesejahteraannya, dan tidak ada individu-pun yang mengalami penurunan kesejahteraan (Pearce, 2000b: 1142). Oleh karena itu ilmu ekonomi kesejahteraan Paretian, adalah sangat steril karena menuntut di mana adanya peningkatan kesejahteraan, di mana tak seorangpun dirugikan oleh suatu kebijakan. Sebab umumnya dalam suatu kebijakan, selalu ada yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan.

Di sini terjadi kesulitan untuk memperbandingkan keuntungan yang diperoleh seseorang dengan kerugian yang diderita orang lain dalam memperoleh kesejahteraan. Inilah yang disebut dengan kepalsuan perbandingan kemanfaatan interpersonal (*fallacy of interpersonal comparisons of utility*). Kalau saja pandangan itu diterima, pasti muncul kesulitan lain untuk merumuskan kriteria perolehan keuntungan dalam hal kesejahteraan sosial tersebut. Prinsip yang diambil Kaldor dalam *Welfare Propositions of Economics and Interpersona Comparisons of Utility* (1939) dan Hicks dalam *Foundations of Welfare Economics* (1939), mengemukakan bahwa; terdapat keuntungan bersih kesejahteraan sosial jika mereka yang memperoleh keuntungan itu mau mengkompensasikan sebagian keuntungannya untuk orang-orang yang menderita kerugian dan tentu masih ada sisa keuntungan yang bisa dinikmatinya. Dengan kata lain bila kompensasi itu terjadi, artinya orang-orang yang mengalami kerugian akan diberi kompensasi penuh sehingga kesejahteraan mereka tidak berubah antara sebelum dan sesudah ditetapkannya kebijakan yang sedang diteliti. Sebaliknya, keadaan orang-orang yang mendapat keuntungan, pasti lebih baik karena kompensasi yang disyaratkan lebih sedikit daripada keuntungan bruto. Inilah prinsip kompensasi Kaldor-Hicks (Pearce, 2000b: 1142).

Alanilis mendasar ekonomi kesejahteraan pada prinsipnya tetap tidak berubah sejak pertama lahir pada pertengahan 1970-an hingga sekarang. Perlu diketahui ilmu ini

telah membangun landasan bagi *environmental economics* (ilmu ekonomi lingkungan) serta analisis manfaat biaya. Di samping itu karya-karya yang terakhir ini mereka berusaha mengintegrasikan konsep-konsep psikologi, khususnya divergensi yang ditemukan dalam penggunaan konsep-konsep Hicks tentang variasi-variasi kompensasi dan ekuivalen (*compensating and equivalent variations* = CV and EV), dua ukuran mengenai surplus konsumen. Secara teoretis, kedua ukuran itu hampir sama. Sedangkan dalam praktiknya bahwa EV secara substansial di atas CV, atau dalam bahasa yang lebih lugas "kesediaan untuk menerima kompensasi" untuk mentolerir kerugian kesejahteraan jauh melampaui "kesediaan untuk membayar" demi perbaikan lingkungan yang ekuivalen (Pearce, 2000b: 1143).

Ekonomi Dualistik (*Dual Economy*), merupakan istilah yang memiliki makna akademis teknis maupun makna yang lebih umum. Dikatakan demikian karena dalam aspek teknisnya istilah ini merujuk kepada adanya dua sektor berlainan dalam perekonomian yang sama, yang masing-masing memiliki pijakan budaya, aturan main, teknologi, pola-pola permintaan, dan juga praktik pelaksanaannya sendiri. Sedangkan di sisi lain yang mencerminkan hal lebih umum adalah adanya perbedaan sektor subsisten tradisional yang berpendapatan rendah khususnya di pedesaan-pedesaan dengan sektor kapitalis perkotaan yang tumbuh pesat dan lebih modern (Singer, 2000: 248).

Konsep ekonomi ganda (*dual economy*) tersebut untuk pertama kalinya dimunculkan oleh Boeke di Indonesia dalam empat tulisan yang serupa; *Oriental Economics* (1947); *Economics and Aconomics Policy of Dual Societies, as Exemplified by Indonesia* (1953); *Three Forms of Disintegration in Dual Societies* (1954), dan *Western Influence on the Growth of Easrern Popolation* (1954), sebagai suatu istilah untuk menyebut hadirnya sektor modern dan tradisional secara bersamaan dalam perekonomian kolonial. Istilah ganda atau dualistik, bertolak dalam waktu yang sama terdapat dua atau lebih sistem sosial, dan masing-masing sistem sosial ini jelas berbeda satu sama lain dan masing-masing menguasai bagian tertentu dari masyarakat bersangkutan, di situ kita berhadapan dengan masyarakat ganda (*dual*) atau jamak (*plural society*)(Boeke, 1953: 1).

Selanjutnya Boeke mengemukakan bahwa teori ekonomi Barat berlandaskan pada kecenderungan-kecenderungan masyarakat Barat, yaitu: (a) kebutuhan ekonominya tidak

terbatas, (b) sistem yang melandasi kehidupan ekonominya adalah ekonomi uang, (c) landasan kegiatan ekonomi perorangan adalah organisasi dalam bentuk perusahaan. Ketiga azas tersebut saling berkaitan..

Sedangkan di lain pihak berdiri masyarakat desa yang bercorak pra-kapitalis dengan ikatan sosialnya yang asli organik; sistem suku tradisional; kebutuhan yang terbatas dan sederhana; azas produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan sendiri; tidak menggunakan jual-beli; sebagai jalan untuk untuk memenuhi kebutuhan; tidak ada keinginan untuk mencari laba, bersaing, berdagang, menghimpun modal, dan mengembangkan industri memakai mesin; kegiatannya tidak teratur, dan sikap memandang remeh dorongan ekonomi, dan mencampuradukkan ini dengan dorongan agama, etika, sosial dan tradisional lainnya. Pendeknya, dengan ciri-ciri pra-kapitalis ini berjuta-juta dunia kecil ini betul-betul bisa dikatakan dunia tersendiri (Boeke, 1947: 3).

Terhadap teori ekonomi dualistik tersebut, ternyata menimbulkan perdebatan sengit pro dan kontra baik dikalangan para sarjana ekonomi Barat maupun domestik (Higgins, 1956; Wageningen, 1961; Geertz, 1963; Sadli, 1982). Beberapa ahli mengatakan bahwa kita tidak dapat mengatakan untuk ekonomi primitif dan tradisional ada teori ekonomi tersendiri. Kalaupun mungkin ada, tetapi kalau teori ekonomi itu harus menerangkan soal; apa, bagaimana, dan untuk siapa dalam masyarakat bersangkutan, maka Boeke tidak berhasil menciptakan teori semacam itu. Apa yang dilakukannya sebenarnya pada dasarnya menerangkan perilaku penawaran dan permintaan, yakni hubungan terbalik tingkat upah dan penawaran tenaga kerja, dan perilaku permintaan yang tidak peka pada orang dengan “kebutuhan terbatas”(Sadli, 1982; 49). Apa yang dikatakan Higgins juga mungkin benar, bahwa hubungan ekonomi dalam masyarakat ganda sebenarnya dapat diterangkan dengan ilmu ekonomi yang ada. Karena itu tingkah laku penawaran faktor-faktor produksi dan permintaan konsumen dapat diterangkan atas dasar ciri-ciri sosial tersebut; tetapi sulit sekali pola tingkah-laku penawaran dan permintaan yang biasa untuk sampai pada keseimbangan. Selain itu juga sistem ekonomi dualisme, sebetulnya hanyalah bersifat sementara dan universal karena tergantung pada kemampuan untuk memadukan perekonomian secara keseluruhan, sebagai akibat perbedaan dalam ketersediaan faktor-faktor produksi (*endowment factor*), atau perbedaan dalam fungsi produksi. Dalam proses pembangunan akan terjadi proses penuluran dan

penyebaran dari sektor modern ke sektor tradisional, sehingga akhirnya dualisme akan hilang dengan sendirinya (Mubyarto, 1983: 254).

Ekonomi Informal (Informal Economy), merupakan suatu istilah yang sering dihubungkan dengan perekonomian ”bawah tanah”, ”perekonomian gelap” atau ”perekonomian yang terabaikan”, yang semuanya itu mengacu pada jenis-jenis transaksi ekonomi yang tidak tercermin pada statistik resmi (Heertje, 2000: 492). Sumber-sumber pendapatan yang tidak pernah dilaporkan resmi itu mencakup pula pendapatan dari kegiatan-kegiatan yang tidak sempat terliput oleh dinas pajak secara formal. Contohnya adalah pedagang kaki lima, industri rumah tangga seperti; pembuat sumbu kompor dan lampu minyak, pembantu rumah tangga, pedagang asongan, pengumpul barang-barang bekas, botol kosong dan kardus-kardus, atau kegiatan-kegiatan penyediaan jasa pengangkut barang di terminal bus dan stasion kereta api, penyemir spatu di pusat-pusat keramaian, penyewa payung musim hujan, dan sebagainya.

Pergerakan atau pertumbuhan ekonomi informal ini cenderung bersifat responsif ketimbang kreatif. Sebab bentuk ekonomi dan sektor ini sekedar memberi reaksi terhadap pertumbuhan pendapatan di sektor non-pertanian dan dalam kegiatan-kegiatan bisnis di perkotaan. Selain itu sektor ini juga terbuka untuk siapa saja, karena tidak sulit memasuki kelompok ini. Sektor ini telah mampu menghasilkan berbagai barang dan jasa dengan harga yang murah, mengingat mereka hanya memanfaatkan keahlian sederhana seperti dalam pengolahan barang-barang bekas; kayu, kertas, plastik, dan logam bekas. Mereka mengekonomiskan modal yang sangat langka dengan memakai berbagai jenis peralatan murah dan sederhana, serta operasinya tidak memakai bangunan atau fasilitas khusus (Elkan, 2000: 494)

Keberadaan sektor ini di banyak negara sering dipandang sebagai entitas atau lawan modernisasi karena metode produksinya dianggap tidak layak. Bahkan kedekatan sektor ini dengan kriminalitas sering dituding pemerintah dan masyarakat; pencurian, penyalahgunaan dan perdagangan obat terlarang, pembuat keonaran, ketertiban dan kesemerawutan jalan raya sering membuatnya dicurigai atau bahkan dimusuhi. Konsekuensinya di banyak negara sektor ini diawasi dan dibatasi secara ketat oleh berbagai peraturan, dan banyak kegiatannya dianggap illegal. Namun sikap pemerintah yang demikian lambat laun berubah, antara lain berkat pengaruh laporan-laporan

International Labour Office. Contohnya laporan yang terjadi di Kenya yang merupakan dokumen pertama yang menyajikan tinjauan lengkap tentang operasi sistematis sistem sektor informal, yang kemudian berhasil mendorong pemerintah di banyak negara untuk mengakui arti penting kegunaan sektor tersebut. Apalagi jika ditelusuri sektor ini mampu beroperasi tanpa disubsidi atau proteksi apapun dalam menyaingi produk-produk impor, menciptakan lapangan kerja, serta untuk bertindak sebagai unit-unit bisnis yang tangguh. Di negara-negara maju saja perekonomian informal itu serangkaian studi empiris yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa pendapatan dan atau produksi tersembunyi itu mencapai 20 hingga 30 % dari total pendapatan nasional riil. Sedangkan di negara-negara berkembang, sektor informal memainkan peran yang lebih besar lagi, terutama di daerah-daerah perkotaan, sehingga sektor tersebut dipandang sebagai salah satu elemen dinamis dan berharga bagi keseluruhan perekonomian mereka (Heertje, 2000: 493; Elkan 2000: 494). Menurut hasil penelitian seorang India mengemukakan

... tumbuhnya sektor informal di Afrika 59% terdapat di kota Freetown, 59% di Kumasi, dan 66% di Lagos. Hasil studi lainnya menunjukkan bahwa di Bamako (Mali) sebesar 55%; di Nouachott (Mauritania) 81%; di Lome (Togo) 63%; di Younde (Kamerun) 81 %; dan Kagali 60%. Begitu juga di Asia dan Amerika Latin presentasinya sebagai berikut: 37% di Kolombo, 62% di Jakarta; 33% di Manila; 32% di Kordoba; dan 55% di Campinas (Sethuraman, 1996: 94).

Adanya pengakuan atas peran ekonomi dan sektor informal ini mendorong baik pemerintah maupun lembaga-lembaga donor internasional untuk menyediakan bantuan, entah itu dalam bentuk program pelatihan, suntikan modal, maupun fasilitas produksi agar perusahaan-perusahaan kecil sektor informal tersebut dapat berkembang lebih pesat (Elkan, 2000: 495).

Ekonomi Campuran (Mixed Economy): Konsep *ekonomi campuran* merujuk kepada bentuk pengakuan keharusan sistem ekonomi pasar bercampur dengan intervensi negara. Sistem ekonomi pasar diterapkan untuk tujuan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Sementara kebijakan intervensi negara secara luas demi keadilan sosial. Sistem ekonomi campuran ini akhir-akhir ini juga dinamakan sistem ekonomi pasar sosial atau *soziaal marktwirtschaft* (Seda, 2006). Dengan demikian dalam ekonomi campuran ini terdapat upaya pengendalian sistem harga untuk pengaturan ekonominya, tetapi menggunakan juga berbagai intervensi pemerintah untuk menanggulangi ketidakstabilan

makroekonomis dan kegagalan pasar. Oleh karena itu dalam sistem perekonomian tersebut juga merupakan campuran dari pilihan pasar dan pilihan kolektif atau publik (Samuelson dan Nordhaus, 1990: 527).

Dalam suatu mekanisme pasar, tidak seorangpun atau satu organisasi manapun yang benar-benar secara sadar menaruh perhatian terhadap tiga rangkaian masalah (apa, bagaimana, dan bagi siapa), melainkan pembeli dan penjual masuk pasar dengan maksud menetapkan harga dan jumlah. Di sini melakukan pengendalian ekonomi baik secara terlihat maupun tak terlihat. Untuk melihat betapa hebatnya fakta arus ini, kita dapat melihat beberapa kota metropolitan. Tanpa adanya arus barang yang terus-menerus baik masuk maupun ke luar, Jakarta misalnya, dapat dipastikan akan timbul bencana kelaparan yang hebat. Apalagi kedudukan Jakarta yang didatangi sejumlah orang dari kota-kota sekitarnya, propinsi dan pulau-pulau lain bahkan dari manca negara. Begitu banyak jenis maupun jumlah makanan yang dibutuhkan oleh penduduk Jakarta khususnya. Barang-barang telah menempuh waktu mingguan bahkan bulanan dengan tujuan akhir Jakarta. Sesuatu yang dapat kita amati adalah berapa besar tingkat pengendalian pemerintah atas berbagai kegiatan ekonomi, seperti: peraturan mengenai tarif atau bea masuk dalam perdagangan internasional, undang-undang mengenai sumber energi, peraturan tentang upah minimum perburuhan, lingkungan hidup, perpajakan nasional maupun daerah, perlindungan anak-anak dan perempuan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang tidak terlihat oleh kita adalah; seberapa jauh kehidupan ekonomi berkembang tanpa campur tangan pemerintah. Ribuan jenis komoditi ternyata dihasilkan oleh jutaan manusia tanpa adanya pengarahan terpusat atau rencana induk. Jadi, semua kegiatan ekonomi ini berlangsung tanpa adanya paksaan oleh siapa-pun

Namun demikian, kita jangan lupa bahwa "tangan gaib" (*invisible hand*)-pun terkadang membawa perekonomian ke jalur yang salah, mengalami kegagalan, distribusi pendapatan yang kurang adil dan sebagainya. Di sinilah pemerintah berperan dalam mengatur perekonomian. Terdapat tiga peran yang dimainkan pemerintah, yakni: *efisiensi*, *keadilan*, dan *stabilitas*. Sebagai tindakan pemerintah dalam *efisiensi* adalah berupa segala upaya untuk memperbaiki kegagalan pasar seperti monopoli maupun oligopoli yang tidak menyehatkan persaingan pasar. Untuk kebijakan *keadilan*, adalah pemerataan kesempatan pendapatan yang dirasakan oleh seluruh kepentingan ataupun

lapisan masyarakat termasuk golongan miskin. Sedangkan kebijakan *stabilisasi*, adalah berusaha mengikis fluktuasi dan siklus ekonomi dengan menekan angka pengangguran, inflasi, serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi (Samuelson dan Nordhaus, 1990: 61).

Ekonomi Pertanian (*Agrikultural Economics*), konsep ini untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh mazhab fisiokrat khususnya oleh tokoh Francois Quesnay (1654-1774), seorang dokter ilmu bedah Prancis yang pernah menjadi dokter pribadi Raja Louis XV, juga dokter kepercayaan selir raja, Madame de Pompadour. Di samping profesinya sebagai dokter, ia seorang ahli ekonomi yang menulis artikelnya "ilmu ekonomi" dalam *Grande Encyclopedie* dan dalam buku lainnya *Tableau Economique* yang membuat model aliran ekonomi antara berbagai sektor di masa kebangkitan industrialisasi Prancis (Saith, 2000: 17). Asumsinya adalah bahwa bidang pertanian dinyatakan sebagai satu-satunya sektor yang produktif, sebab hanya bidang pertanian itulah reproduksi dilipatgandakan seperti halnya padi-padian. Sedangkan sektor manufaktur dipandang sekedar mengubah produksi pertanian ke bentuk barang-barang jadi atau rakitan. Selain itu mereka berpendapat bahwa proses manufaktur tersebut tidak menghasilkan nilai tambah ekonomis. Tentu saja pendapat di atas akan bertolak belakang dengan para ahli ekonomi politik klasik, dalam hal ini David Ricardo khususnya. Ia mengemukakan pendapatnya bahwa naiknya permintaan makanan akan memperluas daerah penanaman di lahan-lahan yang krang subur serta menaikkan harga padi-padian maupun sewa lahan/tanah. Konseptualisasi proses ekonomi yang semacam ini yang menjadi landasan teoretis dari ekonomi klasik yang menganut bias anti tuan-tanah (Saith, 2000: 17).

Selain kaum Fisiokrat, kelompok ekonomi Marxis dan Neo-Klasik adalah kelompok-kelompok yang menganut sistem ekonomi pertanian. Kaum Marxis memusatkan perhatiannya pada analisis tentang peran bidang pertanian dalam masa transisi antara mode produksi feodal ke zaman kapitalis, yaitu sebuah proses yang ditandai dengan akumulasi modal dan transfer surplus yang primitif dari sektor-sektor pra-kapitalis yang kebanyakan bersifat agraris menuju sektor kapitalis yang mayoritas adalah industri. Dalam hal ini ekonomi pertanian dianalisis sebagai makroekonomi, selain itu perlunya pembentukan dan ekstraksi dari surplus pertanian. Sedangkan untuk

ekonomi neo-klasik menganggap pentingnya ekonomi pertanian, karena mereka memandang bahwa ilmu ekonomi pertanian memiliki hubungan amat dekat dengan metode serta skema teori neo-klasik. Ia lebih memusatkan diri pada mikro-ekonomi, di mana perhatiannya lebih memfokuskan pada efisiensi statis dari penggunaan sumber daya dalam produksi pertanian (Saith, 2000: 18). Dengan demikian masalah pokok dalam ekonomi pertanian direduksi menjadi; bagaimana memaksimalkan keuntungan pada setiap petani yang sumber-sumber daya dan teknologi tertentu dan dalam lingkungan ekonomi yang ditandai dengan kompetisi sempurna di semua pasar *input* dan *otputnya*. Oleh karena itu dalam hal ini tidak ada analisis mengenai struktur hubungan produksi dengan organisasi agraria atau transformasinya dalam menghadapi ransangan pertumbuhan ekonomi.

Ilmu Ekonomi Tingkah-Laku (Behavioral Economics). Sebetulnya agak sulit untuk mengkhususkan pada kajian "ilmu ekonomi tingkah-laku", sebab ilmu ekonomi sendiri pada hakikatnya adalah ilmu tentang 'tingkah-laku' manusia. Oleh karena itu memang agak *pleonasmе* untuk menggunakan istilah "ilmu ekonomi tingkah-laku". Namun demikian terdapat perbedaan yang berarti antara ilmu ekonomi "tingkah-laku" khususnya dengan ilmu ekonomi "neo-klasik", mengingat yang terakhir tersebut umumnya menjauhi studi empiris dan cenderung lebih memilih pendekatan deduksi secara logis dari aksioma-aksioma yang rasional (Simon, 2000: 64).

Mengingat dalam ilmu ekonomi tingkah-laku bersifat empiris, maka wajar dalam pengembangan metode yang digunakannya-pun lebih banyak dengan wawancara. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara langsung, sebagai contoh pada pengkajian perilaku konsumen. Dalam hal ini riset lapangan bermaksud untuk mengumpulkan data tentang perkiraan yang telah dibuat sebelumnya mengenai jurang kesenjangan antara tingkah-laku yang sebenarnya dengan rasionalitas yang utuh. Sedangkan dalam ilmu ekonomi neo-klasik yang menggunakan pendekatan deduksi, maka metode yang dikembangkannya adalah metode-metode ekonometri. Dalam metode tersebut banyak menggunakan tumpukan data-data. Seringkali data-data itu berasal dari proses pengumpulan data yang tujuannya bukan semata-mata untuk analisis ekonomi (Simon, 2000: 66).

Ilmu Ekonomi Pembangunan; mengacu pada masalah-masalah perkembangan ekonomi khususnya di negara-negara berkembang dan terbelakang, yang embrionya mulai awal tahun 1940-an, dan lahir setelah Perang Dunia II (Jhinghan, 1994: 3). Dengan demikian ilmu ekonomi pembangunan ini bisa dikatakan sebagai sub-disiplin yang mandiri yang belakangan ini membanjiri dan menggambarkan adanya suasana yang penuh tanda tanya dan meragukan pengaruh ekonomi konvensional yang semakin besar sekaligus sebagai kritik para ahli ekonomi-politik radikal yang semakin jauh menerobos namun mengabaikan negara miskin (Gemmel, 1994: 3). Sebab, tidak dipungkiri kendati studi perkembangan ekonomi telah menarik perhatian para ahli ekonomi sejak kaum Merkantilis, Ekonomi Klasik, maupun sampai Keynes, namun mereka hanya tertarik pada masalah-masalah yang pada hakikatnya bersifat statis dan umumnya lebih dikaitkan dengan kerangka acuan lembaga budaya atau sosial negara-negara Barat (Williamson, 1961: 112).

Tepatnya perhatian mereka dalam ekonomi pembangunan lebih didorong oleh gelombang kebangkitan politik yang melanda Asia-Afrika sesudah PD-II. Keinginan negara-negara tersebut untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang cepat disertai dengan kesadaran bangsa-bangsa di negara-negara maju, bahwa "kemiskinan di suatu tempat merupakan bahaya bagi kemakmuran di manapun", telah membangkitkan minat pada subyek ini. Hal ini dapat kita ketahui sebagaimana Meier dan Baldwin (1976: 12) katakan: "Pengkajian mengenai kemiskinan bangsa-bangsa bahkan terasa lebih mendesak daripada pengkajian kemakmuran".

Namun perlu disadari bahwa minat bangsa-bangsa maju tersebut dalam menghapuskan kemiskinan negara-negara berkembang dan terbelakang tersebut, tidaklah lahir semata-mata dari kemanusiaan. Alasan utamanya adalah waktu itu sedang memuncaknya Perang Dingin blok Barat dan Timur yang menyeret negara-negara berkembang dan terbelakang, di mana masing-masing negara adi daya berupaya mendapat dukungan dengan imbalan bantuan yang melimpah (Jhinghan, 1994: 4). Ketertarikan terhadap negara-negara berkembang dan terbelakang tersebut seperti dinyatakan L.W Shanon dalam *Underdeveloped Areas*, secara potensial mereka banyak menyimpan kekayaan sumber daya alam yang dibutuhkan dunia, dan tidak sedikit yang memiliki lokasi strategis ditinjau dari sudut militer (Shanon, 1967: 1).

B. Metode Ilmu Ekonomi

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa ilmu ekonomi secara sederhana merupakan upaya manusia untuk pemenuhan kebutuhannya yang bersifat tak terbatas dengan alat pemenuhan kebutuhan berupa barang dan jasa yang bersifat langka serta mempunyai kegunaan alternatif. Untuk itu dalam cara pemenuhan kebutuhannya itulah berkaitan dengan metode-metode dalam ilmu ekonomi tersebut.

Adapun metode-metode yang digunakan dalam ilmu ekonomi, menurut Chaurmain dan Prihatin (1994: 14-16) meliputi:

1. *Metode Induktif*; yaitu metode di mana suatu keputusan dilakukan dengan mengumpulkan semua data informasi yang ada di dalam realitas kehidupan. Realita tersebut dalam setiap unsur kehidupan yang dialami individu, keluarga, masyarakat lokal dan sebagainya mencoba dicari jalan pemecahan sehingga upaya pemenuhan kebutuhannya tersebut dapat dikaji secara cermat mungkin. Sebagai contoh upaya menghasilkan dan menyalurkan sumber daya ekonomi. Upaya tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga sampai diperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang dapat tersedia pada jumlah, harga, dan waktu yang tepat bagi pemenuhan kebutuhan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan perencanaan yang dalam ilmu ekonomi berfungsi sebagai cara ataupun metode untuk menyusun daftar kebutuhan terhadap sejumlah barang dan jasa yang diperlukan masyarakat.
2. *Metode Deduktif*; adalah suatu metode ilmu ekonomi yang bekerja atas dasar hukum, ketentuan atau prinsip umum yang sudah diuji kebenarannya. Dengan metode ini ilmu ekonomi mencoba menetapkan cara pemecahan masalah, sesuai dengan acuan, prinsip, hukum dan ketentuan yang ada dalam ilmu ekonomi. Misalnya, dalam ilmu ekonomi terdapat hukum yang mengemukakan bahwa “jika persediaan barang-barang dan jasa berkurang dalam masyarakat, sementara permintaannya tetap, maka harga barang-barang dan jasa-jasa akan naik harganya”. Bertolak dari hukum ekonomi tersebut, para ahli ekonomi secara deduktif sudah dapat menentukan bahwa harus dijaga agar persediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat tersebut selalu dapat mencukupi dalam kuantitas dan kualitasnya. Boulding (1955: 12) menyebutnya sebagai metode eksperimen intelektual (*the method of intellectual experiment*).

3. *Metode Matematika*; adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dengan cara pemecahan soal-soal secara matematis. Hal ini maksudnya bahwa dalam matematika terdapat kebiasaan-kebiasaan yang dimulai dengan pembahasan dalil-dalil. Melalui pembahasan dalil-dalil tersebut dapat dipastikan bahwa kajiannya itu dapat diterima secara umum.
4. *Metode Statistika*; adalah suatu metode pemecahan masalah ekonomi dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penafsiran data, dan penyajian data dalam bentuk angka-angka secara statistik. Dari angka-angka yang disajikan, kemudian dapat diketahui permasalahan yang sesungguhnya untuk selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Sebagai contoh, pembahasan mengenai masalah pengangguran. Dalam hal ini bisa terlebih dahulu diidentifikasi unsur-unsur yang berkaitan dengan pengangguran, misalnya; data-data perusahaan, data-data tenaga kerja yang terdidik/kurang terdidik, jenis dan jumlah lapangan kerja yang tersedia, jumlah dan tingkat upah yang ditawarkan perusahaan, tempat perusahaan beroperasi, maupun rata-rata tempat tinggal para calon pekerja. Dari data yang terkumpul tersebut, seorang ahli ekonomi akan dapat menyusun pengolahan/analisis dan penafsiran data secara statistik yang berhubungan dengan pemecahan masalah pengangguran tersebut. Selanjutnya, dari angka-angka statistik tersebut kemudian ia dapat menentukan cara-cara yang tepat untuk membantu mengatasi masalah-masalah pengangguran secara akurat berdasarkan tafsiran peneliti terhadap angka-angka yang disajikan secara statistik.

C. Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi

Menurut Irving Kristol, ilmu ekonomi sebagai sebuah disiplin akademis, dalam perjalanan sejarahnya, muncul pada abad ke-17 dan 18 sebagai suatu aspek “revolusi” filosofis yang menciptakan dunia “modern” (Kristol, 1981: 203). Dalam hal ini “manusia ekonomi” yang diciptakan ilmu ekonomi tampil sebagai manusia yang ingin mencapai kepuasan yang tertinggi.

Jika ditelusuri lebih jauh kisah, konsep “manusia ekonomi” itu dapat ditelusuri dalam falsafah *Psikologi Asosiatif* khususnya “hedonisme” serta falsafah “utilitarianisme” yang banyak merambah pengikutnya sejak abad 18 dan 19. Dan kalau

ingin ditelusuri lebih jauh lagi “hedonisme” sudah ada sejak zaman Yunani kuno, salah seorang tokohnya yang terkenal adalah Epikurus (341-271 s.M.) Paham ini berpendapat bahwa kepuasan merupakan satu-satunya alasan dalam tindak susila. Hal ini sesuai dengan pendapat Joseph Schumpeter (1954) menulis sebagai berikut:

Buku ini akan memaparkan perkembangan dan nasib baik analisis ilmiah di bidang ilmu ekonomi, mulai dari zaman *Greaco-Roman* hingga sekarang, dalam suatu kerangka sosial dan politik yang memadai dengan tetap memberi perhatian pada perkembangan-perkembangan di berbagai bidang ilmu sosial lainnya dan juga filsafat.

Sedikit sekali para ekonom kontemporer yang mau melacak ilmunya dari peradaban *Greaco-Roman* (Yunani-Romawi) dan tidak banyak pula yang menonjolkan keeratan hubungan antara ilmu ekonomi dengan ilmu-ilmu lainnya seperti dengan sejarah maupun filsafat (Bills, 2002: 273). Namun dengan menyediakan tulisan 2000 halaman, Schumpeter sengaja melacak hal itu sebelum Adam Smith tahun 1776 menulis *The Wealth of Nations*, yang menandai munculnya ilmu ekonomi yang sepenuhnya berdiri sendiri (Bill, 2002: 273).

Pertama, ide-ide yang berkembang pada jaman *Renaissance* yang menyatakan bahwa manusia adalah bagian dari alam yang berdaulat. Gagasan ini membebaskan para analis ekonomi untuk menerapkan metode-metode rasional dan reduksionis guna mengikis anggapan-anggapan ekonomi yang tidak didasarkan pada fakta atau kajian ilmiah (misalnya, anggapan orang hanya bisa disebut kaya jika ia punya banyak emas).

Kedua, ilmu ekonomi terbebaskan dari ikatan moral, namun tidak lantas menjadi sosok manusia yang penuh dirasuki kekuasaan yang politik ekonominya amoral seperti yang diperkirakan para merkantilis dan teoretisi lainnya, yang di mata Adam Smith dan kawan-kawan tidak realistis. Ilmu ekonomi sekedar lebih “dingin” dalam menanggapi soal-soal moral, dan membuka diri terhadap kajian kritis.

Ketiga, tujuan analisis ekonomi meluas, bukan sekedar pada pemilihan kebijakan dagang demi memperbesar kekuatan negara, melainkan juga menyangkut kehidupan dan kesejahteraan sehari-hari. Perkembangan individualisme liberal di abad 17 dan 18 menggarisbawahi pergeseran itu. Mulai banyak analisis yang dicurahkan pada pengerjaan kesejahteraan individu yang telah dipandang sebagai sesuatu yang wajar, dan tidak lagi dianggap sebagai wujud keserakahan (Bliss, 2000: 273).

Pernyataan yang terakhir inilah nampak adanya titik temu dua aliran besar, yakni aliran yang menghendaki kiprah aktif negara, dan aliran *laissez faire*. Kedua-duanya sama-sama menganggap penting peran negara/pemerintah dalam perekonomian. Hanya saja mereka masih berbeda pendapat secara mendasar tentang sejauh mana peran itu dilakukan? Kebijakan menjadi topik kajian yang sangat diminati, dan sampai sekarang aneka model dan rumusnya terus dikembangkan demi memudahkan berlangsungnya perumusan kebijakan ekonomi yang sebaik-baiknya.

Ilmu ekonomi sendiri terus bergulat dengan persoalan-persoalan epistemologi dan aksiologinya. Ilmu ekonomi memang bukan ilmu pasti seperti fisika, biologi, maupun kimia yang serba eksak. Ilmu ekonomi memiliki model-model data dan asumsi-asumsinya sendiri yang bersifat menyederhanakan atau simplistik. Di dalamnya juga terkandung nilai-nilai, tentang apa yang dianggap baik atau buruk. Padahal ilmu pada umumnya bebas nilai (bukan dalam pengertian acak, namun bebas dari penilaian si ilmuwan).

Secara umum, asumsi kedaulatan selera individu tidak dipersoalkan oleh para ekonom. Sejak Vilfredo Pareto sampai sekarang, dukungan bagi pengejaran kepentingan individu merupakan inti ekonomi kesejahteraan. Namun Hicks (1969) menentang pandangan itu dengan mengungkapkan adanya tiga kelemahan dalam evaluasinya. Hal ini didukung oleh Arrow (1973) yang secara meyakinkan dapat menunjukkan melalui sebuah fungsi kesejahteraan yang diderivasikan dari preferensi individu bahwa prinsip kedaulatan konsumen akan memunculkan pemaksaan atau kediktatoran satu individu kepada individu lainnya. Meskipun rumusan Arrow itu kontroversial (lihat misalnya Sen, 1979), namun pendapatnya telah mengubah keyakinan mutlak tentang kedaulatan konsumen yang semula diumumkan.

Memang sejumlah ekonom lebih suka menanggalkan sikap netral dan melacak implikasi dari suatu kebijakan berdasarkan nilai-nilai mereka sendiri, meskipun ekonom lain mempertahankannya. Hal ini antara lain terwujud berupa teori kebijakan keuangan publik yang mementingkan kepentingan umum; misalnya mereka menegaskan bahwa pajak rata-rata (*lump taxation*) adalah yang paling baik karena tagihan yang dibebankannya terhadap setiap wajib pajak relatif paling kecil, meskipun distribusinya

tidak merata (pajak yang dibayarkan oleh orang kaya dan miskin tidak banyak berbeda (Atkinson dan Stiglitz, 1980).

Perdebatan ini tidaklah berarti bahwa ilmu ekonomi sejak awal sudah demikian sarat dengan nilai. Usulan pajak rata-rata itu lebih bertolak dari sikap yang tidak terlalu mementingkan kaitan antara efisiensi dan distribusi pungutan pajak, serta sikap itu sendiri diwarnai oleh angan-angan akan adanya lembaga-lembaga ekonomi yang sempurna dan mampu menjangkau batas kemungkinan kepuasan (*utility possibility frontier*) melalui kebijakan tertentu. Ilmu ekonomi modern berusaha mencapai “kompatibilitas intensif” atau pengutamaan disain dan fungsi lembaga-lembaga ekonomi, termasuk perpajakan, di mana setiap individu dimudahkan oleh negara dalam mengejar kepentingannya (Fudenberg dan Tirole, 1991).

Dalam ekonomi modern, disain kebijakannya jauh lebih rumit dan canggih, dan begitu juga asumsi pembatasannya lebih banyak daripada perekonomian pada abad sebelumnya khususnya abad ke-18. Bentuk dan sejauh mana peran negara dalam ekonomi dimodelkan dalam konteks disain sistem perpajakan dan regulasi? Harus diakui bahwa kajian tentang desain kebijakan ini kian lama kian lengkap.

Lalu seberapa jauh keberhasilan ilmu ekonomi di akhir abad 20 atau awal 21? Ditinjau sekilas secara ekologis, ilmu ekonomi memang cukup berhasil. Ia mampu mereproduksi diri secara efisien. Namun kemampuannya dalam memecahkan masalah masih perlu dipertanyakan. Bahkan sejak pertengahan tahun 1970-an, para ekonom sering mempertanyakan relevansi ilmu mereka dengan kebijakan, khususnya dalam ekonomi makro yang teori-teorinya masih jauh dari efektif, meskipun mereka sendiri — termasuk Adam Smith dahulu — menyadari bahwa teori tidak akan dapat memperbaiki kondisi pasar. Betapa-pun, ilmu ekonomi akan tetap menarik karena dapat menawarkan perspektif guna memahami apa yang terjadi di pasar.

Hampir setiap kekeliruan kebijakan selalu ditimpakan pada pemikiran intelektual yang melandasinya. Hal ini tidak selalu benar, karena ada kalanya kegagalan kebijakan disebabkan oleh faktor-faktor non-ekonomi ataupun yang lain. Sebaliknya kegagalan ekonomi bisa ikut menyebabkan hancurnya suatu sistem negara seperti yang dialami sistem komunisme di Uni Soviet dan Eropa Timur lainnya. Namun tentu saja pasar atau ekonomi dan langkah-langkah pembinaannya (misalnya liberalisasi) bukan satu-satunya

solusi. Hal ini terbukti dengan gagalnya serangkaian reformasi ekonomi di bekas negara-negara komunis Eropa Timur itu. Kondisi ekonomi di setiap masyarakat terbukti tidak bisa dilepaskan dari pengalaman dan presumsi sejarahnya (Bliss, 2000: 277).

D. Mazhab-mazhab dalam Ekonomi

Ilmu ekonomi mengenal berbagai mazhab, menurut Sastradipoera (2001: 12-82) terdapat kurang lebih sembilan mazhab ilmu ekonomi, yaitu mazhab:(1) merkantilis; (2) fisiokrat; (3) klasik; (4) sosialis; (5) hitoris; (6) marjinalis; (7) institusionalis, (8) neo-klasik, (9) Keynesian, (10) Chicago.

Mazhab Merkantilisme; muncul antara Abad Pertengahan dengan kejayaan *Laissez-Faire* (1500-1776 atau 1800). Menurut Eatwell (1987: 445), merkantilisme merupakan babak panjang pertalian sederhana dalam sejarah pemikiran ekonomi Eropa da kebijaksanaan ekonomi nasional, yang membentang sekitar tahun 1500 sampai tahun 1800. Adanya ‘penemuan-penemuan’ daerah baru yang luas memiliki implikasi bahwa institusi ‘gilda’ tidak memadai lagi, bahkan dianggap sebagai penghambat berkembangnya perdagangan antar negara waktu itu. Akibatnya, mereka melakukan perdagangan dengan berbagai negara hasil temuan mereka, dan semua ini menimbulkan persaingan dagang yang makin menajam antar bangsa penjelajah. Para ‘kapitalis pedagang’ (*marchant capitalists*) memegang peranan penting dalam dunia bisnis. Emas, rempah-rempah, perak yang memberikan kemudahan bagi pesatnya perdagangan dan mendorong tumbuhnya teori mengenai logam mulia (Sastradipoera, 2001: 14).

Pada masa tersebut peran tokoh Thomas Mun (1571-1641) saudagar kaya raya dari Inggris dan Jean Baptist Colbert (1619-1683) adalah seorang Menteri Utama Ekonomi dan Keuangan dari Prancis pada zaman Raja Louis XIV, merupakan dua tokoh penting yang mewakili kaum ‘skolar’ dan saudagar pada waktu itu, sehingga ekonomi merkantilisme ini sering disebut ‘Colbertisme’.

Inti ajaran/mazhab ini bahwa; *Pertama*, emas dan perak khususnya merupakan bentuk kekayaan yang paling banyak disukai, oleh karena itu merka melarang ekspor logam mulia. *Kedua*, negara harus mendorong ekspor dan memupuk kekayaan dengan merugikan negara lainnya (tetangga). *Ketiga*, dalam kebijaksanaan ekspor-impor, berkeyakinan bahwa perkembangan harus dapat diraih dan dikelola dengan jalan meraih

surplus sebesar-besarnya dari penerimaan ekspor barang yang melebihi belanja untuk impor barang. *Keempat*, kolonisasi dan monopolisasi perdagangan harus benar-benar dapat dilaksanakan secara ketat untuk memelihara keabadian kaum koloni tunduk dan tergantung kepada negara induk. *Kelima*, penentangan atas bea, pajak, dan restriksi intern terhadap mobilitas barang. *Keenam*, harus dibangun pemerintah pusat yang kuat, guna menjamin kebijaksanaan merkantilisme tersebut, dan. *Ketujuh*, pentingnya pertumbuhan penduduk yang tinggi namun disertai dengan sumberdaya manusia yang tinggi pula untuk memenuhi kepentingan pemasokan kepentingan militer serta pengelolaan merkantilisme yang kuat pula (Sastradipoera, 2001: 12-18).

Mazhab Fisiokrat, muncul pertama kali di Prancis menjelang berakhirnya zaman merkantilis yang diawali tahun 1756. Istilah "fisiokrat" berasal dari bahasa Yunani, dari kata "physis" berarti alam, dan "kratos" berarti kekuasaan. Secara harfiah berarti "supremasi alam". Tokohnya adalah Francois Quesnay (1654-1774), seorang dokter ilmu bedah Prancis yang pernah menjadi dokter pribadi Raja Louis XV, juga dokter kepercayaan selir raja, Madame de Pompadour. Di samping profesinya sebagai dokter, ia seorang ahli ekonomi yang menulis artikelnya "ilmu ekonomi" dalam *Grande Encyclopedie*. Quesnay mengecam kebijaksanaan ekonomi Colbert, dengan mengatakan bawa seorang menteri tidaklah pantas mengeluarkan kebijaksanaan hanya didorong oleh kecemburuan terhadap keberhasilan perdagangan Belanda dan keindahan industri barang-barang mewah. Hal ini hanya akan menjebloskan negara Prancis dalam kebodohan yang amat dalam, di mana rakyat hanya bisa bicara mengenai "dagang" dan "uang". Semuanya ini tidak lain hanya karena ulah Colbert yang telah menghancurkan sendi-sendi ekonomi rakyat Prancis.

Inti ajaran fisiokrat ini pada hakikatnya berlandaskan hukum alam. Sebagaimana Isaac Newton (1643-1727) yang telah menemukan hukum dunia fisik, maka Quesnay percaya bahwa seluruh kegiatan manusia harus dibawa ke ke dalam harmoni dengan hukum alam. Intinya, *pertama*, Semboyan *laissez-faire, laissez-passer* yang berasal dari Vincent de Gournay (1712-1759) yang arti konotatifnya "biarkan orang berbuat seperti yang mereka sukai tanpa campur-tangan pemerintah" mengisaratkan betapa pemerintah harus membatasi diri dalam intervensinya dalam perekonomian jelas bertentangan dengan kaum merkantilis, maupun feodalis. *Kedua*, tekanan pada sektor pertanian yang

produktif yang memungkinkan terjadinya surplus atau produk neto di atas nilai sumber daya yang digunakan. *Ketiga*, pemilik tanah harus dibebani pajak yaitu dalam bentuk satu macam pajak. Sekalipun perekonomian Prancis tidak menjadi lebih baik, namun fisiokrat telah memberikan sumbangan yang bermakna bagi perkembangan ilmu ekonomi, terutama dalam semboyan *laissez-faire*, fisiokrat mengubah perhatian para ekonom kepada masalah peranan pemerintah dalam perekonomian yang didasarkan pada persaingan bebas dan kebebasan memilih serta membuat keputusan (Sastradipoera, 2001: 21-27)..

Mazhab Klasik; mazhab ini secara umum mengacu kepada sekumpulan gagasan ekonomi yang bersumber dari formulasi David Hume, yang karya terpentingnya diterbitkan pada tahun 1752 dan munculnya seorang ekonom besar yang pernah menjadi Guru Besar Falsafah Moral di Universitas Glasgow, Adam Smith dengan karyanya *An Inquiry into the Nature and causes of the Wealth of Nations* tahun 1776 sampai Ricardo, McCulloch John. Stuart. Mill, dan Lord Overstone (1837). Gagasan-gagasan kedua tokoh tersebut mendominasi ilmu ekonomi, khususnya yang berkembang di Inggris, selama seperempat terakhir abad 18 dan tiga perempat pertama abad 19 (O'Brien, 2000: 120).

Inti mazhab klasik tersebut pada hakikatnya terletak pada gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi berlangsung melalui interaksi antara akumulasi modal dan pembagian kerja. Akumulasi modal dapat dilakukan dengan menunda atau mengurangi penjualan *out-put* dan hal ini baru akan bermanfaat jika dibarengi pengembangan spesialisasi dan pembagian kerja. Pembagian kerja itu sendiri nantinya akan dapat meningkatkan *total out-put* sehingga memudahkan dilakukannya akumulasi modal lebih lanjut. Jadi jelaslah bahwa antara kedua hal tersebut terdapat hubungan timbal-balik yang sangat penting. Pertumbuhan ekonomi hanya dapat ditingkatkan jika modal bisa ditambah, dan atau jika alokasi sumber daya (pembagian kerja) dapat disempurnakan. Namun pembagian kerja itu sendiri dibatasi oleh ukuran atau skala pasar, yang pada gilirannya ditentukan oleh jumlah penduduk dan pendapatan perkapita yang ada. Tatkala modal terakumulasi, tenaga kerja akan kian dibutuhkan sehingga tingkat upah-pun meningkat untuk memenuhi kebutuhan "subsisten" baik secara psikologis maupun fisiologis (O'Brien, 2000: 121). Ilmu ekonomi klasik tersebut merupakan prestasi

intelektual yang mengesankan. Landasan-landasan teoretis yang dikembangkannya menjadi pijakan bagi teori-teori perdagangan dan moneter sampai sekarang ini.

Mazhab Sosialisme. Dalam mazhab sosialisme ini sistem pemilikan dan pelaksanaan kolektif atas faktor-faktor produksi (khususnya barang-barang modal), biasanya oleh pemerintah. Ide-ide sosialis dan gerakan politik mulai berkembang pada awal abad ke-19 di Inggris dan Prancis. Periode antara tahun 1820-an sampai 1850-an ditandai dengan pletoria beragam sistem sosialis yang diusulkan oleh Saint-Simon, Fourier, Owen, Blanc, Proudhon, Marx dan Engels, serta banyak lagi pemikir sosialis lainnya. Kebanyakan sistem/mazhab ini bersifat utopia dan sebagian besar pendukungnya adalah para '*filantropis*' (cinta kasih sesama umat manusia) kelas menengah yang memiliki komitmen untuk memperbaiki kehidupan para pekerja/buruh serta kaum miskin lainnya. Selain itu kebanyakan penganut sosialis mendambakan masyarakat yang lebih terorganisir yang akan menggantikan anarki akibat dari pasar dan kemiskinan massal masyarakat perkotaan (Hirst, 2000: 1012).

Inti ajaran atau mazhab sosialis sebenarnya sulit dijelaskan karena luasnya cakupan sosialisme (sosialisme utopis, sosialisme ilmiah, sosialisme negara, sosialisme anarkis, sosialisme revisionis, sosialisme serikat sekerja, dan sebagainya), namun umumnya tidak berpihak kepada pembelaan kebebasan individu yang luas.

Mereka yang membela sosialisme acapkali berbeda mengenai jenis sosialisme yang mereka cari. Hanya dalam beberapa hal mereka mempunyai kesamaan, selebihnya berbeda bahkan bertentangan. Ada yang menghendaki hapusnya pemerintah, sementara yang lainnya ingin mempertahankan agar dapat melindungi kepentingan buruh; ada pula yang menganggap semua lambang kapitalisme harus dilenyapkan, termasuk mekanisme pasar, harga, dan *invisible hand*, sedangkan yang lainnya menganggap mekanisme pasar dan harga masih diperlukan dalam saat-saat awal sosialisme disebabkan sulitnya mengukur efisiensi ketika dewan perencanaan pusat menyusun prioritas (Sastradipoera, 2001: 40).

Sedangkan *Mazhab Historis*; yang lahir di Jerman tahun 1840-an melalui karya ilmiah yang ditulis oleh Friederich List (1789-1846) dalam *Nationales System der politischen Oekonomie* (1840), dan Wilhelm Roscher (1817-1894) dalam *Grundriss zu Vorlesungen ueber die Staatswissenschaft nach geschichtlicher Methode* (1843), menyerang mazhab klasik Inggris. Mereka beranggapan bahwa konsep-konsep ekonomi

sesungguhnya merupakan produk perkembangan menurut sejarah kehidupan ekonomi yang khusus tumbuh di suatu negara. Oleh karena itu hukum-hukum ekonomi tidaklah mutlak, tetapi bersifat relatif atau nisbi berhubungan dengan perkembangan sosial menurut dimensi waktu dan tempat.

Kemudia *Mazhab Marjinalis*. Mazhab ini pelopornya adalah Karl Menger (1840-1921) dari Jerman dalam karyanya *Grundsätze der Volkswirtschaftslehre* (1871). Selanjutnya seorang ekonom Inggris William Staley Jevons (1835-1882) dalam karyanya *Theory of Political Economy* (1871), dan seorang Prancis Leon Walras (1834-1910) dalam karyanya *Elements d'économie politique pure* (1874). Mereka memberikan analisis yang telak mengenai hubungan antara kebutuhan dan harga dengan mengacu kepada konsep "guna marjinal". Mereka menegaskan bahwa dalam hal seseorang individu, setiap tambahan suatu barang yang dilakukan secara berturut-turut akan memperkecil nilai obyektif setiap tambahan yang dimiliki oleh individu itu. Oleh karena itu gagasan yang tidak sistematis mengenai nilai pakai dan permintaan serta penawaran sebagai penentu nilai tukar barang (yang dikembangkan bersamaan dan bertentangan dengan teori Klasik), menemukan penanganan sistematis pada awal tahun 1970-an oleh ketiga penulis di atas (Sastradipoera, 2001: 62).

Mazhab Institusionalis, datang dari Amerika Serikat tahun 1900-an yang pengaruhnya masih kuat sampai sekarang ini, contohnya adanya undang-undang anti-trust yang masih dipertahankan. Tokohnya adalah Thorstein Veblen (1857-1929) dalam karyanya *The Theory of the Leisure Class* pada tahun 1899. Veblen dikenal sebagai seorang kritikus sosial yang bersemangat serta menyerang organisasi masyarakat industri kontemporer yang dianggapnya boros, dan mengalahkan sikap konsumtif yang menyolok mata. Selanjutnya ia mengamati sudut-sudut yang merugikan yang berasal dari gejala yang dihadapinya; "milik guntay" (*absentee ownership*) yang merupakan ciri utama kapitalisme finansial. Berasal dari "milik guntay" maka muncullah suatu lapisan masyarakat yang dianggap oleh Veblen sebagai "kelas santai" (*leisure class*), adalah suatu kelas pada masyarakat lapisan atas yang berasal dari dunia industri dan keuangan yang perilakunya menampakkan fenomena kaum "feodal tanggung" dengan mempertontonkan pola konsumsi yang berlebihan serta mencolok mata (Sastradipoera, 2001: 72).

Mazhab Neo-Klasik; merujuk pada versi terbaru dari ekonomi klasik yang dimunculkan pada abad 19 terutama oleh Alfred Marshall dan Leon Walras. Versi-versi yang terkenal itu dikembangkan pada abad ke-20 oleh John Hicks (1946[1939]) dan Paul Samuelson (1965[1947]). Lepas dari pengertian neo-klasik umumnya, perbedaan ekonomi neo-klasik dan klasik hanya terletak pada penekanan dan pusat perhatiannya. Jika ekonomi klasik menjelaskan segala kondisi ekonomi dalam kerangka kekuatan-kekuatan misterius "*invisiblehand*" (tangan-tangan tak terlihat), maka dalam mazhab ekonomi neo-klasik mencoba memberi penjelasan lengkap dengan memfokuskan pada mekanisme-mekanisme aktual yang menyebabkan terjadinya kondisi ekonomi tersebut (Boland, 2000: 700).

Selanjutnya adalah *Mazhab Keynesian*; Mazhab ini sesuai dengan namanya dipimpin oleh John Maynard Keynes, yang merupakan ekonomi agregat (makro) yang dituangkan dalam bukunya *General Theory of Employment, Interest and Money* (1936), dan dari karya-karya pengikut Keynes yang lebih kontemporer seperti Sir Roy Harrod, Lord Kaldor, Lord Kahn, Joan Robinson dan Michael Kalecki, yang meluaskan analisis Keynes terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertanyaan mengenai distribusi fungsional pendapatan (*functional distribution of income*) antara upah dan laba yang oleh Keynes sendiri dibaikan (Thirwall, 2000: 531). Dua pilar utama dari teori *employment* klasik adalah bahwa tabungan dan investasi menghasilkan ekuilibrium pada tingkat *full employment* melalui tingkat suku bunga, dan bahwa penawaran serta permintaan tenaga kerja menghasilkan ekuilibrium melalui berbagai variasi upah riil. *General Theory* Keynes ditulis sebagai reaksi terhadap paham klasik tersebut. Perdebatan mengenai masalah ini sampai sekarang masih berlangsung.

Mazhab Chicago; merupakan aliran kontrarevolusi neoklasik yang menentang institusionalisme dalam metodologi ilmu ekonomi, makroekonomi ala Keynes maupun terhadap liberalisme abad 20 yang menonjolkan intervensionisme dan penonjolan kebijakan ekonomi oleh pemerintah (Bronfendbrenner, 2000: 103). Sesuai dengan namanya, aliran ini berkembang di Universitas Chicago sejak dekade 1930-an. Tokoh utamanya tahun 1950-an adalah Frank H. Knight untuk soal teori dan metodologinya, serta Henry C. Simons dalam rumusan kebijakan ekonomi. Kemudian pada generasi berikutnya tokoh yang menonjol adalah Milton Friedman, George Stigler dan Gary

Becker. Jika dilihat dari sudut sejarahnya pemikiran ekonomi mazhab Chicago ini sebenarnya adalah suatu varian Neoklasisme dan mengacu kepada "Klasisisme Baru (New Classicism), di mana;

Pertama, pasar dianggap sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi, asalkan didukung kebebasan politik intelektual; para ekonom aliran Chicago melihat perekonomian sebagai suatu kondisi perlu, namun bukan kondisi cukup untuk menciptakan masyarakat bebas; *Kedua*; pengelolaan administratif dan intervensi kebijakan ekonomi yang bersifat *ad hoc*, hanya akan merusak situasi ekonomi; dalam soal kebijakan moneter dan fiskal, aliran ini menekankan pentingnya kesinambungan. *Ketiga*; moneterisme dianggap lebih baik ketimbang fiskalisme dalam regulasi makroekonomi. *Keempat*; kebijakan fiskal diyakini sebagai wahana yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan, namun redistribusi pendapatan bagi kalangan di atas garis kemiskinan justru akan lebih banyak menimbulkan kerugian.

E. Konsep-konsep Ilmu Ekonomi

Beberapa konsep dalam ilmu ekonomi, seperti; (1) *skarsitas*; (2) *produksi*; (3) *konsumsi*; (4) *investasi*; (5) *pasar*; (6) *uang*; (7) *letter of credit* (LC); (8) *neraca pembayaran*; (9) *bank atau perbankan*; (10) *koperasi*; (11) *kebutuhan dasar*; (12) *kewirausahaan*; (13) *perpajakan*; (14) *periklanan*; (15) *perseroan terbatas*.

5. Skarsitas

"Skarsitas" atau "kelangkaan" adalah sebuah prinsip bahwa sebagian besar barang yang diinginkan orang hanya tersedia dalam jumlah yang terbatas (kecuali seperti barang bebas seperti udara). Dengan demikian barang umumnya dalam keadaan langka dan harus dijatah, baik melalui mekanisme harga maupun cara lainnya (Samuelson dan Nordhaus, 1990: 535).

Dalam kaitannya dengan masalah-masalah sosial lainnya, kelangkaan juga melahirkan teori stratifikasi sosial dalam sejarah perkembangan manusia. Teori skarsitas (kelangkaan) merupakan temuan pemikiran Michael Harner (1970), Morton Fried (1967) dan Rae Lesser Blumberg (1978). Teori ini beranggapan bahwa penyebab utama timbul dan semakin intens-nya stratifikasi sosial disebabkan oleh tekanan jumlah penduduk. Tekanan jumlah penduduk tersebut sangat berpengaruh terhadap sumber daya yang

menyebabkan masyarakat baik pemburu dan peramu pola subsistensi pertanian. Pertanian akhirnya menggantikan pola subsistensi pemburu dan peramu. Sebut saja “komunisme primitif” dalam masyarakat pemburu dan peramu merupakan cikal bakal pemilikan tanah oleh keluarga besar, namun pemilikan masih bersifat komunal daripada pribadi.

Makin meningkatnya tekanan jumlah penduduk, mengakibatkan masyarakat holtikultura makin memperhatikan pemilikan tanah serta makin kokohnya jiwa “egoisme” pribadi sehingga menghilangkan apa yang disebut sebagai “pemilikan bersama”. Di samping itu perbedaan akses terhadap sumber daya muncul, dari suatu individu maupun kelompok muncul memaksa individu maupun kelompok lainnya yang memaksa bekerja lebih keras untuk menghasilkan surplus ekonomi melebihi apa yang dibutuhkan sampai terbentuknya kelompok yang bersenang-senang atau *leisure class* (Sanderson, 1995: 161). Dengan demikian dalam teori kelangkaan tersebut tertanam kebiasaan persaingan maupun konflik materialistik

6. *Produksi*

“Produksi” dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas “produksi” adalah segala usaha untuk menambah atau mempertinggi nilai atau faedah dari sesuatu barang. Sedangkan dalam arti sempit “produksi” adalah segala usaha dan aktivitas untuk menciptakan suatu barang atau mengubah bentuk suatu barang menjadi barang lain (Abdullah, 1992: 4; 38).

Misalkan seorang petani berusaha untuk menghasilkan padi atau beras melalui usaha bertani, hal ini dapat diklasifikasikan “produksi” dalam pengertian sempit. Jika jumlah padi atau beras yang dihasilkan di tempat petani tersebut berlimpah bila dibandingkan dengan keperluan konsumsinya, maka beras atau padi tersebut nilai atau faedahnya akan rendah. Dalam hal ini kemudian para pedagang berusaha membawa limpahan beras tersebut ke tempat baru yang memiliki nilai faedah yang lebih tinggi. Untuk aktivitas yang terakhir ini dapat digolongkan “produksi” dalam arti luas.

Suatu aktivitas “produksi” tidak akan berjalan tanpa melalui “proses produksi”. Sebab sesuatu produksi tidaklah terjadi dengan tiba-tiba, melainkan melalui tahapan suatu proses yang cukup panjang. Proses produksi adalah suatu proses atau kegiatan untuk memperoleh alat-alat pemuas kebutuhan, baik secara langsung maupun tidak

langsung. Jadi tujuan pokok dari produksi adalah untuk konsumsi. Bila jarak produsen dengan konsumen berjauhan maka diperlukan adanya usaha-usaha untuk menyampaikannya kepada konsumen. Usaha-usaha untuk menyampaikan barang-barang dari produsen ke konsumen tersebut dinamakan proses “distribusi” (Abdullah, 1992: 4; 38).

Terdapat empat macam faktor produksi, yakni (1) alam; (2) tenaga kerja; (3) modal; (4) *skill* atau keterampilan. *Faktor alam*, mencakup; tanah dan keadaan iklim, kekayaan hutan, kekayaan kandungan tanah (mineral), kekayaan air sebagai sumber penggerak transportasi maupun sumber pengairan dalam pertanian. *Faktor produksi tenaga kerja* adalah peranan manusia dalam proses produksi. *Faktor produksi modal*, adalah semua barang yang dihasilkan dan dipergunakan dalam produksi untuk masa depan. Barang-barang tersebut kadang-kadang disebut sebagai barang-barang produksi dan kadang-kadang disebut investasi maupun barang modal, seperti mesin-mesin, gedung-gedung, dan instalasi pabrik. Sedangkan *faktor produksi skill* atau keterampilan merupakan beberapa jenis kecakapan atau keterampilan khusus yang diperlukan dalam proses produksi ekonomi. Adapun cakupan *skills* yang dimaksud meliputi *managerial skills*, *technological skills*, dan *organizational skills* (Abdullah, 1992: 41).

7. Konsumsi

Secara sederhana pengertian “konsumsi” adalah segala tindakan manusia yang dapat menimbulkan turunnya atau hilangnya “faedah atau nilai guna” sesuatu barang. Pengertian tersebut dapat dibandingkan dengan Samuelson dan Nordhaus (1990: 161) bahwa “konsumsi” adalah sebagai pengeluaran untuk barang dan jasa seperti makanan, pakaian, mobil, pengobatan, dan perumahan. Jadi pengertian tersebut jelas berbeda dengan pemahaman yang hidup di masyarakat bahwa pemahaman ‘konsumsi’ selalu inherent dengan ‘makanan’.

Seseorang konsumen akan bersedia membeli sesuatu barang, karena barang itu sangat berguna baginya. Begitu juga terhadap jasa, seseorang akan membayar suatu jasa karena jasa tersebut sangat bermanfaat baginya. Dari pernyataan tersebut dapat dikemukakan bahwa seseorang akan bersikap berbeda-beda melihat pentingnya sesuatu barang ataupun jasa sesuai dengan keperluannya yang berbeda-beda pula.

Menurut para ahli ekonomi yang mengembangkan pendekatan dengan fungsi kegunaan dalam permintaan konsumen ini berpendapat bahwa kegunaan sesuatu barang dapat diukur secara kardinal — yaitu dengan cara membandingkannya dengan tingkat kegunaan dari barang-barang yang lainnya (Abdullah, 1992: 35)

Dengan demikian pada umumnya setiap orang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya terhadap bermacam-macam barang adalah secara seimbang. Di sinilah sebagai manusia dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya orang dengan sadar atau tidak akan menggunakan prinsip ekonomi. Artinya ia akan berusaha untuk mencapai tingkat konsumsi yang paling menguntungkan baginya. Dengan demikian pula konsumen dalam melakukan konsumsinya bertujuan untuk mencapai kepuasan dan kegunaan setinggi-tingginya melalui pemikiran yang se rasional mungkin. Idealnya seorang konsumen akan mempertimbangkan; (1) jumlah pendapatannya, (2) daftar preferensi dari jenis barang yang akan dikonsumsi; (3) harga persatuan tiap jenis barang yang akan dikonsumsi; (4) jumlah tiap jenis barang yang akan dikonsumsi (Abdullah, 1992: 37).

4. *Investasi*

“Investasi” dapat diartikan sebagai perubahan stok modal dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun buku (Mullineux, 2000: 522). Makna “investasi” tersebut sering dikacaukan dengan investasi keuangan (*financial investment*) yang definisinya adalah pembelian aset-aset keuangan seperti saham dan obligasi yang nantinya akan dijual kembali begitu harganya meningkat, dan hal itu lebih terkait dengan analisis jasa. “Investasi” juga berbeda dari “investasi inventori”, yakni penyimpanan atau perubahan stok produk final, produk setengah jadi, atau bahan-bahan mentah. Begitu-pun barang-barang investasi modal (*capital investment goods*) berbeda dari barang konsumsi, karena hal itu dapat menghasilkan arus jasa selama periode tertentu, dan jasa itu tidak langsung memenuhi kebutuhan konsumen. Namun demikian sangat diperlukan untuk produksi barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kedua-duanya agak mirip, karena sebagian barang konsumen (yakni *durable goods* atau berbagai barang yang bisa dipakai berkali-kali / bisa dimanfaatkan dalam waktu lama) dapat juga dikategorikan sebagai barang investasi.

Pembedaan investasi dapat juga dibedakan atas dasar lembaganya, ada dua yaitu yang dilakukan atas dasar *investasi publik* (dilakukan pemerintah), dan investasi yang dilakukan oleh *badan-badan swasta*. Selain itu investasi juga dapat dibedakan berdasarkan tempatnya yang terbagi atas dua macam, yaitu; ada *investasi domestik* dan ada pula *investasi asing*. Sedangkan pembedaan yang berdasarkan jenis barangnya, investasi dapat digolongkan menjadi dua pula yaitu *investasi langsung* (seperti pengadaan pabrik, peralatan, dan berbagai sarana produksi), dan *investasi keuangan* atau *portofolio* seperti; obligasi dan saham (Mullineux, 2000: 522)

5. Pasar

“Pasar” adalah sebuah mekanisme yang melaluinya para pembeli dan para penjual berinteraksi untuk menentukan harga dan melakukan pertukaran barang dan jasa (Samuelson dan Nordhaus: 2003; 29). Dengan demikian pasar pada hakikatnya juga merupakan keseluruhan permintaan dan penawaran barang serta jasa. Walaupun sepintas kelihatannya seperti sebuah kumpulan campur-baurnya penjual dan pembeli yang membingungkan dan merupakan mekanisme yang rumit, namun sistem ini merupakan suatu alat komunikasi untuk menyatukan pengetahuan dan tindakan-tindakan dari jutaan individu yang berbeda untuk proses pemenuhan kebutuhan.

Jika ditinjau dari macam atau jenisnya, pasar dapat dibedakan berdasarkan; *Pertama*; jika dilihat dari *barang-barang yang diperjual-belikannya*, dapat dibedakan antara pasar *barang konsumsi* dan pasar *faktor produksi*. *Kedua*, jika dilihat dari *waktu terjadinya*, dapat dibedakan antara pasar harian, pasar mingguan, dan bulanan. Sementara itu untuk pasar tahunan biasanya dilaksanakan dalam bentuk pekan raya. *Ketiga*, jika dilihat dari *lingkup aktivitasnya*; dapat dibedakan ada pasar lokal, nasional, maupun internasional. *Keempat*, jika dilihat dari *strukturnya*; dapat dibedakan antara pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik.

6. Uang

John Maynard Keynes (1883-1946) seorang ekonom neo-klasik dalam bukunya *Treaties on Money* (1930) mendefinisikan “*money [is] that by delivery of which debt-*

contract and price-contracts are discharged, and in the shape of which a store of General Purchasing Power is held”, yaitu uang adalah alat penyelesaian kontraktual, dan sebuah *store of value*, sebuah wahana *purchasing power* yang bergerak dalam lintasan waktu. Dengan demikian uang secara umum dilihat dari fungsinya dapat didefinisikan sebagai alat tukar (Komaruddin, 1991: 397-398). Uang juga berfungsi sebagai satuan ukuran (*standard for valuing things*) maupun memiliki fungsi turunan (seperti sebagai standard perincian utang atau *standard deferred payments*, dan sebagai alat penyimpan kekayaan).

Namun dalam perkembangannya, uang juga merupakan alat untuk menjalankan kekuasaan ekonomi. Justru oleh karena uang memberikan hak kekuasaan abstrak atas barang-barang dan jasa-jasa, maka pada umumnya manusia ingin memiliki uang. Uang berarti kekuasaan; pada sebuah masyarakat yang berlandaskan dasar individualistik, uang menjadi alat kekuasaan dalam tangan pemilikinya (Winardi, 1987: 35). Bahkan jauh sebelumnya seorang begawan sosiolog yang dipengaruhi filsafat historisme Wilhelm Dilthey yakni Max Weber (1864-1920) dalam karyanya *General Economic History* (Knight, 1961), pernah mengemukakan bahwa “uang adalah ayahnya partikelir”. Uang akan menjadi cikal-bakal milik swasta, tentu saja setelah melewati proses pembentukan harga dan pembentukan kekuasaan.

Dalam keadaan ekstrem, terlihat suasana yang memprihatinkan “*Uang yang semula hanya merupakan alat, berubah menjadi tujuan, dari benda yang harus mengabdikan ia dapat berubah menjadi penguasa*” (Winardi, 1987: 42). Ini adalah suatu gambaran yang menakutkan akan fenomena “pemujaan uang”. Apakah pasti semuanya berdampak negatif tentang uang? Ternyata tidak selalu begitu, sebab uang juga memiliki “sifat sosial — ekonomi”. Karena melalui uang yang merupakan bagian pokok dari sesuatu masyarakat, juga telah berperan atas lalu-lintas pertukaran dan perdagangan, serta perindustrian. Ia dapat diberikan cuma-cuma maupun dipinjamkan ke orang lain yang membutuhkan melalui peminjaman kredit, ia dapat memungkinkan adanya pembentukan modal yang setiap saat dapat dialihkan bentuknya berupa barang-barang.

7. *Letter of Credit*

“*Letter of Credit*” (L/C) adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut (Amir, 1996: 1). Isi surat itu menyatakan bahwa eksportir penerima L/C diberi hak oleh importir untuk menarik wesel (surat perintah untuk melunasi utang) atas Bank Pembuka untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat itu. Bank yang bersangkutan menjamin untuk mengakseptir atau menhonorir wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum di dalam surat itu.

Adapun peranannya L/C tersebut dalam perdagangan internasional untuk: (1) memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor; (2) untuk mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor; (3) untuk menjamin kelengkapan dokumen pengapalan. Perlu diketahui bahwa dalam praktiknya antara eksportir dan importir itu terpisah baik secara geografis maupun geo-politik. Bahkan tidak mustahil antara eksportir dan importir secara pribadi saling tidak mengenalnya. Sebab bagi eksportir merupakan risiko besar jika mengirimkan barang bila tidak ada jaminan pembayaran. Oleh karena untuk mendapatkan jaminan tersebut, eksportir meminta kepada importir agar membuka *Letter of Credit* untuknya. Dan L/C inilah yang merupakan jaminan atas pelunasan barang yang akan dikirimkan oleh eksportir.

Dengan demikian untuk kepentingan eksportir L/C harus dibuka terlebih dahulu sebelum barang dikirim. Begitu juga sebaliknya, pembukaan L/C merupakan jaminan pula untuk importir bersangkutan untuk memperoleh pengapalan barang secara utuh sesuai dengan yang diinginkannya. Sedangkan dana L/C tersebut tidak akan dicairkan tanpa penyerahan dokumen pengapalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Letter of Credit* merupakan suatu instrumen yang ditawarkan bank devisa untuk memudahkan lalu-lintas pembiayaan dalam transaksi perdagangan internasional (Amir, 1996: 2).

8. *Neraca Pembayaran*

“Neraca pembayaran” (*balance of payments*) adalah keseluruhan catatan akuntansi dari transaksi-transaksi internasional suatu negara dengan negara lainnya (Thirlwall, 2000: 58). Penerimaan valuta asing dari penjualan barang dan jasa disebut

ekspor dan sebagai item kredit dalam apa yang disebut neraca transaksi berjalan (*current account*) yang merupakan salah satu bagian dari neraca pembayaran. Sedangkan pembayaran valuta asing untuk pembelian barang-barang dan jasa disebut impor dan muncul sebagai item *debet* dalam neraca berjalan. Selain itu juga perlu diketahui bahwa ada transaksi-transaksi dalam modal yang muncul sebagai neraca modal terpisah. Arus keluar modal (*capital outflows*) adalah transaksi untuk membiayai aktivitas permodalan internasional seperti penanaman modal di luar negeri, misalnya, dan diperlukan sebagai *debet*, sedangkan arus masuk modal (*capital inflows*) adalah sebaliknya dan diperlukan sebagai *kredit*.

Namun dalam hal ini defisit pada neraca berjalan bisa diseimbangkan atau ditutupi dengan surplus pada neraca modal dan demikian juga sebaliknya. Mengingat nilai tukar valuta asing adalah harga dari atau mata uang terhadap mata uang lain, total kredit (suplai valuta asing) dan *debet* (permintaan valuta asing) harus sama jika nilai tukar dibiarkan berfluktuasi bebas untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan valuta asing. Namun demikian, jika nilai tukar tidak bebas bergerak, maka defisit atau surplus akan meningkat. Defisit bisa dibiayai dengan pinjaman pemerintah dari bank-bank dan lembaga keuangan Internasional *Monetary Fund*, atau dengan menarik sebagian cadangan emas devisanya. Surplus bisa dimanfaatkan dengan memperbesar cadangan atau dipinjamkan ke luar negeri (Tirlwall, 2000: 57).

Terdapat tiga pendekatan utama dalam penyesuaian neraca pembayaran yang telah dikembangkan oleh para ahli ekonomi, khususnya berkenaan dengan bagaimana cara memandang defisit. *Pertama*, pendekatan *elastisitas*; yang melihat defisit sebagai hasil distorsi harga relatif dalam hal ini disebabkan kurangnya kompetisi pasar. Di sini penyesuaian seyogyanya dilakukan melalui depresiasi nilai tukar sesuai dengan nilai elastisitas harga permintaan untuk kelebihan unit impor dan ekspor. *Kedua*, pendekatan *absorsi*, yang melihat defisit sebagai akibat dari kelebihan pembelanjaan atas *output* domestik, sehingga penyesuaian yang baik adalah menurunkan pembelanjaan secara relatif terhadap *output*. *Ketiga*, pendekatan *moneter*, yang memandang defisit sebagai suatu kelebihan suplai uang relatif terhadap permintaan, sehingga penyesuaian hanya bisa berhasil jika permintaan uang bisa dinaikan secara relatif terhadap suplainya. (Tirlwall, 2000: 57).

9. Bank (Perbankan)

Istilah “bank” mempunyai arti yang sebenarnya sudah berakar khususnya pada masyarakat Eropa yang bermakna “meja” atau “kounter”. Pengertian “meja” yang dimaksud adalah “meja” yang sering dipakai tempat penukaran uang di pasar pada Abad Pertengahan dan bukan “meja” yang dipakai oleh para “lintah darat” (Revel, 2000: 60). Pada mulanya bank-bank yang ada pada masa lalu itu acapkali bermula sebagai usaha yang disubsidi oleh para pedagang, awak kapal, pedagang ternak, dan belakangan ini para agen perjalanan. Ada pula bank-bank yang muncul dari bisnis perhiasan emas yang beberapa di antaranya disubsidi oleh para dermawan. Namun setelah dua abad lebih, perbankan berkembang menjadi sektor perdagangan mandiri, dan muncul berbagai perusahaan dan rekanan yang menjalankannya sebagai bisnis yang tersendiri (Revel, 2000: 58).

Salah satu hukum yang berlaku dalam bank adalah menerima tabungan uang dan memberikan pinjaman dengan mengambil keuntungan, kendati dalam hal-hal tertentu tabungan dan pinjaman dibatasi dalam waktu relatif pendek maupun menengah. Secara keseluruhan fungsi bank utama dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menghimpun dana-dana yang dimiliki masyarakat.
2. Menyalurkan dana yang telah berhasil dihimpun tersebut dalam bentuk kredit.
3. Memperlancar kegiatan perdagangan dan arus lalu-lintas uang antara para pedagang (Abdullah, 1992: 216).

Di balik fungsi itu juga bank melakukan tugas-tugas lainnya seperti (1) menciptakan uang; (2) melakukan inkaso. Untuk tugas menciptakan uang tersebut, sebetulnya terdapat variasi. Bank sentral dapat menciptakan uang, baik *uang kartal* dan *uang giral*. Sedangkan di luar bank sentral (bank sekunder) hanya boleh menciptakan uang *giral*. Sedangkan untuk tugas-tugas melakukan inkaso, hal ini dilakukan mengingat perdagangan dewasa ini semakin kompleks dan melampaui batas-batas suatu negara. Di sinilah para pedagang besar umumnya memilih menggunakan jasa bank dalam membayar atau menagih hasil transaksi dagangannya. Umumnya pedagang yang demikian menggunakan alat pembayaran berupa cek atau giro yang ditagih dari bank atau dipindahbukukan pada rekening nasabah yang bersangkutan. Pekerjaan bank yang

berkaitan dengan membayar dan menagih untuk atau atas nama pihak lain seperti dijelaskan di atas, dinamakan sebagai fungsi bank selaku *inkaso*.

10. Koperasi

“Koperasi” adalah sebuah gerakan ekonomi maupun sebagai badan usaha (Chaurmain dan Prihatin, 1994: 364). Sebagai gerakan ekonomi, koperasi mempersatukan sejumlah orang-orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dan sepakat bahwa kebutuhan bersama itu akan direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan diawasi, serta dipertanggungjawabkan secara bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan. Sedangkan sebagai badan usaha milik bersama, koperasi merupakan sebuah badan yang bertujuan melakukan usaha pemenuhan kebutuhan bersama seluruh anggota

Jika ditilik sejarah perkembangannya, koperasi pertama dibentuk pada tahun 1844 di Toad Lane, Rochdale oleh 28 pekerja Lancashire yang selanjutnya mengembangkan tujuh prinsip koperasi yang samapai sekarang masih menjadi landasan gerakan koperasi di seluruh dunia, walaupun tidak sepenuhnya mendapat penekanan yang sama. Ketujuh prinsip tersebut adalah; (1) keanggotaannya bersifat terbuka; (2) satu anggota satu suara; (3) perputaran modal terbatas; (4) alokasi surplus produksi disesuaikan atau kontribusi dari masing-masing anggota; (5) jasa penyediaan uang tunai; (6) penekanan pada aspek pendidikan; (7) bersifat netral dalam soal agama dan politik (Estrin, 2000: 176).

Di Indonesia azas koperasi diatur dalam undang-undang perkoperasian di mana azasnya selalu kekeluargaan dan gotong-royong. Ini tidak berarti bahwa koperasi meninggalkan sifat dan syarat-syarat ekonominya yang menghilangkan proefisiensinya. Sedangkan jika ditilik jenis-jenis koperasi dapat dibedakan berdasarkan; *Pertama; lapangan usaha*, meliputi *koperasi konsumsi* (koperasi pemenuhan kebutuhan barang-barang untuk anggota) dan *koperasi produksi* yang memproduksi untuk disalurkan ke para anggotanya (seperti; koperasi kerajinan tangan, pertanian, perindustrian dan simpan-pinjam; *Kedua;* koperasi menurut lingkungannya, dapat dibedakan menjadi *koperasi fungsional* yang sering dibentuk di kantor tempat para anggotanya bekerja, kemudian *koperasi unit desa* yang tersebar di desa-desa, serta *koperasi sekolah* yang tersebar di bebarapa sekolah.

11. Kebutuhan Dasar

Konsep “kebutuhan dasar” telah memainkan peran penting dalam analisis kondisi-kondisi khususnya di negara miskin dan berkembang. Drenowski dan Scott (1966) mengemukakan bahwa istilah “kebutuhan dasar” memiliki riwayat yang panjang. Dan, menurut Townsend (2000: 61) mulai dipakai secara luas sejak Konperensi Tenaga Kerja Dunia (ILO) yang berlangsung di Jenewa tahun 1976, yang mengemukakan bahwa kebutuhan dasar itu memiliki dua unsur: *Pertama*, meliputi jumlah minimum tertentu yang dibutuhkan oleh suatu keluarga untuk konsumsi pribadi, meliputi; *makanan, perumahan, sandang, serta perabot dan peralatan rumah tangga. Kedua*; kebutuhan dasar juga meliputi layanan-layanan pokok yang disediakan oleh dan untuk komunitas secara keseluruhan, seperti; *kesehatan, pendidikan, air minum yang aman, sanitasi, angkutan umum, dan fasilitas-fasilitas budaya.*

Konsep “kebutuhan dasar” tersebut diakui memang mendapat tempat yang penting dalam perdebatan yang berlangsung terutama dalam hubungannya antara Dunia Pertama dengan Dunia Ketiga. Menurut Townsend (2000: 62).

Semakin diakui aspek-aspek sosial dari konsep itu, semakin perlu pula diakui relativitas kebutuhan atas sumber-sumber daya dunia dan nasional. Semakin konsep itu dibatasi kepada barang-barang dan fasilitas-fasilitas fisik, semakin gampang orang berpendapat bahwa yang diperlukan adalah pertumbuhan ekonomi saja, bukannya kombinasi yang kompleks dari pertumbuhan, pemerataan dan penataan perdagangan dan hubungan-hubungan institusional lainnya.

12. Kewirausahaan

Konsep “kewirausahaan” atau “*entrepreneurship*” merujuk kepada suatu sifat keberanian, keutamaan mengambil risiko dalam kegiatan inovasi (Samuelson dan nordhaus, (1990: 518; Cason, 2000: 297; Abdullah, 1992: 128). Dari kata *entrepreneur* tersebut maka muncullah tafsiran yang beragam, seperti; *merchant* (pedagang), “pemilik usaha”, sampai “petualang”. Dan, orang yang mempopulerkan istilah/konsep tersebut adalah John Stuart Mill (1948) di Inggris.

Menurut Schumpeter, para wirausaha adalah penggerak atau motor ekonomi, karena fungsi inovasi yang mereka jalankan menduduki tempat sentral. Terdapat lima tipe inovasi yang menonjol; (1) pengenalan barang baru atau barang lama dengan mutu

lebih baik; (2) penemuan metode produksi yang baru; (3) pembukaan pasar yang baru, khususnya untuk ekspor; (4) perolehan sumber pasokan bahan baku yang baru; (5) penciptaan organisasi industri yang baru, misalnya pembentukan jaringan usaha terpadu yang bisa beroperasi monopoli (Casson, 2000: 297). Namun demikian wirausahawan bukan "penemu" murni, dia hanya yang pertama kali memanfaatkan penemuan tersebut, dan mempertaruhkan sumberdayanya sendiri untuk mencapai suatu usaha yang tak terbayangkan oleh orang lain. Tetapi bukan pula seorang wirausahawan menjadi "penjudi risiko minimal". Karena keputusan-keputusan yang diambilnya juga penuh perhitungan melalui proses-proses manajerial yang teruji. Oleh karena itu seorang wirausaha menurut Casson adalah sebagai yang berspesialisasi dalam membuat keputusan, karena dia memiliki akses khusus dalam memperoleh informasi (1982).

13. Perpajakan

Konsep "perpajakan" mengacu kepada suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa, untuk kepentingan umum, yang sekaligus sebagai sumber pendapatan negara (Brown, 2000: 1082).

Di kalangan negara-negara maju, rata-rata pajak menduduki seperlima sampai setengahnya dari GDP. Contohnya di Swedia sampai setengah dari GDP. Selandia Baru mengalami peningkatan 61%. Di sini diasumsikan bahwa besarnya pendapatan pajak bagi negara telah ditentukan sebelumnya. Hal ini memungkinkan pemerintah menentukan sendiri bagaimana mencapainya. Menurut Brown (2000: 1082-1083) terdapat tiga peranan pajak dalam masyarakat; (1) efek alokatif, (2) efek distributif, (3) efek administratif.

Pertama, efek alokatif; bahwa pajak mempengaruhi perilaku warga. Artinya bahwa dengan adanya penentuan besar/kecilnya seseorang sebagai obyek pajak, akan memiliki pengaruh terhadap perilaku warga masyarakatnya. Sebagai contoh karena dia tahu bahwa dalam setiap pembelian barang pasti dikenakan pajak pembelian barang, maka dia akan hati-hati dalam membeli barang, atau tidak dengan serta merta ia akan membeli barang. *Kedua*, efek distribusional. Artinya bahwa pajak memiliki pengaruh terhadap distribusi pendapatan. Sebagai contoh buat apa "kerja lembur" banyak-banyak

jika PPh-nya cukup tinggi? *Ketiga*, efek administratif. Di sini diartikan bahwa memungut pajak mengakibatkan munculnya biaya-biaya baik pada sektor publik maupun swasta yang bervariasi. Contohnya di Indonesia ketika kita akan membayar pajak kendaraan bermotor ironisnya justru ”orang-orang yang bijak” mengantri dengan sabar menunggu, sering menjadi korban ”pemerasan waktu” terkalahkan oleh ”penyelinap” yang berpakaian seragam. Inilah satu kendala penentu utama biaya administratif adalah kompleksitas hukum, jika hal ini dibiarkan dapat mengurangi kesadaran hukum bagi warga untuk bayar pajak kendaraan secara langsung dan tepat waktu.

14. Periklanan

Istilah ”periklanan” mengacu pada suatu komunikasi pasar yang dilakukan para penjual barang dan jasa. Pada mulanya yang paling banyak memperhatikan bidang ini ini adalah para ekonom, dan pembahasannya didasarkan pada konsep kunci informasi dalam konteks struktur pasar di tingkat lokal maupun nasional (Jhally, 2000: 7). Walaupun sudah banyak penelitian empiris dilakukan untuk melihat efektivitas periklanan dalam meningkatkan permintaan produk (baik iklan yang sifatnya individual maupun untuk pasar secara keseluruhan). Namun dari keseluruhan penelitian itu tidak bisa menyimpulkan secara tegas seberapa efektif periklanan itu berpengaruh positif secara ekonomis (Albion dan Faris, 1981).

Terdapat beberapa peneliti tentang peranan iklan dalam perekonomian. Stuart Owen dalam karyanya *Captains of Consciousness* (1979) periklanan memiliki fungsi kembar terhadap kapitalisme, (1) menciptakan permintaan untuk menampung kapasitas barang-barang industri, (2) mengalihkan perhatian dari konflik kelas di tempat kerja dengan mendefinisikan identitas menurut konsumsi, bukan produksi. Kemudian teoretisi budaya Raymond Williams (1980) menambahkan bahwa periklanan merupakan sebuah ”sistem sihir” yang menjauhkan perhatian orang dari sifat kelas dalam masyarakat dengan menekankan konsumsi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ”periklanan” dilihat sebagai suatu lokomotif utama dalam penciptaan *kebutuhan semu*.

Bahkan sekarang ini telah terjadi pergeseran di mana periklanan tidaklah semata-mata bernuansa ekonomi tetapi merambah ke bidang-bidang lainnya. Leiss dan kawan-kawan dalam *Social Communication* (1990) berusaha menempatkan iklan dalam suatu

perspektif kelembagaan (menjembatani hubungan antara bisnis dan media) di mana persoalan peran iklan dalam penjualan tidak begitu penting dan menarik lagi, dibanding perannya sebagai lokomotif *komunikasi sosial*. Di sini bagaimana iklan mencoba menarik para konsumen dengan dimensi-dimensi yang tidak berhubungan langsung dengan barang-barang tersebut, baik dimensi identitas individual, kelompok atau keluarga, kebahagiaan dan kepuasan, gender seksual dan sebagainya. Bahkan Kline dalam karyanya *Out of the Garden* (1994) lebih pesimis dan negatif lagi, bahwa iklan pemasaran produk mainan anak-anak telah menimbulkan sekian dampak jelek terhadap jenis permainan yang dimainkan anak-anak (membatasi imajinasi dan kreativitas anak) serta terhadap interaksi antar gender dan interaksi orang tua-anak.

15. Perseroan Terbatas

Konsep "perseroan terbatas" merupakan konsep yang paling populer dalam ekonomi, yang mendasarkan kepemilikan dan tanggung jawab pada sejumlah saham, dan sepenuhnya diakui sebagai badan hukum. Terdapat tiga karakteristik dalam perseroan terbatas; (1) setiap utang perusahaan, menjadi tanggung jawab perusahaan, dan tidak bisa dikaitkan dengan kekayaan pribadi pemegang sahamnya; (2) identitas perusahaan tidak akan berubah sekalipun saham dialihkan ke pihak lain; (3) hubungan kontraktual dilakukan dan menjadi tanggung jawab dewan direksi (Reekie, 2000: 176).

Oleh karena tiga karakteristik yang dimiliki badan usaha 'perseroan terbatas' tersebut maka jenis badan usaha itu merupakan suatu lembaga yang paling mudah berkembang. Hal ini dapat dipahami karena risiko utang bagi pemilik saham bisa diabaikan sehingga perseroan bisa berani berekspansi secara maksimal, selama masih ada pihak yang memberikan pinjaman usaha. Kemudahan jual-beli saham juga membuat badan usaha ini tidak terpengaruh oleh preferensi individual pemiliknya. Status *persona* perusahaan ini memungkinkan dilakukannya pembagian tugas, risiko dan tanggung jawab antara pemilik dan pengelola perusahaan.

Beberapa ekonom ternama memberikan komentar yang beragam terhadap perseroan terbatas tersebut. Schumpeter dalam *Capitalism, Socialism and Democracy* (1950) mengkritik hal itu sebagai suatu hal yang akan menyulitkan pengelolaannya. Namun Hessen dalam *In Defense of Corporation* (1979) berpendapat justru dengan

terbatasnya tanggung jawab pemilik perusahaan sebatas saham yang dimilikinya dan prinsip kepemilikan bersama adalah suatu kontrak khas swasta, bukan negara/pemerintah. Penyusunan kontrak secara bebas adalah wahana peningkatan efisiensi yang sangat diperlukan kalangan swasta, bukan untuk mengelakkan tanggung jawab.

Perlu diketahui bahwa secara historis, terbatasnya tanggung jawab pemilik perusahaan merupakan keistimewaan yang diberikan pemerintah Inggris pada abad ke-15 guna merangsang minat usaha swasta. Kemudian pada abad ke-17 prinsip tersebut disebar-luaskan ke berbagai wilayah jajahan Inggris melalui *East India Company* dan *Hudson Bay Company* yang kemudian dibakukan menjadi undang-undang parlemen pada tahun 1662 (Clapham, 1957). Sejak saat itu badan usaha ini makin populer karena merangsang kreativitas dan keberanian para pengusaha dalam menekuni bisnis. Bahkan jenis badan usaha ini pula yang kemudian mengembangkan beberapa jalan raya dan kereta api ternama di Inggris pada tahun 1780-1790-an dan 1830-1840-an (Reekie, 2000; 176).

F. Generalisasi-generalisasi Ilmu Ekonomi

1. Skarsitas

Kelangkaan (skarsitas) akan barang dan jasa timbul apabila kebutuhan (keinginan) seseorang ataupun masyarakat akan lebih besar daripada tersedianya barang dan jasa tersebut. Dengan demikian *kelangkaan* akan muncul apabila tidak cukup barang dan jasa tersedia untuk memenuhi kebutuhan.

2. Produksi

Dalam sistem perekonomian modern, berlangsung berbagai aktivitas *produksi* yang sangat banyak dan beragam. Dalam masyarakat agraris, aktivitas pertanian menggunakan pupuk, benih, tanah, dan tenaga kerja yang menghasilkan beras dan jagung. Dalam masyarakat industri, pabrik-pabrik modern menggunakan bahan mentah, energi, mesin, tenaga kerja untuk menghasilkan televisi, komputer, mobil, telpon dan sebagainya. Begitu juga dalam dunia usaha penerbangan, banyak menggunakan pesawat terbang, bahan bakar, tenaga kerja, dan sistem *reservasi* terkomputerisasi sehingga penumpang memungkinkan untuk melakukan *traveling* ke berbagai rute penerbangan dengan metode

kerja yang cepat dan modern. Dengan demikian semuanya ini berusaha untuk *berproduksi* secara efisien atau dengan biaya yang serendah-rendahnya. Dengan kata lain mereka selalu berusaha untuk berproduksi pada tingkat *output* yang maksimum dengan menggunakan sejumlah input tertentu.

3. *Konsumsi*

Konsumsi selalu merupakan satu-satunya unsur GNP yang terbesar dari seluruh pengeluaran. Untuk itu alat pokok dalam analisis ini adalah bagaimana mengaitkan pengeluaran untuk *konsumsi* dengan tingkat pendapatan disposable konsumen. Akan tetapi perbandingan konsumsi dan pendapatan tersebut tidaklah selalu linier, karena ada batas tambahan uang yang dibelanjakan untuk makanan, di mana orang tidak bisa makan makin banyak dan makin enak terus searah dengan peningkatan pendapatannya. Maka mulai batas tersebut proporsi dari seluruh pengeluaran untuk makanpun mulai menurun atau sebaliknya kecenderungan tabungan semakin menaik.

4. *Investasi*

Kenaikan *investasi* dapat mendorong kenaikan pendapatan. Proses kenaikan pendapatan sebagai akibat kenaikan investasi dapat dikemukakan sebagai berikut. Injeksi dana *investasi* memungkinkan produsen menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak. Untuk itu ia akan membeli faktor produksi yang lebih banyak lagi. Sebagai akibatnya pendapatan yang diterima konsumen meningkat. Kenaikan pendapatan konsumen tersebut akan mendorong mereka menambah konsumsi, tabungan atau keduanya.

5. *Pasar*

Dalam sebuah sistem ekonomi *pasar*, tidak ada individu maupun organisasi yang secara seorang diri bertanggung jawab atas penetapan harga, produksi, konsumsi, dan distribusi. Khusus untuk harga, yang menggambarkan kesepakatan antara orang dan perusahaan yang dengan sukarela melakukan pertukaran berbagai komoditas. Di samping itu harga juga merupakan sinyal bagi produsen dan konsumen. Harga juga mengkoordinasikan keputusan-keputusan para produsen dan konsumen dalam sebuah *pasar*. Harga-harga yang lebih tinggi cenderung mengurangi pembelian konsumen dan mendorong produksi.

Harga-harga yang lebih rendah mendorong konsumsi dan menghambat produksi. Harga adalah roda penyeimbang dari mekanisme *pasar*.

6. *Uang*

Uang pada hakikatnya adalah segala sesuatu yang dapat dipakai/diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa, maupun utang. Dengan demikian secara umum uang dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang secara umum mempunyai fungsi; (1) sebagai alat tukar-menukar; (2) sebagai alat penyimpan kekayaan; (3) sebagai alat pengukur nilai.

7. *Letter of Credit*

Sistem pembayaran yang paling aman dipandang dari sudut kepentingan eksportir dan importir adalah apa yang disebut "*Letter of Credit*". Sebab dengan sistem *Letter of Credit* tersebut dapat memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor, mengamankan dana yang disediakan importir dalam pembayaran barang impor, dan menjamin kelengkapan dokumen pengapalan.

8. *Neraca Pembayaran*

Suatu negara dalam mempertimbangkan langkah-langkah guna menyeimbangkan *neraca pembayaran*, negara yang bersangkutan harus memfokuskan diri pada neraca transaksi berjalan jika ia menginginkan berfungsinya perekonomian riil, dan (jika sedang defisit) ingin menghindari penurunan terus-menerus atas nilai tukar mata uangnya

9. *Bank dan Perbankani*

Bank sentral pada dasarnya mempunyai tugas untuk memelihara supaya sistem moneter bekerja secara efisien, sehingga dapat menjamin tercapainya tingkat pertumbuhan kredit/uang beredar sesuai dengan yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut tanpa mengakibatkan inflasi yang berarti. Untuk mencapai tujuan tersebut, *bank sentral* bertanggungjawab atas: (1) perumusan serta pelaksanaan kebijaksanaan moneter; (2) mengatur dan mengawasi serta mengendalikan sistem moneter.

10. Koperasi

Beberapa kasus yang banyak terjadi kurang majunya sistem ekonomi *koperasi* di Indonesia, pada umumnya disebabkan masih rendahnya kesadaran berkoperasi serta kurangnya etos kerja yang berdisiplin baik di tingkat pengurus maupun para anggotanya.

11. Kebutuhan Dasar

Kebutuhan-kebutuhan dasar itu tidak cukup lagi didefinisikan hanya dengan mengacu kepada kebutuhan-kebutuhan fisik individunya saja, melainkan harus melibatkan syarat-syarat fisik serta layanan lainnya yang jelas-jelas dibutuhkan oleh komunitas lokal. Penguraian *kebutuhan dasar* tersebut bergantung pada beberapa asumsi mengenai berfungsinya dan berkembangnya masyarakat.

12. Kewirausahaan

Suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih jauh, banyak wirausahawan yang sukses adalah para pendatang atau imigran yang walaupun dengan semangat kantong kosong, anggota kelompok minoritas keagamaan yang militan jauh lebih berhasil dibanding kelompok lain (Casson, 2000: 298).

13. Perpajakan

Tradisi membayar *pajak* tepat pada waktunya sebagai bagian integral dalam mentaati perundangan yang berlaku, tidaklah mudah untuk dilaksanakan karena memerlukan suatu tingkat kesadaran yang tinggi dan terjalin kuat rasa saling percaya mempercayai antara rakyat dengan pemerintah yang ada. Namun bagi sejumlah pemerintahan yang tidak transparan, korup, dan tidak *accountable* akan sulit menumbuhkan kesadaran bagi rakyatnya untuk mematuhi undang-undang perpajakan tersebut.

14. Periklanan

Pengaruh *periklanan*, tidak lagi terbatas pada efek-efek ekonomi, melainkan meluas ke berbagai bidang dan tidak selalu positif tetapi juga negatif. Dalam bidang komunikasi

sosial, iklan juga berperan sebagai lokomotif komunikasi sosial. Ia mencoba menarik para konsumen dengan dimensi-dimensi yang tidak berhubungan langsung dengan promosi barang-barang tersebut, seperti dimensi identitas individual, keluarga, maupun kelompok, kepuasan/kebahagiaan, gender, dan sebagainya (Leiss: 1990).

15. Perseroan Terbatas

Badan usaha perseroan terbatas yang memiliki ciri-ciri independensi yang tinggi serta dapat mengabaikan risiko utang bagi pemilik sahamnya sehingga berani berekspansi secara maksimal selama masih ada pihak yang mau memberikan pinjaman usahanya (Reekie, 2000: 176).

G. Teori-teori Ilmu Ekonomi

Teori ekonomi makro adalah teori ekonomi yang membahas masalah-masalah ekonomi secara keseluruhan, secara besar-besaran, menyangkut keseluruhan sistem dan organisasi ekonomi. Dalam ekonomi makro dibahas teori-teori yang bersifat umum dari gejala-gejala ekonomi keseluruhan. Hal ini terutama menyangkut peristiwa-peristiwa ekonomi yang berhubungan dengan tingkat harga umum; keseluruhan permintaan dan penawaran yang berkaitan dengan jumlah penduduk dan jumlah produksi masyarakat keseluruhan. Jumlah kesempatan kerja dan lapangan kerja serta penempatan kerja dari seluruh tenaga kerja yang ada dalam masyarakat. Jadi teori ekonomi makro membahas keseluruhan gejala dan peristiwa dalam kehidupan ekonomi, hubungannya satu sama lain baik yang bersifat hubungan kausal maupun hubungan fungsional.

Berbeda dengan teori mikro, yang merupakan suatu teori yang membahas peristiwa atau hubungan-hubungan kausal dan fungsional antara beberapa peristiwa ekonomi yang bersifat khusus. Pengertian khusus di sini adalah pada kajian-kajian yang lebih terbatas (spesifik) seperti pada; orang tertentu, keluarga tertentu, perusahaan tertentu, dan sebagainya. Dengan demikian pokok kajian utama pada teori mikro tersebut terbatas pada kebutuhan, barang dan jasa, harga, upah, pendapatan, dari suatu organisme ekonomi dalam lingkup rumah-tangga, keluarga atau perusahaan (Chourmain dan Prihatin, 1994: 19).

1. Teori Ekonomi Klasik Adam Smith

Teori ini merupakan karya Adam Smith yang dituangkan dalam buku *An Inquiry into Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776). Smith adalah seorang Guru besar Falsafah Moral di Universitas Glasgow yang memusatkan perhatiannya kepada persoalan-persoalan umum, yaitu bagaimana menciptakan kerangka politik dan sosial yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara swasembada (Jhingan, 1994: 138; Sastradipoera, 2001). Adapun pokok-pokok pikiran dari teori sebagai berikut:

- a. *Kebijaksanaan Pasar Bebas*: dalam arti tercapainya suatu keterlibatan pemerintah yang minimum untuk mencapai suatu bentuk ‘persaingan yang sempurna’, maka secara otomatis harus bebas atau seminimal mungkin campur tangan pemerintah. Karena itu semboyannya *the best government governs the least*. Sebab teori tersebut berasumsi bahwa yang akan memaksimalkan pendapatan nasional adalah “*tangan-tangan yang tak kelihatan*”.
- b. *Keuntungan, Merangsang bagi Investasi*; Menurut pandangan teori ini bahwa keuntungan itu merangsang investasi. Artinya semakin besar keuntungan, akan semakin besra pula akumulasi modal dan investasi.
- c. *Keuntungan Cenderung Menurun*: Artinya keuntungan tidak akan naik secara terus – menerus, namun cendrung menurun apabila persaingan untuk menghimpun modal antarkapitalis meningkat. Alasannya adalah, dengan meningkatnya upah sebagai akibat persaingan antar kapitalis. Sementara upah dan sewa naik karena naiknya harga-harga pangan. Hal ini mendapat pembenaran juga dari Ricardo.
- d. *Keadaan Stationer*; Para ahli ekonomi klasik meramalkan akan timbulnya keadaan *stationer* pada akhir proses pemupukan modal. Sekali keuntungan mulai menurun, proses ini akan berlangsung terus sampai keuntungan menjadi nol, pertumbuhan penduduk dan pemupukan modal terhenti, dan tingkat upah mencapai tingkat kebutuhan hidup minimal.

2. Teori Tahap-tahap Pertumbuhan Ekonomi Modernisasi Rostow

Mungkin teori pertumbuhan Ekonomi Modernisasi yang paling terkenal adalah teori dari ekonom W.W. Rostow yang ditulis dalam bukunya *The Stage of Economic Growth : A Non-Communist Manifesto* (1960) dan juga dalam *The Process of Economic*

Growth (1953), yang kajiannya secara memakai pendekatan sejarah dalam menjelaskan proses perkembangan ekonomi. Menurut Rostow, perkembangan ekonomi suatu masyarakat meliputi lima tahap perkembangan; (1) *tahap masyarakat tradisional*; (2) *tahap prakondisi tinggal landas*; (3) *tahap tinggal landas*; (4) *tahap maturity (kematangan)*; (5) *tahap konsumsi massa tinggi atau besar-besaran*.

a. *Tahap Tradisional*; Masyarakat tradisional diartikan sebagai ‘suatu masyarakat yang strukturnya berkembang disepanjang fungsi produksi berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi pra-Newtonian: zaman dinasti-dinasti Cina, Peradaban Timur Tengah dan daerah Mediterania, dunia Eropa pada Abad Pertengahan (Rostow, 1960: 5). Dalam masyarakat ini pertanian masih mendominasi aktivitas ekonomi, dan kekuatan politik umumnya masih pada penguasa tanah. Ini tidak berarti pada masyarakat ini tidak ada perubahan ekonomi. Sebenarnya banyak tanah dapat digarap, skala dan pola perdagangan dapat diperluas, manufaktur dapat dibangun dan produktivitas pertanian dapat ditingkatkan sejalan dengan penambahan penduduk yang nyata. Namun fakta menunjukkan bahwa keinginan untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi modern secara teratur dan sistematis masih bertumbuk dengan suatu batas (pagu) yaitu “tingkat output” perkapita yang dapat dicapai. Selain itu struktur sosial masyarakat seperti itu berjenjang; hubungan dan keluarga memainkan peranan yang menentukan (Jhingan, 1994: 180).

b. *Tahap pra-kondisi tinggal landas*: Pada tahap ini merupakan masa transisi di mana prasyarat-prasyarat pertumbuhan swadaya dibangun atau diciptakan. Di Eropa Barat sejak akhir abad ke 15 dan awal abad ke-16 menempatkan kekuatan “penalaran” (*reasoning*) dan “ketidakpercayaan” (*skepticism*) yang merupakan pengaruh empat kekuatan (*Renaissance*, Kerajaan Baru, Dunia Baru, dan Agama Baru atau Protestan), sebagai pengganti “kepercayaan” (*faith*) dan “kewenangan” (*authority*) mengakhiri feodalisme dan membawa ke kebangkitan negara kebangsaan, menanamkan semangat pengembaraan yang menghasilkan berbagai penemuan dan dominannya kaum borjuasi dalam dunia usaha. Manusia-manusia baru yang mau bekerja keras muncul memasuki sektor ekonomi swasta, pemerintah atau dua-duanya, manusia baru yang bersemangat menggalakkan tabungan dan berani mengambil risiko dalam mengejar keuntungan. Bank dan lembaga lain bermunculan untuk mengerahkan modal,

sehingga investasi meningkat di berbagai bidang; pengangkutan, perhubungan dan bahan mentah yang memiliki daya tarik ekonomis bagi bangsa lain. Jangkauan perdagangan dari dalam dan luar negeri menjadi makin luas. Di mana-mana muncul perusahaan manufakturing yang menggunakan metode baru (Rostow, 1960: 6-7).

- c. *Tahap Tinggal Landas*: Merupakan masa awal yang menentukan di dalam suatu kehidupan masyarakat

“ketika pertumbuhan mencapai kondisi normalnya... kekuatan modernisasi berhadapan dengan adat istiadat dan lembaga-lembaga. Nilai-nilai dan kepentingan masyarakat tradisional membuat terobosan yang menentukan; dan kepentingan bersama membentuk struktur masyarakat tersebut. ... bahwa pertumbuhan biasanya berjalan menurut deret ukur, seperti rekening tabungan yang bunganya dibiarkan bergabung dengan simapanan pokok,... revolusi industri yang bertalian secara langsung dengan perubahan radikal di dalam metode produksi yang dalam jangka waktu relatif singkat menimbulkan konsekuensi yang menentukan (Rostow, 1960: 9-11).

- c. *Tahap Kematangan (Maturity)*: Rostow mendefinisikan merupakan tahapan ketika masyarakat telah dengan efektif menerapkan serentetan teknologi modern terhadap keseluruhan sumberdaya mereka. Masa ini juga merupakan suatu tahap pertumbuhan swadaya jangka panjang yang merentang melebihi masa empat dasawarsa. Teknik produksi baru menggantikan teknik yang lama. Berbagai sektor penting baru tercipta. Tingkat investasi neto lebih dari 10 % dari pendapatan nasional. Dan, perekonomian mampu menahan segala goncangan yang tak terduga. Dalam hal ini Rostow memberikan bukti-bukti simbolik kematangan teknologi pada negara-negara industri seperti; Inggris (1850), Amerika Serikat (1900), Jerman (1910), dan Prancis (1910), Swedia (1930), Jepang (1940), Rusia (1950); Kanada (1950) (Jhingan, 1994: 187).

- f. *Tahap Konsumsi Masa Tinggi* atau *Besar-besaran*: Merupakan suatu masa yang ditandai dengan pencapaian banyak sektor penting (*leading sector*) dalam perekonomian berubah menuju produksi barang dan jasa konsumsi. Abad konsumsi besar-besaran juga ditandai dengan migrasi ke pinggiran kota, pemakaian mobil secara luas, barang-barang konsumen dan peralatan rumah tangga yang tahan lama, Pada tahap ini “keseimbangan perhatian masyarakat beralih dari penawaran ke permintaan, dari persoalan produksi ke persoalan konsumsi dan kesejahteraan dalam arti luas”. Tetapi ada tiga kekuatan yang nampak dalam tahap purna dewasa ini, yaitu:

Pertama, penerapan kebijaksanaan guna meningkatkan kekuasaan dan pengaruh melampaui batas-batas nasional; *Kedua*, ingin memiliki suatu negara kesejahteraan dengan pemerataan pendapatan nasional yang lebih adil melalui pajak progresif, peningkatan jaminan sosial, dan fasilitas hiburan bagi para pekerja; *Ketiga*, keputusan untuk membangun pusat perdagangan dan sektor penting seperti mobil, rumah murah, berbagai peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik, dan sebagainya (Jhingan, 1960: 114).

3. Teori Dampak Balik dan Dampak Sebar Gunnard Myrdal

Gunnard Myrdal seorang ahli ekonomi Swedia dan pejabat pada Perserikatan Bangsa-bangsa, terkenal dengan tulisannya *Economic Theory and Underdeveloped Regions* (1957), dan *Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations* (1968), berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab-menyebab sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak, dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik (*Blackwash effects*) cenderung mengecil. Secara kumulatif kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional di antara negara-negara terbelakang. Sebaliknya di negara terbelakang proses kumulatif dan dissirkuler juga dikenal istilah “lingkaran setan kemiskinan”, berjalan menurun, dan karena tidak teratur menyebabkan meningkatnya ketimpangan. Myrdal yakin bahwa “pendekatan teoretis yang kita warisi” tidak cukup menyelesaikan problem ketimpangan ekonomi tersebut. Teori perdagangan internasional dan tentu saja teori ekonomi secara umum, tidak pernah disusun untuk menjelaskan realitas keterbelakangan dan pembangunan ekonomi (Myrdal; 1957).

Tesis Myrdal adalah membangun dari suatu keterbelakangan dan pembangunan ekonominya di sekitar ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Untuk itu ia menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. ‘*Dampak Balik*’, adalah semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi ekonomi suatu tempat, karena sebab-sebab di luar tempat itu, atau juga bisa disebut dampak migrasi. Yang merupakan perpindahan modal dan perdagangan serta

keseluruhan dampak yang timbul dari proses-proses sebab-musebab sirkuler antara faktor-faktor ekonomi dan nonekonomi.

- b. Sedangkan '*Dampak Sebar*' menunjuk pada dampak momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari pusat pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lainnya. Sebab utama ketimpangan regional adalah kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara-negara terbelakang.
- c. *Ketimpangan Regional*; terjadi lebih banyak berakar pada dasar non-ekonomi yang berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba, di mana terpusat di wilayah-wilayah (negara-negara) yang memiliki harapan-laba tinggi. Penyebab gejala ini oleh peranan bebas kekuatan pasar yang cenderung memperlebar ketimpangan regional. Karena produksi, industri, perdagangan, perbankan, asuransi, perkapalan cenderung mendatangkan keuntungan bagi wilayah maju (Myrdal, 1957: 26).
- d. *Dampak balik* dan *dampak sebar* ini dalam laju perkembangannya tidak mungkin berjalan seimbang. Karena *pertama*, ketimpangan regional jauh lebih besar di negara-negara miskin daripada di negara-negara kaya. *Kedua*, di negara-negara miskin ketimpangan regional semakin melebar sedangkan di negara maju menyempit. Hal ini disebabkan oleh semakin tinggi tingkat pembangunan ekonomi yang sudah dicapai suatu negara, biasanya semakin kuat pula dampak sebar yang akan terjadi. Mengingat pembangunan tersebut disertai oleh transportasi dan komunikasi yang makin baik, tingkat pendidikan makin tinggi dan semakin dinamis antara ide dan nilai yang kesemuanya cenderung memperkuat daya-sebar sentrifugal tersebut dan cenderung melunak hambatan-hambatannya. Dengan demikian suatu negara berhasil mencapai tingkat pembangunan yang tinggi, maka pembangunan ekonomi akan menjadi suatu proses yang berjalan otomatis. Sebaliknya, sebab utama keterbelakangan terletak pada lemahnya dampak sebar, kuatnya dampak balik, sehingga dalam proses yang semakin menggumpal kemiskinan itu adalah penyebab yang berasal dari dirinya sendiri.
- e. *Peranan pemerintah*; Kebijakan nasional sering memperburuk ketimpangan regional, terutama oleh peranan kekuatan pasar bebas dan kebijaksanaan liberal sebagai akibat lemahnya dampak sebar. Faktor lain yang merupakan penyebab

ketimpangan regional di negara miskin adalah “lembaga feodal” yang kokoh dan lembaga lainnya yang tidak egaliter serta struktur kekuasaan yang membantu si kaya menghisap si miskin (Myrdal, 1957: 28). Oleh karena itu pemerintah negara terbelakang, harus menerapkan kebijaksanaan yang adil dan egaliter.

- f. *Ketimpangan Internasional*; Pada umumnya perdagangan internasional menguntungkan negara kaya dan memperlemah negara terbelakang. Sebab negara maju / kaya memiliki basis industri manufaktur yang kuat dengan dampak sebar yang kuat pula. Dengan mengekspor produk industri mereka yang merasuk ke negara terbelakang, mereka akan mematikan industri skala kecil. Ini cenderung mengubah negara terbelakang menjadi produsen barang-barang primer untuk ekspor. Mengingat permintaan akan barang-barang ekspor *inelastic* (di pasar ekspor), maka mereka menderita akibat fluktuasi harga yang menggila. Sebagai konsekuensinya mereka tidak dapat mengambil untung dari naik turunnya harga barang di dunia ekspor.
- g. *Perpindahan modal*; juga gagal menghapuskan ketimpangan internasional. Karena negara maju lebih menjanjikan keuntungan dan jaminan bagi para investor, maka modal akan semakin menjauhkan diri dari negara terbelakang. Modal yang mengalir ke negara terbelakang diarahkan sebagian besar kepada produksi barang primer untuk ekspor, dan ini akan meragukan mereka karena dampak balik yang kuat. Apapun yang diinvestasikan pihak asing, akan meningkatkan dampak balik yang domain serta tidak menjadi pemecah masalah dalam ketimpangan internasional (Jhingan, 1994: 274).

4. Teori Nilai Surplus Karl Marx

Karl Marx adalah seorang filosof Jerman (1818-1883) yang di mata para ekonom Barat adalah seorang agitator yang telah membangkitkan persatuan kalangan kaum buruh dan intelektual selama lebih dari seabad yang telah merasa dirugikan oleh kapitalisme pasar dan sekaligus sebagai penjerumus ekonomi ke abad kegelapan baru. Kemudian ia menghancurkan ikatan kapitalisme dan mengoyak-oyak dasar-dasar sistem kebebasan natural Adam Smith (Skousen, 2005: 163-164).

Sesuai dengan sub-judul di atas, pada kajian teori ”Nilai surplus” di sini tidak akan dibahas tentang peranan Karl Marx di bidang filsafat sejarah, politik, maupun

komunisme, serta alienasi. Adapun pokok pikiran yang dituangkan Marx dalam teori nilai surplus tersebut, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Jika tenaga kerja adalah satu-satunya penentu nilai, lalu ke mana profit dan bunganya? Marx menyebut profit-profit dan bunganya itu sebagai “nilai surplus”.
2. Oleh karena itu ia berkesimpulan bahwa kapitalis dan pemilik tanah adalah pihak yang mengeksploitasi para pekerja.
3. Jika semua nilai adalah produk dan tenaga kerja, maka semua profit yang diterima adalah oleh kapitalis dan pemilik tanah pastilah merupakan “nilai surplus” yang diambil secara tidak adil dari pendapatan kelas pekerja.
4. Adapun rumus matematisnya untuk teori nilai surplus tersebut, dapat dikemukakan sebagai berikut: “Bahwa tingkat profit (p) atau eksploitasi adalah sama dengan nilai surplus (s) dibagi dengan nilai produktif akhir (r). Dengan demikian:

$$p = s/r$$

Misalkan; andaikata pabrik pakaian memperkerjakan buruh untuk membuat baju. Sedangkan kapitalis menjual bajunya serga \$ 100 per/buah, tetapi ongkos tenaga kerja adalah \$ 70 per / baju. Karena itu tingkat profit atau eksploitasinya adalah:

$$p = \$ 30 / \$ 100 = 0,3, \text{ atau } 30 \text{ persen}$$

5. Marx membagi nilai produk akhir menjadi dua bentuk kapital (modal) yakni kapital *konstan* (C) dan *kapital variabel* (V). Kapital konstan merepresentasikan pabrik dan peralatan. Kapital adalah biaya tenaga kerja.

Jadi, persamaan untuk tingkat profit menjadi:

$$p = s / (v + c)$$

5. Teori Monetarisme Pasar Bebas Friedman

Milton Friedman lahir pada 1912 di Brooklyn, satu-satunya anak lelaki dari empat bersaudara imigran Yahudi Eropa Timur yang bekerja serabutan di New York. Pada tahun 1932 saat depresi Friedman dapat beasiswa untuk belajar ekonomi di *University of Chicago*. Di samping ia bertemu dengan rekannya George Stigler seumur hidupnya, dia juga di Chicago bertemu Rose Director, yang kelak menjadi istrinya. Dan, tahun 1938 Friedman menikah dengan Rose, mereka menjadi rekan dan bersama-sama menulis

beberapa buku, serta dikaruniai dua anak. Friedman mendapat gelar master tahun 1933. Kemudian tahun 1946 Friedman memperoleh gelar Ph.D. dari Columbia, dan ia kembali mengajar di *University of Chicago*, bahkan melanjutkan tradisinya memperkuat versi terbaru dari teori kuantitas uang Irving Fisher, yang diterapkannya pada kebijakan moneter. Dia menulis banyak topik yang berkaitan dengan ekonomi moneter, dan berpuncak pada riset dan tulisan empirisnya yang paling terkenal, "*A Monetary History of the United States 1867-1960*" yang dipublikasikan oleh *National Bureau of Economic Research* dan ditulis bersama Anna J. Schwartz (1963). Pada intinya studi monumental ini menunjukkan kekuatan uang dan kebijakan moneter dalam gejolak perekonomian Amerika Serikat, termasuk Depresi Besar dan era pascaperang, ketika para ekonom arus utama percaya bahwa "uang tidak penting". Kemudian ia juga menulis buku *Capitalism and Freedom* yang diluncurkan pada ulang tahun perkawinan Friedman dan Rose ke-25. Inti teorinya sebagai berikut:

- a. Metodologi Positivisme; menurut Friedman validitas suatu teori tidak tergantung pada unsur generalisasinya maupun kekokohan asumsi-asumsi dasarnya, melainkan semata-mata pada kesesuaian implikasi-implikasinya secara relatif terhadap implikasi teori-teori lain, yang diukur berdasarkan statistik primer.
- b. Pasar dianggap sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi, asalkan didukung kebebasan politik intelektual; para ekonom aliran Chicago melihat perekonomian sebagai suatu kondisi perlu, namun bukan kondisi cukup untuk menciptakan masyarakat bebas;
- c. Aturan moneter yang ketat lebih disukai untuk pengambilan keputusan yang diskret oleh otoritas pemerintah. "Setiap sistem yang memberi banyak kekuasaan dan banyak keleluasaan bagi segelintir orang di mana kekeliruan mereka entah itu disengaja atau tidak — bisa menimbulkan efek yang luas adalah sistem yang buruk" (Friedman, 1982: 50).
- d. Ia lebih menekankan pada kebijakan moneter Q, kuantitas uang jauh lebih penting daripada P. "Opininya yang segar dan sangat berbeda" dengan opini Fisher dan Simons datang seperti "kilatan tiba-tiba", baginya "aturan dari sudut pandang kuantitas uang jauh lebih unggul, baik itu untuk jangka pendek maupun jangka

panjang, ketimbang aturan dari sudut pandang stabilisasi harga” (Friedman, 1969: 84).

- e. Pengelolaan administratif dan intervensi kebijakan ekonomi yang bersifat *ad hoc* hanya akan merusak situasi ekonomi; dalam soal kebijakan moneter dan fiskal, ia menekankan pentingnya kesinambungan;
- f. Ia menolak standar emas sebagai *numeraire* moneter dengan dua alasan. *Pertama*, biaya *resources*-nya yang tinggi, dan *kedua* implementasinya yang tidak praktis. Selain itu produksi emas jarang dapat mengimbangi pertumbuhan ekonomi dan karena itu bersifat deflasioner. ”Betapa absurdnya menya-nyiakan sumber daya untuk menggali tanah mencari emas, hanya untuk menguburkannya lagi di kolong *Fort Knox, Kentucky*”.
- g. Monetarisme jauh lebih baik daripada fiskalisme dalam regulasi makroekonomi.
- h. Kebijakan fiskal baginya diyakini sebagai wahana yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan, namun redistribusi pendapatan bagi kalangan di atas garis kemiskinan justru akan lebih banyak menimbulkan kerugian, serta;
- i. Imperialisme disipliner yang menonjolkan penerapan analisis ekonomi oleh para ekonom terhadap semua bidang yang biasanya dianggap sebagai disiplin lain/luar seperti sejarah, politik, hukum, dan sosiologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, (1992) *Materi Pokok Pendidikan IPS-2: Buku 1, Modul 1*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , PPPG Tertulis.
- Albion, P. dan Farris, M. (1981) *The Advertising Controversy*, Boston, MA.
- Alchian, A.A. (1961) "Some economics of property rights" dalam A.A. Alchian, *Economics Forces at Work*, Indianapolis, I.N.:
- Amir, M.S. (1996) *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*, Jakarta: Lembaga Manajemen PPM dan Penerbit PPM.
- Arrow.K.J. (1963) *Social Choice and Individual Value*, Edisi Kedua, Cambridge: United Kingdom..
- Asimakopulos, A. (2000) Ekonomi Mikro" dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn. 660-661.
- Atkinson, A.B. dan Stiglitz, J.E.(1980) *Lectures on Public Economic*, Maidenhead.
- Bartlett, B. dan Roth, T.P. (1984) *The Supply-Side Solution*, London.
- Becker, C. (1981) *A Treatise on Family*, Cambridge, MA.
- Bliss. Christopher (2000) "Ilmu Ekonomi" dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn. 272-277.
- Blumberg, Rae Leeser (1978) *Stratification: Sicioeconomic and Sexual Inequality*, Dubuque, Iowa: Brown.
- Boeke, J.H. I (1947) *Oriental Economics* International Secretariat Institute Pacific Relation.
- Boeke, J.H. II (1953) *Economic and Economic Policy of Dual Society, as xemplified by Indonesia*, International Secretariat Institute Pacific Relation.
- Boeke, J.H. III (1954) *Three Froms of Disintegration in Dual Societies, Indonesie*, Vol.VII, no.4 (April 1954).
- Boeke, J.H. IV (1954) "Western Influence on the Growth of Eastern Population", *Economica Internazionali*, Vol. VII, no.2 Mei 1954.

- Boland, Lawrence, A. (2000) “Ekonomi Neo-Klasik” dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn.700-701.
- Britton, Andrew (2000) “Kebijakan Makroekonomi” dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn.595-597.
- Bronffebrenner, Martin, (2000) “Aliran Chicago” dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn 103-104.
- Brown, C.V. (2000) “Perpajakan” dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm, 1082-1083.
- Casson, Mark, (2000) “Entrepreneurship (Kewirausahaan)” dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm, 297-298.
- Casson, Mark (1982) *The Entrepreneur: An Economic Theory*, London: Allen dan Unwin.
- Choumain, Imam dan Prihatin (1994) *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Proyek Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Jakarta: Depdikbud
- Clapham, J. (1957) *A Concise Economic History of Britain from the Earliest Times to 1750*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Coase, R.H. (1937) “The Nature of the Firm”, dalam *Economica*, 4.
- Cochrane, A.L. (1971) *Effectiveness and Efficiency*, London: Allen dan Unwin.
- Coleman, J.S. (1990) *Foundations of Social Theory*, Cambridge, MA: Cambridge university Press.
- Eatwell, John , et.al (1987) *The Palgrave: A Dictionary of Economics*, London: McMillan Press Limited.
- Eggerstson, Thrainn, (2000) “Ekonomi Instiusional” dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 501-503.

- Elkan, walter (2000) “Sektor Informal” dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn. 493-495.
- Estrin, Saul (2000) “Koperasi” dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 174-176.
- Fletcher, G.A (1989) *The Keynesian Revolution and its Critics*, London: Macmillan.
- Fried, Morton,H. (1967) *The Evolution of Political Society*, New York: Random House.
- Friedman, Milton (1982) *Capitalism and Freedom*, Chicago: University of Chicago Press.
- Friedman, Milton (1969) *The Optimum Quantity of Money and Other Essay*, London: Macmillan.
- Fudenburg, D. dan Tirole, J. (1991) *Game Theory*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Gemmell, Norman (ed) (1994) *Ilmu Ekonomi Pembangunan: Beberapa Survei*, Diterjemahkan Oleh Nirwono, Jakarta: LP3ES.
- Hart, Keith (1996) Sektor Informal” dalam Chris Manning (1996) *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal Di Kota*, Diterjemahkan oleh Al Ghazi Usman dan Andre Bayo Ala, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Heertje, A. (2000) “Perekonomian Informal” dalam Kuper, Adam, & Kuper, Jesica, (ed) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn. 492-493..
- Hessen, R. (1979) *In Defense of The Corporation*, Stanford, CA.
- Hicks, J.R. (1939) “Foundations of Welfare Economics”, *Economics Journal* 49..
- Hicks, J.R. (1969) “Preface and Manifesto” dalam K.J. Arrow dan T. Scitovsky (eds) *Reading in Welfare Economic*, London.
- Higgins, B. (1956) “*The Dualistic Theory*” of Underdeveloped Areas, EDCC, Vol IV, 2 January.
- Higgins, B. (1957) *Indonesia’s Economic Stabilization and Development*, Institute of Pacific Relations, New York.

- Hirst, Paul (2000) “Sosialisme” dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm, 1012-1014.
- Hughes, Gordon, (2000) “Ekonomi Matematematik” dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn.630-631.
- Jhally, Sut (2000) “Periklanan” dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm, 7-9.
- Jhingan, M.L. (1994) *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Diterjemahkan Oleh D. Guritno, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kendrick, J.W. (1961) *Productivity Trends in United States*, Princenton, N.J.
- Keynes, John Maynard (1973[1936] *The General Theory of Employment, Interest, and Money*, London: Macmillan.
- Kline, S, (1994) *Out of the Garden*, London: Harper & Row, Publisher.
- Kuznets, S. (1971) *Economic Growth of Nation*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Landes, D. (1968) *The Unbound Prometheus*, Cambridge, UK. Cambridge University Press.
- Ledyard, J. (1995) “Public Goods: a survey of experimental research, dalam J. Kagel dan A.E. Roth (eds) *Handbook of Experimental Economics*, Princenton, N.J.
- Leijonhufvud, Axel (1968) *On Keynesian Economics and the Economics of Keynes*, Oxford: Oxford University Press.
- Leiss, W., Kline, S., dan Jhally, S. (1990) *Social Communication in Advertising*, New York.
- Lipsey, Richard G. dan Steiner, Peter, O. (1981) *Economics*, New York: Harper & Row, Publisher.
- Maynard, Alan, (2000) “Ekonomi Kesehatan” dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 427.
- Mazumdar, Dipak (1996) “Sektor Informal di Kota: Analisis Empiris Terhadap Data dari Berbagai Negara di Dunia Ketiga”, dalam Chris Manning (1996) *Urbanisasi*,

Pengangguran, dan Sektor Informal Di Kota, Diterjemahkan oleh Al Ghozi Usman dan Andre Bayo Ala, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, halmn.109-137..

- Meier, G.M. dan Baldwin, R.E. (1976) *Economic Development*, New York: Oxford University Press.
- Metcalf, J.S. (2000) "Ilmu Ekonomi Evolusioner" dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 324-326.
- Milgrom, P.. dan Roberts, J. (1992) *Economics, Organization and Management*, Englewood, Cliffs, N.J.
- Mincer, J. dan Polacheck, S, (1974) "Family Invesment in Human Capital; Earning of Women", *Journal of Political Economy* 82.
- Mokyr, J. (1991) *The Lever of Riches*, Oxford: Oxord University Press.
- Mubyarto, (1983) *Politik Pertanianm dan Pembangunan Pedesaan*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Mullineux, Andy (2000) "Investasi" dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 522-524
- Myrdal, Gunnar (1968) *Asian Drama: An Inquiry into the Poverly of Nations*, Harmondsworth: Penguin Books.
- Myrdal, Gunnar (1957) *Economic Theory and Underdeveloped Regions*, London: Duck Worth.
- Nopirin (2000) *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPF.
- O'Brien, D.P. (2000) "Ilmu Ekonomi Klasik" dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 120-122
- Owen, Stuart (1979) *Captains of Consciosness*, New York: Harper & Row, Publisher.
- Pearce, David, W. (2000a.) "Ekonomi Lingkungan" dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn.300-301.

- Pearce, David, W. (2000b.) “Ekonomi Kesejahteraan” dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn.1141-1143.
- Posner, R.A. (1994) *Economic Analysis of Law* Edisi Keempat, Boston, MA.: Boston University Press.
- Reekie, W. Duncan (2000) “Perseroan Terbatas” dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn.176-178.
- Revell, Jack (2000) “Perbankan” dalam Kuper, Adam, & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persaa, hlmn.58-60.
- Roberts, P.C. (1984) *The Supply Side Revolution: An Insider Account of Polcymaking in Washington*, Cambridge, MA: Cambridge University Press.
- Rostow,W.W. (1960) *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*, New York: Cambridge University Press.
- Rostow, W.W. (1953) *The Process of Economic Growth*, New York: Cambridge University Press.
- Roth, Alvin, A. “(2000a) “Ilmu Ekonomi Eksperimental” dalam Kuper, Adam, & Kuper, Jesica, (ed) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn.333-334.
- Rooth, Alvin, A. (1995) “Introduction to experimental economics, dalam J.Kagel dan A.E. Roth (eds) *Hanbbok of Experimental Economics*, Pricenton, UK.
- Sadli, M. (1983) “Beberapa Pandangan Atas Teori Ekonomi Ganda Boeke” dalam Sajogo, *Bunga Rampai Perekonomian Desa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Saith, Ashwani (2000) “Ekonomi Pertanian” dalam Kuper, Adam, & Kuper, Jesica, (ed) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn.17-19.
- Samuelson, Paul,A. dan Nordhaus, William,D. (2003) *Ilmu Mikroekonomi*, Alih Bahasa: Nur Rosyidah, Annal Elly, dan Bosco Carvallo, Jakarta: Media Global Edukasi.
- Samuelson, Paul,A. dan Nordhaus, William,D. (1990) *Ekonomi, Jilid 1*, Diterjemahkan Oleh Jaka Wasana, Jakarta: Erlangga.

- Sandler, Todd, (2000) “Ekonomi Perthanan” dalam Kuper, Adam, & Kuper, Jesica, (ed) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn.208-209.
- Satradipoera, Komaruddin (2001) *Sejarah Pemikiran Ekonomi: Suatu Pengantar Teori dan Kebijakan Ekonomi*, Bandung: Kappa-Sigma.
- Satradipoera, Komaruddin (1991) *Uang: Di Negara Berkembang*, Jakarta: Penerbit Bumi Asara.
- Schelling, T.C. (1960) *The Strategy Conflict*, Cambridge, MA. Cambridge of Universty Press.
- Schultz, T. (1974) *The Economics of the Family*, Chicago: Chicago of University Press.
- Shadily, Hasan (ed) (1980) *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Schumpeter, J.A. (1954) *History of Economic Analysis*, New York : Oxford University Press.
- Schumpeter, J.A. (1950) *Capitalism, Socialism, and Democracy*, New York: Oxford University Press.
- Sen, A.K. (1979) *Collective Choice and Social Welfare*, Amsterdam.
- Sethuraman, S.V. (1996) “Sektor Informal di Negara Berkembang”, dalam Chris Manning (1996) *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal Di Kota*, Diterjemahkan oleh Al Ghozi Usman dan Andre Bayo Ala, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Shanon, L.W. ed. (1965) *Underdevelopd Areas*, New York: Oxford University Press.
- Siebert, S. (2000) “Ekonomi Sisi-Penawaran” dalam Kuper, Adam, & Kuper, Jesica, (ed) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn.1072-1074.
- Singer, H.W. (2000) “Ekonomi Ganda” dalam Kuper, Adam, & Kuper, Jesica, (ed) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn.248-249.
- Skousen Mark, (2005) *Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro Teori-tori Ekonomi Modern: Sebuah Narasi Kritis Pergumulan Intelektual dan Kepedihan Sosial di dalam Menyelesaikan Masalah-masalh Ekonomi*, Alih Bahasa Tri Wibowo Budi santoso, Jakarta: Prenada.

- Sundler, S. (1995) "Experimental asset markets: a survey" dalam J.Kagel dan A.E. Roth, (eds) *Hanbook of Experimental Economics*, Pricenton, N.J.
- Sweeney, James, L. (2000) "Ekonomi Sumber Daya Alam" dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn 697-698.
- Taylor, Mark (2000) "Teori Makroekonomi" dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn 597-599.
- Thirlwall, A.P. (2000a) "Neraca Pembayaran" dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn 57-58..
- Thirwall, A.P. (2000b) "Ilmu Ekonomi Aliran Keynes" dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn 531-532.
- Thurstone, L.L. (1931) "*The difference function*", *Journal of Social Psychology*, 2.
- Townsend, Peter (2000) "Kebutuhan Dasar" dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn 61-62.
- Williams, R. (1980) "Advertising: the magic system: dalam R. Williams (ed) *Problems in Materialism and Culture*, London.
- Williamson, H.F dan Buttrick, (1985) *Economic Development: Principles and Patterns*, dalam E. Duran (ed) *Latin American and the World Recession*, Cambridge: Cambridge University Press,.
- Winardi, (1987) *Pengantar Ekonomi Moneter*, Buku-1, Bandung: Tarsito.

BAB IX

PSIKOLOGI

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Ilmu Psikologi

Banyak definisi tentang psikologi dalam berbagai cara, bentuk, dan isi. Para ahli psikologi terdahulu mendefinisikan psikologi sebagai “studi kegiatan mental” (Atkinson, 1996: 18).— istilah mental menyinggung masalah-masalah pikiran, akal, ingatan atau proses-proses yang berasosiasi dengan pikiran, akal, dan ingatan. Beberapa ahli psikologi lainnya memberikan definisi “psikologi” sebagai berikut: William James (1890) ahli psikologi Jerman, memberikan definisi bahwa psikologi adalah ilmu mengenai kehidupan mental, termasuk fenomena dan kondisi-kondisinya. Fenomena di sini termasuk apa yang kita sebut sebagai perasaan, keinginan, kognisi, berpikiran logis, keputusan-keputusan dan sebagainya. Kemudian menurut Kenneth Clark dan George Miller (1970) mendefinisikan bahwa psikologi sebagai studi ilmiah mengenai perilaku. Lingkupnya mencakup berbagai proses perilaku yang dapat diamati, seperti gerak tangan; cara berbicara dan perubahan kejiwaan dan proses yang hanya dapat diartikan sebagai pikiran dan mimpi.

Dari berbagai definisi tersebut di sini dikemukakan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa psikologi sebagai studi ilmiah mengenai *proses perilaku* dan *proses-proses mental*. Bidang khusus yang terdapat di dalamnya sangat beraneka ragam termasuk psikologi eksperimental dan psikologi fisiologi, psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi kepribadian, psikologi klinis dan penyuluhan, psikologi sekolah dan pendidikan, serta psikologi industri dan permesinan. Dengan demikian psikologi merupakan salah satu bagian dari *ilmu perilaku* atau *ilmu sosial*.

Studi psikologi dapat didekati dari beberapa sudut pandang, meliputi: *Pertama*, pendekatan *neurobiologi*, ditandai dengan menghubungkan tindakan kita dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam tubuh kita terutama dalam otak dan sistem saraf. Adapun tokoh kelompok ini adalah *Broca, Fritsch, Hitzig, dan Ferris*. *Kedua*, pendekatan *behaviorisme* (perilaku) berfokus pada kegiatan luar organisme yang dapat diamati dan diukur. Tokoh aliran ini yang terkenal adalah *J.B. Watson* dan *B.F. Skinner*. *Ketiga*, pendekatan *kognitif*, lebih menekankan cara kerja otak mengolah informasi yang masuk

secara aktif dan mengubahnya dengan berbagai cara. Psikologi *kognitif* ini diprakarsai oleh *Kenneth Craik* seorang ahli psikologi Inggris yang menganalogikan otak seperti komputer. (Atkinson, 1996: 11). *Keempat*, pendekatan *psikoanalitik*, yang menekankan motif di bawah sadar yang berakar dari dorongan seksual dan agresi yang ditekan pada masa kanak-kanak. Adapun tokoh-tokohnya, *Sigmund Freud, Adler, Jung, Fromm, Sullivan, Horney*, dan sebagainya. *Kelima*, pendekatan psikologi *gestalt*, yang menekankan pada konfigurasi yang menyeluruh yang diprakarsai oleh *Max Wertheimer, Kohler*, maupun *Koffka*. *Keenam*, pendekatan *fenomenologi* dan *humanistik*, berfokus pada pengalaman subyektif seseorang, kebebasan memilih, dan motivasi terhadap aktualisasi diri. Tokoh-tokoh yang tergolong pada kelompok ini adalah *Abraham Maslow* dan *Carl Rogers* (Hall & Lindzey, 1993: 106, 125).

Begitu juga dalam penggunaan metode yang dipakai (Atkinson, 1996: 25-30), ilmu psikologi mengenal beberapa metode kerja, seperti: (1) Metode *eksperimental* yang menekankan pengkajian setiap variabel (variabel bebas dan terikat), dengan memberikan perlakuan terhadap kelompok eksperimen untuk kemudian diukur analisis pengaruh perlakuan tersebut. (2) Metode *pengamatan* (observasi). Pada metode ini dilakukan pengamatan terhadap sampel penelitian perilaku binatang maupun manusia yang merupakan titik tolak psikologi. Metode ini juga bisa dipakai dalam penelitian-penelitian di laboratorium. (3) Metode *Survei*; yang secara langsung dapat dilakukan peneliti melalui kuesioner atau wawancara dengan jumlah sampel yang cukup banyak. (4) Metode *Tes*; hal ini dilakukan untuk mengukur segala jenis kemampuan, minat sikap, dan hasil kerja. Melalui metode tes, para ahli psikologi memperoleh sejumlah besar data dari sekelompok orang dengan gangguan yang tak berarti dari pekerjaan sehari-hari dan tanpa membutuhkan peralatan laboratorium yang rumit. (5) Metode *Riwayat Hidup atau Kasus*; hal ini dimaksudkan untuk mengungkap kasus-kasus yang ditelaah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sebagian besar riwayat kasus dipersiapkan dengan cara merekonstruksikan riwayat hidup seseorang yang didasarkan pada kejadian dan catatan yang teringat.

Beberapa jenis ilmu psikologi secara tematis maupun terapan, dapat dirinci sebagai berikut; (1) *psikologi sosial*; (2) *psikologi klinis dan konseling*; (3) *psikologi konstitusional*; (4) *psikofarmakologi*; (5) *psikologi okuvasional*; (6) *psikologi politik*; (7)

psikologi sekolah dan pendidikan; (8) psikologi perkembangan; (9) psikologi kepribadian; (10) psikologi lintas budaya; (11) psikologi rekayasa; (12) psikologi lingkungan; (13) psikologi konsumen; (14) psikologi industri dan organisasi.

Psikologi sosial (*social psychology*), ...is the scientific study of individual behavior as a function of social stimuli, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku individu sebagai fungsi dari rangsang-rangsang sosial (Shaw & Costanzo, 1970: 3). Dikatakan 'individu' dalam definisi tersebut karena menunjukkan bahwa unit analisis dari psikologi sosial adalah individu, bukan masyarakat (seperti dalam sosiologi) maupun kebudayaan (seperti dalam antropologi budaya). Sehingga dari definisi yang singkat tersebut, pengertian 'psikologi sosial' dapat pula diartikan sebagai suatu kajian tentang sifat, fungsi dan fenomena perilaku sosial dan pengalaman mental dari individu dalam sebuah konteks sosial. Di antara fenomena psikologi sosial ini adalah; agresi dan kemarahan, altruisme dan perilaku membantu, sikap sosial persuasi, ketertarikan dan hubungan sosial, atribusi dan kognisi sosial, tawar-menawar dan negosiasi, konformitas dan proses-proses pengaruh sosial, kerja sama dan kompetisi, pembuatan keputusan kelompok, presentasi diri dan manajemen kesan, peran-peran seksual, perilaku seksual, pembelajaran sosial dan sosialisasi (Jones, 2000: 996).

Menurut Gordon W. Allport dalam tulisannya *The Historical Background of Modern Social Psychology* (1954), perintisan psikologi sosial telah diamati oleh para filsuf sosial, jauh sebelum pertanyaan-pertanyaan psikologi menjadi bagian dari metodologi ilmiah. Sebagaimana dikemukakan pendiri sosiologi dari Prancis, Auguste Comte (1789-1857): bagaimana manusia secara simultan bisa menjadi penyebab sekaligus sebagai akibat dari masyarakat. Kemudian seorang sosiolog dan kriminolog Prancis lainnya, Gabriel Tarde (1842-1904) yang meneliti tentang proses imitasi sebagai dasar dari interaksi sosial atau *La societe c'est l'imitation*, disusul Gustav Le Bon (1841-1932) yang terkenal dengan kontribusi pemikirannya tentang "psikologi massa" (*crowding*). Karena itu banyak penulis buku teks yang mengidentifikasi kelahiran psikologi sosial tahun 1908, bersamaan dengan diterbitkannya dua teks yang ditulis oleh McDougall dalam *An Introduction to Social Psychology* dan Ross dalam *Social Psychology*. Namun menurut Edward E. Jones, psikologi sosial tersebut baru mulai konsisten mengembangkan identitasnya sendiri pada tahun 1930-an, yakni dengan

berkembangnya teori-teori dan metode psikologi sosial secara murni yang dikembangkan oleh Kurt Lewin (Jones, 2000: 996).

Psikologi Klinis dan Penyuluhan/Konseling (*Clinical psychology and counselling*); merupakan salah satu bidang psikologi terapan yang berperan sebagai salah satu disiplin kesehatan mental dengan menggunakan prinsip-prinsip psikologi untuk memahami, mendiagnosis, dan mengatasi berbagai masalah atau penyakit psikologi (Mens, 2000: 122). Dalam hal ini mahasiswa diajarkan untuk menguasai prinsip-prinsip dasar itu sebagai fondasi aplikasi keilmuannya. Selain itu juga mereka diharuskan melakukan sendiri berbagai riset terhadap perilaku manusia, dan menyimak serta memanfaatkan riset-riset yang berhubungan dengan masalah-masalah kesehatan.

Untuk pertama kalinya organisasi yang mengatur standar psikologi klinis dibentuk pada tahun 1947 oleh Dewan Profesi Psikologi Amerika yakni; *American Noard of Profesional Psychology*. Lembaga inilah yang berhak melakukan pengujian, memberikan diploma, serta mendorong pembinaan kecakapan psikologi profesional. Terdapat lima bidang spesialisasi yang kemudian berkembang secara mandiri, yakni; *psikologi klinis, psikologi konseling, psikologi industri dan organisasional, psikologi pendidikan, serta neuropsikologi* (Mensh, 2000: 123). Perkembangan psikologi klinis khususnya di Amerika demikian pesat. Hal ini terbukti dari perkembangan anggota dan rekanan yang aktif, maupun perkembangan keilmuannya. Pada tahun 1957 saja asosiasi ini sudah memiliki anggota dan rekanan aktif sebanyak 1.907 orang. Kemudian pada tahun 1993, jumlah keseluruhan anggota asosiasi tersebut meningkat menjadi 113.000 orang. Sampai sejauh ini terdapat sekitar 16.000 di antaranya 16.000 pelamar hendak bergabung dan telah terdaftar pada *National Register*. Dan, sekarang ini psikologi klinis berkembang ke arah reintegrasi bidang-bidang psikologi lainnya seperti; psikologi kesehatan (yang mewadahi psikologi klinis, psikologi sosial, psikologi fisiologis, serta bidang-bidang pendidikan, dan psikologi kognitif (Mensh, 2000: 123).

Sedangkan dalam psikologi konseling (*counselling psychology*) merupakan suatu psikologi terapan yang berusaha menciptakan, menerapkan, dan menyebarkan pengetahuan mengenai pencegahan dan penanggulangan gangguan fungsi manusia dalam berbagai kondisi (Brown dan Lent, 1992). Di Amerika Serikat bidang ini lahir sebagai ilmu tersendiri pada tahun 1947, kemudian disusul di Kanada dan Australia, kemudian di

Inggris tahun 1982 dengan membentuk seksi psikologi konseling pada *British Psychology Society* (Taylor, 2000: 182). Adapun tujuan bidang psikologi konseling tersebut adalah membantu individu memahami dan mengubah perasaan, pikiran, dan perilaku kejiwaan, mengatasi tekanan mental, menanggulangi krisis, dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan berbagai persoalan (*American Psychological Association*, 1985).

Psikologi Konstitusional; (*constitutional psychology*), merupakan suatu nama psikologi yang masih kontroversial. Pemahaman yang lain adalah sebagai studi tentang hubungan antara struktur morfologis dan fungsi fisiologis tubuh serta hubungan antara fungsi-fungsi psikologi sosial (Lerner, 2000: 168). Bahkan beberapa psikolog menolak gagasan yang menyatakan bahwa struktur dan fungsi tubuh memiliki kaitan erat dengan fungsi psikologis, kendatipun tersedia banyak data yang mendukung pendapat tersebut (Lerner, 1990).

Psikologi konstitusional ini mula-mula dirintis oleh Kretschmer pada tahun 1921 dengan menerbitkan *Korperbau und Charahter*, kemudian disusul oleh Sheldon dengan karyanya *The Varieties of Human Physique* (1940) yang menimbulkan banyak kritik sebagai reaksinya. Sebab, masyarakat ilmiah nampaknya kurang begitu yakin terhadap kekuatan asosiasi antara tipe fisik dan tempramen seperti yang dilaporkan pada karyanya bahwa terdapat korelasi tatanan + 0,8 tentang hubungan antara karakter tempramen dan fisik. Selain itu keraguan tersebut didasarkan pada landasan konseptual, metodologis, serta analitis datanya. Akan tetapi dalam penelitian lain di mana karena aspek metodologinya lebih kuat, terungkap bahwa memang ada asosiasi yang menonjol antara tipe-tipe fisik tertentu, seperti; *endomorpa*, *mesomorfa*, dan *ektomorfa*, beserta unsur-unsur tubuh lainnya, seperti daya tarik fisik dengan kepribadian atau tempramen (Lerner, 1987; 2000: 168). Tampaknya perbedaan-perbedaan teoretis dalam psikologi konstitusional tersebut akan terus berkembang sebagai dinamika akademik, sehingga kegiatan-kegiatan risetnya-pun terus berkembang.

Kemudian **Psikofarmakologi;** merupakan pengetahuan tentang obat untuk mengobati gangguan psikiatris. Pada zaman dahulu, khususnya sejak tahun 1950, seorang psikiater hanya memiliki sedikit obat stimulan dan obat penenang non-spesifik untuk mengobati kecemasan dan depresi. Bahkan terapi *Elektroconvulsive* (ECT) dianggap efektif bagi pasien depresi, tetapi kurang bagus bagi pasien Schizophrenia kronis. Jadi

belum ada perawatan yang efektif untuk ribuan bahkan mungkin jutaan pasien pada rumah sakit jiwa di seluruh dunia saat itu. Namun dalam perkembangan selanjutnya khususnya pada tahun 1955, terjadi tiga penemuan farmakologi yang menandai revolusi pengobatan psikiatri, yakni; *obat antipsikotik*, *antidepresan*, dan *lithium* (Pope, 2000: 866).

Untuk obat *antipsikotik* berfungsi sebagai penetralan khayalan atau kepercayaan kepada hal-hal yang tidak nyata dan halusinasi (perasaan melihat, mendengar suara dan sejenisnya), yang merupakan gejala umum dalam schizoprenia dan penyakit kegilaan depresif. Biasanya obat ini efeknya luar biasa untuk memberikan penenang untuk 'kembali ke dunia normal' dalam kehidupan sehari-hari dari gangguan-gangguan psikotik. Namun obat ini juga memiliki efek sampingan yang cukup mengganggu seperti; sedasi otot kaku, lesu, melemahkan fungsi fisik dan mental. Kemudian *obat antidepresan*, berfungsi meringankan pasien yang mengalami depresi mayor atau fase tertekan dari penyakit depresi kejiwaan. Biasanya pasien sangat sulit tidur ataupun makan, tidak dapat mengerjakan tugas-tugas, dan selalu berpikir untuk bunuh diri. Di sinilah obat *antidepresan* berfungsi untuk penyakit-penyakit seperti itu. Sedangkan untuk *Lithium*, merupakan obat yang unik di antara obat-obat psikiatrik lainnya, yang terdiri atas sebuah ion sederhana dan bukan molekul kompleks (Pope, 2000: 867). Fungsinya untuk menetralkan tahap kegilaan dari depresi berat (namun kurang efektif bagi depresi akut), dan dalam jangka lama, menghindarkan pasien dari kambuhnya kegilaan maupun depresi.

Kemudian ***Psikologi Okupasional*** (*accupational psychology*), merupakan suatu terminologi yang tampaknya merangkum suatu bidang kajian psikologi industri, psikologi organisasi, psikologi vokasional, dan psikologi sumber daya manusia (Herriot, 2000: 713). Jika psikologi industri memberi petunjuk tentang psikologi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan manajemen; psikologi organisasi dengan membatasi bidang itu hanya pada konteks khusus tertentu; psikologi vokasional cenderung membatasi berbagai karir individu di luar konteks organisasional yang bisa mereka tekuni, sedangkan psikologi sumber daya manusia bisa mengabaikan konteks non-organisasional. Dengan demikian psikologi okupasional merupakan label yang bermanfaat, yang merangkum semua penekanan di atas. Oleh karena itu psikologi okupasional banyak membahas tentang hubungan antara organisasi dengan individu dalam

teori peranan; tentang makna kerja dalam pendekatan-pendekatan fenomenologi terhadap kognisi; tentang karir-karir kehidupan (*life careers*) dalam teori-teori kehidupan (*life-span theories*) perkembangan manusia; dan tentang hubungan antar organisasi dan antar negara-kebangsaan dalam teori-teori konflik dan negosiasi (Herriot, 2000: 714).

Jika ditinjau historisnya, psikologi okupasional sebagai produk perubahan-perubahan sosial, ekonomi, dan kultural khususnya pada masyarakat Barat. Galton yang menemukan determinisme biologi abad 19 tentang kemampuan intelektual yang bersifat bawaan, sangat relevan dengan pendapat Taylor bahwa kerja bisa dipilah-pilah menjadi beberapa tugas yang membutuhkan kemampuan-kemampuan spesifik. Kemudian pasca Perang Dunia I, berkembang tes-tes psikometrik dalam seleksi kemiliteran. Hal ini berbeda dengan pasca Perang Dunia II, yang memberikan bukti tentang pentingnya nilai keterpaduan (*cohesiveness*) kelompok dalam meraih tujuan. Konsep kelompok kerja sebagai faktor dependen terhadap keberhasilan interpersonal telah mendapat kepercayaan. Oleh karena itu berkembang teori-teori kepemimpinan dari Fred Fiedler, teori tipologi X dan Y dari David McGregor dan sebagainya. Selanjutnya yang mempengaruhi kuat psikologi okupasional adalah gerakan humanisme tahun 1960-an seperti yang dilukiskan Theodore Reich (1970) dan proses-proses aktualisasi diri, yakni pencapaian potensi seseorang secara optimal, mendapat dukungan dari para ahli psikologi humanis-eksistensial seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers.

Psikologi politik (*political psychology*); merupakan bidang interdisipliner yang tujuan substantif dasarnya adalah untuk menyingkap saling keterkaitan antara proses-proses psikologi dan politik (Renshon, 2000: 784). Bidang ini mempunyai sumber dari berbagai disiplin keilmuan, seperti antropologi budaya dan psikologi, psikologi ekonomi, sosiologi, psikologi, serta ilmu politik. Dalam kajiannya, biasanya untuk psikologi lebih banyak menggunakan teori psikoanalisis, teori kepribadian, psikologi sosial, psikologi perkembangan, dan psikologi kognitif. Sedangkan dari sisi lain menggunakan kajian-kajian pendekatan ilmu politik, terutama perilaku politik massa, kepemimpinan politik dan pengambilan keputusan, serta konflik politik di dalam dan antar bangsa.

Selanjutnya adalah **Psikologi Sekolah dan Pendidikan**; (*Psychology for The Classroom and Educational Psychology*), merupakan kajian tentang perilaku peserta didik di sekolah yang substansinya merupakan gabungan psikologi perkembangan anak,

psikologi pendidikan, dan psikologi klinis, yang berhubungan dengan setiap anak untuk evaluasi kegiatan belajar dan emosi; memberikan dan menafsirkan hasil tes inteligensi, tes hasil belajar, dan tes kepribadian yang merupakan sebagian dari tugas mereka. Melalui konsultasi dengan para orang tua maupun guru, mereka merencanakan cara memberikan bantuan belajar pada anak tersebut, baik dalam kelas maupun di rumah anak (Turner, 1977: xiii; Atkinson, 1996: 22-23).

Sedangkan untuk *psikologi pendidikan*, merupakan kajian tentang perilaku dalam bidang proses belajar-mengajar. Dalam hal ini guru juga dapat mengadakan penelitian pendidikan yang dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran bagi gurunya maupun hasil-hasil belajar bagi peserta didiknya

Psikologi Perkembangan; merupakan psikologi yang menekankan perkembangan manusia dan berbagai faktor yang membentuk perilakunya sejak lahir sampai berumur lanjut. Para ahli itu mempelajari kemampuan khusus, seperti bagaimana kemampuan berbahasa berkembang dan berubah pada anak-anak yang sedang tumbuh atau dalam suatu masa hidup tertentu, seperti masa bayi, tahun-tahun prasekolah, ataupun masa remaja (Atkinson et al 1996: 21). Pendapat tersebut sejalan dengan LaBouvie dalam *Descriptive Developmental Research*, yang mengemukakan bahwa

psikologi perkembangan sebagai cabang ilmu psikologi menelaah pelbagai perubahan intraindividual dan perubahan interindividual yang terjadi dalam perubahan intraindividual. Perubahan tersebut tidak hanya mendiskripsikan, tetapi juga menjelaskan atau mengeksplikasikan perubahan-perubahan perilaku menurut tingkat usia sebagai masalah hubungan anteseden (gejala mendahului) dan konsekuensinya” (LaBouvie, 1975: 289).

Pada mulanya sebagaimana dikatakan Siegel (1969: 87), lingkup psikologi perkembangan hanya mengkhususkan diri pada masalah-masalah usia dan tahapan-tahapan tertentu, yang sebagian dipusatkan pada usia anak-anak sampai remaja. Kemudian riset diperluas yang sifatnya ke bawah atau ke tahap kelahiran, pematangan; serta selanjutnya ke atas ke tahap dewasa, lanjut usia dan akhirnya usia pertengahan (Siegel, 1969: 88; Hurlock: 1980: 2).

Selanjutnya Hurlock mengemukakan ada dua alasan utama yang mendorong adanya perbedaan penekanan pada psikologi perkembangan: *Pertama*, riset terhadap

periode tertentu dalam pola perkembangan sangat dipengaruhi oleh keinginan untuk memecahkan beberapa masalah praktis dan masalah-masalah yang berkaitan dengan periode tersebut. Misalnya ketika memasuki *usia pertengahan*, sangat dipengaruhi oleh kesiapan penyesuaian diri masa-masa berikutnya dalam penyesuaian diri baik terhadap perubahan fisik maupun psikologis. Alasan *kedua*, riset terhadap masa-masa tertentu dirasakan lebih sulit dibanding dengan tahap yang lain. Misalnya, untuk memperoleh subyek –subyek usia pertengahan maupun lanjut, lebih sulit daripada mencari subyek-subyek usia prasekolah maupun remaja.

Psikologi Kepribadian (*Psychology of Personality*), sebenarnya bukan sesuatu yang baru, hanya saja sering dinamai yang berbeda. Sebagian ada yang memberi nama *The Science of Karakter* atau *Charakterologie*, atau *Karakterkunde*. Sebagian lagi ada yang memberi nama *Typologie*, *The Psychologie of Personality*, *The Psychology of Charcter*, maupun *Theory of Personality*. Namun pada dasarnya yang dimaksud dengan ”Psikologi Kepribadian” (*Psychology of Personality*) menurut Caplin (1999: 362) adalah segi pandangan yang menekankan hal penanaman dan pelekatan tingkah-laku di dalam kepribadian individu. Namun definisi tersebut masih belum jelas, karena justru kata ”kepribadian”-nya itulah yang belum diungkap artinya. Sedangkan menurut Alfred Adler (Hall dan Lindzey (1993: 242) adalah ilmu perilaku tentang gaya hidup individu atau cara karakteristik seseorang dalam mereaksi terhadap masalah-masalah dan tujuan hidup. Hal ini mungkin lebih tepat walaupun baru satu aspek saja tentang ”gaya, karakteristik, dan tujuan hidup”. Sedangkan menurut Carl Jung (1993: 182) merupakan ilmu perilaku tentang integrasi dari ego, ketiaksadaran pribadi, dan ketidaksadaran kolektif, kompleks-kompleks, arketip-arkhetip persona dan anima.

Dalam macam-macam kategori yang dapat dipergunakan untuk penggolongan psikologi kepribadian jika ditilik dari metodenya dapat dibedakan menjadi dua bagian.

- (a) Teori-teori yang disusun atas dasar pemikiran spekulatif, seperti misalnya teori-teori Plato, Kant, para ahli aliran Neo-Kantianisme, Bahmsen, Queyrat, Malapert, yang disusun oleh para ahli filsafat.
- (b) Teori-teori yang disusun atas dasar data-data dari hasil penelitian empiris atau eksperimental, seperti teori-teori Heymans, Freud, Jung, Adler, Eysenck, Rogers, dan lain-lain (Suryabrata, 2006: 4).

Sedangkan jika dikelompokkan dari aspek atau komponen kepribadiannya jika dipakai sebagai landasan atau titik-tolak dalam penyusunan perumusan teori-teori, dapat dibedakan menjadi lima bagian:

- (a) Teori-teori konstitusional, seperti misalnya teori-teori mazhab Italia, Mazhab Prancis, Kretschmer, Sheldon, dan lain-lainnya lagi.
- (b) Teori-teori temprament, seperti misalnya teori-teori Kant, Meumann, Enselhans, Heymans, Ewald, dan lain-lainnya lagi
- (c) Teori-teori ketidaksadaran, seperti misalnya teori-teori Freud, Jung, Adler, dan pengikut-pengikut dari mereka itu.
- (d) Teori-teori faktor, seperti misalnya teori-teori Eysenck, Cattell, dan lain-lainnya lagi.
- (e) Teori-teori kebudayaan, seperti misalnya teori Spranger (Suryabrata, 2006: 4).

Psikologi Lintas-Budaya (Cross-Cultural Psychology); pada hakikatnya menurut Brislin, Lonner, dan Thorndike, (dalam Berry dkk. 1997: 2) “psikologi lintas-budaya” adalah “kajian empirik mengenai anggota berbagai kelompok budaya yang telah memiliki perbedaan pengalaman, yang dapat membawa ke arah perbedaan perilaku yang dapat diramalkan dan signifikan. Dalam sebagian besar kajian, kelompok-kelompok yang dikaji biasa berbicara dengan bahasa berbeda di bawah pemerintahan unit-unit politik yang berbeda. Sedangkan menurut Triandis (dalam Berry dkk. 1997: 2) “psikologi lintas-budaya berkutat dengan kajian sistematis mengenai perilaku dan pengalaman sebagaimana pengalaman itu terjadi dalam budaya yang berbeda, yang dipengaruhi budaya yang bersangkutan”. Dari dua pernyataan tersebut jelas adanya pemilikan pengalaman kelompok yang berbeda mempunyai hubungan sebab-akibat antara budaya dan perilaku.

Namun, sebagai suatu disiplin akademik yang sistematis, psikologi lintas-budaya, sesungguhnya juga tidak hanya berkutat pada ‘keragaman’, tetapi juga ‘keseragaman’ (*uniformity*): apa yang. Secara psikologis dapat dianggap sebagai sesuatu yang umum dan universal pada spesies manusia. Bahkan lebih dari itu terdapat jenis ubahan kontekstual lain yang tidak lazim dimasukkan kedalam konsep budaya walaupun telah dianggap sebagai bagian kegiatan lintas budaya, yakni ubahan-ubahan biologis, seperti; nutrisi, faktor bawaan, genetik, proses hormonal yang bervariasi berdasarkan kelompok dan budaya mereka serta ubahan ekologis. Inilah yang dikritisi oleh Berry dkk (1999: 3),

bahwa faktor variable-variabel psikologis dan biologis itu perlu ditambahkan. Dengan demikian psikologi-lintas budaya merupakan

...kajian mengenai persamaan dan perbedaan dalam fungsi individu secara psikologis, dalam berbagai budaya dan kelompok etnik; mengenai hubungan-hubungan di antara ubahan psikologis dan sosiobudaya, ekologis, dan ubahan biologis; serta mengenai perubahan-perubahan yang berlangsung dalam ubahan-ubahan ini (Berry, dkk, 1999: 4-5).

Disiplin akademik ini bertujuan; *Pertama*; sebagai pengujian kerampatan (*generality*) pengetahuan dan teori psikologis, serbagaimana diharapkan oleh beberapa ahli psikologi lintas-budaya, seperti Segal dan kawan-kawan (1990: 37), bahwa mengingat kebudayaan sebagai faktor diterminan perilaku manusia, para psikolog wajib menguji generalitas lintas-budaya dari asas-asas mereka sebelum menetapkan asas-asas itu. Tujuan inilah yang oleh Berry dan Dasen (1974) disebut “*tujuan membawa dan menguji*” (*transport and test*). *Kedua*; adalah menjawab persoalan. Maksudnya dalam penjelajahan terhadap budaya lain, adalah untuk menemukan variasi psikologis yang tidak dijumpai dalam pengalaman budaya yang berbeda-beda. Sedangkan *tujuan ketiga*, adalah berusaha menjalin dan mengintegrasikan hasil-hasil yang diakui dalam sebuah psikologi yang lebih luas setelah tujuan pertama dan kedua tercapai (Berry, Poortinga, Segal, dan Dasen, 1997: 5-7)..

Psikologi Rekayasa (*engineering psychology*), dalam penggunaannya dewasa ini bersifat agak fleksibel dan komprehensif, baik ‘faktor manusiawi’ (*human factors*), ‘rekayasa faktor manusiawi’ (*human factors engineering*), Terutama masalah yang menyangkut “faktor manusiawi” (*human factors*) banyak mendapat perhatian khusus dalam psikologi rekayasa, banyak memanfaatkan ilmu profesi lainnya termasuk anatomi, fisiologi, sosiologi, disain industri dan arsitektur serta macam-macam bidang teknik. Begitu luasnya istilah ‘psikologi rekayasa’ kadangkala digunakan dalam artian yang luas yang cesara praktis mencakup setiap kajian dalam psikologi industri, termasuk *seleksi dan klasifikasi, training, motivasi, metode kerja, disain peralatan, serta lingkungan kerja*. Dan, pemakaian yang lebih umum cakupannya menyangkut tiga hal yang terakhir disebutkan (Anastasi, 1989: 251-252).

Walaupun psikologi industri dan psikologi rekayasa banyak persamaan yang saling kait-mengait, menurut Chapanis dalam *Engineering psychology* (1976), keduanya

dapat dibedakan dengan jelas dari sudut pendekatannya terhadap pekerjaan. Di sini terdapat tiga perbedaan yang nampak. *Pertama*, seorang ahli psikologi industri akan berusaha mencari kesesuaian antara pekerja dengan pekerjaannya (melalui seleksi, klasifikasi, training dan rangsangan/insentif). Sedangkan ahli psikologi rekayasa, ia akan berupaya menyesuaikan pekerjaan dengan orangnya, dengan cara merancang prosedur kerja yang akurat, perlengkapan yang memadai, serta lingkungan kerja yang selaras. *Kedua*, psikologi rekayasa menitik beratkan pendekatan sistem terhadap masalah-masalah dalam pelaksanaan kerja (*performance*). Orientasi sistemnya menyangkut semua bidang dari psikologi terapan. *Ketiga*, dari sisi lain psikologi rekayasa modern telah memperluas lingkungan okupasional dengan menjangkau semua wilayah kehidupan sehari-hari (meningkatkan efektivitas kerja, meminimalisir kelelahan, dan sebagainya).

Sejarah perkembangan 'psikologi rekayasa dapat ditelusuri pada masa awal pertumbuhan psikologi industri, yakni pada awal tahun 1898, di mana Frederick W. Taylor yang terkenal dengan studinya tentang dimensi waktu dan kerja manual. Ia mengadakan observasi yang sistematis mengenai performansi para buruh, dan dari observasinya tersebut berkembang pada perencanaan bentuk skop (Coley, 1923), yang dilakukan observasi sejumlah buruh di pabrik baja. Taylor menyimpulkan bahwa beban optimal skop-nya itu 2,5 pon, dan apabila beban itu ditambah/dikurangi dapat menimbulkan hasil keseluruhan dalam sehari bisa menurun. Kemudian Frank B. Gilbreth, berusaha merancang kursi-kursi untuk macam jenis pekerjaan, yang maksudnya untuk mengurangi ketegangan otot selama bekerja, termasuk cara menempatkan peralatan kerja, perlengkapan (*equipment*) lingkungan kerja.

Setelah Perang Dunia-II, psikologi rekayasa semakin menonjol peranannya, terutama setelah dirasakan meningkatnya kompleksitas mesin-mesin atau peralatan mekanis yang menuntut sejumlah tenaga operator pada tingkat efisiensi yang dipersyaratkan. Jalan keluarnya adalah mendesain kembali perlengkapan, singkatnya diadakan upaya-upaya nyata, seperti; mengadakan perbaikan pada display melalui mana informasi diterima, penyederhanaan sistem kontrol, mesin dibuat lebih sempurna (Anastasi, 1989: 255). Sekarang ini psikologi rekayasa berbeda dengan ketika disiplin ini lahir. Bibliografi tentang bidang ini pada tahun 1970-an sudah mencapai ribuan judul (Allusi & Morgan, 1976). Bahkan di Amerika Serikat penggunaan psikologi rekayasa

menjangkau kepentingan militer dan industri ruang angkasa. Psikologi rekaya modern tidak lagi terpisah-pisah, melainkan lebih sistematis dan komprehensif serta berjangka panjang. Kontribusi lainnya yang berharga adalah beredarnya buku-buku pegangan ringkasan data mengenai kemampuan sensorik, motorik dan kapasitas-kapasitas lainnya yang dimiliki manusia yang relevan untuk dimanfaatkan oleh para ahli teknik dalam mendisain perlengkapan (Anastasi, 1989: 255-256).

Psikologi Lingkungan: Bidang ini lahir pada tahun 1970-an yang perkembangannya begitu pesat sampai sekarang (Craik, 1973; Heimstra & McFarling; 1974; Proshanky, Rivlin & Winkel, 1974). Sebagaimana telah lazim dalam psikologi, istilah 'lingkungan' yang melekat dipertentangkan adalah berkaitan dengan 'keturunan' atau 'hereditas' sebagai sumber perkembangan perilaku dan perubahan-perubahan individual. Dalam hal ini 'lingkungan' berhubungan dengan proses belajar, yang mununjuk pada efek kumulatif dari respons-respons individu terhadap rangsangan lingkungan individu dalam hidupnya. Karena itu, praktik pengasuhan anak, pendidikan di sekolah serta hubungan antar pribadi merupakan bagian-bagian utama dari lingkungan. (Anastasi, 1989: 337). Namun, sebaliknya, bidang psikologi lingkungan, begitu pula halnya bidang interdisipliner dari hubungan tingkah laku-lingkungan tertentu dari 'lingkungan fisik', termasuk lingkungan yang dibuat (*artificial*) maupun yang natural (Wohlwill, 1970),.

Psikologi lingkungan dapat menjangkau berbagai aneka permasalahan. Bidang ini tidak sekedar mengkaji akibat-akibat yang sebelumnya sudah terpikirkan manusia, melainkan juga akibat yang diperhitungkan sebelumnya. Oleh karena itu apabila dirumuskan secara longgar, sebenarnya psikologi lingkungan tumpang-tindih dengan 'psikologi rekayasa' yang lazim serta bidang-bidang dari psikologi konsumen, komunitas dan psikologi klinis. Namun untuk memudahkan pembahasan psikologi lingkungan ini, kita dapat membedakan antara *Pertama*, riset mengenai efek-efek dari faktor-faktor lingkungan terhadap tingkah-laku. *Kedua*; riset mengenai tingkah-laku manusia terhadap lingkungannya. (Anastasi, 1989: 337

Untuk jenis riset pertama, telah dibicarakan dalam psikologi rekayasa. Sedangkan bagian lainnya dapat dikemukakan secara singkat masalah-masalah yang mengacu pada penerangan (iluminasi), kondisi-kondisi atmosferik, keadaan tanpa bobot, dan fenomena

yang berhubungan dengan gravitasi serta stimulasi emosi sensoris (contoh kebisingan) Sebagian besar dari riset bidang tersebut telah dilaksanakan oleh para ahli psikologi rekayasa yang memiliki latar-belakang psikologi eksperimental. Adapun aspek-aspek lain yang belum dibahas dalam psikologi rekayasa tersebut mencakup; (1) iluminasi (pencahayaannya), (2) kondisi-kondisi atmosferik, (3) keadaan tanpa bobot dan gravitasional lainnya; (4) stimulasi sensoris. Sedangkan untuk jenis riset yang kedua tersebut berkenaan dengan hal-hal yang diperbuat manusia, misalnya membuang sampah penyebab bahaya banjir, membuang puntung rokok penyebab kebakaran hutan, dan sebagainya. Tujuan yang praktis adalah bagaimana mengubah tingkah-laku demikian itu menjadi tidak destruktif. Sejauh tujuan dan metodologi dari riset ini memiliki banyak kesamaan dengan tujuan dan metodologi dari psikologi konsumen, maka riset ini akan ditinjau dalam hubungannya dengan kesamaan tersebut (Anastasi, 1989: 338).

Psikologi Konsumen (*consumer psychology*) membahas tingkah laku individu sebagai konsumen. Bidang psikologi ini mulai dengan psikologi periklanan dan penjualan, yang obyeknya adalah komunikasi yang efektif dari pihak pabrik maupun distributor kepada konsumen (Anastasi, 1989: 389). Terutama melalui iklan konsumen memperoleh informasi tentang produk atau jasa yang dapat diperoleh manfaat khusus produk dan jasa tersebut. Kita tahu bahwa periklanan sendiri usianya begitu tua, hampir seusia dengan upaya manusia untuk membuat dokumentasi pelbagai aktivitasnya (Presbey, 1929). Sedangkan untuk psikologi periklanan mulai dilancarkan selama dua dasawarsa yang pertama dari abad ke-20 dengan studi laboratorium di berbagai lokasi.

Kemudian dalam perkembangannya psikologi konsumen mulai berkembang pesat sejak tahun 1960-an. Engel dkk (1973: 622), mengemukakan bahwa antara tahun 1968 dan 1972 terdapat lebih banyak penelitian psikologi konsumen yang dipublikasikan daripada sebelumnya. Dalam *Annual Review of Psychology*, Jacob (1976: 331) memperkirakan bahwa 7.000 sampai 10.000 surat kabar yang memiliki relevansi langsung telah diterbitkan sejak tahun 1967. Kemudian dalam perkembangan psikologi konsumen yang paling menyolok adalah peralihan pusat perhatian dari konsumen sebagai pembeli ke konsumen sebagai konsumen (Jacoby 1976; Perloff, 1968). Peralihan tersebut menurut Anastasi (1989: 390) dinyatakan paling sedikit ada empat cara yang berbeda; yakni meliputi: *Pertama*, pusat perhatian diperluas melampaui kegiatan

pembelian (karena itu tingkah laku konsumen dirumuskan lebih luas mencakup; perolehan, penggunaan, serta disposisi produk, jasa, waktu dan gagasan). *Kedua*, meningkatnya kecenderungan untuk mendekati masalah dari sudut pandang konsumen. *Ketiga*, dalam psikologi konsumen adalah timbulnya pengakuan terhadap konsumen sebagai organisme hidup yang tingkah lakunya berhak memperoleh perhatian ilmiah. *Keempat*, yang merupakan ciri dari karya psikologi konsumen adalah makin meningkatnya perhatian pada masalah-masalah sosial.

Psikologi Industri dan Organisasi (Industrial and Organizational Psychology), merupakan penerapan dari prinsip-prinsip psikologi industri dan perdagangan. Psikologi tersebut didefinisikan menurut kapan dan di mana ia dipraktikkan, bukan menurut pernyataan atau prinsip-prinsip tertentu. Dalam kajian ini terdapat tiga bidang kajian psikologi industri dan organisasi, yakni: *psikologi personalia*, *psikologi industrial/sosial* atau *psikologi industrial/klinis*, dan *psikologi sumber daya manusia* atau *rekayasa manusia* (Landy, 2000: 479).

Untuk *psikologi personalia* menekankan dampak pembuatan keputusan mengenai seleksi personalia, pelatihan, promosi, transfer pekerjaan, cuti, pemutusan hubungan kerja, kompensasi, dan sebagainya (Atkinson, 1996: 23; Landy, 2000: 479). Sedangkan alat yang digunakan dalam psikologi personalia yang paling umum adalah analisis pekerjaan dan tes kemampuan. Analisis pekerjaan berguna untuk memudahkan dalam penentuan tugas-tugas yang paling penting maupun yang paling sering dilaksanakan dalam mengukur keahlian, kecakapan, melalui survey maupun observasi, interviu (Anastasi, 1989: 34; Landy, 2000: 480). Sedangkan tes kemampuan dimaksudkan untuk menjajagi gambaran kekuatan-kekuatan dan kelemahan para calon pegawai guna memenuhi tuntutan pekerjaan. Gambaran ini harus mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan, peralatan-peralatan yang digunakan, kondisi kerja, risiko, dan sifat-sifat khusus lainnya dari pekerjaan yang bersangkutan (Anastasi 1989: 34).

Untuk *psikologi industri/sosial klinis* berurusan dengan penyesuaian timbal-balik antara orang-orang dan lingkungannya. Dalam hal ini setiap pekerja diteliti tentang; kemampuan menyesuaikan diri, motivasi, kepuasan, kinerja, kecenderungan untuk tetap bekerja di perusahaan, tingkat absensi (Landy, 2000: 480). Sementara psikologi industri /klinis berurusan dengan kesejahteraan psikologis para pekerja.

Hal ini berbeda dengan *psikologi sumber daya manusia* atau *rekayasa manusia*, psikologi ini menggunakan asumsi berkebalikan dari psikologi personalia, walaupun masalahnya; yakni bagaimana mencocokkan individu dengan pekerjaannya. Tetapi psikolog sumber daya manusia bahwa orang adalah konstanta atau faktor tetap, sedangkan lingkungan adalah sebagai variabel atau faktor yang berubah. Kemudian para psikolog berupaya mengatur atau merancang lingkungan kerja agar cocok dengan kapasitas dan keterbatasan-keterbatasan manusia, yakni dengan memodifikasi standar operasi peralatan sesuai kapasitas operator. Dalam hal ini kapasitas tersebut bisa sensorik. Seperti; keterampilan dan kecepatan bekerja, kepatan melihat, dsb), maupun kognitif, seperti; kecepatan menguasai tahapan-tahapan produksi, pemberian informasi, dan sebagainya (Landy, 2000: 480).

B. Pendekatan, Metode, Ilmu Bantu, dan Ragam Penelitian Psikologi

Pendekatan dalam ilmu psikologi secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Namun secara rinci Atkinson, Atkinson, dan Hilgard (1996: 7-14) dalam psikologi terbagi atas lima pendekatan, yaitu: (1) *pendekatan neurobiologis*, (2) *pendekatan pendekatan perilaku*, (3) *pendekatan kognitif*, (4) *pendekatan psikolanalitik*, (5) *pendekatan fenomenologis*.

Pertama, pendekatan neurobiologis: Merupakan pendekatan yang kajiannya menitik-beratkan terhadap pembahasan struktur otak manusia. Otak manusia dengan 12 milyar sel saraf dan sejumlah sel penghubung yang hampir tak terbatas, merupakan struktur yang paling rumit di alam ini. Kejadian-kejadian psikologi tergambar dalam kebiasaan yang digerakkan oleh otak dan sistem saraf. Dalam pendekatan ini berusaha menghubungkan perilaku dengan hal-hal yang terjadi dalam tubuh, terutama dalam otak, dan sistem sarafnya. Dengan demikian dalam pendekatan ini menghususkan proses neurobiologi yang mendasari perilaku dan kegiatan mental.

Beberapa penemuan mutakhir telah menunjukkan dengan jelas bahwa ada hubungan yang erat antara aktivitas otak dengan perilaku dan pengalaman. Reaksi emosional, seperti rasa takut dan marah dapat dibangkitkan pada binatang dengan cara memberi rangsangan elektrik yang lemah pada beberapa bagian tertentu otak. Rangsangan pada bagian otak tertentu akan menimbulkan perasaan senang, sakit bahkan

kenangan yang jelas mengenai kejadian masa lampau. Namun karena rumitnya susunan otak, terdapat kesenjangan pengetahuan kita mengenai bagaimana mekanisme saraf itu beroperasi. Itulah sebabnya digunakan juga pendekatan lain untuk menyelidiki fenomena psikologis.

Kedua, pendekatan perilaku: Merupakan pendekatan dengan cara mengamati perilaku manusia dan bukan mengamati kegiatan-kegiatan bagian tubuh dalam manusia. Pendekatan ini mulai diperkenalkan oleh seorang ahli psikologi Amerika John B. Watson pada awal tahun 1900-an, sedangkan sebelumnya psikologi mengandalkan metode introspeksi. Watson berpendapat bahwa introspeksi merupakan pendekatan yang tidak ada gunanya. Alasannya adalah, jika psikologi dikatakan ilmu, maka datanya harus dapat diamati dan terukur. Sedangkan introspeksi, hanya anda sendiri yang mengintrospeksi pengamatan dan perasaan anda, sedangkan orang lain tidak. Watson mempertahankan pendapatnya bahwa hanya dengan mempelajari apa yang dilakukan manusia melalui perilakunya, psikologi menjadi ilmu yang obyektif.

Akhirnya pendekatan “Behaviorisme” yang dianut Watson tersebut turut berperan dalam pengembangan bentuk psikologi. Cabang perkembangannya yaitu psikologi *stimulus-response* (S-R) yang hingga sekarang masih tetap berpengaruh. Kuatnya pengaruh psikologi *stimulus response* (S-R) tersebut tidak lepas dari hasil jerih payah ahli psikologi dari Harvard, B.F. Skinner. Psikologi S-R ini pada hakikatnya mempelajari rangsangan yang menimbulkan respons dalam bentuk perilaku, mempelajari ganjaran dan hukuman yang mempertahankan adanya respon itu, dan mempelajari perubahan perilaku yang ditimbulkan karena adanya perubahan pola ganjaran dan hukuman (Skinner, 1981).

Ketiga, pendekatan kognitif: Pendekatan ini bertolak dari suatu asumsi bahwa sebagai manusia tidak sekedar penerima rangsangan pasif, otak manusia secara aktif mengolah informasi yang diterima dan mengubahnya dalam bentuk serta kategori pengetahuan baru. Itulah kognisi, yang mengacu pada proses mental dari persepsi, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan persoalan, dan merencanakan masa depan.

Psikologi kognitif merupakan studi ilmiah mengenai kognisi. Tujuannya adalah untuk mengadakan eksperimen dan mewujudkan teori yang menerangkan bagaimana proses mental disusun dan berfungsi. Tetapi penjelasannya mengharuskan teori itu

membuat ramalan mengenai setiap kegiatan yang dapat diamati, terutama perilaku. Dengan demikian munculnya pendekatan ini sebenarnya sebagai reaksi atas psikologi S-R yang dinilai terlalu sempit dan hanya berlaku untuk perilaku yang sederhana. Sedangkan kapabilitas manusia itu luas termasuk dapat berpikir, membuat perencanaan, mengambil keputusan, memilih dengan cermat stimulus mana yang membutuhkan perhatian ekstra, dan sebagainya. Psikologi kognitif ini di antara tokohnya adalah Kenneth Craik, seorang ahli psikologi berkebangsaan Inggris.

Keempat, pendekatan psikoanalitik: Pendekatan ini dikembangkan oleh Sigmund Freud ahli psikologi Austria, yang didasarkan atas studi kasus yang luas dari para pasien secara individual, dan bukan secara eksperimen. Dasar pemikiran pendekatan ini bahwa sebagian besar perilaku manusia adalah dari proses yang tidak disadari (*unconscious processes*) Yang dimaksud dengan proses yang tidak disadari adalah pemikiran, rasa takut keinginan-keinginan yang tidak disadari tetapi berpengaruh terhadap perilakunya. Ia percaya bahwa banyak dari impuls pada masa kanak-kanak yang dilarang dan dihukum oleh para orang tua dan masyarakatnya berasal dari dari naluri pembawaan (*innate instinc*). Karena setiap orang lahir dengan membawa berbagai impuls, hal yang menimbulkan pengaruh mendalam yang harus ditangani dengan cara tertentu. Melarang impuls tersebut hanya akan mengakibatkan mereka keluar dari kesadaran dan menggantiannya dengan ketidaksadaran yang tetap berpengaruh terhadap perilaku. Impuls yang tidak disadari ini menurut Freud akan mendapatkan jalan pelampiasannya melalui mimpi, kekeliruan berbicara (latah) cara kebiasaan, dan gejala penyakit neurosis, serta melalui bentuk perilaku yang dapat diterima masyarakat.

Kelima, pendekatan fenomenologi: Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada *pengalaman subjektif* individu. Pendekatan ini menekankan pemahaman kejadian atau fenomena yang dialami individu tanpa adanya beban prakonsepsi atau ide teoretis. Para psikolog fenomenologi percaya bahwa kita dapat belajar lebih banyak mengenai kodrat manusia dengan cara mempelajari bagaimana manusia memandang diri dan dunia mereka daripada kita mengamati tindak-tanduk mereka. Dua orang manusia mungkin bertindak sangat berbeda dalam bereaksi terhadap situasi yang sama; dengan hanya menanyakan bagaimana tafsiran masing-masing tentang keadaan tersebut, kita dapat mengerti sepenuhnya perilaku mereka.

Para ahli psikologi fenomenologi, di pihak lain lebih menitik-beratkan pengertian mengenai kehidupan bagian dalam dan pengertian mengenai pengalaman individu daripada mengembangkan teori atau meramalkan perilaku. Sebagai contoh, mereka lebih berminat terhadap konsep diri seseorang, perasaan harga diri, dan kesadaran akan diri sendiri (*self-awareness*). Sebaliknya pendekatan ini juga menolak pandangan bahwa perilaku dikontrol oleh desakan yang tidak disadari (teori psikoanalitik) atau rangsangan dari luar terutama pandangan behaviorisme. Mereka lebih meyakini pendapat bahwa kita tidak “digerakkan” oleh kekuatan di luar kontrol kita, tetapi kita merupakan “pelaku” yang mengontrol tujuan kita sendiri. Kita adalah membentuk kehidupan kita sendiri karena setiap orang adalah pelaku yang bebas; bebas memilih, bebas menentukan tujuan, bebas bertanggung jawab terhadap pilihan hidup yang kita pilih.

Kemudian jika kita telah dari segi metode-metodenya yang digunakan dalam psikologi, pada mulanya metode klasik psikologi, terbatas pada *metode introspeksi*. Dalam metode ini mengacu kepada observasi dan pencatatan pribadi yang cermat mengenai persepsi dan perasaannya sendiri. Introspeksi dimulai dengan laporan mengenai kesan yang diterima indera sampai timbulnya rangsangan (contoh sinar lampu), kemudian sampai pada penyelidikan yang berlangsung lama mengenai pengalaman emosi. Observasi pribadi yang nampaknya berbeda itu sebetulnya mempunyai persamaan karakteristik unik yang membedakannya dengan observasi dalam bidang ilmu lain. Setiap ilmuwan dapat mencontoh observasi yang dilakukan dalam bidang ilmu alam, sedangkan observasi introspeksi hanya dapat dilaporkan oleh seorang pengamat.

Selanjutnya metode-metode psikologi berkembang dalam *metode eksperimen, observasi (pengamatan), survei, metode tes, dan riwayat kasus*. Untuk metode *eksperimen*; sebenarnya dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar laboratorium. Metode ini lebih banyak digunakan untuk menyelidiki besaran pengaruh dari suatu penelitian yang diujicobakan. Ciri yang menyolok dalam metode ini adalah adanya suatu perlakuan (*treatment*) ataupun manipulasi terhadap suatu yang diteliti, apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok *treatment* (perlakuan) atau tidak jika dibandingkan dengan kelompok kontrol sebagai pengaruh *treatment* tersebut. Jika ya terdapat perbedaan signifikan sebagai pengaruh *treatment* berarti apa yang

dieksperimenkan betul-betul berpengaruh kuat terhadap sesuatu yang diujicobakan, dan begitu sebaliknya.

Metode pengamatan (observasi); adalah metode yang secara langsung mengamati terhadap sesuatu yang diteliti, bisa perilaku binatang maupun manusia. Metode ini dalam psikologi bisa digunakan di dalam maupun di luar laboratorium. Data yang diperoleh mencakup (1) pengamatan perilaku, (2) pencatatan perubahan fisiologis, dan (3) jawaban yang diperoleh untuk setiap pertanyaan yang diajukan mengenai perasaan para subyek sebelum, selama, dan sesudah adanya yang diteliti. Contoh penggunaan metode pengamatan ini dilakukan oleh Masters dan Johnson (1966) yang mengembangkan berbagai teknik yang memungkinkan pengamatan langsung terhadap sesuatu aktivitas tertentu.

Metode survei: Adalah metode yang menggunakan kuesioner atau wawancara dalam ukuran sampel besar untuk mengetahui informasi seperti pendapat politik, pilihan para konsumen, sebab-sebab mereka partisipatif/tidak partisipatif dalam pemilu, kebutuhan perawatan kesehatan, dan sebagainya. *The Gallup Poll* dan *The United States Census*, mungkin merupakan contoh survey yang terkenal. Biasanya metode ini memerlukan validitas yang betul-betul teruji handal melalui uji-coba sebelumnya, termasuk sampel yang dipilih betul-betul mewakili populasinya. Semuanya ini dimaksudkan untuk memberikan hasil yang dapat diinterpretasikan dengan tepat dan benar.

Metode tes: Metode ini digunakan untuk mengukur segala jenis kemampuan seperti; minat, bakat, inteligensi, sikap, maupun tes prestasi belajar. Melalui metode tes ini memungkinkan para ahli psikologi memperoleh sejumlah besar data dari sekelompok orang dengan gangguan yang tak berarti dari pekerjaan hariannya yang rutin dan tanpa peralatan laboratorium yang rumit. Tes pada dasarnya menyajikan situasi yang seragam kepada sekelompok orang yang berbeda aspeknya dalam kaitannya dengan situasi itu (seperti; inteligensi, bakat, minat, sikap, dsb). Analisis terhadap hasil tes kemudian menghubungkan keanekaragaman skor tes dengan keanekaragaman yang terdapat di antara manusia. Selanjutnya penyusunan tes dan pemakaiannya harus benar-benar direncanakan secara seksama dalam menyiapkan butir-butir soal, pembuatan skala, dan menentukan normanya.

Metode riwayat kasus: Metode penelihan riwayat hidup secara ilmiah yang dikenal sebagai riwayat kasus, merupakan sumber data yang penting bagi para ahli psikologi dalam mempelajari setiap individu. Sebagian besar riwayat kasus dipersiapkan dengan cara merekonstruksikan riwayat hidup seseorang yang didasarkan pada kejadian dan catatan yang teringat. Rekonstruksi itu perlu karena seringkali riwayat hidup seseorang diabaikan sampai orang tersebut terlibat dalam kesulitan; pada saat semacam itu, pengetahuan masa lampau individu itu penting untuk memahami perilakunya sekarang. Metode surut ke belakang dapat mengakibatkan adanya distorsi kejadian atau adanya hal yang terlupakan, tetapi ia sering merupakan satu-satunya metode yang tersedia.

Metode riwayat kasus juga dapat didasarkan pada studi longitudinal. Jenis studi ini mengikuti seseorang individu atau kelompok individu dalam jarak waktu yang panjang, dengan melakukan observasi secara berkala. Keunggulan metode ini adalah tidak tergantung pada ingatan individu yang diwawancarai kemudian hari, tetapi benar-benar atas data/catatan yang sudah dilakukan dari waktu ke waktu.

C. Sejarah Perkembangan Psikologi

Dibandingkan dengan disiplin ilmu lain, psikologi termasuk ilmu yang relatif muda. Namun demikian dalam lintasan sejarah psikologi, banyak para ahli telah menulis menyinggung tentang psikologi. Pada zaman Yunani kuno Plato dan Aristoteles dianggap sebagai pelopor besar dalam psikologi. Plato (427-347 s.M.) yang beranggapan jiwa manusia itu terbagi atas dua bagian, yaitu jiwa rohaniah dan jiwa badaniah. Jiwa rohaniah itu abadi tidak pernah mati, sedangkan jiwa badaniah tidak. Selanjutnya tentang jiwa menurut Plato yang terkenal dengan konsepsinya "*Trichotomi*" dalam diri manusia terdapat jiwa yang meliputi pikiran atau kecerdasan (di kepala), kemauan (di dada) dan, nafsu/perasaan (di perut). Sedangkan Aristoteles (384-323 s..M.) lebih dikenal dengan "*Dichotomi*" di mana jiwa meliputi "kecerdasan" dan "kemauan". Begitupun Saint Agustinus yang terpengaruh oleh gagasan Plato dalam bukunya *Confessions*, mengajarkan bahwa manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani menjadi sumber kejahatan, karena itu tubuh sebagai kurungan dari rohani. Sebaliknya rohani itu tidak berzat dan memberi arah pada jasmani dan membentuk jasmani (Said, 1990: 15). Lain

lagi dengan Rene Descartes (1650) yang menandai adanya hubungan antara pikiran dengan badan sebagai satu interaksi yang terungkap dalam semboyannya “*cogito ergo sum*” atau “saya berpikir karena itu saya ada” (Russell, 2002: 740). Namun dari semua ajaran-ajaran kejiwaan masa lalu masih diwarnai oleh pemikiran filsafat yang spekulatif.

Ungkapan bahwa ‘psikologi telah lama ada, tetapi sejarahnya hanya singkat’ adalah ungkapan yang dikemukakan pertama kalinya oleh Herman Ebbinghaus (1850-1909) dengan karyanya *On Memory: An Investigation in Experimental Psychology* (1885), dan sejak itu ucapan tersebut sering dikutip oleh para ahli psikologi. Ebbinghaus adalah seorang psikolog Jerman pertama yang membuat suatu usaha mengkaji asosiasi (*asosianisme*)—teori yang mengemukakan bahwa pikiran tersusun atas beberapa elemen—biasanya mengacu kepada sensasi-sensasi dan ide-ide secara ilmiah yang kemudian aliran ini menjadi kognitivisme hingga saat ini (Boerere, 2000: 269-278; Madsen, 1991: 119-120). Pada dasarnya penelitiannya mencakup memorisasi suku kata yang “tidak masuk akal” (*nonsense syllables*) yang terdiri atas sebuah konsonan, vokal, dan konsonan lain, seperti ‘rip’, ‘sip’, ‘rap’, ‘mum’ dan seterusnya. Ia juga menulis artikel pertama tentang uji-coba intelegensi terhadap anak-anak sekolah dan menemukan sebuah tes penyelesaian kalimat yang menjadi bagian tes Binet-Simon. Selain itu juga mempublikasikan buku-buku teks tentang psikologi sehingga sejak tahun 1885 namanya menjadi makin populer.

Sebelumnya, sebuah usaha studi ilmiah yang sistematis terhadap psikologi telah dibangun sebagaimana yang dilakukan pada cabang ilmu lainnya, dapat dikatakan telah muncul pada pertengahan abad 19. Pada tahun 1875 Wilhelm Wundt (1832-1920) yang berhasil mendemonstrasikan ‘sensasi’ dan ‘persepsi’ di Leipzig, bersamaan waktunya dengan William James, psikolog Amerika Serikat yang mendirikan laboratorium di Harvard. Sehingga tahun itu dikenal sebagai tahun berdirinya psikologi eksperimental (Boeree, 2005: 292; Madsen: 116-117). Kemudian pada tahun 1879 Wundt, menjadikan murid pertama yang lulus sebagai peneliti psikologi sejati — itulah tonggak bersejarah yang lain. Pada tahun 1881 dia membentuk jurnal *Philosophische Studien*. Momentum lainnya pada tahun 1883, dia memulai pelajaran pertama yang berjudul *Psikologi Eksperimental*, sedangkan pada tahun 1894, usahanya diberi

penghargaan dengan membentuk secara resmi sebuah “Institut Psikologi Eksperimental” di Leipzig — merupakan institusi psikologi pertama di dunia (Boeree, 2005: 292).

Selanjutnya untuk pengukuran psikometrik diawali oleh Francis Galton (1822-1911), seorang ahli psikologi Inggris yang memiliki hobi mengukur sesuatu — yang meluas bahkan ke latar belakang wanita yang dia temui dalam perjalanannya ke Afrika dengan menggunakan triangulasi — akhirnya ia membuatnya bisa mengukur tingkat inteligensi. Pada tahun 1869 Galton mempublikasikan “*Hereditary Genius: An Inquiry into its Laws and Consequences*” yang berisikan pemaparan dan pendemonstrasian bahwa anak jenius cenderung menjeniuskan dirinya sendiri. Pada tahun 1874, Galton membukukan *English Men of Science: Their Nature and Nurture*, yang didasarkan pada survey panjangnya kepada ribuan ilmuwan, dan hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kepontensialan inteligensi itu jelas masih merupakan warisan, namun kecerdasan itu harus dipelihara agar tetap mempunyai nutrisi kecerdasan yang penuh. Pada khususnya melalui pendidikan liberal yang diberikan oleh oleh sistem sekolah Skotlandia masih jauh superior daripada sistem sekolah Inggris, yang sebenarnya sangat Galton benci (Boeree, 2005: 284).

Sekali lagi, perkembangan ilmu psikologi menjadi pesat terutama setelah adanya pengaruh psikologi *eksperimental* Wilhelm Wundt pada tahun 1879, ia telah mendirikan laboratoriumnya di Universitas Leipzig Jerman terutama mengenai gejala-gejala psikis yang disadari (indera), seperti; persepsi, reproduksi, ingatan, asosiasi, dan fantasi (Gerungan, 2000: 11). Wundt yang mengembangkan teori “asosiasi” tersebut melalui metode barunya yang eksperimental telah membawa ilmu psikologi lebih dikenal. Ia berpandangan bahwa dalam memahami gejala-gejala kejiwaan manusia, tidak dapat kita pandang proses-proses kejiwaan itu seperti suatu penjumlahan dari unsur-unsurnya, tetapi jiwa itu merupakan suatu kesatuan (keseluruhan) yang melebihi jumlah dari unsur-unsurnya. Namun psikologi Wundt masih bertumpu pada *introspeksi* sebagai metode untuk mengkaji proses mental. Sebetulnya metode tersebut berasal dari filsafat, tetapi Wundt telah menambahkan dimensi baru pada konsep itu, di mana pengamatan diri yang murni saja tidak cukup, karena itu harus ditambah lagi dengan eksperimen. Percobaanya secara sistematis membedakan beberapa dimensi fisik suatu stimulus, dan metode

introspeksi digunakan untuk menentukan bagaimana perubahan fisik ini memodifikasi kesadaran (Atkinson, 1996: 442).

Suatu perkembangan lainnya dalam sejarah psikologi ialah yang dipelopori oleh Sigmund Freud, seorang psikiater Austria (1856-1939) yang secara sistematis dan empiris telah menunjukkan bahwa pergolakan jiwa manusia itu tidak hanya melibatkan kelangsungan *alam sadar* bagi diri orang yang bersangkutan, tetapi juga melibatkan pergolakan yang *tidak sadar (alam bawah sadar)* pada diri orang tersebut. Bahkan menurut Freud, kegiatan tingkah laku manusia sehari-hari malah lebih dominan dipengaruhi oleh *alam bawah sadar* itu. Begitulah jiwa manusia, alam bawah sadar itu ibarat gunung es yang terapung-apung di tengah samudera yang sembilan persepuluh berada di bawah permukaan air dan tak tampak (Gerungan, 2000: 15). Selain itu bagi Freud bahwa tingkah laku manusia yang banyak dipengaruhi oleh alam bawah sadar itu, juga pengaruh masa dini kanak-kanak yang memiliki kekuatan besar terhadap kepribadian dewasa, merupakan inti pandangannya yang sering disebut “Psikoanalitik”. Dengan demikian pandangan psikoanalitik ini sifatnya lebih *pesimistik, mekanistik, deterministik*, dan reduksionistik. Jika ditinjau dari struktur kepribadian manusia, terdiri atas *id, ego*, dan *super ego*. Ketiganya merupakan nama bagi proses-proses psikologis yang bekerja secara terpadu (Corey, 1995: 13-14).

Beberapa murid dan pengikut Freud yang terkenal dan mampu mengembangkan teori Psikoanalitik Kontemporer adalah Erik H. Erikson, Carl Jung, Alfred Adler, Erich Fromm, Karen Horney, dan Harry Stack Sullivan (Hall dan Lindzey, 1994). Kalau Erikson terkenal dengan teori “*Psikologi Ego*” dan teori “*Psiko Sejarah-nya*” yang menulis orang-orang besar “bermasalah”, Jung terkenal dengan teori *alam tak sadar kolektif*, Fromm terkenal dengan psikoanalisis yang “humanis-eksistensial-nya” karena mengembangkan kebutuhan-kebutuhan hidup, seperti keterhubungan, keterberakaran, identitas, maupun orientasi untuk mengembangkan eksistensial “*having*” dan “*being*”-nya. Sedangkan Karen Horney terkenal dengan psikologi wanita atas kurangnya kepercayaan diri dan penekanan yang berlebihan pada hubungan cinta, serta bukan oleh konsep “inferioritas genital” dan perasaan “iri terhadap laki-laki”, beda lagi dengan Adler yang lebih mementingkan alam sadar, bahwa manusia bukan mahluk seksual tetapi sosial, dan manusia itu bergerak bukan oleh masa lalu melainkan oleh cita-citanya masa

depan, serta Adler juga terkenal dengan “teori kompensasinya”. Begitu juga berbeda dengan Sullivan yang lebih terkenal dengan “teori personifikasi-nya” dan “teori perkembangan”.

Pendapat bahwa perilaku (*behavior*) harus merupakan unsur subyek tunggal yang penting dalam psikologi, mulai diungkapkan oleh seorang ahli psikologi Amerika John Broadus Watson (1878-1958). Namun jika ditelusuri asal-muasalnya sebenarnya sejak para ilmuwan Rusia, seperti Ivan M. Sekhenov (1829-1905), Vladimir M. Bekhterev (1857-1927), Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936), Edward Lee Thorndike (1874-1949), selain J.B Watson sampai pada Burrhus Frederic Skinner (1904-1990).

Ivan M. Sekhenov (1829-1905), adalah seorang fisiologis yang pernah belajar di University of Berlin bersama-sama tokoh terkenal lainnya seperti; Muller, DuBois-Reymond, dan Helmholtz. Dia banyak menghabiskan waktunya untuk memadukan asosianisme dengan materialisme, dan dia menyimpulkan bahwa semua perilaku manusia itu pada dasarnya disebabkan oleh stimulasi. Salah satu karyanya adalah *Reflexes of the Brain*, di mana isinya memperkenalkan gagasan bahwa tidak hanya poses pembebasan (*excitatory*) saja yang ada dalam sistem saraf pusat, tetapi juga proses penghalangan (*inhibitory*). (Boeree, 2005: 385-386).

Behavioris lainnya adalah Vladimir M. Bekhterev (1857-1927), yang lulus pada tahun 1878 dari *Military Medical Academy* di St. Petersburg, setahun sebelum Pavlov belajar di tempat yang sama. Bekhterev membentuk laboratorium psikologi pertama di Rusia khususnya di *University of Kazan* tahun 1885. Tahun 1904 ia berhasil mempublikasikan karyanya *Objective Psychology*, yang kemudian dikembangkan dalam tiga volume. (Madsen, 1993: 192-193; Boeree, 2005: 386), yang mendefinisikan bahwa psikologi sebagai kajian objektif tentang berbagai koneksi *stimulus respons*. Selain itu ia menemukan tentang *refleks asosiasi (association reflex)*, yang kemudian oleh Pavlov disebut *refleks yang menjadi kebiasaan*.

Kini saatnya kita membahas peneliti Rusia yang terkenal Ivam Petrovich Pavlov (1849-1936). Pavlov mempelajari ilmu kedokteran pada tahun 1870 di *Military Medical Academy* St. Petersburg. Sebuah prestasi yang patut dibanggakan yaitu pada tahun 1904, dia menerima Hadiah Nobel di bidang fisiologis atas karyanya tentang pencernaan, serta pada tahun 1921, dia menerima *Hero of the Revolution Award* (Penghargaan sebagai

Pahlawan Revolusi) langsung dari tangan Lenin (Boeree, 2005: 387; Madsen, 1991: 196-197).

Pengkondisian Pavlovian atau klasikal, membentuk berbagai gerak refleks: kita mulai dengan stimulus yang belum menjadi kebiasaan (*unconditioned stimulus*) dan respos yang belum menjadi kebiasaan (*unconditioned respons*) — itulah gerak refleks. Selanjutnya kita gabungkan stimulus netral dengan refleks tersebut dengan cara mempresentasikannya bersama stimulus yang belum menjadi kebiasaan. Setelah melakukan sejumlah pengulangan, stimulus netral dengan sendirinya akan memperoleh respos. Dalam titik ini stimulus netral dinamakan kembali menjadi stimulus yang sudah menjadi kebiasaan (*conditioned stimulus*), dan respos itu disebut respos yang sudah menjadi kebiasaan (*conditioned respons*)

Pada penelitiannya, maka pada awalnya sekerat daging membuat seekor anjing mengeluarkan air liur. Pada saat akan memberikan sekerat daging itu, maka dibunyikanlah bel. Kemudian, setelah melakukan beberapa pengulangan, anjing tersebut akan mengeluarkan air liurnya secara spontan, meski tanpa disertai keratan daging.

Sedikit berbeda dengan Edward Lee Thorndike (1874-1949), seorang fungsionalis, namun ia telah membentuk tahapan behaviorisme Rusia dalam versi Amerika. Thorndike mendapat gelar sarjananya dari *Wesleyan University at Connecticut* pada tahun 1895, dan master dari Harvard tahun 1897.

Nama Edward Lee Thorndike akan mudah diingat karena percobannya melalui kucing-kucingnya serta konstruksi “*kotak-kotak puzzle*” yang unik. Dari penelitiannya itu ia menyimpulkan bahwa:

1. *Hukum Latihan*, yang serupa dengan hukum frekuensinya Aristoteles. Jika asosiasi atau koneksi neural lebih sering digunakan, maka koneksinya akan lebih kuat. Sedangkan yang paling kurang penggunaannya, maka paling lemahlah koneksinya. Dua hal inilah yang berturut-turut disebut dengan hukum kegunaan dan ketakbergunaan.
2. *Hukum Efek*, yaitu ketika sebuah asosiasi diikuti dengan “keadaan yang memuaskan”, maka koneksinya menguat. Begitu juga sebaliknya, ketika sebuah asosiasi diikuti dengan keadaan yang memuaskan, maka koneksinya melemah (Boeree, 2005: 390).

John Broadus Watson (1878-1958) seorang ahli psikologi Universitas John Hopkins di Baltimore yang menangkap temuan Pavlov. Ia menyatakan dengan lantang tidak sekedar bahwa teori Pavlov itu benar, tetapi juga bahwa teori itu menjelaskan semua perilaku manusia. Sebab bagi Watson, perilaku manusia itu dapat dianalogikan sebagai mesin rangsangan-tanggapan; kecenderungan manusia seperti cinta dan keinginan, sebenarnya hanya perwujudan tanggapan kelenjar dan otot yang telah dibiasakan di dalam tubuh yang mekanistik. Watson mengeluarkan bualan yang terkenal dan agak menakutkan tentang kekuatan pembiasaan terhadap bayi yang dapat didik sesuai dengan kehendaknya. Selain itu ia melakukan eksperimen terhadap “Albert kecil” yang ditakut-takuti dengan tikus putih dan suara keras dari batang baja yang dipukul palu, agar ia menjadi fobi terhadap pengalamannya yang menyakitkan itu. Di sini Watson menganggap bahwa pembiasaan sebagai kekuatan bermanfaat yang harus digunakan untuk meningkatkan pendidikan. Dengan demikian pula ia orang yang gigih memberikan kesempatan yang sama dalam kehidupan bagi semua orang. Ia mempunyai harapan untuk menghapuskan sama sekali pemikiran bahwa keturunan tertentu lebih unggul daripada yang lain.

Kemudian, Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) yang agak berbeda dengan Watson. Skinner yang lahir di kota kecil Pennsylvania, yakni Susquehanna, dan memperoleh gelar doktor-nya pada tahun 1931. Eksperimennya yang dilakukan terhadap burung merpati dan tikus yang dimasukkan dalam kurungan (sering disebut “kotak Skinner”) didasarkan pada “cara kerja yang menentukan” (*operant conditioning*). Profesor psikologi Universitas Harvard yang menjadi banyak pemberitaan ini menyatakan bahwa setiap makhluk hidup pasti menerima stimulan-stimulan tertentu yang disebut sebagai stimulan “penggugah”. Karena adanya “stimulan penggugah” itulah maka sebagai responnya akan muncul perilaku-perilaku yang diharapkan/dikehendaki sebagai produk “cara kerja yang menentukan”. Dan, menurutnya “perilaku yang diikuti oleh stimulan penggugah, dapat memperbesar kemungkinan dilakukannya lagi perilaku tersebut di masa selanjutnya. Namun sebaliknya perilaku yang tidak lagi diikuti oleh stimulan-stimulan penggugah, akan memperkecil kemungkinan dilakukannya perilaku tersebut di masa selanjutnya”.

Kontribusi eksperimen Skinner tersebut bahwa pembiasaan dapat mengubah setahap demi setahap ke arah kemajuan. Bahkan binatang-pun dapat diajari berperilaku yang sangat rumit asalkan hadiah diberikan sebelum hasil yang sepenuhnya tercapai. Inilah sumbangan terbesar Skinner dalam eksperimen laboratorium psikologinya tentang "perilaku pembiasaan bekerja".

Sebelumnya itu psikologi diartikan sebagai studi mengenai kegiatan mental dan datanya terutama diperoleh melalui observasi diri dalam bentuk *introspeksi* (Atkinson, 1996: 8). Introspeksi mengacu kepada observasi dan pencatatan pribadi yang cermat mengenai persepsi dan perasaan sendiri. Introspeksi dimulai dengan laporan mengenai kesan yang diterima indera sampai timbulnya rangsangan, kemudian sampai pada penyelidikan yang berlangsung lama mengenai pengalaman emosi (misalnya selama terapi psikologi). Sebetulnya observasi diri ini memiliki persamaan dengan observasi pada ilmu lain, namun dalam observasi diri (introspeksi) ini hanya dapat dilaporkan oleh seorang pengamat. Di sinilah Watson maupun Skinner (Atkinson, 1996: 8) berontak, bahwa metode introspeksi tersebut dalam psikologi tidak ada gunanya. Ia menganggap bahwa psikologi adalah sebagai disiplin ilmu, maka datanya harus dapat diamati dan terukur. Oleh karena itu menurutnya hanya dengan metode "behaviorisme" psikologi menjadi ilmu yang obyektif.

Kemudian menurut pandangan *psikologi kognitif*, bahwa kognisi mengacu kepada proses-proses mental dari persepsi, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan persoalan, dan merencanakan masa depan. Sebetulnya jika kita telaah lebih jauh bahwa lahirnya psikologi kognitif tersebut sebagai reaksi terhadap sempitnya pandangan "*Stimulus Response*" (S-R). Pandangan bahwa tindakan manusia semata-mata didasarkan masukan stimulus dan *output* respons, dan hal ini hanya sesuai dengan perilaku yang sederhana. Namun pendekatan ini terlalu banyak mengabaikan bagian manusia yang menarik dan berfungsi lainnya. Seperti halnya; manusia dapat berpikir, merencanakan, mengambil keputusan, serta memilih dengan cermat stimulus mana yang membutuhkan perhatian (Atkinson, 1996: 11). Karena itulah Kenneth Craik selalu berusaha mempertahankan psikologi kognitif yang menganalogikan otak manusia ibarat komputer yang mampu menjiplak dan menyamai kegiatan dari luar. Bahkan menurutnya otak itu sanggup

menyimpulkan kegiatan mana yang terbaik, dan bereaksi terhadap situasi sebelum kejadian itu timbul, serta memanfaatkan pengetahuan mengenai kejadian dalam menangani kejadian mendatang.

Berbeda dengan latar belakang munculnya psikologi *fenomenologis* yang memusatkan perhatiannya pada pengalaman subyektif. Dalam pendekatan ini memahami kejadian atau fenomena yang dialami individu tanpa adanya beban ide teoretis. Sebagai contoh mereka lebih berminat pada konsep diri seseorang, perasaan harga diri, dan kesadaran akan diri sendiri. Jadi dalam pandangan ini menolak pandangan bahwa perilaku dikontrol oleh desakan alam bawah sadar atau teori *psikoanalitik*, maupun pandangan-pandangan yang ditentukan oleh rangsangan dari luar (*behaviorisme*). Mereka lebih meyakini bahwa individu tidak “digerakkan” oleh kekuatan kontrol dari luar, melainkan individu sebagai “pelaku” yang mengontrol tujuannya sendiri. Pandangan fenomenologi ini diilhami oleh para filsuf eksistensial seperti Soren Kierkegaard, Sartre, dan Camus. Karena itu beberapa teori fenomenologi sering juga disebut psikologi *humanistik-eksistensialisme*. Adapun tokoh-tokoh yang berkiprah pada kelompok ini seperti; Abraham Maslow, Kurt Goldstein, maupun, Carl Rogers.

D. Mazhab-mazhab Ilmu Psikologi

Untuk memahami mazhab-mazhab dalam psikologi, Boeree (2005: 289-436) membaginya dalam sembilan mazhab psikologi, yakni psikologi; (1) eksperimental dan fisiologi; (2) psikoanalisis; (3) behaviorisme; (4) gestalt, (5) humanistik-existensialisme-fenomenologis, (6) kognitif

1. Psikologi Ekperimental dan Fisiologi

Istilah ”psikologi eksperimental” menurut Atkinson (1996: 20) sebetulnya sebutan yang keliru karena para ahli psikologi dengan keahlian bidang lain juga melakukan eksperimen. Tetapi kelompok ini biasanya terdiri dari para ahli psikologi yang mempergunakan metode eksperimen untuk mempelajari bagaimana orang bereaksi rangsangan indera, memandang dunia ini, belajar dan mengingat, menjawab secara emosional dan digerakkan untuk bertindak, baik oleh rasa lapar maupun maupun oleh keinginan untuk sukses untuk hidup. Metode eksperimen dalam psikologi mulai

diperkenalkan oleh dua tokoh ahli psikologi ternama Wilhelm Wundt dan William James yang biasanya dianggap sebagai bapak psikologi. Walaupun kedua tokoh ini dilahirkan di tempat yang berjauhan di mana Wundt lahir di Neckerau Baden di Jerman tanggal 16 Agustus 1832, sedangkan James di New York City 11 Januari 1842. Namun anehnya di samping terlahir dalam periode yang berdekatan serta memiliki persamaan pengembangan metodenya di mana keduanya mengklaim telah membentuk laboratorium psikologi pertama pada tahun 1875, dengan memakai nama laboratorium masing-masing menggunakan nama mereka sendiri (Boeree, 2005: 289).

Dalam perkembangannya, para ahli psikologi eksperimental juga menyelidiki binatang. Kadang-kadang mereka mencoba mencari hubungan antara perilaku binatang dengan perilaku manusia, namun juga sering mereka mempelajari binatang untuk membandingkan perilaku berbagai jenis species (psikologi perbandingan). Apapun minat mereka, para ahli psikologi eksperimental memikirkan mengenai perkembangan metode pengukuran serta pengontrolan secara tepat.

Perlu diketahui, bahwa bidang ini juga erat hubungannya dengan biologi serta psikologi fisiologi. Para ahli psikologi fisiologi disebut juga ahli neurapsikologi (Atkinson, 1996: 21). Bidang ini mencoba menemukan hubungan antara proses biologi dengan perilaku. Bagaimana hormon seks mempengaruhi perilaku? Bagian otak yang mana yang mengontrol ucapan? Serta bagaimana pengaruh candu seperti marijuana dan LSD terhadap kepribadian dan daya ingat? Dua bidang penelitian antar disiplin ilmu adalah *nerosains* yang meneliti tentang hubungan antara fungsi otak dengan perilaku, serta *psikofarmakologi* yang meneliti tentang obat-obatan dan perilaku (Atkinson, 1996: 21).

2. Psikologi Psikoanalisis

Salah satu aliran/mazhab utama dalam sejarah psikologi adalah teori psikoanalitik Sigmund Freud. Psikoanalisis adalah sebuah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang manusia, dan metode psikoterapi.

Sumbangan utama yang bersejarah dari teori dan praktik psikoanalisis meliputi:

- (1) Kehidupan mental individu menjadi bisa dipahami, dan pemahaman terhadap sifat manusia bisa diterapkan pada perbedaan penderitaan manusia.
- (2) Tingkah laku diketahui seiring ditentukan oleh faktor-

faktor tak sadar. (3) Perkembangan pada masa dini kanak-kanak memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepribadian di masa dewasa. (4) Teori psikoanalitik menyediakan kerangka kerja yang berharga untuk memahami cara-cara yang digunakan oleh individu dalam mengatasi kecemasan dengan mengandaikan adanya mekanisme-mekanisme yang bekerja untuk menghindari luapan kecemasan. (5) Pendekatan psikoanalitik telah memberikan cara-cara mencari keterangan dari ketaksadaran melalui analisis atas mimpi-mimpi, resistensi-resistensi, dan tranferensi-transferensi (Corey, 1995: 13).

Menurut pandangan psikoanalitik, struktur kepribadian terdiri atas tiga sistem: *id*, *ego*, *superego*. Ketiganya adalah nama bagi proses-proses dan bukan sebagai agen-agen yang terpisah mengoperasikan kepribadian, akan tetapi merupakan fungsi-fungsi kepribadian sebagai keseluruhan. *Id* adalah komponen biologis, tempat bersemayamnya naluri-naluri, buta, menuntut dan mendesak. Seperti kawah yang terus mendidih dan bergolak, tidak bisa mentoleransi tegangan, dan bekerja untuk melepaskan tegangan itu sesegera mungkin, serta didorong oleh kepentingan naluriah atas kesenangan yang bersifat tak sadar. Sedangkan *ego*, memiliki kontak dengan dunia eksternal dari kenyataan. Dia-lah yang merupakan eksekutif dari kepribadian yang memerintah, mengendalikan, mengartur, ibarat polilisi lalu-lintas. Ia mengantarai naluri dengan lengkungan sekitar. *Ego*-lah yang mengendalikan kesadaran dan melaksanakan sensor yang realistik, berpikir logis. Karena itu *ego* adalah tempat bersemayamnya inteligensi dan rasionalitas yang mengawasi impuls-impuls buta dari *id*. Hal ini berbeda dengan *superego* yang merupakan cabang moral atau hukum dari kepribadian yang urusan utamanya adalah apakah tindakan itu baik atau buruk? *Superego* merepresntasikan nilai-nilai yang dijunjung orang tua, masyarakat, yang diajarkan kepada anak. Selain itu *superego* juga berkaitan dengan imbalan-imbalan dan hukuman-hukuman seperti rasa bangga maupun rasa berdosa.

Pandangan Freudian, tentang sifat manusia itu pada dasarnya adalah *pesimistik*, *deterministik*, *mekanistik*, dan *reduksionistik*. Menurut Freud, manusia dideterminasi oleh kekuatan-kekuatan irasional, motivasi-motivasi tak sadar, kebutuhan-kebutuhan dan dorongan biologis-naluriah, serta oleh peristiwa-peristiwa psikoseksual yang terjadi selama lima tahun pertama pada masa kanak-kanak (masa *oral*, *anal*, dan *falik*) . Manusia dipandang sebagai sistem-sistem energi dari *id*, *ego*, dan *superego*, namun karena energi

psikis itu terbatas, maka suatu sistem memegang kendali yang tersedia sambil mengorbankan dua sistem yang lainnya. Dan, tingkah laku dideterminasi oleh energi psikis tersebut. Selain itu tingkah laku manusia juga selalu dideterminasi oleh hasrat-hasrat untuk memperoleh kesenangan, seksual, serta menghindari kesakitan. Oleh karena itu dalam diri manusia sama kuatnya antara naluri-naluri kehidupan atau *eros* dan naluri-naluri kematian atau *death instinct*. Baginya tujuan segenap kehidupan adalah kematian, serta kehidupan tidak lain adalah jalan melingkar ke arah kematian (Fromm, 1974: xv, 7; Corey, 1995: 16).

Sumbangan lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah konsep-konsepnya tentang "kesadaran" dan "ketaksadaran" merupakan kunci utama untuk memahami tingkah laku dan kepribadian. Ketaksadaran tidak bisa dipelajari secara langsung tetapi dapat dipelajari melalui; (1) analisis mimpi-mimpi yang merupakan representasi simbolik dari kebutuhan-kebutuhan, hasrat-hasrat, dan konflik-konflik tak disadari; (2) analisis "latah" atau salah ucap; (3) analisis pasca hipnotik; (4) analisis asosiasi bebas; (5) analisis dari teknik-teknik proyektif, dan sebagainya.

Konsep lain yang perlu diketengahkan adalah tentang "kecemasan". Terdapat tiga bentuk kecemasan yang berfungsi mengingatkan adanya bahaya atau ancaman bagi *ego*. *Pertama kecemasan realistik*; adalah kecemasan ketakutan terhadap bahaya dari dunia eksternal. *Kedua*, kecemasan neurotik; adalah kecemasan/ketakutan terhadap tidak terkendalinya naluri-naluri yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang bisa mendatangkan hukuman bagi dirinya. Sedangkan *ketiga*, kecemasan moral; merupakan keketakutan terhadap hati nuraninya sendiri. Orang yang hati-nuraninya berkembang baik cenderung merasa berdosa apabila dia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kode moral yang dimilikinya (Corey, 1995: 17).

3. Psikologi Behaviorisme

Behaviorisme adalah posisi filosofis yang mengatakan bahwa untuk menjadi ilmu pengetahuan, psikologi harus memfokuskan perhatiannya pada sesuatu yang bisa diteliti — lingkungan dan perilaku — daripada fokus pada apa yang tersedia dalam individu — persepsi-persepsi, pikiran-pikiran, berbagai citra, perasaan-perasaan, sehingga tidak akan pernah bisa menjadi ilmu pengetahuan yang obyektif (Boeree, 2005: 385) Mengalami

kejayaannya pada masa John Broadus Watson (1878-1958), yang mendeklarasikan sebagai pendekatan baru pada tahun 1913 dalam psikologi. Perintisannya jauh telah dilakukan sejak Ivan.M. Sekhenov (1829-1905), Vladimir M.Bekhterev (1857-1927), Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) melalui pengkondisian atau klasikal yang membentuk gerak refleks melalui percobaan seekor anjing; yang dimulai dengan stimulus yang belum menjadi kebiasaan (*unconditioned stimulus*) dan respons yang belum menjadi kebiasaan (*unconditioned response*). Selanjutnya Edward Thorndike (1874-1949) dengan percobaan kucing-kucingnya dengan kotak-kotak *puzzle*-nya dalam beberapa perilaku yang berurutan.

John Broadus Watson, sebagai pendiri mazhab behaviorisme yang secara resminya diakui pada tahun 1950-an itu, melakukan eksperimen yang kontroversial melalui seorang bayi bernama "Albert" yang berusia 9 bulan yang dibiasakan takut dengan tikus putih disertai dengan suara keras yang berasal dari batang baja yang dipukul palu. Rasa ketakutan Albert ternyata merambat ke segala bentuk dan warna serupa dengan tikus putih seperti; kelinci, mantel dari bulu binatang, dan topeng Santa Clause, bahkan kapas. Watson mempublikasikan bukunya "Behaviorism" yang didesain untuk pembaca awam tahun 1925. Buku itu kemudian mengalami revisi tahun 1930. Di situ Watson menolak eksistensi insting manusia, kapasitas atau talenta warisan, dan juga terhadap tempramen. Menurut Watson, psikologi pada dasarnya merupakan stimuli dan respons. Kita mulai dengan refleks dan dengan penggunaan pembiasaan, harus mempelajari respons. Proses otak tidak begitu penting (dia menyebut otak sebagai "kotak misteri"). Emosi pada dasarnya merupakan respons terhadap stimuli. Pikiran adalah pembicaraan yang tidak terungkap, kesadaran itu tidak ada apa-apanya. Behaviorisme radikal ini direfleksikan dalam ungkapan yang terkenal:

Berikan saya selusin bayi sehat, dan dalam keadaan baik, dengan lingkungan yang saya tentukan sendiri untuk mengasuhnya, saya jamin kalau saya mengambil seorang secara acak maka saya akan melatihnya menjadi ahli apapun yang saya mau pilih — dokter, artis, pengacara, pedagang, dan ya, bahkan pengemis dan pencuri, tanpa memandang talenta, kegemaran, kecenderungan, kemampuan, khususnya, dan suku bangsa leluhurnya (Watson, 1930: 65).

Tokoh behavioris lainnya adalah Clark L. Hull (1884-1952), E.dward Chase Tolman (1886-1959), dan Burrhus Frederic Skinner (1904-1990). Clark Leonard Hull

yang lahir dekat Akron New York, setelah menyelesaikan Ph.D-nya, pada tahun 1936 ia mempublikasikan karya agungnya "*Principles of Behavior*" dan "*A Behavior System*". Teori Hull dikarakterisasikan oleh dengan operasionalisasi sangat ketat terhadap berbagai variabel dan sebuah presentasi matematis yang terkenal, yang eksperimennya melalui tikus. Esensi teori Hull bisa diringkas dengan perkataan bahwa respons merupakan sebuah fungsi dari kekuatan kebiasaan kali kekuatan gerakan. Itulah alasannya mengapa teori Hull sering disebut sebagai teori gerakan atau drive theory (Boeree, 2005: 401). Di samping itu Hull juga merupakan seorang behavioris yang paling berpengaruh di era 1940-an dan 1950-an. Muridnya adalah Kenneth W. Spence, yang mempertahankan popularitasnya hingga tahun 1960-an.

E.C. Tolman adalah seorang behavioris-kognitif lahir di Newton Massachuset, memperoleh gelar Ph.D-nya tahun 1915 di Jerman belajar bersama Kurt Koffka. Dia menilai bahwa Watson terlalu jauh

1. Behaviorisme Watson merupakan kajian tentang "kejang" — stimulus-respons merupakan suatu tingkat terlalu *molekular (molecular level)*. Kita seharusnya mempelajari secara keseluruhan, yakni perilaku yang lebih bermakna: *tingkatan molar (molar level)*.
2. Watson melihat secara sederhana sebab dan akibat dalam binatang-binatangnya. Tolman melihat perilaku yang lebih berguna (*purposefull*), perilaku yang lebih berarahkan tujuan.
3. Watson melihat binatang-binatangnya sebagai "mekanisme" bisu. Sedang Tolman melihatnya sebagai pembentukan dan pengujian berbagai hipotesis yang didasarkan pada pengalaman sebelumnya.
4. Watson tidak menggunakannya untuk proses internal, proses yang "mentalistik". Sedang Tolman mendemonstrasikan bahwa tikus-tikusnya mampu melakukan proses-proses kognitif yang beragam (Boeree, 2005: 403-404).

Berbeda dengan B.F. Skinner yang lahir di kota kecil Pennsylvania, yakni Susquehanna. dan memperoleh gelar doktor-nya pada tahun 1931. Eksperimennya yang terkenal melalui burung merpati dan tikus yang dimasukkan dalam kurungan (sering disebut "kotak Skinner) yang dilengkapi dengan palang kecil di salah satu dindingnya. Jika palang ini disentuh, secara otomatis ada biji makanan yang terlontar ke dalam kotak. Profesor psikologi Universitas Harvard yang menjadi banyak pemberitaan ini menyatakan bahwa satu-satunya cara mensejahterakan umat manusia ialah *membiasakan* semua orang untuk bersikap cinta damai dan bersedia bekerjasama. Dengan hadiah yang

yang diberikan secara sistematis, Skinner membiasakan binatang percobaannya, kebanyakan merpati dan tikus untuk melakukan berbagai hal — sepasang merpati belajar bermain semacam pingpong dengan paruhnya. Di sini Skinner menciptakan istilah ”pembiasaan yang bekerja”. Dalam kotak tersebut baik merpati maupun tikus dapat bergerak leluasa, dapat mematak pengungkit atau tombol tekan itu. Makanan hanya akan muncul jika tombol palang kecil itu tersentuh, dan ternyata itu bisa dilakukan oleh tikus maupun merpati. Skinner melangkah lebih maju dengan mengajarkan pola perilaku lain lagi dengan menghubungkan tanggapan yang satu dengan tanggapan berikutnya sampai si burung dapat melakukan permainan rumit seperti pingpong tersebut (Maness, 1987: 43).

Kontribusi eksperimen Skinner yang berharga bahwa pembiasaan dapat maju setapak demi setapak. Binatang-pun dapat diajari berperilaku yang sangat rumit asalkan hadiah diberikan sebelum hasil yang sepenuhnya tercapai. Perilaku yang diinginkan dibagi-bagi menjadi banyak tahap, dan setiap tahap menuju keberhasilan mendapat hadiah. Lambat laun, sementara setiap tahap dirangsang dan diberi hadiah, tahap-tahap yang berdiri sendiri itu menyatu menjadi perilaku yang dikehendaki. Untuk mendidik merpati mendorong bola masuk lubang di sudut kiri depan kotaknya, misalnya, mula-mula ia hadiah dapat diberikan setiap kali si merpati mendorong bola maju. Tetapi hadiah tidak diberikan jika bolanya berguling ke belakang. Sekali merpati itu berhasil menggerakkan bola ke depan secara tetap, hadiah hanya diberikan bila bola bergerak ke depan dengan arah ke kiri. Akhirnya hadiah tetap tidak diberikan sebelum bola yang di dorong merpati itu jatuh ke dalam lubang (Maness, 1987: 43).

Skinner memang cerdas, eksperimennya yang menonjol dalam ”perilaku pembiasaan bekerja” pernah dilakukan secara serius yang mendapat dukungan dari pemerintah dalam Perang Dunia II: ia melatih merpati menjadi semacam pilot kamikaze dalam peluru kendali sederhana. Peluru kendali itu berupa bom besar dengan mekanisme kemudi primitif yang dikendalikan oleh seekor merpati di kerucut hidungnya. Ia melatih merpati untuk mematak titik pusat sebuah gambar kapal musuh yang muncul di layar. Sebuah elektrode pada paruh burung itu menghidupkan aliran elektronik yang dapat digunakan untuk membetulkan arah peluru kendali, dan patukan merpati tetap mengarahkan peluru kendali itu ke semua sasaran. Kendati mungkin aneh, gagasan itu ternyata berjalan, setidaknya-tidaknya di laboratorium.

4. Psikologi Gestalt

Berbeda dengan behaviorisme Watson, bahwa teori "gestalt" menekankan pentingnya proses mental. Dasar dari teori ini ialah bahwa subyek tersebut mereaksi pada keseluruhan kesatuan yang bermakna (Koffka, 1935: 141). Pandangan "gestalt" berasal dari konsep "*gestalt qualitat*" atau *kualitas bentuk* yang diuraikan oleh Christian von Ehrenfels pada tahun 1890. Arti istilah tersebut mengacu kepada kualitas tertentu yang dimiliki suatu soneta atau lukisan yang tidak berupa not, warna atau kata yang terlepas-lepas (Murphy, 1949). Dengan kata lain suatu lagu yang dimainkan dalam kunci nada yang lain (not-not lagu satu-satu yang berbeda) akan dipersepsi sebagai lagu yang sama

Psikologi Gestalt, dimulai dari peristiwa yang kebetulan belaka, ketika Max Wertheimer dalam perjalanan dengan kereta api meninggalkan Frankfurt mengikuti firasat yang tiba-tiba saja. Ia membeli stroboskop mainan. Stroboskop adalah alat yang menampilkan gambar-gambar sedemikian cepatnya sehingga menciptakan ilusi gerakan, di mana alat ini sangat populer sebelum ditemukannya gambar hidup. Segera Wertheimer membatalkan rencana perjalanannya ia kembali ke hotel kemudian ia membawa penelitiannya ke laboratorium (Madsen 1991: 167; Gredler, 1996: 46).

Dalam percobaannya di laboratorium, Wertheimer menemukan bahwa dua penayangan cahaya yang diam dan kadangkala dipersepsi sebagai cahaya bergerak. Dengan kata lain jika cahaya mula-mula ditayangkan melalui suatu celah tegak lurus dan kemudian melalui celah miring ke kanan, cahaya tersebut akan terlihat seperti jatuh dari kedudukan pertama ke kedudukan kedua. Sama halnya eksposur dari dua garis berturut-turut secara cepat, jika ditaruhkan secara seksama, akan terlihat sebagai gerakan. Dari kedua kejadian itu terdapat dua stimulus yang disajikan, tetapi tidak terlihat seperti itu.

Dari eksperimen tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi mengenai keseluruhan (gerak) tidak bisa diperoleh dari unsur-unsur yang khusus secara terpisah-pisah. Dalam arti bahwa "keseluruhan" memiliki sifat kelihatan yang berbeda dengan sifat unsurnya secara terlepas-lepas. Oleh karena itu dalam pandangan Gestalt bahwa analisis yang dilakukan kaum behavioris terhadap unsur yang terlepas-lepas menghasilkan distorsi dari fenomena yang diteliti (Gredler, 1996: 47) .

Terdapat empat hukum yang dikenali Wertheimer (1938), yang mengatur organisasi persepsi orang ketika menghadapi stimulus. *Pertama, proksimitas*; atau berdekatan, mendekati. Contohnya sesuatu benda sering dipersepsi sebagai sesuatu yang berada didekatnya, sehingga dapat dikelompokkan berdasarkan dekatnya. *Kedua, similaritas atau kesamaan*; contohnya, sesuatu benda sering dipersepsi berdasarkan ciri-ciri persamaan yang dimilikinya. *Ketiga, arah terbuka*, contohnya garis yang terputus-putus dipersepsi sebagai lingkaran yang terbuka. *Keempat, simplisitas* (penyederhanaan) contohnya sesuatu garis tertentu lebih suka disederhanakan sebagai bentuk keseluruhan.

Walaupun mulanya psikologi Gestalt berkembang di Jerman atau Eropa, namun akhirnya meluas ke Amerika Serikat sepuluh tahun kemudian setelah kelahirannya. Beberapa tokoh psikologi Gestalt yang mengembangkannya di Amerika tersebut adalah; Max Wertheimer, Kurt Koffka, dan Wolfgang Kohler. Di Amerika psikologi Gestalt walaupun tidak sepesat Behaviorisme, namun cukup mendapat tempat yang terhormat sebagai cikal-bakal psikologi Kognitif. Beberapa tokoh psikologi Gestalt di Amerika contohnya, Kurt Lewin, Kurt Goldstein, Fritz Heider, Mary Henle, Solomon Asch, dan Rudolf Arnheim (Madsen, 1991: 171).

5. Humanistik-Eksistensialisme-Fenomenologis

Mazhab ini di pelopori oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers. Maslow dilahirkan di Brooklyn, New York, tahun 1908, ia menempuh pendidikan keahliannya di Universitas *Wiconsin*, bahkan semua gelar yang diperolehnya diraih dari universitas tersebut, tempat ia meneliti tingkah laku kera. Selama 14 tahun (1937-1951) ia menjadi staf pengajar *Brooklyn College*. Pada tahun 1951, Maslow pergi ke Universitas Brandeis di mana ia tinggal sampai tahun 1969, ia menjadi anggota tetap pada *Laughlin Foundation* di Menlo Park.

Maslow dalam banyak tulisannya khususnya *Motivation and personality* (1954, edisi yang direvisi, 1970), *Toward a psychology of being* (1968a), dan *The farther reaches of human nature* (1971) mendukung segi pandangan dinamik, holistik yang banyak kesamaannya dengan pandangan Goldstein dan Angyal walaupun terdapat pula perbedaannya dengan teman-teman sekerjanya di Universitas Brandeis. Maslow tergolong dalam psikologi humanistik yang luas — yang disebutnya sebagai “mazhab

ketiga” dalam psikologi Amerika, setelah behaviorisme dan psikoanalisis (Hall & Lindzey, 1993b: 106).

Dalam penelitiannya, Maslow yang lebih menekankan pada hasil-hasil penelitian pada orang-orang sehat dan kreatif, tentunya berbeda dengan Goldstein dan Angyal yang meletakkan dasar pandangan mereka pada penelitian tentang orang-orang cedera otak dan gangguan jiwa. Karena itu, Maslow mencela psikologi mengingat “konsepsinya yang pesimistik, negatif, dan terbatas tentang manusia. Ia berpendapat bahwa psikologi lebih banyak memikirkan kelemahan-kelemahan manusia daripada kekuatan-kuatannya; psikologi semata-mata meneliti dosa-dosa dan mengabaikan kebajikan-kebajikannya. Selain itu psikologi telah melihat hidup ini dari segi dari sudut individu yang berusaha mati-matian untuk menghindari perasaan sakit, bukan mengambil langkah-langkah aktif untuk mencapai kesenangan dan kebahagiaan. Hampir tidak tempat kajian pada psikologi saat itu yang berbicara tentang kegirangan, kegembiraan, cinta, dan kesejahteraan yang sama tuntasnya sebagaimana ia berbicara tentang kesengsaraan, konflik, rasa malu dan permusuhan (Hall & Lindzey, 1993b: 107). Maslow yakin bahwa apabila para psikolog hanya mempelajari orang yang lumpuh, kerdil, neurotik, maka mereka hanya menghasilkan suatu psikologi yang lumpuh pula. Di sini Maslow telah berusaha menyajikan sisi lain dari gambar yang lebih terang, lebih baik untuk memberikan suatu potret keseluruhan yang utuh.

Selain itu dalam pernyataan selanjutnya tentang asumsi-asumsi yang diyakininya, Maslow memberikan komentar yang sangat penting yakni:

Natural of mind is not as strong as and as omnipoten as and cannot be wrong like animal insting-insting. Natural of this mind is weakening is, soft, and also refine and easy to defeated by habit, culture pressure, and wrong attitudes to him. Though weaken, but he seldom lose a] people of normal-mungkin nor lose at ill people. Is though disobeied, but he stand at bay on the quiet and always insist on for aktualisasi (Maslow, 1968: 4).

(Kodrat batin tidaklah sekuat dan semahakuasa dan tidak bisa salah seperti insting-insting binatang. Kodrat batin ini adalah lemah, lembut, serta halus dan mudah dikalahkan oleh kebiasaan, tekanan kebudayaan, dan sikap-sikap yang salah terhadapnya. Meskipun lemah, namun ia jarang hilang pada orang normal-mungkin juga tidak hilang pada orang sakit. Meskipun diingkari, namun ia tetap bertahan secara diam-diam dan selalu mendesak untuk aktualisasi).

Dengan demikian menurut Maslow bahwa kodrat manusia itu pada dasarnya adalah baik atau sekurang-kurangnya netral. Kodrat manusia itu tidak jahat, dan hal ini merupakan pandangan baru mengingat banyak teoretikus sebelumnya berpandangan bahwa beberapa insting adalah buruk atau anti sosial yang harus dijinakkan melalui latihan-latihan pengendalian maupun sosialisasi (Hall & Lindzey, 1993b: 109).

Selain itu Maslow juga mengemukakan tentang teori motivasi manusia yang membedakan antara kebutuhan-kebutuhan dasar (*basic needs*) dan metakebutuhan (*metaneeds*). Kebutuhan-kebutuhan dasar meliputi; rasa lapar, kasih sayang (afeksi), rasa aman, harga diri, dan sebagainya. Metakebutuhan-metakebutuhan meliputi keadilan, kebaikan, keindahan, keteraturan, kesatuan dan sebagainya. Jika kebutuhan-kebutuhan dasar merupakan disebabkan oleh kekurangan, sedangkan metakebutuhan-metakebutuhan untuk pertumbuhan.

Untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan yang lebih lengkap dan luas tentang manusia, maka para psikolog harus juga mempelajari orang-orang yang telah merealisasikan potensi-potensi sepenuhnya. Hal inilah yang dilakukan Maslow, ia telah mengadakan penelitian yang intensif terhadap sekelompok orang-orang yang dinilai telah sukses dalam mengaktualisasikan dirinya. Beberapa diantaranya adalah orang-orang yang telah berhasil mengukir sejarah dalam berbagai profesi karena kesuksesannya baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Penelitian terhadap tokoh legendaris yang sudah meninggal tersebut, diantaranya; Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Walt Whitman, Thoreau, dan Beethoven. Sedang penelitian terhadap tokoh-tokoh yang masih hidup, di antaranya; Eleanor Roosevelt, A. Einstein yang diteliti secara klinis untuk menemukan sifat-sifat mana yang membedakan mereka dari orang-orang biasa. Setelah diidentifikasi, ternyata ciri-ciri khas mereka:

1. *Superior perception of reality*
2. *Increased acceptance of self, of others, and of nature*
3. *Increased spontaneity*
4. *Increase in problem solving*
5. *Increased autonomy, and resistance to enculturation*
6. *Increased detachment and desire for privacy*
7. *Greater freshness of appreciation, and richness of emotional reaction*
8. *Higher frequency of peak experiences*
9. *Increased identification with the human species*
10. *Changed (the clinician would say, improved) interpersonal relations*

11. *More democratic character structure*

12. *Greatly changes in the value system* (Maslow, 1968: 26).

Selain itu Maslow juga meneliti apa yang disebut “pengalaman puncak” (*peak experiences*). Bagi orang yang pernah mengalami memiliki pengalaman-pengalaman yang sangat indah dalam kehidupannya, merasa lebih terintegrasi, lebih merasa bersatu dengan dunia, lebih menjadi raja atas diri mereka sendiri, lebih cepat dan mudah mencerap sesuatu dan sebagiannya (Maslow, 1968). Kelihatannya sumbangan yang khas dari Maslow, yakni terletak sikapnya yang kritis terhadap ilmu pengetahuan. Ia berpendapat bahwa ilmu pengetahuan mekanistik klasik, seperti dikemukakan dalam behaviorisme, tidak cocok untuk mempelajari seluruh pribadi anak didik. Ia menganjurkan suatu ilmu pengetahuan humanistik bukan sebagai alternatif, melainkan sebagai pelengkapannya. Ilmu pengetahuan humanistik semacam itu akan akan menggeluti pertanyaan-pertanyaan tentang nilai, individualitas, kesadaran, tujuan, etika, dan “jangkauan-jangkauan yang lebih tinggi dari kodrat manusia” (Hall & Lindzey, 1993b: 111). Di samping itu pula sebagai tambahan dapat dikatakan bahwa teori organismik dengan semua kekurangannya telah berusaha meluruskan kesalahan yang dilakukan Rene Descartes. Teori organismik menegaskan dengan sungguh-sungguh bahwa organisme bukan sistem dwirangkap antara jiwa dan badan diasumsikan masing-masing memiliki motor penggerakannya sendiri, tetapi merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas banyak fungsi bagian-bagian. Karena mensosialisasikan dan memajukan konsepsi pokok ini, segi pandangan organismik patut mendapat penghargaan sebagaimana telah diperolehnya saat sekarang.

Kemudian, Carl Rogers, ia adalah seorang psikolog Amerika yang berpengaruh, yang dilahirkan tahun 1902 di Oak Park. Pada tahun keduanya di *University of Wisconsin*, Rogers telah memutuskan untuk menjadi pendeta yang kemudian ia menuntut ilmu di *Union Theological Seminary*, New York. Pada masa tersebut berkat interaksinya dengan orang banyak membuat ia sadar bahwa ia tidak dapat membatasi dirinya pada bidang agama saja. Ia akhirnya masuk ke *Teacher College* di *Columbia University* sampai lulus pada tahun 1931. Di Columbia ia menjadi banyak dipengaruhi oleh ide-ide John Dewey, Leta Stetter Hollingworth dan William Kilpatrick (Thorne, 1992).

Pertama kali ia bekerja sebagai psikolog di *Community Guidance Clinic* di Rochester, New York. Di sana ia mendapat pengaruh ide-ide revisionis psikoanalisis seperti; Otto Rank dan Jessica Taft. Rank sangat tidak setuju dengan ide ataupun pemikiran Freud tentang “pikiran pengekan diri” (*self-contained mind*) yang dimotivasi oleh dorongan seksual dan agresif bawah sadar. Walaupun ia diasingkan oleh para pengikut Freud yang loyal karena menolak ide bahwa permasalahan *Oedipal* adalah prinsip dasar psikologis, ia adalah teoretikus *hubungan obyek pertama* (Palmer, 2003: 92). Baginya, hubungan primer adalah dengan ibu dan kehidupan emosional individu bersumber dari hubungan ini. Hubungan ini lebih bersifat hubungan kasih sayang (*affection*) daripada pengetahuan intelektual yang memberikan kesempatan untuk mempelajari dan memahami. Oleh karena itu bukan interpretasi otoritarian terapis yang dapat menyembuhkan klien, tetapi karena empatinya. Pemahaman dan penerimaan terapis sangat penting dalam pembentukan harga diri (*self-esteem*). Melalui terapi seperti ini hubungan yang menghambat perkembangan dapat diremobilisasi. Ia menyamakan pertumbuhan dengan perubahan dalam diri.

Walaupun Rogers sangat banyak dipengaruhi Rank, tetapi teorinya tidaklah serumit Rank dalam perubahan diri secara terus menerus yang berkembang dan tumbuh menuju individualitas dalam konteks hubungan penerimaan yang empatik. Perlu diketahui bahwa karir Rank sendiri dan pengusirannya dari komunitas psikoanalitik yang didominasi Freudian direfleksikan dalam penolakan Rogers terhadap psikologi Freudian dan keterbukaannya yang lebih besar pada kerangka interpretatif klien. Hal ini berbeda dengan terapis lainnya yang menganggap bahwa pengungkapan klien (*client-talk*) sebagai alat untuk memunculkan pemahaman terapis, Rogers memahami klien sebagai kunci utama dalam proses terapeutik. Dengan demikian, fungsi seorang terapis adalah lebih mendekati sebagai bidan daripada ilmuwan (Palmer, 2003: 93).

Namun tidak semua karya Rogers bersifat baru. Terdapat juga karya ilmiah yang tradisional, terutama dalam merintis pencatatan dan transkripsi kasus-kasus terapeutik aktual untuk penelitian dan publikasi. Salah satu kontribusi pentingnya adalah pembentukan dasar bagi penelitian empiris yang memungkinkannya meneliti interaksi verbal klien. Kemudian Rogers memperluas idenya tentang terapi individu pada institusi

pendidikan serta organisasi-organisasi lain seperti organisasi bisnis dan ia menerapkan idenya pada konflik antar kelompok.

Selama sepuluh tahun Rogers menggeluti sebagai psikolog di Rochester, setelah itu ia menjadi profesor di Ohio State University pada tahun 1940 dan menetap di sana selama empat tahun sebelum ia diundang ke *University of Chicago*. Ketika di Ohio ia menulis *Counselling and Psychoteraphy*, sebuah buku yang memaparkan pendekatannya pada situasi terapeutik. Dalam buku tersebut ia menempatkan perasaan senang (*feeling over content*) sebagai inti kegiatan terapeutik. Kemudian sikap tanggap dan penerimaan terapis terhadap perasaan itu menjadi komponen utama dalam teorinya. Sedangkan ketika ia di Chicago, Rogers menjadi anggota jurusan psikologi dan mulai bekerja di pusat konseling universitas. Ia menetap di sana dari tahun 1957 dan selama masa itu diterbitkan *Client-Centered Theraphy* yang merupakan yang termasuk banyak dibaca. Buku tersebut menguraikan kondisi-kondisi yang diperlukan dalam hubungan konseling dengan menekankan penghargaan terhadap kemampuan klien untuk memecahkan sendiri masalahnya dalam kerangka empati dan penerimaan yang diberikan konselor. Selanjutnya Rogers pindah ke *University of Wiconsin* di mana ia berharap dapat menerapkan penemuannya pada penderita schizoprenia. Walaupun ia gagal dalam usahanya tersebut, ia juga menulis yang membuatnya ia terkenal dan berpengaruh, yakni *On Becoming a Person*. Pada buku itu mengembangkan lebih lanjut kepercayaannya terhadap sentralitas kreativitas dan pertumbuhan pribadi. Ia menekankan kualitas pengalaman dari kehidupan yang utuh (*being fully alive*), menjadi manusia seutuhnya yang hidup pada saat ini. Rogers memang sangat produktif, tetapi juga sekaligus banyak menimbulkan keguncangan dalam kehidupan akademiknya karena pendapatnya yang berbeda dan bersikeras. Baru ia meninggalkan dunia akademiknya pada tahun 1963 setelah ia memilih bekerja menjadi staf di *Behavioral Science Institute* yang baru di La Jolla, California, dan ia meninggal pada tahun 1987.

Metode Rogers yang memiliki kekhasan yang berpusat pada klien (*client-centered*) itu dan terapinya yang berpusat pada orang (*person-centered theraphy*), segera menjadi terkenal nama metode tersebut. Namun tidak sedikit para ahli lainnya menyebutnya sebagai *Terapi Rogerian* (Palmer, 2003: 94). Model terapi ini merupakan model yang berbeda dengan psikoanalisis maupun behaviorisme. Dalam model

psikoanalisis terdapat dikhotomis peran, dimana klien mempunyai masalah dan terapis mempunyai keahlian untuk mengobatinya. Begitu juga dalam behaviorisme, karena pada prinsipnya menolak relevansi epistemologis pemahaman klien, pencerahan yang mencerminkan pemahaman terapis, serta perubahan akan terjadi dengan memprogramkan perilaku dari luar. Di sini Rogers menolak dan bersikukuh bahwa terapis yang mendengarkan klien memungkinkan klien untuk merefleksikan kembali pemahamannya pada diri sendiri. Dengan cara ini terapis bertindak sebagai cermin yang memungkinkan klien memandang caranya memahami diri sendiri dan kemudian masuk ke dalam penilaian reflektif atas pemahaman diri ini. Dengan demikian pendekatan klinis fenomenologis Rogers menawarkan sebuah paradigma baru, bukan paradigma behavioris maupun psikoanalitis. Di sini klien ataupun individu menempatkan diri atas dorongan bukan bawah sadar, tetapi atas keinginan (*disire*) dan pemahaman diri klien.

Kemudian ide Rogers tentang pendidikan, sesuai dengan sisi yang lebih individualistik dari pendidikan yang progresif serta perkembangan yang sejajar seperti gerakan klarifikasi nilai, pendidikan gaya Summerhill, ruangan kelas terbuka, dan penekanan pada peningkatan harga diri. Semua gerakan ini berkembang dari pertentangan performatif yang dirasakan antara tujuan dan praktik pendidikan. Meskipun tujuan pendidikan adalah melahirkan sosok yang mampu melakukan aktualisasi diri secara bebas, praktik pendidikan justru menegaskan ketergantungan anak didik pada guru dan menempatkan definisi dan evaluasi aktualisasi anak didik di bawah kontrol guru. Oleh sebab itu, guru akan menentukan kapan anak didik telah mengaktualisasikan dirinya. Dengan demikian ide di balik pandangan Rogerian dan bentuk-bentuk-bentuk pedagogi serupa adalah menyelesaikan kontradiksi tersebut dengan menempatkan anak didik di bawah kontrol perkembangan mereka sendiri.

Bentuk pendidikan semacam ini di samping membawa harapan baru, tidak lepas dari sasaran kritik yang semakin meningkat baik dari aliran pendidikan konservatif, yang memandangnya terlalu terpusat pada anak, maupun dari aliran pendidikan radikal yang memandangnya terlalu individualistis dan melupakan penindasan struktural. Mengingat Rogers lebih terkait dengan psikologi dan terapi daripada pembelajaran di kelas, dan ide-ide sebelumnya jarang diserang oleh kritisi pendidikan. Namun, serangan terhadap klarifikasi nilai dan kritik yang berkenaan dengan harga diri, pada akhirnya adalah kritik

terhadap metode Rogerian (Hirs, 1996: 1003). Ironisnya kritik pendidikan yang sering berasal dari kritik konservatif terhadap pendidikan progresif sama dengan kritik terhadap proses terapeutis yang bersumber dari kritik Marxis, seperti Christopher Lasch (1997). Keduanya menolak ide bahwa terapis atau guru hanya berperan sebagai reseptor pasif untuk pemahaman dan nilai anak. Kelompok konservatif menegaskan bahwa benar dan salah, baik dan jahat, memiliki status obyektif yang melampaui pemahaman anak dan bahwa terapis serta guru memiliki tanggung jawab untuk mendukung yang benar dan yang baik. Kelompok kiri khawatir bahwa fokus yang tertutup terhadap individu akan memperkecil kesempatan untuk tindakan yang lebih kolektif

Kritik-kritik tersebut jelas bermanfaat, walaupun tidak sepenuhnya benar. Kebermanfaatan kritik tersebut mengingatkan klien maupun murid tidak mempunyai seluruh sumber daya (informasi, keterampilan, pemahaman konsekuensial, pandangan kedepan, kesadaran historis, kerangka alternatif, dan lain-lain) untuk sampai pada resolusi yang memadai bagi masalah moral ataupun pribadi (Palmer, 2003: 96). Bukankah individu itu sendiri tidak cukup ketika sekumpulan kepentingan kolektif perlu diungkapkan. Terapis maupun pendidik tidak hanya memantulkan kembali ungkapan-ungkapan klien, sebagaimana dilakukan burung beo yang sangat pintar. Terapis memilih ungkapan-ungkapan mana yang akan dipantulkan, mengubah nada suara (dari intonasi seru sampai tanya), memberikan konteks tambahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan, dan seterusnya.

Begitu juga dengan guru, yang terlibat dalam klarifikasi nilai. Guru menyampaikan sebagian nilai lebih banyak daripada nilai lainnya dan mengajukan sebagian pertanyaan yang lebih sulit daripada pertanyaan lainnya. Kemudian klarifikasi nilai berlangsung dalam suatu lingkungan di mana nilai, yang baik maupun yang buruk direfleksikan melalui norma dan praktik guru, pengelola, dan anak didik yang dilembagakan. Namun perlu diakui bahwa salah satu sudut pandang yang lebih simpatik terhadap teori Rogerian, ia berhasil mengetahui bahwa kesabaran guru atau terapis membutuhkan kecenderungan etis yang sangat kuat dalam membantu subyek mengembangkan keterampilannya untuk berefleksi dan merevisi nilai-nilai yang dimilikinya. Para profesional yang kurang disiplin atau yang bekerja dalam konteks lain mungkin menentukan nilai mereka sendiri dalam situasi tersebut. Kritik yang lebih

simpatik mungkin juga memahami adanya perbedaan antara kepercayaan diri berlebihan (*over-confidence*) dengan harga diri. Kepercayaan diri berlebihan membuat subyek lebih-lebihkan keterampilannya dalam menyelesaikan masalah. Sementara harga diri memungkinkan subyek mengembangkan rasa percaya diri yang diperlukan untuk mempelajari keterampilan yang akan dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Para pengkritik sering mencampuradukan keduanya (Hirs, 1996: 104).

6. Psikologi Kognitif

”Kognisi” merupakan suatu konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan. Termasuk di dalamnya ialah mengamati, melihat, menduga, dan menilai (Chaplin, 1999: 90). Istilah tersebut merujuk kepada bentuk-bentuk pemikiran abstrak serta pemecahan masalah yang didasarkan pada manipulasi simbol-simbol linguistik (proposisi) atau simbol-simbol kebendaan (citra). Sedangkan istilah ’psikologi kognitif’ mengacu pada upaya pada pemahaman berbagai bentuk instrumen observasi empirik sistematis manusia yang selanjutnya dikonstruksikan menjadi serangkaian teori (Richardson, 2000: 127). Sebagai cikal-bakalnya adalah hasil riset yang dilakukan pada tahun 1950-an oleh Donald Broadbent, Jerome Bruner, dan George Miller (Gardner, 1985), meskipun masyarakat luas baru mengetahui setelah terbitnya karya *Ulric Neisser Cognitive Psychology* (1967). Selanjutnya perkembangan psikologi kognitif makin pesat sebagai bukti munculnya karya Jean Piaget, David Ausubel, Allan Newel, dan Herbert Simon. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya psikologi kognitif tersebut turut memicu perkembangan neuropsikologi (Richardson, 2000: 129).

Kelahiran psikologi kognitif tersebut setidaknya dipengaruhi oleh dua tradisi pemikiran. *Pertama*, psikologi kognitif sebagai perkembangan alamiah dari apa yang disebut sebagai psikologi eksperimental, yang selanjutnya merangkum metodologi perilaku yang mendominasi riset psikologi pada abad ke-20. Pendekatan ini mendorong dikembangkannya riset kognitif yang memadukan observasi lapangan dan penelitian laboratorium dalam pelaksanaan analisis konseptual. *Kedua*, psikologi kognitif berkembang setelah Perang Dunia II, yang pada awalnya dimaksudkan untuk mencari pemecahan masalah di seputar interaksi antara manusia dan mesin (Richardson, 2000: 128).

Perkembangan komputer digital telah pula dimanfaatkan untuk menyusun teori mengenai kognisi manusia. Bahkan, struktur dan fungsi komputer tersebut telah dimanfaatkan sebagai metafora. Ini bisa terlihat dari karya pelopor dari Miller, dalam *Plans and the Structure of Human Behavior* (1960). Tujuan dari riset ini adalah menghasilkan kerangka kerja umum yang dapat memberikan manfaat langsung dalam desain dan konstruksi yang mungkin justru kurang cocok kalau diupayakan melalui evaluasi eksperimental (Reason, 1987). Memang tidak mudah bahkan kompleks untuk meneliti kognisi manusia itu. Namun Eysenck (1984) mengidentifikasi tiga jenis pilihan alternatif, yakni; *riset dasar* atau *riset terapan*, *riset dengan fokus pada masalah-masalah umum maupun khusus*, dan *pencakupan atau penyisihan aspek motivasional dan emosional dari subyek yang menjadi domain analisis*. Eysenck melihat bahwa penekanan pada ”riset dasar yang menyoroiti masalah-masalah khusus, dengan menyisihkan aspek emosional dan multifasional”, perlu dilakukan khususnya dalam psikologi kongnitif, walaupun dia sendiri mengakui bahwa faktor-faktor emosional dan multifasional adalah penting.

Psikologi kognitif yang menekankan pada metode eksperimen laboratorium tersebut menuai banyak kritik. Sebagai contoh kritik yang dilancarkan Yulle (1896) mengemukakan bahwa riset laboratorium tidak bisa diandalkan untuk mengungkap hal-hal penting mengenai fungsi-fungsi dasar dalam proses kognitif dasar. Namun ironisnya kritik itu dilontarkan berdasarkan eksperimennya sendiri yang juga dilakukan di laboratorium. Kemudian kritik serupa juga dilontarkan Rowan (1981) mengatakan bahwa riset eksperimental laboratorium membesar-besarkan berbagai bentuk alienasi. Singkatnya kegunaan dan kredibilitas riset laboratorium sangat diragukan. Kritik-kritik tersebut memang tidak bisa diabaikan, termasuk kritik-kritik yang mempertanyakan kegunaan dan keberadaan psikologi kognitif itu sendiri. Hanya saja kritik-kritik terhadap validitas riset laboratorium sejauh ini belum ada alternatif yang lebih baik, dan kritik-kritik yang dilontarkan itu tidak memecahkan masalah serta tidak membuahkan hasil yang lebih baik. Namun yang jelas berkembangnya riset daya ingat atau memori manusia (Gruneberg, 1988) dewasa ini, membuat para ahli psikologi kognitif sepakat bahwa akan perlunya perhatian meningkatkan daya aplikasi riset, baik secara potensial maupun aktual

demikian mendorong pengembangan dan penyempurnaan teori serta metode riset psikologi kognitif.

E. Konsep-konsep Psikologi

Konsep-konsep yang dikembangkan dalam ilmu psikologi, seperti: (1) *motivasi*, (2) *konsep diri*, (3) *sikap*, (4) *persepsi*, (5) *frustrasi*, (6) *sugesti*, (7) *prestasi*, (8) *crowding* (*kerumunan masa*), (9) *imitasi*, (10) *kesadaran*, (11) *fantasi*, (12) *personalitas*, (13) *pikiran*, (14) *insting* atau *naluri*, (15) *mimpi*.

1. Motivasi

”Motivasi” adalah sesuatu keadaan dan ketegangan individu yang membangkitkan dan memelihara serta mengarahkan tingkah-laku yang mendorong (*drive*) menuju pada suatu tujuan (*goal*) untuk mencapai suatu kebutuhan (*need*) (Chaplin, 1999: 310; Thoha, 1993: 180-181). Peranan motivasi dalam kehidupan manusia adalah sangat penting, bahkan menurut McClelland (1953; 1961), seseorang dianggap mempunyai motivasi untuk berprestasi, jika ia mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu karya yang berprestasi lebih baik dari prestasi karya orang lain.

Jika pada umumnya psikologi banyak bertanya ”bagaimana” seperti; ”*bagaimana anda dapat mempelajari kebiasaan itu?* Maka dalam ”motivasi” anda akan menjawab pertanyaan; ”*mengapa*”. Contohnya; ”*mengapa anda melakukan tindakan itu?* Dalam menjawab pertanyaan ”*mengapa*” tersebut, kita dapat mengemukakan jawaban atas dasar beberapa pendekatan (Apter, 2000: 688-689). *Pertama*, pendekatan ”hedonisme”, di mana orang akan berperilaku memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan penderitaan, karena individu pada hakikatnya makhluk yang rasional. *Kedua*, pendekatan psikoanalitis, yang menempatkan manusia tidak selalu rasional. Perilakunya ditentukan oleh pergulatan antara dorongan-dorongan bawah sadar yang kuat terutama *id* yang bekerja atas *dasar nafsu dan biologis*.

Ketiga, pendekatan insting, di mana dalam pendekatan ini McDougal (1908) juga manusia sebagai makhluk non rasional dan menunjukkan penerusan antara motivasi hewani dan manusiawi. *Keempat*, pendekatan eksperimental dengan mengedepankan *drive* (dorongan). Konsep ini diperkenalkan oleh Woodworth (1918) untuk

menggambarkan kekuatan tenaga internal yang membuat organisme melakukan suatu tindakan. Kelima, pendekatan teori rangsangan optimal (*optimal arousal theory*) yang diperkenalkan oleh Hebb (1955), di mana organisme berusaha mencapai, memelihara, rangsangan yang berskala menengah pada dimensi rangsangan. Keenam, pendekatan aktualisasi diri yang diperkenalkan oleh Maslow (1954) di mana manusia selalu memiliki kebutuhan mendasar untuk berkembang secara psikologis menjadi individu yang sepenuhnya memiliki potensi-potensi positif untuk diaktualisasikan (Apter, 2000: 687).

2. Konsep diri

"Konsep diri" merupakan penilaian tentang dirinya oleh orang lain yang menyangkut aspek *physical, perceptual, attitudinal* (fisik, persepsi, sikap). Konsep diri juga merupakan penilaian tentang dirinya yang sering diibaratkan sama dengan/serupa dengan hasil penilaian orang lain. Dalam kaitannya dengan penilaian tersebut, Cooley mengeluarkan teori tentang *Looking Glass Self*. Artinya setiap hubungan sosial di mana seseorang itu terlibat merupakan suatu cerminan diri yang disatukan dalam identitas orang itu sendiri (Johnson, 1986: 28)..

Dengan demikian "konsep diri" merupakan sebuah produk kekuatan dan sosial yang merupakan agen penciptaan diri. Bersama dengan kapasitas untuk refleksi diri — yang sudah dibahas sebelumnya — aspek keagenan dari "konsep diri" terlihat jelas pada pembahasan mengenai motivasi diri (yaitu konsep diri sebagai sumber motivasi). Menurut Gecas (2000: 955) ada tiga motivasi diri yang menonjol dalam literatur psikologi sosial, yaitu; (1) motivasi penguatan diri (*self-enhancement*) atau motivasi harga diri (*self-esteem motive*); (2) motivasi kemampuan diri (*self-efficacy motive*); dan (3) motivasi konsistensi diri (*self-consistency motive*).

Jika motivasi penguatan diri (*self-enhancement*) atau motivasi harga diri (*self-esteem motive*) ini mengacu kepada motivasi seorang individu untuk mempertahankan atau menguatkan harga diri mereka., yang bisa dilakukan kecenderungan orang dalam mendistorsi kenyataan agar tetap positif. Beda dengan motivasi kemampuan diri (*self-efficacy motive*), yang mengacu kepada pentingnya menghayati (*experiencing*) diri sebagai agen sebab-akibat; yaitu motivasi untuk menerima dan menghayati diri sebagai seseorang yang mampu, kompeten, dan tidak bisa lepas dari konsekuensi-

konsekuensinya, bisa positif (memberi spirit) maupun negatif (alienasi, dan fatum). Sedangkan untuk motivasi konsistensi diri (*self-consistency motive*), ini lebih merupakan motivasi diri yang terlemah dari tiga motivasi diri walaupun jelas yang ketiga ini juga banyak pendukungnya. Konsep diri ini menyatakan bahwa konsep diri sebagai organisasi pengetahuan atau generalisasi kognitif yang memberi penekanan lebih besar pada motivasi konsistensi diri (Gecas, 2000: 955).

3. Sikap

Konsep 'sikap' merujuk pada masalah yang lebih banyak bersifat evaluatif afektif terhadap suatu kecenderungan atas reaksi yang dipilihnya. 'Sikap' juga menunjukkan penilaian kita apakah itu bersifat positif ataupun negatif terhadap bermacam-macam entitas, misalnya individu-individu, kelompok-kelompok, obyek-obyek, tindakan-tindakan, dan lembaga-lembaga (Manis, 2000: 49). Dengan demikian sikap sebagai tendensi untuk bereaksi secara menyenangkan ataupun tidak menyenangkan terhadap sekelompok stimuli yang ditunjuk, seperti misalnya suatu kelompok etnis atau komunitas, adat-istiadat atau lembaga. Jelas bahwa ketika dirumuskan, sikap tidak bisa diamati secara langsung tetapi harus disimpulkan dari perilaku yang jelas, baik verbal maupun nonverbal. Dalam istilah yang lebih obyektif, konsep sikap mungkin dikatakan berkonotasi konsistensi respons dalam kaitannya dengan kategori stimuli. Namun dalam praktiknya, konsep 'sikap' kerap kali tidak terasosiasikan dengan stimuli sosial dan dengan respons bernada emosional. Ini sering kali mencakup penilaian atas nilai (Anastasi dan Urbina, 1998: 42). Sikap pada galibnya diukur lewat prosedur tanya-jawab langsung ataupun tidak langsung dengan responden yang diminta untuk menunjukkan reaksi evaluatif mereka terhadap sesuatu atas perilaku seseorang.

Pendapat seseorang maupun kelompok kadang-kadang dibedakan dari sikap dari sikap tetapi pembedaan yang diajukan tidak konsisten dan juga tidak dapat dipertahankan secara argumentatif. Lebih sering kedua bentuk itu dapat digunakan secara timbal-balik dan kedua bentuk tersebut akan digunakan dengan cara tersebut dalam pembahasan di sini. Walaupun, dalam kaitannya dengan metodologi penaksiran, survey opini secara tradisional dibedakan dari sekala sikap (Anastasi dan Urbina, 1998: 42). Dalam survey pendapat (*opinion survey*) secara khas menaruh perhatian pada jawaban

terhadap pertanyaan-pertanyaan khusus yang tidak perlu dikaitkan dengan. Jawaban-jawaban tiap pertanyaan tersebut secara terpisah ditabulasikan untuk mengidentifikasi sumber-sumber kepuasan dan ketidakpuasan kelompok yang diteliti (Fink, 1995). Hal ini berbeda dengan skala-skala sikap; yang menghasilkan skor total yang menunjukkan arah dan intensitas sikap individu terhadap stimuli. Dalam penyusunan skala sikap (*attide scale*), pertanyaan-pertanyaan yang berbeda dirancang untuk mengukur suatu sikap tunggal atau suatu variabel unidimensional, dan prosedur-prosedur obyektif ditempuh untuk mendekati sasaran tersebut (Anastasi dan Urbina, 1998: 42).

Terdapat banyak ragam tentang skala sikap utama, seperti; Mueller dalam *Measuring Social Attitudes: A Handbook for Researchers and Practitioners* (1986), Jones dan Koehly dalam *Multidimensional Scaling* (1993), Ostrom, Bond, Krosnick dan Sedikides dalam *Attitudes Scales: How We Measure the Unmeasurable* (1994), dan sebagainya. Namun dari sekian banyak ragam skala sikap tersebut jenis skala sikap Thurstone (1929), Guttman (1947), dan Likert (1932). Lebih mudah dikenal. Bahkan khusus di Indonesia, jenis skala sikap Likert demikian populer dalam evaluasi pembelajaran bidang-bidang studi tertentu. Tipe skala ini dimulai dengan serangkaian pertanyaan, yang masing-masing mengungkapkan sikap yang jelas baik atau kurang baik. Di mana butir-butir soal diseleksi atas dasar respons orang yang dalam proses penyusunan tes, akan mengerjakan soal tersebut. Dasar utama seleksi butir soal adalah konsistensi internal, meskipun kriteria eksternal juga digunakan bila memungkinkan. Respons dalam skala sikap Likert, biasanya diungkapkan dalam kaitan lima opsi berikut: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Tahu (TT), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Kemudian untuk menentukan skor skala ini, pilihan-pilihan respons diberi skor 5,4,3,2,1 apabila tendensi jawaban ke arah positif, dan begitu sebaliknya. Jumlah kredit butir soal menggambarkan skor total individu yang harus diinterpretasikan dalam kaitan dengan norma yang ditentukan secara empiris (Anastasi dan Urbina, 1998: 43).

4. Persepsi

Istilah 'persepsi' dalam *Kamus Lengkap Psikologi* karya Chaplin (1999: 358), mempunyai arti;

(1) proses mengetahui atau mengenali obyek dan kejadian obyektif dengan bantuan indera; (2) kesadaran dari proses organis; (3) satu kelompok penginderaan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman di masa lalu; (4) variabel yang menghalangi atau ikut campur tangan, berasal dari kemampuan organisme untuk melakukan pembedaan di anatar perangsang-perangsang; (5) kesadaran intuitif mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa persepsi itu mengacu pada mekanisme yang menjadi alat kita menyadari dan memproses informasi tentang stimuli ataupun dunia eksternal baik itu yang menyangkut kualitas kognitif maupun afektif. Nilai penting teoretis dari persepsi berasal dari sudut pandang empiris dalam filsafat yang berusaha menjaga pengetahuan dan pemahaman yang diperantarai oleh kemampuan indera kita. Dalam hal ini keterbatasan sistem sensorik, ilusi, dan distorsi akibat pengalaman dengan faktor-faktor motivasional memainkan suatu peran sangat penting, karena menentukan isi pikiran. Keunggulan dari pandangan empiris adalah bertanggung jawab terhadap penekanan atas kajian terhadap persepsi selama sejarah awal psikologi eksperimental (Leibowitz, 2000: 961).

Di atas telah dikemukakan bahwa pengetahuan dan pemahaman diperantarai oleh indera kita. Jika Aristoteles mengklasifikasi indera kita menjadi lima (*panca*) kategori, yaitu; penglihatan (*vision*), pendengaran (*audition*) penciuman (*olfaction*), perasa (*gustation*), dan perabaan (*groping*). Adalah biasa pada saat ini untuk membagi lebih jauh perabaan menjadi kategori yang terpisah yaitu sakit, sentuhan, kehangatan, dingin, dan sebagainya. Selain itu ada dua indera yang biasanya tidak kita sadari, yaitu *kinestesis*, indera tentang posisi tungkai kita, dan indera *vestibular*, yang memberikan informasi tentang gerakan dan posisi kepala (Leibowitz, 2000: 960).

Informasi dari indera-indera inilah digabungkan dengan pengalaman masa lalu, baik disadari atau tidak. Kemudian informasi-informasi tersebut membentuk kesadaran kita mengenai dunia luar dan membimbing motorik respons kita. Untuk sebagian besar bagian, berbagai peran persepsi ini diterima secara akurat, tetapi ada pula contoh-contoh yang menunjukkan persepsi ini melakukan kesalahan. Persepsi yang tidak tepat, mengacu pada ilusi, yang mungkin muncul ketika mekanisme normal diaktifkan secara tidak benar atau tidak tepat. Ketika melihat foto atau gambar dua dimensi, distorsi ukuran, bentuk,

dan arah mungkin terjadi karena penerapan yang salah dari sensorik dan mekanisme perseptual yang biasanya hanya untuk visi tiga dimensi. Inilah kekeliruan yang disebabkan oleh ilusi, suatu kekeliruan yang disebabkan oleh kesalahan pengamatan yang tidak sesuai dengan penginderaan. Tapi ilusi juga beda dengan halusinasi, yang mengacu kepada persepsi yang tidak berdasarkan pada dunia luar yang akurat. Sedangkan halusinasi biasanya terkait dengan psikopatologi, narkotika, atau patologi sistem saraf (Leibowitz, 2000: 961).

5. Frustrasi

Konsep 'frustrasi' setidaknya menunjuk pada dua pengertian. *Pertama*, 'frustrasi' merujuk pada 'terhalangnya tercapainya tujuan yang diharapkan pada saat tertentu dalam rangkaian perilaku. Definisi ini dianut oleh Dollard, Doob, Miller, Mowrer, dan Sears dalam karyanya *Frustration and Aggression* (1939: 7). Jadi 'frustrasi' dianggap sebagai *pembatas eksternal* yang menyebabkan seseorang tidak dapat memperoleh kesenangan yang diharapkannya. Pengertian *kedua*, 'frustrasi' sebagai reaksi emosional internal yang disebabkan oleh suatu penghalang. Definisi kedua tersebut dianut oleh Leonard Berkowitz dalam *Aggression: its causes, consequences and control* (1995: 42). Dari dua definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa 'frustrasi' merupakan suatu reaksi emosional yang disebabkan oleh gagal/terhalangnya pencapaian tujuan yang diharapkan.

Beberapa peneliti psikologi sosial, kajian tentang frustrasi banyak dihubungkan dengan agresi dan kekerasan. Dollard dkk (1939) frustrasi menjadi predisposisi terjadinya agresi, karena pengalaman frustrasi mengaktifkan untuk bertindak agresif terhadap sumber frustrasi. Tetapi tidak semua frustrasi menimbulkan respons agresif. Individu yang frustrasi mungkin akan menarik diri dari situasi itu atau menjadi depresi. Selain itu tidak semua tindakan agresif merupakan hasil frustrasi yang dialami sebelumnya. Sebab tindakan agresi instrumental yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu tidak harus disertai frustrasi yang dialami sebelumnya. Jadi pendapat awal yang mengenai hubungan determinisme antara frustrasi dan agresi segera diubah oleh menjadi sebuah versi probabilitas oleh Miller (1941: 38), walaupun dia sendiri termasuk pencetus pendapat awal tersebut. Ia menyatakan bahwa "frustrasi menyebabkan sejumlah respons yang berbeda. Salah satu di antaranya adalah bentuk agresi tertentu" Dalam pandangan yang

direvisi tersebut agresi bukan satu-sastunya, tetapi merupakan salah satu alternatif respons terhadap frustrasi. Sejauh tindakan agresif mengurangi kekuatan dorongan yang mendasarinya, tindak itu akan bersifat menguatkan diri: kemungkinan respons agresif akan timbul mengikuti frustrasi yang dialami sebelumnya (Krahe, 2005: 56).

Jika demikian, lalu timbul pertanyaan; frustrasi yang bagaimana yang menimbulkan agresi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut Berkowitz (1998:47) mengemukakan bahwa hanya terdapat beberapa jenis frustrasi yang menyebabkan kecenderungan agresif, terutama jika rintangan itu tidak adil — bersifat arbitrer atau ilegal — atau sifatnya pribadi. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Nicholas Pastore (1952) bahwa orang akan lebih marah jika rintangan tercapainya tujuan bersifat tidak adil, dibanding jika hal itu sesuai aturan sosial. Sebagai contoh beberapa anggota kesebelasan dan *supporter* Itali dalam kejuaraan sepak bola dunia, merasa lebih marah ketika melihat wasit dari Honduras membiarkan lawannya dari Argentina bermain kotor tanpa diberi hukuman.

6. Sugesti

”*Sugesti*” merupakan bagian dari bentuk interaksi sosial yang menerima dengan mudah pengaruh orang lain tanpa diseleksi dengan pemikiran yang kritis. Tanpa penggunaan kekuatan fisik atau paksaan. Keadaan mental seseorang menjadi mudah kena sugesti orang lain, biasanya didahului oleh simpati, rasa kagum, menyenangkan, sehingga sering mengikuti kehendak/pengaruh dari orang lain tersebut. Sugesti banyak digunakan untuk memperoleh dukungan terutama oleh pemimpin-pemimpin politik yang kharismatik, seperti; Hitler, Bung Karno, Lenin, dan sebagainya.

Namun tidak berarti bahwa sugesti semata-mata dari pengaruh eksternal (*heterosugesti*), karena sugesti secara luas merupakan pengaruh psikis yang berasal baik dari orang lain maupun diri sendiri atau *otosugesti* (Belen, 1994: 253). Sugesti yang berasal dari diri sendiri atau *otosugesti*, contohnya rasa sakit-sakitan yang dirasakan seseorang, padahal menurut diagnosis dan pemeriksaan dokter tidak ada gangguan fisik atau penyakit yang sesungguhnya hanya perasaan dia saja yang ketakutan dan selalu dibesar-besarkan rasa sakit tersebut. Sedangkan untuk contoh heterosugesti telah

diberikan di atas seperti yang dilakukan oleh para pemimpin yang kharismatik, bintang film terkenal yang memprovokasi untuk melakukan sesuatu tindakan.

Seseorang dapat dengan mudah menerima sugesti, terjadi karena berbagai hal. *Pertama*, bila yang bersangkutan mengalami hambatan dalam daya pikir kritisnya, apakah itu karena stimulus yang emosional maupun karena kelelahan fisik dan mental. Stimulus emosional misalkan dalam suatu pertunjukan atau konser seni musik yang sangat mengagumkan, seseorang penonton bisa teriak histeris. Sedangkan untuk contoh sugesti yang disebabkan oleh kelelahan fisik dan mental, seseorang dosen bisa memberikan nilai yang besar dan tidak sesuai dengan kemampuan daya pikir mahasiswa yang sebenarnya, karena kebetulan berkas jawaban UAS-nya yang berbentuk uraian ada pada urutan 79 dari sejumlah mahasiswa 82 orang. Faktor *kedua*, karena seseorang mengalami *disosiasi* atau terpecah belah pemikirannya. Sedangkan faktor *ketiga*; karena adanya dukungan mayoritas yang bisa mempengaruhi perubahan opini, prinsip, pendapat, maka individu atau kelompok minoritas bisa berubah pendapat sesuai dengan kehendak mayoritas.

7. Prestasi

"*Prestasi*" merupakan pencapaian atau hasil yang telah dicapai yang memerlukan suatu kecakapan/keahlian dalam tugas-tugas akademik maupun non-akademik (Chaplin, 1999: 310). Berkaitan juga dengan teori N'ach (*Need for Achievement*) McClelland, bahwa seseorang memiliki motivasi berprestasi tinggi, tidaklah semata-mata karena mengejar materi dan meningkatkan status sosial, melainkan memiliki nilai dan kebanggaan tersendiri secara batiniah (dari dalam) yang tidak bisa diukur secara materi maupun gengsi. *Need for achievement* inilah yang akan menentukan maju mundurnya suatu bangsa. Pada bangsa-bangsa miskin dan berkembang, pada umumnya memiliki *N'ach* yang rendah. Sebaliknya bangsa/negara yang memiliki *N'ach*nya tinggi, menurutnya ia akan maju seperti halnya negara-negara kapitalis Barat.

Teori McClelland yang dituangkan dalam bukunya *The Achievement Motive in Economic Growth* (1984), pada hakikatnya kemajuan ekonomi suatu bangsa lebih ditentukan oleh faktor internal, yakni pada nilai-nilai dan motivasi-motivasi yang mendorong untuk mengeksploitasi peluang, untuk meraih kesempatan dan mengubah

nasibnya sendiri. Selain itu teori McClelland juga didasarkan pada studinya yang dilandaskan pada teori psikoanalitis Freud tentang mimpi-mimpi dalam bentuk cerita dari sebuah gambar di Amerika Utara. Kesimpulannya adalah bahwa khayalan, mitos, legenda, ada kaitannya dengan dorongan dan perilaku dalam kehidupan mereka yang dinamakan *the need for achievement (N'ach)* yakni untuk bekerja secara baik, bekerja bukan atas dasar gengsi ataupun pengakuan sosial, tetapi bekerja demi pemuasan batin dari dalam untuk berprestasi (Fakih, 2001: 59) .

8. *Crowding (Kerumunan Massa)*

Crowding (kerumunan massa) merupakan suatu kumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama walaupun mungkin tidak saling mengenal/mengenalnya, dengan emosi-emosi yang mudah dibangkitkan dan tidak kritis (Chaplin 1999: 118). Ini banyak terjadi seperti kaum *Holigan* Sepakbola Inggris yang brutal, di mana beberapa tahun yang lalu terjadi tawuran dengan *supporter* Itali di Brussel Belgia bahkan menewaskan beberapa ratus orang *supporter* Itali. Hal serupa juga perilaku bringas terjadi pada para “Bonek-nya Persebaya” yang suka merusak fasilitas publik seperti gerbong kereta api, maupun “Bobotoh Persib Bandung” jika kalah bertanding merusak fasilitas umum seperti tanaman hias, pot bunga, dan lampu hias di pinggir jalan.

Mengapa sampai terjadi demikian? Menurut Guatav Le Bon (1841-1932) seorang ahli psikologi sosial Prancis yang terkenal bukunya *Psychologie des foules* (1895) bahwa, suatu massa seakan-akan mempunyai suatu jiwa tersendiri yang berlainan sifatnya dengan jiwa individu satu persatu. Dengan demikian seseorang individu yang bergabung dalam massa tersebut, maka sebagai anggota massa itu akan berpengalaman dan bertingkah-laku secara berlainan dibandingkan dengan pengalaman dan tingkah-lakunya sehari-hari selaku individu. Jiwa massa tersebut impulsif, lebih mudah tersinggung, bersikap menerabas, lebih mudah terbawa oleh sentimen-sentimen, kurang rasional, sugestible, mudah mengimitasi agresi dan kekerasan, serta lebih bersifat ”primitif” dalam arti buas, beringas, dan tidak rasional, penuh sentimen, serta sukar dikendalikan (Gerungan, 2000: 34). Teori Le Bon tersebut juga diikuti oleh Adolf Hitler dalam bukunya *Mein Kampf*.

9. Imitasi

"Imitasi" merupakan salah satu proses interaksi sosial yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan meniru perbuatan orang lain secara disengaja. Pengaruhnya bisa positif dan negatif. Secara positif imitasi dapat menimbulkan pengaruh makin patuhnya terhadap norma-norma yang berlaku terutama dalam sistem masyarakat patrimonial (*patronase*). Sebaliknya juga bisa negatif seperti dengan maraknya penyiaran film-film kekerasan maka di masyarakat dan sekolah-pun kekerasan makin meningkat intensitasnya

Menurut seorang ahli psikologi sosial dan kriminolog Prancis, Gabriel Tarde (1842-1904) bahwa masyarakat itu tiada lain dari pengelompokan manusia, di mana individu-individu satu sama lain mengimitasinya. Manusia baru dapat menjadi suatu masyarakat manakala ia mau mengimitasi kegiatan manusia lainnya, dengan semboyan *La sossiete c'est l'imitation*. Teori imitasi tersebut lebih lanjut dikembangkan oleh Albert Bandura dari Universitas Stanford, di mana teorinya dikenal dengan *Social Learning Theories*, dan *Teori Modeling* Menurut Bandura. Menurutnya manusia belajar lewat peniruan, mengambil pola-pola perilaku yang mereka lihat disekitar mereka, dan juga melalui proses umum yang disebut "pembiasaan".

Dalam eksperimennya yang sederhana dengan boneka Bobo, Bandura membagi anak yang diamati menjadi 3 kelompok. Satu kelompok berada pada di sebuah kamar selama 10 menit untuk memperhatikan seorang dewasa anggota regu peneliti; ia bertidak sebagai model yang menurut perkiraan akan ditiru anak-anak. Model tersebut menyerang boneka Bobo dengan menghantam hidungnya, memukul kepalanya dengan palu dan akhirnya menduduki boneka itu sambil berseru "bangsat tunduk terus kau!". Kelompok anak-anak yang kedua melihat "model" yang sama-sama bermain akrab dengan boneka Bobo. Kelompok yang ketiga, anak-anak dibiarkan tanpa ada model yang menganiaya maupun bermain dengan boneka Bobo. Kemudian ke tiga kelompok anak ini secara serempak dimasukkan dalam kamar yang sudah disediakan boneka Bobo, dan ternyata anak-anak kelompok pertama adalah anak-anak yang paling agresif melakukan kekerasan dengan memukul-mukul boneka bobo. Dari penelitian ini jelas bahwa agresi dan kekerasan lebih dominan dilakukan melalui pembelajaran imitasi melalui model yang diberikan (Bailey, 1988: 45)

10. Kesadaran

Konsep 'kesadaran' makna intinya merujuk pada suatu kondisi atau kontinum di mana kita mampu merasakan, berpikir, dan membuat persepsi (Wright, 2000: 162). Kesadaran juga sangat dipengaruhi oleh sudut pandang individual, dan kita mungkin bisa mengatakan bahwa aspek-aspek subyektif dari kesadaran itu berada di luar penjelasan sistem ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pemahaman bersama bahkan berada di luar semua makna yang terkonstruksikan secara sosial.

Dalam hal ini William James (1890) mengawali kritik dan sintesis apakah pikiran itu bersumber pada otak materi ataukah jiwa non-materi, yang selanjutnya menjadi sumber perdebatan sengit pada abad ke-19. Kemudian ia menyimpulkan bahwa pikiran secara psikologis ada pada otak, namun pikiran memiliki hukum-hukum tersendiri. Analisisnya mengenai kesadaran dimulai dengan introspeksi, yang secara umum kesadaran dipandang sebagai suatu kontinum dan senantiasa berubah dan terkait dengan persepsi diri, selalu memiliki obyek, bersikap selektif dan evaluatif. Dikatakan berubah karena dalam 'kesadaran' memiliki rentang tertentu, bersifat terbatas, dan ada pula keterbatasan dalam memori langsung sehingga daya ingat kita tentang masa lampau juga terbatas dan fluktuatif. Dengan demikian 'kesadaran' tergantung pada fungsi-fungsi otak tertentu.

Serangkaian studi pada pasien yang mengalami kerusakan otak membuktikan hal itu. Jika konteks visual itu salah satu sisi otak ada gangguan akibat penyempitan pembuluh darah, maka sisi yang terdapat pada bagian otak visual akan lenyap hingga separuhnya. Bahkan pada kasus tertentu, pasien akan kehilangan penglihatan (Wright, 2000: 163). Hal itu berarti ada disosiasi antara pengalaman sadar dalam melihat sesuatu dengan proses visual yang diperlukan otak untuk memberi tahu kita bahwa mata kita melihat sesuatu. Jika terjadi visi yang tanpa memiliki kesadaran itu namanya blindsight (Weiskrantz, 1986). Jika korteks bagian kanan rusak, pasien cenderung mengalami suatu sindroma yang dikenal dengan "pengabaian unilateral". Dalam hal ini mereka kehilangan kesadaran diri. Menurut Bisiach dan Luzzatti (1978) menunjukkan bahwa pengabaian unilateral bisa merusak daya imajinasi maupun pemahaman terhadap dunia nyata. Bahkan gangguan tersebut merupakan bentuk kegiatan berskala tinggi, di mana reaksi

pasien seperti itu terhadap stimuli apa-pun akan bersifat otomatis, termasuk bercakap-cakap tanpa disadarinya.

11. Fantasi

Konsep "fantasi" merujuk pada kapasitas manusia yang luar biasa dalam memberikan sosok pada sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, yang kemudian melengkapinya dengan aneka pengandaian baik itu secara spontan maupun sengaja (Janjnes, 1977). Pemanfaatan fantasi dalam dunia seni sudah lama merupakan sumber lahirnya puisi, drama, dan lukisan. Akan tetapi baru sejak abad ke dua puluh fenomena tersebut menjadi kajian ilmiah formal dalam psikologi. Perlu diketahui bahwa dalam bahasa sehari-hari sering disamakan dengan khayalan. Padahal dalam bidang-bidang eksperimental atau klinis istilah "fantasi" tersebut mempunyai pengertian yang lebih luas lagi, mengingat istilah tersebut tidak sekedar aktivitas imajiner secara spontan, melainkan juga merupakan produk pemikiran yang muncul sebagai respons suatu kesadaran atau gambaran yang tidak jelas. Istilah tersebut juga mengacu pada representasi artistik proses-proses mental (Singer, 2000: 342).

Penelitian James dalam *The Principles of Psychology* (1980) tentang fantasi yang sering diremehkan orang, dikemukakan bahwa fantasi juga merupakan suatu respons terhadap sesuatu rangsangan melalui suatu proses asosiatif yang kompleks. Dalam studi yang lebih komprehensif, "fantasi" dapat dikaji melalui berbagai pendekatan dan metode psikologi; (1) *psikoanalitik*, (2) *metode proyektif*, *thematic apperception test*, dan (3) *metode rist pertimbangan teoretis mutakhir* (Singer, 2000: 344-345). *Pertama*, psikoanalitik Freud (1962[1908]) yang mengemukakan bahwa berspekulasi mengenai arti penting psikologis khayalan dalam makalahnya yang berjudul *Creative writes and daydreaming*. Proses asosiasi bebas psikoanalisis juga mendorong para para pasien untuk membangkitkan kembali ingatannya di amasa kanak-kanak dan juga mengenai fantasi-fantasi yang dibuatna pada masa itu, serta khayalan-khayalan setelah dewasa.

Kedua, studi yang dilakukan oleh para psikiatri membangkitkan minat untuk menemukan berbagai prosedur yang memunculkan fantasi sebagai pijakan diagnosa. Itulah yang disebut sebagai metode proyektif terutama metode *Roscharch Inkoblots* dan *Thematic Apperceptions*. Proses *Rosharch Inkoblots* adalah upaya untuk menggunakan

asosiasi spontan guna mengidentifikasi unsur-unsur struktural kepribadian seperti kecenderungan berhayal, suka emosional, kepekaan terhadap organisasi kognisi dan kontrol terhadap diri sendiri. Sedangkan metode *Thematic Apperceptions Test*, merupakan suatu metode yang meminta para responden untuk mengajukan cerita melalui gambar-gambar sederhana yang dapat ditafsirkan berbagai bentuk-bentuk penafsiran sesuai pengalaman maupun persepsi pasien, bahkan bisa digunakan untuk menghubungkan khayalan dengan motivasi seseorang (MacClelland, 1961; 1992). Terakhir, metode riset pertimbangan teoretis mutakhir, contohnya (a) melalui metode survei kuesioner; pencatatan khayalan oleh orang yang bersangkutan; (b) studi laboratorium dengan berbagai variasi teknik; (c) pengukuran psikofisiologis fungsi-fungsi otak selama fantasi tercipta; serta pengukuran fantasi ketika ia muncul dalam benak orang yang bersangkutan (Singer, 2000: 344).

12. Personalitas

”Personalitas” berasal dari bahasa Latin kata ”persona” yang artinya ”topeng aktor”. Merupakan sebuah konsep samar yang mencakup seluruh karakteristik psikologi yang membedakan seseorang dengan yang lainnya (Colman, 2000: 745). Menurut Gordon W. Allport ada 50 definisi personalitas yang berbeda-beda sejak penelitiannya yang ia lakukan (Allport, 1937). Namun secara garis besar ”personalitas pada hakikatnya merupakan organisasi dinamis dalam individu terdiri dari sistem-sistem psikofisik yang menentukan tingkah-laku dan fikirannya yang dimiliki secara karakteristik (Chaplin, 1999: 362).

Berdasarkan sejarahnya tentang teori kepribadian, Hipocrates (400 SM) dan Galen (170 M) dianggap teori kepribadian yang paling awal yang diterima pada Zaman Yunani dan Abad Pertengahan,

di mana manusia dapat diklasifikasikan atas empat jenis kepribadian menurut keseimbangan rasa humor atau cairan dalam tubuh. Manusia optimis digerakkan oleh darah (*sanguis*), manusia murung oleh cairan ampedu hitam (*melas chole*), manusia tempramental oleh cairan ampedu kuning (*chole*), dan manusia apatis oleh dahak atau *phlegma* (Colman, 2000: 745).

Penelitian personalitas yang lebih modern dilakukan oleh Francis Galton (1884) di Inggris, kemudian disusul Alfred Binet dan Theodore Simon tahun 1905 dengan penelitian intelegensi. Yang terus berkembang, kendatipun tidak pernah diakui secara akademis bahwa inteligensi sebagai bagian teori kepribadian. Dan, mungkin teori-teori kepribadian multi sifat yang sebenarnya lebih menonjol lebih ambisius untuk menjelaskan kepribadian manusia sebagai satu kesatuan yang utuh dan bukan satu aspek saja. Tujuan teori-teori ini adalah mengidentifikasi konstelasi sifat dasar yang membentuk struktur kepribadian; dan menjelaskan perbedaan-perbedaan antar orang-orang menurut letak berbagai perbedaan ini dalam dimensi-dimensinya, seperti teori, teori Eysenck (1967) Cattell (1977), dan lain-lain.

13. Pikiran

Istilah '*mind*' atau 'pikiran' berasal dari bahasa Teutonic kuno, yaitu 'gamundi' yang artinya 'berpikir', 'mengingat', 'bermaksud' atau *intend* (Valentine: 2000: 667). Berbagai pengertian ini nampak sekali sebagai frase seperti mengingat kembali (*remind*), memperhatikan (*give one's mind*), mengubah pikiran orang (*to make up or change one's mind*), Dahulu kata '*mind*' digunakan untuk menunjuk secara kolektif pada kemampuan mental seperti mempersepsi, membayangkan, mengingat, berpikir, mempercayai, merasakan menginginkan, memutuskan, dan berniat.

Dalam bahasa Yunani kuno, persoalan pikiran dikaitkan dengan jiwa atau roh, hal serupa juga terjadi di Eropa pada Abad Pertengahan, di mana ajaran teologi mendominasinya. Sementara itu Plato membagi pikiran dalam tiga bagian, yakni fungsi-fungsi kognitif, konatif, dan afektif, dan hal ini bertahan hingga abad ke-19. Pada masa lalu 'pikiran' diidentifikasi dengan pengalaman sadar: 'Kesadaran ... merupakan syarat atau pernyataan dari setiap kerja mental' (Fleming, 1858). 'Tidak ada proposisi yang bisa diutarakan jika tidak pernah ada dalam kesadaran' (Locke, 1690). Namun pendapat ini keliru. Sebab para ahli neurofisiologi dan klinik pada abad ke-19 menyelidiki berbagai level fungsi dalam susunan syaraf, dan menemukan aktivitas mental tidak sadar. Bahkan William James (1890) menyatakan bahwa hanya kilasan-kilasan dan bukan arus pemikiran yang terdapat dalam kesadaran. Mayoritas proses mental terjadi di luar kesadaran. Saat ini banyak orang berasumsi bahwa pikiran diidentifikasi sebagai sistem

yang mengatur perilaku — dan bukan diidentifikasi berdasarkan kesadaran, dengan demikian terbuka kemungkinan bagi pendekatan-pendekatan yang lebih mekanistik terhadap kajian-kajian tentang pikiran (Valentine, 2000: 668).

Sementara itu muncul psikologi kognitif yang mempopulerkan kerangka metafora komputer, yang didasarkan pada suatu filosofi fungsionalis yang memberi ciri pada pada mental adalah organisasi fungsionalnya, bukan konstitusi materialnya. Pikiran dapat dimodelkan lewat suatu hirarki prosesor paralel ganda — yang memungkinkan kecepatan dan fleksibilitas — dengan interaksi dan ketergantungan di dalam dan di antara berbagai level. Pada level yang terendah prosesor-prosesor ini mengatur interaksi-interaksi sensoris dan motoris dengan dunia luar. Pada level yang tertinggi seluruh tujuan dipantau. Sebagian kecil dari model ini mungkin sama fungsinya, sedangkan mayoritasnya mungkin relatif terspesialisasi (Valentine, 2000: 668).

14. *Insting* atau *naluri*

Istilah 'insting' atau 'naluri' merujuk pada macam-macam aktivitas yang luas. Sebagai contoh istilah ini mengacu kepada suatu impuls untuk melakukan tindakan tertentu tanpa kesadaran, tidak berhubungan dengan hasil pembelajaran atau didikan (James, 1980). Ada pula yang mengartikan naluri sebagai sesuatu kecenderungan, sikap atau intuisi yang dibawa sejak lahir. Begitu luasnya tentang pengertian insting atau naluri', oleh karena itu menyulitkan pembahasan secara ilmiah (Beer, 1983).

Untuk mengetahui pemahaman 'naluri' lebih jauh, kita bisa mengikuti pendapat para ahli terdahulu seperti Charles Darwin, Sigmund Freud, maupun Mc Dougal. Darwin yang menulis *On the Origin of Species*, (1859) mengartikan "naluri" sebagai suatu yang terpisah dari dari pengalaman hidup. Sedangkan Freud melihatnya 'naluri' sebagai suatu dorongan biologis yang ada pada setiap mahluk hidup yang melandasi perilakunya untuk mempertahankan diri dan ber-reproduksi. Namun bagi Freud terdapat tambahan bahwa setiap manusia memiliki 'naluri' hidup (*eros*) seperti kegairahan, dan 'naluri' kematian (*thanatos*) melalui agresi dan kekerasan. Jadi bagi Freud naluri pada hakikatnya adalah energi yang tersembunyi yang sekurang-kurangnya analog dengan energi fisik, dan ada kalanya berfungsi sebagai agen intensional yang mendorong seseorang melakukan strategi tertentu guna mencapai tujuan. Di sini jelas bahwa Freud tidak konsisten, karena

itu ia dikritik karena kekurangan dukungan empiris dan konsistensi konseptual. Hal ini berbeda dengan McDougal dalam bukunya *Introduction to Social Psychology* (1908) mengemukakan bahwa naluri:

Suatu disposisi psikologis turunan atau bawaan yang menentukan seseorang dalam merumuskan persepsi, memberi perhatian atau memberi respon terhadap berbagai pengalaman emosional atau dalam menghadapi suatu obyek tertentu, untuk kemudian melakukan tindakan atau perilaku tertentu yang muncul begitu saja akibat adanya impuls terhadap obyek atau pengalaman tadi.

Definisi ini melihat adanya keterkaitan beberapa aspek dan bersifat netral. Aspek-aspek itu mencakup psikofisik namun mengartikan persepsi, emosi dan impuls sebagai suatu manifestasi mental yang selalu memberi pengaruh terhadap tindakan, kontrol, dan arah tindakan secara sengaja. Jadi terdapat unsur kognitif, konatif yang menjadi kekuatan emosi. Sebagai kesimpulan pengertian 'naluri' tersebut dapat dikemukakan sejauh ini masih merupakan cakupan aktivitas yang luas, bisa merupakan dorongan biologis pada suatu impuls untuk melakukan tindakan tertentu tanpa kesadaran yang sifatnya turunan atau bawaan dengan mengabaikan pengalaman hidup maupun hasil belajar

15. *Mimpi*

'Mimpi' secara psikologis merujuk pada suatu aktivitas sederetan tamsil simbolik dan ide-ide, gagasan-gagasan, hasrat-hasrat terpendam maupun kebutuhan-kebutuhan, konflik-konflik yang saling bertalian dan berlangsung selama tidur, selama dikuasai obat bius, maupun selama dalam kondisi terhipnotis (Chaplin, 1999: 147). Sampai sekarang ini masih relatif sedikit dipahami bahkan seringkali diabaikan dalam berbagai kajian kognisi. Terutama setelah metode introspeksi tergusur oleh metode-metode obyektif-positivistik tentang kesadaran pada periode perkembangan ilmu-ilmu sosial di tahun 1930-an dan 1940-an, studi tentang mimpi terpendam dan mandek dari kepustakaan dunia ilmu-ilmu sosial (Cartwright, 2000: 240). Padahal mimpi mempunyai peran penting yang lebih besar daripada disadari pada orang-orang pada umumnya (Freud, 2001: 83-98).

Terungkapnya latar belakang mimpi, yakni pada kondisi elektrifisiologis tertentu di saat kita tidur yang ditandai oleh gerakan-gerakan mata secara liar di bawah kelopak

(disebut REM = *rapid eye movement*), maka mulai saat itu ada kriteria obyektif yang diketahui tentang munculnya mimpi. Ketika periode REM berlangsung, mimpi itu mulai terjadi pada orang yang bersangkutan. Eratnya korelasi antara periode REM dengan munculnya pengalaman mimpi merupakan penemuan penting pertama dalam serangkaian penelitian tentang mimpi (Cartwright, 2000: 241). Dari riset itu juga dapat diketahui bahwa durasi mimpi biasanya berlangsung 60 sampai 90 menit. Selain itu juga periode REM, terjadi dalam beberapa tahapan atau episode berurutan, di mana episode pertama berlangsung sekitar 10 hingga 12 menit, sedangkan yang kedua dan ketiga berlangsung 15 hingga 20 menit. Namun REM di penghujung malam biasanya lebih lama, yakni sekitar 45 menit.

Kita patut merasa berhutang budi kepada Sigmund Freud yang sejak tahun 1900 ia telah begitu besar menaruh perhatian dan telah melakukan risetnya tentang mimpi yang dituangkan dalam bukunya "*The Interpretation of Dream*". Walaupun sebagian penulis seperti Hughlings Jackson (1932) menyatakan bahwa tidur dapat melenyapkan ingatan yang tidak diperlukan atau tidak diinginkan dari pengalaman yang dialami oleh orang yang bersangkutan selama satu hari penuh sebelum tidur. Ternyata pendapat ini telah disempurnakan oleh Crick dan Mitchison (1983) yang menyatakan bahwa mimpi bisa pula berfungsi sebagai proses belajar atau pengingatan atas hal-hal penting yang dialami pada masa sebelumnya. Begitu juga Hennevin dan Leconte (1971) berpendapat bahwa mimpi berfungsi menghimpun informasi.

F. Generalisasi-generalisasi Psikologi

1. Motivasi

Motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan dapat berlangsung baik disadari ataupun tidak disadari. Sebab sebagai manusia sering terjadi bahwa kita tidak selalu sepenuhnya menyadari akan sebab-sebab dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari tindakan itu.

2. Konsep Diri

Konsep diri yang baik bagi seseorang adalah konsep diri yang positif. Artinya penilaian tentang dirinya secara internal maupun eksternal adalah seimbang dan valid. Sebaliknya

bagi seseorang yang sombong, tidak sesuai antara penilaian dirinya secara internal dengan eksternal yang suka membual, adalah *konsep diri* yang negatif. Begitu juga bagi seseorang yang kurang memiliki rasa percaya diri walaupun secara perseptual, fisik dan attitudinal sangat memadai, tetap memiliki *konsep diri* yang negatif.

3. Sikap

Sebuah *sikap* sering kali didefinisikan sebagai tendensi (kecenderungan) untuk bereaksi secara menyenangkan ataupun tidak menyenangkan terhadap sekelompok stimuli yang ditunjuk, seperti misalnya suatu kelompok etnis, kelompok bangsa, adat istiadat atau lembaga (Anastasi dan Urbina, 1998: 42).

4. Persepsi

Persepsi seseorang tentang posisi sesuatu benda tertentu, memiliki nilai yang lebih obyektif dibanding jika kita bertanya tentang sikap seseorang terhadap partai politik tertentu. Akan tetapi persepsi seseorang juga bisa keliru manakala individu itu mengalami ilusi, di mana ia mengalami gangguan pengamatan yang tidak sesuai dengan penginderaan, sehingga ketika mekanisme normal diaktifkan tidak mampu menangkap stimuli yang sebenarnya secara akurat.

5. Frustrasi

Frustrasi yang disebabkan oleh ketidakadilan (bersifat arbitrer), lebih erat hubungannya dengan terjadinya agresi, dibanding dengan *frustrasi* non-arbitrer. Sebab *frustrasi* non-arbitrer justru reaksinya bisa menarik diri dari pergaulan dan menjadi depresi (Krahe, 2005: 56; Berkowitz, 1998: 47).

6. Sugesti

Berlangsungnya proses *sugesti* dapat terjadi karena pihak yang menerima dilanda kekalutan emosi, hal mana sedang terhambat daya pikirnya seseorang secara rasional. Tetapi juga bisa terjadi oleh sebab yang memberikan pandangan tersebut adalah orang yang dianggap berwibawa dan otoriter ataupun karena faktor suara mayoritas (Soekanto, 1986:52-53)

7. *Prestasi*

Masyarakat yang memiliki tingkat kebutuhan *berprestasi*, umumnya akan menghasilkan jiwa wiraswastawan yang lebih bersemangat dan selanjutnya akan menghasilkan perkembangan ekonomi yang lebih cepat, dibanding dengan kelompok yang memiliki tingkat kebutuhan *berprestasi* yang lebih rendah. Dan, jika ditelusuri asal-muasal kebutuhan untuk *berprestasi* tersebut pada umumnya merupakan hasil yang dibangun oleh pengalaman sosial sejak masa kanak-kanak, serta bukan sesuatu yang tiba-tiba. .

8. *Crowding (kerumunan Massa)*

Crowding atau kerumunan massa, sering merefleksikan perbuatan-perbuatan primitif yang destruktif, (walaupun pada hakikatnya tidak selalu merepresentasikan perbuatan negatif seperti itu). Menurut pengamat psikologi sosial seperti Gustav Le Bon, hal ini disebabkan karena suatu massa yang umumnya tidak saling mengenal tersebut memiliki suatu jiwa tersendiri yang berbeda dengan sifat-sifat individu dan massa lebih bersifat implusif, mudah tersinggung, sugestible, dan irrasional.

9. *Imitasii*

Menurut Gabriel Tarde, masyarakat tiada lain dari pengelompokan manusia, di mana individu-individu yang satu *mengimitasi* yang lain, dan sebaliknya. Bahkan masyarakat itu baru menjadi masyarakat sebenarnya apabila manusia mulai *mengimitasi* kegiatan-kegiatan manusia lainnya. Kata Tarde; *La sosiete c'es l'imitasion* (Gerungan, 2000: 32)..

10. *Kesadaran*

Bukti-bukti medis menunjukkan bahwa *kesadaran* seseorang sangat bergantung dari pada fungsi-fungsi otak tertentu. Serangkaian studi terhadap pasien yang mengalami kerusakan otak, menunjukkan para pasien mengalami gangguan *kesadaran* dari tingkat ringan sampai berat. Jika korteks bagian kanan rusak, pasien cenderung mengalami sindroma yang dikenal dengan "pengabaian unilateral". Dalam kasus seperti ini pasien bisa kehilangan kesadaran diri yang merusak daya imajinasi maupun pemahaman dunia nyata (Bisiach dan Luzzatti, 1978).

11. *Fantasi*

Pemanfaatan *fantasi* dalam dunia seni sudah lama merupakan sumber lahirnya puisi, drama, dan lukisan. Akan tetapi baru sejak abad ke dua puluh fenomena tersebut menjadi kajian ilmiah formal dalam psikologi (Singer, 2000: 343).

12. *Personalitas/Kepribadian*

Kepribadian mencakup usaha-usaha menyesuaikan diri yang beraneka ragam namun khas yang dilakukan oleh individu. Karena itu kepribadian sering diidentikan dengan aspek-aspek unik atau khas dari tingkah-laku. Dalam hal ini *kepribadian* merupakan istilah untuk menunjuk pada hal-hal khusus tentang individu dan yang membedakannya dari semua orang (Hall dan Lindzey, 1993: 27).

13. *Pikiran*

Manusia sebagai makhluk rasional yang berberagama dan berbudaya, semestinya kemampuan *pikiran* mengendalikan perilaku kita sehari-hari. Bukan sebaliknya di mana perilaku mengendalikan pikiran (Valentine, 2000: 668)..

14. *Insting/Naluri*

Bagi Charles Darwin maupun Sigmund Freud, agresi dan kekerasan jika ditelusuri asal-muasalnya, merupakan bagian integral dari seleksi alam yang kompetitif maupun *insting/naluri* sebagai pertahanan *naluri* kehidupan (*eros*) maupun *naluri* kematian (*thanatos*) sebagai makhluk manusia. Namun berbeda dengan mazhab behavioristik seperti John B. Watson bahkan Albert Bandura, bahwa agresi dan kekerasan adalah hasil pembiasaan dan pembelajaran yang bersifat eksternal dari pengaruh-pengaruh lingkungan yang deterministik. .

15. *Mimpi*

Sampai sekarang ini riset tentang *mimpi* masih sangat terbatas sehingga aktivitas *mimpi* masih merupakan bagian perilaku manusia yang sangat sedikit dipahami. Terutama sejak psikologi melepaskan diri dari metode introspeksi dengan penggunaan metode-metode

obyektif-positivistik. Sstudi tentang mimpi menjadi terpentah dari kepustakaan dunia ilmu-ilmu sosial. Padahal jika ditelaah lebih jauh, mimpi memiliki multi fungsi untuk kepentingan manusia sekarang dan mendatang (Cartwright, 2000: 240).

G. Teori-teori Psikologi

1. Teori Agresi Psikoanalisis Sigmund Freud

Teori agresi psikoanalisis dimotori oleh Sigmund Freud dalam karyanya *Beyond the pleasure principle* (1920). Inti dari teori tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Perilaku agresif manusia, pada dasarnya didorong oleh dua kekuatan dasar yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sifat manusia, yakni insting/naluri kehidupan (*eros*), dan insting/naluri kematian (*thanatos*).
- b. *Eros*, mendorong orang mencari kesenangan dan kenikmatan untuk memenuhi keinginan. Sedangkan *thanatos*, diarahkan pada tindakan-tindakan destruktif-diri serta perasaan berdosa/bersalah..
- c. Karena sifat antagonistiknya, kedua insting/naluri itu merupakan sumber konflik intrafisik yang berkelanjutan, yang hanya dapat diatasi dengan mengalihkan kekuatan itu dengan dari orang bersangkutan kepada orang lain. Dengan demikian bertindak agresif terhadap orang lain dianggap merupakan mekanisme untuk melepaskan energi destruktif sebagai cara melindungi stabilitas intrafisik pelaku.
- d. Satu alternatif yang mungkin dapat dilakukan melalui "katarsis" (pelepasan) yang dapat dilakukan melalui humor maupun menyalurkan agresi terhadap benda-benda tiruan, serta berolahraga yang menunjukkan permainan keras.

2. Teori Disonansi Kognitif Festinger

Teori disonansi kognitif dari Festinger dimuat dalam karyanya *A Theory of Cognitive Dissonance* (1957). Namun sebelum dijelaskan secara rinci tentang isi teori disonansi tersebut, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu pengertian disonansi. Disonansi adalah hubungan dua elemen yang terjadi disertai suatu penyangkalan. Sebagai contoh jika seseorang dipukul seharusnya ia kesakitan. Tetapi kalau ada orang dipukul tidak kesakitan, maka terjadilah hubungan disonansi Adapun isi pokok teori disonansi kognitif tersebut sebagai berikut:

- a. Antara elemen-elemen kognitif mungkin terjadi hubungan-hubungan yang tidak pas (*nonfitting relations*) yang menimbulkan disonansi (kejanggalan) kognitif.
- b. Disonansi kognitif menimbulkan desakan untuk mengurangi disonansi tersebut dan menghindari peningkatannya .
- c. Hasil dari desakan itu terwujud dalam perubahan-perubahan pada kognisi.
- d. Perubahan tingkah-laku dan menghadapkan diri pada beberapa informasi dan pendapat-pendapat baru yang sudah diseleksi terlebih dahulu.

3. Teori Kepribadian Erich Fromm

Erich Fromm lahir di Frankfurt Jerman tahun 1900. Ia belajar psikologi di dan sosiologi di Universitas Heidelberg, Frankfurt dan Munich. Setelah meraih gelar Ph.D. dari Heidelberg tahun 1922 kemudian ia belajar psikoanalisis di Munich pada Institut Psikoanalisis Berlin yang terkenal itu. Pada tahun 1933 ia pergi ke Amerika Serikat dan ia sebagai lektor di Institut Psikoanalisis Chicago. Namun terakhir ia pindah ke Swiss dan dikenal sebagai teoretikus humanis dialektik. Sebagai seorang psikonalisis-humanis, tema dasar tulisan-tulisan beliau selalu menggunakan tema *keseharian dan isolasi* akibat dipisahkan dari alam dan orang-orang lain. Adapun karya-karya Fromm yang banyak diminati karena wawasannya yang luas tidak sekedar psikologi, namun juga sosiologi, filsafat, dan agama, sangat diminati oleh masyarakat akademik secara luas. Adapun buku-bukunya tersebut: yang mencirikan ia seorang psikoanalisis-humanistik dialektis banyak ditulis gagasan-gagasannya tersebut pada karya *Escape from freedom* (1941); *Man for himself* (1947); *The heart of man* (1964); *The same society* (1955); *The revolution of hope* (1968);

Secara singkat teori kepribadian yang digagas Fromm sebagai berikut:

- a. Kebebasan yang didapat manusia, yang semakin luas, menempatkan manusia semakin merasa kesepian, dengan kata lain kebebasan menjadikan keadaan yang negatif di mana manusia-manusia itu melarikan diri (Fromm, 1941).
- b. Manusia selalu berusaha memecahkan kontradiksi-kontradiksi dasar yang ada padanya. Maksudnya bahwa seseorang pribadi merupakan bagian tetapi sekaligus terpisah dari alam, merupakan binatang dan sekaligus manusia. Sebagai binatang ia memiliki kebutuhan fisiologis yang harus dipuaskan, sebagai manusia ia memiliki

kesadaran diri, pikiran dan daya khayal. Begitupun manusia memiliki pengalaman-pengalaman khas meliputi perasaan lemah lembut, cinta, perasaan kasihan, perhatian, tanggung jawab, identitas, integritas, transendensi, kebebasan, nilai-nilai, serta norma-norma (Fromm, 1968).

- c. Aspek individu yakni aspek binatang dan aspek manusia, merupakan kondisi-kondisi dasar eksistensi manusia, yang berasumsi bahwa; "Pemahaman tentang psikhe manusia harus berdasarkan analisis tentang kebutuhan-kebutuhan manusia yang berasal dari kondisi-kondisi eksistensinya (Fromm, 1955). Kebutuhan-kebutuhan itu mencakup:
 - (1) kebutuhan akan keterhubungan;
 - (2) kebutuhan akan transendensi;
 - (3) kebutuhan akan keterberakaran;
 - (4) kebutuhan akan identitas;
 - (5) kebutuhan akan kerangka orientasi.
- d. Kepribadian orang akan berkembang menurut kesempatan-kesempatan yang diberikan kepadanya oleh masyarakat tertentu.
- e. Sebagai manusia tidak lepas dari pasangan tipe karakter keenam; *nekrofilus* dan *biofilus*. Nekrofilus, yakni orang yang tertarik pada kematian, dan biofilus, yakni orang yang mencintai kehidupan. Selain itu juga bahwa hidup adalah satu-satunya potensialitas primer, sedangkan kematian adalah sekunder dan hanya muncul bila daya-daya hidup dikecewakan.
- f. Sekarang ini lima tipe masyarakat sudah demikian menggejala, yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya, seperti; (1) reseptif; (2) eksploitatif; (3) penimbunan; (4) pemasaran; (5) produktif.
- g. Ia yakin dengan proposisi-proposisi sebagai berikut: (1) manusia mempunyai kodrat esensial bawaan; (2) masyarakat diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kodrat esensialini; (3) tidak satupun bentuk masyarakat yang pernah diciptakan berhasil memenuhi kebutuhan dasar eksistensi manusia; (4) adalah mungkin menciptakan masyarakat itu.
- h. Masyarakat yang didambakan adalah "sosialisme komunitarian humanistik".

4. Teori Deprivasi Relatif Gurr

Teori Deprivasi Relatif ini merupakan hasil pemikiran dan penelitian Ted Robert Gurr yang dituangkan dalam karyanya *Why Men Rebel* (1970). Adapun ringkasan isi teori tersebut, sebagai berikut:

- a. *Pertama*, dengan mendefinisikan deprivasi relatif sebagai sebagai hasil dari proses perubahan harapan dan kemampuan untuk memenuhi harapan itu, maka bentuk deprivasi dapat dibedakan berdasarkan pola-pola perubahan; (1) deprivasi presisten, kemampuan yang secara konstan berada di bawah harapan; (2) deprivasi aspirasional, harapan naik dan kemampuan konstan; (3) deprivasi dekremental, harapan konstan dan kemampuan turun; (4) deprivasi progresif, kemampuan naik tetapi masih lebih rendah dibandingkan harapan .
- b. *Kedua*, ketidakpuasan menciptakan potensi untuk kekerasan politik. Tiga kelompok faktor yang memperantarai potensi untuk kekerasan politik dan kekerasan aktual, adalah (1) justifikasi normatif untuk kekerasan; (2) justifikasi kemanfaatan (utilitarian) untuk kekerasan; (3) keseimbangan antara sumber-sumber daya koersif dan institusional dari pemberontak versus pemerintah/negara.

5. Teori Kecerdasan Majemuk Howard Gardner

Howard Gardner dilahirkan di Scranton Pennsylvania pada 1943. Setelah menyelesaikan Ph.D-nya Gardner bekerja untuk Jerome S. Bruner seorang ahli psikologi perkembangan kognisi. Pengaruh Bruner sangat kuat. Ia banyak mengkritik teori Piaget tentang teori tahap perkembangan kognisi. Baginya teori tersebut sudah tidak memadai lagi. Inti pemikiran Piaget adalah konsepsi tentang anak sebagai "bakal ilmuwan" (*incipient scientist*). Namun, pendidikan musik dan ketertarikan Gardner pada karya seni lainnya, menunjukkan bahwa ilmuwan tidak bisa menjadi contoh bentuk tertinggi kognisi manusia. Pada tahun 1970-an Gardner mulai merumuskan teori kognisi yang berlawanan dengan teori Piaget (terkait dengan dengan konsepsinya tentang "ilmuwan luar biasa" (*pre-eminent scientist*) dan dengan teori psikometris (berkenaan dengan konsep kecerdasan umum atau *general intelligence* atau "g"). Menurut Gardner kemungkinan-kemungkinan pemikiran dan kepandaian manusia sebenarnya dapat dijelaskan. Kesempatan mengembangan teori ini terwujud pada awal tahun 1980-an, ketika

Gardner menjadi anggota kehormatan *Project on Human Potential*. Selama kegiatannya ia membukukan dalam *Frames of Mind* yang membahas teori kecerdasan majemuk (*multiple intelligence*). Teori Gardner tidak seperti teori-teori lain dengan metode psikometri tradisional, bukan merupakan jawaban terhadap pertanyaan tersirat "kemampuan kognitif apa yang mendasari skor tes IQ yang baik? Tetapi *Multiple Intelligence* adalah jawaban pertanyaan tersurat "kemampuan kognitif apa yang memungkinkan manusia menjalankan peran-peran orang dewasa atau 'keadaan paripurna' pada pelbagai kebudayaan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut Gardner meneliti pelbagai literatur sains dan ilmu sosial untuk memperoleh kecerdasan potensial (*candidate intelligence*). Kecerdasan bukan hanya didukung oleh tes psikometri, melainkan juga dibuktikan dengan hasil dari tugas-tugas dalam psikologi eksperimental; kecerdasan menunjukkan sekumpulan kegiatan pengolahan, seperti pencarian titi-nada dalam musik atau sintaksis dalam bahasa, yang dirancang oleh informasi yang relevan dengan kecerdasan itu (Kornhaber, 2003: 487).

Dengan menggunakan kriteria itu Gardner mengidentifikasi delapan kecerdasan yang relatif otonom, yakni:

- (1) kecerdasan linguistik;
- (2) kecerdasan logika matematika;
- (3) kecerdasan spasial;
- (5) kecerdasan kinestetik jasmaniah;
- (6) kecerdasan interpersonal;
- (7) kecerdasan intrapersonal;
- (8) kecerdasan naturalis (membuat kategorisasi dan menentukan ciri-ciri lingkungan).

Baginya kecerdasan bisa ditambahkan jumlahnya, jika memenuhi sebagian besar kriterianya. Jumlah kecerdasan kurang penting daripada kemajemukan kecerdasan, dan bahwa tiap manusia memiliki campuran kekuatan serta kelemahan kecerdasan yang unik itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Allport, Gordon, W. (1954) "The historical background of modern social psychology" dalam G.E. Lindzey (ed) *Handbook of Social Psychology*, 1st edn, vol II, Cambridge, MA: Cambridge University Press.
- Alluisi, E.A. & Morgan, B.B. JR. (1976) "Engineering psychology and human performance", *Annual Review of Psychology*, 1976, 27, hlmn. 305-330.
- American Psychological Association (1985) *Minutes of Midwinter Executive Committee Meeting*, Chicago.
- Ames, Russel E. Dan Ames Carole (1984) *Motivation in Education, Volume 1 Student Motivation*, New York: Academic Press, Inc.
- Anastasi, Anne dan Urbina Susana (1997) *Tes Psikologi Jilid 1 dan 2*, Penerjemah Robertus Hariono, Jakarta Prenhallindo.
- Anastasi, Anne (1989) *Bidang-bidang Psikologi Terapan*, Penerjemah Aryatmi dkk, Jakarta: CV Rajawali.
- Atkinson, Rita, L. Ed. (1996) *Pengantar Psikologi, Jilid 1 dan 2*, Alih Bahasa, Nurdjannah Taufiq dan Agus Dharma, Jakarta: Erlangga.
- Bailey, Ronald, H (1988) *Kekerasan dan Agresi*, Alih Bahasa Suwargono Wirono, Jakarta Tira Pustaka.
- Bandura, Albert, (1973) *Aggression: A Social Learning Analysis*, Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Bandura, Albert (1977) *Social Learning Theory*, Englewood-Cliffs NJ: Prentice Hall.
- Banks, James A. (1977) *Teaching Strategies for the Social Studies: Inquiry, Valuing, and Decision-Making*, Philippines, : Addison-Wesley Publishing Company.
- Baron, Robert. A dan Byrne, Donn (1983) *Social Psychology: Understanding Human Interaction*, Avenue Newton , Massachusetts: Allyn and Bacon.
- Beer, C.G. (2000) "Insting" atau "Naluri" dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Penerjemah Haris Munandar, dkk. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlmn. 498-500..
- Berkowitz, Leonard (1995) *Agresi I, : Sebab dan Akibatnya*, Penerjemah: Hartatni Woro Susianti, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.

- Bell Gredler, Margareth (1996) *Belajar dan Membelajarkan*, Terjemahan Munandar, Jakarta: Seri Pustaka Teknologi Pendidikan.
- Berry, J.H., Poortinga, Y.H., Segall, M.H., dan Dasen, P.R. (1997) *Psikologi Lintas-Budaya Riset dan Aplikasi*, Alih Bahasa Edi Suhardjono, Jakarta PT.Gramedia
- Berry, John; Poortinga, Ype H; Segall M,H. dan Dasen, P.R (1999) *Psikologi Lintas Budaya: Riset dan Aplikasi*, Penerjemah Edi Suhardjono, Jakarta: PT Gramedia.
- Bisiach, E. Dan Luzzatti, C. (1978) "Unilateral neglect representational schema and consciousness" dalam *Cortex 14*.
- Boeree, George (2006) *Personality Theoris: Melacak Kepribadian Anda Bersama Psikolog Dunia*, Penerjemah Inyik Ridwan Mudzir, Yogyakarta: Primasophie.
- Boeree, George, (2005) *Sejarah Psikologi: dari Masa Kelahiran Sampai Masa Modern*, Penerjemah: Abdul Qodir Shaleh, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Brown, S.D. dan Lent, R.W. (1992) *Hanbook of Councelling Psychology*, Chichester.
- Cartwright, Rosalind, D. (2000) "Mimpi" dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Penerjemah Haris Munandar, dkk. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlmn. 240-242.
- Calhoun, James F. dan Acocela, Joan Ross (1990) *Psikologi Tentang Penyesuaian dan Hubungan Kemanusiaan*, Penerjemah: R.S. Satmoko, Semarang: IKIP Semarang Press.
- Chaplin J.P (1999) *Kamus Lengkap Psikologi*, Terjemahan Kartini-Kartono, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Colman, Andrew.M. (2000) "Kepribadian" dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Penerjemah Haris Munandar, dkk. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.744-746.
- Corey, Gerald (1995) *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*, Penerjemah. E. Koswara, Bandung: PT. Eresco.
- Craik, K.H. (1973) "Environmental psychology", dalam *Annual Review of Psychology*, 24, hlmn. 403-4022
- Crick, F. Dan Mitchison, G. (1983) "The Function of Dream Sleep, dalam *Nature*, 304.
- Darwin, Charles, (1964[1859) *On the Origin of Species*, Cambridge, MA: Cambridge University Press.

- Engel, J.F., Kollat, D.T., & Blackwell, R.D. (1973) *Consumer Behavior*, (edisi kedua), New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Eysenck, M.W. (1984) *A Handbook of Cognitive Psychology*, London: Routledge and Kegan.
- Feinberg, Eleanor dan Feinberg, Walter (2003) "Carl Rogers (1902-1987)", dalam Joy A. Palmer, *50 Pemikir Pendidikan: Dari Piaget Sampai Masa Sekarang*, Alih Bahasa Farid Assifa, Yogyakarta: jendela.
- Festinger, L. (1957) *A theory of cognitive dissonance*, Stanford: Stanford University Press.
- Freud S. (1962[1908]) "Creative writers and daydreaming" dalam *Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*, ed. Strachey, vol.9 London.
- Freud, Sigmund, (1920) *Beyond the pleasure principle*, New York: Bantam Books.
- Fromm, Erich, (1968) *The revolution of hope*, New York: Harper and Row.
- Fromm, Erich, (1955) *The same society*, New York: Rinehart.
- Fromm, Erich (1964) *The heart of man*, New York: Harper and Row.
- Fromm, Erich, (1947) *Man for himself*, New York: Rinehart.
- From, Erich, (1941) *Escape from freedom*, New York: Rinehart.
- Gardner, Howard. (1985) *The Mind's New Science: A History of Cognitive Revolution*, New York: Basic Books.
- Gecas, Victor (2000) "Konsep Diri" dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Penerjemah Haris Munandar, dkk. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlmn. 953-955.
- Gerungan, W.A.(2000) *Psikologi Sosial*, Bandung: Refika Aditama.
- Gruneberg, M.M. (1986) *Practical Aspects of Memory: Current Research and Issues*, Chichester.
- Gurr, Ted, R. (1970) *Why Men Rebel*, Princeton, N.J: Princeton University Press.
- Fakih, Mansour (2001) *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Fromm, Erich (1974) *Akar Kekerasan: Analisis Sosiopsikologis atas Watak Manusia*, Penerjemah Imam Muttaqin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hall, Calvin dan Lindzey, Gardner, (1993) *Psikologi Kepribadian 1, Teori-Teori Psikodinamik (Klinis)*, Terjemahan Yustinus, Yogyakarta: Kanisius.
- Hall, Calvin dan Lindzey, Gardner, (1993) *Psikologi Kepribadian 2, Teori-Teori Holistik (Organismik-Fenomenologis)*, Terjemahan Yustinus, Yogyakarta: Kanisius.
- Hall, Calvin dan Lindzey, Gardner, (1993) *Psikologi Kepribadian 3: Teori-teori Sifat dan Behavioristik*, Terjemahan Yustinus, Yogyakarta: Kanisius.
- Heimstra, N.W., & McFarling, L.H. (1974) *Environmental psychology*, Monterey, Calif: Brooks/Cole.
- Hennevin, E. dan Leconte, P. (1971) 'La fonction du sommel paradox: faits et hypotheses' dalam L'Ann. *Psychologique*, 2.
- Herriot, Peter (2000) "Psikologi Okupasional" dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Penerjemah Haris Munandar, dkk. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlmn. 713-714.
- Hirst, E.D. (1996) *The Schools We Need: Why We Don't Have Them*, New York: Doubleday, hlmn. 100-1004.
- Hurlock, Elizabeth, B. (1980) *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Alih Bahasa: Istiwidayanti dan Soedjarwo, Jakarta: Erlangga.
- Jackson, J.H. (1932) *Selected Writing of John Hughlings Jackson*, ed. J. Taylor, London: Oswald Wolf.
- Jacoby.J. (1976) "Consumer and Industrial Psychology: Prospect for Theory Corroboration and Mutual Contribution, dalam M.D. Dunnette (ed) *Hanbook of Industrial and Organizational Psychology*, Chicago: Rand McNally.
- Jaynes, J. (1977) *The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind*, New York: Academic Press, Inc.
- Johnson, Doyle Paul, (1986) *Teori Sosiologi: Klasik dan Modern*, Di-indonesiakan oleh Robert Lawang, Jakarta: PT Gramedia.
- Jones, Edward E. (2000) "Psikologi Sosial" dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Penerjemah Haris Munandar, dkk. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlmn. 996-999.

- Koffka, K. (1935) *Principles of Gestalt Psychology*, New York: Harcourt Brace.
- Kohler, W. (1929) *Gestalt Psychology*, New York: Horace Liveright.
- Krahe, Barbara (2005) *Perilaku Agresif*, Penerjemah Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kretschmer, E. (1921) *Korperbau und Charakter*, Berlin.
- LaBouvie, E.W. (1975) „Descriptive developmental research: Why only time? „, *Journal of Genetic Psychology*, 126, hlmn. 289-298.
- Leibowitz, Herschel W. (2000) ”Sensasi dan Persepsi” dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Penerjemah Haris Munandar, dkk. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlmn. 960-963.
- Lerner, Richard M. (2000) “Psikologi Konstitusional” dalam dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Penerjemah Haris Munandar, dkk. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlmn. 168-169.
- Lerner, Richard M. dan Jovanovic, J. (1990) “The role of body image in psychological development across the lifespan: a developmental contextual perspective”, dalam T.T. Cash dan T. Pruzing (eds) *Body Image: Development, Deviance, and Change*, New York; McGraw-Hill.
- Lewin, K. Lippit, R., dan White, R.K., (1939) “Pattern of Aggressive Behavior in Experimentally Created “Social Climates”, *Journal of Social Psychology* 10.
- McDougal, W. (1908) *An Introduction to Social Psychology*, London: Methuen.
- Madsen, K.B. (1991) *A History of Psychology in Metascientific Perspective*, Amsterdam: Elsevier Science Publishers, B.V.
- Maness, David (ed) (1987) *How We Learn*, Penerjemah C. Wukirsari, Jakarta: PT Tiara Pustaka.
- Maslow, Abraham, H. (1943 “A Theory of Motivation” dalam *Psychological Review*, 50, hlmn. 370-396.
- Maslow, Abraham, H. (1970) *Motivation and Personality*, Edisi Kedua, New York: Harper & Row.
- Maslow, Abraham, H. (1968) *Toward a psychology of being*. (2nd ed.), Pricenton: Van Nostrad.
- McClelland (1961) *The Achieving Society*, Pricenton, N.J: Van Nostrad Co, Inc.

- McClelland, David, C. et al. (1953) *The Achievement Motive*, New York: Appeton-Century-Cfts.
- McClelland, David C. dan Winter, D.G. (1969) *Motivating Economic Achievement*, New York: The Free Press.
- McClelland, David, C. (1992) "Is Personality Consitent"? dalam R.A. Zucker, A.I. Rabin, J.Aronof dan S.J. (eds) *Personality Structure in the Life Course: Essay of Personology in theMurray Traditions*, New York: The Free Press.
- McDougal, W. (1908) *An Introduction to Social Psychology*, London: Pergamon Press.
- Mensh, Ivan, N. (2000) 'Psikologi Klinis' dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Penerjemah Haris Munandar, dkk. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.122-123.
- Meyers, David G. (1983) *Social Psychology*, London: McGraw-Hill International Book Company.
- Miller, G.A., Galanter, E. dan Pribram, K.H. (1960) *Plans and the Structure of Human Behavior*, New York: Basic Books.
- Neisser, U. (1967) *Cognitive Psychology*, New York: Basic Books.
- Perloff, R. (1968) "Consumer Analysis" dalam *Annual Review of Psychology*, 19.
- Presbrey, F.S. (1929) *The history and development of advertising*, Garden City,N.Y.: Doubleday Doran.
- Pope, Harison G. (2000) "Psikofarmakologi" dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Penerjemah Haris Munandar, dkk. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.866-868.
- Proshanky, H.M., Ittelson, W.H., & Rivlin, L.G. (eds) (1976) *Environmental psychology: People and their physical settings (edisi kedua)* Newyork: Holt, Rinehart & Winston.
- Radfor, John (2000) "Psikologi" dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Penerjemah Haris Munandar, dkk. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.858-865.
- Reason, J. (1987) "Framework models of human performance and error: a consumer guide' dalam Goldstein, H.B.Andersom dan S.E. Olsen (eds) *Tasks, Errors and Mental Models*, London: Routledge & Kegan Paul.

- Richardson, John, T.E. (2000) "Psikologi Kognitif" dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Penerjemah Haris Munandar, dkk. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.127-129.
- Rogers, Carl. R. (1942) *Counseling and Psychotherapy: Newer Concepts in Practice*, Boston: Houghton Mifflin.
- Rogers, Carl, R. (1951) *Client-Centered therapy: Its Current Practice, Implications, and Theory*, Boston: Houghton Mifflin.
- Ross, F. A. (1908) *Social Psychology: An Outline and a Source Book*, New York: McGraw-Hill.
- Rowan, J. (1981) "A dialectical paradigm for research" dalam P.Reason and J. Rowan (eds) *Human Inquiry: A Sourcebook of New Paradigm Research*, Chichester.
- Said, M. Dan Affan Junimar (1990) *Psikologi dari Zaman ke Zaman*, Bandung: Penerbit Jemmars.
- Sarwono, Sarlito, W. (1995) *Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sheldon, W.H. (1940) *The Varieties of Human Physique*, New York: Harper.
- Siegel, A.E. (1969) "Current issues in research on early development". dalam *Human Development*, 12, hlmn.86-92.
- Singer, Jerome,L. (2000) "Fantasi" Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Penerjemah Haris Munandar, dkk. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlmn. 343-346.
- Suryabrata, Sumardi (2006) *Psikologi Kepribadian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Taylor, Maye (2000) "Psikologi Konseling/Penyuluhan" dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Penerjemah Haris Munandar, dkk. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 182-183.
- Thoha, Miftah, (1993) *Perilaku Organisasi: Konsep dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Turner, Johana, (1977) *Psychology for the Classroom*, London: Methuen.
- Valentine, E.R. (2000) "Pikiran" dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Penerjemah Haris Munandar, dkk. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 667-669.

Yuille, J.C. (1986) "The futility of a purely experimental psychology of cognition: Imagery as a case study, dalam D.F. Marks (ed) *Theories of Image Formation*, New York: Routledge.

Watson, J.B. (1925) *Behaviorism*, New York: W.W. Norton.

Wertheimer, M. (1945) *Productive Thinking*, New York: Harper & Brothers.

Winter, David (2000) "Teori Konsep Diri", dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Penerjemah Haris Munandar, dkk. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 744-745.

Wright, Michael (2000) "Kesadaran" dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Penerjemah Haris Munandar, dkk. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 164-166..

BAB X

ILMU POLITIK

A. Pengertian, Karakteristik, dan Ruang Lingkup Ilmu Politik

Istilah “politik” (*politics*) sering dikaitkan dengan bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik ataupun negara yang menyangkut proses penentuan tujuan maupun dalam melaksanakan tujuan tersebut. Di samping itu juga menyangkut pengambilan keputusan (*decisionmaking*) tentang apakah yang menjadi tujuan sistem politik yang menyangkut seleksi antara beberapa alternatif serta penyusunan untuk membuat skala prioritas dalam menentukan tujuan-tujuan itu. Namun menurut Brendan O’Leary (2000; 788) ilmu politik merupakan disiplin akademis, dikhususkan pada penggambaran, penjelasan, analisis dan penilaian yang sistematis mengenai politik dan kekuasaan. Selanjutnya dia mengemukakan bahwa ilmu politik mungkin lebih tepat diberi label “*politikologi*”, sebagaimana sesungguhnya hal ini terjadi di negara-negara Eropa, selain dikarenakan para praktisinya menolak gagasan bahwa disiplin mereka adalah seperti disiplin ilmu-ilmu alam dan juga karena disiplin itu tidak mempunyai satu bangunan teori atau paradigma yang padu. Tentu saja banyak teoretisi lainnya yang menentang pendapat tersebut. Dalam tulisan ini penulis tidak akan memperpanjang kontroversi ilmu politik tersebut.

Untuk memahami lebih jauh apa itu arti “ilmu politik” sebetulnya sangat tergantung pada dari dimensi apa ia melihatnya. Bagi kaum *institutionalis* atau *institutional approach* seperti Roger F. Soltau (1961: 4), mengatakan; “*Political science is the study of the state, its aims and purposes... the institutions by which these are going to be realized, its relations with its individual members, and other states*” (Ilmu politik adalah kajiian tentang negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain). Sedangkan J. Barents (1965: 23) mengemukakan: “*De wetenschap der politiek is de wetenschap die het leven van de staat bestudeert... een maatschappelijk leven... waarvan de staat een onderdeel vormt. Aan het onderzoek van die staten, zoals ze werken, is de wetenschap der politiek gewijd*” (Ilmu politik adalah

ilmu tentang kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat; ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya).

Berbeda dengan kelompok pendekatan kekuasaan (*power approach*), seperti Harold Laswel, W.A. Robson, maupun Deliar Noer. Laswel (1950: 240) mengemukakan: mendefinisikan ilmu politik *sebagai disiplin empiris pengkajian tentang pembentukan dan pembagian kekuasaan, serta “tindakan politik seperti yang ditampilkan seseorang dalam perspektif-perspektif kekuasaan”*. Kemudian Robson (1954; 24) mengemukakan:

Political science is concerned with the study of power in society... its nature, basis, processes, scope and results. The focus of interest of the political scientist... centers on the struggle to gain or retain power, to exercise power or influence over others, or to resist that exercise.

(Ilmu politik adalah ilmu yang memfokuskan dalam masyarakat, ... yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasilnya. Fokus perhatian seorang sarjana ilmu politik tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu).

Kemudian seorang ahli ilmu politik dalam negeri kita Deliar Noer mengemukakan: “Ilmu politik memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat (Noer, 1965: 56).

Berbeda dengan mereka kelompok yang menggunakan pendekatan pengambilan keputusan (*decisionmaking approach*) seperti Joyce Mitchell maupun Karl W. Deutsch. Mitchell (1969: 4-5) mengemukakan: *“Politics is collective decisionmaking or the making of public policies for an entire society”* (Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan publik untuk suatu keseluruhan masyarakat). Kemudian Deutsch (1970: 5) mengatakan: *“Politics is the making of decision by public means”* (Politik adalah pembuatan keputusan oleh alat-alat publik).

Selanjutnya pengertian “ilmu politik” akan berbeda pula menurut kelompok yang menggunakan pendekatan (*public policy / belied approach*), seperti Hogerwerf maupun David Easton. Hogerwerf (1972: 38-39) mengemukakan; Obyek dari ilmu politik adalah kebijaksanaan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Pengertian kebijaksanaan di sini adalah membangun secara terarah melalui penggunaan kekuasaan. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Easton (1971: 128) yang

menyatakan bahwa ilmu politik “... *study of the making of public policy*” (studi tentang terbentuknya kebijaksanaan umum).

Penjelasan yang berbeda juga datang dari kelompok ahli ilmu politik yang menggunakan “pendekatan pembagian” (*distribution approach*) yang dikemukakan Harold Laswel maupun David Easton. Laswel (1972: 128) mengemukakan bahwa “Politik adalah masalah siapa mendapat apa; kapan dan bagaimana?” Sedangkan menurut Easton, “Sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif (berdasarkan wewenang) untuk dan atas nama masyarakat (1965). Sedangkan menurut Robert Dhal (1994: 4) bahwa ilmu politik membahas tentang *hubungan manusia yang kokoh, dan melibatkan secara cukup mencolok, kendali, pengaruh, kekuasaan dan kewenangan*.

Ruang lingkup disiplin ilmu politik kontemporer sangat luas. Menurut O’leary (2000: 794) sub-bidang utama dari penyelidikan ilmu politik meliputi: (1) pemikiran politik; (2) teori politik; (3) lembaga-lembaga politik; (4) sejarah politik; (5) politik perbandingan; (6) ekonomi politik; (7) administrasi publik; (8) teori-teori kenegaraan; (9) hubungan internasional.

1. Pemikiran Politik: Sub-bidang ini merupakan akumulasi bangunan teks dan tulisan para filsuf besar yang membingkai pendidikan intelektual kepada banyak mahasiswa ilmu politik. Di antaranya karya-karya besar para pemikir sejak zaman Plato dan Aristoteles, zaman pertengahan dan awal modern karya-karya Aquinas, Augustine, Hobbes, Locke, Rousseau, dan Montesquieu, serta akhirnya buku-buku para penulis moden seperti Kant, Hegel, Marx, Tocqueville dan Mill (O’Leary, 2000: 788).

Dalam perkembangannya, norma tersebut banyak dikritik berulang kali karena dianggap bersifat “etnosentrisme”, mengingat mengabaikan tradisi filsafat non-Barat yang sudah berkiprah sebelum dan bersamaan dengan peradaban Barat serta bersifat *patriarchal* (Okin,1980; Pateman; 1988). Oleh karena itu kelompok yang menolak norma tersebut berangkat dari suatu asumsi bahwa suatu sains yang matang seharusnya melampaui asal-usulnya, dan karenanya bahwa kajian pemikiran politik harus diserahkan kepada para ahli sejarah.

Memang para penafsir pemikiran politik selalu punya alasan yang berbeda dalam hal memberikan perhatian yang rinci terhadap teks-teks klasik. Sebagian berpendapat

bahwa ilmu-ilmu klasik menyimpan kebenaran yang permanen kendati mereka berbeda pendapat dengan penulis-penulis tertentu. Dan inilah tugas pendidik untuk meneruskan kebenaran-kebenaran ini kepada generasi selanjutnya. Kelompok ini contohnya Leo Strauss yang bersikukuh bahwa ilmu-ilmu klasik mengandung kebenaran-kebenaran abadi tetapi bahwa semua itu hanya bisa diakses oleh kalangan elite yang berperadaban (O'Leary, 2000: 289).

Namun sebaliknya para ahli sejarah pemikiran politik walaupun sependapat bahwa ilmu klasik menyampaikan persoalan-persoalan yang tidak mengenal zaman, akan tetapi norma itu lebih penting untuk pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkannya daripada untuk menemukan jawaban-jawaban yang diberikannya. Sebagai contoh; “akankah manusia-manusia rasional mengenai sifat negara sependapat untuk mendirikan suatu negara, dan apabila setuju, lalu tipe yang bagaimana?” Pertanyaan tersebut akan membantu memperjelas konsepsi sifat manusia yang diasumsikan dalam pemikiran politik serta sifat kewajiban politik, legitimasi politik dan negara. Bahkan menurut Quentin Skinner, bahwa ilmu klasik sebenarnya bukan tidak kenal zaman, melainkan merupakan teks yang ditujukan kepada orang-orang yang sezaman dengan penulisnya. Selain itu juga para penulis tersebut terlibat dalam argumen-argumen politik tertentu yang relevan dengan jaman mereka sendiri (Skinner: 1985; 4-20).

Bagi mereka tugas pemikiran politik adalah untuk menemukan makna dan konteks yang asli dari wacana klasik, seringkali dengan cara memfokuskan pada para penulis yang terlupakan dan dimarjinalkan. Pendekatan kontekstual dan historis itu dikritik karena memberikan diskontinuitas radikal dalam makna dan akses abilitas teks, dan karena menyiratkan bahwa kita harus melakukan hal yang mustahil menjadi orang – orang sezaman dengan para pengarang dari teks besar itu guna memahami semuanya. Terlebih lagi pendekatan ini menjadi korban oleh perbuatan sendiri: para kritikus bertanya: “Kontroversi politik kontemporer apa yang sedang disampaikan oleh para ahli sejarah ketika mereka menawarkan bacaan-bacaan teks yang otoritatif?”

2. Teori Politik: Para ahli teori politik biasanya memiliki gaya sendiri-sendiri, kendati memiliki ciri umum yang bersifat normatif dalam orientasi teori politiknya yang telah lama berevolusi. Sebagai contoh, menurut O'Leary (2000: 789), teori politik Anglo-Amerika kontemporer, biasanya memiliki citra rasa deduktif dan analisis. Mereka

menyampaikan secara akurat dengan pendekatan logika matematika dari tema-tema dalam karya klasik. Alasan mereka sederhana, karena tugas mereka adalah untuk menjelaskan konseptual tentang makna-makna konsep kunci yang kemungkinan kontradiktif seperti; demokrasi, kebebasan, hukum legitimasi, persamaan, HAM dan sebagainya. Tetapi, perhatian utama mereka adalah pertanyaan-pertanyaan normatif seperti; ”memangnya apa sih keadilan itu”? Inilah persoalan yang paling sering muncul dewasa ini sebagaimana ditulis John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971) di mana bagi kaum liberal memuja buku ini sebagai solusi bagi ketegangan di antara kebebasan dan kesetaraan. Sebaliknya bagi kaum konservatif memandangnya sebagai tuntunan bagi pemerintah aktif, sedangkan kaum radikal memandangnya sebagai ekspresi ideologis tentang negara kesejahteraan liberal (Losco dan Williams, 2005: 991).

Meski demikian apapun perspektif orang, *A Theory of Justice* tidak pernah dipandang sebagai satu edisi filosofi akademis yang tak melahirkan inspirasi. Bahkan, *A Theory of Justice*, sering kali diakui sebagai yang menyegarkan kembali filosofi politik Anglo-Amerika dan memperbaharui kepedulian terhadap konsep-konsep keadilan, kebebasan, dan kesetaraan, kontrak sosial. Ini semuanya telah diperkenalkan Hobbes, Locke, dan Rousseau untuk menanyakan prinsi-prinsip keadilan apa yang diambil oleh para individu rasional di balik ”tudung kebodohan” (*veil of ignorance*) di mana mereka tidak akan mengetahui posisi apa dalam masyarakat yang akan mereka duduki nantinya. Dengan tangkas Rawls menjawab bahwa individu yang rasional akan memegang prinsip kemerdekaan yang sama bagi semua, prinsip meritokrasi, persamaan kesempatan, dan ”prinsip perbedaan: yang membenarkan ketidaksamaan dalam pendapatan dan sumber sumber-sumber daya, hanya apabila mereka lebih baik dalam keadaan yang paling buruk. (O’Leary, 2000: 789).

3. Lembaga-lembaga Politik, yang merupakan kajian terhadap lembaga-lembaga politik khususnya peranan konstitusi, eksekutif, birokrasi, yudikatif, partai politik dan sistem pemilihan, yang mula-mula mendorong pembentukan formal jurusan-jurusan ilmu politik di banyak niversitas pada akhir abad ke-19 (Miller, 2003: 790). Sebagian besar mereka tertarik pada penelusuran asal-usul dan perkembangan lembaga-lembaga politik dan memberikan deskripsi-deskripsi fenomenologis; memetakan konsekuensi-konsekuensi formal dan prosedural dari institusi-institusi politik.

Banyak para ahli politik kontemporer yang menghabiskan waktunya untuk memonitor, mengevaluasi, dan menghipotesiskan tentang asal-usul, perkembangan dan konsekuensi-konsekuensi lembaga-lembaga politik, seperti aturan-pluralitas sistem pemilihan atau organisasi-organisasi pemerintahan yang semu. Namun sebagian lagi mereka kurang toleran dan mengklaim bahwa mereka terlibat dalam deskripsi-deskripsi tebal hanya karena mereka memang ilmuwan politik yang handal, bukan yang kebanyakan ada. Dalam hal ini, kritikus-kritikus seperti itu merasa skeptis terhadap kegiatan-kegiatan kolega mereka yang merupakan sekedar spesialis-spesialis wilayah atau administrasi publik pada suatu negara, walaupun mereka mungkin memberikan data penting untuk ilmu politik, tetapi mereka sendiri bukanlah praktisi yang ilmiah (O'Leary, 2000: 790).

4. Sejarah Politik: Banyak para ilmuwan politik yang menjelaskan tentang sejarah politik walaupun sering bias terhadap sejarah kontemporer. Pada umumnya mereka percaya bahwa tugas ilmuwan politik menawarkan penjelasan-penjelasan retrodiktif bukannya prediksi-prediksi yang kritis dan sangat deskriptif. Mereka yakin bahwa kebenaran terletak pada arsip-arsip pemerintah (O'Leary, 2000: 790).

Selain itu secara garis besar, politik cenderung terbagi dua kubu: *Pertama; high politics* (politik tinggi), yaitu yang mempelajari perilaku politik para pembuat keputusan elit; mereka percaya bahwa kepribadian dan mekanisme para elit politik adalah kunci pembuat sejarah. Mereka juga percaya bahwa perluasan kekuasaan dan kepentingan diri dapat menjelaskan perilaku sebagian besar kaum elit. *Kedua, low politics* (politik bawah), atau politik dari bawah. Mereka percaya bahwa perilaku politik massa memberikan kunci untuk menjelaskan episode-episode politik utama seperti halnya beberapa revolusi yang terjadi. Selain itu bagi mereka kharisma, plot, maupun blunder para pemimpin kurang begitu penting dibanding dengan perubahan nilai-nilai kepentingan dan tindakan kolektivitas (O'Leary, 2000: 790).

5. Politik Perbandingan; merupakan asumsi dari para ilmuwan politik bahwa fokus perbandingan memberikan satu-satunya cara untuk menjadi ilmu sosial murni. Sebab bagi ilmuwan politik dalam pandangannya bahwa ilmu politik berkaitan dengan upaya membangun hukum-hukum universal atau generalisasi-generalisasi yang bisa memberikan penjelasan-penjelasan fenomena politik yang tepat dan teruji.

Lembaga-lembaga politik perbandingan telah berkembang menjadi suatu disiplin yang meliputi; konstitusi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif — baik di dalam dan luar negeri — untuk kemudian dijelaskan perbedaan-perbedaan dalam cara di mana persoalan-persoalan politik diproses dan diatasi.

Sebenarnya analisis perbandingan politik tersebut berkembang sebagai bagian dari gerakan behaviorisme ilmu sosial yang mengkritik sifat formalistik dan legalistik dari ilmu politik yang institusional (kelembagaan) tahun 1950-an dan 1960-an. Sebab analisis-analisis konstitusional, legal dan formal seringkali mempunyai sedikit dukungan empiris yang substansial. Ia mencoba menguji dan menghitung proposisi tentang perilaku massa dan politik elite. Dengan perubahan pendekatan behavioristik disertai dengan penelitian kuantitatif yang tepat tentang sistem pemilihan dan perilaku pemilihan, keberfungsian partai-partai politik dan sistem partai, serta pembuatan kebijakan umum dapat dikaji secara tepat.

6. *Ekonomi Politik*; sub-bidang ini bertolak dari suatu pemikiran bahwa teori-teori perilaku politik sebagaimana teori-teori perilaku ekonomi, harus bermula dari premis sederhana tentang manusia yang suka membangun prediksi-prediksi dari perilaku mereka. Bagi para eksponen pilihan rasional, pengujian suatu teori yang baik terletak pada daya prediksinya, dan bukan pada kebenaran asumsi-asumsinya. Di sinilah letak hubungan ilmu politik dan ekonomi, di mana manusia tidak pernah puas menggapai kepentingan diri yang rakus tersebut. Pemikiran yang demikian telah menggerakkan literatur yang ekstensif, misalnya, tentang ekonomi politik lingkaran bisnis, di mana para ahli teori mencoba memprediksi bagaimana para politisi memanipulasi alat-alat ekonomi untuk membangun atau menciptakan dukungan politik (Tufte, 1978).

Secara umum para ahli ekonomi politik mencari penjelasan bagi fenomena politik dan ekonomi. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti; “siapa yang diuntungkan?” dan “siapa yang membayar?” dalam mencari penjelasan-penjelasan hasil politik. Investigasi pilihan rasional terhadap ekonomi politik domestik dilengkapi dengan kajian ekonomi politik internasional yang berusaha memadukan disiplin politik dan ekonomi seperti pada kajian-kajian organisasi-organisasi ekonomi internasional misalnya GATT, NAFTA, Uni Eropa, ASEAN dan sebagainya (O’Leary, 2000: 793).

7. *Administrasi Publik dan Kebijakan Umum:* Administrasi Publik dan Kebijakan Umum, kedua-duanya merupakan cabang empiris dan normatif dari ilmu politik yang tumpang-tindih dengan hukum dan ekonomi. Mengapa demikian? Karena administrasi publik memusatkan perhatiannya pada susunan institusional provisi pelayanan publik, dan secara historis berkenaan dengan kepastian administrasi yang bertanggung-jawab dan adil, sedangkan para ahli kebijakan publik menganalisis formasi dan penerapan kebijakan-kebijakan, serta memberikan manfaat normatif dan empiris terhadap argumen-argumen yang digunakan untuk menjustifikasi kebijakan-kebijakan tersebut.

Kedua bidang tersebut, tidak mempunyai satu pendekatan dominan; di mana para eksponen pluralisme, behaviorisme, pilihan rasional, Marxisme, dan feminisme, ternyata terlibat dalam perdebatan dengan para institusionalis yang mengambil inspirasi mereka dari sosiolog Max Weber. Pada tataran analisis kebijakan publik konvensional, khususnya di negara-negara Barat merupakan suatu kuantitatif, yang dipengaruhi oleh ilmu ekonomi, analisis keputusan, serta kebijakan sosial. Oleh karena itu masalah pokok pada bidang ini adalah; perumusan, penerapan, dan penilaian terhadap kebijakan publik. Selain itu juga para spesialis kebijakan publik, menguji siapa yang mempunyai kekuasaan untuk mengajukan proposal kebijakan pada agenda, seperti; para pemilih, kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok etnis, organisasi-organisasi profesi, kelas-kelas dominan, partai-partai politik, media massa; bagaimana kebijakan-kebijakan itu dibuat, dan mengeksekusi pejabat-pejabat yang terpilih dan tidak terpilih. Di sini para ahli kebijakan publik perbandingan, berusaha agar para ilmuwan sosial berupaya mengokohkan keteraturan sosial.

8. *Teori-teori Kenegaraan.* Teori ini sering diduga merupakan teori politik yang paling padu dalam memberikan perhatian bagi teori politik kontemporer, pemikiran politik, administrasi publik, kebijakan publik, sosiologi politik, dan hubungan internasional (O'Leary, 2000: 794). Hal ini dapat dipahami mengingat kebanyakan ilmu politik kontemporer memfokuskan pada organisasi negara dalam sistem demokrasi liberal. Dalam hal ini demokrasi liberal, sebagai bagian dari jawaban terhadap perkembangan kegiatan negara dalam demokrasi kapitalis Barat, yang pada abad ke-20 telah terlihat fungsi-fungsi negara melebar melampaui inti minimal — pertahanan,

keteraturan dan pembuatan-hukum serta perlindungan terhadap agama dominan — hingga meliputi manajemen dan regulasi ekonomi serta sosial yang ekstensif (O’Leary, 2000: 795).

Dalam kaitannya dengan bangunan pemikiran tersebut, terdapat dua masalah tentang demokrasi. *Pertama*, hingga tingkat mana negara demokrasi dikontrol oleh rakyatnya. Untuk menjawab persoalan tersebut bahwa negara dikontrol oleh masyarakatnya, atau setidaknya tidaknya dikontrol oleh orang yang paling kuat di masyarakatnya. Sedangkan yang *kedua*, negara cukup otonom sehingga bisa mengarahkan kembali ke tekanan yang datang dari masyarakatnya ataupun yang paling kuat dalam masyarakatnya.

9. Hubungan Internasional; sebetulnya jika hubungan antar negara merupakan hubungan internasional, jelas istilah tersebut sangat menyesatkan bagi sub-disiplin ilmu politik yang memfokuskan pada hubungan lintas negara dan inter-negara dalam diplomasi, transaksi ekonomi, serta perang maupun damai. Asal-usul hubungan internasional terdapat dalam karya para teolog, yang mengajukan argumen tentang kapan dan bagaimana perang itu dianggap adil, seperti karya Grotius, Pufendorf, dan Vattel, yang mencoba menyatakan bahwa ada hukum bangsa-bangsa yang sederajat dengan hukum domestik negara-negara, dan karya-karya para filsuf politik seperti Rousseau dan Kant, yang membahas kemungkinan perilaku moral dalam perang dan kebutuhan akan tatanan internasional yang stabil dan adil (O’Leary, 2000: 794).

Sub-bidang ilmu politik ini memfokuskan pada masalah-masalah yang beragam menyangkut organisasi-organisasi internasional, ekonomi-politik internasional, kajian perang, kajian perdamaian, dan analisis kebijakan luar negeri. Namun secara normatif terbagi dalam dua mazhab pemikiran yaitu pemikiran idealis dan pemikiran realis. Pemikiran idealis mempercayai bahwa negara dapat dan harus melaksanakan urusan-urusan mereka sesuai dengan hukum dan moralitas serta kerjasama fungsional lintas batas negara membentuk landasan bagi perilaku moral. Sedang dalam mazhab realis sebaliknya; mereka percaya bahwa negara pada dasarnya amoral dalam kebijakan luar negerinya; hubungan antar negara diatur bukannya oleh kebaikan tetapi kepentingan; perdamaian adalah hasil dari kekuasaan yang seimbang, bukannya tatanan normatif dan kooperatif fungsional (O’Leary, 2000: 794).

Beberapa bidang kajian ilmu politik secara tematik yang berkembang dewasa ini demikian luas dan banyak ragam, seperti; (1) *psikologi politik*; (2) *pluralisme politik*; (3) *budaya politik*; (4) *ekonomi politik*; (5) *antropologi politik*; (6) *politik etnik*; (7) *rekrutmen politik*; (8) *partai politik*; (9) *perwakilan politik*; (10) *birokrasi politik*.

Pertama, Psikologi Politik (Political Psychology); merupakan bidang interdisipliner yang relatif baru, dan lahir tahun 1950-an yang ditandai dengan *rapprochement*-nya ilmu-ilmu sosial khususnya ilmu politik dan psikologi. Adapun tujuan substantif dasarnya adalah untuk menyingkap saling keterkaitan antara proses-proses psikologi dan politik (Renshon, 2000: 784). Bidang ini mempunyai sumber dari berbagai disiplin keilmuan, seperti antropologi budaya dan psikologi, psikologi ekonomi, sosiologi, psikologi, serta ilmu politik. Dalam kajiannya, biasanya untuk psikologi lebih banyak menggunakan teori psikoanalisis, teori kepribadian, psikologi sosial, psikologi perkembangan, dan psikologi kognitif. Sedangkan dari sisi lain menggunakan kajian-kajian pendekatan ilmu politik, terutama perilaku politik massa, kepemimpinan politik dan pengambilan keputusan, serta konflik politik di dalam dan antar bangsa.

Kemudian pada tingkatan metodologis, psikologi politik ini baik alat pengumpul data maupun analisisnya sangat beragam. Kajian-kajian kasus yang intensif, metode survei, dan eksperimentasi serta analisis kelompok kecil, adalah sebagian dari alat-alat empiris utama yang banyak digunakan dalam berbagai perspektif teoretis. Beberapa studi kasus pemimpin tertentu, seperti pemimpin revolusi, pemimpin partai, presiden, perdana menteri, banyak menggunakan teori psikoanalisis seperti yang dilakukan Erik Erikson dalam *Young Man Luther* (1958) dan *Gandhi's Truth* (1970), Wolfenstein dalam *The Revolutionary Personality: Lenin, Trotsky, Gandhi*, (1967), maupun Erich Fromm dalam *The anatomy of Human Destructiveness* (1974), telah meningkatkan khasanah pengetahuan kita terhadap analisis kepemimpinan terutama dari aspek psikoanalisis-politik tersebut. .

Kedua, Pluralisme Politik (Political Pluralism), adalah perspektif normatif dalam ilmu politik modern yang menekankan pentingnya demokrasi dan kebebasan mempertahankan pluralitas organisasi-organisasi politik dan ekonomi yang relatif otonom (Russel, 2000: 769). Sebab kaum pluralis percaya bahwa dalam masyarakat berskala besar, persaingan dalam kepentingan-kepentingan ekonomi dan perbedaan pandangan-

pandangan politik adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Jadi berbeda dengan pandangan Marxis, kaum pluralis politik tidak percaya bahwa pembelahan politik yang penting ini terutama seharusnya berkaitan dengan kelas. Selain itu mereka juga tidak percaya bahwa sumber konflik politik bisa dihapuskan dengan meletakkan alat-alat produksi di bawah kepemilikan umum. Untuk itu agar sistem pemerintahan menjadi demokratis, maka pluralitas politik bersikeras harus ada lembaga-lembaga sebagai saluran kepentingan-kepentingan yang berbeda dengan mengartikulasikan pandangan-pandangannya itu.

Robert Dahl dalam *Dilemmas of Pluralist Democracy*, (1982) percaya bahwa ketimpangan atau ketidakadilan dalam distribusi sumber-sumber politik bisa berarti sebagian kepentingan atau kelompok sosial dalam demokrasi liberal memiliki lebih banyak kekuasaan dan pengaruh daripada yang lain. Dengan demikian seorang pluralis politik menganjurkan kebijakan-kebijakan redistributif untuk mengurangi ketimpangan-ketimpangan politik. Akan tetapi berapapun ketimpangan-ketimpangan itu, kaum pluralis masih dihadapkan pada dilema seberapa banyak otonomi harus diberikan kepada kelompok-kelompok pandangannya yang berbeda-beda itu dengan kelompok mayoritas. Di sinilah menurut Lijphart dalam *Democracy in Plural Societies* (1977) federalisme mungkin dianggap suatu alternatif, di mana perbedaan-perbedaan masyarakat yang signifikan dapat disesuaikan dan dicarikan konsensus yang ditarik dari segmen-segmen budaya atau ideologi utama yang bersangkutan.

Ketiga, Budaya politik; istilah 'budaya politik' (*political culture*) untuk pertama kali muncul pada tahun 1950-an (Almond, 1956), yang penelitian empiris substansialnya mulai muncul pada tahun 1960-an. Pada umumnya konsep 'budaya politik' itu berkaitan dengan "ketidakpuasan baik terhadap pandangan politik yang mengabaikan masalah-masalah makna dan kebudayaan; maupun terhadap pandangan kultural yang mengabaikan isu-isu politik dan kekuasaan" (Welch, 1993). Menurut Brown (2002: 779), definisi-definisi budaya politik pada umumnya dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok definisi. Definisi kelompok *pertama*, kelompok yang membatasi cakupan budaya politik pada orientasi subyektif bangsa-bangsa, kelompok-kelompok sosial atau individual hingga politik. Kelompok ini beranggapan bahwa budaya politik sebagai "sistem keyakinan-keyakinan empiris, simbol-simbol dan nilai-nilai ekspresif yang menentukan situasi di mana tindakan politik terjadi (Verba, 1965). Dalam arti budaya

politik sebagai persepsi subyektif tentang sejarah dan politik, keyakinan dan nilai-nilai mendasar, lokus identifikasi dan loyalitas, serta pengetahuan dan harapan-harapan politik yang merupakan produk dari pengalaman sejarah khusus dari bangsa atau kelompok (Brown, 1977). *Kedua*; kelompok yang memperluas konsep itu sehingga meliputi pola-pola perilaku politik. Dalam hal ini dapat dianalogikan bahwa 'budaya politik' sebagai matriks sikap dan perilaku di mana sistem politik berada (White, 1979). Dalam pengertian yang kedua ini, konsep psikologis demikian melekat, sehingga terjadi perpaduan erat dengan antropologi sosial dan budaya.

Pada tahun 1990, diluncurkan keseluruhan seri buku berjudul "*Political Cultures*" (Budaya-budaya Politik), dengan penyunting umum Aron Wildavsky. Dalam buku tersebut gagasan utamanya adalah bahwa "budaya politik secara luas menjelaskan orang-orang yang menganut nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan pilihan-pilihan yang melegitimasi jalan hidup yang berbeda-beda", tetapi ia menekankan "keterbukaan terhadap berbagai pendekatan dalam kajian budaya politik". Berbeda dengan kajian-kajian yang dilakukan tahun 1960-an, para penulis saat ini menekankan berbagai budaya politik yang ditemukan dalam masing-masing negara/bangsa, mengalihkan titik perhatian dari perbedaan antara bangsa-bangsa kepada perbedaan-perbedaan di dalam bangsa-bangsa. Hal ini sejalan dengan pendapat Welch (1993) bahwa "lingkungan sosial di mana gerakan orang-orang terbentuk dan diberi makna oleh mereka,". Lebih jauh Welch juga mengemukakan bahwa "budaya" bukanlah seperangkat kenyataan di mana budaya politik merupakan sebuah subyek; ia adalah proses, dan 'budaya politik' mengacu kepada proses tersebut dalam aspek politiknya.

Keempat, Ekonomi Politik. Istilah 'ekonomi politik' (*political economy*), mulai digunakan secara umum pada abad ke-18, yang dapat diartikan sebagai cara-cara yang digunakan pemerintah untuk mengatur perdagangan, pertukaran, uang dan pajak yang sekarang disebut 'kebijakan ekonomi' (Sutcliffe, 2000). Sekarang ini 'ekonomi politik' menjadi suatu profesi akademis yang diakui semakin dipandang sebagai sains. Bahkan di beberapa universitas seperti di Skotlandia misalnya, masih merupakan istilah yang biasa digunakan untuk mengacu kepada 'ilmu ekonomi' (*economics*). Akan tetapi di bawah pengaruh W.S. Jevons (1879; 1905) dan Alfred Marshal (1890), bahwa 'ilmu ekonomi' sebagian besar telah menggantikan 'ekonomi politik' di akhir abad sembilan belas.

Pembedaan antara 'ekonomi politik' (ilmiah) dan 'ilmu ekonomi' (vulgar) ini telah menjadi konstanta dalam pemikiran ekonomi yang kritis, khususnya Marxis. Namun betul-betul terdapat perbedaan saat ketika kosa kata itu memiliki nilai penting. Ketika kebangkitan analisis ekonomi Marxis di Barat akhir tahun 1950-an, istilah ekonomi politik sebagai semacam simbol saja, yang kemudian perbedaan itu semakin longgar, di mana acapkali sekedar menunjukkan analisis ekonomi yang memperkenalkan faktor-faktor non-ekonomi khususnya politik (Sutcliffe, 2000: 782). Tetapi juga pengertian yang lebih longgar ini telah menimbulkan daya tarik sendiri. Sejak tahun 1980, istilah ekonomi politik telah menyebar pada skala yang belum pernah terjadi, di mana sebagian kehilangan hubungannya dengan Marxisme seperti yang dinyatakan Gilpin dalam *Political Economy of International Relations* (1987). Namun di lain pihak sebagian pakar ekonomi, tanpa menjelaskan apa yang mereka lakukan sebagai 'ekonomi politik' telah semakin peduli dengan jenis-jenis persoalan yang menyibukkan para pakar ekonomi politik klasik, seperti hubungan antara pola upah dan sistem buruh serta profitabilitas modal seperti yang dikemukakan Bowles dalam tulisannya *The Production Process in A Competitive Economy* (1985). Maka dengan cara-cara seperti ini perbedaan antara 'ekonomi politik' dan 'ilmu ekonomi' kembali menjadi semakin kabur.

Kelima, Antropologi Politik (Political Anthropology); bidang ini membahas perkembangan struktur politik masyarakat secara evolusioner, dari kebidaban melalui barbarisme menuju peradaban, muncul dari masyarakat sipil menuju masyarakat politik berdasarkan batas wilayah dan kekayaan, kajian tentang *subaltern*, hubungan kepercayaan, kesenian dengan kekuasaan, hubungan problematik antropologi dengan kolonialisme, nasionalisme, pemberontakan petani, kelas dan gender, bahkan hubungan kekuasaan dengan pengetahuan (Vincent, 2000: 778).

Studi tentang antropologi politik tersebut, diawali oleh tulisan Morgan dalam *The League of the Ho-de-ne-sau-nee, or Iroquis* (1851) dan *Ancient Society* (1877) tentang susunan kemasyarakatan dan kekerabatan orang Iroquois, sebagai etnografer politik pertama. Kemudian disusul oleh sejumlah antropolog dan tulisannya, seperti; Meyer Forted dan E.E.Evans-Pitchard dalam *African Political System* (1940) yang membedakan antara masyarakat negara, masyarakat tidak bernegara, serta masyarakat gerombolan. Selanjutnya Talal Asad menulis *Anthropology and Colonial Encounter* (1973),

menggiring perhatian kita kepada hubungan problematik antropologi dengan kolonialisme Inggris. Lain lagi dengan Bailey yang menulis tentang *Stratagems and Spoils: A Social Anthropology of Politics* (1980), ia mencurahkan gagasan-gasannya tentang peranan kasta di India, desa dan politik pemilihan untuk memahami politik mikro. Sedangkan Michel Facoult dalam tulisannya *The Arkheology of Knowledge* (1969) dan *The Order of Things: An Arkheology of Human Sciences* (1973) membahas tentang mekanisme kekuasaan dan hubungan kekuasaan dengan pengetahuan, menghentikan involusi dan keterlibatan perdisiplinan dan sub-bidang spesialisasi dalam jejak-jejaknya.

Keenam, Politik Etnik, merupakan bidang politik yang dapat dibangkitkan oleh ketidakpuasan sekelompok anggota masyarakat yang terkonsentrasi dalam suatu daerah, dengan menuntut otonomi yang lebih besar atas daerah kediaman mereka, atau perwakilan yang lebih memadai pada pemerintah pusat; atau oleh kelompok-kelompok pendatang yang menghendaki akses yang lebih memadai dalam pembuatan keputusan, yang terkadang dikombinasi oleh tuntunan pengakuan dan dukungan pemerintah terhadap institusi-institusi budayanya. Berbagai inisiatif seperti itu seringkali memicu tumbuhnya tuntutan serupa dari kelompok-kelompok etnik lain yang merasa terancam oleh tuntutan-tuntutan tersebut atau dari aparat negara yang berkepentingan dengan pemeliharaan status quo (Esman, 2000: 308).

Di era sekarang ini politik etnik selalu mempengaruhi stabilitas pemerintah mapun negara, karena pemerintah/negara menjadi pihak yang mengalokasikan nilai-nilai yang berkaitan dengan dengan kekuasaan, status, kemakmuran, serta kesempatan hidup kelompok-kelompok etnik dan anggota-anggotanya. Nilai-nilai yang dipertaruhkan dapat bersifat politis, misalnya saja penguasaan wilayah, kewarganegaraan, hak pilih, peluang untuk menjadi pemimpin pejabat pemerintah, dan memegang simbol atau lambang negara, dan sebagainya. Dalam hal ini menurut Esman (2000:308) untuk mengatur/mengelola konflik-konflik etnis, aparat pemerintah/negara dapat melakukan tiga jenis strategi; *Pertama*, mempertahankan kemajemukan melalui dominasi kekuasaan kelompok-kelompok etnik atau melalui konsensus seperti federalisme atau pembagian kekuasaan; *Kedua*, memperkecil pluralisme melalui pembasmian ras, pengusiran atau asimilasi yang dipaksakan; *Ketiga*, mengurangi solidaritas etnik dengan menumbuhkan afiliasi silang,

mengurangi legitimasi organisasi etnik dan pesan-pesan etnis, serta menekan partisipasi perorangan dalam dunia ekonomi dan politik.

Ketujuh, Rekrutmen Politik, adalah melihat, mempelajari peristiwa-peristiwa politik dengan cermat tentang bagaimana para partisipan atau peserta sampai terakomodir dalam suatu keanggotaan institusi politik, dari mana asal mereka, dan dengan jalan apa saja, serta gagasan-gagasan, keterampilan-keterampilan yang dipersyaratkan serta hubungan-hubungan yang mereka peroleh atau mereka korbakan. Dengan demikian rekrutmen politik merupakan suatu proses pertahanan sistem yang dilembagakan, yang sebagian besar dipelajari melalui sistem pemagangan (*apprenticeship*). Perspektif karir setiap generasi dibentuk oleh prioritas-prioritas baru pada ketrampilan dan pengetahuan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan yang berubah dan oleh contoh-contoh kinerja, baik dan buruk, yang mendahului mereka di tangga politik, berdasarkan kriteria penyaringan yang dianggap baku oleh elite politik (Marvik, 2000: 786).

Dalam hal ini partai politik mengontrol batas-batas berisiko tinggi yang membedakan tokoh lokal, fungsional, translokal, karir legislatif, karir birokrasi /pemerintah, maupun karir kementerian, dalam *setting* institusional tertentu, atau di wilayah geografis tertentu, dengan mempertimbangkan cukup serius dari para aspiran yang memenuhi beberapa persyaratan. Biasanya dalam rekrutmen dan karir politik, pada setiap negara dan masa (waktu), akan ada perbedaan-perbedaan relatif dan signifikan, tergantung dari banyak variabel yang mempengaruhinya; kedewasaan dan intelektualitas lembaga, visi dan misi organisasi, serta mekanisme kerja organisasi, sampai sumber-sumber daya politik yang perlu diperoleh dan dipertahankan. Sebagai contoh, dalam hal ini Marvik (1977), sangat menekankan dinamika kepribadian yang ditonjolkan: seperti motif-motif pribadi yang dirasionalisasikan dalam pengertian tujuan-tujuan publik. Kemudian Eldersveld dalam karyanya *Political Parties: A Behavioral Analysis* (1964), lebih menekankan suatu pola-pola yang labil dan kompleks namun adaptif dalam rekrutmen dan karir politik dari motivasi-motivasi aktivis.

Kedelapan, Partai Politik (political party), merupakan suatu istilah yang sebenarnya sampai sekarang belum memiliki kata sepakat tentang apa itu 'partai politik'. Definisi yang paling awal muncul pada abad ke-19 dan mungkin bisa disebut sebagai definisi terbaik, di mana 'partai politik diartikan: *suatu organisasi yang berusaha*

memenangkan jabatan publik dalam suatu persaingan di daerah pemilihan dengan satu atau lebih organisasi serupa (Lijphart, 2000: 731). Namun definisi tersebut memiliki masalah mengingat masih merupakan definisi sempit. Sebagaimana dikatakan Schlesinger dalam karyanya *Party Unit* (1968) bahwa definisi tersebut tidak mengikutsertakan tiga jenis organisasi yang biasanya menjadi acuan sebagai partai politik, yakni: *Pertama*, organisasi-organisasi yang terlalu kecil tidak dapat membuat perubahan-perubahan yang realistis untuk memenangkan jabatan publik, terutama posisi eksekutif, walaupun tetap mencalonkan kandidat dan berpartisipasi dalam kampanye pemilihan, *Kedua*, partai yang revolusioner, biasanya bertujuan untuk menghilangkan pemilihan yang kompetitif. *Ketiga*, merupakan kelompok-kelompok yang memerintah dalam pemerintah yang otoriter maupun totaliter biasanya hanya memiliki satu partai politik.

Selain itu timbul persoalan lainnya terutama untuk membedakan antara sistem bipartai maupun multipartai, khususnya tentang 'partai politik' dan 'kelompok kepentingan' yang kadang-kadang juga mengajukan kandidatnya untuk jabatan publik tanpa menjadi partai politik. Dari kebingungan di sini, Lijphart (2000: 732) menawarkan kemunculan dua kriteria. *Kriteria pertama* menitik beratkan pada seberapa luas kepentingan-kepentingan yang diwakili oleh partai politik dan kelompok kepentingan. Sebagaimana kita ketahui, fungsi kelompok kepentingan biasanya menyuarakan kepentingan-kepentingan, sedangkan partai politik melayani tugas-tugas agregasi dari berbagai kepentingan yang diartikulasikan tersebut (Almond, 1960). *Kriteria kedua*, diajukan oleh Blondel dalam *An Introduction to Comparative Government* (1969), merupakan suatu kombinasi antara berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh partai politik dan kelompok kepentingan serta tipe-tipe keanggotaannya. Di mana, kelompok kepentingan cenderung memiliki karakter yang promosional atau protektif, di mana cenderung menampilkan sudut pandang yang spesifik (seperti masalah hukuman mati, lingkungan) yang terbuka untuk semua. Pemahaman 'protektif' biasanya berkaitan dengan asosiasi perdagangan maupun veteran. Sedangkan partai politik bisa promosional protektif maupun penanggulangan isu-isu tunggal seperti kelompok minoritas dan isu-isu mendesak lainnya.

Kesembilan, Perwakilan Politik (political representation); menurut Tournon (2000: 919) sejarah representasi/perwakilan politik adalah sejarah kebangkitan Eropa, melalui transformasi dari *sovereign's councillors* (kedaulatan para penasihat) menjadi *sovereign assembly* (kedaulatan majelis). Beberapa kerajaan Eropa di abad pertengahan biasanya meminta nasihat dari orang-orang yang dipilihnya atas dasar kompetensi dan kepercayaan. Tetapi karena raja menghendaki orang-orang ini memberi laporan tentang semua wilayah, menyampaikan perintah raja, serta menarik pajak untuk diterima orang-orang "mereka", maka raja cenderung memilih mereka dari keluarga bangsawan dan agamawan. Namun dalam perkembangannya kaum bangsawan dan agamawan tersebut bertindak sebagai suatu majelis atas nama rakyat, dan berbicara atas namanya sendiri (Toumon, 2000: 919). Otoritas perwakilan ini tidak sekedar legitimasi politik, tetapi juga kekuasaan telah mengalami pergeseran yang makin mengukuhkan kekuasaan mereka. Dengan demikian yang berdaulat adalah bukan raja, melainkan parlemen.

Kesepuluh, Birokrasi Politik (Bureaucratic Polity); istilah 'birokrasi' (*brreucracy*) menurut Baron de Grimm, mengemukakan

M de Gornay... tulis Baron de Grimm, filsuf Prancis, dalam sebuah surat tertanggal 1 Juli 1764, dahulunya acapkali... menemukan empat atau lima bentuk pemerintahan di bawah judul '*bureucracratie*'. Dalam bahasa Italinya *burocrazia*, bahasa Jermannya *Bureakratie* (sebelumnya *Burokratie*), dan bahasa Inggrisnya '*bureucracy*' (Albrow, 1970).

Samapai sekarang, makna kata tersebut masih agak kabur, memiliki kadar emosi dan konotasi yang kuat. Kadang-kadang 'birokrasi' diartikan sebagai upaya efisiensi pemerintah, namun kadang-kadang sebaliknya, yakni pelayanan pemerintah yang berbelit-belit. Walaupun kekaburan ini nampak, namun masih dalam koridor permukaan yang tidak nyata. Sebab ada dua unsur yang sudah disepakati, yakni bahwa *pertama*, birokrasi adalah pemerintah oleh pegawai, dan merupakan suatu bentuk khusus organisasi (Nelson, 2000: 74). *Kedua*, pandangan yang berasal dari pandangan Weber, bahwa birokrasi adalah organisasi untuk menerapkan wewenang legal, suatu pemerintahan berdasarkan hukum, dan bukan berdasarkan manusia. Dengan demikian organisasi birokrasi merupakan sejumlah jabatan atau instansi yang kekuasaan, wewenang, dan tugasnya didefinisikan secara jelas.

Dilihat dari sejarahnya, masyarakat politik birokrasi (*bureaucratic polity*) untuk pertama kalinya konsep tersebut diteliti oleh Fred Riggs dalam karyanya *Thailand: The Modernization of Bureaucratic Polity* (1966), untuk menerangkan sistem politik di Thailand pada tahun 1966. Selanjutnya *bureaucratic polity* tersebut diteliti oleh Karl D. Jackson di Indonesia dalam tulisannya *The Implication of Structure in Indonesia* (1978). Masyarakat politik birokrasi ini disebutnya sebagai satu bentuk sistem politik di mana kekuasaan dan partisipasi politik dalam membuat keputusan terbatas sepenuhnya pada penguasa negara, terutama pada perwira militer dan pejabat tinggi birokrasi (Jackson 1978: 3). Selanjutnya Jackson mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat birokratik tersebut dalam tiga karakteristik. *Pertama*, lembaga politik yang dominan adalah aparat birokrasi. *Kedua*, lembaga-lembaga politik lainnya, seperti parlemen, partai politik, dan *interest-group* semuanya lemah dan tidak mampu melakukan "balance" serta kontrol kepada birokrasi. *Ketiga*, massa di luar birokrasi secara politis dan ekonomis pasif, yang merupakan sebab terpenting lemahnya peranan partai politik, dan secara timbal balik menguatkan peranan birokrasi.

B. Pendekatan, Metode, Teknik, Ilmu Bantu, dan Ragam Penelitian Ilmu Politik

1. Pendekatan

Dalam kajian ilmu politik dapat digunakan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Seperti yang sebelumnya telah dikemukakan bahwa dalam pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung, yang bersifat deskriptif analitik, menekankan proses, bersifat induktif, dan menurut W.R.Torbert sering disebut sebagai '*collaborative inquiri*' (Torbert, 1981: 141-151)

Sedangkan pendekatan kuantitatif mencoba untuk memelihara diri mereka dari pengaruh koleksi data. Instrumennya yang variasi seperti; *psychometric* yang dibentuk mapan seperti melalui tes, menguji dan menstandarisasi daftar observasi maupun wawancara terbuka maupun tertutup, menggunakan metode statistik untuk meneliti data dan menyimpulkan sebagai hasil penelitian. Dengan kata lain, peneliti kuantitatif mencoba ke hal-hal obyektif, artinya yang mereka ingin kembangkan suatu pemahaman

dunia sebagaimana adanya "di luar sana", tidak terikat pada penyimpangan pribadi mereka, nilai-nilai, dan pikiran-pikiran tentang keistimewaan sesuatu yang diteliti serta bersifat deduktif (Borg dan Gall, 1989: 23-24).

2. Metode

Semakin tepat kita menggunakan metode dan teknik dalam ilmu politik akan semakin baik dalam menghampiri kenyataan politik. Hal ini sesuai dengan pendapat Iswara (1974: 57) yang mengemukakan bahwa:

Metode dan teknik menjernihkan substansi, memisahkan khayalan dari kenyataan. Semakin tepat dan intensif metode dan teknik itu dipergunakan, semakin dekat ilmu itu akan kebenaran, semakin diperkecil peranan khayalan dan harapan yang tidak berlandaskan kenyataan.

Seperti juga ilmu-ilmu sosial pada umumnya, maka dalam metode penelitian yang digunakan dalam ilmu politik juga menyangkut metode induksi dan deduksi. *Metode Induksi* adalah serangkaian strategi ataupun prosedur-prosedur penarikan kesimpulan-kesimpulan umum yang diperoleh berdasarkan proses pemikiran setelah mengkaji peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus atas dasar fakta-fakta teoretis yang khusus ke yang umum. Biasanya penggunaan metode induksi ini lebih banyak digunakan dalam penelitian-penelitian kualitatif. Selanjutnya menurut Iswara (1974: 57), yang termasuk dalam metode induksi tersebut mencakup metode *deskriptif*, metode *analisis*, metode *evaluatif*, metode *klasifikasi*, dan metode *perbandingan*.

Yang dimaksud dengan *metode deskriptif* adalah sebagai prosedur pengkajian masalah-masalah politik untuk memberikan gambaran-gambaran terhadap kenyataan yang ada sekarang ini secara akurat. Hal ini berbeda dengan *metode analisis*, yang menekankan pada penelaahan secara mendalam terhadap masalah-masalah politis yang disusun secara sistematis dengan memperlihatkan hubungannya fakta satu dengan lainnya.

Metode evaluatif, merupakan serangkaian usaha penelaahan fenomena-fenomena politik yang bersifat menentukan terhadap fakta-fakta yang dikumpulkan dengan dasar pada norma-norma ataupun ide-ide yang abstrak. Kemudian yang dimaksud dengan *metode klasifikasi*, adalah metode yang melandaskan pada penggolongan atau

pengelompokan obyek-obyeknya secara teratur yang masing-masing menunjukkan hubungan timbal-balik. Klasifikasi ini dalam pengertian sempit dipandang sebagai salah satu cara untuk mengadakan tabulasi data terhadap kualitas data masing-masing (Ciarke, 1971; 42). Sedangkan *metode perbandingan*, merupakan metode kajian politik yang menitik beratkan pada studi persamaan dan perbedaan atas dua objek telaahan, dengan maksud untuk memperdalam maupun menambah pengetahuan tentang obyek-obyek kajian politik tersebut.

Sedangkan *metode deduksi* adalah sebaliknya dari *metode induksi*. Dalam penggunaan metode ini merupakan serangkaian strategi ataupun prosedur dengan penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum ke yang khusus, dan biasanya penelitian yang demikian banyak dilakukan dalam pendekatan yang kuantitatif (Supardan, 2004: 157).

Pada bagian lain Iswara (1974: 57) mengemukakan bahwa metode-metode lainnya banyak digunakan dalam kajian ilmu politik juga menggunakan metode-metode: (1) *metode filosofis*; (2) *metode yuridis atau legislatif*; (3) *metode historis*; (4) *metode ekonomis*; (5) *metode sosiologis*; (6) *metode psikologis*. Namun demikian berbeda dengan The Liang Gie (1969: 116), bahwa beberapa metode penelitian ilmu politik yang banyak digunakan adalah metode; (1) *observasi*; (2) *analisis*; (3) *klasifikasi*; (4) *pengukuran* atau *measurement*; (5) perbandingan atau *comparation*, dan (6) penyelidikan atau *survey*.

Metode filosofis, metode ini digunakan untuk meneliti masalah-masalah politik langsung yang berhubungan dengan kehidupan politik yang diteliti secara abstrak-akademis-teoretis. Dari ide yang abstrak itulah kemudian dibuat deduksi tentang fenomena-fenomena yang disusun secara detail.

Metode yuridis atau legalistik, merupakan penekanan prosedur penelitiannya terhadap azas-azas legal secara yuridis. Sebagai contoh penelitiannya terhadap negara yang memandangnya bahwa negara sebagai sebuah korporasi dalam hukum publik. Atau bisa juga dalam penelitian ini bertolak dari suatu kesadaran hukum bahwa negara pada dasarnya merupakan pribadi hukum, maupun badan hukum. Sebagai implikasinya dalam penelitian ini ilmu politik diidentifikasi sebagai ilmu hukum negara (Haricahyono, 1991: 30).

Metode historis: dalam metode ini penelitian ilmu politik didasarkan pada kenyataan-kenyataan sejarah. Artinya tekanan dalam penelitian ini terutama terhadap segi-segi latar-belakang, pertumbuhan dan perkembangan, hukum-hukum sebab-akibat, yang merupakan ciri khas dalam ilmu sejarah. Metode Ekonomis; dalam penelitian ini ilmu politik disangkut-pautkan secara melekat dengan aspek-aspek ekonomi baik itu melalui pendekatan Marxisme maupun non-Marxisme.

Metode sosiologis; memandang bahwa dalam kajian politik tersebut lembaga-lembaga politik dianalogikan sebagai fenomena-fenomena sosial maupun organisme sosial. Karena itu dalam kajian sosiologis ini lembaga-lembaga politik dapat dirinci dalam semua individu sebagai substratumnya. Dalam arti bahwa metode sosiologis memandangnya dalam kajian politik tersebut sebagai organisme sosial yang dinamis.

Metode psikologis, dalam penggunaannya kajian politik banyak menggunakan dalil-dalil psikologi sebagai acuannya. Aspek-aspek politik sering dilihatnya dari perspektif motif-motif, kepribadian pemimpin maupun pihak-pihak yang menentanginya, termasuk faktor-faktor penyebab terjadinya suatu peristiwa politik.

Sedangkan untuk *metode observasi* hal ini diartikan secara luas, karena pengertian pengamatan tidak sekedar pengamatan langsung, tetapi juga bisa tidak langsung terhadap fenomena politik. Pengamatan disini diartikan dengan sistematis, teratur, terencana, berdasarkan pedoman-pedoman tertentu, serta tidak cukup dilakukan sekali atau dua kali saja, melainkan dilakukan secara kontinu atau berulang-ulang kemudian ditarik kesimpulan (Haricahyono, 19991: 31).

Metode Analisis, adalah suatu metode dengan serangkaian tindakan dan pemikiran yang disengaja untuk menelaah sesuatu hal yang secara mendalam ataupun terinci terutama dalam mengkaji bagian-bagian dari suatu totalitas. Maksudnya untuk mengetahui cirri masing-masing bagian, hubungan satu sama lain, serta peranannya dalam totalitas yang dimaksud.

Metode Deskripsi, merupakan metode yang secara mendalam memberikan gambaran politik terhadap kondisi realitasnya. Dengan demikian metode ini dapat disimpulkan sebagai upaya memberikan gambaran-gambaran realitas secara akurat. Maksudnya dalam penggunaan metode ini mencoba memberikan gambaran-gambarannya itu dan pencatatan-pencatatan terhadap berbagai masalah yang sedang dikaji.

Metode Klasifikasi, secara umum metode ini menggambarkan adanya pengelompokan-pengelompokan ataupun penggolongan obyek-obyek kajian secara teratur untuk memudahkan pencarian adanya hubungan timbal-balik. Oleh karena itu usaha mengadakan pengelompokan ini biasanya didasarkan pada persamaan dan perbedaan. Untuk selanjutnya dalam metode ini menggunakan tabulasi terhadap serangkaian baik terhadap jenis/bentuk maupun kualitasnya. Untuk memudahkan pengelompokannya tersebut, biasanya terdapat aturan-aturan pokok yang menurut Ciarke (Isaak, 1975: 42) mencakup:

1. Penggolongan harus masuk akal
2. Harus ada pengelompokan yang cukup untuk semua data
3. Harus tidak ada pengelompokan yang *overlapping*
4. Harus hanya ada satu basis penggolongan

Metode Pengukuran, merupakan metode untuk mengidentifikasi besar-kecilnya obyek atau fenomena yang diteliti baik itu yang menggunakan alat khusus maupun tidak. Metode ini dapat digunakan terhadap isi surat kabar, siaran radio, ataupun menghitung secara cermat perkataan-perkataan tertentu yang sering diucapkan oleh pemimpin-pemimpin politik yang diteliti. Melalui penghitungan yang cermat tersebut dapat diketahui kecenderungan politik dalam masyarakat, pergeseran ideologi, strategi propaganda yang dilakukan oleh suatu kelompok ekstrim.

Metode Perbandingan, merupakan metode yang dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari dua peristiwa politik, negara, kelompok, atau lebih. Dengan demikian dapat dianalisis dan diperdalam aspek-aspek yang dikajinya. Dalam ilmu politik metode ini makin banyak digunakan khususnya untuk membandingkan di antara berbagai macam pemerintahan dan negara. Perkembangan terakhir tentang metode tersebut, tidak sekedar menyangkut pranata pemerintah formal, tetapi menyangkut seluruh proses dan sistem politik yang ada. Oleh karena itu dewasa ini muncul istilah "*Comparative Politics*" yang menunjukkan adanya perbandingan serangkaian proses dan sistem politik antar negara (Haricahyono, 1991: 34).

3. Teknik

Teknik yang banyak digunakan dalam ilmu politik sebetulnya banyak ragamnya, seperti; (1) *field work*; (2) *Investigation*; (3) *Questionare*; (4) *sampling*; (5) *interview*;

(6) *opinionnaire*; (7) *participant observer*; (8) *schedule*; (9) *direct observation*; (10) *case studi*; (11) *action research*.

4. Ilmu Bantu

Adapun beberapa ilmu bantu yang digunakan dalam kajian politik diperlukan sekali peran dan kontribusi dari berbagai ilmu sosial lainnya seperti; ilmu sejarah, ilmu filsafat, sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, psikologi sosial, geografi, serta hukum (Budiardjo, 2000: 17-28).

Ilmu sejarah sangat diperlukan dalam ilmu politik, mengingat dalam sejarah itu memberikan fakta-fakta masa lampau untuk dikaji lebih lanjut. Memang terdapat perbedaan mendasar antara ilmu sejarah dan politik. Ilmu sejarah selalu meneropong masa lampau, sedangkan ilmu politik lebih berorientasi ke depan (*future oriented*). Namun demikian tanpa kontribusi ilmu sejarah, maka ilmu politik hanya akan berupa narasi ataupun nalar belaka jika tanpa didukung oleh fakta-fakta yang akurat. Untuk memperoleh legitimasi keilmiahannya itulah fakta itu mutlak diperlukan. Apalagi peran sejarah kontemporer, hal itu sangat dibutuhkan oleh para ilmuwan politik dalam kajian-kajiannya yang lebih holistik.

Filsafat juga berperan dalam ilmu politik, terutama filsafat politik Yaitu suatu bagian dari filsafat yang mengungkap kehidupan politik seperti; sifat hakiki, asal-mula nilai dan negara. Dalam filsafat politik keberadaan manusia dan negara merupakan kajian kosmologi yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Begitupun juga dalam pandangan Yunani kuno, filsafat politik juga mencakup dan erat hubungannya dengan *moral philosophy* atau etika (*ethics*). Etika membahas persoalan-persoalan yang menyangkut norma-norma baik atau buruk. Seperti halnya tindakan; apakah yang boleh di dinamakan baik atau buruk? Manusia macam apakah yang dinamakan baik atau buruk? Apakah yang dinamakan adil atau tidak adil?, dan sebagainya.

Antropologi, merupakan ilmu bantu dalam ilmu politik. Hal ini mengingat dalam antropologi memberikan kontribusi besar dalam pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial-budaya yang lebih kecil dan sederhana. Sebagaimana kita ketahui, antropologi mula-mula lebih banyak memusatkan perhatian pada masyarakat dan kebudayaan di suku-suku terpencil pedalaman, sedangkan

sosiologi lebih memusatkan perhatian pada kehidupan masyarakat kota. Namun lambat laun antropologi dan sosiologi saling mempengaruhi baik dalam obyek penelitian maupun dalam pembinaan teori-teori. Akibatnya pada saat ini batas-batas antara kedua ilmu sosial itu menjadi kabur.

Belakangan ini perhatian sarjana ilmu politik terhadap antropologi menjadi makin meningkat, sejalan dengan bertambahnya perhatian dan penelitian tentang kehidupan serta usaha modernisasi politik di negara-negara baru maupun berkembang. Mulanya di negara-negara tersebut penelitian berkisar pada masalah-masalah makro, seperti pengaruh kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, kedudukan dan peranan para elite politik, dan sebagainya. Tetapi karena betapa kompleksnya persoalan-persoalan yang dihadapi di negara-negara baru maupun berkembang tersebut terutama dalam pembinaan kehidupan yang bercorak nasional itu, maka hal ini diperlukan pendekatan yang lebih hati-hati dalam gerakan nation-building untuk dipahami berbagai karakteristiknya yang melekat kuat.

Sosiologi, juga merupakan paling pokok dan umum sifatnya Mengingat sosiologi banyak membantu usahanya memahami latar-belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari pelbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Dengan menggunakan pengertian-pengertian dan teori-teori sosiologi, sarjana ilmu politik dapat mengetahui sampai di mana susunan dan stratifikasi sosial mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh oleh misalnya keputusan kebijaksanaan (*policy decisions*), corak dan sifat keabsahan politik (*political legitimacy*), sumber-sumber kewenangan politik (*sources of political authority*), pengendalian sosial (*social control*), dan perubahan sosial atau *social change* (Budiadjo, 2000: 20).

Psikologi Sosial, dalam hal ini menitik beratkan pada hubungan timbal-balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Jika sosiologi mempelajari tentang kegiatan kehidupan sosial, sedangkan psikologi umum memusatkan perhatian terhadap kehidupan orang perorangan, maka psikologi sosial dalam analisis politik jelas dapat kita ketahui apabila kita sadar bahwa analisis sosial politik secara makro diisi dan diperkuat dengan analisis-analisis yang bersifat mikro (individu) dalam kaitannya dengan kelompok-kelompok.

Ilmu Ekonomi, memiliki sejarah yang kuat akan keterkaitan dua disiplin tersebut. Pada masa silam ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan suatu bidang ilmu tersendiri yang dikenal dengan ekonomi politik (*political economy*), yaitu pemikiran dan analisis kebijaksanaan yang hendak digunakan guna memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara Inggris khususnya dalam menghadapi saingan-saingannya seperti Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman dan sebagainya. Kemudian sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, maka ilmu tersebut memisahkan diri menjadi dua disiplin ilmu.

Ilmu ekonomi modern, dewasa ini sudah memiliki teori, ruang-lingkup, serta metodologinya yang begitu ketat dan terperinci. Justru karena tingginya keketatan disiplin ilmu ini memiliki tingkat prediksi-prediksi untuk perhitungan masa kini maupun mendatang. Inilah sumbangan besar ilmu ekonomi dalam kaitannya dengan ilmu politik, karena dua-duanya memiliki kepentingan kajian untuk kekinian dan kedepan.

Ilmu Hukum, juga merupakan ilmu bantu dalam ilmu politik. Hal ini dapat dipahami karena sejak dahulu terutama di Eropa barat ilmu hukum dan politik memang sudah demikian erat. Kedua-duanya memiliki persamaan daya “mengatur dan memaksakan undang-undang” (*law enforcement*) yang merupakan salah satu kewajiban negara yang begitu penting. Di samping itu analisis-analisis mengenai hukum serta hubungannya dengan negara, mulai diperkembangkan pada abad ke-19, tetapi pada itu masih terbatas pada penelitian mengenai negara-negara Barat saja. Sebailiknya para sarjana hukum melihat negara sebagai lembaga atau institusi dan menganggapnya sebagai organisasi hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban manusia. Fungsi negara adalah menyelenggarakan penertiban, tetapi oleh ilmu hukum penertiban ini dipandang semata-mata sebagai tata hukum. Manusia dilihatnya sebagai obyek dari sistem hukum, dan dianggap sebagai pemegang hak serta kewajiban politik semata-mata. Ilmu hukum tidak melihat manusia sebagai makhluk sosial-budaya. Akibatnya adalah bahwa ada kecenderungan pada ilmu hukum untuk “meremehkan” kekuatan-kekuatan sosial dan budaya. Namun dari aspek-aspek daya yang “memaksa” inilah ilmu politik memandang perlu untuk mengungkap dalam kaitannya seperti dengan kesadaran maupun partisipasi politik. Hal ini sesuai dengan pendapat Hans Kelsen (1961: 181-191), bahwa negara sebagai suatu badan hukum atau *Rechtsperson* (*juristic person*). Dalam pengertian

tersebut badan hukum merupakan sekelompok orang yang oleh hukum diperlakukan sebagai suatu kesatuan sebagai suatu *person* yang mempunyai hak dan kewajiban.

Ilmu geografi, juga termasuk ilmu bantu dalam ilmu politik. Terutama faktor-faktor yang berdasarkan seperti; lokasi (*location*), perbatasan strategis (*strategic frontiers*), desakan penduduk (*population pressures*), daerah pengaruh (*sphere of influence*) mempengaruhi politik. Montesquieu, seorang cendekiawan Prancis, orang yang pertama kali membahas bagaimana faktor-faktor ilmu geografi mempengaruhi konstelasi politik suatu negara. Dengan demikian geografi memiliki peran besar dalam ilmu politik, bahkan bukan sekedar pengaruh yang disebutkan di atas seperti yang pernah dikemukakan dalam aliran Geopolitik, tetapi sebagai suatu negara itu jelas memerlukan persyaratan yang di antaranya juga wilayah yang berdaulat.

C. Tujuan dan Fungsi Ilmu Politik

Dalam beberapa hal, ilmu politik memiliki sifat ambigu, mendua, dan paradoks. Dalam ilmu itu terkandung rasa campuran antara ingin tahu, menarik, jijik, bernafsu, serakah dan sifat-sifat positif bergalau dengan negatif. David Apter dalam bukunya yang berjudul *Introduction to Political Analysis*, menganalogikan *ilmu politik* dengan *seks* (Apter, 1996: 5). Sebagaimana seks, politik menjadi suatu pokok kajian yang dihindari dalam masyarakat yang sopan. Tetapi, sebagaimana kita butuh akan keindahan, kemesraan, kesenangan, kekuasaan, keagungan sebagai “pemimpin” dan “penakluk” di muka bumi ini, kita perlu “tahu” dan “merasakan” akan hal-hal yang terlarang pada satu masalah, dan kita juga membutuhkan kontroversi dari masalah lain. Tidak aneh jika dalam mempelajari ilmu politik itu membangkitkan perasaan-perasaan yang mendalam, seperti rasa cinta, setia, bangga, sekaligus rasa jijik, benci, malu, dan marah.

Kita telah menciptakan lembaga-lembaga tertentu untuk mengendalikan dan menyalurkan nafsu itu, di antaranya yang satu dalam kehidupan keluarga dan kekerabatan, yang lain dalam kekuasaan yang terorganisir. Kedua tipe itu menunjukkan suatu kesinambungan: kesinambungan rumpun manusia dan kesinambungan komunitas. Kedua-duanya adalah sesuatu yang pokok dalam kehidupan yang terorganisir, namun di satu sisi juga punya arti yang kabur yang mudah disalahgunakan

Sebagai sebuah disiplin ilmu, ruang lingkup ilmu politik lebih luas dan umum daripada ideologi apapun. Tetapi secara khusus untuk memahami nilai-nilai demokrasi, hal ini begitu nampak terutama di Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya, yang menggunggungulkan cita-cita demokrasi dalam praktek-praktek kelembagaan. Setidak-tidaknya secara umum terdapat *tiga* makna tujuan mempelajari ilmu politik:

Pertama, perspektif intelektual: Sebagaimana kita maklumi bahwa sebenarnya tujuan politik adalah tindakan politik. Untuk mencapai itu diperlukan pembelajaran untuk memperbesar kepekaan pembelajar sehingga ia dapat bertindak. Agar dapat bertindak dengan baik secara politik, orang perlu mempelajari azas dan seni politik, nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat. Seperti, bagaimana nilai-nilai itu diwujudkan dalam lembaga-lembaga, serta taktik ataupun strategi apa yang digunakan untuk bertindak? Dengan demikian orang belajar, bagaimana kekuasaan dapat dijinakkan oleh Prometheus, dan diabdikan kepada tujuan manusia yang positif. Sebagai contoh, Plato dan Aristoteles di akademi-akademi Yunani, tetapi juga mereka sangat terlibat dalam politik praktis. Begitu juga sebelumnya Socrates sebagai lambang guru politik yang aktif, ia juga meninggal karena tekanan-tekanan politik praktis penguasa Yunani kuno.

Dalam pembelajarannya-pun sudah mengenal metode yang bersifat kritis. Tujuannya tidak lain adalah untuk menelaah kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para penguasa dan berusaha untuk mengurangi ketidaktahuan dari mereka yang dikuasai.. Walaupun ajaran kritis tersebut pada prinsipnya bersifat intelektual, tetapi dapat menimbulkan hal-hal yang bersifat praktis. Itulah sebabnya mengapa tradisi intelektual dapat dengan mudah menjadi subversif terhadap penguasa dan merangsang timbulnya perdebatan politik. “Dengan demikian tidak bisa dihindari bahwa pembelajarn politik bersifat politis, dan guru-guru politik merupakan aktivis”. Jadi, perspektif intelektual dalam politik adalah perspektif yang mempergunakan diri-sendiri sebagai titik tolak. Sebab perspektif itu bertolak dan dibangun berdasarkan apa yang dianggap salah oleh individu, maka pemikiran individu itu yang memperbaikinya.

Kedua, perspektif politik. Maksudnya adalah bahwa pandangan intelektual mengenai politik, tidak banyak berbeda dengan pandangan politisi. Bedanya terletak jika politisi lebih bersifat “segera” (yang ada kini dan di sini, daripada hal-hal yang teoretis). Sedangkan intelektual dapat menjadi politisi jika ia mampu memasukkan masalah politik

dalam pelayanan suatu kepentingan ataupun tujuan. Sebagai contoh, sebuah kasus dengan adanya sistem pemilihan langsung di Indonesia, banyak intelektual yang bersedia menjadi calon legislatif dan eksekutif pusat dan daerah. Dengan kampanye yang bergaya “orator mendadak”, dalam waktu singkat mereka mempersiapkan dan menggunakan strategi itu dari yang biasanya sangat teoretik mendadak berubah ke dalam suatu kerangka kerja yang bersifat praktik. Hal ini mirip dengan apa yang dinyatakan Robert Dahl (1967: 1-90), bahwa dalam waktu singkat mereka telah menjadi politisi.

Singkatnya, dunia politisi adalah dunia hari ini, dan hari esok yang dekat. Sedangkan kaum intelektual menaruh perhatian dalam tiga dimensi; hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Keputusan-keputusan dari politisi diuji dalam kenyataan tanggapan publik yang keras. Suara lebih dahulu, sedangkan azas belakangan. Jika tujuan pertama politisi adalah memperoleh kekuasaan, maka kaidah kedua adalah mempertahankan kekuasaan. Juga tidak usah heran sebagian politisi — termasuk yang terbaik dan tercerdik sekalipun — sering melakukan hal-hal yang mengerikan. Karena itu tidak usah heran pula jika politisi adalah orang yang selalu optimis yang senantiasa tergugah oleh kemungkinan-kemungkinan yang dapat diperoleh dari kekuasaan (Apter, 1996: 20).

Ketiga, perspektif ilmu politik. Dalam hal ini politik dipandang sebagai ilmu. Ia menilai politik dari sisi intelektual dengan pertimbangan kritis serta mempunyai criteria yang sistematis. Pendirian ini memandangnya terhadap kebutuhan ke depan, untuk meramalkan akibat tindakan politik maupun kebijaksanaan para politisi. Jika para politisi memandang politik sebagai pusat kekuasaan publik, maka kaum intelektual memandang politik sebagai perluasan pusat moral dari diri. Dengan demikian politik sebagai ilmu menaruh perhatian pada dalil-dalil, keabsahan, percobaan, hukum, keragaman, pembentukan asas-asas yang universal (Apter, 1996: 21).

Tentu saja ilmuwan politik professional memandang politik sebagai suatu sistem, sebagai peubah-peubah terorganisir yang saling berinteraksi. Sistem itu meliputi; pemerintah, partai politik, kelompok kepentingan, kebijaksanaan, termasuk individu-individu. Baik intelektual maupun politisi bisa saja meragukan, apakah politik itu ilmu? Sebab sebagian besar mereka berasumsi bahwa politik itu seni. Politik bisa memiliki dampak terbaik bahkan terburuk kepada rakyat. Di satu sisi politik juga menyerupai

agama dalam beberapa aspirasinya, dan mirip tindakan kejahatan dalam sebagian kegiatannya, seperti licin, curang, dan serakah..

Jadi kalau begitu apa ilmu politik? Kalau begitu ilmu politik ibarat orang kerdil di tengah-tengah ilmu pengetahuan lain? Tetapi harus ingat, alam semesta menurut para ilmuwan alam semesta yang dapat dikelola: ilmu pengetahuan dapat merancang bom yang bagus. Perkembangan ilmu politik, apakah itu “keras” (bersifat kuantitatif positif) ataukah “lunak” (bersifat penafsiran dan kualitatif), telah melahirkan bentuk pengetahuan politik yang baru dan absah. Di suatu tempat, antara ilmu pengetahuan yang “keras” dan “lunak” sebagian terbesar ilmuwan politiknya melakukan apa yang paling sesuai bagi mereka. Sedangkan menurut Leo Straus (1959: 10-12) dan Sheldon Wolin (1960: 10-12), bahwa tugas untuk ilmu politik untuk mendapat kearifan tentang sifat-sifat manusia dan politik. Dengan demikian mengerjakan “teori politik” melibatkan pembelajaran untuk membaca karya-karya klasik agar orang dapat secara efektif membedakan antara apa yang semata-mata opini dengan pengetahuan autentik. Wolin di sisi lain berpendapat bahwa studi teori politik terbaik difahami sebagai sebuah wacana reflektif mengenai makna politik. Sebagai sebuah dialog antara para filsuf, ilmu politik perlu memperjelas hubungan antara kesinambungan dan perubahan dalam kehidupan politik.

Kemudian muncul pendapat serupa yang lebih mutakhir menyempurnakan pendapat Straus dan Wolin adalah Robert Flower dan Jeffrey Orenstein (1985: 2) mengemukakan bahwa ilmu politik terutama teori-teori politik melibatkan refleksi konsep-konsep politik dasar, analisis pandangan-pandangan alternatif tentang manusia dan politik serta pengejaran kebenaran normatif tentang sifat-sifat rezim terbaik. Pendapat serupa juga dikemukakan Dante Geronimo (1975; 229-281) yang menunjuk pada sifat upaya teoretis yang sedang berlangsung sebagai sebuah ‘percakapan dari banyak suara’ (yang merupakan sebuah dialog) antara orientasi-orientasi yang berbeda menuju realitas politik sebagai satu keutuhan. Ditinjau dari sisi ini maka filosofi politik adalah kegiatan yang kreatif dan kritis di mana setiap generasi bisa berpartisipasi dalam tradisi berkelanjutan yang menyatukan masa kini dan masa lalu (Losco dan Williams, 2003: 2). Sebab siapapun yang membaca ilmu politik, saya setuju dengan pendapat Terence Ball yang terkenal karyanya *Reappraising Political Theory* (1995: 29) bahwa mereka akan menganggap “interpretasi-interpretasi sebagai solusi alternatif sejumlah

teka-teki atau masalah, kemudian berlanjut dengan menilai kecukupan mereka *vis-a-vis* satu sama lain dan dalam hubungannya dengan solusi yang diusulkan oleh seseorang”. Mengingat mempelajari ilmu politik khususnya teori politik, maka bukan sekedar membaca naskah-naskah tentang kewenangan; melainkan juga refleksi dari makna kehidupan politik itu sendiri.

Pendapat di atas juga sejalan dengan John Nelson dalam tulisannya *Natures and Futures for Political Theory*” (1983: 3-24) bahwa tujuan-tujuan teori politik dapat dijabarkan menjadi tiga C, yakni; *comprehend* (memahami), *conserve* (memelihara), dan *critisize* (mengkritik). Terminologi “*comprehend*” merujuk kepada dua tujuan yang berupa penjelasan dan pemahaman. Mengingat teori-teori politik memberikan suatu kosa kata konseptual bagi penggambaran dan perhitungan ciri-ciri terpenting kehidupan politik. Pendek kata teori politik mengeksplorasi fenomena-fenomena lewat analisis politiknya. Kemudian “*conserve*” menunjuk kepada bahwa studi sejarah pemikiran politik membantu pemeliharaan suatu warisan budaya. Sedangkan “*critisize*” pada hakikatnya menggarisbawahi fakta bahwa teori menganalisis dan mengevaluasi baik argumen-argumen teoretis maupun fenomena-fenomena politik.

Para teoretisi harus menyadari, bahwa mereka bukanlah dan tidak selalu hidup sebagai filosofi murni, tidak juga hidup dalam atmosfer tipis penuh abstraksi. Hal ini relevan sebagaimana telah dikemukakan Benyamin Barber dalam *The Conquest of Politics: Liberal Philosophy in Democratic Times* (1988: 11), bahwa

... politics remain to represent human being something that do, rather than their something that have ... or see or discuss or pikirka. They do something with him have to be more from simply have philosophy, and philosophy which politically easy to ism have to bring an action against politics fully from politics as a attitude.

(... politik tetap merupakan sesuatu yang manusia lakukan, bukannya sesuatu yang mereka miliki ... atau lihat atau bicarakan atau pikirkan. Mereka yang akan melakukan sesuatu dengannya harus lebih dari sekedar berfilosofi, dan filosofi yang secara politik mudah difahami harus mengambil tindakan politik sepenuhnya dari politik sebagai sebuah sikap).

D. Sejarah Perkembangan Ilmu Politik

Lahirnya *Ilmu Politik* secara formal memang sejak abad 19, namun sangat beragam dari mana memulai lahirnya ilmu politik itu. Budiardjo (2000: 2) secara resmi

politik diakui sebagai ‘disiplin ilmu’ itu sejak berdirinya ‘*Ecole Libre des Science Politiques*’ di Paris tahun 1870, dan di London ‘*School of Economic and Political Science*’ tahun 1895. Lain lagi dengan David E. Apter yang menulis buku *Introduction to Political Analysis*, di mana ilmu ini sangat bercorak Amerika. Mengapa demikian, Apter (1996: 15), mengemukakan:

Hal ini berawal dari Konstitusi. Orang Amerika mempunyai keyakinan besar bahwa mereka tidak saja dapat merancang suatu konstitusi yang sempurna bagi pemerintahan mereka sendiri, tetapi senantiasa juga dapat memperbaiki cara-cara kerjanya. (Seperti pernah dikemukakan oleh Richard Hofstadter, orang Amerika adalah satu-satunya yang sementara percaya bahwa mereka telah membangun suatu masyarakat yang sempurna, namun masih terus berusaha memperbaikinya). Hingga hari ini, ilmu politik pertama-tama dan terutama adalah rangkaian asas dan resep untuk kemajuan. Pandangan ini masih bertahan, meskipun dalam bentuk yang agak goyah atau lebih halus. Ilmu politik diakui seperti ini untuk pertama kali oleh Thomas Jefferson. Sewaktu mendirikan Universitas Virginia, ia menciptakan satu dari delapan jabatan profesor profesional yang paling awal di lembaga itu, yaitu jabatan Profesor bidang hukum dan Kebijakanaksanaan Sipil (*Chair of Law and Civil Policy*) (Apter, 1996: 15).

Padahal secara embrio yang lebih luas dan secara orijinalitas, pembahasan tentang negara sudah ada sejak 450 SM di Yunani kuno. Seorang ahli sejarah Herodotus (480-430 SM) maupun filsuf-filsuf ternama Yunani seperti Plato (427-347 SM) karya-karyanya *Politeia* (tentang hal ikhwal politik), *Kriton* (tentang ketaatan terhadap hukum), dan Aristoteles (384-332 SM) sudah banyak berbicara tentang filsafat politik. Begitu juga filsuf Cina kuno Kung Fu-Tze / Confucius (551-479 SM), Meng-Tse (Mencius), dan Li-Tze (350 SM) seorang aliran perintis *legalitas* telah banyak berbicara tentang politik.

Apa bila ilmu politik merupakan disiplin ilmu yang bercorak Amerika, maka cikal-bakalnya adalah *Eropa klasik*. Ide rasionalitas berasal dari Yunani, maka ide mengenai hukum berasal dari Romawi, sedangkan perhatian pada persamaan, kebebasan, dan kekuasaan terutama diambil dari konsep-konsep yang berasal dari Prancis dan Inggris. Sementara itu perhatian terhadap negara sebagaimana adanya lebih banyak dari Jerman (Apter, 1996: 15). Tetapi perbedaan antara praktik politik di Eropa dan di Amerika demikian berjauhan, karena tiadanya di Amerika lembaga tradisional seperti monarkhi, dan karena adanya pertalian antara tradisi dan tirani di Eropa dalam pikiran

orang-orang Amerika, maka orang-orang Amerika lebih dari orang-orang manapun sebelumnya selalu mengaitkan politik dengan asas-asas pemerintahan yang universal, masuk akal, dan karena itu sudah nyata dengan sendirinya.

Bagi orang-orang Amerika, politik adalah seni dari para “tukang yang sangat berpendidikan”. Jika bangsa Eropa lebih menekankan filsafat moral dan yurisprudensi, sedangkan tradisi Amerika lebih menekankan alat dan praktek dari pemerintahan rakyat. Memang tradisi Amerika lebih merupakan disiplin ilmu terapan, mengingat Amerika adalah pemegang terbesar faham *pragmatisme* (Kattsoff, 1996: 129). Kita bisa melihat ‘Himpunan Ilmu Politik Amerika’ — *American Political Science Association* — didirikan pada tahun 1904, bukan sebagai leveransir filsafat, tetapi sebagai wadah untuk menghimpun fakta. Karena itu mereka ‘curiga’ terhadap teori-teori besar dan disain-disain yang hebat-hebat, ilmu politik tradisi Amerika merupakan disiplin ilmu yang lebih bersifat ‘meneliti’ yang menganggap demokrasi sebagai kebenaran yang dengan sendirinya telah terbukti (Apter, 1996: 16).

Untuk mengikuti kajian kronologis lahirnya ilmu politik dari embrio sampai pesatnya perkembangan ilmu itu, di bawah ini disajikan secara sederhana kronologi secara tematis yang mewarnai ilmu politik dari waktu ke waktu.

Filsafat politik tidak berawal dari ilmu pengetahuan, melainkan bertolak dari pemakaian *common-sense* (akal sehat) dalam tujuan-tujuan manusia. Saat dan urutan peristiwa-peristiwa manusia merupakan suatu bentuk penjelasan, suatu cara menyusun, atau merasionalkan perkembangan masyarakat. Mulailah paradigma rasional menggantikan pandangan dunia yang lebih irasional dan mistik, yang hidup sebelumnya, suatu pandangan dalam mana dewa-dewa seperti Zeus (leluhur yang bergairah), Hermes (leluhur yang penipu), Athena (leluhur yang berpengetahuan) dan sebagainya, dapat melakukan tindakan kekerasan maupun bermain cinta (Apter, 1996: 49).

Kemudian, ilmu pengetahuan menggantikan hal itu yang tidak terduga-duga sebelumnya melalui keteraturan. Keteraturan tidak lagi berasal dari paradigma mistik melainkan dari paradigma ilmiah. Orang-orang Yunani mulai menyingkirkan peranan para dewa dengan obyek-obyek yang rasional. Oleh karena itu alam-pun ditanggapinya tidak berbau mistik, melainkan “lebih masuk akal”. Seperti halnya ‘atom’— temuan

Democritus (460-370 SM) — yang merupakan bahan dasar dari dunia yang tidak dapat diperkecil, tidak hanya bertahan lama bahkan meluas dalam kehidupan sosial.

Orang mulai memandang dirinya sebagai bagian dari alam dan tunduk pada kaidah-kaidahnya. Kaidah ini yang dianggap kekal dalam kerangka acuan ilmiah baru, menentukan keteraturan dalam segala hal. Demikianlah awal tradisi intelektual bangsa Yunani, tidak sekaligus menerima ilmu analisis pengetahuan, namun mereka menerima analisis moral. Di sini Socrates (469-399 SM), orang pertama yang menyadari bahwa ilmu alam tidak memberikan penjelasan memadai untuk penalaran atas tingkah-laku manusia. Oleh karena itu wajar jika dalam ilmu pengetahuan kuno belum mampu memberikan rumusan teori. Begitu juga dalam ilmu politik, rasionalitas bukannya menjadi sesuatu yang bersifat deduktif, melainkan untuk memperoleh suatu kualitas moral. Munculnya slogan-slogan ‘filsafat politik dibatasi etika’ bahkan merupakan ilmu pengetahuan tertinggi, hal ini sebagai wujud bahwa filsafat politik merupakan pokok soal yang lebih penting.

Itulah sebabnya pada dekade ini, politik merupakan *suatu fungsi antara penguasa dan yang dikuasai*. Baik itu pemerintah yang dijalankan satu orang (raja, Diktator, otokrat, tiran), beberapa orang (oligarkhi, yunta, elit), atau banyak orang (para pemilih). Yang penting setiap pemerintah harus mampu menemukan apa yang mendatangkan “kebijakan”. Kuncinya adalah bahwa rakyat harus memiliki kemampuan “akal sehat” yang memungkinkan dari pengetahuan politik yang dimilikinya akan memiliki kualitas moral yang memadai dalam usaha pencarian makna dalam kehidupan perorangan dan masyarakat. Dengan demikian model politik klasik sebelum Plato cukup terdiri atas penguasa dan yang dikuasai, cara, dan tujuan. Model ini pada dasarnya mengandung semua unsur kekuasaan yang abstrak seperti yang lukiskan dalam Gambar 10-1. di bawah ini:

Gambar 10-1
Model Politik Yunani Klasik Sebelum Plato

	Cara	Tujuan
Penguasa		
yang dikuasai		

Sumber: David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, Diterjemahkan Oleh Setiawan Abadi, Jakarta: LP3ES, 1996, halm.54.

Pendeknya dalam paradigma politik waktu itu adalah bahwa yang terpenting bagaimana untuk mencari suatu *keselarasan* atau *keseimbangan* antara *penguasa* dan yang *dikuasai*. Dengan demikian masing-masing akan melayani tujuan pihak lain sebagaimana tujuan bersama.

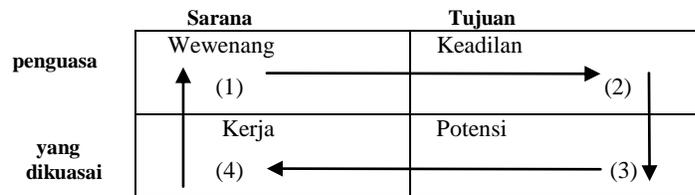
Lain lagi dengan zaman Plato (427-347 SM), seorang murid Socrates yang pernah mengajarkan bahwa kebajikan berisi pengetahuan mengenai hal-hal yang baik, karena itu masalahnya adalah membangun suatu negara yang di dalamnya semua orang tertarik pada kebajikan. Selain itu Pythagoras (582-507 SM) juga mengajarkan Plato bahwa kebajikan itu abstrak dan bahwa pengetahuan mengenai yang abstrak adalah lebih nyata daripada pengetahuan mengenai hal-hal yang berwujud dalam dunia empiris atau inderawi (Losco dan William, 2003: 151-53). Konsep-konsep tersebut memberi pengertian mengenai metafisika dari bentuk-bentuk ideal. Metode dialektis ---bertanya dengan cara paradoks---mengungkapkan bahwa manusia dapat didasarkan mengenai pemahaman abstrak mereka (Apter, 1996; 57). Dan memang Plato juga sangat percaya bahwa bentuk-bentuk abstrak merupakan dasar keabadian manusia.

Suatu pukulan batin yang Plato rasakan, ketika ia berusia 31 tahun, Athena telah menjatuhkan hukuman mati terhadap Socrates. Ia merasa hancur, kemudian Plato menjadi pengembara, berkelana ke Mesir, Sisilia, dan tempat lain. Sekembalinya dari Athena ia mendirikan sebuah akademi pengetahuan, bahkan Aristoteles-pun pernah belajar di situ. Kematian Socrates menunjukkan kepada Plato, tidak hanya pentingnya pengetahuan yang tak terkekang, tetapi juga perlunya pendidikan publik. Ia memandang pendidikan harus menjadi pembelajaran hal-hal yang benar yang membuat orang lebih bijaksana. Jalan menuju pencerahan adalah melalui percakapan, atau menguji kebenaran dari suatu dalil melawan dalil lain. Plato menamakannya metode dialektika. Plato membuka dialog-dialog kepada kita mengenai kebenaran, hukum, dan keadilan, serta ide-ide generatif kehidupan sosial politik (Losco dan Williams, 2003: 144-145).

Dalam bukunya *Republic* ia mengemukakan postulat utopia pertama, yang di dalamnya mereka yang mempunyai kekuatan nalar terbesar diberikan kekuasaan terbesar untuk memerintah. Otoritas semacam itu akan mengarah kepada masyarakat yang bajik

dan harmonis. Kebesaran Plato bagi kita bukan terletak pada kesegaran visinya atau pada teorinya yang mengenai “meritokrasi” (walaupun hal itu memang penting), maupun tentang teori ide, tetapi lebih pada kenyataan bahwa teorinya merupakan teori pertama mengenai ‘negara ideal’ (Apter, 1996: 58). Untuk lebih jelasnya mengenai sistem politik yang digagas Plato itu dapat dilihat pada Gambar 10-2 berikut ini:

Gambar 10-2
Sistem Politik Plato



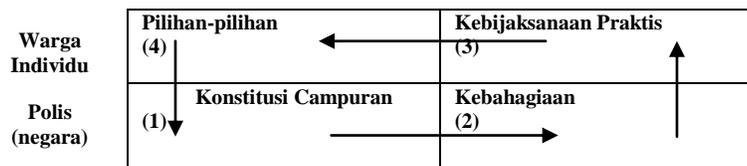
Sumber: David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, Diterjemahkan Oleh Setiawan Abadi, Jakarta: LP3ES, 1996, halm.59.

Hal ini berbeda dengan Aristoteles (384- 322 SM) walaupun dia mengakui gurunya Plato, tetapi secara fundamental baik semangat dan kepribadiannya jelas berbeda. Aristoteles menerima model Plato tetapi mengubah fokusnya. Bukannya membayangkan suatu struktur konsep geometris untuk diterapkan pada masalah-masalah sosial, tetapi ia berusaha menyeimbangkan kebutuhan logis untuk etika dengan suatu pandangan yang lebih praktis mengenai dunia nyata. Aristoteles meragukan kebaikan orang-orang bijak dengan lebih menyukai suatu pemerintahan berdasarkan hukum (d'Entreves, 1967: 69-81). Ia tidak banyak berilusi dengan politik. Hal yang paling dapat diharapkan oleh orang banyak adalah kebahagiaan yang bijaksana. Begitu juga tentang “paham kebijaksanaan” (*prudentialism*) diperluasnya ke dalam model-model Platonis, dimana hubungan antara penguasa rakyat ditentukan oleh bentuk-bentuk konstitusi; wewenang dapat dijalankan terbaik melalui tujuan kolektif bila tujuan-tujuan individu dilindungi terhadap kekuasaan sewenang-wenang; terkanan politiknya terletak pada hukum (Apter, 1996: 63).

Begitu juga tentang hirarki, Aristoteles berkeyakinan bahwa sebagian besar orang berada di sembarang tempat antara yang pandai dan kurang pandai, ibarat status sosial antara orang kaya dengan miskin, karena itu kelas menengah yang dominan. Di samping ia dikenal yang demokratis, ia juga empiris. Sebab ia berpendapat bahwa realitas itu

sesuatu yang kelihatan dan dapat dirasakan. Selain itu baginya kebaikan etis dan kebijaksanaan praktis harus berjalan bersama. Apa yang menyebabkan orang mengikuti garis kebaikan bukanlah karena beberapa standar abstrak dalam visi kontemplatif, melainkan pilihan-pilihan konkrit yang mereka lakukan sehari-hari (Losco dan Williams, 2003: 186; Apter, 1996: 63). Selain itu Aristoteles yakin bahwa negara harus mewujudkan kemampuan individu: Rakyat bahagia bila mereka bersikap etis dan juga praktis. Jika hal itu dimaksimalkan maka tujuan rakyat menjadi potensi negara. Untuk lebih jelasnya model negara yang digagas Aristoteles lihat Gambar 10-3 di bawah ini.

Gambar 10-3
Model Negara yang Digagas Aristoteles



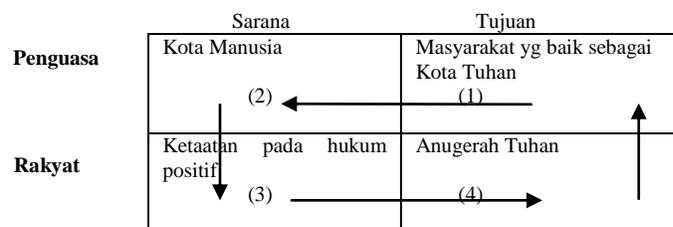
Sumber: David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, Diterjemahkan Oleh Setiawan Abadi, Jakarta: LP3ES, 1996, halm.64.

Hal ini juga berbeda jika dibandingkan dengan paradigma teokratis, di mana ide hukum alam ke hukum–hukum manusiawi. Dalam dunia Romawi hakim menggantikan filosof-raja. Tetapi dunia Kristen menampilkan kembalinya kepada pandangan dunia agama. Dalam hal ini hakim-hakim bisa menjadi suci maupun sekuler — pendeta atau raja. Masalahnya adalah mengkombinasikan kepercayaan yang fundamental pada Tuhan dan hukum alam, dengan menyatakannya dalam hukum-hukum aktual yang dibuat untuk mengatur dalam sikap yang akan mengalami kerjasama antara pejabat gereja dengan pejabat sekuler. Masalahnya adalah bagaimana memberikan kepada Caesar hanya apa-apa yang menjadi miliknya.

Dengan demikian dapat disimpulkan dari Tuhan datanglah wahyu; dari wahyu datanglah nalar; dari nalar datanglah hukum alam. Dari hukum alam lahirlah hukum praktis yang mengatur harta, warisan, dinas, militer, dan kewajiban lainnya, dan Santo Agustinus (354-430) adalah tokoh yang pertama yang menegaskan politikisme theokratis ini yang bertolak dari masyarakat yang baik sebagai Kota Tuhan, menuju pada Kota

Manusia di mana di situ ada neraka, surga, serta setan sebagai personifikasi perjuangan individual antara kebaikan dan keburukan. Kemudian ia menuju ketaatan *Hukum Positif*, di mana merupakan gabungan hukum alam yang berasal dari Yunani dan Romawi serta wahyu yang diperoleh dari kepercayaan Kristen. Di sini hukum positif mengatur konsekwensi-konsekwensi praktis, dan terakhir menuju Anugerah Tuhan yang merupakan tujuan yang dapat dicapai. Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 10-4 di bawah ini:

Gambar 10-4
Paradigma Teokratis



Sumber: David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, Diterjemahkan Oleh Setiawan Abadi, Jakarta: LP3ES, 1996, halm.70

Pada akhir abad pertengahan dua prinsip penting muncul yang mendorong transisi ke masa pencerahan (*enlightenment*) yang dimulai pada abad keenambelas. *Prinsip pertama*, bahwa penguasa atau raja merupakan wakil rakyat, dengan lingkup kekuasaan yang ditentukan oleh konstitusi yang sifatnya terbatas. *Prinsip lain*, bahwa komunitas politik bukan terdiri dari hak-hak pribadi semua individu, melainkan hak-hak dewan perwakilan. Rakyat diwakili bukan dalam kedudukan perorangan mereka, tetapi dalam kedudukan politik sebagai warga negara (Apter, 1996: 74). Sebuah dewan perwakilan menjalankan pengawasan terhadap penguasa. Hal ini merupakan dasar hak-hak individu dan perwakilan.

Prinsip-prinsip tentang hak warga negara dan pembatasan konstitusional terhadap kekuasaan para penguasa menjadi sekuler tatkala pengertian-pengertian ini berkembang menjadi sebuah teori kontrak sosial (*social contract*), dalam hal mana penguasa dan rakyat menjalin hubungan hukum atau konstitusional mereka melalui perjanjian. Ide asli perjanjian itu adalah persetujuan antara Tuhan dan manusia. Kemudian hal ini menjadi perjanjian antara penguasa dan rakyat. Selama masa pencerahan, masyarakat yang selama

abad pertengahan dianggap sebagai jenis korporasi — sebuah badan hukum — kemudian menjadi berdasar pada landasan konstitusi. Hal ini perlu diketahui bahwa dalam negara modern “korporasi” sosial tidak lagi menjadi satu rangkaian hubungan sosial yang ketat, yang diabadikan secara agama, melainkan sebuah sosial yang lebih mekanistik pola fisika “Newtonian” (1642-1727) yang disetujui pemerintah. Dalam hal ini pola tersebut pada hakekatnya menggantikan Tuhan sebagai pusat. Sebaliknya, alam semesta sekuler terdiri atas vektor-vektor yang menetralkan dirinya sendiri atau mekanistik. Seperti fisika politik berjalan menurut aturan-aturan yang disusun di atas ide mengenai unit terkecil — dalam fisika yaitu “atom”, sedangkan dalam politik adalah “individu”.

Tetapi masalahnya adalah bahwa manusia itu bukan atom, sebab mereka dapat bernalar, mereka perlu kebebasan, mereka berperilaku konstruktif bahkan juga tidak sedikit yang destruktif maupun anarkis. Di sinilah patut dipertanyakan; proses politik apakah yang akan menjamin bahwa kebebasan menghasilkan ketertiban? Newton bukan satu-satunya tokoh masa pencerahan; Voltaire bahkan perintisnya. Keduanya bisa dibilang sebagai “nenek moyang” tentang “ilmu mengenai manusia” baru. Filosof-filosof Inggris seperti John Locke dan David Hume, semuanya menyumbang terhadap perhatian yang baru tersebut, yang merupakan antitesis bagi semangat abad pertengahan maupun otokrasi (Gay, 1969:130-173).

Dalam hal ini terdapat beberapa peristiwa penting, di antaranya; kemenangan kerajaan atas gereja dalam perjuangan besar antara raja dan paus. Kemudian ketika visi sintesis paham Kristen abad pertengahan yang dominan merosot, para penguasa menjadi makin asyik untuk mempertahankan kekuasaan yang menjadi tujuan dalam dirinya sendiri. Paradigma teokratis akhirnya tergeser oleh suatu persekutuan sekuler antara raja dan sebagian filosof politik baru yang akhirnya digantikan oleh pencerahan. Sejak itu hak-hak rakyat — bukan kekuasaan penguasa — dan cara-cara melindunginya menjadi perhatian utama politik. Pemecahan universal haruslah pemerintahan perwakilan, yang dikenal dengan demokrasi politik (Apter, 1996: 76).

Tokoh utama pada transisi ini adalah Niccolò Machiavelli (1469-1527). Dia-lah yang merasa jemu dengan pertengkaran-pertengkaran doktrin, dan ia membuka jalan bagi pemikir kekuasaan yang sekuler. Seseorang yang lebih bersinonim dengan politik yang kontroversial, mengapa demikian?. Karena di satu sisi

... reputasi Machiavelli sebagian besar didasarkan pada nasihat amoral, seandainya bukan immoral, yang diberikannya dalam *The Prince* yang ditulis pada tahun 1513. ... Pandangan-pandangannya tidak lepas menempatkan dirinya sebagai seorang “guru kejahatan”. Namun di belakang daya tarik “buah terlarang” yang lezat, bagaimanapun para ahli telah menemukan kontribusi-kontribusi signifikan lain dalam karya Machiavelli. Dengan menawarkan sebuah analisis empiris yang rasional tentang negara dan politik modern, ide-idenya (meskipun muncul dalam ujaran-ujaran praktis) dipandang sebagai sebuah kunci pembuka ilmu politik kontemporer. Terlebih lagi dia mendukung suatu politik republikanisme sipil dan kebebasan yang terus menerus membentuk sejumlah arus dalam pemikiran demokratis...Apakah ia menasihati para pangeran atau rakyat, perhatian utama Machiavelli adalah untuk melestarikan lingkup publik dari pengaruh-pengaruh korup kepentingan pribadi (Losco dan William, 2005: 561-563).

Machiaveli percaya bahwa rezim-rezim masuk kedua tipe, yaitu “kepangeranan” (*principality*) dan “republik”. Dalam *The Prince*, ia memberikan nasihat tentang bagaimana mendapatkan dan mempertahankan sebuah kepangeranan. Untuk melakukannya seorang penguasa bijak hendaknya mengikuti jalur yang dikedepankan berdasarkan kebutuhan, kejayaan, dan kebaikan negara. Hanya dengan memadukan *machismo*, semangat keprajuritan, dan pertimbangan politik, seseorang penguasa barulah dapat memenuhi kewajibannya kepada negara dan mencapai keabadian sejarah (Losco dan William, 2005: 561). Sebaliknya Machiavelli mengalihkan perhatiannya dalam *Discourses* (Sebuah komentar tentang sejarah Roma yang ditulis Livius), menekankan tentang penciptaan, penjagaan, dan renovasi sebuah pemerintahan republik yang demokrasi. Perhatian utamanya adalah untuk menunjukkan bagaimana pemerintahan-pemerintahan republik dapat mendorong stabilitas dan kebebasan sambil menghindari pengaruh-pengaruh korupsi yang membuat lemah bagi negara. Sebab bagi Machiavelli, kejayaan (baik pangeran maupun republik) merupakan ambisi politik definitif — yang dikejar dalam batas-batas yang ditentukan oleh akal, kearifan, nasib baik, dan kebutuhan (Losco dan William, 2005: 562).

Jika Machiavelli menandai gerakan menjauhi filsafat agama sebagai suatu dogma politik dan membukakan jalan kepada dua penerus cemerlang. *Pertama* adalah Thomas Hobbes (1558-1674) di mana filsafat materialismenya merupakan jembatan yang menghubungkan ilmu pengetahuan dan mekanika, serta yang logikanya sama bagus

dan rapuhnya seperti logika lain yang dapat ditemukan dalam pemikiran politik. *Kedua*, adalah Jean Jaques Rousseau, tokoh yang berusaha mendefinisikan kembali kepribadian moral dalam komunitas moral (Apter, 1996: 78-79).

Dalam buku *Leviathan* (1651), Hobbes bertolak dari pengembangan pengertian negara yang jauh berbeda dengan pengertian negara pada abad pertengahan. Mereka terpaku asyik dengan komunitas organis — orang bijaksana merupakan kepala negara, rokhaniawan merupakan jantungnya, sementara berbagai organ yang berguna lainnya berkelompok membentuk keluarga atau rumah-tangga dalam persaudaraan komunitas yang mencakup keseluruhan (Gierke: 1950).

Lain halnya bagi Hobbes, tidak ada komunitas alamiah yang bertindak sebagai kekuatan hidup yang segera terwujud, kecuali suatu ciptaan yang “khayal”. Komunitas itu tercipta karena manusia — makhluk yang memiliki nafsu — mempunyai imajinasi, kemampuan berbicara, dan terutama kemampuan bernalar. Namun nalar bisa salah, sehingga secara abstrak masyarakat tidak dapat bergantung padanya. Ia menganalogikan “seperti ilmu hitung, manusia yang tidak cakap, pasti keliru dan para professor sendiri-pun mungkin acapkali salah (Hobbes, dalam Oxford, 1909). Selain itu karena manusia juga mempunyai segala macam sifat yang tidak begitu “terpuji” seperti; marah, sedih, serakah, maka akibatnya adalah terjadi situasi alamiah kearah konflik, yang menimbulkan kekacauan. Untuk mencegah kekacauan itu, pertimbangan-pertimbangan pribadi harus mengalah kepada otoritas. Tetapi bagaimana orang dapat dibujuk untuk mengumpulkan kekuasaan mereka dan menyerahkannya kepada penguasa? Mereka akan melakukannya hanya bila mereka memperoleh sejumlah manfaat darinya. Manfaat apa ? Suatu keadaan yang tertib atau teratur. Bagi Hobbes ketertiban merupakan sasaran tertinggi, suatu hal yang dapat dipahami oleh orang yang rasional dan suatu manfaat yang nyata serta dirasakan langsung. Di sinilah peran Hobbes merupakan orang yang pertama yang dapat mendefinisikan dan mengubah kepentingan pribadi dalam keuntungan publik (Apte, 1996: 80).

Ia memastikan bahwa nilai yang ditentukan orang pada dirinya itu berbeda bagi setiap orang. Memang, orang tidak dapat menentukan “harga” diri mereka, tetapi nilai sesungguhnya seseorang akan diukur oleh pendapat orang lain mengenai harga diri orang tersebut. Maka dari itu kompensasi akan bervariasi, bahkan akan menimbulkan konflik

juga mengingat tiadanya asas tunggal bagi pergantian yang disepakati bersama. Nafsu-nafsu kuat akan diikutsertakan. Orang-orang yang besar kepala, penakut, ambisius, dan masa bodoh akan menceburkan dalam konflik yang sia-sia. Di sinilah kebijaksanaan tertinggi adalah menyerahkan wewenang kepada kekuasaan itu. Namun alternatifnya juga adalah kekacauan:

Karena itu apapun yang terjadi menyusul masa Perang, di mana setiap orang menjadi “musuh” bagi setiap orang; hal yang sama juga terjadi pada masa itu, di mana manusia hidup tanpa jaminan keamanan selain kekuatan mereka sendiri...tak ada masyarakat, dan yang terburuk dari semuanya, rasa takut yang terus menerus, dan bahaya kematian karena tindakan kekerasan; Dan kehidupan manusia, terpencil, miskin, mesum, kasar, dan pendek” (Hobbes, 1905).

Inilah yang dikenal Hobbes dalam semboyannya *homo homini lupus* (manusia adalah srigala bagi sesamanya). Mengingat bahwa manusia pada dasarnya hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, segala tindakan manusia mengarah pada pemupukan kekuasaan dan hak milik. Dalam hal ini diperlukan seorang hakim yang berdiri di atas semua hukum. Tetapi kedaulatan pada mulanya terletak pada individu-individu meskipun mereka menyerahkan kedaulatan pribadi mereka melalui tindakan kolektif — pengesahan mereka (secara diam-diam atau sebaliknya) terhadap sebuah piagam atau perjanjian sosial. Piagam ini mempunyai kekuatan hukum. Dalam keadaan seperti ini, kebebasan tidak lagi tertanam pada individu-individu. Sesuai dengan pernyataannya “kebebasan bukanlah hak setiap orang sejak lahir, melainkan “hak dari publik saja” (Hobbes: 1905).

Di atas telah disebutkan bahwa tokoh cemerlang lain pada masa pencerahan adalah Jean Jaques Roussea (yang mewakili sudut pandang alternatif dan memberikan kekuasaan yang besar kepada komunitas sebagai satu keseluruhan). Tetapi antara Hobbes dan Rousseau terdapat dua orang lain lagi terutama John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755).

Perbedaan Locke dan Hobbes adalah tajam. Locke memandang keadaan alamiah bukan sebagai suatu kondisi perang, melainkan sebagai suatu kondisi yang ramah. Tetapi kedua-duanya adalah sekuler; Ia menganggap gereja sebagai tidak lebih dari suatu asosiasi sukarela. Ia juga meyakini bahwa pada efek-efek yang baik dari harta pribadi,

pemilikan yang merupakan satu bentuk jaminan, bahwa orang akan bersikap wajar dan bekerjasama satu sama lain. Sekularisme Locke mendorong ia menyerang baik doktrin mengenai hak-hak raja yang berasal dari Tuhan maupun argumen tentang ketuhanan yang digunakan oleh raja-raja absolut untuk melegitimasi penggunaan kekuasaan yang tidak terbatas.

Pelaksanaan pekerjaan dan pencarian harta merupakan faktor penting untuk ditelaah. Sebab melalui kerja dapat mengubah produk-produk alam menjadi sesuatu yang bernilai. Dalam masyarakat sipil harta dimiliki secara pribadi dan individual. Begitu juga sebaliknya karena pekerja mengolah tanah yang menghasilkan, maka kerja menjadi lebih penting daripada nilai tanah itu sendiri. Karena itu yang lebih rajin menjadi lebih kaya, sebab mereka bersedia bekerja lebih keras dan mempergunakan lebih banyak harta; mereka dibenarkan memiliki karena mereka menambah nilai lebih dari yang mereka ambil; dan perbedaan penting antara individu-individu adalah kemampuan produktif kerja mereka (Locke, 1948: 26). Inilah kerja yang jika dikenakan pada harta menciptakan nilai, dan nilai yang menjadi warisan individu.

Kontribusi penting teori Locke, dengan demikian adalah tentang hubungan antara harta dengan persetujuan. Pengertian 'harta milik' yang Locke maksudkan sedikit berbeda yang sering kita artikan.

Meski bumi dan semua makhluk yang lebih rendah derajatnya adalah milik bersama semua manusia, namun setiap orang mempunyai harta dalam dirinya sendiri; tak seorang-pun mempunyai hak terhadap harta ini kecuali dirinya sendiri. Kerja badannya dan kerja tanggannya dapat kita katakan sebagai mana mestinya adalah kepunyaannya. Maka apa saja yang ia pindahkan dari keadaan yang telah disediakan dan ditinggalkan oleh alam, telah bercampur dengan kerjanya, ia telah memasukkan sesuatu yang adalah miliknya, dan karena itu menjadikan miliknya (Locke, 1948: 15).

Menurut Locke, orang-orang membentuk persekutuan untuk memelihara (bukan menciptakan) "kehidupan, kebebasan, dan keberuntungan mereka; melalui kaidah mengenai hak dan harta yang tetap menjamin kedamaian dan ketenangan mereka. Begitu juga kekuasaan semestinya didelegasikan oleh rakyat kepada suatu badan legislatif untuk pemerintahan yang menempatkan hukum yang ditulis demi kepentingan bersama. Persamaan dalam politik adalah sangat penting di bawah kebebasan. Formula abad

pertengahan untuk kebebasan adalah “*Solus populi supreme lex*” (‘kesehatan’ atau ‘kesejahteraan’ rakyat adalah ‘hukum’ atau ‘kebajikan’ tertinggi). Oleh Locke ditegaskan kembali tentang kepentingan publik tersebut.

Dengan demikian bagi Locke, tanggung-jawab politik berasal dari hubungan-hubungan akan harta, yang akhirnya merambah sampai ke pemerintahan. Bagi Locke orang dilahirkan “secara alamiah bebas dari keharusan patuh kepada pemerintahan apapun” dan tidak akan membelenggu diri mereka secara politik. Penguasa tertinggi maupun hakim tidak berhak untuk membatasi hak atau bertindak secara lalim, dan begitu juga rakyat tidak mempunyai keharusan untuk menerima kelaliman (Apter, 1996: 84).

Hal ini sedikit berbeda dengan Montesquieu (1689-1755) yang tertulis dalam bukunya *Spirit of the Laws*, menjelaskan bagaimana evolusi berbagai bentuk perdagangan dalam dunia kuno mempengaruhi sistem politik (Montesquieu, 1949: 316-402). Montesquieu menolak teori-teori psikologis yang dikemukakan Machiavelli dan Hobbes. Kalau Machiavelli dan Hobbes beranggapan bahwa manusia pada dasarnya “bajingan, licik, tamak, berhawa nafsu... lebih siap untuk mengampuni pembunuh ayahnya ketimbang perampas hartanya”, selernya “tidak pernah puas” kepuasannya sedikit (Alen, 1928: 221). Montesquieu berpendapat, bahwa *manusia tidak senantiasa buruk seperti itu. Tetapi mereka juga tidak sebaik seperti yang ditunjukkan oleh Rousseau maupun Locke. Apapun sifat manusia, kebebasan individu merupakan dasar kesejahteraan* (Montesquieu, 1949: 5). Baginya bahaya terbesar adalah konflik antar bangsa atau perang.

Untuk mengatasi kondisi perang inilah hukum dibutuhkan. Hukum bangsa-bangsa mengatur hubungan antar negara-negara merdeka, hukum sipil mengatur hubungan antara individu-individu, dan hukum politik menentukan hubungan antar penguasa dengan rakyat. Sebaliknya negara yang lalim didasarkan atas ketakutan dan paksaan. Sedangkan negara demokratis harus berdasarkan pada kebajikan atau ia yang akan mengancam dirinya sendiri. Jika terlalu banyak persamaan merusak rasa hormat antara pribadi-pribadi, sedangkan terlalu sedikit persamaan menghasilkan kelaliman. Dalam pendapatnya yang banyak dianut hingga kini adalah bahwa negara yang cocok untuk untuk memaksimalkan kebebasan dan menyeimbangkan persamaan adalah negara di mana *kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif pemerintah perlu dipisahkan*

sendiri-sendiri, hingga hukum sipil dapat dibuat menurut kebutuhan semua bagian masyarakat. Menurutnya negara semacam inilah yang akan menghasilkan “ketenangan pikiran”, ketentruman yang dapat dirasakan oleh setiap pribadi — merupakan unsur hakiki kebebasan politik (Apter, 1996: 86).

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), seorang pengarang, filsuf politik dan komponis Prancis yang hijrah ke Genewa. Ketenaran Rousseau mulai terjadi tahun 1750, ketika ia memenangkan *Sayembara Akademi Dijon* untuk esai berbait yang bertajuk: “Apakah kebangkitan ilmu ikut andil dalam memperbaiki perilaku?” Pada tahun 1754 ia menulis *Discours sur l’origine et les fondements de l’inegalite parmi les homes*, yang isinya berupa pujian terhadap negara-alamiah; dan berpendapat bahwa hilangnya negara demikian itu setelah munculnya hak milik pribadi (Shadily, 1984: 2948). Kemudian pada tahun 1776 Rousseau sekaligus menulis dua buku *Du Contrat social ou Principes de droit Polique* dan *Emile ou de l’ Education*. Khusus buku yang pertama sering dikenal *The Social Contract*.

Pada hakikatnya Rousseau setuju dengan pendapat Locke bahwa harta harus dilindungi, dipelihara, dan dijamin oleh hukum negara. Orang dapat memiliki harta, tetapi agar semua orang sama dalam politik maka semua orang harus menikmati kegunaannya. Oleh karena itulah harta tidak boleh menjadi penyebab ketimpangan. Perlu diingat walaupun kedaulatan dibagi-bagi diantara semua anggota masyarakat, tetapi komunitas bukan seperti keluarga. Komunitas tidak memiliki cinta seorang ibu dan ayah terhadap keluarganya; para penguasa suka kekuasaan. Oleh karena itu pemerintahan apapun cenderung memerintah secara paksa. Seseorang menyetujui pada suatu otoritas, secara diam-diam adalah melepaskan hak-hak individu, karena mengasingkan kebebasan seseorang adalah tindakan yang tidak wajar. Oleh karena itu Rousseau mengemukakan lebih jauh

Menyerahkan kebebasan seseorang adalah menyerahkan kualitasnya sebagai seorang manusia, hak dan juga kewajiban kemanusiaan. Bagi seseorang yang menyerahkan segala-galanya, tidak mungkin ada gantinya. Penyerahan seperti itu bertentangan dengan sifat manusia, karena mengambil semua kebebasan dari kehendaknya adalah mengambil semua asas moral dari tindakannya. Pendeknya, suatu perjanjian yang menetapkan wewenang absolut di satu sisi dan kepatuhan yang tidak terbatas di sisi lain, adalah sia-sia dan kontradiktif (Rousseau, 1948: 105).

Di satu sisi pemikiran Rousseau menggambarkan seorang radikal, tetapi dia bukan seorang sosialis. Karena itu pulalah ia sering dikenal seorang teoretisi yang ambigu dan kadang-kadang inkonsisten (Schmandt, 2002: 388) Rousseau berpendapat bahwa kebebasan dan persamaan merupakan tujuan-tujuan masyarakat terpenting, meskipun ia meragukan kemungkinan persamaan sempurna itu. Selain itu ia berpendapat bahwa pemilikan harta sebagai “tidak wajar” — suatu tindak pengambilan yang membuat sebagian orang kuat dan yang lain lemah. Dengan demikian mengurangi kebebasan masing-masing individu. Tetapi komunitas politik juga “tidak wajar”, karena harta menciptakan masyarakat sipil. Seperti juga Locke, Rousseau melihat hubungan itu dengan sangat jelas (Masters, 1968: 49). Namun perbedaan Locke dengan Rousseau, ia menganggap betapa pentingnya persamaan bagi manusia, dan menekankan akibat-akibat yang diabaikan oleh Locke, di mana ketimpangan menghasilkan ketidakadilan dan dasar-dasar ketidakserasian. Inilah yang harus dipecahkan persoalannya melalui kontrak sosial (Rousseau, 1948: 109). Melalui kontrak sosial inilah bahwa tindakan melakukan perjanjian seperti itu melibatkan suatu “hubungan timbal-balik” antara publik dan individu. Setiap individu adalah baik anggota yang berdaulat terhadap individu-individu lain maupun anggota negara sebagai seorang yang berdaulat. Implikasinya adalah sebagai berikut:

Segera setelah orang banyak itu dipersatukan dalam satu badan, maka tidaklah mungkin mencelakakan salah satu anggota tanpa menyerang badan itu, apalagi melukai badan itu tanpa para anggotanya merasakan akibat-akibatnya (Rousseau, 1948: 112).

Jadi dalam hal ini berlaku ‘semua untuk satu’ dan ‘satu untuk semua’. Dengan demikian walaupun penguasa tertinggi memiliki kepentingan pribadi yang berbeda dengan kepentingan komunitas, ia akan mengalami kesulitan karena

... siapa saja yang menolak untuk mematuhi keinginan umum harus dirintangi oleh seluruh badan melakukan hal itu; yang tak lain berarti bahwa ia akan dipaksa untuk bebas; karena hal itu merupakan kondisi yang dengan mempersatukan setiap warga dengan asalnya, menjaminkannya dari semua ketergantungan pribadi, suatu kondisi yang memastikan pengendalian dan jalannya mesin politik dan secara sendirian memberikan perjanjian sipil yang sah, yang tanpanya akan

menjadi mustahil dan lalim, dan terkena penyalahgunaan terbesar (Rousseau, 1948: 113).

Sedangkan dalam buku *Emile*, Rousseau menganjurkan ‘kembali ke alam’, dalam arti seseorang anak haruslah dijauhkan dari pengaruh negatif kemasyarakatan yang membuatnya kehilangan keasliannya. Kemudian menjelang akhir hayatnya ia menulis tiga autobiografi *Confessions*, *Dialogues*, dan *Reveries du promeneur solitaire*. Rousseau adalah pemikir Prancis yang paling penting dari zaman pasca Renaissance, serta pengaruhnya begitu besar dalam pelbagai ilmu, tetapi yang paling terkenal adalah di bidang politik. Namun karena Rousseau menempatkan pribadi manusia pada kedudukan tinggi terutama pada emosi dan bukan rasio — manusia lebih mengikuti naluri daripada akal, dan keindahan daripada fakta obyektif, melihat keindahan kebelakang karena kepentingan historisnya yang didominasi oleh *feeling* akan mitos dan puisi — Rousseau dikategorikan sebagai tokoh romantisme politik (Schmandt, 2002: 385).

Pada abad ke-19 penolakan terhadap ‘hukum alam’ terjadi dan mereka bersandar pada filsafat utilitarianisme yang perintisannya sudah dimulai sejak zaman David Hume (1771-1776), dan Beccaria (1738-1794), namun secara formal Jeremy Bentham-lah (1748-1832), seorang sarjana hukum Inggris yang membentuk teori formal tentang reformasi sosial. Dalam bukunya yang berjudul *Principles of Moral and Legislation* (1870), Bentham mengemukakan prinsipnya dalam perubahan perundang-undangan berdasarkan semboyan “bahagia terbesar untuk sebanyak-banyaknya manusia”. Artinya kebahagiaan dideskripsikan “menikmati kesenangan, rasa aman dari penderitaan”, disamakan dengan kebaikan (*goodness*), dan ketidakbahagiaan atau penderitaan disamakan dengan kejahatan (*evil*). Tindakan yang benar adalah tindakan yang meningkatkan kebahagiaan, sedangkan tindakan yang salah adalah tindakan yang menghilangkan kebahagiaan. Pujian moral oleh karenanya terkait dengan tindakan yang pertama dan kutukan moral dengan tindakan kedua (Schmandt, 2002: 444).

Sebagaimana yang dipahami Bentham, doktrin utilitas ini mempunyai watak yang sepenuhnya kuantitatif, tidak mengakui adanya perbedaan kualitas atau jenis kesenangan. Satu-satunya tolok ukur perbedaan adalah *quantum* kesenangan yang ditimbulkan oleh tindakan yang berbeda-beda pula. Ia menyadari bahwa ketika memperkenalkan elemen kualitas dalam rumusan utilitarian, ia mengacu kepada standar kebaikan yang berbeda.

Seseorang mungkin mengalami kepuasan yang lebih besar dalam menyantap makanan favoritnya daripada membaca karya Shakespeare. Menurut tolok ukur Bentham, kesenangan inderawi akan lebih baik daripada dua kepuasan di atas bagi seseorang karena memberinya jumlah kebahagiaan yang lebih besar. Dan, ketika ia ditanya untuk memberikan bukti empiris akan validitas doktrinnya tersebut, ia menjawab bahwa kebenaran doktrin ini bersifat *self-evident* atau terbukti dengan sendirinya (Schmandt, 2002: 445).

Doktrin tersebut sangat mempengaruhi pikiran David Ricardo (1772-1823) dan John Stuart Mill (1773-1836) di bidang ekonomi dan mempengaruhi Revolusi Prancis. Mill adalah seorang jurnalis dan ekonom Inggris. Karya Mill tentang utilitarianisme dalam *On Liberty and Considerations on Representative Government*, diawali dengan pernyataan bahwa dalam ilmu praktis, seperti etika atau politik, semua tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan (Schmandt, 2002:455). Aturan tingkah-laku, sebagai konsekuensinya, harus tergantung pada tujuan tersebut. Jika terdapat tujuan yang bisa ditentukan, maka benar atau salah dalam tiap kasus adalah kesesuaian atau ketidaksesuaian fakta dengan tujuan.

Sebagai pengganti yang cenderung membahagiakan (*felicity*) Bentham, Mill menambahkan perkembangan karakter individu. Ia menyatakan bahwa tujuan pokok manusia adalah penyempurnaan diri (*self-perfection*), bukan pencapaian kesenangan. Sebab kehidupan yang diabdikan untuk pencarian kesenangan pribadi adalah sama sia-sianya dengan tingkah-laku yang mengabaikan keseluruhan watak manusia, mengingat manusia adalah makhluk sosial yang rasional.

Mill yang menyadari dengan keberatannya bahwa utilitarianisme adalah doktrin yang bersifat hedonistik, ia berusaha menunjukkan bahwa kebahagiaan mempunyai karakter kualitatif dan kuantitatif. Seseorang mungkin lebih memilih satu kesenangan dari kesenangan lainnya, meskipun ia memperoleh itu dengan ketidakpuasan yang lebih besar. Dan, individu yang bijak menuntut lebih dari sekedar kesenangan lahiriah (*sensual pleasure*) untuk membuatnya bahagia. Bagi orang yang seperti ini ketidakpuasan di bawah kondisi tertentu, lebih baik daripada kepuasan. “Lebih baik menjadi manusia yang tidak puas daripada menjadi babi yang puas; lebih baik menjadi Socrates daripada menjadi orang yang tolol tapi puas (Schmandt, 2002: 456).

Konsep Mill tentang individualisme adalah konsep tipikal dari liberalisme abad ke-19, namun demikian ia bukan seorang individualis yang ekstrim. Meskipun pemenuhan-diri (*self-fulfillment*) manusia ditekankan dalam semua karya-karyanya, tetapi pemenuhan ini harus selalu terjadi dalam konteks kebaikan umum. Mill juga menolak teori kontrak sosial dengan mengatakan bahwa tidak ada tujuan baik yang bisa dijawab dengan menemukan kontrak dengan maksud untuk menyimpulkan kewajiban-kewajiban politiknya. Kenyataan bahwa masyarakat adalah perlu bagi kesejahteraan dan perkembangan manusia, melahirkan kewajiban pada manusia untuk serta mempertahankannya. “Kondisi sosial adalah alamiah, perlu, dan sudah jamak bagi manusia, kecuali dalam keadaan yang luar-bisa, manusia tidak pernah melihat dirinya kecuali sebagai anggota masyarakat (Parkerson dan Bourn, 1963: 2).

Selain itu Mill yakin bahwa pemerintah oleh mayoritas adalah cara yang paling praktis untuk mengatur masyarakat, dan ia sangat sadar perlunya menjaga hak-hak minoritas. Untuk membuktikan apa yang dianggap sebagai pengawasan penting bagi kemungkinan tirani oleh mayoritas, ia mengusulkan perwakilan proporsional, rekonstruksi Dewan Raja (*House of Lords*), voting plural, dan kartu yang terbuka. Ia mendukung yang pertama karena keyakinannya bahwa metode pemilihan oleh suara mayoritas dalam satu distrik anggota tidak memberikan representasi yang memadai bagi minoritas. Kemudian ia mendesak agar *Chamber of States* (Dewan Negarawan) yang terdiri atas pejabat tinggi pemerintah, para intelektual, dan para wakil bangsawan menggantikan Dewan Raja yang diwariskan. Mengingat kemampuan dan pengalaman anggota-anggotanya, dewan ini bisa diberi kekuasaan untuk merancang undang-undang yang kemudian dibawa ke Majelis Rendah (Apte, 1996: 98; Schmandt, 2002: 466).

Ternyata baik empirisme maupun individualisme tidak lepas dari tantangan-tantangan yang dihadapinya. Kedua aliran ini menyulut serangan balik yang kuat terutama dari “kaum idealistis” yang pada prinsipnya memiliki beberapa pengertian:

1. Teori bahwa alam semesta adalah suatu penjelmaan pikiran.
2. Untuk bereksistensi realitas tergantung pada suatu pikiran dan aktivitas-aktivitas pikiran.
3. Seluruh realitas itu bersifat mental (spiritual, psikis). Materi yang fisik tidak ada.
4. Tidak ada pengetahuan yang mungkin selain keadaan-keadaan dan proses-proses mental.

5. Realitas dijelaskan berkenaan dengan gejala-gejala psikis seperti pikiran-pikiran, ide-ide, roh, dan seterusnya dan bukan berkenaan dengan materi.
6. Hanya aktivitas berjenis-pikiran (*mind-type*) dan isi pikiran yang ada. Dunia eksternal tidak bersifat fisik (Bagus, 2000: 300).

Salah seorang filsuf idealisme yang terkenal adalah filsuf Jerman yakni Georg Wiliam Friedrich Hegel (1770-1831). Karya-karya terpentingnya terdapat tiga buku ternama; *Science of Logic* (1816), *Philosophy of Right* (1821), dan *Philosophy of History* (1837), dan judul yang ketiga inilah yang paling berpengaruh terhadap teori politik pada masa itu.

Hegel adalah pengagum Kant, tetapi ia merasa bahwa pendahulunya itu telah gagal menjawab secara pasti persoalan yang dikedepankan empirisme Hume. Ia yakin bahwa dasar yang lebih kuat bisa dibangun untuk menghadapi pandangan empiris yang menolak kemungkinan membangun basis rasional bagi moralitas. Menurut jalan pemikirannya, dualisme pemikiran dan wujud, akal dan obyek, merupakan titik lemah dalam jawaban Kant pada Hume. Aspek filsafat Kant ini telah mendorong Kant untuk berpendapat bahwa akal tidak mampu sampai pada pengetahuan tentang benda dalam-dirinya (*things-in-themselves*) serta apa yang disebut antinomi. Hegel mengemukakan alasan bahwa jika dualisme ini bisa dijabatani secara efektif, problem pengetahuan dan kebenaran bisa dipecahkan. Upaya Hegel untuk memenuhi tugas ini menimbulkan idealisme absolut — teori bahwa realitas pokok semesta alam ada dalam ide Tuhan atau “absolut” (*the divine or absolute idea*).

Dalam pandangan Hegel, alam adalah keseluruhan yang bersifat koheren, manifestasi eksternal dari rasio absolut atau Tuhan yang secara progresif terungkap dalam ruang dan waktu. Yang absolut adalah *geist* atau roh (Bagus, 2000: 301). Roh ini terus menyelimuti meskipun ia sepenuhnya bersifat spiritual. Ia mencakup dunia materi dan semua kumpulan pengalaman manusia. Ia didasarkan pada setiap penilaian yang tercakup dalam keseluruhan pengalaman. Ia “menyingkapkan hakikatnya sendiri dalam fenomena eksistensi dunia”. Sedangkan yang terbatas adalah riil hanya dalam arti bahwa ia adalah tahap dalam perkembangan roh abslut. Setingkatnya dunia adalah ekspresi dari pemikiran akan yang absolut. Akal dan tindakan adalah bagian atau fase dari Tuhan (*divine mind*). Ia merupakan tahapan dalam perkembangan atau aktualisasi diri dari *geist*.

Dunia yang logis dengan cara ini disamakan dengan dunia riil. Pemikiran dan wujud, subyek dan obyek, materi dan bentuk pada akhirnya tercakup dalam kesatuan akal absolut. Dengan aksi seperti ini maka dualitas yang mengganggu dalam pikiran Kant dapat dihilangkan (Schmandt, 2002: 489).

Berbeda dengan zaman setelah Hegel, Eropa pada saat itu sangat dipengaruhi oleh sosialisme. Jika ditelusuri keragamannya istilah sosialisme tersebut bertolak dari sosialisme *utopi*, *sindikalisme*, *anarkisme*, sampai ke *sosialisme ilmiah*. Sosialisme utopis bertolak dari Sir Thomas More atau Morus (1478-1535) dalam bukunya *Utopia* (1516) yang mengajarkan agar kembali ke keadaan tidak berdosa. Ia ingin menghapuskan harta pribadi yang dianggap sebagai akar semua kejahatan, dan menganjurkan kesederhanaan sebagai cara untuk menyembuhkan keadaan dunia yang menyedihkan (Apte, 1996: 108). Kemudian pemikiran seperti ini juga mempengaruhi tokoh-tokoh Francis Noel Babeuf (1764-1797) yang berpendapat bahwa semua orang mempunyai hak yang sama pada kekayaan di atas bumi ini. Selain itu Henri Saint Simon (1760-1825) aristokrat yang bersama Laffayette yang bertempur di Amerika, menyarankan bahwa hak waris seharusnya dihapuskan, bahwa setiap orang seharusnya bekerja, dan bahwa resep bagi distribusi hasil-hasil produksi adalah “dari tiap-tiap orang menurut kemampuannya, untuk setiap orang menurut kebutuhannya” (Schmandt, 2002: 510).

Kemudian tokoh-tokoh lainnya seperti Charles Fourier (1772-1842) seorang pembaharu Prancis, Louis Blanc (1811-1882) intelektual Prancis yang menulis *Organization of Labour*, sedangkan di Inggris sosialisme diprakarsai oleh Robert Owen (1771-1837). Owen mengusulkan bahwa pemerintah perlu membangun perkampungan-perkampungan kerjasama bagi kaum miskin, bukannya memberi mereka sedekah. Di sini orang-orang akan memproduksi yang dibutuhkan untuk konsumsinya sendiri dan mereka akan saling menukar surplus berbagai jenis barang. Tujuannya tidak hanya meringankan beban kebutuhan kaum miskin, tetapi juga untuk melatih warga agar mau bekerja keras, melatih produktivitas, serta hidup berdisiplin. Owen juga datang ke Amerika dengan mengadakan eksperimen-eksperimen pada tingkat politik yang telah dimulai di pabriknya di Scotlandia.

Kemudian Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) seorang filsuf Prancis yang dikenal dengan “*sindikalisme radikal*” yang menulis buku *What is property?* (1840). Ia mencita-citakan adanya suatu masyarakat dengan hak milik yang dibagikan di antara individu-individu merdeka yang bekerjasama secara sukarela, tanpa adanya kerangka kekuasaan negara (Apte, 1996: 119; Shadily, 1986: 2782). Berikutnya adalah Mikhail Bakunin (1814-1885) merupakan seorang tokoh anarkis Rusia sejati yang tegas dan berani dalam tindakan. Pribadi Bakunin sebenarnya banyak dipengaruhi ekstremis Jerman Wilhelm Weitling, seorang pengikut organisasi Louis-Agust Blanqui dan organisator gerakan komplotan rahasia. Bakunin menjadi obyek perhatian polisi di sejumlah negara. Untuk menghindari penangkapannya oleh polisi, ia selalu hidup berpindah-pindah. Pernah menjadi sahabat Giuseppe Garibaldi, pemimpin nasionalis Italia, dan berdiam di Italia di mana ia mendirikan persaudaraan rahasia pertama, bentuk asli dari organisasi-organisasi anarkis bawah tanah (Woodcock, 1972: 160).

Walaupun semuanya ini tidak menjelma menjadi suatu kenyataan sesuai dengan harapan, namun hal ini penting untuk diketahui sebagai kritik terhadap sistem kapitalistik dan merupakan transisi bagi bentuk-bentuk sosialisme modern. Faktor ini pula yang mendorong Karl Marx (1818-1883) menawarkan doktrin “sosialisme ilmiah” pada dunia (Schmandt, 2002: 512). Teori-teori ekonomi Marx dirancang untuk menunjukkan bahwa kapitalisme jelas melahirkan kondisi-kondisi yang mengarah pada kehancurannya dan memberi jalan bagi perkembangan sosialisme. Marx berusaha menempatkan kembali setiap perubahan fundamental di bidang sosial dan politik pada sebab ekonomi. Beberapa aspek dari doktrin yang terkait dengan perkembangan teori politiknya tertuang dalam karyanya yang terkenal *Das Kapital*.

Salah satu alasan mengapa Marx menjadi tokoh yang begitu penting, ialah karena ia mewakili suatu campuran *intelektual* yang berhasil dalam ekonomi, politik, sosial, yang memandang dunia dengan perasaan dingin serta mencari suatu masa depan yang lebih bermoral dan lebih bebas bagi manusia, dengan mengembangkan suatu teori perubahan sosial secara ilmiah seperti dialektika materialisme. Teori dialektika materialisme historis Marx, didasarkan pada beberapa pokok pikiran:

- (1) perkembangan historis berlangsung melalui sintesis ketegangan atau kontradiksi yang inheren — dialektika;

- (2) institusi sosial dan politik dibentuk dan ditentukan oleh ekonomi — materialisme historis ;
- (3) gerakan dialektik sejarah terungkap dalam pertentangan atau konflik antar kelompok-kelompok ekonomi—pertentangan kelas (Schmandt, 2002: 514)

Cara-cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan ini terdapat dalam Manifesto Komunis (*Communist Manifesto*) 1847, sebagai berikut:

- (1) penghapusan pemilikan dan pemberlakuan semua pajak untuk kepentingan umum;
- (2) pajak pendapatan yang progresif dan dikelompokkan menurut kelas-kelas;
- (3) penghapusan semua hak waris;
- (4) serampasan harta milik semua emigran dan pemberontak;
- (5) sentralisasi kredit di tangan negara melalui bank nasional;
- (6) sentralisasi alat-alat komunikasi dan transportasi di tangan negara;
- (7) perluasan pabrik-pabrik dan alat-alat produksi yang dimiliki negara: mengolah lahan-lahan tidur, dan memperbaiki keadaan tanah menurut rencana umum;
- (8) kewajiban yang sama bagi semua orang untuk bekerja dan pembangunan sarana-sarana industri, khususnya untuk pertanian;
- (9) penggabungan pertanian dengan industri; penghapusan secara bertahap perbedaan antara kota dan desa melalui penyebaran penduduk yang lebih seimbang ke desa; dan
- (10) pendidikan gratis bagi semua anak-anak di sekolah-sekolah umum dan penghapusan pekerja anak-anak yang ada sekarang.

Dengan demikian Marx bagi zaman modern khususnya di kalangan sosialis-komunis menyerupai Socrates pada zaman Yunani kuno, yakni sebagai lambang kekuasaan rakyat atas nasib mereka sendiri, seperti yang dikatakan teman dekatnya Friederich Engels (1958: 167-168), bahwa

Karena Marx adalah seorang revolusioner di atas segala-galanya. Misi hidup yang sebenarnya adalah membantu, dengan cara apapun, menggulingkan masyarakat kapitalis dan lembaga-lembaga negara yang dilahirkannya, dan menyumbang kepada pembebasan proletariat modern, yang dialah orang pertama yang menyadarkan mereka akan kedudukan dan kebutuhan-kebutuhan mereka, menyadari kondisi-kondisi bagi emansipasinya.

Setelah Marx meninggal, warisan radikal menjadi terpecah belah. *Pertama adalah tradisi Lenin*, yang memandang perlunya transformasi militan dari kapitalisme yang paling lemah di pinggiran (*peripheri*) sampai ke pusat (*center*). *Kedua*, pemikiran Marx

yang lebih demokratis; bahwa transisi revolusioner dapat terjadi melalui cara-cara parlementer, melalui *revisionisme*, di antara tokohnya adalah Eduard Bernstein, Karl Kautsky di Jerman, kaum Fabian di Inggris, dan Jean Jaures serta kaum sosial Reformis di Prancis. Sedangkan kelompok radikal juga terpecah-pecah lagi, seperti pengikut-pengikut di Rusia Leon Trotsky dan Joseph Stalin, di Italia Antonio Gramsci, dan Cina Mao Tse Tung.

Dalam bagian filsafat politik, terjadi pergeseran dari semula yang bertolak dari asumsi rasionalitas menentukan bagi politik apapun. Namun kesulitannya adalah; bagaimana itu semua mengawasinya? Di sinilah orientasi kelembagaan (institusional) berusaha mewujudkan pemecahan-pemecahan universal dengan menerjemahkan cita-cita libertarian ke dalam pemerintahan perwakilan. Kebanyakan pengikut paham kelembagaan, yang mengikuti tradisi pencerahan, menolak pemecahan-pemecahan tuntas seperti itu. Bagi mereka politik adalah “terbuka”. *Konflik diubah menjadi persaingan damai melalui badan-badan perwakilan dalam pemerintahan* (Popper, 1945). Sistem yang dipegang oleh kelompok ini adalah sistem terbuka. Sistem ini berusaha mencari pemecahan sedikit-demi sedikit berdasarkan persetujuan rakyat. Dan, sistem ini dapat diperbaharui, sebab betapapun buruknya suatu sistem, masih lebih baik daripada yang tidak memiliki sistem yang mapan.

Jadi “pemerintahan perwakilan” merupakan prasyarat kelembagaan bagi demokrasi. Namun perlu diketahui bahwa lembaga tidak dengan sendirinya ada dan hidup dengan sendirinya, mereka terdiri atas orang-orang yang bertindak berdasarkan penafsiran mereka sendiri terhadap kemampuan badan-badan pemerintahan untuk berkuasa. Lembaga-lembaga demokratis misalnya, akan gagal dalam masyarakat industri modern, bila keyakinan mengenai tindakan politik yang rasional berdasarkan akal sehat yang wajar diubah menjadi paranoia, kebencian, ketakutan masal oleh “orang-orang dalam” dari “orang-orang luar” Sebagai contoh di Jerman yang dikuasai Nazi, di Itali yang dikuasai Fasis, di mana orang menyerahkan konsensus kekuasaan kepada pemerintahan para diktator, dan atas nama kebudayaan politik yang baru, mereka melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma mendasar. Jelas kejadian seperti itu telah menimbulkan perhatian terhadap *patologi politik* manusia dalam masyarakat modern (Apter, 1996: 136-205).

Adapun tokoh-tokoh paham kelembagaan tersebut di antaranya Ruth A Bevan dalam karyanya *Marx and Burke: A Revisionist* (1973), seorang pemikir cemerlang yang mengulas mempertegas kembali pentingnya Revolusi Amerika dari kacamata “orang luar” yakni Alexis de Tocqueville dalam karyanya *Democracy in America* (1945), kemudian A.V. Dicey dalam *Introduction to the Study of the Law of Constitution* (1959), dan yang terakhir adalah Robert A. Dahl dalam karya monumentalnya *Pluralist Democracy in the United States* (1967) yang banyak membahas tentang konsistensi mengapa banyak kaum emigran memilih Partai Demokrat. Pendeknya dalam kajian kelembagaan ini banyak membahas analisis hukum dan sejarah, metode-metode deskriptif dan perbandingan, serta teori kelompok kepentingan.

Kemudian pada *paham Tingkahlaku (Behavioralisme)*; yang mengalihkan perhatiannya kepada lembaga ke pengkajian mengenai bagaimana orang bertingklaku dan apa yang mendorong tingkahlaku mereka. Paham ini menyangkut banyak topik: pendapat dan preferensi orang-orang; apa yang menyebabkan mereka melakukan tindakan kekerasan; kapan mereka mematuhi peraturan; apakah mereka menyesuaikan diri dengan pandangan yang bertentangan; bagaimanakah pandangan mereka diubah; kapan mereka berpartisipasi dalam politik; bagaimana mereka melindungi kepentingan-kepentingannya; serta bagaimana semua faktor itu mempengaruhi keanggotaan mereka atau hubungan mereka dengan partai politik, faksi-faksi, dan aspek-espek lain dari kehidupan kelompok dalam politik.

Akar-akar mazhab ini sebenarnya sejak berkembangnya aliran filsafat empirisme radikal David Hume (1771-1776), terus mempengaruhi pemikiran-pemikiran filsafat pragmatis William James (1842-1910) yang menekankan empirisme, voluntarisme, dan tindakan-tindakan individual, terus ahli filsafat pragmatisme lainnya Charles S. Pierce (1839-1914) bahkan sampai ke ahli filsafat instrumentalisme John Dewey (1859-1952) yang berusaha membangun filsafat praktis mengenai kebenaran yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip ideal, melainkan pada observasi terhadap pengalaman. Kemudian dalam kaitannya dengan kecenderungan umum terhadap proses belajar dari tindakan, adalah pendapat seorang ahli behaviorisme John B. Watson (1878-1958). Tokoh utama dalam bidang politik adalah David Easton dari *University of Chicago* yang terkenal karyanya *The Political System* (1965), kemudian V.O. Key Jr. yang karyanya *Public*

Opinion and American Democracy (1961), dan *Politics, Parties and Pressure Groups* (1948), selanjutnya seorang ahli psikologi politik H.J. Eysenck dengan karyanya *The Psychology of Politics* (1954), Harry Stack Sullivan dalam *Tensions Interpersonal and International* (1950), dan yang terakhir adalah Robert d. Putnam dalam *The Beliefs of Politicians* (1973). Paham tingkahlaku ini jelas memusatkan perhatiannya pada perorangan maupun kelompok, dengan mengutamakan metode eksperimental, analisis psikologi, teori proses belajar, teori pengambilan keputusan serta aspek-aspek organisasi mempengaruhi tindakan.

Lain halnya dengan *paham kemajemukan*; yang menekankan perpaduan antara kelembagaan dan tingkahlaku, lebih menaruh perhatian pada bagaimana diferensiasi dan partisipasi sosial memperluas lingkungan politik. Perhatian utamanya terletak pada cara-cara partisipasi demokrasi dan efeknya terhadap proses belajar dan tingkahlaku. Beberapa yang dikenal dalam paham ini adalah W. Lloyd Warner dalam karyanya *Social Class in America* (1960) di mana dalam buku ini membahas rinci tentang teori elit kekuasaan yang beroperasi di Amerika masih melalui dominasi dan kedudukan pada skala nasional. Kemudian Rupert Emerson dalam karyanya *From Empire to Nation* (1960), ia banyak melukiskan pentingnya sikap mental pluralisme primordial yang masih banyak melekat dan menjadi tantangan di negara-negara yang masyarakatnya plural. Yang terakhir adalah Nelson W. Polsby dalam *Community Power and Political Theory* (1963) yang mengupas makna kekuasaan sebagai suatu kekuatan pembuat keputusan, dalam cara yang sangat komparatif dan teoretik.

Paham Struktural, menekankan pada “agenda tersembunyi” di belakang politik, fokusnya terhadap teori pertukaran analisis peran, analisis kelas, analisis Marxis, fungsionalis, dan linguistik. Tokoh-tokoh yang dominan pada paham ini adalah dimulai dari tokoh sosiologi-politik Erving Goffman dalam karyanya *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience* (1974), ia mendeskripsikan betapa pentingnya untuk menemukan agenda-agenda tersembunyi, aturan-aturan permainan yang menentukan aksi. Politik nasional ataupun lokal juga berstruktur. Jika orang tahu bagaimana politik distrukturkan, maka ia akan menemukan kesenjangan dalam pengetahuan seseorang yang timpang, sehingga dapat membentuk pengetahuan baru. Strukturalisme menyusun potensi ini dalam istilah fungsi-fungsi (Apter, 1996: 371). Mereka memandang masyarakat

sebagai suatu organisme sosial. Jika ilmu ekonomi klasik mengaitkannya pada fisika, maka teori strukturalis memandangnya seperti ilmu biologi. Seperti halnya badan, mempunyai kebutuhan-kebutuhan fungsional, dan kebutuhan-kebutuhan itu harus dipenuhi jika ingin tetap hidup, serta kebutuhan-kebutuhan itu satu bagian dan lainnya saling berkaitan. Sebagai contoh kebutuhan akan partai politik, sebagai pemenuhan kebutuhan penyaluran aspirasi para anggotanya berhubungan dengan ekspektasinya terhadap pemerintah serta perubahan-perubahan sosial yang diharapkan.

Kemudian yang terakhir adalah paham *developmentalisme* (perkembangan) menekankan perhatiannya pada masalah-masalah transisi pertumbuhan dari jenis sistem politik lama ke yang baru, dan bagaimana inovasi-inovasi itu terjadi, efek-efeknya, distribusinya, munculnya negara-negara baru, nasionalisme yang berjuang melawan kolonialisme dan imperialisme, siapa yang memperoleh manfaat dan sebagainya (Apter, 1996: 13-14). Dalam kajian paham ini bisa diawali dengan contoh tulisan Sholmo Avineri dalam *Karl Marx on Colonialism and Modernization* (1969) yang menafikan teori-teori gerakan sejarah yang evolusioner lamban, apalagi berulang (*siklis*) di Barat sebagai perkembangan demokrasi politik. Baginya *developmentalisme* “liberal” menghasilkan kontradiksi-kontradiksi kapitalis yang makin intensif, yang melahirkan imperialisme. Selanjutnya baik Asher (1970) maupun Hoselitz (1960) sangat mengharapkan uluran tangan negara-negara maju dalam modernisasi negara-negara berkembang. Mereka itu bukan hanya miskin, tetapi juga menjadi sasaran penghisapan dan manipulasi oleh kekuatan-kekuatan utama. Baik pemerintah maupun sarana-sarana politik kekuasaan lain seperti korporasi-korporasi multinasional menimbulkan ketidakadilan.

E. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya

Keterkaitan *Ilmu Sosiologi* dengan *Ilmu Politik* dapat dilihat pada hubungan di mana sosiologi banyak membantu memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari pelbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat (Budiardjo, 2000: 20). Sebab dengan menggunakan pengeritan-pengertian dan konsep-konsep, generalisasi-generalisasi, serta teori-teori ilmu sosiologi, para ahli ilmu politik dapat mengetahui sampai di mana susunan dan stratifikasi sosial itu dapat mempengaruhi ataupun

dipengaruhi oleh *policy decisions* (keputusan kebijaksanaan), *sources of political authority* (sumber-sumber kewenangan politik), *social control* (kontrol sosial), *social change* (perubahan sosial), maupun *political legitimacy* atau corak dan sifat keabsahan politik (Budiardjo, 2000: 20).

Selain itu baik sosiologi maupun politik juga mempelajari institusi makro seperti negara. Hanya saja kalau sosiologi menganggap negara itu sebagai salah satu lembaga *agent of social control* (pengendalian sosial). Hal ini wajar karena dalam sosiologi bahwa dalam masyarakat yang sederhana maupun kompleks, senantiasa terdapat kecenderungan untuk menimbulkan proses pengaturan atau pola-pola pengendalian tertentu yang formal maupun tidak formal. Di samping itu sosiologi melihat bahwa negara juga sebagai salah satu asosiasi dalam masyarakat dan memperhatikan bagaimana sifat dan kegiatan anggota asosiasi itu mempengaruhi sifat dan aktivitas negara. Dengan demikian sosiologi dan ilmu politik memiliki persamaan pandangan bahwa negara dapat dianggap baik sebagai asosiasi maupun sebagai sistem pengendalian. Hanya saja bagi ilmu politik negara merupakan obyek penelitian pokok, sedangkan dalam sosiologi negara hanya merupakan salah satu dari banyak asosiasi dan lembaga pengendalian dalam masyarakat (Budiardjo, 2000: 21).

Hubungan *Ilmu Antropologi* dengan *Ilmu Politik*, nampak pada pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Kita tahu bahwa mula-mula antropologi lebih banyak memusatkan perhatian pada masyarakat dan kebudayaan di desa-desa dan pedalaman, sedangkan sosiologi lebih memusatkan perhatian pada kehidupan masyarakat kota yang jauh lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan teknologi modern. Lambat laun antropologi dan sosiologi saling mempengaruhi baik dalam obyek penelitian maupun dalam pembinaan teori-teori, sehingga pada saat ini batas-batas antara kedua ilmu sosial tadi telah menjadi kabur.

Sekarang ini perhatian sarjana ilmu politik terhadap antropologi makin meningkat, sejalan dengan bertambahnya perhatian dan penelitian tentang kehidupan serta usaha modernisasi politik di negara-negara baru. Sejalan dengan itu sekarang ini pengaruh dalam bidang teori, khususnya dalam menunjukkan perbedaan struktur sosial serta pola-pola kebudayaan yang berbeda-beda pada tiap-tiap masyarakat, antropologi

telah pula berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik. Salah satu pengaruh yang amat berguna dan terkenal serta yang kini sering dipakai dalam penelitian ilmu politik ialah metode *participant observer* atau peserta pengamat (Budiardjo, 2000: 22). Cara penelitian ini mendorong para peneliti ilmu politik untuk mengamati fenomena-fenomena kehidupan sosial yang sifatnya “dari dalam” masyarakat menjadi obyek penelitiannya. Ternyata dari model penelitian ini, para ahli ilmu politik dapat mengembangkan pembinaan teori-teori atas dasar kenyataan-kenyataan konkrit yang dialami dan diamatinya sendiri secara *grounded theory*.

Hubungan *ilmu sejarah* dengan *ilmu politik*; nampak sejak dahulu merupakan dua bidang kajian yang penting kontribusinya yang saling mempengaruhi. Sejarah banyak menyumbangkan fakta-fakta masa lampau untuk diolah dalam ilmu politik lebih lanjut. Perbedaan antara ahli sejarah dengan politik sebenarnya terletak bahwa ahli sejarah selalu meneropong masa lampau inilah yang menjadi sasarannya, sedangkan dalam ilmu politik sasarannya lebih ditekankan pada masa sekarang dan ke depan atau *future oriented* (Budiardjo, 2000: 17). Para ahli ilmu politik selalu tidak puas hanya mencatat fakta-fakta sejarah, sehingga ia akan selalu mencoba menemukan dalam sejarah pola-pola tingkah-laku politik (*patterns of political, behavior*) yang memungkinkannya untuk, dalam batas-batas tertentu, menyusun suatu pola perkembangan untuk masa depan dan memberi gambaran bagaimana sesuatu keadaan diharapkan akan berkembang dalam keadaan tertentu.

Hubungan *Ilmu Geografi* dengan *Ilmu Politik* itu nampak dari beberapa faktor yang menyangkut geografis, seperti bentuk daratan (apakah kepulauan besar, kecil, ataupun kontinental), perbatasan dengan negara lain (*frontiers*), kepadatan penduduk (*over populatin*), kesuburan dan kandungan mineral yang dimilikinya, maupun letak wilayah itu apakah daerah persimpangan budaya ataukah terpencil, semuanya memiliki pengaruh politik yang perlu diperhitungkan. Oleh karena itu menurut seorang ahli politik Prancis Maurice Duverger dalam *The Study of Politics*, bahwa struktur geografis yang menyangkut geografi fisik dan sosial bahwa “politik adalah berada di dalam geografinya”. (Duverger, 1985: 36). Lebih jauh Duverger mengemukakan bahwa Aristoteles telah merumuskan teori tentang hubungan antara iklim dengan kebebasan politik. Kemudian Jean Bodin dan dielaborasi oleh Montesquieu, dalam bukunya *Spirit of*

Laws, jilid XVII (1748) mengemukakan: “Panas yang tinggi melemahkan kekuatan dan keberanian manusia”, sedangkan “dalam iklim yang dingin ada kekuatan tubuh dan jiwa tertentu yang memungkinkan manusia melakukan perbuatan-perbuatan langgeng, mengejutkan, besar, dan berani”. Kemudian seorang ilmuwan Jerman bernama Ratzel menerbitkan *Political Geography* (1897); kemudian murid-muridnya menyebutnya disiplin yang baru tersebut dinamakan “geopolitik”. Kemudian Sir Halford John Mackinder seorang ahli geografi Inggris pada tahun 1919 menerbitkan buku *Democratic Ideals and Reality*, Dengan membuat simplifikasi peta dunia, dia menganggap Eropa, Asia dan Afrika sebagai satu blok tunggal, pusat dari kehidupan politik dunia, yang disebutnya “pulau dunia”. Mackinder menyebutnya teori *Hertland* (Jantung Dunia) dengan isi pokok “Barangsiapa yang menguasai Eropa Timur, dia akan menguasai ‘pusat bumi’; siapa yang menguasai ‘pusat bumi’ akan menguasai ‘pulau dunia’; dan siapa yang menguasai ‘pulau dunia’ dia akan menguasai dunia (Duverger, 1985: 422).

Teori Ratzel dan Mackinder tersebut oleh penasihat Hitler yaitu Karl Haushofer mengembangkan teori Jerman tentang *Lebensraum* (Rung-Hidup). Teori tersebut dijustifikasi demi kepentingan-kepentingan politik imperialisme Jerman dalam mengembangkan “*sense of space*”. Tetapi perkembangan teori ini sampai sekarang sudah ditinggalkan para ahli geografi maupun politik karena dianggapnya sebagai ilmu pengetahuan yang terlalu deterministik dan sebagai bentuk “*pseudo science*”. Namun demikian hubungan ilmu geografi dan ilmu politik sampai sekarang tetap memiliki keterkaitan yang begitu melekat antar kedua disiplin tersebut.

Hubungan *Ilmu Ekonomi* dengan *Ilmu Politik* nampak baik dari aspek sejarahnya maupun peranan ekonomi dalam politik maupun sebaliknya. Ditinjau dari sejarahnya ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan suatu bidang kajian (ilmu) yang terintegrasi yang dikenal sebagai *political economy* (*ekonomi politik*). Istilah ini mulai dikenal di Inggris, yang maksudnya adalah merupakan pemikiran dan analisis kebijaksanaan yang hendak digunakan memajukan kekuatan dan kesejahteraan di negara Inggris dalam menghadapi saingan-saingannya seperti; Portugis, Spanyol, Perancis, maupun Jerman (Budiardjo, 2000: 23).

Sekarang ini *political economy* telah berkembang dengan masing-memisahkan diri dalam ilmu ekonomi dan ilmu politik. Namun demikian dua ilmu sosial tersebut

masih begitu erat dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, dalam ilmu ekonomi sekarang ini telah banyak memiliki *the body of knowledge* sendiri seperti memiliki, obyek, metode dan teknik, serta kemanfaatannya yang sangat spesifik. Khusus untuk ilmu ekonomi modern dewasa ini sudah menjadi salah satu cabang ilmu sosial yang memiliki fakta, konsep, generalisasi, dan teori, bahkan dalam metodologinya, ilmu ekonomi memiliki sifat yang ketat dan terperinci. Karena itu tidak aneh mengingat ketatnya ilmu tersebut, maka ilmu ekonomi sering digunakan untuk menyusun perhitungan-perhitungan secara rinci.

Ide-ide ataupun pemikiran yang bertolak dari faktor *scarcity* (kelangkaan), menyebabkan ilmu ekonomi beorientasi kuat terhadap kebijaksanaan yang rasional, khususnya penentuan hubungan antara tujuan dan cara pencapaian tujuan tersebut. Wajar jika ilmu ekonomi sering disebut ilmu sosial yang sangat *planning-oriented*, di mana pengaruh ini juga nampak pada ilmu politik (Budiardjo, 2000: 23). Hal tersebut terbukti bahwa dalam pengertian pembangunan ekonomi (*economic development*) telah mempengaruhi pengertian pembangunan politik (*political development*). Dengan demikian pilihan-pilihan tentang kebijaksanaan yang harus ditempuh seringkali terbatas sekali adanya, oleh karena itu ilmu ekonomi dikenal pula sebagai ilmu sosial yang bersifat *choice-oriented*, hal mana telah berpengaruh pada spesifikasi penelitian mengenai *decision making* dalam ilmu politik moden.

Implikasi dari ilmu ekonomi yang berpangkal-tolak dari pemikiran faktor *scarcity* (kelangkaan), telah mendorong dalam ilmu tersebut telah bergeser dan berikhtiar ke arah ramalan (*prediction*) berdasarkan perhitungan yang seksama, sehingga ilmu ekonomi modern dapat terhindar dari pemikiran-pemikiran yang spekulatif. Hal ini juga sangat berpengaruh pada ilmu politik, untuk lebih berupaya keras pada pendekatan/metode yang lebih ilmiah yakni *behavioral approach* atau pendekatan tingkahlaku (Apter, 1996: 209; Surbakti; 1996:16; Budiardjo; 2000: 24)

Sebaliknya dalam mengajukan kebijaksanaan atau siasat ekonomi, tentunya seorang ahli ekonomi juga dapat bertanya kepada seorang ahli politik tentang politik manakah yang paling mungkin baik disusun guna mencapai tujuan ekonomi yang diharapkan. Begitu juga seorang ahli politik dapat meminta bantuan ahli ekonomi tentang syarat-syarat ekonomis yang harus dipenuhi guna memperoleh tujuan-tujuan politis

tertentu, terutama yang mengenai pembinaan dan pengembangan kehidupan berdemokrasi.

Sedangkan untuk hubungan *Ilmu Psikologi* dengan *Ilmu Politik* nampak di situ bahwa psikologi banyak mempelajari aspek-aspek *intern* (seperti motivasi, sikap, minat, karakter, prestasi, dan lain sejenisnya) dan proses-proses mental yang terjadi. Dengan menggunakan analisis psikologi kita dapat mengetahui beberapa aspek seperti latar belakang pemimpin apakah dia berhasil atau gagal ditinjau dari aspek individunya. Kita juga bisa menyimak mengapa kepemimpinannya ia begitu disenangi maupun dibenci oleh kelompok masyarakat luas. Di sisi lain kita juga bisa melihat, mengapa dia memimpin begitu baik (berhasil) maupun jelek prestasi kepemimpinannya yang berbeda dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, kepribadian kepemimpinan macam apa yang dia implementasikan ? dan lain-lain.

Jadi psikologi banyak menyingkap masalah-masalah yang tersembunyi, tidak muncul kepermukaan, tetapi begitu penting untuk disingkap sebagai bagian yang *inherent* kepemimpinan seseorang. Ilmu tersebut banyak memberikan informasi tentang sebab-sebab internal yang sering orang banyak mengabaikannya karena dianggap 'tidak langsung' menjadi faktor *determinan* politik.

Begitu juga untuk kontribusi psikologi sosial yang berhubungan dengan aspek kejiwaan secara massa, hal ini berharga untuk mengungkap, seperti; mengapa jika dalam demonstrasi massa yang tergabung dalam "crowd" maupun "mob" mudah terjadi anarkhis? Adakah hubungan antara "crowd" atau "mob" dengan deindividuasi (hilangnya rasa tanggung jawab individu) karena kelompok massa? Lalu mengapa demikian ? Hal-hal semacam ini hanya mungkin dapat diungkap dengan psikologi sosial. Dengan demikian baik psikologi umum maupun psikologi sosial sangat berkontribusi dalam melakukan analisis dan tindakan politik. Sebab psikologi umum maupun sosial pada hakikatnya dapat mengungkap informasi-informasi tersembunyi baik secara individu (psikologi umum) maupun kolektif (psikologi sosial). Oleh karena itu tidak aneh jika psikologi dapat menjelaskan bagaimana kepemimpinan tidak resmi (*informal leadership*) turut menentukan suatu hasil putusan dalam kebijaksanaan politik dan kenegaraan. Selain itu juga psikologi dapat menjelaskan bagaimana *attitude* dan

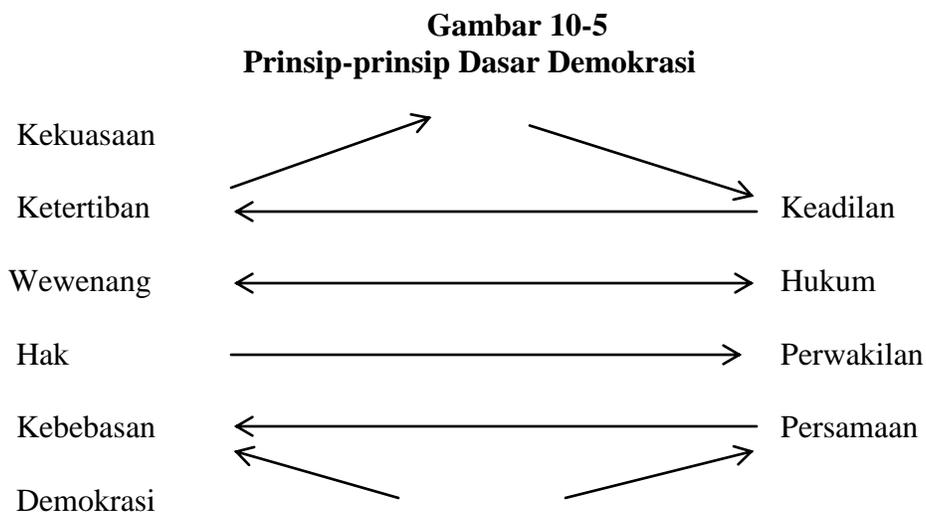
expectation masyarakat dapat melahirkan tindakan-tindakan serta tingkah-laku yang berpegang teguh pada tuntutan-tuntutan sosial atau *conformity* (Budiardjo, 2000: 25).

F. Mazhab-mazhab Ilmu Politik

Dalam pengelompokan mazhab-mazhab ilmu politik, menurut Apter (1996: 135-443), terbagi atas 5 mazhab, yakni mazhab: (1) *institusionalisme atau kelembagaan*, (2) *behaviorisme*, (3) *pluralisme atau kemajemukan*, (4) *strukturalisme*, (5) *developmentalisme*.

Pertama, *paham institusionalisme atau kelembagaan*; berusaha mewujudkan pemecahan-pemecahan universal dengan menerjemahkan cita-cita libertarian ke dalam pemerintahan perwakilan. Bagi para penganut paham kelembagaan, teori-teori politik libertarian timbul dari sejarah sebagai tujuan moral yang akan dimantapkan di dalam praktik politik. Inilah tradisi yang dibangun Plato, dan juga yang diwakili Karl Marx. Kebanyakan pengikut paham kelembagaan, yang mengikuti tradisi Pencerahan, ia menolak pemecahan-pemecahan tuntas seperti ini. Bagi mereka politik adalah “terbuka”. Konflik diubah menjadi persaingan damai melalui badan-badan perwakilan dalam pemerintahan (Popper, 1945).

Ide-ide generatif utama yang diikuti oleh para penganut paham kelembagaan ini dapat diringkas seperti pada gambar 10-5 berikut ini.



Sumber: David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, Diterjemahkan Setiawan Abadi, Jakarta: LP3ES, 1996, hlm. 137.

Kekuasaan adalah kekuatan yang dapat dipakai dan dikendalikan. Persoalan besar sejarah adalah mengubah kekuasaan mutlak untuk dapat diubah kearah demokrasi. Kekuasaan merupakan dasar politik. Dalam demokrasi, pemakaiannya harus sesuai dengan patokan-patokan kewajaran atau keadilan. Hal ini selanjutnya tercermin dalam hukum. Hukum menciptakan wewenang dan memungkinkan perwakilan menjadi sarana pembuatan hukum. Selanjutnya jika perwakilan didasarkan persamaan, maka ia akan mendorong kebebasan dan demokrasi itu sendiri. Demokrasi adalah sistem yang menjamin kebebasan. Kebebasan-kebebasan ini diabadikan dalam hak-hak, yang diungkapkan, secara politik dalam perwakilan. Dalam demokrasi melalui kedaulatan rakyat, hak menimbulkan wewenang, suatu wewenang yang didukung oleh hukum. Hasilnya adalah sebuah sistem ketertiban yang menjadi landasan yang memungkinkan dijalankannya kekuasaan serta ditetapkannya asas-asas kewajaran atau keadilan.

Selanjutnya lembaga-lebaga pemerintahan ini terbagi dalam tiga wewenang yang erupakan perhatian utama kaum institusionalis, yaitu: *Pertama; badan legislatif*; Badan ini merupakan pengawas terpenting terhadap kekuasaan yang nyata maupun potensial. Badan ini terdiri atas wakil-wakil rakyat. Semua pemberlakuan hukum harus disetujui oleh badan legislatif ini, namun sangat sedikit kebijaksanaan barasal langsung dari inisiatifnya (Apter, 1996: 145). Fraksi-fraksi, kelompok-kelompok kepentingan, dan koalisi-koalisi partai politik campur tangan dalam pemberlakuan kebijaksanaan-kebijaksanaan penting. Badan legislatif jarang mengusulkan rancangan undang-undang khusus, sekalipun ada krisis dalam jumlah suara. Tetapi mereka meninjau, mengkritik, mengusulkan perubahan, memperbaiki dan sering menolak rancangan undang-undang.

Kedua, adalah badan *eksekutif*. Badan eksekutif pemerintah ini bertanggung jawab sesuai dengan makna yang terkandung dalam namanya, yaitu melaksanakan keinginan-keinginan rakyat. Dalam sistem demokrasi, eksekutif bertindak atas nama rakyat. Semakin banyak mendapat dukungan yang diperoleh eksekutif dari rakyat, semakin efektif tindakan-tindakannya, dan begitu sebaliknya. Tetapi seorang eksekutif yang demokratis sangat berbeda dengan seorang jenderal atau presiden perusahaan bisnis. Eksekutif harus memimpin, tetapi harus tanggap juga terhadap rakyat. Sebab publik secara kontradiktif mengharapkan agar eksekutif: (1) mengambil inisiatif, (2) tidak melakukan sesuatu tanpa berkonsultasi dengan publik. Namun demikian eksekutif yang

kuat akan selalu dituduh berkecenderungan menjadi diktator, dan sebaliknya eksekutif yang lemah senantiasa akan diejek karena kurang mengambil inisiatif (Apter, 1996: 148).

Ketiga, adalah badan *yudikatif*. Pemerintahan memang rumit. Dengan adanya yurisdiksi-yurisdiksi kekuasaan yang dibatasi konstitusi dalam hal mana mereka harus saling berhubungan dalam urusan pembuatan kebijaksanaan, selalu ada kemungkinan terjadinya pelanggaran konstitusi. Jika demikian halnya diperlukan adanya pengadilan tinggi yang berfungsi sebagai wasit agung untuk masalah-masalah penafsiran konstitusional. Pengadilan tinggi semacam itu mewakili asas mengenai lembaga yudikatif agung yang independen.

Kedua, paham behavioralisme. Kaum institusionalis mengetahui bahwa meskipun sistem pemilihan itu penting, namun bentuk perwakilan presidensiil dan parlemnter, pengawasan parlemen terhadap eksekutif, pemisahan atau pembagian kekuasaan dan sebagainya, tidaklah dengan sendirinya menentukan bagaimana jalannya suatu sistem politik berjalan. Banyak orang tidak mudah begitu percaya bahwa demokrasi perwakilan dapat berjalan sesuai harapan. Dalam arti diperlukan lebih kesetiaan para pemilih. Komitmen kepada kebudayaan politik yang demokratis membutuhkan perantaraan kepentingan dan kebijaksanaan yang baik secara efektif. Di sinilah para penganut paham tingkah-laku (*behavioralisme*) memalingkan perhatiannya dari sistem-sistem politik (khususnya pengaturan-pengaturan hukum dan konstitusional) untuk mengamati tindakan politik individual (Apter dan Andrain, 1972: 14-28, 459-484). Dengan demikian perhatian utama paham tingkah-laku tersebut terletak *pada hubungan antara pengetahuan politik dengan tindakan politik, termasuk bagaimana proses pembentukan pendapat politik, bagaimana kecakapan politik diperoleh, dan bagaimana cara orang menyadari peristiwa-peristiwa politik*. Kategori-kategori itu bisanya dianggap sebagai ideologi, atau sistem kepercayaan yang menciptakan pola-pola tingkah-laku yang penuh makna (Apter, 1996: 210).

Jika ditelusuri akar-akar pemikiran paham tingkah-laku tersebut dimulai dari filsuf skeptis David Hume. Sedangkan di Amerika Serikat adalah filsafat pragmatis William James (1842-1910) yang menekankan empirisme, voluntarisme, tindakan-tindakan individual serta hubungan antara kesadaran dan tujuan. Pelopor lainnya adalah Charles S. Pierce (1839-1914) yang menekankan filsafat pragmatisme, dan yang lebih

penting lagi adalah John Dewey (1859-1952) yang berusaha membangun filsafat praktis mengenai kebenaran yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip ideal, melainkan pada observasi terhadap pengalaman yang kemudian lebih dikenal sebagai paham “Instrumentalisme”. Paham ini memandang kebenaran sebagaimana tersusun dan teruji dalam pengalaman.

Kecenderungan umum terhadap proses belajar dari tindakan mengaitkan filsafat dengan disiplin psikologi yang sedang berkembang menjadi usaha pencarian “ilmiah” yang dapat diamati dan terukur dalam mengamati tingkah-laku, inilah yang dinamakan *behavioralisme* yang dilontarkan oleh John B. Watson (1878-1958). Menurutnya bahwa proses belajar terjadi sebagai hasil pengamatan terhadap hubungan-hubungan antara dorongan dan tanggapan. “Instrumentalisme behavioral” seolah-olah memberikan inspirasi baru mengenai kehidupan politik sebagai cara belajar bermasyarakat yang dicapai melalui pengalaman eksperimen-eksperimen. Apa yang diabaikan adalah pola pikir yang spekulatif. Kalaupun mereka sedikit tertarik pada pertanyaan-pertanyaan filosofis, hanya terbatas pada filosof seperti Alfred North Whitehead, Rudolf Carnap, Carl Hempel, maupun Karl Popper, mereka bertujuan untuk mengganti perspektif-perspektif metafisika, mengganti kemungkinan dengan kepastian, mengecilkan intuitif dan membesarkan empirisme yang lebih tegas berdasarkan observasi, maka pandangan behavioral menjadi tidak historis dan non-evolutioner (Kaplan 1964; Ayer, 1959).

Dengan demikian kaum behavioralis bekerja dari “bawah ke atas”. Teknik-teknik yang mereka gunakan untuk menetapkan variabel-variabel independen yang penting meliputi analisis regresi, analisis faktor, skala Guttman, analisis indikator, dan ukuran-ukuran statistik lainnya. Mereka menggunakan data agregat yang mengarah kepada penentuan hal-hal yang menonjol, atau “vektor-vektor” yang memperlihatkan arah perubahan. Teori-teori mereka lahir dari teori proses belajar. Pengalaman pada masa kanak-kanak, dampak pendidikan terhadap sikap, dan pembentukan pendapat umum, semuanya merupakan fokus penelitian kaum behavioralis (Apter, 1996: 213). Dan, tokoh yang pertama kali menggunakan metode ini adalah Graham Wallas (1858-1932). Ia merasa kesal dengan penekanan *Fabian Society* (di mana ia sebagai anggotanya) terhadap penjelasan masalah manusia, yang sering melihatnya dari aspek ekonomi semata-mata.

Wallas menghendaki mereka mempelajari politik untuk melihat fakta-fakta lain dari sisi perilaku manusia.

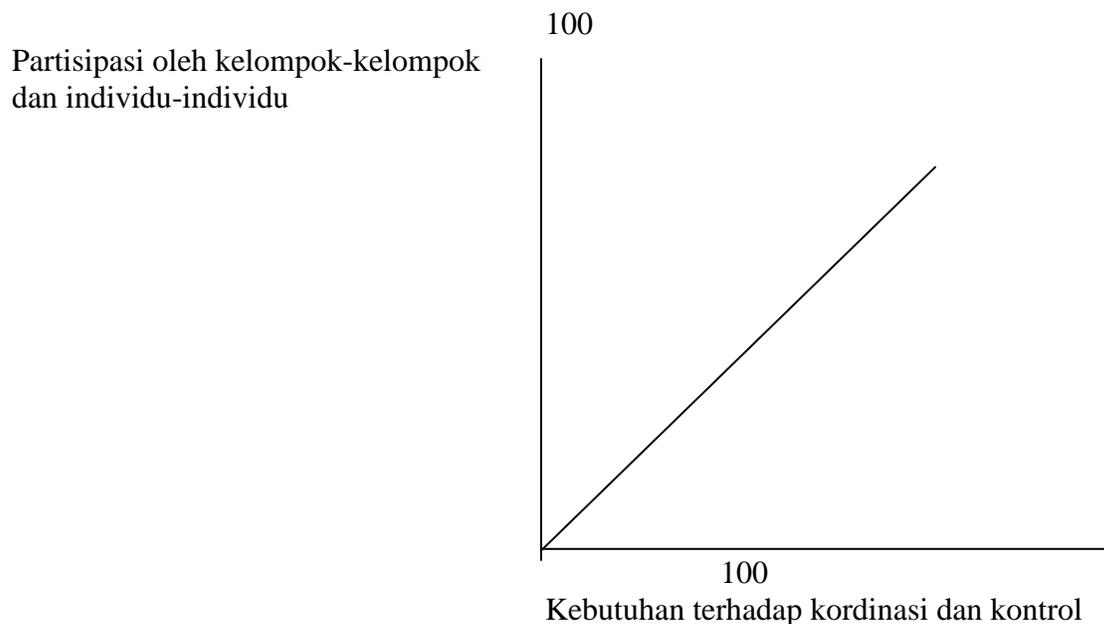
Ketiga, paham pluralisme atau **kemajemukan**. Paham ini sebenarnya dibangun atas dasar perpaduan paham kelembagaan dan (*institutionalisme*) paham tingkah-laku (*behavioralisme*). Seperti paham institusionalisme, *pluralisme* menekankan partisipasi partai sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, dengan demikian membentuk postulat hubungan-hubungan dinamis tertentu di antara mereka. Misalnya mengenai kapan suatu kenaikan dalam jumlah atau keefektifan lingkup keterlibatan politik mengubah secara berarti tingkat pemusatan pengambilan keputusan pertanggungjanaan, dan aspek-aspek lain pembuatan kebijaksanaan pemerintah. Selain itu juga, seperti behaviorisme, pluralisme menekankan sikap aktif politik dan proses belajar menyesuaikan melalui partisipasi publik pada berbagai tingkat politik dalam berbagai badan-badan sosial dan politik.

Paham ini juga menekankan proses di atas struktur, serta lebih sedikit perhatiannya terhadap bagaimana kerja badan-badan pemerintah, legislatif, komite-komite, jika dibandingkan dengan bagaimana pembagian kekuasaan di antara berbagai kelompok, baik publik maupun swasta. Dari sudut ini, politik dipandang sebagai proses interaksi di mana warga yang terlibat mempengaruhi jalannya kebijaksanaan. Pandangan ini menurut Apter (1996: 287) menampilkan dua pertanyaan mendasar yang telah menjadi perhatian kaum pluralis. *Pertanyaan pertama* adalah bagaimana masalah non-partisipan, yaitu warganegara yang berinteraksi yang dikesampingkan atau mengesampingkan dirinya dari proses itu? *Pertanyaan kedua*, yang dapat dinamakan paradoks pluralis, menyangkut bagaimana partisipasi yang terlalu banyak ?. Tingkat partisipasi berbagai kelompok yang sangat tinggi dapat melumpuhkan para pembuat kebijaksanaan jika dan ketika keputusan mengenai isu penting yang manapun mengganggu terlalu banyak kepentingan (Dahl, 1970).

Dalam hal yang pertama, mungkin juga terjadi bahwa dalam pemungutan suara, bagaimanapun juga ada sedikit perbedaan yang berarti antara pemilih dan bukan pemilih dalam hal sikap, keyakinan, dan pilihan. Dalam hal kedua, sudah tentu benar bahwa partisipasi memperbesar demokrasi. Tetapi ia juga memperbesar kebutuhan akan

kordinasi dan kontrol. Pendeknya, masalah itu meningkat seperti dilukiskan dalam Gambar 10-6.

Gambar 10-6
Paradoks Pluralis



Sumber: David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, Diterjemahkan oleh Setiawan Abadi, Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1996, halm. 286.

Semakin banyak orang berpartisipasi dalam proses politik, dan semakin bermacam-macam cara partisipasi itu, semakin banyak persaingan di antara kelompok-kelompok. Memang, kecuali jika ada beberapa cara untuk mengkordinasikan dan mengontrol, atau mengarahkan persaingan semacam itu, sistem politik dapat menjadi “berlebihan beban” dan rusak. Contoh-contohnya sangat banyak: di Amerika Latin misalnya, banyak negara pluralis telah mengalami pengambilalihan oleh kelompok militer, dan mereka atas nama kontrol; di Italia sangat menderita karena tiadanya organisasi politik dan kontrol. Sebaliknya, dalam sistem politik yang tidak mempunyai kordinasi, partisipasi menjadi tiada artinya. Orang-orang menjadi sinis atau kecewa. Ketika mereka menjadi tidak berminat atau apatis, kontrol dibiarkan tidak diperiksa.

Bagaimana menemukan keseimbangan yang baik, sebagian merupakan masalah mekanisme institusional yang tepat. Tetapi sebagian juga merupakan masalah tingkah-laku politik yang yang cocok. Usaha menemukan unsur-unsur pluralitas yang tepat membagi para penganut ke dalam dua mashab pemikiran utama. Bentuk yang dominan, *pluralisme liberal* menyerukan pembentukan elit-elit kompetitif yang diambil dari berbagai rekanan dan bertanggung-jawab baik kepada para pendukung maupun kepada sistem politik itu. Kaum *pluralis radikal* menentang penyelesaian ini, dan sebaliknya mereka menekankan penciptaan cara-cara partisipasi baru yang seharusnya mengurangi kebutuhan akan kordinasi dan kontrol (Apter, 1996: 288).

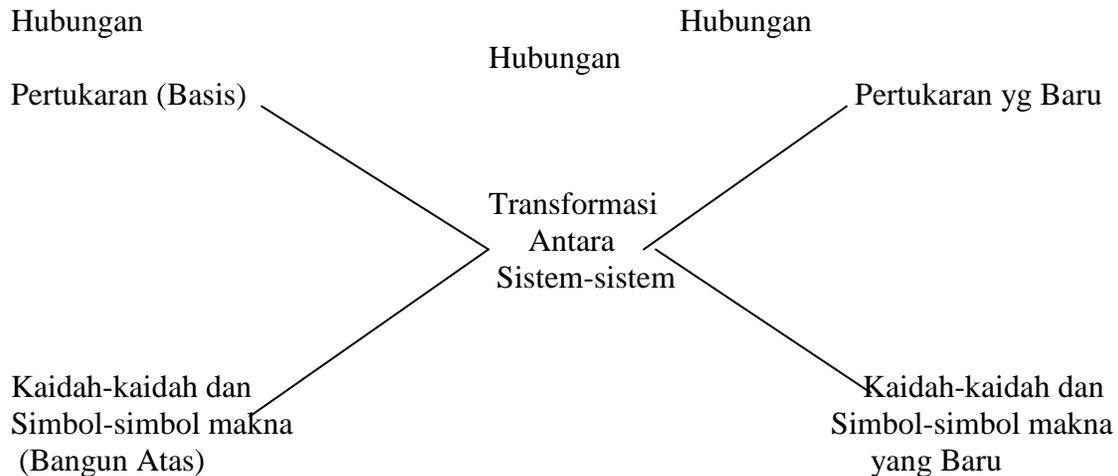
Keempat, paham strukturalisme. Paham ini berbeda jauh dengan pluralisme yang kajian politiknya bersifat kontemporer. Sedangkan dalam paham strukturalisme ini sebenarnya kurang dikenal dan lebih kompleks karena bersifat interdisipliner. Paham ini berasal dari linguistik, antropologi, filsafat, dan sosiologi (Apter, 1996: 372). Menurut Erving Goffman (1974), strukturalisme berusaha menemukan agenda-agenda yang tersembunyi, aturan-aturan permainan yang menentukan aksi. Ia “menyusun” aktivitas-aktivitas manusia.

Seperti kita ketahui bahwa politik nasional maupun lokal, dalam asosiasi-asosiasi atau birokrasi-birokrasi memiliki “struktur”. Jika ditelaah bagaimana politik distrukturkan, maka mungkin mereka akan menemukan kesenjangan dalam pengetahuan seseorang, yaitu terdapat kepingan-kepingan yang hilang. Jadi strukturalisme pada hakikatnya menyusun potensi fungsi-fungsi yang terdapat dalam politik. Fungsi-fungsi politik mempunyai nama-nama lain, seperti informasi, komunikasi, dan agregasi. Dalam tulisan ini akan dipusatkan pada tiga bentuk strukturalisme dari banyak bentuk yang ada, yakni *strukturalisme metode kontradiksi* dan *metode keseimbangan*. Jika yang pertama menekankan tentang konflik bersifat dialektis di mana nenek moyangnya adalah Karl Marx, sedang yang kedua menekankan keseimbangan (keharmonisan) yang bersifat fungsional pengaruh Emile Durkheim, sedangkan yang ketiga berkaitan dengan linguistik yang didirikan oleh Ferdinand de Saussure, seorang ahli linguistik Swiss yang tertarik pada bagaimana sistem-sistem bahasa Indo-Eropa berpisah, di mana bahasa sebagai sistem isyarat-isyarat (*semiology*). Kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan isyarat, mirip kaidah permainan catur; tata bahasa adalah struktur.

Perhatian lain adalah menunjukkan bagaimana kaidah-kaidah diambil dari pikiran manusia. Dalam kehidupan sosial dan politik kaidah-kaidah itu dapat diterapkan kepada ketimbal-balikan yang didasarkan pada pertukaran, kerja, kewajiban keluarga, dan tanggung-jawab. Kaidah-kaidah normatif yang mengatur hubungan-hubungan sosial adalah ide-ide politik. Tatkala bentuk pertukaran berubah, kepercayaan juga berubah (keduanya secara sistematis berkaitan). Kaum strukturalis menyukai penelaahan tentang “transformasi sistem”. Sebagian memandang transformasi sebagai hal yang evolusioner dari bawah ke atas. Yang lain menganggap perubahan sebagai kemajuan dari tipe-ke tipe secara progresif. Namun demikian para teoretisi abad ke-19 dan awal ke-20 seperti Mark, Darwin, Durkheim, Weber, percaya bahwa pada evolusi yang didasarkan pada pengetahuan. Mereka memandang bahwa masyarakat sebagai suatu organisme sosial. Jika ilmu ekonomi klasik mengingatkan pada fisika, maka teori strukturalis adalah seperti biologi.

Seperti halnya badan mempunyai kebutuhan-kebutuhan fungsional, demikian juga masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan itu harus dipenuhi, dan jika tidak organisme itu tidak akan bertahan hidup. Dan seringkali kebutuhan-kebutuhan itu saling berkaitan; misalnya, pernafasan merupakan sebuah struktur yang melaksanakan lebih dari satu fungsi biologis dalam badan. Dalam masyarakat manusia, struktur-struktur secara fungsional berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri, kepada sub-sub unitnya dan kepada anggota-anggota individual maupun kepada keseluruhan. Sebuah model strukturalisme sederhana dalam ilmu-ilmu sosial disajikan pada Gambar 10-7.

Gambar 10-7
Model Struktural Sederhana



Sumber: David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, Diterjemahkan oleh Setiawan Abadi, Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1996, halm. 375.

Model ini menekankan interaksi antara makna dan pertukaran, yang dijelaskan oleh teori-teori yang berbeda dengan cara-cara yang berlainan pula. Menurut Karl Marx, misalnya; pertukaran tidak hanya didasarkan kepada faktor-faktor produksi, tanah atau sewa, tenaga kerja atau kerja, dan modal atau uang, tetapi pada hubungan dinamis antara hal-hal ini di dalam, katakan saja, kapitalisme. Hal ini merupakan *basis*. Komposisi “organik” modal menghasilkan suatu komposisi “organik” masyarakat berupa hubungan timbal-balik di antara kelas-kelas. Maka itu kelas menjalankan fungsi yang sesuai dengan faktor-faktor produksi; sebagian menyewa, sebagian bekerja, dan sebagian memanfaatkan modal. Masing-masing kelas dengan kepentingannya sendiri mengalami konflik dengan yang lain-lain. Kemudian, konflik menciptakan makna dalam kehidupan orang-orang, yaitu makna dalam arti kepentingan kelas. Inilah *bangun atas*. Masing-masing kelas menganut keyakinan-keyakinan tertentu yang tetap mengenai kedudukan relatifnya, baik sendiri maupun dalam perbandingan dengan yang lain.

Proses produksi kapitalis adalah dinamis, yang secara terus menerus mendorong perubahan –perubahan teknologi, dan menghasilkan serta memproses kembali kekayaan. Ketika kondisi sosial berubah, evolusi terjadi. Orang-orang mempertukarkan atau

memodifikasi keyakinan mereka terhadap satu sama lain. Dalam bentuk-bentuk awal masyarakat kapitalis, agama merupakan pernyataan makna pokok. Dalam masa yang lebih maju, agama merosot, untuk digantikan oleh ideologi-ideologi kepentingan kelas yang sekuler; liberal versus sosialis. Bagi Marx, perubahan-perubahan pada *bangun atas* ini sangat penting karena perubahan makna dapat juga mengubah konsep-konsep mengenai pertukaran. Setiap sistem pertukaran dan makna merupakan tahapan yang lebih tinggi dalam suatu evolusi; feodalisme menyerah kepada kapitalisme, kapitalisme menyerah kepada sosialisme, sosialisme memberikan jalan kepada komunisme. Setiap tahap ditandai oleh konflik; setiap sintesis baru mengembangkan kontradiksi yang lebih tinggi. Hubungan antara pertukaran dalam makna dan makna dalam pertukaran secara inheren tidak mantap, karena itu kontradiksi lebih lanjut menggantikan kesatuan dalam semua transisi ke tahap-tahap yang lebih tinggi yang lebih rumit. Gerak inilah yang Marx namakan dialektis: gerakan dari bentuk yang lebih rendah kepada bentuk yang lebih tinggi, dengan teknologi berkembang dari yang sederhana kepada bentuk yang lebih tinggi, dengan teknologi berkembang dari yang sederhana kepada yang kompleks. Hal ini merupakan basis metode kontradiksi.

Alternatif metode kontradiksi adalah metode keseimbangan. Metode keseimbangan menekankan hubungan timbal-balik yang bersifat melengkapi antar bagian, yakni bagaimana kebutuhan-kebutuhan badan sosial dapat dipenuhi. Metode ini bahkan merupakan lawan dari metode kontradiksi. Di bawah ini diperbandingkan keduanya dalam pengertian makna dan pertukaran pada Gambar 10-8. Dalam bagan tersebut disebutkan nama-nama empat pra-strukturalis yang penting. Marx diperlihatkan sebagai pendukung metode kontradiksi yang baginya pertukaran adalah basis struktur itu, sementara makna merupakan bangunan atasnya. Bagi Max Weber (1864-1920), sosiolog historis Jerman, pertukaran merupakan variabel independen, tetapi makna “sistem-sistem normatif” menggantikannya sebagai landasan struktur politik. Weber bertanya, apakah makna agama bagi timbulnya kapitalisme modern ?

Emile Durkheim (1858-1917) adalah ahli sosiologi historis Prancis. Seperti Weber, ia tertarik pada agama sebagai bentuk “perwakilan kolektif”, atau sebagai ide mengenai perihal dan peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta moral. Ia berusaha mengimbangi perubahan makna dan perubahan pembagian kerja dalam masyarakat.

Akhirnya Bronislaw Malinowski (1884-1942), seorang antropolog sosial kelahiran Polandia yang sangat tertarik pada perbandingan masyarakat. Ia menolak pemakaian analisis silang budaya untuk menentukan kecenderungan “evolusionis” dan “difusionis” (yang lain beranggapan bahwa ciri-ciri budaya merembes sialang budaya). Melainkan Malinowski melihat kebudayaan sebagai tanggapan terhadap kebutuhan-kebutuhan fungsional, yang pemuasannya mempengaruhi sifat yang berjalan terus dari masyarakat. Ia menggunakan metode keseimbangan.

Gambar 10-8
Beberapa Teoretisi Pra-Strukturalis

<i>Metode Kontradiksi</i>	Karl Marx	Max Weber
<i>Metode Keseimbangan</i>	Bronislaw Malinowski	Emile Durkheim

Sumber: David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, Diterjemahkan oleh Setiawan Abadi, Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1996, halm. 375.

Kelima, paham developmentalisme (perkembangan), yang kajiannya mencakup suatu kemajuan ke arah sasaran melalui pertumbuhan ekonomi. Jika kaum institusionalis menganggap evolusi demokrasi sebagai penanaman ide-ide filosofis kemasyarakatan yang “baik”, demikian juga bagi kaum developmentalis, akhir suatu periode perubahan merupakan bagian sejarah negara-negara industri yang bersifat evolusioner, siklus maupun berulang. Di Barat, mereka memandang perkembangan sebagai pengulangan tahap-tahap kemajuan sejarah umumnya menganggap tujuannya bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai realisasi demokrasi politik. Bagi seorang Marxis ide dapat dikatakan bodoh, di mana developmentalisme “liberal” menghasilkan kontradiksi-kontradiksi kapitalis yang makin intensif, yang melahirkan imperialisme (Avineri, 1969). Tetapi jika tujuan Barat umumnya adalah demokrasi liberal, maka bagi kaum Marxis tujuannya adalah masyarakat tanpa negara. Namun para pemikir liberal maupun Marxis memandang bahwa “perkembangan” sebagai suatu proses yang berisi *telos* (menyerupai tujuan akhir), dimana tujuan terkandung sejak awal dalam bentuk potensi atau sasaran.

Dengan demikian dasar pemikiran developmentalisme (maupun janjinya — teleologi pertumbuhan) merupakan sebuah ideologi; bahwa pertumbuhan itu sendiri merupakan sejarah yang diperankan dalam seperangkat tahapan. Setiap tahapan mempunyai kategorinya sendiri. Teori unlinear menganggap perkembangan tak terelakan. Dalam model unlinear, modernisasi adalah sebuah proses. Seperti arus barang dan jasa dalam kehidupan ekonomi (bisnis bergerak ke tempat di mana keuntungan akan diperoleh), modernisasi terjadi di mana ia paling mudah diterima atau dikehendaki. Menurut Nash (1965: 5) terdapat empat metode dalam kajian developmentalisme tersebut, yakni:

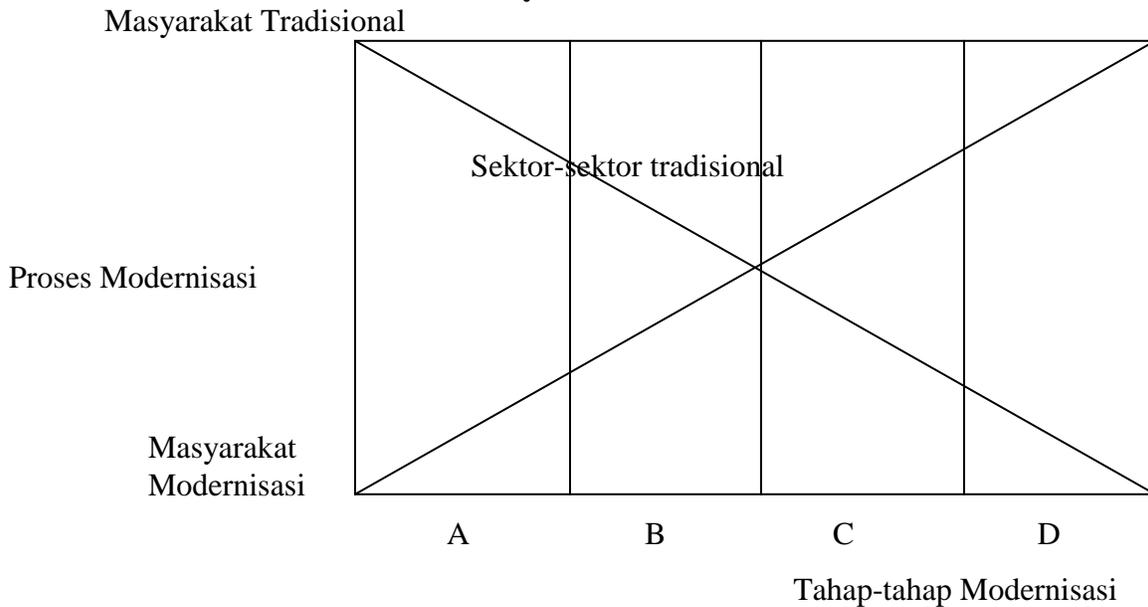
Cara *pertama* adalah metode indeks: sifat-sifat umum perekonomian yang telah maju diabstraksikan sebagai jenis ideal dan kemudian dibandingkan dengan ciri-ciri tipikal yang sama idealnya dari perekonomian dan masyarakat miskin. Dengan cara ini perkembangan dipandang sebagai transformasi dari suatu tipe kepada tipe yang lain.

Cara *kedua* adalah pandangan akulturasi proses perkembangan. Barat (di sini dalam pengertian sebagai komunitas Atlantik bangsa-bangsa maju dan para perantarnya) mendifusikan pengetahuan, keahlian, organisasi, nilai-nilai, teknologi dan model bagi suatu bangsa miskin, hingga dalam jangka waktu tertentu, kebudayaan dan personalianya menjadi sesuatu yang menjadikan komunitas Atlantik secara ekonomi berhasil.

Cara *ketiga*..... adalah analisis terhadap proses seperti yang kini sedang menguasai bangsa-bangsa yang dikatakan terbelakang. Pendekatan ini menjurus kepada hipotesis-hipotesis berskala lebih kecil, hingga suatu pandangan retrospektif, dan suatu penilaian penuh terhadap konteks politik, sosial dan kultural perkembangan.

Di bawah ini disajikan penjelasan proses dan tahap-tahap modernisasi, seperti yang dilukiskan pada Gambar 4-5.. Secara tipikal A mewakili modernisasi tahap pertama (agen modernisasi berada di luar). Tenaga pendorong orisinal dapat merupakan suatu perusahaan carter atau misi penyebaran agama tertentu. Contohnya adalah Amerika Latin di bawah kekuasaan Spanyol, atau wilayah Afrika di bawah pengawasan Eropa, atau wilayah Afrika di bawah pengawasan Eropa (Haring, 1964). Konsolidasi kekuasaan asing, pembangunan sistem yang mantap, dan awal urbanisasi, kesehatan dan sekolah untuk elit terjadi pada akhir tahap A.

Gambar 10-9
Model Modernisasi Politik Unlinear
Masyarakat Tradisional



Sumber: David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, Diterjemahkan oleh Setiawan Abadi, Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1996, halm. 460

Tahap B, jauh lebih bercampur. Proporsi peran-peran inovatif lebih besar dan para inovator mengembangkan institusi-institusi. Sebagai ganti wakil resmi tunggal dari kekuasaan kolonial, adalah birokrasi. Menggantikan missionaris beserta guru terdapat suatu sistem sekolah. Terdapat suatu jaringan perdagangan untuk menggantikan menggantikan pedagang-pedagangnya. Orang-orang lokal dan orang asing berinteraksi. Bentuk-bentuk asosiasi yang baru muncul dan kepentingan-kepentingan baru timbul. Suatu struktur perbankan dan kredit terbentuk. Demikian juga dengan embrio nasionalisme elit. Wakil-wakil lokal menuntut partisipasi yang lebih banyak dan bagian tanggung-jawab yang lebih besar. Pada umumnya reaksi awal penguasa kolonial terhadap kekuatan politik seperti ini adalah negatif. Keresahan, konflik, dan konfrontasi menyusul, melibatkan semakin banyak orang. Biasanya pemerintah membuat beberapa konsesi, sejumlah militan nasionalis banyak dipenjara.

Dengan tahap C proses itu lebih maju. Pemerintah kolonial cenderung sangat menjadi partisipan, dengan mendukung kaum moderat politik lokal dan membentuk

pembangunan politik mengikuti model imperialis. Tanggapan-tanggapan seperti itu pada gilirannya merangsang organisasi-organisasi politik, gerakan-gerakan massa, tuntutan-tuntutan bagi kemerdekaan yang lebih besar, dan para pelopor lain yang mengancam untuk mematahkan kekuasaan kolonial. Kaum intelektual membangkitkan pemberontakan, sambil memberikan argumen dan alternatif ideologis. Para pemimpin karismatis atau hampir karismatis menjanjikan suatu kesatuan baru dengan kemerdekaan.

Dalam tahap D terjadi peralihan menuju kemerdekaan. Kemudian proses itu mulai kembali lagi dari semula dalam artian politik. Suatu keuntungan model ini adalah bahwa ia dapat digunakan untuk mendokumentasikan morfologi pada pasca kemerdekaan dan juga tahap-tahap kolonial. Fase permulaan merupakan fase antusiasme dan dukungan terhadap kepemimpinan nasionalis. Fase berikutnya adalah fase ketidakpuasan, dan konflik di puncak hirarki. Pemenangnya menciptakan negara satu partai. Tahap ketiga merupakan periode di mana kekuasaan pemerintah mudah digulingkan oleh kudeta-kudeta militer. Tahap terakhir mendatangkan usaha-usaha untuk menyerahkan alternatif-alternatif kepada militer. Pada titik ini dalam sifat siklus perkembangan, seluruh proses diperbaharui kembali, barangkali pada tingkat baru yang lebih tinggi, namun demikian tetap mengikuti model dasar yang sama.

G. Konsep-konsep Ilmu Politik

Untuk melakukan efisiensi dan efektivitas bagi kegiatan belajar, hal ini kita sederhanakan mengingat informasi-informasi itu kian terus bertambah banyak dan semuanya harus diidentifikasi dalam simbol-simbol yang dapat disepakati. Caranya adalah dengan merumuskannya dalam konsep-konsep yang mereduksi informasi-informasi tersebut menurut proporsi-proporsi yang dapat ditangani (Sjamsuddin, 1996: 15). Selain itu juga untuk dapat berfungsi mereduksi keperluan yang sering dikatakan berulang-ulang terhadap sesuatu kajian yang serupa dan sudah diketahui (Fraenkel, 1980: 65), maka di bawah ini dikemukakan konsep-konsep yang diperkenalkan dan dikembangkan dalam pembelajaran ilmu politik. Adapun konsep-konsep yang dimaksud, seperti; (1) *kekuasaan*, (2) *kedaulatan* (3) *kontrak sosial*, (4) *negara*, (5) *pemerintah*, (6) *legitimasi*, (7) *oposisi*, (8) *sistem politik*, (9) *demokrasi*, (10) *pemilihan umum*, (11) *partai*

politik, (12) desentralisasi, (13) persamaan, (14) demonstrasi, (15) Hak Asasi Manusia, (16) Voting.

1. Kekuasaan

Konsep "kekuasaan" merujuk kepada kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu (Budiardjo, 2000: 35). Dengan demikian konsep 'kekuasaan' itu *sangat luas*, karena setiap manusia pada hakikatnya merupakan subyek dan sekaligus sebagai obyek kekuasaan. Misalnya, sekalipun seorang presiden sebagai penguasa eksekutif tertinggi (subyek kekuasaan), tetapi ia harus tunduk kepada undang-undang (obyek kekuasaan). Definisi "kekuasaan" memang terlalu melimpah dan sangat beragam.

Menurut Philip (2000: 820), terdapat tiga sumber utama yang menyebabkan dalam mendefinisikan kekuasaan selalu ada perbedaan mendasar. *Pertama*, adanya perbedaan disiplin dalam ilmu-ilmu sosial yang menekankan perbedaan basis kekuasaan, misalnya; kekayaan, status, pengetahuan, kharisma, kekuatan dan otoritas. *Kedua*, adanya perbedaan bentuk kekuasaan, seperti pengaruh, paksaan, dan kontrol. *Ketiga*, adanya perbedaan penggunaan kekuasaan, seperti; tujuannya untuk individu atau masyarakat, tujuan politik atau ekonomi?

Begitu juga pada diskusi-diskusi mengenai kekuasaan tahun 1950-an, saat itu kekuasaan didominasi oleh perspektif-perspektif yang saling bertentangan yang ditawarkan oleh teori-teori elite-kekuasaan (Mills, 1950) dengan menekankan kekuasaan sebagai bentuk dominasi (Weber, 1978[1972]) yang dijalankan oleh suatu kelompok yang lain dengan keberadaan konflik kepentingan fundamental; dalam hal ini contohnya Parsons (1960) yang menggunakan pendekatan struktural fungsional, melihatnya kekuasaan sebagai "kapasitas tergeneralisasi dari suatu sistem, sebagai kapasitas untuk mencapai tujuan" Sementara Mills (1956) memandang kekuasaan sebagai suatu hubungan di mana satu pihak menang atas yang lain. Tentu saja pandangan ini diserang oleh kaum pluralis, yang mengatakan bahwa menurutnya kekuasaan dijalankan oleh kelompok-kelompok sukarela yang mewakili koalisi-koalisi kepentingan yang sering

tersatukan baik oleh suatu isu tunggal maupun beragam dalam hal kelanggengan secara nyata (Dahl, 1957; Polsby, 1963).

2. Kedaulatan

Konsep "kedaulatan" dapat dibedakan menjadi dua telaahan. *Pertama*, dilihat dari *Hukum Tata Negara*; konsep kedaulatan mengacu kepada kekuasaan pemerintah negara yang tertinggi dan mutlak. *Kedua*; dilihat dari *Hukum Internasional* mengacu kepada kemerdekaan suatu negara terhadap negara-negara lain (Shadily, 1984: 1711).

Kemudian jika ditinjau dari jenis ataupun bentuknya, ragam kedaulatan itu dapat dibedakan menjadi tiga macam. *Pertama, kedaulatan hukum*. Dalam *Hukum Tata Negara* menyatakan bahwa hukum itu berdaulat; kedaulatan ini terlepas dari kedaulatan kekuasaan negara. Negara harus tunduk juga pada kedaulatan hukum, walaupun tidak cocok dengan kehendak negara. Dengan demikian teori ini melandaskan pada kesadaran hukum masyarakat. Adapun tokohnya ajaran kedaulatan hukum tersebut adalah seorang ahli hukum Belanda, yakni Hugo Krabe. *Kedua, kedaulatan Negara*. Dalam *Hukum Tata Negara* menyatakan bahwa azas kedaulatan mutlak terletak pada penguasa negara. Menurut teori kedaulatan negara ini bahwa "kehendak negara merupakan sumber hukum utama". Kehendak negara tersebut termuat dalam perundang-undangan dan hukum kebiasaan yang diakui dengan undang-undang. Beberapa tokoh ajaran ini adalah Kelsen, Laband, Jhering dan Jellinek. *Ketiga, kedaulatan rakyat*. Dalam hal ini bahwa kedaulatan harus berada pada tangan rakyat. Implikasinya dari bentuk kedaulatan tersebut bahwa kekuasaan untuk membuat undang-undang harus dilakukan oleh rakyat dengan perantaraan Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai sumber hukum utama adalah Undang-undang. Dengan demikian yang berdaulat adalah kehendak rakyat atau kehendak umum (*volonte generale*). Adapun tokoh ajaran kedaulatan rakyat tersebut adalah J.J. Rousseau.

3. Kontrol Sosial:

Konsep "kontrol sosial" mengacu kepada pengaturan tingkah laku manusia oleh kekuatan sosial yang dilakukan di luar pemerintahan untuk memelihara menurut hukum dan aturan itu yang muncul di dalam tiap-tiap masyarakat dan institusi. Dengan demikian kontrak sosial merupakan doktrin bahwa pemerintahan itu didirikan untuk dan oleh

rakyat melandasi semua negara yang menyatakan dirinya demokratis. Dilihat dari sejarahnya, kontrak sosial itu diperjuangkan sejak zaman Thomas Hobbes, John Locke, maupun J.J. Rousseau.

Dalam buku yang berjudul *Leviathan* (1968[1651]), Hobbes yang baru saja mengalami kegerian perang saudara, membayangkan masyarakat berada dalam sebuah lingkungan alamiah yang anarkhis, hidup dalam kehatiran penyerangan yang membawa kematian. Akhirnya orang-orang membuat perjanjian untuk menjamin perdamaian, untuk melindungi mereka sendiri. Kemudian Locke memperbaiki teori Hobbes. Teori Locke (1924[1690]) salah satunya merespons teori Hobbes. Teori ini bersifat damai dan teratur, rakyat hidup dalam hukum moral dan alam, mengolah alam dan mendapat kepemilikan. Tetapi tidak adanya hukum untuk menyelesaikan perselisihan, telah mendorong masyarakat mendirikan sebuah pemerintahan melalui persetujuan. Dalam membuat sebuah kontrak, individu-individu menyerahkan hak-hak alamiah mereka, dan sebagai imbalannya mereka menerima hak-hak sipil dan perlindungan.

Kontraktualisme selanjutnya dikembangkan lagi oleh J.J. Rousseau (1762) yang berpendapat bahwa pemerintah pada mulanya adalah konspirasi dari orang-orang kaya untuk melindungi kepemilikan mereka. Tetapi dalam kontrak sosial yang ideal, individu bisa dengan bebas mempertukarkan otonomi alamiah mereka dengan saham dalam pemerintahan. Hal ini hanya dapat dicapai melalui demokrasi partisipasi langsung, yang akan diarahkan oleh "Kehendak Bersama" (*General Will*). Kehendak Bersama dengan demikian mewakili "hal-hal terbaik dari kita semua", walaupun golongan liberal sering menunjuk bahwa hal ini memberikan potensi pembenaran bagi tumbuhnya otoritarianisme (Goodwin, 2000: 973-974).

4. Negara

"Negara" adalah integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dalam kekuasaan politik. Namun, negara juga merupakan alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat menertibkan fenomena kekuasaan dalam masyarakat. Sebab manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonistik yang penuh konflik. Oleh karena itu negara merupakan organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan

kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan kehidupan bersama tersebut. Secara singkat terdapat dua tugas negara, yakni: (1) mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial ataupun bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan; (2) mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional (Budiardjo, 2000: 39).

Namun, yang lebih khusus lagi konsep "negara" tersebut kecenderungan umumnya mengacu kepada bentuk pemerintahan sipil, yang khususnya berkembang seperti di Eropa sejak abad ke-16. Model tersebut telah banyak ditiru dengan keberhasilan yang bervariasi. Persoalan yang muncul ditimbulkan oleh bentuk pemerintah sipil ini dapat ditemukan melalui refleksinya dalam filsafat politik Eropa. Baik teori kontrak sosial yang dimulai dari Thomas Hobbes yang dituangkan dalam *Leviathan* (1651), ia berpendapat bahwa mematuhi apa yang memerintah berdasarkan hukum adalah satu-satunya alternatif dalam situasi yang penuh pertikaian yang berkepanjangan. Negara adalah suatu struktur yang abstrak dan impersonal dari jabatan yang dipelihara kondisional dijalankan oleh individu-individu tertentu. Namun segera setelah Revolusi 1688, John Locke mempublikasikan *Two Treatises of Government*, yang memperluas gambaran kekakuan negara yang bersifat tidak toleran sebagaimana diberikan oleh Hobbes. Karya ini mempopulerkan pandangan bahwa pemerintah membentuk persetujuan subyek mereka, dan dibatasi oleh-hak-hak alamiah (hak untuk hidup, kebebasan, dan hak milik). Selanjutnya J.J. Rousseau menerbitkan dua karya utamanya yakni *Social Contrat* dan *Emile* tahun 1762. Ia menertibkan bagaimana pada kehendak umum komunitas warganegara yang ditujukan untuk kepentingan publik, yang berpendapat bahwa republik merupakan kondisi yang diperlukan bagi perdamaian abadi, dan di dalam Revolusi Prancis 1789, banyak mengadopsi gagasan-gagasan Rousseau tersebut.

5. *Pemerintah*

Mengikuti rumusan Finer (1974), istilah 'pemerintah' bisa kita bagi dalam empat pengertian. *Pertama*; pemerintah mengacu kepada proses memerintah, yakni pelaksanaan kekuasaan oleh yang berwenang. *Kedua*, istilah ini bisa juga dipakai untuk menyebut keberadaan proses itu sendiri, kepada kondisi adanya tata aturan. *Ketiga*, pemerintah capkali berarti orang-orang yang mengisi kedudukan otoritas dalam masyarakat atau lembaga, artinya kantor atau jabatan-jabatan dalam pemerintahan. *Keempat* istilah ini bisa juga mengacu kepada bentuk, metode, atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan dinas pemerintahan dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Beberapa kecenderungan dalam pemerintah yang berdaulat pada masyarakat maju sekarang ini, paling tidak memiliki tiga perangkat dinas yang terpisah; yakni: *Pertama*, peran legislatif untuk membuat peraturan-peraturan; *Kedua*, peran eksekutif yang kadang-kadang dicampuradukkan dengan pemerintah, bertanggung jawab menjalankan hukum itu dan dalam masyarakat politik yang sudah maju memainkan peran dominan dalam usulan-usulan peraturan baru. *Ketiga*; peran yudikatif yang bertanggungjawab untuk menafsirkan hukum dan menerapkannya dalam masing-masing kasus. Begitu juga dalam kajian tentang pemerintah kini mengalami perubahan terutama sejak Perang Dunia II. Kalau saja pada mulanya yang difokuskan adalah aspek-aspek formal termasuk konstitusinya pada setiap negara secara terpisah. Akan tetapi sejalan dengan pengaruh behavioralisme, kini fokusnya bergeser ke bagaimana sebuah pemerintah beroperasi, baik lembaga-lembaga formal maupun non-formalnya termasuk partai-partai politik, kelompok kepentingan dalam suatu kerangka komparatif (Curtice, 2000: 419).

6. *Legitimasi*

Konsep "legitimasi" menunjuk kepada keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang kekuasaan maupun pemerintah adalah benar-benar orang yang dimaksud (yang secara hukum adalah sah). Legitimasi memegang peranan penting dalam sistem kekuasaan, mengingat dengan legitimasi yang diperolehnya tersebut dapat memudahkan ataupun melancarkan suatu pengaruh kekuasaan yang dimiliki seseorang ataupun kelompok. Namun demikian legitimasi tidak menjamin akan dapat memuaskan

para anggotanya yang terus-menerus tanpa batas terhadap kepemimpinannya itu. Hal ini terjadi jika sang pemimpin atau pemegang kekuasaan itu nampak mengingkari tidak memenuhi tuntutan yang dipimpinnya (Johnson, 1986: 91).

Pemikiran tentang "legitimasi" merupakan sebuah penemuan dalam pemikiran modern, yang terwakili dengan baik pada janji Rousseau dalam *Social Contract*, yang memperlihatkan bagaimana sebuah otoritas politik dapat disebut "absah", yang juga diperdalam oleh Max Weber, seorang ahli teoretis modern.

Dalam teori modern terdapat asumsi bahwa "legitimasi" harus memiliki hubungan ciri-ciri otoritatif, hukum, perasaan, mengikat, atau kebenaran yang melekat pada sebuah tatanan; sebuah pemerintah atau negara dianggap "absah" jika memiliki hak-hak untuk memerintah" (Scaff, 2000: 562). Lalu timbul pertanyaan; apakah hak itu ada, dan bagaimana keberadaan serta menentukan maknanya? Dalam hal ini Weber (1968) menjawab: "Ini hanyalah probabilitas dari orientasi pada keyakinan subyektif atas validitas sebuah tatanan yang mendukung tatanan absah itu sendiri". Menurut pandangan ini "hak" dapat diterima sebagai keyakinan dalam kesesuaian dengan tatanan yang ada dan "hak untuk memerintah". Adanya standar obyektif bersifat eksternal atau universal untuk menilai kebenaran yang didasarkan pada hukum alamiah, penalaran, atau sebuah prinsip transhistoris nampaknya selalu ditolak dengan alasan tidak masuk akal atau naif. Di sinilah Weber sebagai ahli sosiologi membentangkan empat alasan untuk memperoleh legitimasi bagi setiap tatanan sosial, yakni; (1) tradisi; (2) pengaruh; (3) rasionalitas nilai dan (4) legalitas. Klasifikasi ini dipakai sebagai landasan analisisnya yang terkenal tentang tipe-tipe ideal "dominasi yang absah" atau *legitim herrschaft*: tradisional-karismatik-rasional legal (Scaff, 2000: 563).

7. Oposisi

Konsep "oposisi" merujuk kepada kelompok/partai penentang terhadap pemerintah resmi yang mengkritik pendapat maupun kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa. Kehadiran oposisi tersebut memiliki peranan yang penting dalam pemerintahan demokrasi, terutama jika berperan sebagai oposisi yang sehat, merupakan penyeimbang maupun kontrol atas kebijaksanaan pemerintah yang bisa saja terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Di sanalah oposisi dibutuhkan, dan menurut Kleden (2001: 5) bukan hanya untuk mengawasi kekuasaan, tapi semacam *advocatus diaboli* atau *devil's advocate* yang memainkan peran sebagai setan yang menyelamatkan kita justru dengan mengganggu kita terus menerus. Dalam peran ini oposisi berkewajiban mengemukakan titik-titik kelemahan dari suatu kebijaksanaan, sehingga apabila kebijaksanaan itu diterapkan, segala hal yang dapat mengakibatkan efek samping yang merugikan sudah lebih dulu ditekan seminimal mungkin. Tragedi Orde Baru yang dialami pemerintah Indonesia, bahwa oposisi dipandang sebagai *devil* (setan) tidak pernah diakui sebagai *advocate* atau pembela. Sebab, sudah menjadi suatu postulat bahwa "kekuasaan mempunyai tendensi bukan saja untuk memperbesar dan memperkuat dirinya, melainkan juga memusatkan dirinya".

Manfaat lainnya bahwa dengan kehadiran oposisi, masalah *accountability* atau pertanggungjawaban akan lebih diperhatikan oleh pemerintah. Tidak semua hal akan diterima begitu saja, seakan-akan — dengan sendirinya — jelas atau beres dalam pelaksanaannya. Kehadiran oposisi membuat pemerintah harus selalu menerangkan dan mempertanggung-jawabkan mengapa suatu kebijaksanaan diambil, apa dasarnya, apa pula tujuan dan urgensinya (Kleden, 2001: 5).

Dengan demikian oposisi tidak hanya bertugas untuk mengingatkan pemerintah terhadap kemungkinan-kemungkinan salah-kebijaksanaan atau salah tindakan (*sin of commission*), melainkan juga mampu menunjukkan apa yang harus dilakukannya, tetapi justru tidak dilakukannya (*sin of omission*). Dalam hal ini jelas kewajiban oposisi adalah melakukan kualifikasi apakah sesuatu itu harus dilakukan, tidak harus dilakukan, atau malah tidak harus dilakukan sama sekali.

8. Sistem Politik

Konsep "sistem politik" merupakan suatu istilah yang mengacu kepada semua proses dan institusi yang mengakibatkan pembuatan kebijakan publik. Perjuangan persaingan kelompok untuk menguasai secara politik adalah suatu aspek/ yang utama dalam suatu sistem politik. Komponen-komponen yang berikut ini adalah bagian penting dalam suatu sistem politik;

"...orang-orang yang diatur, pejabat yang memiliki wewenang / kekuasaan, suatu proses politis (pemilihan), suatu struktur pemerintah,

suatu proses pembuatan kebijakan. Kekuasaan ... mungkin secara luas didistribusikan antar lembaga pemerintahan yang ada atau mungkin juga dipusatkan satu atau beberapa komponen” (Gibson, 1966: 565).

Dengan demikian secara sederhana dalam setiap sistem politik akan mencakup: (1) fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat, baik ke luar maupun ke dalam; (2) penempatan nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan kewenangan; (3) penggunaan kewenangan atau kekuasaan, baik secara sah maupun tidak. Oleh karena itu berbicara tentang sistem politik pada hakikatnya sama halnya dengan berbicara tentang kehidupan politik masyarakat (*social political life*) yang bersifat infra struktur, dan kehidupan politik pemerintah (*governmental political life*) yang bersifat supra struktur (Haricahyono, 1991: 93-94).

9. Demokrasi

Konsep ”demokrasi” secara umum merupakan sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakil-wakilnya. Namun ada juga yang menyatakan suatu sistem politik di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Mayo, 1960: 70).

Jika ditilik dari sejarahnya, ”demokrasi” sudah berakar sejak zaman Yunani kuno. Dalam karya Yunani kuno yang berjudul *Polis* atau negara kota, ”demokrasi” adalah nama konstitusi (sistem pemerintahan) di mana masyarakat yang lebih miskin bisa menggunakan kekuasaan untuk membela kepentingan mereka yang acapkali berbeda dari kepentingan kaum kaya dan para bangsawan (Minogue, 2000: 214). Aristoteles sendiri berpendapat bahwa ”demokrasi” adalah bentuk pemerintahan yang tidak begitu bernilai dan ”demokrasi” memainkan peran yang relatif kecil dalam pemikiran politik saat itu. Begitu juga menurut sejarawan saat itu, Polybius maupun penulis lainnya menyatakan bahwa suatu konstitusi yang merupakan campuran berimbang dari elemen-elemen monarki, aristokrasi, dan demokrasi bisa stabil. Namun secara umum, saat itu demokrasi dianggap ”agresif” yang tidak stabil serta mengarah kepada tirani, dan ini bisa dilihat dalam karya Plato yang berjudul *Republic* (Minogue, 2000: 214).

Demokrasi juga merupakan suatu slogan yang sangat menggoda karena tampak menjanjikan dalam suatu bentuk pemerintahan yang ideal, harmonis dan mencintai kebebasan. Dalam realitasnya prinsip demokrasi senantiasa terus berubah, sejalan dengan perubahan masyarakat yang dinamis dalam penyempurnaan konstitusi. Demokrasi hanya memungkinkan tumbuh subur, jika masyarakat dapat mengakui kepentingan-kepentingan sebagian orang maupun masyarakat lainnya. Namun tidak ada negara yang benar-benar demokrasi sampai memuaskan seluruh rakyatnya maupun dengan munculnya suatu oposisi yang sempurna pula sebagai penyeimbang.

Demokrasi sebagai suatu kekuatan orang banyak, juga bisa ditilik dalam *Magna Charta*, 1215, *Bill of Rights* 1689, maupun *Deklarasi Amerika* 1776. Namun yang memberikan kontribusi besar terhadap konsep demokrasi adalah Revolusi Prancis. Pada saat itulah sebenarnya "demokrasi" dianggap nama baru bagi aliran republikanisme yang merupakan kritik terhadap dominasi lembaga monarki di Eropa. Dari momentum keberhasilan inilah yang kemudian penyebaran demokratisasi meluas ke mana-mana. Menurut Huntington (1991) sejauh ini ada tiga arus demokratisasi dan dua arus sebaliknya: arus pertama terjadi selama periode 1828-1926 dan arus balik pertama berlangsung selama periode 1922-1942. Arus kedua muncul pada 1943-1962 dan arus balik kedua pada 1958-1975. Arus ketiga terjadi mulai tahun 1974 sampai sekarang. Keseluruhan proses demokratisasi telah berpindah dari kawasan Anglo-Saxon dan negara-negara Eropa Utara ke cekung Eropa Selatan dan Amerika Latin. Saat ini gelombangnya telah mencapai seluruh Eropa Timur dan beberapa negara Asia.

10. Pemilihan Umum

"Pemilihan Umum" adalah suatu kegiatan politik baik untuk memilih atau menentukan orang-orang yang duduk di dewan legislatif maupun eksekutif. "Pemilihan umum" juga masih diyakini sebagai cara terbaik untuk memilih pejabat publik. Selain itu penyelenggaraan pemilihan umum dapat dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai barometer dari kehidupan demokrasi, terutama di negara-negara Barat (Lipset, 1960; Schumpeter, 1942). Sesuai dengan perkembangan demokrasi, pemilihan umum sekarang telah meluas tidak sekedar milik Eropa dan Amerika Utara. Pada tahun 1975 hanya 33 negara di dunia yang tidak menyelenggarakan pemilihan umum untuk

memilih para pemimpinnya. Namun bagi kebanyakan negara, pertanyaan yang lebih penting adalah, pemilihan umum macam apa yang seharusnya dilaksanakan? (Kavanagh, 2000: 284).

Adapun fungsi-fungsi adanya pemilihan umum, menurut Rose dan Mossawir (1967), antara lain; (1) menentukan pemerintahan secara langsung maupun tak langsung; (2) sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah; (3) barometer dukungan rakyat terhadap penguasa; (4) sarana rekrutmen politik; (5) alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat. Sedangkan jika dilihat dari unsur-unsur yang diperlukan dalam pemilihan umum, yakni: *Kesatu*, adalah obyek pemilu, yaitu warganegara yang memilih pemimpinnya. *Kedua*, adalah sistem kepartaian atau pola dukungan yang menjadi perantara antara pemilik suara dan elite atau para pejabat publik. *Ketiga*, adalah sistem pemilihan (*electoral system*) yang menerjemahkan suara-suara menjadi kursi jabatan di parlemen ataupun pemerintahan (Lipset dan Rokkan, 1967).

Dilihat dari bentuknya sistem pemilihan umum ini terdapat beberapa macam. Ada bentuk pemilihan sistem distrik yang didasarkan atas satu kesatuan geografis. Di luar itu juga menurut Kavanagh (2000: 284), terdiri dari banyak variasi. *Pertama*, sistem mayoritas absolut (misalnya Prancis) di mana pemenang harus memperoleh sekurang-kurangnya separuh dari total suara. *Kedua*, sistem pluralis (dipraktekkan di sebagian besar negara berbahasa Inggris) dengan berbagai tingkatan proporsionalitas, mulai dari representasi proporsi murni (misalnya Belanda) di mana 0,67 persen dari total suara dapat memberi sebuah kursi di parlemen bagi sebuah kelompok, hingga ke sistem yang memadukan berbagai mekanisme seperti di Jerman (separuh kursi di parlemen diberikan kepada pihak yang memperoleh suara terbanyak, sedangkan sisanya dibagi-bagi untuk setiap pihak yang memperoleh 5 persen suara).

11. Partai Politik

Konsep "partai politik" mengacu kepada sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kemanfaatan bagi para anggotanya baik yang bersifat idiil maupun material (Lijphart,

2000: 731; Friederich, 1967). Oleh karena itu secara umum dapat dijelaskan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir di mana para anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita serta perjuangan yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik — biasanya dengan cara konstitusional — untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka (Budiardjo, 2000: 161).

Tetapi definisi yang dikemukakan di atas mendapat kritikan dari Schlesinger (1968) yang menganggapnya terlalu sempit dan tidak mengikutsertakan tiga jenis organisasi yang biasanya menjadi acuan berbagai partai. *Pertama*, organisasi yang terlalu kecil untuk dapat membuat perubahan-perubahan yang realistis untuk memenangkan jabatan publik — terutama posisi eksekutif — tetapi tetap mencalonkan kandidat serta berpartisipasi dalam kampanye pemilihan. *Kedua*, adalah partai revolusioner, yang bertujuan untuk menghilangkan pemilihan yang kompetitif. *Ketiga*, adalah kelompok yang memerintah dalam negara otoriter lainnya yang memiliki satu partai. Walaupun telah dimasukkannya tiga kategori tambahan tersebut dan menjadikan definisi partai politik makin luas, namun terjadi kesulitan terutama untuk mengetahui bagaimana membedakan antara partai politik dengan kelompok kepentingan. Sebab kelompok kepentingan kadang-kadang juga mengajukan kandidatnya untuk satu jabatan publik tanpa harus mengubah cirinya menjadi partai politik. Untuk menjawab kesulitan baru tersebut, munculah dua pendekatan baru yang ditawarkan Almond (1960). Almond mengemukakan bahwa fungsi kelompok kepentingan (non-parpol) umumnya adalah menyuarakan kepentingan-kepentingan, sedangkan partai politik melayani fungsi agregasi dari berbagai kepentingan yang diartikulasikan tersebut.

12. Desentralisasi:

Konsep "desentralisasi" dalam *Ensiklopedi Indonesia*, (1984: 794) dikemukakan sebagai pemindahan hak-hak pengaturan (bagian dari perundang-undangan) dan perintah dari badan-badan penguasa atasan kepada yang lebih rendah. Mungkin definisi ini terlalu luas dan seolah-olah konsep "desentralisasi" dilawankan dengan "sentralisasi". Padahal menurut Koswara (1996: 44), "desentralisasi" bukan merupakan suatu sistem yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu rangkaian kesatuan dari suatu sistem yang lebih

besar. Dengan demikian desentralisasi bukan pula merupakan alternatif dari sentralisasi, karena antara desentralisasi dan sentralisasi tidak dilawankan, dan karenanya tidak bersifat dikhotomis, melainkan merupakan sub-sub sistem dalam kerangka sistem organisasi negara. Namun demikian tidak berarti kita harus pasif dan tidak kritis membedakan dengan istilah-istilah lain yang serupa. Dalam realitasnya di masyarakat, konsep "desentralisasi" tersebut sering dikacaukan dengan konsep-konsep "dekonsentrasi" maupun "devolusi". Kalau saja dalam "dekonsentrasi" hanya merupakan pembagian kewenangan dan tanggung jawab administratif antara departemen pusat dengan pejabat pusat di lapangan (pejabat pusat di daerah). Sedangkan dalam "devolusi" adalah pemerintah pusat membentuk unit-unit pemerintah di luar pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi-fungsi tertentu untuk dilaksanakan secara mandiri (Koswara, 1996: 49-53).

Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi tentang desentralisasi sebagai berikut: "*.. decentralization refers to the transfer of authority away from the national capital whether by deconcentration (i.e. delegation) to field offices or by devolution to local authorities or local bodies*" Dengan demikian desentralisasi merupakan proses kewenangan yang diserahkan pusat kepada daerah, yang dapat dilakukan baik dengan delegasi kepada pejabat-pejabat di daerah (*deconcentration*) atau dengan *devolution* kepada badan-badan otonom daerah. Artinya bahwa dekonsentrasi dan devolusi merupakan bagian integral dari desentralisasi. Dan, menurut Bryan dkk. (1987) bahwa realitasnya ada dua bentuk desentralisasi, yakni desentralisasi yang bersifat administratif dan politik. Kalau saja desentralisasi administratif merupakan suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Dengan demikian pejabat tersebut bekerja dalam batas-batas rencana dan sumber pembiayaan yang sudah ditentukan, namun memiliki keleluasaan, kewenangan, dan tanggung-jawab tertentu dalam pengembangan kebijaksanaan. Sedangkan dalam desentralisasi politik, adalah wewenang pembuatan keputusan dan kontrol tertentu terhadap sumber-sumber daya yang diberikan kepada badan-badan pemerintah regional dan lokal.

13. *Persamaan*

Sebenarnya konsep "persamaan" atau *equality*, hampir melekat pada beberapa disiplin ilmu. Dalam ilmu matematika, istilah "persamaan" memiliki makna bahwa persamaan sebagai sebuah konsep hubungan yang kompleks, sifatnya bervariasi mulai dari identitas hingga korelasi, namun di dalamnya sama sekali tidak ada kandungan nilai atau moral. Sebaliknya dalam ilmu sosial khususnya politik, konsep "persamaan" sangat sarat nilai. Konsep ini merujuk kepada *prinsip dasar pengaturan masyarakat manusia, seperti yang dikemukakan Thomas Jefferson, bahwa setiap orang dinyatakan punya kedudukan yang setara sebagai warganegara* (Halsey, 2000: 303). Di sinilah para ilmuwan sosial, sejak lama mencari validitas empiris atas arti "persamaan" tersebut. Pertanyaan kunci yang hendak dijawab adalah, "apakah persamaan ekonomi, politik dan sosial itu memang bisa diwujudkan, dan sejauh manua itu bisa? Terhadap pertanyaan itu tentu saja jawabannya sampai sekarang belum disepakati, sebab ada beberapa ahli yang menyebutnya "persamaan" itu sebagai yang bersifat alamiah ataupun hukum alam, namun ada pula yang menyebutnya sebagai konstruksi sosial buatan manusia yang harus diperjuangkan.

Pernyataan-pernyataan bahwa "persamaan" itu sesuatu yang alamiah dikemukakan sejak zaman Yunani kuno. Plato (427-347 sM) menyatakan bahwa kedudukan politik setiap orang secara alamiah selalu berbeda. Lain lagi dengan pernyataan Hobbes dalam *Leviathan* (1934 [1651]) mengemukakan pendapat yang justru sebaliknya bahwa alam menyediakan setiap orang untuk setara, meskipun ada orang yang lebih kuat dari yang lain, perbedaan hanya akan membuat orang satu mengambil keuntungan sepihak dari yang lain yang juga lalai menyadari persamaan itu. Pendapat Hobbes ini nampaknya lebih berpengaruh terutama dalam pembahasan jender dan ras. Namun persoalan yang muncul adalah nilai-nilai apa yang mengukuhkan persamaan di antara kelompok-kelompok yang terlanjur diyakini tidak sepenuhnya setara.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan serupa itulah maka Christopher Jencks dalam karyanya *Inequality* (1972) mengemukakan bahwa persamaan tidak hadir dengan sendirinya, melainkan diupayakan atau dibuat. Ia menunjuk pada reformasi pendidikan sebagai salah satu instrumennya. Sebab melalui pendidikan seseorang dapat mengejar ketertinggalannya di berbagai bidang; politik, budaya, termasuk ekonomi. Walaupun ia

juga menyadari bahwa dengan pendidikan sering memperlebar jurang pemisahannya dengan orang-orang lain yang kurang beruntung. Lagi pula berdasarkan data pengaruh pendidikan terhadap pendapatan di Amerika hanya memberi pengaruh 12%, namun demikian argumen Jencks walaupun agak lemah tentang "persamaan" harus diupayakan atau dibuat itu adalah amat penting.

14. Demonstrasi

Konsep "demonstrasi" secara umum berarti 'memperlihatkan, memamerkan, menunjukkan, dan membuktikan', namun dalam ilmu politik merupakan tindakan sekelompok orang yang secara bersama-sama untuk menunjukkan dukungan maupun protes kolektif baik itu ketidakpuasan maupun ketidaksetujuan (Shadily, 1980: 785). Dalam wujudnya demonstrasi tersebut bisa berupa demonstrasi konstitusional yang tertib dan rapi bahkan enak dipandang mata layaknya sebagai tontonan (banyak dilakukan di Jepang dan Korea Selatan). Namun bisa juga terjadi demonstrasi yang anarkhis dengan merusak sarana publik maupun memusuhi kelompok-kelompok penentang maupun aparat pemerintah.

Salah satu teori gerakan sosial protes maupun demonstrasi yang terkenal adalah *Teori Deprivasi Relatif* dari Ted Robert Gurr dalam bukunya *Why Men Rebel* (1970). Ide dasar teori ini adalah adanya "penghilangan", "perampasan", yang disertai ketegasan dan keterusterangan dalam penolakannya itu sebagai suatu respons terhadap suatu ketidakadilan yang mereka rasakan. Secara lebih rinci bahwa dalam teori deprivasi relatif ini; (1) *deprivasi relatif* sebagai perubahan harapan dan kemampuan untuk memenuhi harapan itu, maka bentuk deprivasi dapat dibedakan berdasarkan pola-pola perubahan; (a) *deprivasi persisten*; yaitu kemampuan yang secara konstan berada di bawah harapan; (b) *deprivasi aspirasional*; yaitu harapan naik kemampuan konstan; (c) *deprivasi dekremental*, di mana harapan konstan dan kemampuan turun; (d) *deprivasi progresif*; di mana kemampuan naik tetapi masih lebih rendah dibandingkan harapan. Namun yang paling menentukan dalam munculnya gerakan dan kekerasan politik adalah faktor "ketidakpuasan". (2) Ada tiga bentuk faktor yang memperantarai gerakan dan kekerasan politik; (a) *justifikasi normatif untuk kekerasan*; (b) *justifikasi kemanfaatan* untuk

kekerasan; (3) *keseimbangan antara sumber-sumber daya koersif* dan institusional dari pemberontak vs negara (Klandersman, 2005: 368-369).

15. Hak Asasi Manusia

Menurut Rosalyn Higgins, seorang pakar yang tergabung dalam *United Nations Committee on Human Rights*, pengertian "Hak Asasi Manusia" (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang sesuai kondisi yang manusiawi. Oleh karena itu hak-hak tersebut bukan merupakan pemberian atau anugerah negara yang bisa dicabut melalui peraturan-peraturan hukum oleh negara. Walaupun sistem hukum setiap berbeda-beda, bahwa hak-hak asasi manusia yang menjadi hak bagi setiap orang itu merupakan hak-hak dalam hukum internasional. Sebagai contoh, hak asasi untuk memperoleh pengadilan yang adil, tidak ada bedanya antara mereka yang tinggal di negara yang menganut sistem hukum *common law*, *civil law*, maupun sistem hukum Romawi. Dalam hal ini negara pada hakikatnya berkewajiban untuk menjamin bahwa setiap sistem hukum mereka mencerminkan dan melindungi hak-hak asasi manusia yang bersifat internasional yang berada pada wilayah yurisdiksi mereka (Higgins, 2000: 464).

Perdebatan tentang universalitas tidaknya HAM, memang sudah berlangsung lama, memang dalam pertumbuhannya HAM tidak lepas dari budaya masyarakat setempat dan tidak bisa dipukul-rata seperti yang diinginkan oleh pengajur HAM radikal Barat. Akan tetapi terdapat juga dokumen-dokumen HAM yang diakui secara universal seperti *International Covenant on Human Rights 1966* yang didasarkan pada *Universal Declaration of Human Rights 1948*. Hal ini lebih dari 140 negara telah menandatangani dokumen *International Covenant on Civil and Political Parties*, termasuk negara-negara Eropa Timur, negara-negara Timur Tengah (Mesir, Tunisia, Iraq, Iran, dan sebagainya). Kemudian sejak berlakunya dokumen HAM tersebut sejak awal tahun 1990-an, konsep universalitas HAM berkembang secara bertahap.

Setelah runtuhnya tembok Berlin 1999, ada usulan diselenggarakannya Konferensi Dunia tentang HAM dan dilaksanakan di Wina Austria tahun 1993. Hasilnya dalam persiapannya negara-negara diminta meratifikasinya. Ternyata di sinilah menimbulkan polemik, di mana Barat terlalu banyak gagasan liberal yang mendominasinya. Akhirnya setelah melalui perdebatan yang "alot" dicapai kata sepakat

bahwa "keragaman regional hendaknya tidak mengikis, melainkan sedapat mungkin mendukung universalisme HAM (Higgins, 2000: 465). HAM tidak sekedar mencakup hak-hak sipil dan politik, tetapi juga hak-hak ekonomi, sosial, budaya, seperti yang tercantum dalam *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*. Dalam hal ini terjadi kontroversial antara negara maju dan berkembang. Beberapa negara maju khususnya Barat, skeptis terhadap instrumen implementasinya (misal hak untuk memperoleh pendidikan, perumahan, kesehatan, dan sebagainya). Sementara itu di kalangan negara-negara berkembang sendiri tidak begitu yakin akan mampu memenuhi hak-hak tersebut dalam jangka pendek, karena prioritas program mereka bukan itu yang utamanya.

16 Voting (Pemungutan Suara)

Istilah "voting" atau "pemungutan suara" merujuk kepada suatu instrumen untuk mengekspresikan dan mengumpulkan pilihan partai atau calon dalam pemilihan. Jika ditinjau dari sejarahnya, kegiatan semacam ini sudah sangat tua. Bangsa Yunani kuno, melakukan voting/pemungutan suara dengan menempatkan batu kerikil (*psephos*) di sebuah jambangan besar yang kemudian memunculkan istilah *psephology*, atau kajian mengenai bermacam-macam pemilihan umum. Kemudian menjelang akhir abad ke-19 kebanyakan negara Barat memberikan hak suara kepada sebagian pria dewasa, dan selama dasawarsa awal abad ke-20 hak itu juga diperluas kepada sebagian besar wanita dewasa (Kavanagh, 2000: 1130). Perkembangan terakhir semacam ini dalam sistem pemerintahan demokrasi, telah menjadi *trend* baru dalam pemilihan-pemilihan kompetitif yang bebas.

Berdasarkan pengalaman historis, bangsa Indonesia dalam melaksanakan pemilihan umum belum pernah menggunakan sistem distrik secara penuh, dalam arti lebih percaya kepada sistem proporsional walaupun kini ada gagasan sistem yang dikombinasikan dengan sistem proporsional. (Republika, 27/11/98; Chaidar, 1999: 37). Menurut para pengamat politik Indonesia, bahwa pemimpin partai politik Indonesia yang lebih percaya kepada sistem proporsional tersebut menggambarkan ketidak beranian para fungsionaris partai-partai politik di Indonesia yang tidak berani bertarung secara jantan dan masih bersifat "banci" (Chaidar, 1999: 37).

H. Generalisasi-generalisasi Ilmu Politik

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa secara umum generalisasi merupakan “*Generalizations are statements of the relationship of two or more concepts. These statements may range from very simple to very complex. Sometimes they are referred to as principles or laws*” (Banks, 1977: 26; 97). Jadi, generalisasi itu merupakan pernyataan hubungan dua konsep atau lebih. Pernyataan tersebut boleh terbentang dari yang sangat sederhana ke yang sangat kompleks. Kadang-kadang mereka dikenal sebagai prinsip-prinsip atau hukum. Dari pernyataan tersebut maka generalisasi-generalisasi dalam Ilmu politik yang sering dikembangkan di tingkat pendidikan menengah berkaitan dengan konsep-konsep yang telah dibahas sebelumnya, seperti di bawah ini

1. Negara

Jika pemimpin suatu *negara* menyalahgunakan *kekuasaan* untuk melanggengkannya demi kepentingan pribadi dengan berbagai tindakan yang sewenang-wenang, cepat atau lambat akan datang gerakan masa yang tidak bisa dibendung sebagai respons atas tindakan penyalahgunaan *kekuasaan* tersebut.

2. Kedaulatan Rakyat

Meleletusnya Revolusi Prancis 1789, salah satu penyebab yang dominan adalah disebabkan raja-raja Prancis berkuasa secara absolut, dalam arti tiadanya *kedaulatan rakyat* Prancis yang dijunjung tinggi oleh pemerintah.

3. Kontrol Sosial

Dalam setiap pemerintahan, institusi masyarakat, maupun pemerintahan, diperlukan suatu *kontrol sosial* untuk memudahkan pengawasan jalannya suatu mekanisme perjanjian dan pemerintahan yang telah disepakati.

4. Negara

Adanya peraturan dan undang-undang dalam kehidupan *bernegara*, pada hakikatnya dimaksudkan untuk menertibkan jalannya roda pemerintahan dengan tertib, aman, dan berkesinambungan.

5. Pemerintahan

Pemerintahan yang diktator sering menimbulkan suatu gerakan masyarakat-bangsa untuk melakukan suatu revolusi yang mengarahkan perlawanan terhadap rejim lama ketika menekan kebebasan dan menentang pembaharuan.

6. Legitimasi

Sebetulnya di awal masa jabatannya pemerintahan Gusdur memiliki *legitimasi* yang baik untuk melaksanakan agenda reformasi Indonesia, mengingat ia memperoleh dukungan mayoritas dari berbagai elite dan partai politik yang mendukungnya. Hanya saja karena ia sering “nyleneh” dan “keras kepala” dengan seringnya melontarkan isu-isu yang kurang perlu, bongkar-pasang kabinet, mondar-mandir ke luar negeri, bahkan tersandung dalam *Bulog-Gate*, popularitas pemerintahannya menjadi pudar bahkan berakhir secara tragis.

7. Oposisi

Tidak semua partai *oposisi* itu jelek, karena oposisi juga bisa menjadi penyeimbang dan kontrol atas mekanisme pemerintahan yang ada. Sebaliknya, juga tidak semua partai *oposisi* baik, karena tidak sedikit partai *oposisi* terlahir hanya didasarkan pertimbangan emosional atas kealahannya dalam pemilihan umum yang telah lalu.

8. Sistem Politik

Bagi pemerintahan yang menganut *sistem politik* yang komunis maupun otoritarian, maka jelas kebebasan rakyat itu terkekang. Hal ini akan berbeda dengan di negara-negara yang menganut sistem politik liberal seperti di negara-negara Barat, kebebasan itu sangat luas, termasuk kebebasan seksual di mana bagi kita hal itu perlu diatur dalam perundang-undangan.

9. Demokrasi

Tidak semua pemerintahan yang *demokrasi* itu memiliki karakteristik universal, karena nilai-nilai budaya suatu negara-bangsa akan turut mewarnai budaya politiknya. Dengan

demikian pemahaman mengenai pemerintahan yang demokrasi sarat dengan pengaruh nilai-nilai internal suatu negara-bangsa.

10. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum merupakan salah satu indikator pemerintahan yang demokrasi. Sebab melalui sarana pemilihan umum, aspirasi rakyat ataupun kontituen dapat diakomodir dengan sistem pemilihan umum yang baik.

11. Partai Politik

Jika suatu pemerintahan mengaku dirinya *demokrasi*, sementara *partai politik* dilarang berdiri, hal itu dapat dimetaforakan sebagai seekor harimau yang “dikebiri”. Ia tidak dapat menikmati kehidupan yang bebas dan melakukan reproduksi, berarti sama halnya dengan tidak dapat menumbuh-kembangkan kehidupan demokrasi yang sejati yang menghargai hak-hak asasi setiap pribadi.

12. Desentralisasi

Desentralisasi menjadi keniscayaan dalam pemerintahan Indonesia masa kini, tanpa mengurangi makna sebagai negara kesatuan. Sebab tanpa desentralisasi, berarti tidak ada otonomi bagi daerah, segala sesuatunya masih bersifat sentralistik, di mana kesenjangan antara pusat dan daerah akan menjadi semakin timpang.

13. Demonstrasi

Gerakan *demonstrasi* mahasiswa Indonesia, tidak pernah absen dalam perjuangan bangsa. Dalam gerakan *demonstrasi* anti pemerintahan Orde Lama, KAMI merupakan motor utama dalam kegiatan-kegiatan Angkatan 66 dan memainkan peranan pokok dalam arena politik berikutnya. Begitu juga dalam mengakhiri rezim Orde Baru yang otoritarian, beberapa tokoh reformis dan mahasiswa Indonesia berhasil menurunkan Jenderal Suharto dari jabatan kepresidenannya melalui demonstrasi yang besar-besaran.

14. *Persamaan*

Dalam suatu tatanan pemerintahan demokrasi, *persamaan* merupakan ide fundamental dalam azas kehidupan berbangsa dan bernegara, walaupun selalu ada hirarki-hirarki itu yang membedakannya antar individu. Lagi pula selalu ada untuk mengimbangi bentuk-bentuk hirarki itu. Untuk mengimbangi hirarki kekayaan, ada pajak progresif. Untuk mengimbangi hirarki status sosial dalam jabatan formal, ada masa pensiun. Namun tetap saja dibalik *persamaan* tersebut memiliki beberapa ketidaksamaan secara relatif.

15. *Hak Asasi Manusia*

Hak Asasi Manusia tidak sekedar mencakup hak-hak sipil dan politik, tetapi juga hak-hak ekonomi, sosial, budaya, seperti yang tercantum dalam *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*.

16. *Voting*

Pada umumnya sekarang ini sistem pemungutan suara (*voting*) diberikan haknya kepada kaum laki-laki maupun perempuan dewasa baik itu dalam sistem pemilihan distrik maupun proporsional.

I. Teori-teori Ilmu Politik

Meminjam istilah Miler (2000: 796), teori politik merupakan “enterprise” dan jika ditelusuri akar-akarnya mempunyai silsilah yang panjang dan istimewa. Ketika para pendahulu berhenti memandangi institusi-institusi sosial dan politik, karena mereka hanya dikeramatkan oleh tradisi. Mereka mulai bertanya; mengapa mengambil bentuk yang mereka lakukan, dan apakah mereka mungkin memperbaikinya atau tidak teori politik itu? Hal-hal apa saja yang seharusnya dibolehkan oleh hukum, dan apa-apa saja yang dilarang? Siapa yang seharusnya mengatur, dan seberapa jauh seharusnya yang diatur menerima kewajiban untuk mentaati? Apa itu keadilan, di antara individu-individu dan masyarakat? Demikian pertanyaan-pertanyaan itu bermunculan dan tak terelakan manakala orang mulai merefleksikan secara kritis praktik-praktik dan institusi-institusi mereka. Di sinilah teori politik mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara sistematis.

Sebagian teori telah memulai dengan konsepsi tentang sifat manusia, dan mempertanyakan pengaturan politik serta sosial apa yang akan mengisi dengan baik kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umat manusia. Sebagian lagi menafsirkan institusi-institusi yang ada sebagai bagian dari pola keseluruhan sejarah perkembangan, baik sebagai titik puncak dari perkembangan pranata, atau sebagai tahapan persinggahan yang dipersiapkan untuk digantikan oleh sesuatu yang lain. Sedangkan sebagian lagi memulai dengan mempertanyakan apa jenis pengetahuan yang mungkin dalam masalah-masalah politik, serta melanjutkan pada masalah-masalah mempertahankan pengaturan institusi yang memberikan kekuasaan kepada rakyat sesuai dengan proporsi kapasitas untuk menggunakannya demi kebaikan masyarakat.

Teori politik tersebut pada abad ke-20 mengalami perkembangan yang pesat terutama setelah terpengaruh oleh pemikiran positivisme. Sedangkan teori politik sebelumnya seperti Plato, Aristoteles, hingga Marx dan Mill berusaha menggabungkan dalam keseluruhan terhadap dunia sosial dan politik. Dominasi positivisme tersebut terletak adalah klaim bahwa tidak mungkin ada hubungan yang logis antara proposisi empiris yang menjelaskan dunia sebagaimana adanya dan proposisi normative yang mengatakan bagaimana seharusnya kita bertindak. Penerimaan terhadap klaim ini menyiratkan bahwa teori politik sebagaimana dipahami secara tradisional bertmpu pada kesalahan. Kesalahan tersebut adalah menggabungkan sekaligus memberi penjelasan hubungan sosial dan politik dengan rekomendasi mengenai bagaimana hubungan-hubungan itu seharusnya dikaukan untuk mendatang.

Terdapat tiga bentuk “penteorian” dalam ilmu politik yakni; *teori politik empiris*, *teori politik formal*, dan *teori politik normatif*. *Pertama*, teori *politik empiris*; biasanya digunakan untuk mengacu kepada bagian-bagian teoritis ilmu politik. Para ahli ilmu politik tertarik dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa politik tertentu, sekaligus tertarik dalam mengembangkan teori-teori yang lebih luas dalam satu payung politik. *Kedua*; *teori politik formal*, merupakan teori politik yang kadang-kadang dirasakan tumpang-tindih dengan “teori-teori sosial” maupun “teori-teori pilihan publik” (Miller, 2002: 787). Istilah ini meminjam dari gagasan ilmu ekonomi tentang pelaku-pelaku rasional yang berusaha mencapai tujuan-tujuannya, kemudian mencoba mengembangkan model sistem politik dan seolah-olah mereka tersusun dari pelaku-pelaku dalam berbagai peran politik

(politisi, birokrat, pemilih, dan lain-lain). Salah satu hasil yang sangat terkenal mengenai investigasi ini adalah teori Arrow (1963). Menurut teori tersebut tidak ada aturan keputusan secara simultan bisa memenuhi sejumlah kondisi yang sangat masuk akal. Pada bagian lain para ahli teori, lagi-lagi mengasumsikan satu populasi dengan preferensi politik tertentu, dan melihat bagaimana partai-partai politik berperilaku dalam sistem pemilihan yang demokratis, dengan asumsi bahwa setiap tujuan partai adalah memenangkan pemilihan dan masing-masing tujuan pemilih adalah untuk mengamankan kebijakan yang sesuai mungkin dengan preferensinya sendiri. Penerangan ini pada mulanya dikembangkan oleh Antony Down (1957) dan sejak itu telah dielaborasi secara meluas.

Ketiga, teori politik normatif. Merupakan teori politik yang tetap paling dekat dengan *enterprise* tradisional, sejauh ia berkenaan dengan justifikasi institusi dan kebijakan politik (Miller, 2000: 797). Tujuannya adalah meletakkan prinsip-prinsip otoritas, kebebasan, keadilan dan lain-lain. Kemudian menghususkan pada tatanan sosial macam apa yang paling memadai untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, tugas teori politik menurut pandangan ini adalah dua. *Pertama* ia tercapai sebagian karena menjelaskan prinsip-prinsip dasar itu sendiri. Tugas ahli teori tersebut menurut pandangan ini adalah menjelajah apa makna gagasan kebebasan dan kemudian menerapkannya pada masalah-masalah praktis.

Kedua; spektrum itu berdiri di mana mereka memihak kepada beberapa bentuk fondasionalisme, di mana pandangan tersebut adalah mungkin untuk menemukan landasan tujuan dalam mendukung prinsip-prinsip politik yang mendasar. Kelompok yang menonjol di sini adalah berbagai versi teori politik “kontraktarian”. Kelompok ini berpendapat bahwa ada seperangkat prinsip politik dasar yang semua orang rasional akan sependapat terhadap kondisi tertentu yang sesuai. Contoh politik demikian adalah “teori keadilan” John Rawls (1971) yang memahami keadilan sebagai prinsip individu-individu yang rasional akan menyepakatinya. Contoh serupa juga klaim Jurgen Habermas (1971) bahwa norma-norma yang akan disetujui dalam “situasi pembicaraan yang ideal” di mana penindasan dan dominasi tidak ada, serta partisipan mempengaruhi atau membujuk satu sama lain secara argumentatif (Miller, 2000: 798).

1. Teori Politik Kekuasaan Niccolo Machiavelli

Sebagaimana telah dicatat sebelumnya, teori politik kekuasaan Niccolo Machiavelli dapat dilihat sebagai penanda transisi dari dunia kuno ke modern yang sangat kontroversi. Melalui karyanya yang berjudul *The Prince* tahun 1513, ia sering dituduh “gurunya kejahatan” karena nasihat-nasihatnya yang amoral seandainya bukan immoral. Meskipun karya-karyanya akhir-akhir ini diinterpretasikan agak bersimpati, di belakang daya tarik ‘buah terlarang yang lezat’ bagaimanapun para ahli telah menemukan kontribusi-kontribusi signifikan lain dalam karya Machiavelli tersebut. Dengan menawarkan sebuah analisis empiris yang rasional tentang negara dan politik modern, tulisan-tulisannya meskipun muncul dalam bentuk ujaran-ujaran praktis, dipandang sebagai sebuah kunci pembuka dari ilmu politik kontemporer.

Machiavelli dilahirkan pada tahun 1469 di kota Florence (Italia Sekarang). Ia menghabiskan karir masa mudanya sebagai seorang diplomat dan administrator di kota Florence, meskipun ia tidak pernah menjadi duta besar, ia menjalankan misi diplomatik dan menjadi cukup ahli dalam urusan-urusan militer. Ketika Republik Florentine jatuh digantikan oleh keluarga Medici pada tahun 1512, Machiaveli dipaksa keluar dari posisinya dan mulai menjalani studi seumur hidup dalam bidang sejarah dan politik. Dalam pikiran-pikirannya Machivelli percaya bahwa rezim-rezim masuk ke dalam dua tipe, yaitu kepangeranan atau *principality* dan republik. Dalam buku *The Prince*, ia memberikan nasihat tentang bagaimana mendapatkan dan mempertahankan sebuah kepangeranan. Adapun isi dari teori Machiavelli (Skinner, 1988: 4) tersebut:

- a. Untuk melakukannya seorang penguasa yang bijak hendaknya mengikuti jalur yang dikedepankan berdasarkan kebutuhan, kejayaan, dan kebaikan negara. Hanya dengan memadukan *machismo*—semangat keprajuritan, dan pertimbangan politik, seseorang penguasa barulah dapat memenuhi kewajibannya kepada negara dan mencapai kebadian sejarah.
- b. Penguasa bijak hendaknya memiliki hal-hal:
 1. Sebuah kemampuan untuk menjadi baik sekaligus buruk, baik dicintai maupun ditakuti;
 2. Watak-watak seperti ketegasan, kekejaman, kemandirian, disiplin, dan kontrol diri;

3. Sebuah reputasi menyangkut kemurahan hati, pengampunan, dapat dipercaya, dan tulus.
- c. Seorang pangeran harus berani untuk melakukan apapun yang diperlukan, betapapun tampak tercela karena rakyat pada akhirnya hanya peduli dengan hasilnya — yaitu dengan kebaikan negara.

2. Teori Negara Berdaulat Jean Bodin

Jean Bodin hidup tahun 1530-1596, lahir di Anjou-Prancis dari keluarga kelas menengah yang kaya. Pemikiran politik Bodin dibangun di bawah tekanan pengalaman pribadinya. Ia hidup pada masa ketika pertentangan agama yang sudah lama dan mencapai puncak ketika terjadi pembunuhan St. Barthomew tahun 1572 yang mengakibatkan Prancis berada diambang kehancuran. Untuk itulah ia bergabung dalam kelompok kecil pengacara dalam *Politiques* yang di dalamnya terdapat tokoh-tokoh ternama seperti Michel de L'Hopital dan Duke of Alencon. Ia merasa sangat prihatin dengan perpecahan itu, sehingga ia menulis *Six Books of Commonwealth*. Sepuluh edisi karya ini dalam versi Bahasa Perancis dan tiga dalam Bahasa Latin. Inti teorinya bahwa:

- a. Watak dan tujuan negara adalah merupakan hal penting diketahui sebelum beralih pada cara mencapai tujuan negara. “Orang yang tidak memahami tujuan, dan tidak bisa menentukan masalahnya dengan benar, tidak bisa berharap akan menemukan cara-cara untuk meraihnya, sebagaimana orang yang melepaskan ke udara dengan cara serampangan tidak akan mengenai sasaran” (Bodin, 1957).
- b. Negara sebagai “pemerintahan yang tertata dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan yang berdaulat”. Terdapat empat unsur dalam negara; (a) tatanan yang benar, (b) keluarga; (c) kekuasaan yang berdaulat; (d) tujuan bersama.
- c. Keluarga merupakan unit dasar bagi negara serta bukan individu. Keluarga yang harmonis citra sejati dari *commonwealth*. Sebagaimana dalam keluarga di mana tunduk pada perintah ayah adalah penting bagi kesejahteraan keluarga, demikian juga patuh pada penguasa adalah penting bagi stabilitas negara.
- d. Ayah yang mempunyai kekuasaan penuh dalam keluarga, maka dalam penguasa *commonwealth* harus mempunyai yurisdiksi penuh terhadap warga negaranya.

Karena berkeluarga itu seperti bernegara; hanya bisa satu penguasa, satu pemimpin, satu tuan. Jika beberapa orang mempunyai otoritas, mereka akan merusak tatanan dan menimbulkan bencana yang terus berlanjut.

- e. Elemen yang membedakan negara dari semua bentuk asosiasi manusia lainnya adalah kedaulatan. Tidak bisa ada *commonwealth* yang sejati tanpa kekuasaan yang berdaulat menyatukan semua anggota-anggotanya. Suatu otoritas yang mutlak dan tertinggi yang tidak tunduk pada kekuasaan manusia lainnya harus ada dalam lembaga politik.

3. Teori Kekuasaan Negara Terbatas John Locke

John Locke (1632-1704) dilahirkan di Wrington-Somerset. Orang tuanya adalah penganut Puritan, di mana ayahnya adalah seorang tuan tanah dan pengacara yang berperang di parlemen wada waktu perang sipil. Karya utamanya adalah *Two Treatises of Government*, sebuah karya yang sering kali disebut sebagai “*Bibel Liberalisme Modern*” (Schmandt, 2002: 336).

Inti ajaran Locke pada hakikatnya adalah:

- a. Manusia hidup pada awalnya adalah dalam “kondisi alamiah” (*state of nature*), adalah kondisi hidup bersama di bawah bimbingan akal tanpa ada kekuasaan tertinggi di atas bumi yang menghakimi mereka berada dalam keadaan alamiah. Dalam masyarakat pra-politik ini orang bebas, sederajat, dan merdeka;
- b. Setiap orang mempunyai kemerdekaan alamiah, untuk bebas dari setiap kekuasaan superior di atas bumi, dan tidak berada di bawah kehendak atau otoritas legislatif manusia;
- c. Meskipun keadaan alamiah adalah keadaan kemerdekaan, ia bukan keadaan kebebasan penuh. Ia juga bukan masyarakat yang tidak beradab, tetapi masyarakat anarki yang beradab dan rasional. Ia tidak mempunyai kemerdekaan untuk menghancurkan dirinya atau apa yang menjadi miliknya.
- d. Untuk menanggulangi kelemahan dalam ‘hukum alam’, terdapat kebutuhan hukum yang mapan yang diketahui, diterima, dan disetujui oleh kesepakatan bersama untuk menjadi standar benar dan salah

- e. Individu tidak menyerahkan kepada komunitas tersebut hak-hak alamiahnya yang substansial, tetapi hanya hak-hak untuk melaksanakan hukum alam.
- f.1. Hak yang diserahkan oleh individu tidak diberikan kepada orang atau kelompok tertentu, tetapi kepada seluruh komunitas.
- f.2. Kontrak adalah perjanjian untuk membentuk suatu masyarakat politik. Ketika masyarakat itu telah terbentuk, kemudian harus membentuk pemerintahan yang dilanjutkan dengan membentuk lembaga-lembaga yang terpercaya untuk mencapai tujuan pemerintahan tersebut.
- f.3. Masyarakat politik adalah pembuat sekaligus pewaris keputusan tersebut. Sebagai pembuat ia menetapkan batas-batas kekuasaan; sedangkan sebagai pewaris ia adalah penerima manfaat yang berasal dari pelaksanaan kekuasaan tersebut.

4. Teori Pemisahan Kekuasaan Baron de Montesquieu

Baron de Montesquie (1689-1755) yang populer dikenal Montesquieu, dilahirkan dari keluarga kaya raya kelas ningrat (*petite noblesse*), di Paris Perancis. Karyanya yang terkenal adalah *De l'esprit des lois* atau *Spirit of the Laws* (Jiwa Peurndang-undangan) pada tahun 1748. Montesquieu lebih dikenal sebagai “Bapak Teori Pemisahan Kekuasaan”, kendatipun tidak sedikit gagasan-gagasan beliau juga membahas tentang hubungan antara hukum dan institusi politik yang perlu disesuaikan dengan lingkungan (sejarah, geografi khususnya iklim) dimana orang itu tinggal. Secara keseluruhan teori Montesquieu ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Hukum dan institusi politik harus disesuaikan dengan lingkungan — sejarah, geografi, dan iklim — di mana orang tinggal. Tidak ada aturan yang pasti dan tidak ada bentuk pemerintahan yang berlaku bagi semua masyarakat (relativisme)
- b. Bentuk pemerintahan yang paling tepat adalah pemerintahan yang paling sesuai dengan karakter orang-orang yang mendiami wilayah itu.
- c. Dalam klasifikasi pemerintah, terdapat tiga jenis pemerintahan, yakni: republik, monarkhi, dan despotik. Republik bisa berupa demokrasi, ketika kedaulatan diserahkan kepada semua lembaga kerakyatan, atau aristokrasi, ketika kekuasaan tertinggi hanya diserahkan sebagian anggota masyarakat. Monarkhi adalah pemerintahan konstitusional oleh satu orang, sedangkan despotisme adalah kekuasaan

yang sewenang-wenang oleh satu orang di mana tidak mentolerir intervensi keberadaan aristokrasi atau beberapa kekuasaan perantara yang berdiri di antara penguasa dan rakyat dan bertindak sebagai penengah.

- d. Untuk menghindari ketegangan politik dan perang, maka hukum dibutuhkan, baik itu hukum bangsa-bangsa yang mengatur hubungan antar bangsa/negara merdeka, hukum sipil yang mengatur hubungan antar individu-individu, dan hukum politik yang mengatur dan menentukan hubungan antara penguasa dengan rakyat.
- e. Negara yang cocok untuk memaksimalkan kebebasan dan menyeimbangkan persamaan, adalah negara di mana kekuasaan *legislatif*, *eksekutif*, dan *yudikatif* pemerintah dipisahkan sendiri-sendiri sehingga hukum sipil dapat dibuat menurut kebutuhan semua bagian masyarakat (Apter, 1996: 86).

5. Teori Hak Pemilikan Legal Robert Nozick

Sebagaimana kaum libertarian membela pasar bebas, mereka mentang penggunaan kekuasaan negara bagi kebijaksanaan sosial, termasuk pola-pola perpajakan redistributif dalam menerapkan teori persamaan liberal. Akan tetapi tidak semua orang yang mendukung pasar bebas dapat digolongkan sebagai seorang libertarian, karena tidak semua dari mereka menerima pandangan kaum libertarian bahwa pasar bebas secara inheren adil yang membela kaum kapitalisme tanpa batas (*unrestricted capitalism*) adalah produktivitasnya (Kimlicka, 2004: 127). Seperti yang dikatakan Nozick (1974: ix) "individu memiliki hak dan terdapat hal-hal yang tidak seorangpun atau sebuah kelompok-pun boleh mencampurinya (tanpa melanggar hak itu). Sedemikian kuat dan luas jangkauan hak-hak ini. Karena orang memiliki hak untuk menghabiskan sekalipun untuk kepemilikannya menurut apa yang dianggap sesuai. Sedangkan campur-tangan pemerintah sama dengan pemaksaan kerja yang merupakan sebuah pelanggaran, bukan atas efisiensi, tetapi atas hak-hak moral dasar kita. Dengan demikian klaim pokok Nozick dapat dikemukakan; "jika kita memiliki anggapan bahwa semua orang memiliki hak legal (*entitled*) atas barang-barang yang sekarang dimilikinya, maka distribusi yang adil secara sederhana adalah distribusi yang dihasilkan dari pertukaran bebas (*free exchanges*) di antara orang-orang. Semua distribusi yang timbul oleh pemerintah secara bebas (*free transfers*) dari sebuah situasi yang adil dengan sendirinya adalah adil. Namun jika

pemerintah berusaha memajaki pertukaran tersebut dengan melawan kemauan orang itu, itu berarti tidak adil, bahkan seandainya pajak tetap dipergunakan untuk memberikan kompensasi bagi seseorang yang harus menanggung biaya ekstra karena rintangan alamiah yang tidak semestinya. Dengan demikian satu-satunya perpajakan yang sah adalah mengumpulkan penghasilan demi memelihara latar belakang institusi-institusi yang diperlukan untuk melindungi sistem pertukaran bebas misalnya polisibeserta jajaran penegak hukum lainnya dalam menegakkan pertukaran bebas.

Nozick mengklaim bahwa dengan meningkatnya kekayaan sosial akan terjadi proefisiensi secara maksimal. Secara lebih rinci, menurut Nozick dalam karyanya yang berjudul *Anarchy, State, and Utopia* (1974) terdapat tiga prinsip utama dalam *entitlement theory* (teori hak pemilikan legal) sebagai berikut:

- a. Prinsip transfer (*principle of transfer*) — apa-pun yang diperoleh secara adil dapat ditransfer secara bebas.
- b. Prinsip perolehan awal yang adil (*principle of just initial acquisition*) — penilaian tentang bagaimana orang pada awalnya sampai memiliki sesuatu yang dapat ditransfer menurut prinsip pertama.
- c. Prinsip pembetulan ketidakadilan (*principle of rectification of injustice*) — bagaimana berhubungan dengan pemilikan (*holdings*) jika hal ini diperoleh atau ditransfer melalui cara yang tidak adil.

Dengan demikian secara bersama ketiga prinsip tersebut mengimplikasikan bahwa jika apa yang sekarang ada pada orang diperoleh dengan cara yang adil, maka rumus distribusi yang adil adalah "setiap orang memberikan sesuai dengan pilihannya, dan setiap orang menerima sesuai dengan apa yang dipilihnya atau *from each as they choose, to each as they are chose* (Nozick, 1974: 160).

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel A. dan Verba, S. (eds) (1963) *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Almond, Gabriel A. (1960) "Introduction: a functional approach to comparative politics" dalam Gabriel A. Almond dan J.S Coleman (eds) *The Politics of the Developing Areas*, Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Almond, Gabriel A. (1956) "Comparative political systems" dalam *Journal of Politics*, 18.
- Apter, David A. (1996) *Pengantar Analisa Politik*, Diterjemahkan Oleh Setiawan Abadi, Jakarta: LP3ES.
- Apter dan Adrian (1972), *Choice and the Politics of Allocation*, New Haven: Conn Yale University Press.
- Arrow. K. (1963) *Social Choice and Values*, New Haven, CT.
- Asad. Talal (ed) (1973) *Anthropology and the Colonial Encounter*, London: Lewis.
- Avineri, Shlomo, (1969) *Karl Marx on Colonialism and Modernization*, New York: Doubleday Anchor Books.
- Ball, Terence (1995) *Reappraising Political Theory*, Oxford: Oxford University Press
- Bagus, Lorens (2000) *Kamus Filsafat*, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bailey, F.G. (1980) *Stratagems and Spoils: A Social Anthropology of Politics*, Oxford: Oxford University Press.
- Banks, James A. (1977) *Teaching Strategies for the Social Studies: Inquiry, Valuing, and Decision-Making*, Philippines,: Addison-Wesley Publishing Company.
- Barber, Benjamin (1988) *The Conquest of Politics: Liberal Philosophy in Democratic Times*, Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Barents, J. (1965) *Ilmu Politik Suatu Perkenalan Lapangan*, Terjemahan L.M. Sitorus, Jakarta: Pembangunan.
- Bevan, Ruth, A. (1973) *Marx and Burke: A Revisionist View* (La Salle, III: Open Court Publishing Company.

- Borg, Walter R. dan Gall Meredith, D. (1989) *Educational Research: An Introduction*, Fifth Edition, New York: Longman.
- Blondel, J. (1969) *An Introduction to Comparative Government*, London: Alfred Knopf.
- Bowles, S. (1985) "The production process in a competitive economy: Walrasian, Neo-Hobbesian, and Marxian models" dalam *American Economic Review* 75 (1).
- Brown, Archie (2000) "Budaya Politik" dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Edisi Kedua, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlmn.778-780.
- Brown, Archie (1984) *Political Culture and Communist Studies*, London: Alfred Knopf.
- Bryant, Caroli dan Louise G. White, (1987) *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*, Terjemahan Rusyant L. Simatupang, Jakarta: LP3ES.
- Budiardjo, Miriam (2000) *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia.
- Chaidar, Al (1999) *Pemilu 1999: Peratarungan Ideologis Partai-partai Islam Versus Partai-partai Sekuler*, Jakarta: Darul Falah.
- Curtice, John (2000) "Pemerintah" dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Edisi Kedua, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlmn.418-419.
- Dahl, Robert, A. (1970) *After the Revolution ?*, New Haven, Conn: Yale University Press.
- Dahl, Robert,A. (1967) *Pluralist Democracy in the United States*, Chicago: Rand McNally.
- D'Entreves, Alexander Passerin (1967) *The Notion of the State*, Oxford: The Clarendon Press.
- Dhal, Rober, A. (1994) *Analisis Politik Modern*, Alih Bahasa: Mustafa Kamil Ridwan, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Dicey, A.V. (1959) *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan.
- Deutch, Karl W.(1970) *Politics and Government: How People decide their Fate*, Boston: Houghton Mifflin Co.
- Douglas, M. (1975) *Implicit Meanings; Essay in Anthropology*, London. The English Universities Press Limited.

- Down, Antony (1957) *An Economic Theory of Democracy*, New York: Doubleday Anchor Books.
- Duverger, Maurice, (1985) *Sosiologi Politik*, Penerjemah Daniel Dhakidae, Jakarta: CV Rajawali.
- Easton, David (1971) *The Political System*, New York: Alfred A. Knopf, Inc.
- Easton, David (1965) *A System Analysis of Political Life*, New York: Alfred A. Knopf, Inc.
- Eldersveld, S.J. (1964) *Politics Parties: A Behavioral Analysis*, New York: Basic Books
- Emerson, Rupert (1960) *From Empire to Nation*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Engels, Friederich, (1958) "Speech at the Graveside of Karl Marx" dalam *Marx and Engels*, New York: The Macmillan Company.
- Erikson, Erik, (1970) *Gandhi's Truth*, London: The English Universities Press Limited.
- Erikson, Erik (1958) *Young Man Luther*, New York: Alfred Knopf.
- Esman, Milton J. (2000) "Politik Etnik" dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Edisi Kedua, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlmn.308-309.
- Eysenck, (1954) *The Psychology of Politics*, New York: Praeger.
- Finer, S.E. (1974) *Comparative Government*, Harmondsworth:
- Flower, Robert. B. dan Oresstein, Jeffrey, R (1985) *Contemporary Issues in Political Theory*, New York: Praeger.
- Fortes, M., dan Evans-Pitchard, E.F. (eds) (1940), *African Political System*, London: Alfred Knopf.
- Fraenkel, Jack, R. (1980) *Helping Students Think and Value. Strategies for Teaching the Social Studies*, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Foucault, Michel, (1974) *The Archeology of Knowledge*, Diterjemahkan A.M. Sheridan-Smith, London: Tavistock.
- Foucault, Michel, (1973) *The Order Things: An Archeology of the Human Sciences*, Terjemahan dari Bahasa Prancis, New York: Vintage.

- Fromm, Erich, (1974) *The Anatomy of Human Destructiveness*, New York: Basic Books
- Gay, Peter (1969) *The Enlightenment: An Interpretation*, Jilid II, New York: Alfred Knopf.
- Germino, Dante (1975) "The Contemporary Relevance of The Classic of Political Philosophy" dalam Fred Greenstein dan Nelson Polsby, eds. *Handbook of Political Science*, vol1 (Reading, MA: Addison-Wesley.
- Gibson John,S. (1965) "The Process Approach" dalam Donald H. Riddle dan Robert S. Cleary (eds) *Political Science in the Social Studies*, Washington: National Council for the Social Studies.
- Gilpin, R. (1987) *Political Economy of International Relations*, Princeton, NJ. Prentice-Hall.
- Goffman, Erving (1974) *Frame Analysis: An Essay on Organization of Experience*, Cambridge, Ma: Harvard University Press.
- Goodwin, Barbara, (2000) "Kontrak Sosial" dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Edisi Kedua, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlmn.973-974.
- Gurr, Ted, R. (1970) *Why Men Rebel*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Halsey, A.H. (2000) "Persamaan" dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Edisi Kedua, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlmn.304-305.
- Haricahyono, Chepy, (1991) *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Yogyakarta: Tiarawacana.
- Higgins, Rosalyn, (2000) "Hak Asasi Manusia" dalam dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Edisi Kedua, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlmn.464-466.
- Hobbes, Thomas (1934 [1651]) *Leviathan*, Oxford: The Clarendon Press.
- Hogerwerf (1972) *A Politicologie Begripen en Problemen*, Alphen aan den Rijn: Samson Uitgeverij.
- Huntington, Samuel, P (1991) *The Third Wafe: Democratization in the Late Twentieth Century*, London: Hutchinson & Co, Ltd.
- Iswara, F. (1974) *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Dwiwantara.

- Jackson, Karl, D. (1978) "The Implication of Structure and Culture in Indonesia" dalam Karl, D. Jackson & Lucian W Pye (eds), *Political Power and Communication in Indonesia*, Berkeley: California University Press.
- Jencks, Christopher, (1972) *Inequality*, London: Alfred Knopf.
- Johnson, Doyle Paul (1986) *Teori Sosiologi: Klasik dan Modern, Jilid 2*, Diindonesiakan oleh Robert Lawang, Jakarta: Gramedia.
- Kaplan, Braham (1964) *The Conduct of Inquiry*, San Francisco: Chandler Publishing Company.
- Kattsoff, Louis, O. (1996) *Pengantar Filsafat*. Alih Bahasa Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Kavanagh, Dennis, (2000a) "Pemilihan Umum" dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Edisi Kedua, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlmn.284-285.
- Kavanagh, Dennis, (2000b) "Voting (Pemungutan Suara)" dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Edisi Kedua, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlmn.1130-1132.
- Kelsen, Hans (1961) *General Theory of Law and State*, New York: Russell and Russell.
- Key, V.O. Jr (1965). *Public Opinion and American Democracy*, New York: Alfred A. Knopf.
- Key. V.O.Jr. (1948) *Politics, Parties and Pressure Group*, New York: T.Y. Crowell.
- Kimlicka, Will (2004) *Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus Atas Teori-teori Keadilan*, Penerjemah Agus Wahyudi Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kleden, Ignas (2001) *Menulis Politik: Indonesia Sebagai Utopia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Koswara, Ekom (1996) *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia: Suatu Studi Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II Menurut UU No. 5 Tahun 1974*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Klandersmans, Bert. (2005) *Protes dalam Kajian Psikologi Sosial*, Penerjemah Helly P. Sutjipto, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Laswel, Harold (1950) *Politics, Who gets What, When, How*, New York: World Publishing.

- Locke, John (1948) *The Second Treatise on Civil Government*, Oxford: Basic Blackwell.
- Losco, Joseph dan Williams, Leonard (2005) *Political Theory: Kajian Klasik dan Kontemporer*, Penerjemah Haris Munandar, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lijphart, Arend (2000) "Partai Politik" dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Edisi Kedua, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlmn 731-733.
- Lipset, S. dan Rokkan, S. (eds) (1967) *Party System and Voter Alignments*, New York: Oxford University Press.
- Lipset, S. (1960) *Political Man*, London: The English Universities Press Limited.
- Machiavelli, Nocolo, (1984) *The Prince*, diterjemahkan, diberi kata pengantar oleh Leo Paul S de Alvarez, Irving, Tx.: University of Dallas Press, Buku XV.
- Marvick, Dwaine (2000) "Rekriutmen Politik" dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Edisi , hlmn. 786-787.
- Marvick, Dwaine (ed) (1977) *Harold D. Laswell on Political Sociology*, Chicago: Chicago University Press.
- Mayo, Henry B. (1960) *An Introduction to Democratic Theory*, New York: Oxford University Press.
- Miller, David (2002) "Political Theory" dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Edisi Kedua, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlmn.796-799..
- Mitchell,J.B. (1960) *Historical Geography*, London: The English Universities Press Limited.
- Montesqieu (1949) *Spirit of the Laws*, New York: Hafner Publishing Co.
- Nash, Manning (1965) "Approaches to the Study of Economic Growth", *Journal of Social Issues*, Vol 29. No.1
- Nelson, John (1983) "Natures and Futures for Political Theory" dalam Nelson, ed. *What Should Political Theory Be Now?*, Albany: State University of New York Press.
- Noer, Deliar (1965) *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Djilid I., Medan: Dwipa.
- Nozick, Robert (1974) *Anarchy, State, and Utopia*, New York; Basic Books.

- Okin, S.M. (1980) *Women in Western Political Thought*, London.
- O'leary, Brendan (2000) "Ilmu Politik" dalam Adam Kupper & Jessica Kupper, Ed. *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Haris Munandar dkk. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pateman, C. (1988) *The Sexual Contact*, Cambridge United Kingdom.
- Polsby, Nelson W. (1963) *Community Power and Political Theory*, New Haven, Conn.: Yale University Press.
- Popper Karl.R. (1945) *The Open Society and Its Enemies*, London: Routledge and Kegan Paul.
- Popper Karl.R. (1959) *The Logic of Scientific Discovery*, London: Hutchinson & Co, Ltd.
- Popper, Karl.R. (1964) *The Poverty of Historicism*, New York: Harper Torch Books.
- Popper, Karl. R. (1962) *Conjectures and Refutations*, New York: Basic Books.
- Putnam, Robert, D. (1973) *The Beliefs of Politicians*, New Haven: Conn
- Ranney, Austin, (1966) *The Governing of Men*, New York: Rinehart and Winston Inc.
- Rawls, John, (1971) *The Theory of Justice*, Cambridge, Ma.: Harvard University Press.
- Renshon, Stanley A. (2000) "Psikologi Politik" dalam Adam Kupper & Jessica Kupper, Ed. *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Haris Munandar dkk. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlmn. 784-785.
- Riggs, Fred W., (1966) *Thailand: The Modernization of a Bureaucratic Polity*, Boston: Houghton Mifflin.
- Rose, R. dan Mossawir, H. (1967) "Voting and Elections: A Functional Analysis, dalam *Political Studies*.
- Rousseau, J.J. (1948) *The Social Contract*, London: George Allen and Unwin.
- Schlesinger, J.A. (1968) "Party Units" dalam D.L. Sills (ed) *International Encyclopedia of the Social Science*, vol.11. New York.
- Schmandt, Henry.J. (2002) *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, Penerjemah: Ahmad Baidlowi dan Imam Bahehaki, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Scaff, Lawrence A. (2000) "Legitimacy" dalam Adam Kupper & Jessica Kupper, Ed. *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Haris Munandar dkk. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlmn.562-563..
- Schumpeter, J.A. (1942) *Capitalism, Socialism and Democracy*, New York: Harper Torch Books.
- Shadily, Hasan (ed) (1984) *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Samsuddin,H. (1996) *Metodologi Sejarah*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Proyek Pendidikan Tenaga Akademik,
- Skinner, Quentin (1985) *The Return of Grand Theory in The Human Science*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Straus, Leo (1959) *What is Political Philosophy?*, Glencoe, IL: Free Press.
- Sullivan, Harry, Stack (1950) "Tensions Interpersonal and International" dalam *Tensions that Cause War*, penyunting Hadley Cantri, Urbana III: University of Illionois Press.
- Supardan, Dadang, (2004) *Pembelajaran Sejarah Berbasis Pendekatan Multikultural dan Perspektif Sejarah Lokal, Nasional, Global, Untuk Integrasi Bangsa (Studi Kuasi Eksperimentl Terhadap Siswa SMU di Kota Bandung)*, Disertasi Doktor, UPI Bandung.
- Surbakti, Ramlan, (1996) "Perkembangan Mutakhir Ilmu Politik", dalam Miriam Budiardjo dan Tri Nuke Pudjiastuti (ed), *Teori-teori Politik Dewasa Ini*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutcliffe, Bob, (2000) "Politik Ekonomi" dalam Adam Kupper & Jessica Kupper, Ed. *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Haris Munandar dkk. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halmn.780-782.
- Thomson, M. Ellis, R, dan Wildaysky, A. (1990) *Cultural Theory*, Boulder, Co.
- Torbeth, W.R (1981) "Why Educational Research Has Been So Uneducational: The Case for a New Model of Social Science Based on Collaborative Inquiry", dalam *Human Inquiry: A Sourcebook of New Paradigm Research*, (Eds) P. Reason dan J. Rowan, New York: Wiley.
- Tocqueville, Alexis, (1945) *Democracy in America*, New York: Alfred A. Knopf.

- Tournon, Jean, (2000) Perwakilan Politik” dalam Adam Kupper & Jessica Kupper, Ed. *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Haris Munandar dkk. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halmn.919..
- Tufte, E. (1978) *Political Control the Economy*, New Jersey: Pricenton.
- United Nations, Technical Assistant Programe (1962), *Decentralization For National and Local Development*, Departement Economic and Social Affair, Division for Public Administration, New York: United Nations.
- Verba, Sidney, (1985) ‘Comparative Politics: Where Have We Been, Where Are We Going ?’, dalam Howard J. Wiarda, ed., *New Direction in Comparative Politics*, Boulder, Co.: Westview Press, Inc.
- Vincent , Joan (2000) “Antropologi Politik” dalam Adam Kupper & Jessica Kupper, Ed. *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Haris Munandar dkk. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halmn 776 -778.
- Warner, W.Lloyd (1960) *Social Class in America*, New York: Harper Torch Books.
- Weber, M. (1968[1922) *Economy and Society*, New York: The Free Press.
- Weber, Max, (1949) *The Methodology of Social Sciences*, diterjemahkan dan disunting oleh Edward A. Shils dan Henry A.Finch, New York: The Free Press.
- Welch, S. (1993) *The concept of political Culture*, London: George Allen and Unwin.
- White, S. (1979) *Political Culture and Soviet Politics*, London: George Allen and Unwin.
- Wolin, Sheldon, (1960) *Politics and Vision*, Boston: Little Brown.

BAB XI

KESIMPULAN

Jika sebagian para ahli keberatan adanya istilah “ilmu sosial” karena baginya hanya sebagai jargon birokratis dari para akademisi, di mana mustahil dapat ditentukan kekhususan metodologi dalam filsafat ilmu pengetahuan yang begitu luas, dan hal ini bagi kita suatu pemikiran yang sangat berharga. Menurut mereka, konon karakteristik ilmu-ilmu sosial yang memiliki kontinum ekstrem dari ideografis partikularistik sampai nomotetis generalistik, tidak bisa begitu saja direduksi dalam bentuk penyederhanaan ‘tunggal yang dipaksakan’. Selain itu bagi mereka penamaan ‘ilmu sosial’ yang disatukan dalam beberapa pendekatan yang telah memisahkan berbagai subyek, sebenarnya upaya pencarian sintesis tidak akan mereda. Sementara itu masih akan terlihat coreng-moreng dan tampak seperti sebuah kelompok petualang intelektual yang sangat berbeda dan beragam.

Terhadap pandangan tersebut bagi Wallerstein sebagai seorang sejarawan dan sosiolog menawarkan sebuah pendekatan jangka panjang yang membuatnya tidak jatuh dalam satu kutub ekstrem dari tarik-ulur antara ideosinkratik (ideografis) dengan nomotetik. Dia mengakui kebenaran dari teori-teori ralitasistik yang sering digagas kelompok posmodernisme maupun pandangan-pandangan positivistik yang menuntut pada hukum-hukum obyektif dan universal. Meskipun distingsi epistemologis antara dua kubu itu sedang sengit terjadi, dia menganjurkan untuk semakin meningkatkan dialog antara dua kubu tersebut. Sebab, baginya apa yang disebut sebagai ‘ilmu sosial’ adalah salah satu pewaris kearifan itu. Selain itu, secara sadar ‘ilmu sosial’ pernah mendefinisikan dirinya sebagai upaya pencarian kebenaran-kebenaran yang melampaui kearifan yang telah ada atau telah dideduksikan semacam itu, terutama dalam upaya penjelajahan dunia modern. Pandangan yang demikian itu juga mirip dengan bagian *dualisme Cartesian*, yang berasumsi bahwa ada pemilahan yang mendasar antara alam dan manusia, *benda* dan *jiwa*, *dunia fisik* dan *sosial/spiritual*. Oleh karena itu perjuangan epistemologis atas pengetahuan yang sah (*legitimate*), bukan lagi perjuangan terhadap *siapa yang akan mengendalikan pengetahuan tentang alam*, melainkan *mengenai siapa yang akan mengendalikan pengetahuan tentang dunia manusia*.

Suatu hal yang menarik, beberapa ilmu sosial, seperti; *sejarah, ekonomi, sosiologi, geografi, antropologi, psikologi*, dan *ilmu politik*, itu terlahir pada abad ke-19, dan terdapat lima lokasi utama aktivitas ilmu sosial, yakni Inggris, Perancis, Jerman, Italia, dan Amerika Serikat.

Untuk *ilmu sejarah* yang membuat ‘disiplin’ baru tersebut benar-benar berbeda dari *hagiografi* (riwayat hidup dan legenda orang-orang yang ‘disucikan’, biasanya sesuai dengan pesanan penguasa), adalah betapa sukarnya kita mengabaikan kata-kata Leovold von Ranke yang demikian kuat pengaruhnya sejarah harus menghasilkan “*wie es eigentlich gewesen ist*” (apa yang nyata-nyata terjadi), seraya ia banyak menulis tema-tema; “ilmu” dalam perjuangan melawan “filsafat”.

Dalam perkembangannya ilmu sejarah setelah melewati masa-masa penulisan sejarah klasik dan kritis (Herodotus, Thucydides, Cicero, Vico, Ranke, Collingwood, Romein, Toynbee, Huizinga, Burkhardt, Barzun, dan sebagainya) muncul sejarah sosial Di bawah Fernand Braudel pada tahun 1950-an kelompok *Annales* dari Prancis muncul mendominasi dunia sejarah, baik secara intelektual maupun institusional. Kemudian sejarah politik baru banyak dipraktekkan di Amerika Serikat baik tentang hasil-hasil pemilu, pola pemungutan suara, maupun usaha untuk menghitung pemogokan dan bentuk-bentuk protes lainnya. Selain itu tidak lama kemudian juga di Amerika mulai gnadrung pada ide-ide Sigmund Freud, para ahli sejarah dan psikoanalisis membentuk psychohistory, mulai mencoba menyimak motif personal para pemimpin agama dan politik seperti; Martin Luther, Woodrow Wilson, Lenin, Gandhi, dan sebagainya. Bahkan sejarawan Langer yang menjadi *Presiden Asosiasi Sejarawan Amerika* menghimbau kepada para koleganya untuk menyambut psikohistori sebagai cabang baru ilmu sejarah.

Pesatnya perkembangan ilmu-ilmus sosial yang disusul oleh perkembangan kajian sejarah juga erat hubungannya dengan usaha-usaha saling mendekat (*rapprochement*) antara sejarah dan ilmu sosial lain. Sejarah memang tidak mentabukan penggunaan konsep-konsep umum digunakan dalam beberapa ilmu sosial asl relevan dan selama penggunaan itu menambah kejelasan eksplanasi sejarah. Dengan demikian terwujudlah bentuk Sejarah Baru (*The New History*) para tokohnya adalah James Harvey Robinson, David S. Landes, dan Getrude Himmelfarb, dan Charles Tilly.

Ilmu sejarah terus berkembang, sejarawan kontemporer banyak menolak determinisme ekonomi maupun geografis. Dalam pada itu penolakan terhadap karya-karya generasi sebelumnya disertai dengan munculnya pendekatan-pendekatan baru terhadap masa silam, khususnya yang diringkas dalam empat bahasa, yakni; *Pertama, subaltern/grass-roots history* (maksudnya sejarah dari bawah, seperti yang dituliskan Guha tentang *Subaltern Studies*); *Kedua, microstoria* ('sejarah mikro' dalam komunitas kecil, seperti yang ditulis Giovanni Levi maupun Roy Ladurie); *Ketiga, alltagsgeschichte* ('sejarah keseharian' yang ditulis seperti oleh Alfred Schutz, maupun Erving Goffman; Keempat; *historiedel'immaginaire* ('sejarah mentalitas' yang ditulis oleh Lacan dan Michel Foucault).

Pada abad kesembilas pula *ilmu ekonomi*, yang pada mulanya terkadang di fakultas hukum, maupun filsafat, di mana istilah 'ekonmi politik' yang pernah berjaya sampai abad ke-18 mulai dihapuskan. Dengan melepaskan kata sifat 'politik', para ekonom lebih merupakan cermin suatu psikologi individualitas universal daripada institusi-institusi yang dikonstruksikan secara sosial. Argumentasi inilah yang kemudian digunakan untuk melaksanakan prinsip-prinsip *laissez-faire, laissez-passer* yang berasal dari Vincent de Gournay mazhab fisiokrat dan dipopulerkan Adam Smith mazhab klasik. Asumsi-asumsi yang menguniversalisasikan ilmu ekonomi serta ketatnya penerapan positivisme melalui kuantifikasi data, membuat kajian ilmu ekonomi menjadi sangat berorientasi ke masa kini. Mungkin ini satu-satunya ilmu sosial yang 'terbebaskan dari ikatan moral', namun tidak lantas menjadi sosok negara kekuasaan yang politik ekonominya amoral. Hanya saja di mata Adam Smith, ekonomi sekedar lebih dingin dalam menanggapi soal-soal moral serta membuka diri kajian kritis.

Jika saja aliran neo-klasik dan revolusi Keynes bisa mengatasi berbagai kelemahannya, akankah ada ilmu ekonomi anti neo-klasik itu? Sebab Keynes sendiri hanya menganggap dirinya sebagai orang yang mencoba memperbaiki ekonomi neo-klasik dan tidak membuat aliran baru, walaupun pernyataan ini masih diperdebatkan. Seabad yang lampau tidak terbayangkan tentang peranan matematika dalam ekonomi. Tetapi belakangan ini matematika menjadi dominan, termasuk diferensiasi kalkulus yang merupakan bahasa alamiah logika ekonomi dan sangat membantu ilmu ekonomi modern. Hal ini dirasakan memudahkan pengaitan aspek empiris, serta diakui oleh para ekonom

termasuk yang agak alergi matematika seperti Keynes. Namun ekonometri (aspek matematika ekonomi) dan ilmu ekonomi tidak pernah melebur sepenuhnya, kendatipun para ahli ekonomi terus menguskannya. Realitanya, masih banyak kajian ekonomi yang tidak memakai matematika, namun mampu memberikan eksplanasi yang jelas dan rinci. Kondisi-kondisi realitas seperti ini yang mendorong terjadinya divisi-divisi dalam ilmu ekonomi yang memicu spesialisasi-spesialisasi baru.

Disusul oleh kelahiran *disiplin sosiologi*, sebuah ilmu yang namanya baru. Bagi sang penemu, Aguste Comte, sosiologi harus menjadi 'ratunya ilmu-ilmu'. Comte yakin, bahwa sosiologi tidak hanya ditemukan untuk sebuah disiplin baru yang belum pernah dipraktekkan pada saat itu, tetapi juga mengklaim status masa depan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perkembangan sosial yang progresif melalui tiga stadia itu ke arah penyebaran metode ilmiah dari observasi dan eksperimen yang dapat diterapkan secara universal.

Kalau saja pada sosiologi klasik dan modern seperti Comte, Durkheim, Spencer, Sorokin, Mark, Simmel, Ogburn, Dahrendorf, Blau, Coser Collin, Mead, Parsons, Merton dan lainnya, banyak dipengaruhi oleh aliran-aliran evolusi sosial-budaya, struktur sosial, budaya, dan interpersonal (sedikit sekali tingkat individual kecuali di antaranya Weber yang menonjol), yang melahirkan teori-teori struktural-fungsional, konflik, pertukaran sosial, interaksionisme simbolik, dramaturgi, teknologi dan ketinggalan budaya, maka dalam sosiologi kontemporer banyak terjadi perubahan-perubahan mendasar. Perhatian sosiologi banyak bergeser dari ruang kendali (dari isu-isu seperti dampak negara, dominasi kelas, dan sebagainya) ke tingkat realitas akar rumput. Apa yang dilakukan oleh para aktor satu sama lain dan kepada mereka sendiri. Dibawah pengaruh Alfred Schutz yang menyatakan bahwa "dunia dalam jangkauan" memberikan arketip untuk para aktor suatu model dari semua "kesemestaan bermakna" bagi yang lain. Dengan kata lain pengetahuan esensial yang disebarkan para aktor dalam kehidupan sehari-hari pada akhirnya bertanggung jawab atas apa yang dianggapnya sebagai *trend global* dan impersonal.

Trend lainnya adalah mengesampingkan organisasi sosial untuk mencari pemicu ke tindakan sosial yang sebenarnya. Dalam arti para sosiolog kontemporer lebih memberi perhatian pada komunitas (*community*) dengan menurunkan peran masyarakat (*society*)

demi tujuan praktis, karena pandangan sosiologi kontemporer, komunitas adalah *imagined*, sebagaimana pandangannya bahwa komunitas adalah sesuatu yang dipostulatkan sebagai realitas. Mungkin kebangkitan yang paling berkembang dan memunculkan kritik yang luas apa yang disebut Anthony Giddens 'konsensus ortidoks' pada tahun 1970-an, adalah *revolusi fenomenologis*. Hal ini diawali oleh Berger dan Lukman yang ditopang melimpahnya reformulasi radikal seperti yang dilakukan Alfred Schultz tersebut di atas. Kemudian "etnometodologi" dari Harold Garfinkel yang memperlakukan masyarakat sebagai presentasi dari aktor yang berpengatahuan luas dalam kegiatan sehari-harinya, ternyata mendorong perubahan sosiologi dari "struktur dan sistem obyektif" ke "perwakilan" atau *agency* sosial.

Pengenalan konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi sosiologi mencakup; *masyarakat, peran, norma, sanksi, interaksi sosial, konflik sosial, perubahan sosial, permasalahan sosial, penyimpangan, globalisasi, patronase, kelompok, patriarki, hirarki*, merupakan hal yang penting untuk disimak mahasiswa secara seksama. Mengingat dari konsep dan generalisasi-generalisasi tersebut dapat ditarik suatu teori yang merupakan satuan pernyataan yang dapat dimengerti bagi yang lain, dan sekaligus berfungsi untuk meramalkan tentang peristiwa empiris. Karena itu suatu teori sosiologi juga merupakan seperangkat konstruk, batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan mencari hubungan-hubungan antar *variable*, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.

Berbeda dengan *disiplin antropologi*, walaupun bangsa Eropa telah mengumpulkan segudang informasi tentang bangsa Afrika dan Asia sejak abad ke-15 dan 16 sebagai implikasi penjelajahan samudera, namun laporan-laporan itu sifatnya tidak sistematis dan kurang terpercaya. Baru pada abad ke-19 para antropolog melakukan riset yang profesional dan luas, di mana mereka mulai mengorganisir pengumpulan informasi etnografis yang sistematis. Boleh jadi etnografi merupakan bagian yang paling sukses dalam antropologi sosial dan budaya. Franz Boas sebagai "bapak antropologi" melakukan studi jangka panjang terhadap penduduk asli pantai utara *British-Columbia*. Kalau saja Boas menjadi dosen pertama dalam antropologi di *Universitas Columbia* di New York serta pendiri ilmu antropologi di Amerika, maka E.B. Taylor yang dikenal sebagai

antropolog evolusionisme berjasa dalam mengembangkan ilmu antropologi di Inggris khususnya di Universitas Oxford.

Antropologi yang pernah dikritik sebagai perpanjangan tangan kolonialisme Barat, kini semakin berkembang secara internasional, dengan munculnya pusat-pusat studi seperti di India, Brazil, Mexico, dan Afrika Selatan. Di Amerika utara dan Eropa juga hidup sebuah gerakan yang menerapkan metode-metode baru sosial budaya untuk menganalisis masyarakat Barat, yang mana sebelumnya tidak pernah dibahas dalam penelitian etnografis. Penelitian lapangan yang berdasarkan observasi partisipan dikembangkan Bronislaw Malinowski yang mewariskan aliran fungsionalisme, sedangkan Claude Levi-Strauss mengembangkan pendekatan struktural untuk mengungkap mentalitas manusia dalam mitos, legenda, ataupun cerita rakyat lainnya.

Kemudian pada tahun 1980-an terjadi pergeseran penting yakni dengan berkembangnya antropologi sosial sepanjang akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, di mana problem-problem pemaknaan dan interpretasi dalam suatu budaya dipandang sebagai kategori sesuatu yang 'esensial', sedangkan sebelumnya dianggap 'residu'. Di sinilah muncul para antropolog kultural bersamaan dengan antropologi sosial di Eropa Barat seperti; Clifford Geertz dan David Schneider yang memiliki pengaruh penting baik bagi antropolog Eropa maupun Amerika.

Disiplin geografi seperti halnya ilmu sejarah, embrionya merupakan sebuah praktek yang sudah ada sejak zaman Yunani kuno dan Romawi, baru pada abad ke-19 geografi merekonstruksikan dirinya sebagai sebuah disiplin baru, terutama di universitas-universitas Jerman. Walaupun geografi dalam geografi yang menjadi perhatian utama kajiannya sebagaimana dalam ilmu sosial, tetapi ia menolak untuk dikategorisasi. Geografi lebih suka berada di antara ilmu-ilmu alam melalui geografi fisiknya dengan ilmu-ilmu sosial melalui kajian geografi manusia-nya. Walaupun pendiri geografi Paul Vidal de la Blace, akan tetapi barangkali penjelasan geografi yang memadai yang dikemukakan oleh Harstone dalam *Nature of Geography*, maupun Wooldridge dan East dalam *The Spirit and Purpose of Geography*.

Pada penghujung tahun 1950-an pengaruh kepeloporan studi geografi Skandinavia yang berorientasi keruangan telah mendorong munculnya perspektif lain dalam geografi manusia. Disiplin baru tersebut bermaksud mempelajari hukum-hukum

yang mengatur perilaku keruanga secara individual maupun pola-pola keruangan lainnya. Dalam arti jarak diminimalisir untuk mengefektifkan interaksi melalui pertimbangan biaya-biaya mahal karena jarak, misalnya mengorganisasikan tempat pemukiman dan sebagainya. Dengan demikian geografi manusia yang saat itu tampil sebagai "ilmu mengenai jarak". Selanjutnya pada tahun 1960-an dan 1970-an muncul geografi baru yang sarannya adalah mempelajari hukum-hukum keruangan, yang didasarkan pada evaluasi kuantitatif atas hipotesis-hipotesisnya. Dengan demikian baik geografi fisik maupun geografi manusia menggeser analisis pola kartografi ke statistik dan matematika. Perkembangan ini melanda di berbagai universitas khususnya di negara-negara berbahasa Inggris. Sebagai disiplin ilmu yang luas dan dinamis, geografi memiliki akar-akar yang kuat baik dalam ilmu pasti, ilmu sosial, bahkan humaniora. Tidak sedikit di dalamnya terdapat berbagai kelompok yang saling beririsan apakah itu para ahli riset maupun guru, yang kesemuanya bertujuan meningkatkan pemahaman manusia baik mengenai lingkungan, tata ruang maupun tempat diciptakan sebagai lokasi kediaman serta ajang sosialisasi.

Untuk *disiplin psikologi*, nampaknya merupakan kasus yang berbeda. Seperti ilmu-ilmu sosial lainnya, mulanya psikologi memisahkan diri dari filsafat yang kemudian mencoba menyusun diri kembali dalam format ilmiah yang baru dari metode introspeksi ke eksperimental pada zaman Wilhelm Wundt dan William James. Perlu diketahui bahwa pada ilmu psikologi pernah lebih suka jika digolongkan dalam ilmu medis. Dengan demikian legitimasi ilmiahnya lebih tergantung pada ilmu-ilmu alam, sehingga saat itu lebih berkembang dengan psikologi fisiologis, bahkan kimiawi. Di situlah disiplin psikologi di beberapa universitas pernah pindah dari fakultas ilmu-ilmu sosial ke fakultas ilmu-ilmu alam, walaupun psikologi sosial tetap mencoba dalam kubu ilmu sosial. Namun karena psikologi sosial tidak berhasil membentuk suatu otonomi institusional secara penuh, akhirnya terpinggirkan senasib dengan sejarah ekonomi dalam ilmu ekonomi. Mungkin tidak berlebihan jika dalam banyak kasus psikologi diserap oleh sosiologi sebagai suatu sub-disiplin dalam sosiologi, khususnya di Amerika Serikat, walaupun memang ada variasi psikologi yang tidak positivistik terutama psikologi *geisteswissenschaftliche*, psikologi gestalt, maupun psikologi lintas budaya.

Berbeda dengan '*ilmu politik*' lahir belakangan. Walaupun menurut beberapa pengamat secara resmi politik diakui sebagai 'disiplin ilmu' itu sejak berdirinya '*Ecole Libre des Science Politiques*' di Paris tahun 1870, dan di London '*School of Economic and Political Science*' tahun 1895. Namun dalam perkembangannya disiplin ini sangat bercorakan Amerika. Hal ini berawal dari Konstitusi bangsa Amerika mempunyai keyakinan besar bahwa mereka tidak saja dapat merancang suatu konstitusi yang sempurna bagi pemerintahan mereka sendiri, tetapi senantiasa juga dapat memperbaiki cara-cara kerjanya. Seperti pernah dikemukakan oleh Richard Hofstadter, orang Amerika adalah satu-satunya yang sementara percaya bahwa mereka telah membangun suatu masyarakat yang sempurna, namun masih terus berusaha memperbaikinya. Pandangan ini masih bertahan, meskipun dalam bentuk yang agak goyah atau lebih halus. Ilmu politik diakui seperti ini untuk pertama kali di Amerika oleh Thomas Jefferson. Sewaktu mendirikan *Universitas Virginia*, ia menciptakan satu dari delapan jabatan profesor yang paling awal di lembaga itu.

Kelambanan lahirnya ilmu politik tersebut bukan karena *subject matter*-nya tentang negara kontemporer beserta perpolitikannya ataupun karena analisisnya yang kurang menyetujui pendekatan nomotetik, melainkan terutama karena resistensi-resistensi fakultas-fakultas hukum untuk merebut monopoli di arena tersebut. Hal ini dapat dipahami karena gaimanapun fakultas hukum memerlukan curahan perhatian yang diberikan oleh para ilmuwan politik pada kajian filsafat politik ataupun teori politik. Sementara itu filsafat politik masih belum memperoleh justifikasi yang cukup untuk menciptakan disiplin baru. Sekarang ilmu politik sangat bercorakan Amerika, seperti halnya pemerintah Amerika pada dasarnya dikuasai oleh para pengacara. Tidak mengherankan kalau ilmu politik di Amerika selalu berkaitan dengan filsafat di satu pihak dan hukum di pihak lain. Hal ini pula yang telah mengakibatkan diterapkannya azas-azas hukum pada lembaga-lembaga pemerintah. Bangsa Amerika pada dasarnya beranggapan bahwa politik yang tercipta dari hukum adalah bentuk perasaan umum yang dikodifikasikan.

TENTANG PENULIS

Dadang Supardan, lahir di Brebes Jawa Tengah tahun 1957. Ia menyelesaikan Sarjana Pendidikan Sejarah sampai Doktor dalam Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial pada universitas yang sama, yakni Universitas Pendidikan Indonesia (dahulu IKIP Bandung). Sekarang masih aktif sebagai pengajar di Jurusan Pendidikan Sejarah dan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan (UPI). Jabatan terakhir yang dipangkunya adalah sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia 2004-2006.